



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2021



TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
3. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
4. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu;
6. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp	1.699.751.020.194,30			
Belanja	Rp	1.517.599.468.488,39			
Surplus.....	Rp		182.151.551.705,91		
b. Pembiayaan					
- Penerimaan	Rp	220.762.753.122,45			
- Pengeluaran	Rp	20.000.000.000,00			
Surplus.....	Rp		200.762.753.122,45		
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp		382.914.304.828,36		

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp62.874.861.845,66 (enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp	1.636.876.158.348,64	
2. Realisasi	Rp	1.699.751.020.194,30	–
Selisih lebih	Rp	62.874.861.845,66	

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp319.620.122.982,70 (tiga ratus sembilan belas milyar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja	Rp	1.837.219.591.471,09
2. Realisasi	Rp	1.517.599.468.488,39
Selisih kurang	Rp	(319.620.122.982,70)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp382.494.984.828,36 (tiga ratus delapan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit	Rp	(200.343.433.122,45)
2. Realisasi	Rp	182.151.551.705,91
Selisih lebih	Rp	382.494.984.828,36

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp419.320.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan		
pembiayaan	Rp	220.343.433.122,45
2. Realisasi	Rp	220.762.753.122,45
Selisih lebih	Rp	419.320.000,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran		
pembiayaan	Rp	20.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	20.000.000.000,00
Selisih	Rp	-

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp419.320.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	200.343.433.122,45
2. Realisasi	Rp	200.762.753.122,45
Selisih lebih	Rp	419.320.000,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	220.340.133.122,45
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	220.340.133.122,45
c. SiLPA/SiKPA	Rp	382.914.304.828,36
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	382.914.304.828,36

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	4.506.498.945.235,37
b. Jumlah kewajiban	Rp	9.261.204.752,54
c. Jumlah ekuitas	Rp	4.497.237.740.482,83

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp	1.800.489.787.640,79	
2. Beban-LO	Rp	<u>1.440.214.006.171,38</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp		360.275.781.469,41
b. Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus Non			
Operasional	Rp	-	
2. Defisit Non			
Operasional	Rp	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp		-
c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	
2. Beban Luar Biasa	Rp	-	
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp		-
d. Surplus/Defisit - LO			360.275.781.469,41

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo kas 1 Januari 2020	Rp	220.340.133.122,45
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	374.054.585.303,84
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(211.903.033.597,93)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	422.620.000,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	-
f.	Saldo akhir kas BUD dan BLUD	Rp	382.914.304.828,36
g.	Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	Rp	-
h.	Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	Rp	-
i.	Titipan Bank BPD Uji SIM BPD	Rp	4.213,45
j.	Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan toilet Taman Pintar	Rp	48.148.500,00
k.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp	382.962.457.541,81

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	4.234.883.563.121,72
b.	surplus/defisit LO	Rp	285.890.450.021,83
c.	ekuitas mutasi	Rp	(23.536.272.660,72)
d.	ekuitas akhir	Rp	4.497.237.740.482,83

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 6. Lampiran I.6 : rincian realisasi anggaran pendapatan daerah;

- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka pendek;
- s. Lampiran XIX : daftar kewajiban jangka panjang;
- t. Lampiran XX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- u. Lampiran XXI : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020
 (AUDITED)

Halaman 1

(format APBD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	103,84
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	86.255.692.984,99	118,09
1 1 1	Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	59.910.087.013,00	121,18
1 1 2	Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	3.663.875.163,00	118,65
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	30.958.006,98	100,09
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	22.650.772.802,01	116,23
1 2	DANA PERIMBANGAN	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	(21.481.524.080,00)	97,44
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	(4.630.364.301,00)	91,35
1 2 2	Dana Alokasi Umum	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	99,30
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	(12.458.381.779,00)	91,97
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	(1.899.307.059,33)	99,41
1 3 1	Hibah	62.517.650.000,00	59.813.911.135,00	(2.703.738.865,00)	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	101,34
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	100,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	103,84
2	BELANJA DAERAH	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	967.028.159.996,09	739.999.064.237,58	(227.029.095.758,51)	76,52
2 1 1	Belanja Pegawai	640.994.760.065,00	600.497.942.504,00	(40.496.817.561,00)	93,68
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	(11.398.369.592,00)	77,26
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	(7.101.527.600,00)	77,90
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	-	100,00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	(168.032.381.005,51)	30,68
2 2	BELANJA LANGSUNG	870.191.431.475,00	777.600.404.250,81	(92.591.027.224,19)	89,36
2 2 1	Belanja Pegawai	134.032.306.111,00	128.212.237.274,78	(5.820.068.836,22)	95,66
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	(67.325.015.244,90)	87,13
2 2 3	Belanja Modal	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	(19.445.943.143,07)	90,87
	Jumlah Belanja Daerah	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60
	Surplus/(Defisit)	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	382.494.984.828,36	(90,92)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	419.320.000,00	100,19
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	-	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	410.000.000,00	410.000.000,00	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	3.300.000,00	12.620.000,00	9.320.000,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	419.320.000,00	100,19
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	100,00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	100,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	100,00
	Pembiayaan Netto	200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	419.320.000,00	100,21
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	382.914.304.828,36		

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2020 sebesar	Rp. 326.475.196.823,90
2. SISA KAS RSUD tahun 2020 sebesar	Rp. 35.746.744.809,51
3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2020 sebesar	Rp. 1.087.890.837,44
4. BLUD Puskesmas tahun 2020 sebesar	Rp. 4.313.105.563,43
5. BLUD RS Pratama tahun 2020 sebesar	Rp. 7.379.376.649,75
6. UPT Pusat Bisnis tahun 2020 sebesar	Rp. 2.383.386.238,97
7. UPT Logam tahun 2020 sebesar	Rp. 93.958.368,20
8. SISA KAS DANA BOS tahun 2020 sebesar	Rp. 5.434.645.537,16
	<u>Rp. 382.914.304.828,36</u>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 DAN 2019
(AUDITED)

Halaman 1
(format SAP)

Uraian	Reff	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	%	Realisasi 2019 Rp
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18	451.265.948.031,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65	32.428.343.731,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	5.1.1.1.c	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09	28.975.003.950,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23	176.380.429.797,26
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09	689.049.725.509,27
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana	5.1.1.2.a				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	92,81	27.070.845.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	63,90	1.904.476.800,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30	700.372.564.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97	145.960.291.302,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44	875.308.177.702,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1)	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91	65.318.639.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3)	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91	65.318.639.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	101,34	133.393.876.281,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2)	-	-	-	1.236.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3)	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	98,53	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		173.740.245.587,75	174.544.677.393,42	100,46	134.629.876.281,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.126.772.729.936,75	1.105.993.726.262,42	98,16	1.075.256.692.983,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16	1.454.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.c	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16	1.454.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	103,84	1.765.760.418.492,27
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02	760.532.062.428,28
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13	553.387.490.228,89
Belanja Bunga	5.1.2.1.c	-	-	-	-
Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26	79.389.047.945,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90	11.551.423.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,43	1.404.860.023.602,17
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.a	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85	25.569.058.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,16	96.719.552.169,17
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,46	54.312.514.794,87
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,46	101.225.143.404,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98,09	828.300.673,00
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82,66	48.779.803.117,30
Jumlah Belanja Modal		212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87	327.434.372.199,17

Uraian	Reff	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	%	Realisasi 2019 Rp
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga		242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	317.693.064,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	317.693.064,00
TRANSFER	5.1.2.4				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	5.1.2.4.1				
Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.a	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1.b	-	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.4.1.c	-	-	-	-
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	5.1.2.4.2.a	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00	1.228.210.990,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2.b	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	777.359.018,00	777.359.018,00	100,00	753.036.006,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	1.981.246.996,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60	1.734.593.335.861,34
SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	(90,92)	31.167.082.630,93
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.a	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	100,00	226.442.324.759,52
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.b	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	5.1.3.1.c	-	410.000.000,00	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5.1.3.1.d	-	-	-	5.725.732,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.3.1.e	3.300.000,00	12.620.000,00	382,42	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	100,19	226.448.050.491,52
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	37.275.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	5.1.3.2.c	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.d	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	37.275.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	100,21	189.173.050.491,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.3.3	-	382.914.304.828,36		220.340.133.122,45

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	115.346.913.352,00	134.020.254.030,20	18.673.340.678,20	116,19	320.733.614.631,00	-	-	-	-	320.733.614.631,00
01 01	PENDIDIKAN	-	-	-		221.320.170.631,00	-	-	-	-	221.320.170.631,00
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	-	-		221.320.170.631,00	-	-	-	-	221.320.170.631,00
01 02	KESEHATAN	114.437.985.326,00	132.879.938.830,20	18.441.953.504,20	116,12	75.928.092.000,00	-	-	-	-	75.928.092.000,00
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	39.141.910.518,00	41.211.502.113,95	2.069.591.595,95	105,29	45.889.838.000,00	-	-	-	-	45.889.838.000,00
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	121,74	30.038.254.000,00	-	-	-	-	30.038.254.000,00
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	898.078.026,00	1.134.065.200,00	235.987.174,00	126,28	7.187.162.000,00	-	-	-	-	7.187.162.000,00
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	898.078.026,00	1.134.065.200,00	235.987.174,00	126,28	7.187.162.000,00	-	-	-	-	7.187.162.000,00
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-		-	-	-	-	-	-
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-		-	-	-	-	-	-
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-		-	-	-	-	-	-
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	57,60	12.717.911.000,00	-	-	-	-	12.717.911.000,00
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-		8.103.934.000,00	-	-	-	-	8.103.934.000,00
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	57,60	3.669.178.000,00	-	-	-	-	3.669.178.000,00
01 05 01 05 03	BPBD	-	-	-		944.799.000,00	-	-	-	-	944.799.000,00
01 06	SOSIAL	-	-	-		3.580.279.000,00	-	-	-	-	3.580.279.000,00
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	-	-		3.580.279.000,00	-	-	-	-	3.580.279.000,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	1.487.925.000,00	-	-	-	-	1.487.925.000,00
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	1.487.925.000,00	-	-	-	-	1.487.925.000,00
02 09	PERHUBUNGAN	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	1.410.618.200,00	132,22	4.620.524.000,00	-	-	-	-	4.620.524.000,00
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	1.410.618.200,00	132,22	4.620.524.000,00	-	-	-	-	4.620.524.000,00
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	3.535.235.000,00	-	-	-	-	3.535.235.000,00
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	3.535.235.000,00	-	-	-	-	3.535.235.000,00
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	219.170.114,00	286.536.472,59	67.366.358,59	130,74	3.248.802.790,00	-	-	-	-	3.248.802.790,00
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	219.170.114,00	286.536.472,59	67.366.358,59	130,74	3.248.802.790,00	-	-	-	-	3.248.802.790,00
02 12	PENANAMAN MODAL	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	186,02	3.218.162.000,00	-	-	-	-	3.218.162.000,00
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	186,02	3.218.162.000,00	-	-	-	-	3.218.162.000,00
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	1.528.782.000,00	-	-	-	-	1.528.782.000,00
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	1.528.782.000,00	-	-	-	-	1.528.782.000,00
02 14	STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 15	PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 16	KEBUDAYAAN	-	-	-	-	1.521.628.000,00	-	-	-	-	1.521.628.000,00
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	1.521.628.000,00	-	-	-	-	1.521.628.000,00
02 17	PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 18	KEARSIPAN	-	-	-	-	3.549.323.000,00	-	-	-	-	3.549.323.000,00
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	3.549.323.000,00	-	-	-	-	3.549.323.000,00
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	-	-	-	713.156.000,00	-	-	-	-	713.156.000,00
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	713.156.000,00	-	-	-	-	713.156.000,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
03	URUSAN PILIHAN	22.207.567.788,00	21.813.406.348,10	(394.161.439,90)	98,23	13.452.994.669,00	-	-	-	-	13.452.994.669,00
03 01	PERTANIAN	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	108,12	4.050.344.635,00	-	-	-	-	4.050.344.635,00
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	108,12	4.050.344.635,00	-	-	-	-	4.050.344.635,00
03 02	PARIWISATA	7.364.810.633,00	5.407.690.814,00	(1.957.119.819,00)	73,43	2.418.024.949,00	-	-	-	-	2.418.024.949,00
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	7.364.810.633,00	5.407.690.814,00	(1.957.119.819,00)	73,43	2.418.024.949,00	-	-	-	-	2.418.024.949,00
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 04	PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 05	PERINDUSTRIAN	14.603.044.455,00	16.146.543.634,10	1.543.499.179,10	110,57	6.984.625.085,00	-	-	-	-	6.984.625.085,00
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.603.044.455,00	16.146.543.634,10	1.543.499.179,10	110,57	6.984.625.085,00	-	-	-	-	6.984.625.085,00
03 06	TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.490.927.666.994,64	1.532.971.314.738,41	42.043.647.743,77	102,82	232.272.201.000,00	50.123.433.400,00	32.131.465.000,00	1.360.789.078,00	242.417.712.453,09	558.305.600.931,09
04 01	PERENCANAAN	-	-	-	-	3.184.213.000,00	-	-	-	-	3.184.213.000,00
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	3.184.213.000,00	-	-	-	-	3.184.213.000,00
04 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	11.294.116.000,00	-	-	-	-	11.294.116.000,00
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	972.613.000,00	-	-	-	-	972.613.000,00
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	-	-	-	976.208.000,00	-	-	-	-	976.208.000,00
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	-	-	-	3.253.771.000,00	-	-	-	-	3.253.771.000,00
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	-	-	-	1.120.344.000,00	-	-	-	-	1.120.344.000,00
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	-	-	-	1.220.205.000,00	-	-	-	-	1.220.205.000,00
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	-	721.223.000,00	-	-	-	-	721.223.000,00
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1.346.894.000,00	-	-	-	-	1.346.894.000,00
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	-	-	-	1.682.858.000,00	-	-	-	-	1.682.858.000,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA					
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Anggaran Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan (Rp)					
						Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	23.437.850.400,00	-	-	-	-	23.437.850.400,00
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	23.437.850.400,00	-	-	-	-	23.437.850.400,00
04 05	INSPEKTORAT	-	-	-	-	4.172.025.000,00	-	-	-	-	4.172.025.000,00
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	4.172.025.000,00	-	-	-	-	4.172.025.000,00
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	167.810.830.600,00	-	-	-	-	167.810.830.600,00
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	167.810.830.600,00	-	-	-	-	167.810.830.600,00
04 07	KEUANGAN	1.490.927.666.994,64	1.532.971.314.738,41	42.043.647.743,77	102,82	22.373.166.000,00	50.123.433.400,00	32.131.465.000,00	1.360.789.078,00	242.417.712.453,09	348.406.565.931,09
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	330.970.187.057,89	396.394.665.940,99	65.424.478.883,10	119,77	22.373.166.000,00	-	-	-	-	22.373.166.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	1.159.957.479.936,75	1.136.576.648.797,42	(23.380.831.139,33)	97,98	-	50.123.433.400,00	32.131.465.000,00	1.360.789.078,00	242.417.712.453,09	326.033.399.931,09
05	URUSAN KEISTIMEWAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01	URUSAN KEISTIMEWAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 03 02 01	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 04 03 01	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 01 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	103,84	640.994.760.065,00	50.123.433.400,00	32.131.465.000,00	1.360.789.078,00	242.417.712.453,09	967.028.159.996,09

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	114.300.951.984,00	317.386.305.271,00	123.508.432.761,00	555.195.690.016,00	875.929.304.647,00	309.379.845.757,00	-	-	-
01 01	PENDIDIKAN	41.736.222.121,00	68.924.652.221,00	21.905.806.482,00	132.566.680.824,00	353.886.851.455,00	217.436.011.580,00	-	-	-
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	41.736.222.121,00	68.924.652.221,00	21.905.806.482,00	132.566.680.824,00	353.886.851.455,00	217.436.011.580,00	-	-	-
01 02	KESEHATAN	69.811.641.863,00	188.609.617.977,00	41.100.404.573,00	299.521.664.413,00	375.449.756.413,00	69.403.040.049,00	-	-	-
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	24.143.174.063,00	121.409.830.534,00	12.071.455.573,00	157.624.460.170,00	203.514.298.170,00	44.499.251.161,00	-	-	-
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	45.668.467.800,00	67.199.787.443,00	29.028.949.000,00	141.897.204.243,00	171.935.458.243,00	24.903.788.888,00	-	-	-
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.000.000,00	23.267.433.609,00	51.670.473.518,00	74.948.907.127,00	82.136.069.127,00	6.978.654.573,00	-	-	-
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.750.000,00	22.925.681.967,00	51.512.559.118,00	74.443.991.085,00	81.631.153.085,00	6.978.654.573,00	-	-	-
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.250.000,00	341.751.642,00	157.914.400,00	504.916.042,00	504.916.042,00	-	-	-	-
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	131.450.000,00	10.386.550.466,00	7.976.909.088,00	18.494.909.554,00	18.494.909.554,00	-	-	-	-
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	131.450.000,00	10.386.550.466,00	7.976.909.088,00	18.494.909.554,00	18.494.909.554,00	-	-	-	-
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.595.985.000,00	20.082.116.491,00	501.758.000,00	22.179.859.491,00	34.897.770.491,00	12.165.829.624,00	-	-	-
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	1.595.985.000,00	14.321.432.859,00	276.878.000,00	16.194.295.859,00	24.298.229.859,00	7.823.852.740,00	-	-	-
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	-	2.979.124.773,00	-	2.979.124.773,00	6.648.302.773,00	3.540.214.269,00	-	-	-
01 05 01 05 03	BPBD	-	2.781.558.859,00	224.880.000,00	3.006.438.859,00	3.951.237.859,00	801.762.615,00	-	-	-
01 06	SOSIAL	1.014.653.000,00	6.115.934.507,00	353.081.100,00	7.483.668.607,00	11.063.947.607,00	3.396.309.931,00	-	-	-
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	1.014.653.000,00	6.115.934.507,00	353.081.100,00	7.483.668.607,00	11.063.947.607,00	3.396.309.931,00	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	12.946.090.615,00	97.381.265.345,00	36.006.910.217,00	146.334.266.177,00	220.870.215.942,00	69.606.759.726,00	-	-	-
02 01	TENAGA KERJA	221.775.000,00	1.530.808.000,00	-	1.752.583.000,00	1.752.583.000,00	-	-	-	-
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	221.775.000,00	1.530.808.000,00	-	1.752.583.000,00	1.752.583.000,00	-	-	-	-
02 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	137.950.000,00	2.398.134.826,00	405.556.928,00	2.941.641.754,00	4.883.574.754,00	1.652.737.015,00	-	-	-
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	137.950.000,00	2.398.134.826,00	405.556.928,00	2.941.641.754,00	4.883.574.754,00	1.652.737.015,00	-	-	-
02 03	PANGAN	-	540.199.936,00	42.423.120,00	582.623.056,00	582.623.056,00	-	-	-	-
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	540.199.936,00	42.423.120,00	582.623.056,00	582.623.056,00	-	-	-	-
02 04	PERTANAHAN	65.450.000,00	598.067.868,00	21.632.329.000,00	22.295.846.868,00	24.518.575.868,00	2.103.902.967,00	-	-	-
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	65.450.000,00	598.067.868,00	21.632.329.000,00	22.295.846.868,00	24.518.575.868,00	2.103.902.967,00	-	-	-
02 05	LINGKUNGAN HIDUP	951.200.000,00	27.329.511.305,00	983.961.420,00	29.264.672.725,00	42.778.234.700,00	12.996.155.293,00	-	-	-
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	951.200.000,00	27.329.511.305,00	983.961.420,00	29.264.672.725,00	42.778.234.700,00	12.996.155.293,00	-	-	-
02 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.705.000,00	2.490.756.500,00	48.425.000,00	2.616.886.500,00	5.101.826.500,00	2.350.133.561,00	-	-	-
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.705.000,00	2.490.756.500,00	48.425.000,00	2.616.886.500,00	5.101.826.500,00	2.350.133.561,00	-	-	-
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.082.530.115,00	26.027.091.374,00	9.201.819.539,00	45.311.441.028,00	76.260.689.028,00	28.949.795.360,00	-	-	-
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	719.975.000,00	1.856.078.344,00	772.569.000,00	3.348.622.344,00	5.941.520.344,00	2.524.649.913,00	-	-	-
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	653.450.000,00	1.461.031.889,00	1.597.119.860,00	3.711.601.749,00	5.929.992.749,00	2.069.245.689,00	-	-	-
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	1.063.675.000,00	2.809.304.368,00	585.821.135,00	4.458.800.503,00	7.470.422.503,00	2.881.217.388,00	-	-	-
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	556.050.000,00	1.313.877.484,00	506.703.500,00	2.376.630.984,00	4.573.298.984,00	2.111.079.999,00	-	-	-
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	546.045.000,00	1.569.157.363,00	406.026.200,00	2.521.228.563,00	4.186.608.563,00	1.496.529.001,00	-	-	-
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	494.800.000,00	1.382.058.800,00	146.851.000,00	2.023.709.800,00	3.587.460.800,00	1.486.173.320,00	-	-	-
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	474.100.000,00	1.048.466.608,00	627.330.300,00	2.149.896.908,00	3.756.916.908,00	1.531.850.420,00	-	-	-
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	573.750.000,00	1.808.495.891,00	730.257.000,00	3.112.502.891,00	5.228.916.891,00	1.985.245.226,00	-	-	-
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantriweron	759.800.000,00	2.011.237.254,00	685.348.000,00	3.456.385.254,00	5.639.892.254,00	2.028.374.147,00	-	-	-
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	635.025.115,00	1.445.688.367,00	514.430.100,00	2.595.143.582,00	4.440.286.582,00	1.758.352.712,00	-	-	-
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	478.850.000,00	1.689.558.000,00	36.905.000,00	2.205.313.000,00	3.732.724.000,00	1.457.378.304,00	-	-	-
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	744.100.000,00	1.931.812.950,00	645.859.869,00	3.321.772.819,00	5.630.838.819,00	2.144.404.563,00	-	-	-
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	1.411.510.000,00	3.445.095.577,00	1.267.626.575,00	6.124.232.152,00	10.134.720.152,00	3.523.119.840,00	-	-	-
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	732.250.000,00	1.712.236.468,00	678.972.000,00	3.123.458.468,00	5.224.947.468,00	1.952.174.838,00	-	-	-
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	239.150.000,00	542.992.011,00	-	782.142.011,00	782.142.011,00	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	418.780.500,00	3.210.333.260,00	425.980.000,00	4.055.093.760,00	5.543.018.760,00	1.324.393.834,00	-	-	-
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	418.780.500,00	3.210.333.260,00	425.980.000,00	4.055.093.760,00	5.543.018.760,00	1.324.393.834,00	-	-	-
02 09	PERHUBUNGAN	109.200.000,00	9.560.878.063,00	1.144.088.210,00	10.814.166.273,00	15.434.690.273,00	4.206.928.002,00	-	-	-
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	109.200.000,00	9.560.878.063,00	1.144.088.210,00	10.814.166.273,00	15.434.690.273,00	4.206.928.002,00	-	-	-
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.850.000,00	10.193.781.550,00	964.215.000,00	11.174.846.550,00	14.710.081.550,00	3.297.562.428,00	-	-	-
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	16.850.000,00	10.193.781.550,00	964.215.000,00	11.174.846.550,00	14.710.081.550,00	3.297.562.428,00	-	-	-
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	67.250.000,00	2.115.190.750,00	23.950.000,00	2.206.390.750,00	5.455.193.540,00	3.076.688.113,00	-	-	-
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.250.000,00	2.115.190.750,00	23.950.000,00	2.206.390.750,00	5.455.193.540,00	3.076.688.113,00	-	-	-
02 12	PENANAMAN MODAL	-	2.503.498.000,00	194.866.000,00	2.698.364.000,00	5.916.526.000,00	2.978.015.928,00	-	-	-
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	-	2.503.498.000,00	194.866.000,00	2.698.364.000,00	5.916.526.000,00	2.978.015.928,00	-	-	-
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	22.000.000,00	2.411.223.992,00	-	2.433.223.992,00	3.962.005.992,00	1.293.644.244,00	-	-	-
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.000.000,00	2.411.223.992,00	-	2.433.223.992,00	3.962.005.992,00	1.293.644.244,00	-	-	-
02 14	STATISTIK	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	43.178.000,00	-	-	-	-
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	43.178.000,00	-	-	-	-
02 15	PERSANDIAN	1.100.000,00	994.189.000,00	423.775.000,00	1.419.064.000,00	1.419.064.000,00	-	-	-	-
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.100.000,00	994.189.000,00	423.775.000,00	1.419.064.000,00	1.419.064.000,00	-	-	-	-
02 16	KEBUDAYAAN	-	617.217.347,00	88.000.000,00	705.217.347,00	2.226.845.347,00	1.363.962.310,00	-	-	-
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	617.217.347,00	88.000.000,00	705.217.347,00	2.226.845.347,00	1.363.962.310,00	-	-	-
02 17	PERPUSTAKAAN	-	1.876.670.601,00	294.233.000,00	2.170.903.601,00	2.170.903.601,00	-	-	-	-
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1.876.670.601,00	294.233.000,00	2.170.903.601,00	2.170.903.601,00	-	-	-	-
02 18	KEARSIPAN	5.700.000,00	2.253.689.991,00	72.300.000,00	2.331.689.991,00	5.881.012.991,00	3.380.758.644,00	-	-	-
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.700.000,00	2.253.689.991,00	72.300.000,00	2.331.689.991,00	5.881.012.991,00	3.380.758.644,00	-	-	-
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	759.600.000,00	695.844.982,00	60.988.000,00	1.516.432.982,00	2.229.588.982,00	632.082.027,00	-	-	-
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	759.600.000,00	695.844.982,00	60.988.000,00	1.516.432.982,00	2.229.588.982,00	632.082.027,00	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
03	URUSAN PILIHAN	4.368.743.512,00	39.868.946.856,00	10.377.421.804,00	54.615.112.172,00	68.068.106.841,00	12.841.228.198,00	-	-	-
03 01	PERTANIAN	1.485.000,00	2.579.558.916,00	196.990.000,00	2.778.033.916,00	6.828.378.551,00	3.886.024.608,00	-	-	-
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	1.485.000,00	2.579.558.916,00	196.990.000,00	2.778.033.916,00	6.828.378.551,00	3.886.024.608,00	-	-	-
03 02	PARIWISATA	3.670.200.600,00	11.541.477.627,00	7.765.265.658,00	22.976.943.885,00	25.394.968.834,00	2.252.359.166,00	-	-	-
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	3.670.200.600,00	11.541.477.627,00	7.765.265.658,00	22.976.943.885,00	25.394.968.834,00	2.252.359.166,00	-	-	-
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	931.201.616,00	-	931.201.616,00	931.201.616,00	-	-	-	-
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	931.201.616,00	-	931.201.616,00	931.201.616,00	-	-	-	-
03 04	PERDAGANGAN	697.057.912,00	16.982.770.447,00	2.347.865.146,00	20.027.693.505,00	20.027.693.505,00	-	-	-	-
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	697.057.912,00	16.982.770.447,00	2.347.865.146,00	20.027.693.505,00	20.027.693.505,00	-	-	-	-
03 05	PERINDUSTRIAN	-	7.806.065.250,00	67.301.000,00	7.873.366.250,00	14.857.991.335,00	6.702.844.424,00	-	-	-
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	7.806.065.250,00	67.301.000,00	7.873.366.250,00	14.857.991.335,00	6.702.844.424,00	-	-	-
03 06	TRANSMIGRASI	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	27.873.000,00	-	-	-	-
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	27.873.000,00	-	-	-	-
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.928.990.000,00	53.125.786.876,00	5.279.225.450,00	60.334.002.326,00	618.639.603.257,09	208.670.108.823,00	38.725.063.808,00	25.029.937.400,00	1.360.789.078,00
04 01	PERENCANAAN	68.100.000,00	2.106.566.783,00	578.851.000,00	2.753.517.783,00	5.937.730.783,00	3.010.793.654,00	-	-	-
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.100.000,00	2.106.566.783,00	578.851.000,00	2.753.517.783,00	5.937.730.783,00	3.010.793.654,00	-	-	-
04 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	95.750.000,00	156.563.620,00	579.700.000,00	832.013.620,00	832.013.620,00	-	-	-	-
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.750.000,00	156.563.620,00	579.700.000,00	832.013.620,00	832.013.620,00	-	-	-	-
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	503.300.000,00	9.249.815.633,00	1.370.639.750,00	11.123.755.383,00	22.417.871.383,00	10.128.323.175,00	-	-	-
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.700.000,00	845.431.550,00	1.500.000,00	867.631.550,00	1.840.244.550,00	853.832.542,00	-	-	-
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	227.825.000,00	1.136.449.273,00	-	1.364.274.273,00	2.340.482.273,00	831.135.006,00	-	-	-
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	2.661.634.567,00	94.224.000,00	2.755.858.567,00	6.009.629.567,00	3.022.068.736,00	-	-	-
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	2.524.942.599,00	576.470.750,00	3.101.413.349,00	4.221.757.349,00	1.007.966.600,00	-	-	-
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	658.155.886,00	275.010.000,00	933.165.886,00	2.153.370.886,00	1.037.000.581,00	-	-	-
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	311.999.728,00	142.450.000,00	454.449.728,00	1.175.672.728,00	601.403.496,00	-	-	-
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	238.000.000,00	487.290.920,00	31.485.000,00	756.775.920,00	2.103.669.920,00	1.262.846.671,00	-	-	-
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	16.775.000,00	623.911.110,00	249.500.000,00	890.186.110,00	2.573.044.110,00	1.512.069.543,00	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan (Rp)				Jumlah Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Rp)		Belanja Pegawai	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
1	2	13	14	15	16 = 13+14+15	17 = 12+16	18	19	20	21
04 04	SEKRETARIAT DPRD	3.000.000,00	28.776.008.038,00	1.277.615.000,00	30.056.623.038,00	53.494.473.438,00	22.053.505.713,00	-	-	-
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	3.000.000,00	28.776.008.038,00	1.277.615.000,00	30.056.623.038,00	53.494.473.438,00	22.053.505.713,00	-	-	-
04 05	INSPEKTORAT	147.800.000,00	651.101.436,00	148.000,00	799.049.436,00	4.971.074.436,00	3.949.900.292,00	-	-	-
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	147.800.000,00	651.101.436,00	148.000,00	799.049.436,00	4.971.074.436,00	3.949.900.292,00	-	-	-
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	520.340.000,00	3.068.432.406,00	1.412.506.000,00	5.001.278.406,00	172.812.109.006,00	148.627.265.284,00	-	-	-
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	520.340.000,00	3.068.432.406,00	1.412.506.000,00	5.001.278.406,00	172.812.109.006,00	148.627.265.284,00	-	-	-
04 07	KEUANGAN	590.700.000,00	9.117.298.960,00	59.765.700,00	9.767.764.660,00	358.174.330.591,09	20.900.320.705,00	38.725.063.808,00	25.029.937.400,00	1.360.789.078,00
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	590.700.000,00	9.117.298.960,00	59.765.700,00	9.767.764.660,00	32.140.930.660,00	20.900.320.705,00	-	-	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	-	-	-	-	326.033.399.931,09	-	38.725.063.808,00	25.029.937.400,00	1.360.789.078,00
05	URUSAN KEISTIMEWAAN	487.530.000,00	15.427.232.449,00	37.797.598.335,00	53.712.360.784,00	53.712.360.784,00	-	-	-	-
05 01	URUSAN KEISTIMEWAAN	487.530.000,00	15.427.232.449,00	37.797.598.335,00	53.712.360.784,00	53.712.360.784,00	-	-	-	-
05 01 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	34.251.759.500,00	34.251.759.500,00	34.251.759.500,00	-	-	-	-
05 01 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	246.100.000,00	783.416.000,00	210.034.000,00	1.239.550.000,00	1.239.550.000,00	-	-	-	-
05 01 02 16 01	Dinas Kebudayaan	101.580.000,00	5.711.832.430,00	622.825.920,00	6.436.238.350,00	6.436.238.350,00	-	-	-	-
05 01 03 02 01	Dinas Pariwisata	-	7.296.905.519,00	145.000.000,00	7.441.905.519,00	7.441.905.519,00	-	-	-	-
05 01 04 03 01	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	119.300.000,00	54.996.500,00	-	174.296.500,00	174.296.500,00	-	-	-	-
05 01 02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	18.450.000,00	331.550.000,00	-	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-
05 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	323.964.000,00	315.600.000,00	639.564.000,00	639.564.000,00	-	-	-	-
05 01 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.100.000,00	924.568.000,00	2.252.378.915,00	3.179.046.915,00	3.179.046.915,00	-	-	-	-
	JUMLAH :	134.032.306.111,00	523.189.536.797,00	212.969.588.567,00	870.191.431.475,00	1.837.219.591.471,09	600.497.942.504,00	38.725.063.808,00	25.029.937.400,00	1.360.789.078,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	309.379.845.757,00	109.424.751.237,00	269.965.585.252,94	111.735.452.998,63	491.125.789.488,57	800.505.635.245,57	(75.423.669.401,43)	91,39
01 01	PENDIDIKAN	-	217.436.011.580,00	39.506.481.121,00	58.635.293.550,00	20.708.602.725,00	118.850.377.396,00	336.286.388.976,00	(17.600.462.479,00)	95,03
01 01 01 01 01	Dinas Pendidikan	-	217.436.011.580,00	39.506.481.121,00	58.635.293.550,00	20.708.602.725,00	118.850.377.396,00	336.286.388.976,00	(17.600.462.479,00)	95,03
01 02	KESEHATAN	-	69.403.040.049,00	67.310.927.116,00	153.592.157.867,73	34.437.581.357,00	255.340.666.340,73	324.743.706.389,73	(50.706.050.023,27)	86,49
01 02 01 02 01	Dinas Kesehatan	-	44.499.251.161,00	21.196.162.434,00	107.574.310.618,99	7.684.488.144,00	136.454.961.196,99	180.954.212.357,99	(22.560.085.812,01)	88,91
01 02 01 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)	-	24.903.788.888,00	46.114.764.682,00	46.017.847.248,74	26.753.093.213,00	118.885.705.143,74	143.789.494.031,74	(28.145.964.211,26)	83,63
01 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	6.978.654.573,00	11.000.000,00	22.624.937.504,06	47.881.886.077,63	70.517.823.581,69	77.496.478.154,69	(4.639.590.972,31)	94,35
01 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	6.978.654.573,00	5.750.000,00	22.286.133.462,06	47.724.377.132,63	70.016.260.594,69	76.994.915.167,69	(4.636.237.917,31)	94,32
01 03 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	5.250.000,00	338.804.042,00	157.508.945,00	501.562.987,00	501.562.987,00	(3.353.055,00)	99,34
01 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	87.550.000,00	10.045.319.714,28	7.860.792.720,00	17.993.662.434,28	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
01 04 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	87.550.000,00	10.045.319.714,28	7.860.792.720,00	17.993.662.434,28	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
01 05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	12.165.829.624,00	1.561.200.000,00	19.166.505.396,90	495.035.969,00	21.222.741.365,90	33.388.570.989,90	(1.509.199.501,10)	95,68
01 05 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	7.823.852.740,00	1.561.200.000,00	14.141.326.576,80	273.146.585,00	15.975.673.161,80	23.799.525.901,80	(498.703.957,20)	97,95
01 05 01 05 02	Dinas Kebakaran	-	3.540.214.269,00	-	2.427.004.906,50	-	2.427.004.906,50	5.967.219.175,50	(681.083.597,50)	89,76
01 05 01 05 03	BPBD	-	801.762.615,00	-	2.598.173.913,60	221.889.384,00	2.820.063.297,60	3.621.825.912,60	(329.411.946,40)	91,66
01 06	SOSIAL	-	3.396.309.931,00	947.593.000,00	5.901.371.219,97	351.554.150,00	7.200.518.369,97	10.596.828.300,97	(467.119.306,03)	95,78
01 06 01 06 01	Dinas Sosial	-	3.396.309.931,00	947.593.000,00	5.901.371.219,97	351.554.150,00	7.200.518.369,97	10.596.828.300,97	(467.119.306,03)	95,78

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	69.606.759.726,00	12.638.859.770,00	93.541.442.095,16	32.039.046.313,87	138.219.348.179,03	207.826.107.905,03	(13.044.108.036,97)	94,09
02 01	TENAGA KERJA	-	-	220.975.000,00	1.507.383.974,40	-	1.728.358.974,40	1.728.358.974,40	(24.224.025,60)	98,62
02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	220.975.000,00	1.507.383.974,40	-	1.728.358.974,40	1.728.358.974,40	(24.224.025,60)	98,62
02 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	1.652.737.015,00	137.050.000,00	2.366.126.287,91	400.315.650,00	2.903.491.937,91	4.556.228.952,91	(327.345.801,09)	93,30
02 02 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.652.737.015,00	137.050.000,00	2.366.126.287,91	400.315.650,00	2.903.491.937,91	4.556.228.952,91	(327.345.801,09)	93,30
02 03	PANGAN	-	-	-	536.152.860,00	42.075.000,00	578.227.860,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
02 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	536.152.860,00	42.075.000,00	578.227.860,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
02 04	PERTANAHAN	-	2.103.902.967,00	65.450.000,00	577.116.811,00	17.923.611.620,00	18.566.178.431,00	20.670.081.398,00	(3.848.494.470,00)	84,30
02 04 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	2.103.902.967,00	65.450.000,00	577.116.811,00	17.923.611.620,00	18.566.178.431,00	20.670.081.398,00	(3.848.494.470,00)	84,30
02 05	LINGKUNGAN HIDUP	-	12.996.155.293,00	739.550.000,00	26.392.045.994,49	979.067.761,00	28.110.663.755,49	41.106.819.048,49	(1.671.415.651,51)	96,09
02 05 02 05 01	Dinas Lingkungan Hidup	-	12.996.155.293,00	739.550.000,00	26.392.045.994,49	979.067.761,00	28.110.663.755,49	41.106.819.048,49	(1.671.415.651,51)	96,09
02 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.350.133.561,00	74.850.000,00	2.461.317.056,00	48.365.000,00	2.584.532.056,00	4.934.665.617,00	(167.160.883,00)	96,72
02 06 02 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.350.133.561,00	74.850.000,00	2.461.317.056,00	48.365.000,00	2.584.532.056,00	4.934.665.617,00	(167.160.883,00)	96,72
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	28.949.795.360,00	10.011.545.000,00	25.556.242.405,54	9.032.560.133,20	44.600.347.538,74	73.550.142.898,74	(2.710.546.129,26)	96,45
02 07 02 07 01	Kecamatan Tegalrejo	-	2.524.649.913,00	708.250.000,00	1.824.776.908,00	758.795.000,00	3.291.821.908,00	5.816.471.821,00	(125.048.523,00)	97,90
02 07 02 07 02	Kecamatan Jetis	-	2.069.245.689,00	644.050.000,00	1.423.224.335,00	1.595.788.860,00	3.663.063.195,00	5.732.308.884,00	(197.683.865,00)	96,67
02 07 02 07 03	Kecamatan Gondokusuman	-	2.881.217.388,00	1.063.075.000,00	2.764.690.364,58	578.889.194,97	4.406.654.559,55	7.287.871.947,55	(182.550.555,45)	97,56
02 07 02 07 04	Kecamatan Danurejan	-	2.111.079.999,00	550.650.000,00	1.277.589.579,29	499.641.118,91	2.327.880.698,20	4.438.960.697,20	(134.338.286,80)	97,06
02 07 02 07 05	Kecamatan Gedongtengen	-	1.496.529.001,00	539.935.000,00	1.547.564.691,00	402.542.000,00	2.490.041.691,00	3.986.570.692,00	(200.037.871,00)	95,22
02 07 02 07 06	Kecamatan Pakualaman	-	1.486.173.320,00	493.800.000,00	1.369.814.860,00	146.273.900,00	2.009.888.760,00	3.496.062.080,00	(91.398.720,00)	97,45
02 07 02 07 07	Kecamatan Ngampilan	-	1.531.850.420,00	474.100.000,00	1.013.933.752,02	623.114.699,97	2.111.148.451,99	3.642.998.871,99	(113.918.036,01)	96,97
02 07 02 07 08	Kecamatan Wirobrajan	-	1.985.245.226,00	572.700.000,00	1.779.883.752,00	722.798.499,24	3.075.382.251,24	5.060.627.477,24	(168.289.413,76)	96,78
02 07 02 07 09	Kecamatan Mantriheron	-	2.028.374.147,00	754.750.000,00	1.981.831.135,00	677.482.800,00	3.414.063.935,00	5.442.438.082,00	(197.454.172,00)	96,50
02 07 02 07 10	Kecamatan Kraton	-	1.758.352.712,00	632.775.000,00	1.415.305.096,00	510.408.000,00	2.558.488.096,00	4.316.840.808,00	(123.445.774,00)	97,22
02 07 02 07 11	Kecamatan Gondomanan	-	1.457.378.304,00	476.225.000,00	1.646.799.253,00	35.494.800,00	2.158.519.053,00	3.615.897.357,00	(116.826.643,00)	96,87
02 07 02 07 12	Kecamatan Mergangsan	-	2.144.404.563,00	732.750.000,00	1.874.791.026,00	640.766.816,40	3.248.307.842,40	5.392.712.405,40	(238.126.413,60)	95,77
02 07 02 07 13	Kecamatan Umbulharjo	-	3.523.119.840,00	1.403.785.000,00	3.419.081.219,05	1.181.421.645,57	6.004.287.864,62	9.527.407.704,62	(607.312.447,38)	94,01
02 07 02 07 14	Kecamatan Kotagede	-	1.952.174.838,00	726.300.000,00	1.685.387.076,00	659.142.798,14	3.070.829.874,14	5.023.004.712,14	(201.942.755,86)	96,14
02 07 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	238.400.000,00	531.569.358,60	-	769.969.358,60	769.969.358,60	(12.172.652,40)	98,44

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
02 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1.324.393.834,00	412.664.770,00	3.007.111.717,00	408.240.000,00	3.828.016.487,00	5.152.410.321,00	(390.608.439,00)	92,95
02 08 02 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1.324.393.834,00	412.664.770,00	3.007.111.717,00	408.240.000,00	3.828.016.487,00	5.152.410.321,00	(390.608.439,00)	92,95
02 09	PERHUBUNGAN	-	4.206.928.002,00	109.200.000,00	8.224.559.268,00	1.122.051.101,02	9.455.810.369,02	13.662.738.371,02	(1.771.951.901,98)	88,52
02 09 02 09 01	Dinas Perhubungan	-	4.206.928.002,00	109.200.000,00	8.224.559.268,00	1.122.051.101,02	9.455.810.369,02	13.662.738.371,02	(1.771.951.901,98)	88,52
02 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	3.297.562.428,00	16.850.000,00	9.697.033.175,50	929.679.049,15	10.643.562.224,65	13.941.124.652,65	(768.956.897,35)	94,77
02 10 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	3.297.562.428,00	16.850.000,00	9.697.033.175,50	929.679.049,15	10.643.562.224,65	13.941.124.652,65	(768.956.897,35)	94,77
02 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	3.076.688.113,00	60.125.000,00	2.087.734.196,40	23.950.000,00	2.171.809.196,40	5.248.497.309,40	(206.696.230,60)	96,21
02 11 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.076.688.113,00	60.125.000,00	2.087.734.196,40	23.950.000,00	2.171.809.196,40	5.248.497.309,40	(206.696.230,60)	96,21
02 12	PENANAMAN MODAL	-	2.978.015.928,00	-	2.450.611.235,00	193.425.000,00	2.644.036.235,00	5.622.052.163,00	(294.473.837,00)	95,02
02 12 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	-	2.978.015.928,00	-	2.450.611.235,00	193.425.000,00	2.644.036.235,00	5.622.052.163,00	(294.473.837,00)	95,02
02 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	1.293.644.244,00	22.000.000,00	2.342.624.601,00	-	2.364.624.601,00	3.658.268.845,00	(303.737.147,00)	92,33
02 13 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	1.293.644.244,00	22.000.000,00	2.342.624.601,00	-	2.364.624.601,00	3.658.268.845,00	(303.737.147,00)	92,33
02 14	STATISTIK	-	-	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
02 14 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
02 15	PERSANDIAN	-	-	1.100.000,00	991.301.008,00	422.125.642,00	1.414.526.650,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
02 15 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	1.100.000,00	991.301.008,00	422.125.642,00	1.414.526.650,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
02 16	KEBUDAYAAN	-	1.363.962.310,00	-	546.368.338,00	86.125.000,00	632.493.338,00	1.996.455.648,00	(230.389.699,00)	89,65
02 16 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	1.363.962.310,00	-	546.368.338,00	86.125.000,00	632.493.338,00	1.996.455.648,00	(230.389.699,00)	89,65
02 17	PERPUSTAKAAN	-	-	-	1.862.684.469,40	294.188.357,50	2.156.872.826,90	2.156.872.826,90	(14.030.774,10)	99,35
02 17 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	1.862.684.469,40	294.188.357,50	2.156.872.826,90	2.156.872.826,90	(14.030.774,10)	99,35
02 18	KEARSIPAN	-	3.380.758.644,00	5.700.000,00	2.245.358.892,52	72.279.000,00	2.323.337.892,52	5.704.096.536,52	(176.916.454,48)	96,99
02 18 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.380.758.644,00	5.700.000,00	2.245.358.892,52	72.279.000,00	2.323.337.892,52	5.704.096.536,52	(176.916.454,48)	96,99
02 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	632.082.027,00	753.300.000,00	658.502.805,00	60.988.000,00	1.472.790.805,00	2.104.872.832,00	(124.716.150,00)	94,41
02 19 02 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa	-	632.082.027,00	753.300.000,00	658.502.805,00	60.988.000,00	1.472.790.805,00	2.104.872.832,00	(124.716.150,00)	94,41

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
03	URUSAN PILIHAN	-	12.841.228.198,00	3.800.420.267,78	35.286.558.782,90	6.974.307.239,87	46.061.286.290,55	58.902.514.488,55	(9.165.592.352,45)	86,53
03 01	PERTANIAN	-	3.886.024.608,00	1.485.000,00	2.518.509.781,00	196.585.100,00	2.716.579.881,00	6.602.604.489,00	(225.774.062,00)	96,69
03 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	3.886.024.608,00	1.485.000,00	2.518.509.781,00	196.585.100,00	2.716.579.881,00	6.602.604.489,00	(225.774.062,00)	96,69
03 02	PARIWISATA	-	2.252.359.166,00	3.389.511.438,00	8.206.580.675,40	5.887.894.932,87	17.483.987.046,27	19.736.346.212,27	(5.658.622.621,73)	77,72
03 02 03 02 01	Dinas Pariwisata	-	2.252.359.166,00	3.389.511.438,00	8.206.580.675,40	5.887.894.932,87	17.483.987.046,27	19.736.346.212,27	(5.658.622.621,73)	77,72
03 03	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	914.400.700,00	-	914.400.700,00	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
03 03 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	914.400.700,00	-	914.400.700,00	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
03 04	PERDAGANGAN	-	-	409.423.829,78	16.105.039.696,00	824.744.207,00	17.339.207.732,78	17.339.207.732,78	(2.688.485.772,22)	86,58
03 04 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	409.423.829,78	16.105.039.696,00	824.744.207,00	17.339.207.732,78	17.339.207.732,78	(2.688.485.772,22)	86,58
03 05	PERINDUSTRIAN	-	6.702.844.424,00	-	7.514.706.130,50	65.083.000,00	7.579.789.130,50	14.282.633.554,50	(575.357.780,50)	96,13
03 05 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	6.702.844.424,00	-	7.514.706.130,50	65.083.000,00	7.579.789.130,50	14.282.633.554,50	(575.357.780,50)	96,13
03 06	TRANSMIGRASI	-	-	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
03 06 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	74.385.331.447,58	348.171.230.556,58	1.877.171.000,00	41.990.146.986,87	5.218.877.742,00	49.086.195.728,87	397.257.426.285,45	(221.382.176.971,64)	64,21
04 01	PERENCANAAN	-	3.010.793.654,00	65.500.000,00	2.088.876.585,50	573.927.000,00	2.728.303.585,50	5.739.097.239,50	(198.633.543,50)	96,65
04 01 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.010.793.654,00	65.500.000,00	2.088.876.585,50	573.927.000,00	2.728.303.585,50	5.739.097.239,50	(198.633.543,50)	96,65
04 02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	95.225.000,00	155.658.450,00	567.258.600,00	818.142.050,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
04 02 04 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	95.225.000,00	155.658.450,00	567.258.600,00	818.142.050,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
04 03	SEKRETARIAT DAERAH	-	10.128.323.175,00	501.950.000,00	8.681.417.471,31	1.351.368.846,59	10.534.736.317,90	20.663.059.492,90	(1.754.811.890,10)	92,17
04 03 04 03 01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03 04 03 01A	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	853.832.542,00	20.100.000,00	831.351.212,08	1.500.000,00	852.951.212,08	1.706.783.754,08	(133.460.795,92)	92,75
04 03 04 03 01B	Bagian Hukum	-	831.135.006,00	227.075.000,00	1.130.445.859,60	-	1.357.520.859,60	2.188.655.865,60	(151.826.407,40)	93,51
04 03 04 03 01C	Bagian Protokol	-	3.022.068.736,00	-	2.302.688.348,94	80.254.000,00	2.382.942.348,94	5.405.011.084,94	(604.618.482,06)	89,94
04 03 04 03 01D	Bagian Umum	-	1.007.966.600,00	-	2.402.374.898,00	573.959.750,00	2.976.334.648,00	3.984.301.248,00	(237.456.101,00)	94,38
04 03 04 03 01E	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	-	1.037.000.581,00	-	648.141.079,39	274.060.100,00	922.201.179,39	1.959.201.760,39	(194.169.125,61)	90,98
04 03 04 03 01F	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	601.403.496,00	-	311.836.002,00	142.450.000,00	454.286.002,00	1.055.689.498,00	(119.983.230,00)	89,79
04 03 04 03 01G	Bagian Organisasi	-	1.262.846.671,00	238.000.000,00	473.413.303,90	31.485.000,00	742.898.303,90	2.005.744.974,90	(97.924.945,10)	95,35
04 03 04 03 01H	Bagian Layanan Pengadaan	-	1.512.069.543,00	16.775.000,00	581.166.767,40	247.659.996,59	845.601.763,99	2.357.671.306,99	(215.372.803,01)	91,63

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA								
		Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)		Realisasi Belanja Langsung (Rp)				Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Belanja Tidak Terduga	Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp)			
1	2	22	23 = 18+19+20+21+22	24	25	26	27 = 24+25+26	28 = 23+27	29 = 28-17	30
04 04	SEKRETARIAT DPRD	-	22.053.505.713,00	-	18.805.497.929,30	1.262.042.200,00	20.067.540.129,30	42.121.045.842,30	(11.373.427.595,70)	78,74
04 04 04 04 01	Sekretariat DPRD	-	22.053.505.713,00	-	18.805.497.929,30	1.262.042.200,00	20.067.540.129,30	42.121.045.842,30	(11.373.427.595,70)	78,74
04 05	INSPEKTORAT	-	3.949.900.292,00	146.600.000,00	635.370.479,74	148.000,00	782.118.479,74	4.732.018.771,74	(239.055.664,26)	95,19
04 05 04 05 01	Inspektorat Daerah	-	3.949.900.292,00	146.600.000,00	635.370.479,74	148.000,00	782.118.479,74	4.732.018.771,74	(239.055.664,26)	95,19
04 06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	148.627.265.284,00	495.405.000,00	2.948.120.335,00	1.408.004.750,00	4.851.530.085,00	153.478.795.369,00	(19.333.313.637,00)	88,81
04 06 04 06 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	148.627.265.284,00	495.405.000,00	2.948.120.335,00	1.408.004.750,00	4.851.530.085,00	153.478.795.369,00	(19.333.313.637,00)	88,81
04 07	KEUANGAN	74.385.331.447,58	160.401.442.438,58	572.491.000,00	8.675.205.736,02	56.128.345,41	9.303.825.081,43	169.705.267.520,01	(188.469.063.071,08)	47,38
04 07 04 07 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	20.900.320.705,00	572.491.000,00	8.675.205.736,02	56.128.345,41	9.303.825.081,43	30.204.145.786,43	(1.936.784.873,57)	93,97
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	74.385.331.447,58	139.501.121.733,58	-	-	-	-	139.501.121.733,58	(186.532.278.197,51)	
05	URUSAN KEISTIMEWAAN	-	-	471.035.000,00	15.080.788.434,23	37.555.961.129,56	53.107.784.563,79	53.107.784.563,79	(604.576.220,21)	98,87
05 01	URUSAN KEISTIMEWAAN	-	-	471.035.000,00	15.080.788.434,23	37.555.961.129,56	53.107.784.563,79	53.107.784.563,79	(604.576.220,21)	98,87
05 01 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	34.096.595.764,35	34.096.595.764,35	34.096.595.764,35	(155.163.735,65)	99,55
05 01 02 04 01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-	246.100.000,00	738.288.250,00	204.480.050,37	1.188.868.300,37	1.188.868.300,37	(50.681.699,63)	95,91
05 01 02 16 01	Dinas Kebudayaan	-	-	90.460.000,00	5.501.622.968,00	555.210.400,00	6.147.293.368,00	6.147.293.368,00	(288.944.982,00)	95,51
05 01 03 02 01	Dinas Pariwisata	-	-	-	7.232.686.866,23	143.080.000,00	7.375.766.866,23	7.375.766.866,23	(66.138.652,77)	99,11
05 01 04 03 01	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	-	-	113.925.000,00	43.689.750,00	-	157.614.750,00	157.614.750,00	(16.681.750,00)	90,43
05 01 02 01 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-	18.450.000,00	318.820.550,00	-	337.270.550,00	337.270.550,00	(12.729.450,00)	96,36
05 01 03 01 01	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	321.327.000,00	304.346.000,00	625.673.000,00	625.673.000,00	(13.891.000,00)	97,83
05 01 03 05 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	2.100.000,00	924.353.050,00	2.252.248.914,84	3.178.701.964,84	3.178.701.964,84	(344.950,16)	99,99
	JUMLAH :	74.385.331.447,58	739.999.064.237,58	128.212.237.274,78	455.864.521.552,10	193.523.645.423,93	777.600.404.250,81	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
01.01 01.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	353.886.851.455,00	336.286.388.976,00	(17.600.462.479,00)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	221.320.170.631,00	217.436.011.580,00	(3.884.159.051,00)	
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	221.320.170.631,00	217.436.011.580,00	(3.884.159.051,00)	
01.01 01.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	132.566.680.824,00	118.850.377.396,00	(13.716.303.428,00)	
01.01 01.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.524.013.258,00	21.696.653.052,00	(827.360.206,00)	
01.01 01.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	167.915.000,00	148.914.675,00	(19.000.325,00)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	167.915.000,00	148.914.675,00	(19.000.325,00)	
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	22.356.098.258,00	21.547.738.377,00	(808.359.881,00)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	9.900.366.624,00	9.669.170.511,00	(231.196.113,00)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.327.351.634,00	11.762.017.866,00	(565.333.768,00)	
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	128.380.000,00	116.550.000,00	(11.830.000,00)	
01.01 01.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.012.055.569,00	963.066.531,00	(48.989.038,00)	
01.01 01.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	841.215.569,00	836.760.129,00	(4.455.440,00)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	340.318.240,00	336.363.290,00	(3.954.950,00)	
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	500.897.329,00	500.396.839,00	(500.490,00)	
01.01 01.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	170.840.000,00	126.306.402,00	(44.533.598,00)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170.840.000,00	126.306.402,00	(44.533.598,00)	
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.185.000,00	45.180.000,00	(5.000,00)	
01.01 01.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	45.185.000,00	45.180.000,00	(5.000,00)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.185.000,00	45.180.000,00	(5.000,00)	
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	22.752.756.006,00	20.366.497.294,00	(2.386.258.712,00)	
01.01 01.01.01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	483.400.500,00	480.789.060,00	(2.611.440,00)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	483.400.500,00	480.789.060,00	(2.611.440,00)	
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	387.191.256,00	386.883.834,00	(307.422,00)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260.773.488,00	260.466.066,00	(307.422,00)	
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3	Belanja Modal	126.417.768,00	126.417.768,00	-	
01.01 01.01.01 010 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	112.977.000,00	112.977.000,00	-	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.977.000,00	112.977.000,00	-	
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 010 004	Pengelolaan BOS SD Negeri	21.769.187.250,00	19.385.847.400,00	(2.383.339.850,00)	
01.01 01.01.01 010 004 5 2 1	Belanja Pegawai	811.766.000,00	701.142.000,00	(110.624.000,00)	
01.01 01.01.01 010 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.553.431.851,00	13.740.481.510,00	(1.812.950.341,00)	
01.01 01.01.01 010 004 5 2 3	Belanja Modal	5.403.989.399,00	4.944.223.890,00	(459.765.509,00)	
01.01 01.01.01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.914.427.872,00	26.403.210.857,00	(5.511.217.015,00)	
01.01 01.01.01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	785.855.000,00	785.836.000,00	(19.000,00)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	785.855.000,00	785.836.000,00	(19.000,00)	
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	1.263.245.940,00	1.263.031.436,00	(214.504,00)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197.526.240,00	197.311.736,00	(214.504,00)	
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3	Belanja Modal	1.065.719.700,00	1.065.719.700,00	-	
01.01 01.01.01 011 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	141.890.100,00	141.164.300,00	(725.800,00)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	141.890.100,00	141.164.300,00	(725.800,00)	
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 011 004	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1	2.177.117.038,00	1.605.684.822,00	(571.432.216,00)	
01.01 01.01.01 011 004 5 2 1	Belanja Pegawai	269.440.000,00	245.264.000,00	(24.176.000,00)	
01.01 01.01.01 011 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.692.462.038,00	1.146.916.522,00	(545.545.516,00)	
01.01 01.01.01 011 004 5 2 3	Belanja Modal	215.215.000,00	213.504.300,00	(1.710.700,00)	
01.01 01.01.01 011 005	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2	1.915.180.296,00	1.251.176.616,00	(664.003.680,00)	
01.01 01.01.01 011 005 5 2 1	Belanja Pegawai	258.350.000,00	172.520.000,00	(85.830.000,00)	
01.01 01.01.01 011 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.139.639,00	779.603.816,00	(532.535.823,00)	
01.01 01.01.01 011 005 5 2 3	Belanja Modal	344.690.657,00	299.052.800,00	(45.637.857,00)	
01.01 01.01.01 011 006	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3	1.574.431.579,00	1.379.316.294,00	(195.115.285,00)	
01.01 01.01.01 011 006 5 2 1	Belanja Pegawai	176.715.000,00	101.385.000,00	(75.330.000,00)	
01.01 01.01.01 011 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.107.261.579,00	1.012.702.494,00	(94.559.085,00)	
01.01 01.01.01 011 006 5 2 3	Belanja Modal	290.455.000,00	265.228.800,00	(25.226.200,00)	
01.01 01.01.01 011 007	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4	1.690.391.574,00	1.261.163.469,00	(429.228.105,00)	
01.01 01.01.01 011 007 5 2 1	Belanja Pegawai	100.060.000,00	78.340.000,00	(21.720.000,00)	
01.01 01.01.01 011 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.244.949,00	777.583.844,00	(297.661.105,00)	
01.01 01.01.01 011 007 5 2 3	Belanja Modal	515.086.625,00	405.239.625,00	(109.847.000,00)	
01.01 01.01.01 011 008	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5	2.388.563.622,00	1.821.155.217,00	(567.408.405,00)	
01.01 01.01.01 011 008 5 2 1	Belanja Pegawai	156.400.000,00	82.200.000,00	(74.200.000,00)	
01.01 01.01.01 011 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.706.403.822,00	1.316.630.717,00	(389.773.105,00)	
01.01 01.01.01 011 008 5 2 3	Belanja Modal	525.759.800,00	422.324.500,00	(103.435.300,00)	
01.01 01.01.01 011 009	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6	2.084.637.421,00	1.862.025.850,00	(222.611.571,00)	
01.01 01.01.01 011 009 5 2 1	Belanja Pegawai	102.539.200,00	38.762.000,00	(63.777.200,00)	
01.01 01.01.01 011 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.011.714,00	1.480.835.585,00	(139.176.129,00)	
01.01 01.01.01 011 009 5 2 3	Belanja Modal	362.086.507,00	342.428.265,00	(19.658.242,00)	
01.01 01.01.01 011 010	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7	1.566.793.969,00	1.496.360.369,00	(70.433.600,00)	
01.01 01.01.01 011 010 5 2 1	Belanja Pegawai	96.552.000,00	58.830.000,00	(37.722.000,00)	
01.01 01.01.01 011 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.990.214,00	1.000.378.014,00	(32.612.200,00)	
01.01 01.01.01 011 010 5 2 3	Belanja Modal	437.251.755,00	437.152.355,00	(99.400,00)	
01.01 01.01.01 011 011	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8	3.140.365.777,00	2.450.382.360,00	(689.983.417,00)	
01.01 01.01.01 011 011 5 2 1	Belanja Pegawai	175.000.000,00	136.356.000,00	(38.644.000,00)	
01.01 01.01.01 011 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.964.340.777,00	1.315.213.060,00	(649.127.717,00)	
01.01 01.01.01 011 011 5 2 3	Belanja Modal	1.001.025.000,00	998.813.300,00	(2.211.700,00)	
01.01 01.01.01 011 012	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9	1.670.672.494,00	1.456.038.857,00	(214.633.637,00)	
01.01 01.01.01 011 012 5 2 1	Belanja Pegawai	106.400.000,00	106.400.000,00	-	
01.01 01.01.01 011 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.246.736.994,00	1.042.737.357,00	(203.999.637,00)	
01.01 01.01.01 011 012 5 2 3	Belanja Modal	317.535.500,00	306.901.500,00	(10.634.000,00)	
01.01 01.01.01 011 013	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10	1.733.048.015,00	1.565.760.668,00	(167.287.347,00)	
01.01 01.01.01 011 013 5 2 1	Belanja Pegawai	135.000.000,00	128.030.000,00	(6.970.000,00)	
01.01 01.01.01 011 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	954.548.015,00	844.323.808,00	(110.224.207,00)	
01.01 01.01.01 011 013 5 2 3	Belanja Modal	643.500.000,00	593.406.860,00	(50.093.140,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 011 014	Pengelolaan Operasional SMP	1.151.339.148,00	1.033.521.442,00	(117.817.706,00)	
	Negeri 11				
01.01 01.01.01 011 014 5 2 1	Belanja Pegawai	130.828.000,00	128.470.000,00	(2.358.000,00)	
01.01 01.01.01 011 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	738.278.348,00	635.200.543,00	(103.077.805,00)	
01.01 01.01.01 011 014 5 2 3	Belanja Modal	282.232.800,00	269.850.899,00	(12.381.901,00)	
01.01 01.01.01 011 015	Pengelolaan Operasional SMP	1.406.031.098,00	1.392.885.625,00	(13.145.473,00)	
	Negeri 12				
01.01 01.01.01 011 015 5 2 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	119.150.000,00	(850.000,00)	
01.01 01.01.01 011 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	887.056.098,00	886.877.665,00	(178.433,00)	
01.01 01.01.01 011 015 5 2 3	Belanja Modal	398.975.000,00	386.857.960,00	(12.117.040,00)	
01.01 01.01.01 011 016	Pengelolaan Operasional SMP	1.095.178.018,00	905.262.208,00	(189.915.810,00)	
	Negeri 13				
01.01 01.01.01 011 016 5 2 1	Belanja Pegawai	152.867.500,00	110.890.000,00	(41.977.500,00)	
01.01 01.01.01 011 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	725.660.518,00	607.292.908,00	(118.367.610,00)	
01.01 01.01.01 011 016 5 2 3	Belanja Modal	216.650.000,00	187.079.300,00	(29.570.700,00)	
01.01 01.01.01 011 017	Pengelolaan Operasional SMP	1.331.079.241,00	1.284.940.681,00	(46.138.560,00)	
	Negeri 14				
01.01 01.01.01 011 017 5 2 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	119.661.000,00	(339.000,00)	
01.01 01.01.01 011 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	885.479.241,00	840.399.481,00	(45.079.760,00)	
01.01 01.01.01 011 017 5 2 3	Belanja Modal	325.600.000,00	324.880.200,00	(719.800,00)	
01.01 01.01.01 011 018	Pengelolaan Operasional SMP	2.812.159.591,00	2.039.951.613,00	(772.207.978,00)	
	Negeri 15				
01.01 01.01.01 011 018 5 2 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	119.900.000,00	(30.100.000,00)	
01.01 01.01.01 011 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.843.332.091,00	1.249.402.213,00	(593.929.878,00)	
01.01 01.01.01 011 018 5 2 3	Belanja Modal	818.827.500,00	670.649.400,00	(148.178.100,00)	
01.01 01.01.01 011 019	Pengelolaan Operasional SMP	1.986.447.951,00	1.407.553.030,00	(578.894.921,00)	
	Negeri 16				
01.01 01.01.01 011 019 5 2 1	Belanja Pegawai	134.405.000,00	96.640.000,00	(37.765.000,00)	
01.01 01.01.01 011 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.342.951,00	944.767.999,00	(495.574.952,00)	
01.01 01.01.01 011 019 5 2 3	Belanja Modal	411.700.000,00	366.145.031,00	(45.554.969,00)	
01.01 01.01.01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	6.294.841.898,00	6.008.466.914,00	(286.374.984,00)	
01.01 01.01.01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	2.730.538.330,00	2.609.902.278,00	(120.636.052,00)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1	Belanja Pegawai	348.025.000,00	342.550.000,00	(5.475.000,00)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.041.772.000,00	948.273.978,00	(93.498.022,00)	
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3	Belanja Modal	1.340.741.330,00	1.319.078.300,00	(21.663.030,00)	
01.01 01.01.01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.429.020.568,00	3.264.741.636,00	(164.278.932,00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.751.600.000,00	2.693.000.000,00	(58.600.000,00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	663.020.568,00	558.266.636,00	(104.753.932,00)	
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3	Belanja Modal	14.400.000,00	13.475.000,00	(925.000,00)	
01.01 01.01.01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	135.283.000,00	133.823.000,00	(1.460.000,00)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135.283.000,00	133.823.000,00	(1.460.000,00)	
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.01 01.01.01 013	Program Pengembangan Pendidikan	48.023.401.221,00	43.367.302.748,00	(4.656.098.473,00)	
01.01 01.01.01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	304.908.800,00	304.908.800,00	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1	Belanja Pegawai	28.490.000,00	28.490.000,00	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	276.418.800,00	276.418.800,00	-	
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.110.196.568,00	17.705.901.076,00	(404.295.492,00)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1	Belanja Pegawai	18.039.000.000,00	17.637.719.400,00	(401.280.600,00)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71.196.568,00	68.181.676,00	(3.014.892,00)	
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	967.224.080,00	965.961.960,00	(1.262.120,00)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	907.224.080,00	907.190.060,00	(34.020,00)	
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3	Belanja Modal	60.000.000,00	58.771.900,00	(1.228.100,00)	
01.01 01.01.01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	1.047.220.600,00	1.037.616.636,00	(9.603.964,00)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1	Belanja Pegawai	590.400.000,00	582.800.000,00	(7.600.000,00)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	456.820.600,00	454.816.636,00	(2.003.964,00)	
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.01 01.01.01 013 005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK)	25.350.217.200,00	21.226.027.369,00	(4.124.189.831,00)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1	Belanja Pegawai	4.931.879.428,00	4.174.361.500,00	(757.517.928,00)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.308.663.700,00	11.026.207.376,00	(3.282.456.324,00)	
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3	Belanja Modal	6.109.674.072,00	6.025.458.493,00	(84.215.579,00)	
01.01 01.01.01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	2.243.633.973,00	2.126.886.907,00	(116.747.066,00)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1	Belanja Pegawai	1.950.138.369,00	1.834.449.710,00	(115.688.659,00)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	244.499.864,00	243.441.457,00	(1.058.407,00)	
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3	Belanja Modal	48.995.740,00	48.995.740,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	353.886.851.455,00	336.286.388.976,00	(17.600.462.479,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(353.886.851.455,00)	(336.286.388.976,00)	17.600.462.479,00	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	39.141.910.518,00	41.211.502.113,95	2.069.591.595,95	
01.02 01.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.141.910.518,00	41.211.502.113,95	2.069.591.595,95	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	138.792.000,00	208.920.800,00	70.128.800,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	138.792.000,00	208.920.800,00	70.128.800,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	138.792.000,00	208.920.800,00	70.128.800,00	1)PD No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	39.003.118.518,00	41.002.581.313,95	1.999.462.795,95	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.458.891.000,00	23.047.942.795,00	(410.948.205,00)	2)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	782.950.000,00	787.602.641,00	4.652.641,00	No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	607.811.000,00	614.635.014,00	6.824.014,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.326.120.000,00	1.171.761.213,00	(154.358.787,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.248.200.000,00	1.408.651.986,00	160.451.986,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	605.113.000,00	648.485.963,00	43.372.963,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	878.144.000,00	795.354.387,00	(82.789.613,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.012.875.000,00	2.096.805.599,00	83.930.599,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.657.805.000,00	1.339.368.853,00	(318.436.147,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	755.077.000,00	809.766.851,00	54.689.851,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	985.688.000,00	1.002.463.002,00	16.775.002,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.960.800.000,00	1.821.923.755,00	(138.876.245,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.624.515.000,00	1.632.813.423,00	8.298.423,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	901.617.000,00	815.504.190,00	(86.112.810,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	603.080.000,00	623.496.528,00	20.416.528,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.626.341.000,00	2.610.753.621,00	(15.587.379,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.293.617.000,00	2.349.408.612,00	55.791.612,00	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.092.764.000,00	1.053.745.445,00	(39.018.555,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.496.374.000,00	1.465.401.712,00	(30.972.288,00)	
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	15.544.227.518,00	17.954.638.518,95	2.410.411.000,95	3)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	15.544.227.518,00	17.954.638.518,95	2.410.411.000,95	No 18/2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	203.514.298.170,00	180.954.212.357,99	(22.560.085.812,01)	
01.02 01.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.889.838.000,00	44.499.251.161,00	(1.390.586.839,00)	
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	45.889.838.000,00	44.499.251.161,00	(1.390.586.839,00)	
01.02 01.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	157.624.460.170,00	136.454.961.196,99	(21.169.498.973,01)	
01.02 01.02.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.478.170.000,00	4.374.688.000,00	(103.482.000,00)	
01.02 01.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105.340.000,00	68.840.078,00	(36.499.922,00)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	105.340.000,00	68.840.078,00	(36.499.922,00)	
01.02 01.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.372.830.000,00	4.305.847.922,00	(66.982.078,00)	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.290.457.300,00	4.223.935.622,00	(66.521.678,00)	
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	82.372.700,00	81.912.300,00	(460.400,00)	
01.02 01.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	257.122.000,00	211.300.391,00	(45.821.609,00)	
01.02 01.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	76.211.000,00	75.115.000,00	(1.096.000,00)	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.211.000,00	75.115.000,00	(1.096.000,00)	
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	180.911.000,00	136.185.391,00	(44.725.609,00)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	180.911.000,00	136.185.391,00	(44.725.609,00)	
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.495.000,00	35.814.336,00	(680.664,00)	
01.02 01.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	36.495.000,00	35.814.336,00	(680.664,00)	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.495.000,00	35.814.336,00	(680.664,00)	
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	45.543.822.789,00	38.314.878.088,17	(7.228.944.700,83)	
01.02 01.02.01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	1.012.773.214,00	829.388.503,00	(183.384.711,00)	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1	Belanja Pegawai	625.033.000,00	537.534.130,00	(87.498.870,00)	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	287.591.366,00	219.261.053,00	(68.330.313,00)	
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3	Belanja Modal	100.148.848,00	72.593.320,00	(27.555.528,00)	
01.02 01.02.01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	740.566.292,00	607.163.032,00	(133.403.260,00)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1	Belanja Pegawai	406.072.430,00	356.629.754,00	(49.442.676,00)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.104.662,00	206.871.178,00	(64.233.484,00)	
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3	Belanja Modal	63.389.200,00	43.662.100,00	(19.727.100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	1.544.658.683,00	1.218.680.788,00	(325.977.895,00)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1	Belanja Pegawai	1.062.024.750,00	898.714.672,00	(163.310.078,00)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	381.033.933,00	235.976.316,00	(145.057.617,00)	
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3	Belanja Modal	101.600.000,00	83.989.800,00	(17.610.200,00)	
01.02 01.02.01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	1.602.733.369,00	1.229.742.997,00	(372.990.372,00)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1	Belanja Pegawai	943.475.000,00	841.093.133,00	(102.381.867,00)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	547.508.369,00	352.511.950,00	(194.996.419,00)	
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3	Belanja Modal	111.750.000,00	36.137.914,00	(75.612.086,00)	
01.02 01.02.01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	799.337.055,00	682.117.916,00	(117.219.139,00)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1	Belanja Pegawai	441.044.101,00	380.951.305,00	(60.092.796,00)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	237.142.954,00	185.943.611,00	(51.199.343,00)	
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3	Belanja Modal	121.150.000,00	115.223.000,00	(5.927.000,00)	
01.02 01.02.01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	1.013.604.575,00	784.125.252,00	(229.479.323,00)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1	Belanja Pegawai	608.105.825,00	523.483.270,00	(84.622.555,00)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	358.557.750,00	218.189.732,00	(140.368.018,00)	
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3	Belanja Modal	46.941.000,00	42.452.250,00	(4.488.750,00)	
01.02 01.02.01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	2.451.484.408,00	2.372.860.427,00	(78.623.981,00)	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1.549.666.906,00	1.526.616.256,00	(23.050.650,00)	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	824.417.502,00	771.509.771,00	(52.907.731,00)	
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3	Belanja Modal	77.400.000,00	74.734.400,00	(2.665.600,00)	
01.02 01.02.01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	1.758.072.951,00	1.402.543.890,00	(355.529.061,00)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1	Belanja Pegawai	964.590.040,00	864.914.204,00	(99.675.836,00)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	728.452.911,00	477.704.186,00	(250.748.725,00)	
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3	Belanja Modal	65.030.000,00	59.925.500,00	(5.104.500,00)	
01.02 01.02.01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	874.374.496,00	806.742.253,00	(67.632.243,00)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1	Belanja Pegawai	586.901.691,00	549.504.435,00	(37.397.256,00)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	244.172.805,00	221.805.818,00	(22.366.987,00)	
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3	Belanja Modal	43.300.000,00	35.432.000,00	(7.868.000,00)	
01.02 01.02.01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	1.246.997.281,00	1.028.340.122,00	(218.657.159,00)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1	Belanja Pegawai	634.290.972,00	599.196.612,00	(35.094.360,00)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463.172.996,00	329.253.341,00	(133.919.655,00)	
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3	Belanja Modal	149.533.313,00	99.890.169,00	(49.643.144,00)	
01.02 01.02.01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	2.438.672.287,00	1.894.360.392,00	(544.311.895,00)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1	Belanja Pegawai	1.270.932.000,00	1.106.652.701,00	(164.279.299,00)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	882.740.287,00	565.665.461,00	(317.074.826,00)	
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3	Belanja Modal	285.000.000,00	222.042.230,00	(62.957.770,00)	
01.02 01.02.01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	2.685.111.446,00	1.800.955.981,00	(884.155.465,00)	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1	Belanja Pegawai	1.248.900.000,00	982.591.365,00	(266.308.635,00)	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.114.371.446,00	697.940.263,00	(416.431.183,00)	
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3	Belanja Modal	321.840.000,00	120.424.353,00	(201.415.647,00)	
01.02 01.02.01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	1.205.621.189,00	959.791.117,17	(245.830.071,83)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1	Belanja Pegawai	736.401.939,00	651.964.946,00	(84.436.993,00)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	464.419.250,00	303.154.471,17	(161.264.778,83)	
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3	Belanja Modal	4.800.000,00	4.671.700,00	(128.300,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	951.423.981,00	670.240.524,00	(281.183.457,00)	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1	Belanja Pegawai	459.028.000,00	408.362.952,00	(50.665.048,00)	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	399.622.381,00	234.889.172,00	(164.733.209,00)	
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3	Belanja Modal	92.773.600,00	26.988.400,00	(65.785.200,00)	
01.02 01.02.01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	2.754.206.034,00	2.447.960.832,00	(306.245.202,00)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1	Belanja Pegawai	1.646.000.000,00	1.602.523.504,00	(43.476.496,00)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	913.206.034,00	712.547.245,00	(200.658.789,00)	
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3	Belanja Modal	195.000.000,00	132.890.083,00	(62.109.917,00)	
01.02 01.02.01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	2.607.170.608,00	2.427.156.148,00	(180.014.460,00)	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1	Belanja Pegawai	1.542.187.620,00	1.420.561.188,00	(121.626.432,00)	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	965.196.335,00	919.177.360,00	(46.018.975,00)	
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3	Belanja Modal	99.786.653,00	87.417.600,00	(12.369.053,00)	
01.02 01.02.01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	1.177.645.489,00	1.112.314.076,00	(65.331.413,00)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1	Belanja Pegawai	645.046.989,00	639.127.215,00	(5.919.774,00)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	445.673.000,00	391.510.061,00	(54.162.939,00)	
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3	Belanja Modal	86.925.500,00	81.676.800,00	(5.248.700,00)	
01.02 01.02.01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	1.718.768.427,00	1.584.678.357,00	(134.090.070,00)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1	Belanja Pegawai	922.422.800,00	905.808.889,00	(16.613.911,00)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	713.739.252,00	619.067.768,00	(94.671.484,00)	
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3	Belanja Modal	82.606.375,00	59.801.700,00	(22.804.675,00)	
01.02 01.02.01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	904.492.320,00	796.286.207,00	(108.206.113,00)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	904.492.320,00	796.286.207,00	(108.206.113,00)	
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	1.077.752.760,00	1.005.763.922,00	(71.988.838,00)	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.702.760,00	964.319.922,00	(71.382.838,00)	
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3	Belanja Modal	42.050.000,00	41.444.000,00	(606.000,00)	
01.02 01.02.01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	1.305.584.952,00	1.110.954.211,00	(194.630.741,00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.231.584.952,00	1.049.138.561,00	(182.446.391,00)	
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3	Belanja Modal	74.000.000,00	61.815.650,00	(12.184.350,00)	
01.02 01.02.01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	1.187.841.000,00	929.505.115,00	(258.335.885,00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.144.841.000,00	906.250.115,00	(238.590.885,00)	
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3	Belanja Modal	43.000.000,00	23.255.000,00	(19.745.000,00)	
01.02 01.02.01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	856.511.200,00	800.104.509,00	(56.406.691,00)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	821.811.200,00	771.796.579,00	(50.014.621,00)	
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3	Belanja Modal	34.700.000,00	28.307.930,00	(6.392.070,00)	
01.02 01.02.01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	1.029.308.200,00	845.178.111,00	(184.130.089,00)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.029.308.200,00	845.178.111,00	(184.130.089,00)	
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	710.771.000,00	657.383.508,00	(53.387.492,00)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	654.771.493,00	601.837.658,00	(52.933.835,00)	
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3	Belanja Modal	55.999.507,00	55.545.850,00	(453.657,00)	
01.02 01.02.01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	799.667.372,00	494.440.031,00	(305.227.341,00)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	755.167.372,00	457.973.031,00	(297.194.341,00)	
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3	Belanja Modal	44.500.000,00	36.467.000,00	(8.033.000,00)	
01.02 01.02.01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	744.818.000,00	675.699.340,00	(69.118.660,00)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	698.048.000,00	637.470.890,00	(60.577.110,00)	
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3	Belanja Modal	46.770.000,00	38.228.450,00	(8.541.550,00)	
01.02 01.02.01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	1.027.007.068,00	811.354.705,00	(215.652.363,00)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	974.507.068,00	778.574.705,00	(195.932.363,00)	
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3	Belanja Modal	52.500.000,00	32.780.000,00	(19.720.000,00)	
01.02 01.02.01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	1.182.320.000,00	1.016.349.548,00	(165.970.452,00)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.119.320.000,00	972.877.548,00	(146.442.452,00)	
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3	Belanja Modal	63.000.000,00	43.472.000,00	(19.528.000,00)	
01.02 01.02.01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	698.582.950,00	570.407.359,00	(128.175.591,00)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	657.582.950,00	540.870.778,00	(116.712.172,00)	
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3	Belanja Modal	41.000.000,00	29.536.581,00	(11.463.419,00)	
01.02 01.02.01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	878.825.092,00	826.001.751,00	(52.823.341,00)	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	849.825.092,00	799.008.187,00	(50.816.905,00)	
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3	Belanja Modal	29.000.000,00	26.993.564,00	(2.006.436,00)	
01.02 01.02.01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	715.028.390,00	499.258.941,00	(215.769.449,00)	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	682.028.390,00	479.858.941,00	(202.169.449,00)	
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3	Belanja Modal	33.000.000,00	19.400.000,00	(13.600.000,00)	
01.02 01.02.01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	1.197.198.000,00	932.016.140,00	(265.181.860,00)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.132.198.000,00	876.080.468,00	(256.117.532,00)	
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3	Belanja Modal	65.000.000,00	55.935.672,00	(9.064.328,00)	
01.02 01.02.01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	883.088.020,00	824.043.175,00	(59.044.845,00)	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	808.088.020,00	753.138.175,00	(54.949.845,00)	
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3	Belanja Modal	75.000.000,00	70.905.000,00	(4.095.000,00)	
01.02 01.02.01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	922.725.680,00	861.797.700,00	(60.927.980,00)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	922.725.680,00	861.797.700,00	(60.927.980,00)	
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	839.079.000,00	799.171.208,00	(39.907.792,00)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	796.579.000,00	757.594.808,00	(38.984.192,00)	
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3	Belanja Modal	42.500.000,00	41.576.400,00	(923.600,00)	
01.02 01.02.01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	29.920.466.270,00	25.143.333.882,00	(4.777.132.388,00)	
01.02 01.02.01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	23.744.105.581,00	19.114.785.621,00	(4.629.319.960,00)	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7.836.000.000,00	6.386.281.903,00	(1.449.718.097,00)	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.434.905.581,00	11.259.467.407,00	(3.175.438.174,00)	
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3	Belanja Modal	1.473.200.000,00	1.469.036.311,00	(4.163.689,00)	
01.02 01.02.01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	6.176.360.689,00	6.028.548.261,00	(147.812.428,00)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.639.746.812,00	5.508.122.396,00	(131.624.416,00)	
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3	Belanja Modal	536.613.877,00	520.425.865,00	(16.188.012,00)	
01.02 01.02.01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	55.881.098.319,00	47.952.924.745,00	(7.928.173.574,00)	
01.02 01.02.01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	6.376.651.600,00	2.961.818.674,00	(3.414.832.926,00)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	143.940.600,00	134.407.872,00	(9.532.728,00)	
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3	Belanja Modal	6.232.711.000,00	2.827.410.802,00	(3.405.300.198,00)	
01.02 01.02.01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	139.302.124,00	115.999.252,00	(23.302.872,00)	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	139.302.124,00	115.999.252,00	(23.302.872,00)	
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	48.177.691.595,00	43.895.556.642,00	(4.282.134.953,00)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.177.691.595,00	43.895.556.642,00	(4.282.134.953,00)	
01.02 01.02.01 016 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	1.187.453.000,00	979.550.177,00	(207.902.823,00)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.129.453.000,00	926.482.227,00	(202.970.773,00)	
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3	Belanja Modal	44.000.000,00	40.467.950,00	(3.532.050,00)	
01.02 01.02.01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.778.738.820,00	1.710.474.448,00	(68.264.372,00)	
01.02 01.02.01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	369.511.400,00	366.954.280,00	(2.557.120,00)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	369.511.400,00	366.954.280,00	(2.557.120,00)	
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	704.563.000,00	649.243.057,00	(55.319.943,00)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	704.563.000,00	649.243.057,00	(55.319.943,00)	
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	457.341.000,00	455.515.591,00	(1.825.409,00)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	360.377.000,00	358.551.591,00	(1.825.409,00)	
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3	Belanja Modal	96.964.000,00	96.964.000,00	-	
01.02 01.02.01 017 004	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	247.323.420,00	238.761.520,00	(8.561.900,00)	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	247.323.420,00	238.761.520,00	(8.561.900,00)	
01.02 01.02.01 017 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	17.421.744.772,00	16.574.487.957,82	(847.256.814,18)	
01.02 01.02.01 018 001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	182.874.000,00	175.220.600,00	(7.653.400,00)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	159.874.000,00	152.945.600,00	(6.928.400,00)	
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3	Belanja Modal	23.000.000,00	22.275.000,00	(725.000,00)	
01.02 01.02.01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	9.381.176.772,00	9.350.708.294,00	(30.468.478,00)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.380.126.772,00	9.349.658.294,00	(30.468.478,00)	
01.02 01.02.01 018 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	7.857.694.000,00	7.048.559.063,82	(809.134.936,18)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.612.694.000,00	6.917.459.563,82	(695.234.436,18)	
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3	Belanja Modal	245.000.000,00	131.099.500,00	(113.900.500,00)	
01.02 01.02.01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.306.802.200,00	2.137.059.349,00	(169.742.851,00)	
01.02 01.02.01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	72.996.000,00	70.188.126,00	(2.807.874,00)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72.996.000,00	70.188.126,00	(2.807.874,00)	
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	1.597.206.200,00	1.489.929.047,00	(107.277.153,00)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.597.206.200,00	1.489.929.047,00	(107.277.153,00)	
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	636.600.000,00	576.942.176,00	(59.657.824,00)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	87.662.176,00	(2.337.824,00)	
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3	Belanja Modal	546.600.000,00	489.280.000,00	(57.320.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	39.141.910.518,00	41.211.502.113,95	2.069.591.595,95	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	203.514.298.170,00	180.954.212.357,99	(22.560.085.812,01)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(164.372.387.652,00)	(139.742.710.244,04)	24.629.677.407,96	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
01.02 01.02.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	171.935.458.243,00	143.789.494.031,74	(28.145.964.211,26)	
01.02 01.02.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30.038.254.000,00	24.903.788.888,00	(5.134.465.112,00)	
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	30.038.254.000,00	24.903.788.888,00	(5.134.465.112,00)	
01.02 01.02.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	141.897.204.243,00	118.885.705.143,74	(23.011.499.099,26)	
01.02 01.02.01 020	<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja</i>	141.897.204.243,00	118.885.705.143,74	(23.011.499.099,26)	
01.02 01.02.01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	91.611.250.443,00	72.236.867.542,00	(19.374.382.901,00)	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1	Belanja Pegawai	39.078.415.800,00	39.749.896.965,00	671.481.165,00	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.113.334.643,00	24.618.483.382,00	(19.494.851.261,00)	
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3	Belanja Modal	8.419.500.000,00	7.868.487.195,00	(551.012.805,00)	
01.02 01.02.01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	50.285.953.800,00	46.648.837.601,74	(3.637.116.198,26)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6.590.052.000,00	6.364.867.717,00	(225.184.283,00)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.086.452.800,00	21.399.363.866,74	(1.687.088.933,26)	
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3	Belanja Modal	20.609.449.000,00	18.884.606.018,00	(1.724.842.982,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	171.935.458.243,00	143.789.494.031,74	(28.145.964.211,26)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(96.639.383.435,00)	(52.121.057.315,49)	44.518.326.119,51	

Keterangan :

- 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	898.078.026,00	1.134.065.200,00	235.987.174,00	
01.03 01.03.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	898.078.026,00	1.134.065.200,00	235.987.174,00	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	523.510.026,00	802.712.500,00	279.202.474,00	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	511.400.026,00	792.602.500,00	281.202.474,00	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	511.400.026,00	792.602.500,00	281.202.474,00	1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	12.110.000,00	10.110.000,00	(2.000.000,00)	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.110.000,00	10.110.000,00	(2.000.000,00)	2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	374.568.000,00	331.352.700,00	(43.215.300,00)	
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	374.568.000,00	331.352.700,00	(43.215.300,00)	3)Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06	Sewa Tanah dan/atau Bangunan - Sewa Rusunawa	374.568.000,00	331.352.700,00	(43.215.300,00)	4)Perwal No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	134.377.822.139,00	129.085.173.366,32	(5.292.648.772,68)	
01.03 01.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.187.162.000,00	6.978.654.573,00	(208.507.427,00)	
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	7.187.162.000,00	6.978.654.573,00	(208.507.427,00)	
01.03 01.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	127.190.660.139,00	122.106.518.793,32	(5.084.141.345,68)	
01.03 01.03.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.927.837.618,00	1.813.636.854,40	(114.200.763,60)	
01.03 01.03.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80.730.000,00	69.849.550,00	(10.880.450,00)	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.730.000,00	69.849.550,00	(10.880.450,00)	
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.847.107.618,00	1.743.787.304,40	(103.320.313,60)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.787.618,00	1.716.867.304,40	(102.920.313,60)	
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	27.320.000,00	26.920.000,00	(400.000,00)	
01.03 01.03.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.647.000,00	478.096.067,00	(41.550.933,00)	
01.03 01.03.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	50.000.000,00	29.944.000,00	(20.056.000,00)	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	29.944.000,00	(20.056.000,00)	
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	469.647.000,00	448.152.067,00	(21.494.933,00)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	469.647.000,00	448.152.067,00	(21.494.933,00)	
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.182.675,00	10.906.400,00	(276.275,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 01.03.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	11.182.675,00	10.906.400,00	(276.275,00)	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.182.675,00	10.906.400,00	(276.275,00)	
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	23.857.510.648,00	23.254.080.409,91	(603.430.238,09)	
01.03 01.03.01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	743.644.784,00	726.286.373,36	(17.358.410,64)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.750.000,00	-	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.114.784,00	33.015.223,36	(3.099.560,64)	
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3	Belanja Modal	701.780.000,00	687.521.150,00	(14.258.850,00)	
01.03 01.03.01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	23.078.045.864,00	22.516.767.536,55	(561.278.327,45)	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	93.483.864,00	91.415.153,92	(2.068.710,08)	
01.03 01.03.01 021 002 5 7 3	Belanja Modal	22.984.562.000,00	22.425.352.382,63	(559.209.617,37)	
01.03 01.03.01 021 003	Pengawasan Pembangunan	35.820.000,00	11.026.500,00	(24.793.500,00)	
01.03 01.03.01 021 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 021 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.820.000,00	11.026.500,00	(24.793.500,00)	
01.03 01.03.01 021 003 5 7 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	71.604.268.884,00	68.092.708.914,95	(3.511.559.969,05)	
01.03 01.03.01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	16.561.956.000,00	14.007.813.920,00	(2.554.142.080,00)	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.344.000,00	26.309.520,00	(34.480,00)	
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3	Belanja Modal	16.535.612.000,00	13.981.504.400,00	(2.554.107.600,00)	
01.03 01.03.01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.761.101.384,00	4.377.952.970,86	(383.148.413,14)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.383.114.848,00	2.252.315.970,86	(130.798.877,14)	
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3	Belanja Modal	2.377.986.536,00	2.125.637.000,00	(252.349.536,00)	
01.03 01.03.01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	21.838.008.500,00	21.417.916.278,60	(420.092.221,40)	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.190.679.186,00	15.148.686.878,60	(41.992.307,40)	
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3	Belanja Modal	6.647.329.314,00	6.269.229.400,00	(378.099.914,00)	
05.01 01.03.01 022 004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	28.443.203.000,00	28.289.025.745,49	(154.177.254,51)	
05.01 01.03.01 022 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 01.03.01 022 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
05.01 01.03.01 022 004 5 2 3	Belanja Modal	28.443.203.000,00	28.289.025.745,49	(154.177.254,51)	
05.01 01.03.01 022 005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	-	-	-	
05.01 01.03.01 022 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 01.03.01 022 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
05.01 01.03.01 022 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 01.03.01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase	10.775.303.760,00	10.463.427.712,78	(311.876.047,22)	
01.03 01.03.01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	6.060.221.780,00	6.042.469.718,86	(17.752.061,14)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107.885.280,00	103.214.700,00	(4.670.580,00)	
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3	Belanja Modal	143.780.000,00	131.685.000,00	(12.095.000,00)	
01.03 01.03.01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	4.715.081.980,00	4.420.957.993,92	(294.123.986,08)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.892.712,00	2.344.430.193,92	(276.462.518,08)	
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3	Belanja Modal	2.094.189.268,00	2.076.527.800,00	(17.661.468,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
05.01 01.03.01 023 003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	5.808.556.500,00	5.807.570.018,86	(986.481,14)	
05.01 01.03.01 023 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 01.03.01 023 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
05.01 01.03.01 023 003 5 2 3	Belanja Modal	5.808.556.500,00	5.807.570.018,86	(986.481,14)	
01.04 01.03.01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	18.494.909.554,00	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	
01.04 01.03.01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	5.502.314.881,00	5.474.947.401,00	(27.367.480,00)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.748.210.961,00	1.744.868.401,00	(3.342.560,00)	
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3	Belanja Modal	3.754.103.920,00	3.730.079.000,00	(24.024.920,00)	
01.04 01.03.01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	8.063.888.131,00	7.940.518.303,20	(123.369.827,80)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	22.750.000,00	(4.750.000,00)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.153.342.131,00	7.040.290.303,20	(113.051.827,80)	
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3	Belanja Modal	883.046.000,00	877.478.000,00	(5.568.000,00)	
01.04 01.03.01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	739.560.042,00	730.040.618,88	(9.519.423,12)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	298.122.074,00	294.462.618,88	(3.659.455,12)	
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3	Belanja Modal	441.437.968,00	435.578.000,00	(5.859.968,00)	
01.04 01.03.01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	4.189.146.500,00	3.848.156.111,20	(340.990.388,80)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1	Belanja Pegawai	103.950.000,00	64.800.000,00	(39.150.000,00)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.186.875.300,00	965.698.391,20	(221.176.908,80)	
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3	Belanja Modal	2.898.321.200,00	2.817.657.720,00	(80.663.480,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	898.078.026,00	1.134.065.200,00	235.987.174,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	134.377.822.139,00	129.085.173.366,32	(5.292.648.772,68)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(133.479.744.113,00)	(127.951.108.166,32)	5.528.635.946,68	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 17

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
01.05 01.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	24.298.229.859,00	23.799.525.901,80	(498.703.957,20)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.103.934.000,00	7.823.852.740,00	(280.081.260,00)	
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	8.103.934.000,00	7.823.852.740,00	(280.081.260,00)	
01.05 01.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	16.194.295.859,00	15.975.673.161,80	(218.622.697,20)	
01.05 01.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.131.689.361,00	4.032.024.786,00	(99.664.575,00)	
01.05 01.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	49.757.000,00	49.665.255,00	(91.745,00)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.757.000,00	49.665.255,00	(91.745,00)	
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4.081.932.361,00	3.982.359.531,00	(99.572.830,00)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.063.403.761,00	3.963.830.946,00	(99.572.815,00)	
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	18.528.600,00	18.528.585,00	(15,00)	
01.05 01.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	717.051.950,00	655.294.103,00	(61.757.847,00)	
01.05 01.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	138.000.000,00	134.968.000,00	(3.032.000,00)	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	138.000.000,00	134.968.000,00	(3.032.000,00)	
01.05 01.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	579.051.950,00	520.326.103,00	(58.725.847,00)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	555.202.550,00	496.676.103,00	(58.526.447,00)	
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	23.849.400,00	23.650.000,00	(199.400,00)	
01.05 01.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	857.000,00	857.000,00	-	
01.05 01.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	857.000,00	857.000,00	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	857.000,00	857.000,00	-	
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5.247.696.568,00	5.206.225.468,00	(41.471.100,00)	
01.05 01.05.01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	115.165.000,00	96.350.000,00	(18.815.000,00)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1	Belanja Pegawai	105.705.000,00	86.890.000,00	(18.815.000,00)	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	9.460.000,00	-	
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	5.132.531.568,00	5.109.875.468,00	(22.656.100,00)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1	Belanja Pegawai	168.800.000,00	160.400.000,00	(8.400.000,00)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.952.831.568,00	4.938.575.468,00	(14.256.100,00)	
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3	Belanja Modal	10.900.000,00	10.900.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	3.911.180.100,00	3.910.140.024,80	(1.040.075,20)	
01.05 01.05.01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	3.886.060.100,00	3.885.020.024,80	(1.040.075,20)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1	Belanja Pegawai	137.000.000,00	135.960.000,00	(1.040.000,00)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.716.060.100,00	3.716.060.024,80	(75,20)	
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3	Belanja Modal	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
01.05 01.05.01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	25.120.000,00	25.120.000,00	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	12.520.000,00	-	
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	179.554.568,00	177.495.708,00	(2.058.860,00)	
01.05 01.05.01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	114.734.568,00	113.625.708,00	(1.108.860,00)	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.134.568,00	111.025.708,00	(1.108.860,00)	
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3	Belanja Modal	2.600.000,00	2.600.000,00	-	
01.05 01.05.01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	64.820.000,00	63.870.000,00	(950.000,00)	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	14.370.000,00	(450.000,00)	
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	
01.05 01.05.01 030	Program Perlindungan Masyarakat	2.006.266.312,00	1.993.636.072,00	(12.630.240,00)	
01.05 01.05.01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1.271.659.352,00	1.263.946.062,00	(7.713.290,00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1.161.080.000,00	1.154.550.000,00	(6.530.000,00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	110.579.352,00	109.396.062,00	(1.183.290,00)	
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	734.606.960,00	729.690.010,00	(4.916.950,00)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723.806.960,00	718.890.010,00	(4.916.950,00)	
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	24.298.229.859,00	23.799.525.901,80	(498.703.957,20)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(24.298.229.859,00)	(23.799.525.901,80)	498.703.957,20	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	1)PD No 4/2012
01.05 01.05.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	6.648.302.773,00	5.967.219.175,50	(681.083.597,50)	
01.05 01.05.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.669.178.000,00	3.540.214.269,00	(128.963.731,00)	
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.669.178.000,00	3.540.214.269,00	(128.963.731,00)	
01.05 01.05.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.979.124.773,00	2.427.004.906,50	(552.119.866,50)	
01.05 01.05.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.352.436.555,00	1.236.637.836,30	(115.798.718,70)	
01.05 01.05.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	59.069.555,00	57.201.555,00	(1.868.000,00)	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59.069.555,00	57.201.555,00	(1.868.000,00)	
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 020	Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran	1.293.367.000,00	1.179.436.281,30	(113.930.718,70)	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.293.367.000,00	1.179.436.281,30	(113.930.718,70)	
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.045.818,00	101.926.418,00	(29.119.400,00)	
01.05 01.05.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	65.000.000,00	47.993.000,00	(17.007.000,00)	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	47.993.000,00	(17.007.000,00)	
01.05 01.05.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66.045.818,00	53.933.418,00	(12.112.400,00)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	66.045.818,00	53.933.418,00	(12.112.400,00)	
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.315.000,00	3.315.000,00	-	
01.05 01.05.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.315.000,00	3.315.000,00	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	3.315.000,00	-	
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 031	Program Pencegahan Kebakaran	68.020.000,00	67.584.500,00	(435.500,00)	
01.05 01.05.02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	65.920.000,00	65.484.500,00	(435.500,00)	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65.920.000,00	65.484.500,00	(435.500,00)	
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	1.424.307.400,00	1.017.541.152,20	(406.766.247,80)	
01.05 01.05.02 032 001	Penanganan Kebakaran	722.022.000,00	645.533.827,20	(76.488.172,80)	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	722.022.000,00	645.533.827,20	(76.488.172,80)	
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	702.285.400,00	372.007.325,00	(330.278.075,00)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	702.285.400,00	372.007.325,00	(330.278.075,00)	
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	10.850.000,00	6.250.000,00	(4.600.000,00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6.648.302.773,00	5.967.219.175,50	(681.083.597,50)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6.637.452.773,00)	(5.960.969.175,50)	676.483.597,50	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
: 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
01.05 01.05.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.951.237.859,00	3.621.825.912,60	(329.411.946,40)	
01.05 01.05.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	944.799.000,00	801.762.615,00	(143.036.385,00)	
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	944.799.000,00	801.762.615,00	(143.036.385,00)	
01.05 01.05.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.006.438.859,00	2.820.063.297,60	(186.375.561,40)	
01.05 01.05.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	222.290.959,00	215.531.327,00	(6.759.632,00)	
01.05 01.05.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	34.820.000,00	34.732.591,00	(87.409,00)	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.820.000,00	34.732.591,00	(87.409,00)	
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	187.470.959,00	180.798.736,00	(6.672.223,00)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	169.590.959,00	163.018.736,00	(6.572.223,00)	
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	17.880.000,00	17.780.000,00	(100.000,00)	
01.05 01.05.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448.450.000,00	371.900.449,00	(76.549.551,00)	
01.05 01.05.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	170.000.000,00	169.623.779,00	(376.221,00)	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.884.395,00	(115.605,00)	
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	120.000.000,00	119.739.384,00	(260.616,00)	
01.05 01.05.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	278.450.000,00	202.276.670,00	(76.173.330,00)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	278.450.000,00	202.276.670,00	(76.173.330,00)	
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	540.000,00	540.000,00	-	
01.05 01.05.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	540.000,00	540.000,00	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	-	
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.05 01.05.03 033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	2.335.157.900,00	2.232.091.521,60	(103.066.378,40)	
01.05 01.05.03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	909.673.600,00	896.281.294,40	(13.392.305,60)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	909.673.600,00	896.281.294,40	(13.392.305,60)	
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.05 01.05.03 033 002	Penanganan Bencana Alam	1.275.484.300,00	1.189.349.727,20	(86.134.572,80)	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.188.484.300,00	1.104.979.727,20	(83.504.572,80)	
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3	Belanja Modal	87.000.000,00	84.370.000,00	(2.630.000,00)	
01.05 01.05.03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	150.000.000,00	146.460.500,00	(3.539.500,00)	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.460.500,00	(3.539.500,00)	
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3.951.237.859,00	3.621.825.912,60	(329.411.946,40)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3.951.237.859,00)	(3.621.825.912,60)	329.411.946,40	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL
 ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
01.06 01.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	11.063.947.607,00	10.596.828.300,97	(467.119.306,03)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.580.279.000,00	3.396.309.931,00	(183.969.069,00)	
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.580.279.000,00	3.396.309.931,00	(183.969.069,00)	
01.06 01.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7.483.668.607,00	7.200.518.369,97	(283.150.237,03)	
01.06 01.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.372.313.388,00	1.355.076.066,80	(17.237.321,20)	
01.06 01.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	99.960.000,00	98.471.110,00	(1.488.890,00)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	99.960.000,00	98.471.110,00	(1.488.890,00)	
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.272.353.388,00	1.256.604.956,80	(15.748.431,20)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.237.272.288,00	1.222.456.456,80	(14.815.831,20)	
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	35.081.100,00	34.148.500,00	(932.600,00)	
01.06 01.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	587.282.400,00	567.060.770,07	(20.221.629,93)	
01.06 01.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	312.338.000,00	310.957.850,00	(1.380.150,00)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.338.000,00	16.542.200,00	(795.800,00)	
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	295.000.000,00	294.415.650,00	(584.350,00)	
01.06 01.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	274.944.400,00	256.102.920,07	(18.841.479,93)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	274.944.400,00	256.102.920,07	(18.841.479,93)	
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.500.000,00	12.275.000,00	(225.000,00)	
01.06 01.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.275.000,00	(225.000,00)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.275.000,00	(225.000,00)	
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.703.611.879,00	3.469.580.889,70	(234.030.989,30)	
01.06 01.06.01 034 001	Perlindungan Sosial	225.083.600,00	186.592.014,40	(38.491.585,60)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1	Belanja Pegawai	86.760.000,00	82.800.000,00	(3.960.000,00)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138.323.600,00	103.792.014,40	(34.531.585,60)	
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 002	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	620.929.000,00	589.226.887,20	(31.702.112,80)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1	Belanja Pegawai	172.200.000,00	168.000.000,00	(4.200.000,00)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	448.729.000,00	421.226.887,20	(27.502.112,80)	
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.06 01.06.01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1.118.914.400,00	985.122.732,80	(133.791.667,20)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1	Belanja Pegawai	160.790.000,00	102.140.000,00	(58.650.000,00)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	958.124.400,00	882.982.732,80	(75.141.667,20)	
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	1.738.684.879,00	1.708.639.255,30	(30.045.623,70)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.550.000,00	(250.000,00)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.884.879,00	1.671.089.255,30	(29.795.623,70)	
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	752.564.500,00	751.758.400,20	(806.099,80)	
01.06 01.06.01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS	158.318.500,00	158.260.903,40	(57.596,60)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	-	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.118.500,00	97.060.903,40	(57.596,60)	
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS	594.246.000,00	593.497.496,80	(748.503,20)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1	Belanja Pegawai	120.600.000,00	120.600.000,00	-	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	473.646.000,00	472.897.496,80	(748.503,20)	
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	1.055.396.440,00	1.044.767.243,20	(10.629.196,80)	
01.06 01.06.01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	685.939.440,00	682.104.928,80	(3.834.511,20)	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1	Belanja Pegawai	342.903.000,00	342.903.000,00	-	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	320.036.440,00	316.211.928,80	(3.824.511,20)	
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3	Belanja Modal	23.000.000,00	22.990.000,00	(10.000,00)	
01.06 01.06.01 036 002	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial /PSKS	369.457.000,00	362.662.314,40	(6.794.685,60)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	-	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	337.057.000,00	330.262.314,40	(6.794.685,60)	
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	11.063.947.607,00	10.596.828.300,97	(467.119.306,03)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(11.063.947.607,00)	(10.596.828.300,97)	467.119.306,03	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.02 02.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.665.716.765,00	5.326.198.311,51	(339.518.453,49)	
02.02 02.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.941.933.000,00	1.652.737.015,00	(289.195.985,00)	
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.941.933.000,00	1.652.737.015,00	(289.195.985,00)	
02.02 02.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.723.783.765,00	3.673.461.296,51	(50.322.468,49)	
02.02 02.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	679.240.918,00	650.637.893,30	(28.603.024,70)	
02.02 02.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85.032.000,00	84.371.450,00	(660.550,00)	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85.032.000,00	84.371.450,00	(660.550,00)	
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 020	Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Kantor	594.208.918,00	566.266.443,30	(27.942.474,70)	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	562.258.918,00	534.651.443,30	(27.607.474,70)	
02.02 02.02.01 001 020 5 2 3	Belanja Modal	31.950.000,00	31.615.000,00	(335.000,00)	
02.02 02.02.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.659.928,00	227.586.297,00	(3.073.631,00)	
02.02 02.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	178.106.928,00	175.385.000,00	(2.721.928,00)	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	175.706.928,00	172.985.000,00	(2.721.928,00)	
02.02 02.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	52.553.000,00	52.201.297,00	(351.703,00)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.553.000,00	52.201.297,00	(351.703,00)	
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.402.824,00	71.321.194,40	(81.629,60)	
02.02 02.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	71.402.824,00	71.321.194,40	(81.629,60)	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71.402.824,00	71.321.194,40	(81.629,60)	
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	827.746.108,00	823.567.387,60	(4.178.720,40)	
02.02 02.02.01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	156.601.784,00	154.384.264,40	(2.217.519,60)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	-	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56.451.784,00	56.418.614,40	(33.169,60)	
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3	Belanja Modal	100.000.000,00	97.815.650,00	(2.184.350,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.02 02.02.01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	292.942.324,00	292.770.594,40	(171.729,60)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	-	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	277.342.324,00	277.170.594,40	(171.729,60)	
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 039 003	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	378.202.000,00	376.412.528,80	(1.789.471,20)	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1	Belanja Pegawai	71.100.000,00	71.100.000,00	-	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	307.102.000,00	305.312.528,80	(1.789.471,20)	
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 040	Program Perlindungan Anak	1.132.591.976,00	1.130.379.165,61	(2.212.810,39)	
02.02 02.02.01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	146.575.000,00	145.296.000,00	(1.279.000,00)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1	Belanja Pegawai	24.350.000,00	23.450.000,00	(900.000,00)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	122.225.000,00	121.846.000,00	(379.000,00)	
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.02 02.02.01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	986.016.976,00	985.083.165,61	(933.810,39)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	26.750.000,00	-	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	861.366.976,00	860.433.165,61	(933.810,39)	
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3	Belanja Modal	97.900.000,00	97.900.000,00	-	
02.07 02.02.01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	782.142.011,00	769.969.358,60	(12.172.652,40)	
02.07 02.02.01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	444.777.227,00	443.968.044,20	(809.182,80)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1	Belanja Pegawai	59.125.000,00	58.425.000,00	(700.000,00)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	385.652.227,00	385.543.044,20	(109.182,80)	
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.02.01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	337.364.784,00	326.001.314,40	(11.363.469,60)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1	Belanja Pegawai	180.025.000,00	179.975.000,00	(50.000,00)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	157.339.784,00	146.026.314,40	(11.313.469,60)	
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.665.716.765,00	5.326.198.311,51	(339.518.453,49)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.665.716.765,00)	(5.326.198.311,51)	339.518.453,49	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN
 ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.04 02.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	26.263.041.910,00	22.360.512.685,37	(3.902.529.224,63)	
02.04 02.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.222.729.000,00	2.103.902.967,00	(118.826.033,00)	
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.222.729.000,00	2.103.902.967,00	(118.826.033,00)	
02.04 02.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	24.040.312.910,00	20.256.609.718,37	(3.783.703.191,63)	
02.04 02.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	345.568.688,00	343.628.472,00	(1.940.216,00)	
02.04 02.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.078.000,00	30.776.169,00	(301.831,00)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31.078.000,00	30.776.169,00	(301.831,00)	
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	314.490.688,00	312.852.303,00	(1.638.385,00)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	311.490.688,00	309.852.603,00	(1.638.085,00)	
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	
02.04 02.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.935.000,00	43.534.050,00	(2.400.950,00)	
02.04 02.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	-	
02.04 02.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.435.000,00	43.034.050,00	(2.400.950,00)	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.435.000,00	43.034.050,00	(2.400.950,00)	
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.773.080,00	60.684.940,00	(88.140,00)	
02.04 02.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.773.080,00	60.684.940,00	(88.140,00)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.773.080,00	60.684.940,00	(88.140,00)	
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	23.083.120.100,00	19.307.199.269,37	(3.775.920.830,63)	
02.04 02.04.01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	91.619.820,00	80.780.789,00	(10.839.031,00)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1	Belanja Pegawai	43.450.000,00	43.450.000,00	-	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.169.820,00	37.330.789,00	(10.839.031,00)	
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.04 02.04.01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	21.678.182.040,00	17.963.911.200,00	(3.714.270.840,00)	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.753.040,00	37.199.280,00	(5.553.760,00)	
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3	Belanja Modal	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	(3.708.717.080,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.04 02.04.01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	73.768.240,00	73.638.980,00	(129.260,00)	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.368.240,00	58.238.980,00	(129.260,00)	
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.04.01 042 004	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	695.175.000,00	650.652.800,37	(44.522.199,63)	
05.01 02.04.01 042 004 5 2 1	Belanja Pegawai	134.000.000,00	134.000.000,00	-	
05.01 02.04.01 042 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	351.141.000,00	312.172.750,00	(38.968.250,00)	
05.01 02.04.01 042 004 5 2 3	Belanja Modal	210.034.000,00	204.480.050,37	(5.553.949,63)	
05.01 02.04.01 042 005	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	544.375.000,00	538.215.500,00	(6.159.500,00)	
05.01 02.04.01 042 005 5 2 1	Belanja Pegawai	112.100.000,00	112.100.000,00	-	
05.01 02.04.01 042 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	432.275.000,00	426.115.500,00	(6.159.500,00)	
05.01 02.04.01 042 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.03 02.04.01 024	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	428.095.562,00	425.159.227,00	(2.936.335,00)	
01.03 02.04.01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	321.342.682,00	318.570.967,00	(2.771.715,00)	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	171.002.682,00	168.236.422,00	(2.766.260,00)	
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3	Belanja Modal	150.340.000,00	150.334.545,00	(5.455,00)	
01.03 02.04.01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	76.478.040,00	76.395.680,00	(82.360,00)	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.063.040,00	75.015.680,00	(47.360,00)	
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3	Belanja Modal	1.415.000,00	1.380.000,00	(35.000,00)	
01.03 02.04.01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	30.274.840,00	30.192.580,00	(82.260,00)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29.874.840,00	29.828.580,00	(46.260,00)	
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3	Belanja Modal	400.000,00	364.000,00	(36.000,00)	
01.03 02.04.01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	76.820.480,00	76.403.760,00	(416.720,00)	
01.03 02.04.01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	44.862.240,00	44.482.780,00	(379.460,00)	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.561.040,00	36.510.580,00	(50.460,00)	
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3	Belanja Modal	3.051.200,00	2.722.200,00	(329.000,00)	
01.03 02.04.01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	577.000,00	577.000,00	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	397.000,00	397.000,00	-	
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3	Belanja Modal	180.000,00	180.000,00	-	
01.03 02.04.01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	31.381.240,00	31.343.980,00	(37.260,00)	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.853.040,00	28.815.780,00	(37.260,00)	
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3	Belanja Modal	2.528.200,00	2.528.200,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	26.263.041.910,00	22.360.512.685,37	(3.902.529.224,63)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(26.263.041.910,00)	(22.360.512.685,37)	3.902.529.224,63	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 0102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	
02.05 02.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	42.778.234.700,00	41.106.819.048,49	(1.671.415.651,51)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.513.561.975,00	12.996.155.293,00	(517.406.682,00)	
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	13.513.561.975,00	12.996.155.293,00	(517.406.682,00)	
02.05 02.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	29.264.672.725,00	28.110.663.755,49	(1.154.008.969,51)	
02.05 02.05.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.075.330.306,00	3.041.157.657,81	(34.172.648,19)	
02.05 02.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.393.730,00	13.923.730,00	(470.000,00)	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.393.730,00	13.923.730,00	(470.000,00)	
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	3.060.936.576,00	3.027.233.927,81	(33.702.648,19)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.054.136.576,00	3.020.463.927,81	(33.672.648,19)	
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	6.800.000,00	6.770.000,00	(30.000,00)	
02.05 02.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.101.958.000,00	1.083.535.272,31	(18.422.727,69)	
02.05 02.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	60.000.000,00	59.970.628,31	(29.371,69)	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.970.628,31	(29.371,69)	
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.041.958.000,00	1.023.564.644,00	(18.393.356,00)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.958.000,00	1.006.564.644,00	(18.393.356,00)	
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
02.05 02.05.01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.466.600,00	6.466.600,00	-	
02.05 02.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	6.466.600,00	6.466.600,00	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.466.600,00	6.466.600,00	-	
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.05 02.05.01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	1.274.019.960,00	1.263.145.661,00	(10.874.299,00)	
02.05 02.05.01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	211.419.080,00	211.208.560,00	(210.520,00)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22.550.000,00	22.550.000,00	-	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	188.869.080,00	188.658.560,00	(210.520,00)	
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	1.062.600.880,00	1.051.937.101,00	(10.663.779,00)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.053.665.880,00	1.043.002.101,00	(10.663.779,00)	
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3	Belanja Modal	8.935.000,00	8.935.000,00	-	
02.05 02.05.01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	929.616.850,00	917.687.470,00	(11.929.380,00)	
02.05 02.05.01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	539.747.700,00	530.126.280,00	(9.621.420,00)	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532.247.700,00	522.626.280,00	(9.621.420,00)	
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	109.754.910,00	109.498.550,00	(256.360,00)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	109.754.910,00	109.498.550,00	(256.360,00)	
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	280.114.240,00	278.062.640,00	(2.051.600,00)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	280.114.240,00	278.062.640,00	(2.051.600,00)	
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.05 02.05.01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	6.701.669.470,00	6.558.842.490,00	(142.826.980,00)	
02.05 02.05.01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	1.570.569.800,00	1.545.092.911,00	(25.476.889,00)	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	965.950.380,00	943.754.450,00	(22.195.930,00)	
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3	Belanja Modal	604.619.420,00	601.338.461,00	(3.280.959,00)	
02.05 02.05.01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	5.131.099.670,00	5.013.749.579,00	(117.350.091,00)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.096.991.670,00	4.980.978.079,00	(116.013.591,00)	
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3	Belanja Modal	34.108.000,00	32.771.500,00	(1.336.500,00)	
01.03 02.05.01 046	Program Pengelolaan Persampahan	16.175.611.539,00	15.239.828.604,37	(935.782.934,63)	
01.03 02.05.01 046 001	Pengurangan Sampah	1.228.614.112,00	1.223.698.446,40	(4.915.665,60)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1	Belanja Pegawai	244.350.000,00	244.350.000,00	-	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	973.964.112,00	969.048.446,40	(4.915.665,60)	
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3	Belanja Modal	10.300.000,00	10.300.000,00	-	
01.03 02.05.01 046 002	Penanganan Sampah	3.280.644.746,00	3.280.398.546,00	(246.200,00)	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.978.445.746,00	2.978.445.746,00	-	
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3	Belanja Modal	302.199.000,00	301.952.800,00	(246.200,00)	
01.03 02.05.01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	986.960.250,00	909.194.111,00	(77.766.139,00)	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	986.960.250,00	909.194.111,00	(77.766.139,00)	
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
01.03 02.05.01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	10.679.392.431,00	9.826.537.500,97	(852.854.930,03)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1	Belanja Pegawai	676.800.000,00	465.150.000,00	(211.650.000,00)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.002.592.431,00	9.361.387.500,97	(641.204.930,03)	
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	42.778.234.700,00	41.106.819.048,49	(1.671.415.651,51)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(40.129.135.200,00)	(38.309.026.743,49)	1.820.108.456,51	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.06 02.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.101.826.500,00	4.934.665.617,00	(167.160.883,00)	
02.06 02.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.484.940.000,00	2.350.133.561,00	(134.806.439,00)	
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.484.940.000,00	2.350.133.561,00	(134.806.439,00)	
02.06 02.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.616.886.500,00	2.584.532.056,00	(32.354.444,00)	
02.06 02.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.885.500,00	809.588.232,00	(6.297.268,00)	
02.06 02.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	83.812.000,00	83.690.220,00	(121.780,00)	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	83.812.000,00	83.690.220,00	(121.780,00)	
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	732.073.500,00	725.898.012,00	(6.175.488,00)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723.323.500,00	717.198.012,00	(6.125.488,00)	
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8.750.000,00	8.700.000,00	(50.000,00)	
02.06 02.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.110.000,00	137.935.724,00	(174.276,00)	
02.06 02.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	39.675.000,00	39.665.000,00	(10.000,00)	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	39.675.000,00	39.665.000,00	(10.000,00)	
02.06 02.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98.435.000,00	98.270.724,00	(164.276,00)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	98.435.000,00	98.270.724,00	(164.276,00)	
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.356.000,00	13.356.000,00	-	
02.06 02.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	13.356.000,00	13.356.000,00	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.356.000,00	13.356.000,00	-	
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.120.957.000,00	1.099.944.760,00	(21.012.240,00)	
02.06 02.06.01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	1.053.309.000,00	1.034.244.120,00	(19.064.880,00)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4.505.000,00	2.930.000,00	(1.575.000,00)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.048.804.000,00	1.031.314.120,00	(17.489.880,00)	
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	67.648.000,00	65.700.640,00	(1.947.360,00)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.648.000,00	65.700.640,00	(1.947.360,00)	
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.06 02.06.01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	307.081.000,00	305.302.900,00	(1.778.100,00)	
02.06 02.06.01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	241.809.000,00	240.137.280,00	(1.671.720,00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1	Belanja Pegawai	44.800.000,00	43.520.000,00	(1.280.000,00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	197.009.000,00	196.617.280,00	(391.720,00)	
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	65.272.000,00	65.165.620,00	(106.380,00)	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28.400.000,00	28.400.000,00	-	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.872.000,00	36.765.620,00	(106.380,00)	
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 049	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	221.497.000,00	218.404.440,00	(3.092.560,00)	
02.06 02.06.01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	58.900.000,00	58.153.000,00	(747.000,00)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	58.153.000,00	(747.000,00)	
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.597.000,00	160.251.440,00	(2.345.560,00)	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	162.597.000,00	160.251.440,00	(2.345.560,00)	
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.101.826.500,00	4.934.665.617,00	(167.160.883,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.101.826.500,00)	(4.934.665.617,00)	167.160.883,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	1)PD No 5/2012
02.07 02.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.941.520.344,00	5.816.471.821,00	(125.048.523,00)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.592.898.000,00	2.524.649.913,00	(68.248.087,00)	
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.592.898.000,00	2.524.649.913,00	(68.248.087,00)	
02.07 02.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.348.622.344,00	3.291.821.908,00	(56.800.436,00)	
02.07 02.07.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.659.908,00	708.787.924,00	(8.871.984,00)	
02.07 02.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	33.775.000,00	33.708.000,00	(67.000,00)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.775.000,00	33.708.000,00	(67.000,00)	
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	683.884.908,00	675.079.924,00	(8.804.984,00)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	262.050.000,00	262.050.000,00	-	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	421.834.908,00	413.029.924,00	(8.804.984,00)	
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.383.000,00	82.975.900,00	(2.407.100,00)	
02.07 02.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	64.704.000,00	64.704.000,00	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	64.704.000,00	64.704.000,00	-	
02.07 02.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.679.000,00	18.271.900,00	(2.407.100,00)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.679.000,00	18.271.900,00	(2.407.100,00)	
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.075.000,00	2.075.000,00	-	
02.07 02.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000,00	2.075.000,00	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	2.075.000,00	-	
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	2.543.504.436,00	2.497.983.084,00	(45.521.352,00)	
02.07 02.07.01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	52.796.600,00	52.496.600,00	(300.000,00)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1	Belanja Pegawai	22.650.000,00	22.650.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.146.600,00	29.846.600,00	(300.000,00)	
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	700.000,00	700.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	76.568.500,00	76.568.500,00	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.893.500,00	75.893.500,00	-	
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	530.320.784,00	514.057.496,00	(16.263.288,00)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1	Belanja Pegawai	107.000.000,00	103.250.000,00	(3.750.000,00)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	146.955.784,00	144.657.496,00	(2.298.288,00)	
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3	Belanja Modal	276.365.000,00	266.150.000,00	(10.215.000,00)	
02.07 02.07.01 050 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	520.829.784,00	513.820.496,00	(7.009.288,00)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1	Belanja Pegawai	130.050.000,00	128.250.000,00	(1.800.000,00)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	209.279.784,00	206.185.496,00	(3.094.288,00)	
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3	Belanja Modal	181.500.000,00	179.385.000,00	(2.115.000,00)	
02.07 02.07.01 050 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	683.355.784,00	671.874.496,00	(11.481.288,00)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1	Belanja Pegawai	126.700.000,00	123.200.000,00	(3.500.000,00)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	556.655.784,00	548.674.496,00	(7.981.288,00)	
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 050 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	550.619.484,00	540.152.496,00	(10.466.988,00)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1	Belanja Pegawai	61.850.000,00	59.175.000,00	(2.675.000,00)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	238.769.484,00	232.421.496,00	(6.347.988,00)	
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3	Belanja Modal	250.000.000,00	248.556.000,00	(1.444.000,00)	
02.07 02.07.01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	128.313.500,00	128.313.000,00	(500,00)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	119.313.500,00	119.313.000,00	(500,00)	
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	25.000.000,00	34.140.000,00	9.140.000,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.941.520.344,00	5.816.471.821,00	(125.048.523,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.916.520.344,00)	(5.782.331.821,00)	134.188.523,00	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.02 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.929.992.749,00	5.732.308.884,00	(197.683.865,00)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.218.391.000,00	2.069.245.689,00	(149.145.311,00)	
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.218.391.000,00	2.069.245.689,00	(149.145.311,00)	
02.07 02.07.02 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.711.601.749,00	3.663.063.195,00	(48.538.554,00)	
02.07 02.07.02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.154.889.765,00	1.115.235.750,00	(39.654.015,00)	
02.07 02.07.02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	49.736.045,00	49.735.045,00	(1.000,00)	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.736.045,00	49.735.045,00	(1.000,00)	
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 001 019 5 2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.105.153.720,00	1.065.500.705,00	(39.653.015,00)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	267.000.000,00	257.750.000,00	(9.250.000,00)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	597.825.860,00	567.622.845,00	(30.203.015,00)	
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3	Belanja Modal	240.327.860,00	240.127.860,00	(200.000,00)	
02.07 02.07.02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.936.560,00	273.982.770,00	(3.953.790,00)	
02.07 02.07.02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	236.261.000,00	236.261.000,00	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3	Belanja Modal	236.261.000,00	236.261.000,00	-	
02.07 02.07.02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41.675.560,00	37.721.770,00	(3.953.790,00)	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41.675.560,00	37.721.770,00	(3.953.790,00)	
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.676.400,00	3.676.400,00	-	
02.07 02.07.02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.676.400,00	3.676.400,00	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.676.400,00	3.676.400,00	-	
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis	2.275.099.024,00	2.270.168.275,00	(4.930.749,00)	
02.07 02.07.02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	42.227.500,00	42.222.500,00	(5.000,00)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1	Belanja Pegawai	28.850.000,00	28.850.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.377.500,00	13.372.500,00	(5.000,00)	
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	80.192.184,00	80.091.421,00	(100.763,00)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77.192.184,00	77.091.421,00	(100.763,00)	
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.01 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	65.024.400,00	65.024.400,00	-	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	-	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59.324.400,00	59.324.400,00	-	
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.02 051 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	587.680.320,00	584.929.018,00	(2.751.302,00)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1	Belanja Pegawai	120.700.000,00	120.550.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127.021.320,00	124.420.018,00	(2.601.302,00)	
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3	Belanja Modal	339.959.000,00	339.959.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	816.947.020,00	816.757.618,00	(189.402,00)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1	Belanja Pegawai	116.900.000,00	116.900.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260.773.020,00	260.739.618,00	(33.402,00)	
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3	Belanja Modal	439.274.000,00	439.118.000,00	(156.000,00)	
02.07 02.07.02 051 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	576.512.600,00	574.628.318,00	(1.884.282,00)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1	Belanja Pegawai	108.300.000,00	108.300.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	126.914.600,00	126.005.318,00	(909.282,00)	
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3	Belanja Modal	341.298.000,00	340.323.000,00	(975.000,00)	
02.07 02.07.02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	106.515.000,00	106.515.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103.515.000,00	103.515.000,00	-	
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.929.992.749,00	5.732.308.884,00	(197.683.865,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.929.992.749,00)	(5.732.308.884,00)	197.683.865,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	7.470.422.503,00	7.287.871.947,55	(182.550.555,45)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.011.622.000,00	2.881.217.388,00	(130.404.612,00)	
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.011.622.000,00	2.881.217.388,00	(130.404.612,00)	
02.07 02.07.03 00 00	BELANJA LANGSUNG	4.458.800.503,00	4.406.654.559,55	(52.145.943,45)	
02.07 02.07.03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.519.400,00	637.992.182,70	(17.527.217,30)	
02.07 02.07.03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.895.200,00	15.895.200,00	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.895.200,00	15.895.200,00	-	
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	639.624.200,00	622.096.982,70	(17.527.217,30)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	384.300.000,00	384.300.000,00	-	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235.574.200,00	218.046.982,70	(17.527.217,30)	
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3	Belanja Modal	19.750.000,00	19.750.000,00	-	
02.07 02.07.03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332.364.874,00	329.954.058,88	(2.410.815,12)	
02.07 02.07.03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	312.738.430,00	312.625.510,88	(112.919,12)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	312.738.430,00	312.625.510,88	(112.919,12)	
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	19.626.444,00	17.328.548,00	(2.297.896,00)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19.626.444,00	17.328.548,00	(2.297.896,00)	
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.530.000,00	1.530.000,00	-	
02.07 02.07.03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.530.000,00	1.530.000,00	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	-	
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	3.469.386.229,00	3.437.178.317,97	(32.207.911,03)	
02.07 02.07.03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	58.371.000,00	58.251.000,00	(120.000,00)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.500.000,00	(100.000,00)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.771.000,00	24.751.000,00	(20.000,00)	
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	52.149.568,00	51.993.654,00	(155.914,00)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.149.568,00	51.993.654,00	(155.914,00)	
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	92.325.000,00	92.325.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1	Belanja Pegawai	15.325.000,00	15.325.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	633.663.409,00	624.478.961,00	(9.184.448,00)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1	Belanja Pegawai	101.500.000,00	101.500.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	532.163.409,00	522.978.961,00	(9.184.448,00)	
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	502.737.900,00	492.369.400,00	(10.368.500,00)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1	Belanja Pegawai	53.550.000,00	53.050.000,00	(500.000,00)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	449.187.900,00	439.319.400,00	(9.868.500,00)	
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	582.149.784,00	581.242.336,00	(907.448,00)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1	Belanja Pegawai	143.200.000,00	143.200.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	247.299.784,00	247.176.336,00	(123.448,00)	
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3	Belanja Modal	191.650.000,00	190.866.000,00	(784.000,00)	
02.07 02.07.03 052 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	784.694.384,00	777.239.130,97	(7.455.253,03)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1	Belanja Pegawai	205.200.000,00	205.200.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	344.166.749,00	342.412.936,00	(1.753.813,00)	
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3	Belanja Modal	235.327.635,00	229.626.194,97	(5.701.440,03)	
02.07 02.07.03 052 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	659.821.184,00	655.804.836,00	(4.016.348,00)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1	Belanja Pegawai	127.000.000,00	127.000.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	393.727.684,00	390.157.836,00	(3.569.848,00)	
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3	Belanja Modal	139.093.500,00	138.647.000,00	(446.500,00)	
02.07 02.07.03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	103.474.000,00	103.474.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103.474.000,00	103.474.000,00	-	
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7.470.422.503,00	7.287.871.947,55	(182.550.555,45)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7.470.422.503,00)	(7.287.871.947,55)	182.550.555,45	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.04 00 00 5	BELANJA DAERAH	4.573.298.984,00	4.438.960.697,20	(134.338.286,80)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.196.668.000,00	2.111.079.999,00	(85.588.001,00)	
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.196.668.000,00	2.111.079.999,00	(85.588.001,00)	
02.07 02.07.04 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.376.630.984,00	2.327.880.698,20	(48.750.285,80)	
02.07 02.07.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.584.604,00	456.395.519,80	(16.189.084,20)	
02.07 02.07.04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12.991.200,00	12.991.200,00	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.991.200,00	12.991.200,00	-	
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	459.593.404,00	443.404.319,80	(16.189.084,20)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	164.250.000,00	164.250.000,00	-	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	293.352.404,00	277.163.319,80	(16.189.084,20)	
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.991.000,00	1.991.000,00	-	
02.07 02.07.04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.050.000,00	20.746.223,00	(1.303.777,00)	
02.07 02.07.04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	7.864.000,00	7.339.000,00	(525.000,00)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.864.000,00	3.537.000,00	(327.000,00)	
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3	Belanja Modal	4.000.000,00	3.802.000,00	(198.000,00)	
02.07 02.07.04 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.186.000,00	13.407.223,00	(778.777,00)	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14.186.000,00	13.407.223,00	(778.777,00)	
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
02.07 02.07.04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1.878.496.380,00	1.847.238.955,40	(31.257.424,60)	
02.07 02.07.04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	32.410.000,00	32.310.000,00	(100.000,00)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1	Belanja Pegawai	20.750.000,00	20.750.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	11.560.000,00	(100.000,00)	
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	102.153.640,00	102.023.217,60	(130.422,40)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	102.153.640,00	102.023.217,60	(130.422,40)	
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	31.280.000,00	30.375.000,00	(905.000,00)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.380.000,00	29.475.000,00	(905.000,00)	
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.04 053 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	538.276.000,00	529.031.200,00	(9.244.800,00)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1	Belanja Pegawai	106.600.000,00	102.500.000,00	(4.100.000,00)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	362.376.000,00	357.802.200,00	(4.573.800,00)	
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3	Belanja Modal	69.300.000,00	68.729.000,00	(571.000,00)	
02.07 02.07.04 053 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	594.198.900,00	588.738.197,80	(5.460.702,20)	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1	Belanja Pegawai	145.800.000,00	144.500.000,00	(1.300.000,00)	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	248.898.900,00	245.579.078,89	(3.319.821,11)	
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3	Belanja Modal	199.500.000,00	198.659.118,91	(840.881,09)	
02.07 02.07.04 053 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	532.584.340,00	519.127.840,00	(13.456.500,00)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	111.000.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	189.671.840,00	181.667.840,00	(8.004.000,00)	
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3	Belanja Modal	231.912.500,00	226.460.000,00	(5.452.500,00)	
02.07 02.07.04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	47.593.500,00	45.633.500,00	(1.960.000,00)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40.843.500,00	38.883.500,00	(1.960.000,00)	
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4.573.298.984,00	4.438.960.697,20	(134.338.286,80)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.573.298.984,00)	(4.438.960.697,20)	134.338.286,80	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.05 00 00 5	BELANJA DAERAH	4.186.608.563,00	3.986.570.692,00	(200.037.871,00)	
02.07 02.07.05 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.665.380.000,00	1.496.529.001,00	(168.850.999,00)	
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.665.380.000,00	1.496.529.001,00	(168.850.999,00)	
02.07 02.07.05 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.521.228.563,00	2.490.041.691,00	(31.186.872,00)	
02.07 02.07.05 001	Program Pelayanan Administrasi Perk	719.853.935,00	705.635.028,00	(14.218.907,00)	
02.07 02.07.05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.496.000,00	26.374.505,00	(121.495,00)	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.496.000,00	26.374.505,00	(121.495,00)	
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	693.357.935,00	679.260.523,00	(14.097.412,00)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	188.950.000,00	183.000.000,00	(5.950.000,00)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	464.267.935,00	456.920.523,00	(7.347.412,00)	
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3	Belanja Modal	40.140.000,00	39.340.000,00	(800.000,00)	
02.07 02.07.05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.458.000,00	207.325.162,00	(132.838,00)	
02.07 02.07.05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	191.700.000,00	191.689.088,00	(10.912,00)	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.949.088,00	(10.912,00)	
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3	Belanja Modal	184.740.000,00	184.740.000,00	-	
02.07 02.07.05 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.758.000,00	15.636.074,00	(121.926,00)	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.758.000,00	15.636.074,00	(121.926,00)	
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.439.920,00	1.434.800,00	(5.120,00)	
02.07 02.07.05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.439.920,00	1.434.800,00	(5.120,00)	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.439.920,00	1.434.800,00	(5.120,00)	
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.592.476.708,00	1.575.646.701,00	(16.830.007,00)	
02.07 02.07.05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	58.113.000,00	57.756.500,00	(356.500,00)	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1	Belanja Pegawai	31.720.000,00	31.560.000,00	(160.000,00)	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.393.000,00	26.196.500,00	(196.500,00)	
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	38.105.974,00	38.071.397,00	(34.577,00)	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38.105.974,00	38.071.397,00	(34.577,00)	
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	4.285.000,00	4.285.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.575.000,00	2.575.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.710.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.05 054 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	720.914.406,00	710.256.122,00	(10.658.284,00)	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1	Belanja Pegawai	188.300.000,00	188.300.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	352.818.206,00	344.694.122,00	(8.124.084,00)	
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3	Belanja Modal	179.796.200,00	177.262.000,00	(2.534.200,00)	
02.07 02.07.05 054 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	713.651.328,00	707.870.682,00	(5.780.646,00)	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1	Belanja Pegawai	124.500.000,00	124.500.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	587.801.328,00	582.170.682,00	(5.630.646,00)	
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3	Belanja Modal	1.350.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	57.407.000,00	57.407.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	47.407.000,00	47.407.000,00	-	
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4.186.608.563,00	3.986.570.692,00	(200.037.871,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.186.608.563,00)	(3.986.570.692,00)	200.037.871,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.06 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.587.460.800,00	3.496.062.080,00	(91.398.720,00)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.563.751.000,00	1.486.173.320,00	(77.577.680,00)	
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.563.751.000,00	1.486.173.320,00	(77.577.680,00)	
02.07 02.07.06 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.023.709.800,00	2.009.888.760,00	(13.821.040,00)	
02.07 02.07.06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	636.778.000,00	626.275.350,00	(10.502.650,00)	
02.07 02.07.06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	23.680.000,00	23.657.200,00	(22.800,00)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000,00	23.657.200,00	(22.800,00)	
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	613.098.000,00	602.618.150,00	(10.479.850,00)	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	219.600.000,00	219.600.000,00	-	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	393.498.000,00	383.018.150,00	(10.479.850,00)	
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.722.000,00	33.434.310,00	(287.690,00)	
02.07 02.07.06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	16.722.000,00	16.721.023,00	(977,00)	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.612.000,00	7.611.023,00	(977,00)	
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3	Belanja Modal	9.110.000,00	9.110.000,00	-	
02.07 02.07.06 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000,00	16.713.287,00	(286.713,00)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.713.287,00	(286.713,00)	
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.883.000,00	28.737.920,00	(145.080,00)	
02.07 02.07.06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	28.883.000,00	28.737.920,00	(145.080,00)	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.883.000,00	28.737.920,00	(145.080,00)	
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1.324.326.800,00	1.321.441.180,00	(2.885.620,00)	
02.07 02.07.06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	108.709.000,00	108.621.700,00	(87.300,00)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	85.200.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.509.000,00	23.421.700,00	(87.300,00)	
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	27.246.000,00	27.114.720,00	(131.280,00)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.246.000,00	27.114.720,00	(131.280,00)	
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	19.430.000,00	19.340.000,00	(90.000,00)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.930.000,00	16.840.000,00	(90.000,00)	
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.06 055 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	576.675.000,00	575.221.320,00	(1.453.680,00)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1	Belanja Pegawai	101.800.000,00	100.800.000,00	(1.000.000,00)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	424.134.000,00	423.796.320,00	(337.680,00)	
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3	Belanja Modal	50.741.000,00	50.625.000,00	(116.000,00)	
02.07 02.07.06 055 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	531.021.800,00	530.030.020,00	(991.780,00)	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1	Belanja Pegawai	80.900.000,00	80.900.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	363.121.800,00	362.591.120,00	(530.680,00)	
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3	Belanja Modal	87.000.000,00	86.538.900,00	(461.100,00)	
02.07 02.07.06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	61.245.000,00	61.113.420,00	(131.580,00)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56.445.000,00	56.313.420,00	(131.580,00)	
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3.587.460.800,00	3.496.062.080,00	(91.398.720,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3.587.460.800,00)	(3.496.062.080,00)	91.398.720,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.756.916.908,00	3.642.998.871,99	(113.918.036,01)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.607.020.000,00	1.531.850.420,00	(75.169.580,00)	
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.607.020.000,00	1.531.850.420,00	(75.169.580,00)	
02.07 02.07.07 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.149.896.908,00	2.111.148.451,99	(38.748.456,01)	
02.07 02.07.07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659.294.456,00	634.419.316,00	(24.875.140,00)	
02.07 02.07.07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.918.700,00	22.918.700,00	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.918.700,00	22.918.700,00	-	
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	636.375.756,00	611.500.616,00	(24.875.140,00)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	183.000.000,00	183.000.000,00	-	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	393.601.456,00	368.732.316,00	(24.869.140,00)	
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3	Belanja Modal	59.774.300,00	59.768.300,00	(6.000,00)	
02.07 02.07.07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.856.000,00	26.415.811,00	(440.189,00)	
02.07 02.07.07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	4.170.000,00	4.169.155,00	(845,00)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	4.169.155,00	(845,00)	
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.686.000,00	22.246.656,00	(439.344,00)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.686.000,00	22.246.656,00	(439.344,00)	
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.371.200,00	5.371.200,00	-	
02.07 02.07.07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5.371.200,00	5.371.200,00	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.371.200,00	5.371.200,00	-	
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	1.458.375.252,00	1.444.942.124,99	(13.433.127,01)	
02.07 02.07.07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	27.778.400,00	27.778.400,00	-	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.400.000,00	18.400.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.378.400,00	9.378.400,00	-	
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	27.689.784,00	27.689.784,00	-	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.689.784,00	27.689.784,00	-	
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	48.786.000,00	48.786.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.386.000,00	36.386.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.07 056 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	639.526.784,00	636.459.122,99	(3.067.661,01)	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1	Belanja Pegawai	150.100.000,00	150.100.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	262.154.784,00	261.058.723,02	(1.096.060,98)	
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3	Belanja Modal	227.272.000,00	225.300.399,97	(1.971.600,03)	
02.07 02.07.07 056 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	634.060.784,00	623.695.534,00	(10.365.250,00)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1	Belanja Pegawai	102.200.000,00	102.200.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	191.576.784,00	183.449.534,00	(8.127.250,00)	
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3	Belanja Modal	340.284.000,00	338.046.000,00	(2.238.000,00)	
02.07 02.07.07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	80.533.500,00	80.533.284,00	(216,00)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	72.533.500,00	72.533.284,00	(216,00)	
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3.756.916.908,00	3.642.998.871,99	(113.918.036,01)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.756.916.908,00)	(3.642.998.871,99)	113.918.036,01	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Pracimoloyo	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	
02.07 02.07.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.228.916.891,00	5.060.627.477,24	(168.289.413,76)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.116.414.000,00	1.985.245.226,00	(131.168.774,00)	
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.116.414.000,00	1.985.245.226,00	(131.168.774,00)	
02.07 02.07.08 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.112.502.891,00	3.075.382.251,24	(37.120.639,76)	
02.07 02.07.08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	676.355.513,00	672.699.949,00	(3.655.564,00)	
02.07 02.07.08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24.703.100,00	24.577.100,00	(126.000,00)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.703.100,00	24.577.100,00	(126.000,00)	
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	651.652.413,00	648.122.849,00	(3.529.564,00)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	213.500.000,00	212.450.000,00	(1.050.000,00)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	433.612.413,00	431.282.849,00	(2.329.564,00)	
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3	Belanja Modal	4.540.000,00	4.390.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.751.265,00	35.580.075,00	(2.171.190,00)	
02.07 02.07.08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	18.030.178,00	18.028.178,00	(2.000,00)	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.030.178,00	18.028.178,00	(2.000,00)	
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.721.087,00	17.551.897,00	(2.169.190,00)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19.721.087,00	17.551.897,00	(2.169.190,00)	
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.477.500,00	2.477.500,00	-	
02.07 02.07.08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.477.500,00	2.477.500,00	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.477.500,00	2.477.500,00	-	
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	2.395.918.613,00	2.364.624.727,24	(31.293.885,76)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	28.732.500,00	28.679.900,00	(52.600,00)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	10.250.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.482.500,00	18.429.900,00	(52.600,00)	
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	67.193.568,00	66.797.832,00	(395.736,00)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.193.568,00	66.797.832,00	(395.736,00)	
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	34.712.800,00	34.712.800,00	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.812.800,00	33.812.800,00	-	
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	598.997.784,00	579.938.498,00	(19.059.286,00)	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1	Belanja Pegawai	119.250.000,00	119.250.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	288.622.784,00	269.563.498,00	(19.059.286,00)	
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3	Belanja Modal	191.125.000,00	191.125.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	634.292.784,00	623.790.168,24	(10.502.615,76)	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1	Belanja Pegawai	121.200.000,00	121.200.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323.359.784,00	319.772.669,00	(3.587.115,00)	
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3	Belanja Modal	189.733.000,00	182.817.499,24	(6.915.500,76)	
02.07 02.07.08 057 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	692.419.784,00	691.381.336,00	(1.038.448,00)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1	Belanja Pegawai	108.650.000,00	108.650.000,00	-	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	352.368.784,00	351.500.336,00	(868.448,00)	
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3	Belanja Modal	231.401.000,00	231.231.000,00	(170.000,00)	
02.07 02.07.08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	339.569.393,00	339.324.193,00	(245.200,00)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	226.111.393,00	226.089.193,00	(22.200,00)	
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3	Belanja Modal	113.458.000,00	113.235.000,00	(223.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	30.000.000,00	33.555.000,00	3.555.000,00	
	JUMLAH BELANJADAERAH :	5.228.916.891,00	5.060.627.477,24	(168.289.413,76)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.198.916.891,00)	(5.027.072.477,24)	171.844.413,76	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	
02.07 02.07.09 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.639.892.254,00	5.442.438.082,00	(197.454.172,00)	
02.07 02.07.09 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.183.507.000,00	2.028.374.147,00	(155.132.853,00)	
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.183.507.000,00	2.028.374.147,00	(155.132.853,00)	
02.07 02.07.09 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.456.385.254,00	3.414.063.935,00	(42.321.319,00)	
02.07 02.07.09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	675.260.120,00	669.241.621,00	(6.018.499,00)	
02.07 02.07.09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	23.809.500,00	23.756.500,00	(53.000,00)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.809.500,00	23.756.500,00	(53.000,00)	
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	651.450.620,00	645.485.121,00	(5.965.499,00)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	183.000.000,00	183.000.000,00	-	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	364.136.620,00	358.988.621,00	(5.147.999,00)	
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3	Belanja Modal	104.314.000,00	103.496.500,00	(817.500,00)	
02.07 02.07.09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.725.796,00	38.721.983,00	(3.813,00)	
02.07 02.07.09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	18.492.430,00	18.492.430,00	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	452.430,00	452.430,00	-	
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3	Belanja Modal	18.040.000,00	18.040.000,00	-	
02.07 02.07.09 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.233.366,00	20.229.553,00	(3.813,00)	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.233.366,00	20.229.553,00	(3.813,00)	
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	870.000,00	870.000,00	-	
02.07 02.07.09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	870.000,00	870.000,00	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	2.741.529.338,00	2.705.230.331,00	(36.299.007,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	59.553.000,00	59.550.000,00	(3.000,00)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.753.000,00	18.750.000,00	(3.000,00)	
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	49.084.586,00	49.019.654,00	(64.932,00)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	49.084.586,00	49.019.654,00	(64.932,00)	
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	13.210.000,00	13.210.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.110.000,00	9.110.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.09 058 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	1.007.338.784,00	997.536.021,58	(9.802.762,42)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1	Belanja Pegawai	193.300.000,00	193.300.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	529.538.784,00	524.409.021,58	(5.129.762,42)	
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3	Belanja Modal	284.500.000,00	279.827.000,00	(4.673.000,00)	
02.07 02.07.09 058 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	654.134.184,00	651.386.257,42	(2.747.926,58)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1	Belanja Pegawai	164.000.000,00	164.000.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	438.440.184,00	437.445.757,42	(994.426,58)	
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3	Belanja Modal	51.694.000,00	49.940.500,00	(1.753.500,00)	
02.07 02.07.09 058 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	680.919.784,00	658.151.398,00	(22.768.386,00)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1	Belanja Pegawai	169.300.000,00	164.250.000,00	(5.050.000,00)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	284.819.784,00	267.722.598,00	(17.097.186,00)	
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3	Belanja Modal	226.800.000,00	226.178.800,00	(621.200,00)	
02.07 02.07.09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	277.289.000,00	276.377.000,00	(912.000,00)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	-	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.989.000,00	271.077.000,00	(912.000,00)	
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	15.000.000,00	20.825.000,00	5.825.000,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.639.892.254,00	5.442.438.082,00	(197.454.172,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.624.892.254,00)	(5.421.613.082,00)	203.279.172,00	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.10 00 00 5	BELANJA DAERAH	4.440.286.582,00	4.316.840.808,00	(123.445.774,00)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.845.143.000,00	1.758.352.712,00	(86.790.288,00)	
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.845.143.000,00	1.758.352.712,00	(86.790.288,00)	
02.07 02.07.10 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.595.143.582,00	2.558.488.096,00	(36.655.486,00)	
02.07 02.07.10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.553.570,00	583.081.730,00	(11.471.840,00)	
02.07 02.07.10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.476.800,00	17.476.800,00	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.476.800,00	17.476.800,00	-	
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	577.076.770,00	565.604.930,00	(11.471.840,00)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	215.500.000,00	213.750.000,00	(1.750.000,00)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359.876.770,00	350.154.930,00	(9.721.840,00)	
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
02.07 02.07.10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.211.275,00	31.256.427,00	(1.954.848,00)	
02.07 02.07.10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	23.210.000,00	23.204.829,00	(5.171,00)	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	15.924.829,00	(5.171,00)	
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3	Belanja Modal	7.280.000,00	7.280.000,00	-	
02.07 02.07.10 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.001.275,00	8.051.598,00	(1.949.677,00)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.001.275,00	8.051.598,00	(1.949.677,00)	
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
02.07 02.07.10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	1.966.278.737,00	1.943.049.939,00	(23.228.798,00)	
02.07 02.07.10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	63.378.500,00	62.858.500,00	(520.000,00)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	22.900.000,00	(500.000,00)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39.978.500,00	39.958.500,00	(20.000,00)	
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	61.161.600,00	60.992.458,00	(169.142,00)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61.161.600,00	60.992.458,00	(169.142,00)	
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	40.147.000,00	40.147.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6.375.000,00	6.375.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.772.000,00	33.772.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.10 059 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	495.502.682,00	479.081.249,00	(16.421.433,00)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1	Belanja Pegawai	96.400.000,00	96.400.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	169.502.682,00	155.414.249,00	(14.088.433,00)	
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3	Belanja Modal	229.600.000,00	227.267.000,00	(2.333.000,00)	
02.07 02.07.10 059 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	741.998.715,00	738.876.583,00	(3.122.132,00)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1	Belanja Pegawai	168.800.115,00	168.800.000,00	(115,00)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	414.223.500,00	411.814.583,00	(2.408.917,00)	
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3	Belanja Modal	158.975.100,00	158.262.000,00	(713.100,00)	
02.07 02.07.10 059 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	532.857.240,00	529.861.149,00	(2.996.091,00)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1	Belanja Pegawai	121.700.000,00	121.700.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294.282.240,00	292.262.149,00	(2.020.091,00)	
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3	Belanja Modal	116.875.000,00	115.899.000,00	(976.000,00)	
02.07 02.07.10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	31.233.000,00	31.233.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.383.000,00	28.383.000,00	-	
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4.440.286.582,00	4.316.840.808,00	(123.445.774,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.440.286.582,00)	(4.316.840.808,00)	123.445.774,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.11 - KECAMATAN GANDOMANAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	1) PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.732.724.000,00	3.615.897.357,00	(116.826.643,00)	
02.07 02.07.11 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.527.411.000,00	1.457.378.304,00	(70.032.696,00)	
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.527.411.000,00	1.457.378.304,00	(70.032.696,00)	
02.07 02.07.11 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.205.313.000,00	2.158.519.053,00	(46.793.947,00)	
02.07 02.07.11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	608.619.000,00	579.939.468,00	(28.679.532,00)	
02.07 02.07.11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.274.000,00	16.268.500,00	(5.500,00)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.274.000,00	16.268.500,00	(5.500,00)	
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	592.345.000,00	563.670.968,00	(28.674.032,00)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	170.850.000,00	168.250.000,00	(2.600.000,00)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	416.395.000,00	390.320.968,00	(26.074.032,00)	
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3	Belanja Modal	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
02.07 02.07.11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.735.000,00	30.968.200,00	(1.766.800,00)	
02.07 02.07.11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	13.805.000,00	13.700.000,00	(105.000,00)	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3	Belanja Modal	13.805.000,00	13.700.000,00	(105.000,00)	
02.07 02.07.11 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18.930.000,00	17.268.200,00	(1.661.800,00)	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.930.000,00	17.268.200,00	(1.661.800,00)	
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.470.000,00	1.470.000,00	-	
02.07 02.07.11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	-	
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan	1.562.489.000,00	1.546.141.385,00	(16.347.615,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	62.005.000,00	61.980.000,00	(25.000,00)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1	Belanja Pegawai	38.675.000,00	38.650.000,00	(25.000,00)	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.330.000,00	23.330.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	36.688.000,00	36.574.300,00	(113.700,00)	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.688.000,00	36.574.300,00	(113.700,00)	
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	56.040.000,00	56.040.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.140.000,00	50.140.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	573.266.000,00	560.707.785,00	(12.558.215,00)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1	Belanja Pegawai	116.675.000,00	116.675.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	444.591.000,00	433.337.985,00	(11.253.015,00)	
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3	Belanja Modal	12.000.000,00	10.694.800,00	(1.305.200,00)	
02.07 02.07.11 060 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	793.591.000,00	789.940.300,00	(3.650.700,00)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1	Belanja Pegawai	146.750.000,00	146.750.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	640.841.000,00	637.190.300,00	(3.650.700,00)	
02.07 02.07.11 060 005 5 2 3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	40.899.000,00	40.899.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40.899.000,00	40.899.000,00	-	
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3.732.724.000,00	3.615.897.357,00	(116.826.643,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3.732.724.000,00)	(3.615.897.357,00)	116.826.643,00	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	
02.07 02.07.12 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasonoloyo	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	1)PD No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.630.838.819,00	5.392.712.405,40	(238.126.413,60)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.309.066.000,00	2.144.404.563,00	(164.661.437,00)	
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.309.066.000,00	2.144.404.563,00	(164.661.437,00)	
02.07 02.07.12 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.321.772.819,00	3.248.307.842,40	(73.464.976,60)	
02.07 02.07.12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.237.409,00	749.086.914,00	(6.150.495,00)	
02.07 02.07.12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28.150.000,00	27.522.000,00	(628.000,00)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	27.522.000,00	(628.000,00)	
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	727.087.409,00	721.564.914,00	(5.522.495,00)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	219.600.000,00	219.600.000,00	-	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	455.686.459,00	450.163.964,00	(5.522.495,00)	
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3	Belanja Modal	51.800.950,00	51.800.950,00	-	
02.07 02.07.12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.780.100,00	54.296.943,00	(4.483.157,00)	
02.07 02.07.12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	30.000.000,00	27.433.520,00	(2.566.480,00)	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.561.800,00	(2.438.200,00)	
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3	Belanja Modal	20.000.000,00	19.871.720,00	(128.280,00)	
02.07 02.07.12 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.780.100,00	26.863.423,00	(1.916.677,00)	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.780.100,00	26.863.423,00	(1.916.677,00)	
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	
02.07 02.07.12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	2.505.755.310,00	2.442.924.385,40	(62.830.924,60)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	57.398.800,00	54.791.300,00	(2.607.500,00)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	21.300.000,00	(2.550.000,00)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	33.548.800,00	33.491.300,00	(57.500,00)	
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	48.220.784,00	48.165.488,00	(55.296,00)	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.220.784,00	48.165.488,00	(55.296,00)	
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	39.779.784,00	39.706.426,00	(73.358,00)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38.879.784,00	38.806.426,00	(73.358,00)	
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.12 061 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	780.072.984,00	776.943.788,00	(3.129.196,00)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1	Belanja Pegawai	189.300.000,00	189.150.000,00	(150.000,00)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	440.772.984,00	439.810.788,00	(962.196,00)	
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3	Belanja Modal	150.000.000,00	147.983.000,00	(2.017.000,00)	
02.07 02.07.12 061 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	892.186.634,00	840.353.885,40	(51.832.748,60)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1	Belanja Pegawai	181.400.000,00	173.950.000,00	(7.450.000,00)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	399.944.115,00	357.562.739,00	(42.381.376,00)	
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3	Belanja Modal	310.842.519,00	308.841.146,40	(2.001.372,60)	
02.07 02.07.12 061 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	572.503.784,00	568.531.288,00	(3.972.496,00)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1	Belanja Pegawai	125.900.000,00	124.700.000,00	(1.200.000,00)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	333.387.384,00	331.561.288,00	(1.826.096,00)	
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3	Belanja Modal	113.216.400,00	112.270.000,00	(946.400,00)	
02.07 02.07.12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	115.592.540,00	114.432.210,00	(1.160.330,00)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.442.540,00	111.282.210,00	(1.160.330,00)	
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	27.000.000,00	30.680.000,00	3.680.000,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.630.838.819,00	5.392.712.405,40	(238.126.413,60)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.603.838.819,00)	(5.362.032.405,40)	241.806.413,60	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.13 00 00 5	BELANJA DAERAH	10.134.720.152,00	9.527.407.704,62	(607.312.447,38)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.010.488.000,00	3.523.119.840,00	(487.368.160,00)	
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.010.488.000,00	3.523.119.840,00	(487.368.160,00)	
02.07 02.07.13 00 00	BELANJA LANGSUNG	6.124.232.152,00	6.004.287.864,62	(119.944.287,38)	
02.07 02.07.13 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.402.248.937,00	1.392.239.430,70	(10.009.506,30)	
02.07 02.07.13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.125.000,00	94.123.014,50	(1.985,50)	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94.125.000,00	94.123.014,50	(1.985,50)	
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.308.123.937,00	1.298.116.416,20	(10.007.520,80)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	622.200.000,00	622.200.000,00	-	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	675.523.937,00	665.516.416,20	(10.007.520,80)	
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3	Belanja Modal	10.400.000,00	10.400.000,00	-	
02.07 02.07.13 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	124.099.575,00	123.866.990,95	(232.584,05)	
02.07 02.07.13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	85.878.575,00	85.646.000,00	(232.575,00)	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	4.210.000,00	-	
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3	Belanja Modal	81.668.575,00	81.436.000,00	(232.575,00)	
02.07 02.07.13 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.221.000,00	38.220.990,95	(9,05)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38.221.000,00	38.220.990,95	(9,05)	
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	3.117.000,00	3.110.000,00	(7.000,00)	
02.07 02.07.13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.117.000,00	3.110.000,00	(7.000,00)	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.117.000,00	3.110.000,00	(7.000,00)	
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</i>	4.594.766.640,00	4.485.071.442,97	(109.695.197,03)	
02.07 02.07.13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	60.098.000,00	60.076.000,00	(22.000,00)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.098.000,00	42.076.000,00	(22.000,00)	
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	28.899.820,00	28.878.352,00	(21.468,00)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	28.899.820,00	28.878.352,00	(21.468,00)	
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	89.276.000,00	89.276.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	88.376.000,00	88.376.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.13 062 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	619.253.000,00	613.150.431,40	(6.102.568,60)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1	Belanja Pegawai	102.100.000,00	99.700.000,00	(2.400.000,00)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	319.153.000,00	316.714.431,40	(2.438.568,60)	
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3	Belanja Modal	198.000.000,00	196.736.000,00	(1.264.000,00)	
02.07 02.07.13 062 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	601.892.820,00	597.291.154,40	(4.601.665,60)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1	Belanja Pegawai	153.075.000,00	151.275.000,00	(1.800.000,00)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	261.647.820,00	260.516.154,40	(1.131.665,60)	
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3	Belanja Modal	187.170.000,00	185.500.000,00	(1.670.000,00)	
02.07 02.07.13 062 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	554.051.000,00	551.125.564,40	(2.925.435,60)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1	Belanja Pegawai	113.500.000,00	113.500.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296.551.000,00	294.462.564,40	(2.088.435,60)	
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3	Belanja Modal	144.000.000,00	143.163.000,00	(837.000,00)	
02.07 02.07.13 062 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	574.315.000,00	493.371.959,97	(80.943.040,03)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1	Belanja Pegawai	84.900.000,00	84.900.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	184.170.000,00	183.783.314,40	(386.685,60)	
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3	Belanja Modal	305.245.000,00	224.688.645,57	(80.556.354,43)	
02.07 02.07.13 062 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	615.087.000,00	611.644.432,00	(3.442.568,00)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1	Belanja Pegawai	109.800.000,00	109.800.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	440.934.000,00	437.619.432,00	(3.314.568,00)	
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3	Belanja Modal	64.353.000,00	64.225.000,00	(128.000,00)	
02.07 02.07.13 062 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	560.573.000,00	555.786.394,40	(4.786.605,60)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1	Belanja Pegawai	117.800.000,00	116.975.000,00	(825.000,00)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	317.693.000,00	314.107.394,40	(3.585.605,60)	
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3	Belanja Modal	125.080.000,00	124.704.000,00	(376.000,00)	
02.07 02.07.13 062 010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	713.126.000,00	706.307.154,40	(6.818.845,60)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1	Belanja Pegawai	81.675.000,00	78.975.000,00	(2.700.000,00)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	479.741.000,00	476.763.154,40	(2.977.845,60)	
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3	Belanja Modal	151.710.000,00	150.569.000,00	(1.141.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	178.195.000,00	178.164.000,00	(31.000,00)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1	Belanja Pegawai	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	170.635.000,00	170.604.000,00	(31.000,00)	
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	10.134.720.152,00	9.527.407.704,62	(607.312.447,38)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(10.134.720.152,00)	(9.527.407.704,62)	607.312.447,38	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.07 02.07.14 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.224.947.468,00	5.023.004.712,14	(201.942.755,86)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.101.489.000,00	1.952.174.838,00	(149.314.162,00)	
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.101.489.000,00	1.952.174.838,00	(149.314.162,00)	
02.07 02.07.14 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.123.458.468,00	3.070.829.874,14	(52.628.593,86)	
02.07 02.07.14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.158.036,00	709.772.915,00	(20.385.121,00)	
02.07 02.07.14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	53.269.700,00	53.232.700,00	(37.000,00)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53.269.700,00	53.232.700,00	(37.000,00)	
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	676.888.336,00	656.540.215,00	(20.348.121,00)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	140.750.000,00	140.500.000,00	(250.000,00)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	510.388.336,00	490.366.435,00	(20.021.901,00)	
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3	Belanja Modal	25.750.000,00	25.673.780,00	(76.220,00)	
02.07 02.07.14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.318.432,00	67.692.333,00	(626.099,00)	
02.07 02.07.14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	43.822.000,00	43.483.400,00	(338.600,00)	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3	Belanja Modal	43.522.000,00	43.183.400,00	(338.600,00)	
02.07 02.07.14 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.496.432,00	24.208.933,00	(287.499,00)	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.496.432,00	24.208.933,00	(287.499,00)	
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
02.07 02.07.14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kotagede	2.320.182.000,00	2.288.564.626,14	(31.617.373,86)	
02.07 02.07.14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	236.650.000,00	235.750.000,00	(900.000,00)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1	Belanja Pegawai	212.650.000,00	211.750.000,00	(900.000,00)	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.07 02.07.14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	78.620.000,00	78.521.954,00	(98.046,00)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	78.620.000,00	78.521.954,00	(98.046,00)	
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	49.178.000,00	49.178.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.828.000,00	44.828.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 004	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	623.584.000,00	615.069.036,14	(8.514.963,86)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1	Belanja Pegawai	116.800.000,00	112.000.000,00	(4.800.000,00)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	311.784.000,00	309.133.418,00	(2.650.582,00)	
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3	Belanja Modal	195.000.000,00	193.935.618,14	(1.064.381,86)	
02.07 02.07.14 063 005	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	644.540.000,00	628.022.318,00	(16.517.682,00)	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1	Belanja Pegawai	125.600.000,00	125.600.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	388.940.000,00	388.902.318,00	(37.682,00)	
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3	Belanja Modal	130.000.000,00	113.520.000,00	(16.480.000,00)	
02.07 02.07.14 063 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	624.900.000,00	619.313.318,00	(5.586.682,00)	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1	Belanja Pegawai	132.100.000,00	132.100.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	208.100.000,00	204.383.318,00	(3.716.682,00)	
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3	Belanja Modal	284.700.000,00	282.830.000,00	(1.870.000,00)	
02.07 02.07.14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	62.710.000,00	62.710.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62.710.000,00	62.710.000,00	-	
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.224.947.468,00	5.023.004.712,14	(201.942.755,86)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.224.947.468,00)	(5.023.004.712,14)	201.942.755,86	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
 ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.08 02.08.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.543.018.760,00	5.152.410.321,00	(390.608.439,00)	
02.08 02.08.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.487.925.000,00	1.324.393.834,00	(163.531.166,00)	
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.487.925.000,00	1.324.393.834,00	(163.531.166,00)	
02.08 02.08.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4.055.093.760,00	3.828.016.487,00	(227.077.273,00)	
02.08 02.08.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.171.378.860,00	1.045.201.447,00	(126.177.413,00)	
02.08 02.08.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.740.000,00	15.629.380,00	(11.110.620,00)	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.740.000,00	15.629.380,00	(11.110.620,00)	
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.144.638.860,00	1.029.572.067,00	(115.066.793,00)	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	739.658.860,00	642.232.067,00	(97.426.793,00)	
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	404.980.000,00	387.340.000,00	(17.640.000,00)	
02.08 02.08.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	169.237.600,00	116.864.070,00	(52.373.530,00)	
02.08 02.08.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	64.749.600,00	50.476.000,00	(14.273.600,00)	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	64.749.600,00	50.476.000,00	(14.273.600,00)	
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.488.000,00	66.388.070,00	(38.099.930,00)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	104.488.000,00	66.388.070,00	(38.099.930,00)	
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.320.000,00	1.885.000,00	(435.000,00)	
02.08 02.08.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000,00	1.885.000,00	(435.000,00)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	1.885.000,00	(435.000,00)	
02.08 02.08.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 064	Program Pengendalian Penduduk	1.080.490.900,00	1.067.279.870,00	(13.211.030,00)	
02.08 02.08.01 064 001	Pengendalian Penduduk	338.035.600,00	336.222.400,00	(1.813.200,00)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	338.035.600,00	336.222.400,00	(1.813.200,00)	
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	742.455.300,00	731.057.470,00	(11.397.830,00)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1	Belanja Pegawai	418.780.500,00	412.664.770,00	(6.115.730,00)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323.674.800,00	318.392.700,00	(5.282.100,00)	
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.08 02.08.01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1.631.666.400,00	1.596.786.100,00	(34.880.300,00)	
02.08 02.08.01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	838.279.800,00	837.080.100,00	(1.199.700,00)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	838.279.800,00	837.080.100,00	(1.199.700,00)	
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.08 02.08.01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	793.386.600,00	759.706.000,00	(33.680.600,00)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	772.386.600,00	738.806.000,00	(33.580.600,00)	
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3	Belanja Modal	21.000.000,00	20.900.000,00	(100.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.543.018.760,00	5.152.410.321,00	(390.608.439,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(5.543.018.760,00)	(5.152.410.321,00)	390.608.439,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	1.410.618.200,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	1.410.618.200,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	4.152.919.000,00	5.405.964.000,00	1.253.045.000,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3.931.227.000,00	5.209.040.000,00	1.277.813.000,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	1.295.380.000,00	1)PD No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	(17.567.000,00)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	221.692.000,00	196.924.000,00	(24.768.000,00)	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	221.692.000,00	196.924.000,00	(24.768.000,00)	2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	225.821.600,00	383.394.800,00	157.573.200,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	220.821.600,00	378.394.800,00	157.573.200,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	220.821.600,00	378.394.800,00	157.573.200,00	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26	Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-	-	3)Perwal No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01	Service Charge	-	-	-	
02.09 02.09.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	15.434.690.273,00	13.662.738.371,02	(1.771.951.901,98)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.620.524.000,00	4.206.928.002,00	(413.595.998,00)	
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.620.524.000,00	4.206.928.002,00	(413.595.998,00)	
02.09 02.09.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	10.814.166.273,00	9.455.810.369,02	(1.358.355.903,98)	
02.09 02.09.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.668.177.830,00	1.613.235.915,40	(54.941.914,60)	
02.09 02.09.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.120.000,00	26.565.600,00	(554.400,00)	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.120.000,00	26.565.600,00	(554.400,00)	
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.641.057.830,00	1.586.670.315,40	(54.387.514,60)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.641.057.830,00	1.586.670.315,40	(54.387.514,60)	
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	572.459.000,00	395.020.977,00	(177.438.023,00)	
02.09 02.09.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	185.309.000,00	185.309.000,00	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	185.309.000,00	185.309.000,00	-	
02.09 02.09.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	387.150.000,00	209.711.977,00	(177.438.023,00)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	387.150.000,00	209.711.977,00	(177.438.023,00)	
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.315.600,00	2.315.600,00	-	
02.09 02.09.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.315.600,00	2.315.600,00	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.315.600,00	2.315.600,00	-	
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	1.705.923.344,00	1.692.368.926,42	(13.554.417,58)	
02.09 02.09.01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	7.500.000,00	7.440.000,00	(60.000,00)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.440.000,00	(60.000,00)	
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	195.974.344,00	195.414.365,40	(559.978,60)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	195.974.344,00	195.414.365,40	(559.978,60)	
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.502.449.000,00	1.489.514.561,02	(12.934.438,98)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	951.768.000,00	947.944.750,00	(3.823.250,00)	
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3	Belanja Modal	550.681.000,00	541.569.811,02	(9.111.188,98)	
02.09 02.09.01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	1.677.553.003,00	1.647.000.550,20	(30.552.452,80)	
02.09 02.09.01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	222.031.000,00	221.627.450,00	(403.550,00)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	138.376.000,00	137.972.450,00	(403.550,00)	
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3	Belanja Modal	83.655.000,00	83.655.000,00	-	
02.09 02.09.01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	734.377.516,00	710.208.147,60	(24.169.368,40)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	479.434.306,00	466.895.857,60	(12.538.448,40)	
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3	Belanja Modal	254.943.210,00	243.312.290,00	(11.630.920,00)	
02.09 02.09.01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	305.385.695,00	305.255.708,60	(129.986,40)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	305.385.695,00	305.255.708,60	(129.986,40)	
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	415.758.792,00	409.909.244,00	(5.849.548,00)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	373.758.792,00	367.909.244,00	(5.849.548,00)	
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.09 02.09.01 068	Program Pengelolaan Perpajakan	5.187.737.496,00	4.105.868.400,00	(1.081.869.096,00)	
02.09 02.09.01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perpajakan	4.937.577.496,00	3.878.275.400,00	(1.059.302.096,00)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.876.077.496,00	3.816.775.400,00	(1.059.302.096,00)	
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3	Belanja Modal	13.500.000,00	13.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.09 02.09.01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	250.160.000,00	227.593.000,00	(22.567.000,00)	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	-	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	174.960.000,00	153.688.000,00	(21.272.000,00)	
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3	Belanja Modal	56.000.000,00	54.705.000,00	(1.295.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	1.410.618.200,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	15.434.690.273,00	13.662.738.371,02	(1.771.951.901,98)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(11.055.949.673,00)	(7.873.379.571,02)	3.182.570.101,98	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.10 02.10.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	16.172.323.550,00	15.395.318.302,65	(777.005.247,35)	
02.10 02.10.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.535.235.000,00	3.297.562.428,00	(237.672.572,00)	
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.535.235.000,00	3.297.562.428,00	(237.672.572,00)	
02.10 02.10.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	12.637.088.550,00	12.097.755.874,65	(539.332.675,35)	
02.10 02.10.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	864.375.930,00	753.712.203,50	(110.663.726,50)	
02.10 02.10.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.340.000,00	20.785.000,00	(555.000,00)	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21.340.000,00	20.785.000,00	(555.000,00)	
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	843.035.930,00	732.927.203,50	(110.108.726,50)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	834.565.930,00	724.457.203,50	(110.108.726,50)	
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8.470.000,00	8.470.000,00	-	
02.10 02.10.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.546.000,00	139.913.651,15	(11.632.348,85)	
02.10 02.10.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	97.725.000,00	96.871.049,15	(853.950,85)	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	97.725.000,00	96.871.049,15	(853.950,85)	
02.10 02.10.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.821.000,00	43.042.602,00	(10.778.398,00)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	53.821.000,00	43.042.602,00	(10.778.398,00)	
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	600.000,00	600.000,00	-	
02.10 02.10.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	600.000,00	600.000,00	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	7.957.284.900,00	7.593.499.086,00	(363.785.814,00)	
02.10 02.10.01 069 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	569.960.000,00	568.252.000,00	(1.708.000,00)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	509.960.000,00	508.852.000,00	(1.108.000,00)	
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3	Belanja Modal	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 02.10.01 069 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	7.102.032.900,00	6.745.387.686,00	(356.645.214,00)	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.434.012.900,00	6.108.753.686,00	(325.259.214,00)	
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3	Belanja Modal	668.020.000,00	636.634.000,00	(31.386.000,00)	
02.10 02.10.01 069 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	285.292.000,00	279.859.400,00	(5.432.600,00)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155.292.000,00	151.555.400,00	(3.736.600,00)	
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3	Belanja Modal	130.000.000,00	128.304.000,00	(1.696.000,00)	
02.10 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1.121.814.080,00	1.100.933.345,00	(20.880.735,00)	
02.10 02.10.01 070 001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1.121.814.080,00	1.100.933.345,00	(20.880.735,00)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.117.614.080,00	1.096.733.345,00	(20.880.735,00)	
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1.079.225.640,00	1.054.903.939,00	(24.321.701,00)	
02.10 02.10.01 071 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	845.585.640,00	840.195.219,00	(5.390.421,00)	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	845.585.640,00	840.195.219,00	(5.390.421,00)	
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 02.10.01 071 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	233.640.000,00	214.708.720,00	(18.931.280,00)	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	12.650.000,00	-	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	220.990.000,00	202.058.720,00	(18.931.280,00)	
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.14 02.10.01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	43.178.000,00	39.667.000,00	(3.511.000,00)	
02.14 02.10.01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	43.178.000,00	39.667.000,00	(3.511.000,00)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.178.000,00	31.167.000,00	(3.011.000,00)	
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.15 02.10.01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1.419.064.000,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	
02.15 02.10.01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	937.080.000,00	933.510.000,00	(3.570.000,00)	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	748.605.000,00	746.162.008,00	(2.442.992,00)	
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3	Belanja Modal	188.475.000,00	187.347.992,00	(1.127.008,00)	
02.15 02.10.01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	124.610.000,00	124.554.450,00	(55.550,00)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	-	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.760.000,00	48.751.000,00	(9.000,00)	
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3	Belanja Modal	75.300.000,00	75.253.450,00	(46.550,00)	
02.15 02.10.01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	357.374.000,00	356.462.200,00	(911.800,00)	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	-	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	196.824.000,00	196.388.000,00	(436.000,00)	
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3	Belanja Modal	160.000.000,00	159.524.200,00	(475.800,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	16.172.323.550,00	15.395.318.302,65	(777.005.247,35)	
	SURPLUS/(DEFISIT):	(16.172.323.550,00)	(15.395.318.302,65)	777.005.247,35	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	219.170.114,00	286.536.472,59	67.366.358,59	
02.11 02.11.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.170.114,00	286.536.472,59	67.366.358,59	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	202.435.800,00	254.245.800,00	51.810.000,00	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	202.435.800,00	254.245.800,00	51.810.000,00	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	202.435.800,00	254.245.800,00	51.810.000,00	1)PD No 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.734.314,00	32.290.672,59	15.556.358,59	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23	Pendapatan dari BUKP	16.734.314,00	32.290.672,59	15.556.358,59	
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 01	Pendapatan dari BUKP	16.734.314,00	32.290.672,59	15.556.358,59	2)Kep.Gub.No. 71/KEP/2017
	- Dana Pembinaan BUKP	9.562.465,00	18.451.812,92	8.889.347,92	
	- Jasa Produksi BUKP	7.171.849,00	13.838.859,67	6.667.010,67	
02.11 02.11.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	7.585.649.540,00	7.341.448.633,80	(244.200.906,20)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.248.802.790,00	3.076.688.113,00	(172.114.677,00)	
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.248.802.790,00	3.076.688.113,00	(172.114.677,00)	
02.11 02.11.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4.336.846.750,00	4.264.760.520,80	(72.086.229,20)	
02.11 02.11.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	830.893.000,00	825.562.401,60	(5.330.598,40)	
02.11 02.11.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	87.686.000,00	87.386.369,00	(299.631,00)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87.686.000,00	87.386.369,00	(299.631,00)	
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	743.207.000,00	738.176.032,60	(5.030.967,40)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	719.257.000,00	714.226.032,60	(5.030.967,40)	
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	23.950.000,00	23.950.000,00	-	
02.11 02.11.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.751.000,00	82.975.600,00	(4.775.400,00)	
02.11 02.11.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	87.751.000,00	82.975.600,00	(4.775.400,00)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	87.751.000,00	82.975.600,00	(4.775.400,00)	
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.953.000,00	1.953.000,00	-	
02.11 02.11.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.953.000,00	1.953.000,00	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.953.000,00	1.953.000,00	-	
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.11 02.11.01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	381.164.950,00	374.264.843,60	(6.900.106,40)	
02.11 02.11.01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	330.288.850,00	323.432.410,80	(6.856.439,20)	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	330.288.850,00	323.432.410,80	(6.856.439,20)	
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	50.876.100,00	50.832.432,80	(43.667,20)	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.876.100,00	50.832.432,80	(43.667,20)	
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
01.06 01.06.01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.254.628.800,00	1.224.323.901,20	(30.304.898,80)	
02.11 02.11.01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	238.845.800,00	237.289.151,20	(1.556.648,80)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	24.500.000,00	-	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	214.345.800,00	212.789.151,20	(1.556.648,80)	
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	665.783.000,00	649.764.200,00	(16.018.800,00)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1	Belanja Pegawai	42.750.000,00	35.625.000,00	(7.125.000,00)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	623.033.000,00	614.139.200,00	(8.893.800,00)	
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.11 02.11.01 073 003	Pengembangan Industri Kreatid	350.000.000,00	337.270.550,00	(12.729.450,00)	
02.11 02.11.01 073 003 5 2 1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.450.000,00	-	
02.11 02.11.01 073 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	331.550.000,00	318.820.550,00	(12.729.450,00)	
02.11 02.11.01 073 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.382.256.000,00	1.360.561.194,40	(21.694.805,60)	
02.01 02.11.01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	488.093.000,00	486.904.414,40	(1.188.585,60)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	482.093.000,00	480.904.414,40	(1.188.585,60)	
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	894.163.000,00	873.656.780,00	(20.506.220,00)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1	Belanja Pegawai	98.600.000,00	97.800.000,00	(800.000,00)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	795.563.000,00	775.856.780,00	(19.706.220,00)	
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	370.327.000,00	367.797.780,00	(2.529.220,00)	
02.01 02.11.01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	180.420.000,00	177.967.780,00	(2.452.220,00)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1	Belanja Pegawai	59.175.000,00	59.175.000,00	-	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	121.245.000,00	118.792.780,00	(2.452.220,00)	
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.01 02.11.01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	189.907.000,00	189.830.000,00	(77.000,00)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1	Belanja Pegawai	58.000.000,00	58.000.000,00	-	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	131.907.000,00	131.830.000,00	(77.000,00)	
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.06 02.11.01 037	<i>Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	27.873.000,00	27.321.800,00	(551.200,00)	
03.06 02.11.01 037 001	Penempatan Transmigrasi	27.873.000,00	27.321.800,00	(551.200,00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	27.873.000,00	27.321.800,00	(551.200,00)	
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	219.170.114,00	286.536.472,59	67.366.358,59	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	7.585.649.540,00	7.341.448.633,80	(244.200.906,20)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(7.366.479.426,00)	(7.054.912.161,21)	311.567.264,79	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	
02.12 02.12.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	5.916.526.000,00	5.622.052.163,00	(294.473.837,00)	
02.12 02.12.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.218.162.000,00	2.978.015.928,00	(240.146.072,00)	
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.218.162.000,00	2.978.015.928,00	(240.146.072,00)	
02.12 02.12.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.698.364.000,00	2.644.036.235,00	(54.327.765,00)	
02.12 02.12.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.527.573.000,00	1.514.871.685,00	(12.701.315,00)	
02.12 02.12.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	56.705.000,00	55.908.479,00	(796.521,00)	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56.705.000,00	55.908.479,00	(796.521,00)	
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.470.868.000,00	1.458.963.206,00	(11.904.794,00)	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.436.252.000,00	1.425.563.206,00	(10.688.794,00)	
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	34.616.000,00	33.400.000,00	(1.216.000,00)	
02.12 02.12.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	479.370.000,00	441.894.500,00	(37.475.500,00)	
02.12 02.12.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	410.000.000,00	372.636.800,00	(37.363.200,00)	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	372.636.800,00	(37.363.200,00)	
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.370.000,00	69.257.700,00	(112.300,00)	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69.370.000,00	69.257.700,00	(112.300,00)	
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.474.000,00	34.044.380,00	(2.429.620,00)	
02.12 02.12.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	36.474.000,00	34.044.380,00	(2.429.620,00)	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.474.000,00	34.044.380,00	(2.429.620,00)	
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	422.308.400,00	421.646.072,00	(662.328,00)	
02.12 02.12.01 074 001	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	128.598.000,00	128.417.996,00	(180.004,00)	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	128.598.000,00	128.417.996,00	(180.004,00)	
02.12 02.12.01 074 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.12 02.12.01 074 002	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	67.402.400,00	67.327.760,00	(74.640,00)	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.402.400,00	67.327.760,00	(74.640,00)	
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003	Pengelolaan Data Perizinan	172.661.000,00	172.478.916,00	(182.084,00)	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	62.411.000,00	62.228.916,00	(182.084,00)	
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3	Belanja Modal	110.250.000,00	110.250.000,00	-	
02.12 02.12.01 074 004	Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan	53.647.000,00	53.421.400,00	(225.600,00)	
02.12 02.12.01 074 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 074 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	3.646.400,00	(600,00)	
02.12 02.12.01 074 004 5 2 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	
02.12 02.12.01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	2.816.000,00	2.701.200,00	(114.800,00)	
02.12 02.12.01 075 001	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	2.816.000,00	2.701.200,00	(114.800,00)	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.816.000,00	2.701.200,00	(114.800,00)	
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	157.854.000,00	157.384.638,00	(469.362,00)	
02.12 02.12.01 076 001	Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	67.181.000,00	66.921.540,00	(259.460,00)	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	67.181.000,00	66.921.540,00	(259.460,00)	
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	90.673.000,00	90.463.098,00	(209.902,00)	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	90.673.000,00	90.463.098,00	(209.902,00)	
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	71.968.600,00	71.493.760,00	(474.840,00)	
02.12 02.12.01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan	35.719.600,00	35.622.180,00	(97.420,00)	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.719.600,00	35.622.180,00	(97.420,00)	
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003	Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta	36.249.000,00	35.871.580,00	(377.420,00)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.249.000,00	35.871.580,00	(377.420,00)	
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	5.916.526.000,00	5.622.052.163,00	(294.473.837,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.866.526.000,00)	(3.668.894.663,00)	1.197.631.337,00	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.13 02.13.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.962.005.992,00	3.658.268.845,00	(303.737.147,00)	
02.13 02.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.528.782.000,00	1.293.644.244,00	(235.137.756,00)	
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.528.782.000,00	1.293.644.244,00	(235.137.756,00)	
02.13 02.13.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.433.223.992,00	2.364.624.601,00	(68.599.391,00)	
02.13 02.13.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	355.297.008,00	351.506.890,00	(3.790.118,00)	
02.13 02.13.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60.820.000,00	60.800.000,00	(20.000,00)	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.820.000,00	60.800.000,00	(20.000,00)	
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	294.477.008,00	290.706.890,00	(3.770.118,00)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	294.477.008,00	290.706.890,00	(3.770.118,00)	
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.076.000,00	22.667.055,00	(3.408.945,00)	
02.13 02.13.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.076.000,00	22.667.055,00	(3.408.945,00)	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.076.000,00	22.667.055,00	(3.408.945,00)	
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,00	996.600,00	(3.400,00)	
02.13 02.13.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	996.600,00	(3.400,00)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	996.600,00	(3.400,00)	
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	228.267.432,00	228.137.568,00	(129.864,00)	
02.13 02.13.01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	177.441.648,00	177.355.072,00	(86.576,00)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	177.441.648,00	177.355.072,00	(86.576,00)	
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	50.825.784,00	50.782.496,00	(43.288,00)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.825.784,00	50.782.496,00	(43.288,00)	
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.13 02.13.01 079	Program Pengembangan Olah Raga	1.822.583.552,00	1.761.316.488,00	(61.267.064,00)	
02.13 02.13.01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	1.587.889.568,00	1.526.769.192,00	(61.120.376,00)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.587.889.568,00	1.526.769.192,00	(61.120.376,00)	
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.13 02.13.01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	234.693.984,00	234.547.296,00	(146.688,00)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	212.693.984,00	212.547.296,00	(146.688,00)	
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	3.962.005.992,00	3.658.268.845,00	(303.737.147,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(3.962.005.992,00)	(3.658.268.845,00)	303.737.147,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.16 02.16.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8.663.083.697,00	8.143.749.016,00	(519.334.681,00)	
02.16 02.16.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.521.628.000,00	1.363.962.310,00	(157.665.690,00)	
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.521.628.000,00	1.363.962.310,00	(157.665.690,00)	
02.16 02.16.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	7.141.455.697,00	6.779.786.706,00	(361.668.991,00)	
02.16 02.16.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	416.596.227,00	391.376.318,00	(25.219.909,00)	
02.16 02.16.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	42.800.000,00	34.114.600,00	(8.685.400,00)	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	34.114.600,00	(8.685.400,00)	
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	373.796.227,00	357.261.718,00	(16.534.509,00)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	365.796.227,00	350.636.718,00	(15.159.509,00)	
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	8.000.000,00	6.625.000,00	(1.375.000,00)	
02.16 02.16.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.462.000,00	135.396.904,00	(42.065.096,00)	
02.16 02.16.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	80.000.000,00	79.500.000,00	(500.000,00)	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.500.000,00	(500.000,00)	
02.16 02.16.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	97.462.000,00	55.896.904,00	(41.565.096,00)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.462.000,00	55.896.904,00	(41.565.096,00)	
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.16 02.16.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	111.159.120,00	105.720.116,00	(5.439.004,00)	
02.16 02.16.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	111.159.120,00	105.720.116,00	(5.439.004,00)	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	111.159.120,00	105.720.116,00	(5.439.004,00)	
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	818.677.830,00	814.865.614,00	(3.812.216,00)	
05.01 02.16.01 081 001	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan budaya	818.677.830,00	814.865.614,00	(3.812.216,00)	
05.01 02.16.01 081 001 5 2 1	Belanja Pegawai	18.480.000,00	18.480.000,00	-	
05.01 02.16.01 081 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	639.697.830,00	637.291.214,00	(2.406.616,00)	
05.01 02.16.01 081 001 5 2 3	Belanja Modal	160.500.000,00	159.094.400,00	(1.405.600,00)	
02.16 02.16.01 081 002	Pelestarian Tata Nilai Budaya	-	-	-	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.16 02.16.01 081 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
05.01 02.16.01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	1.775.183.080,00	1.569.944.067,00	(205.239.013,00)	
05.01 02.16.01 082 001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	809.036.000,00	742.631.791,00	(66.404.209,00)	
05.01 02.16.01 082 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 02.16.01 082 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	455.585.080,00	449.525.791,00	(6.059.289,00)	
05.01 02.16.01 082 001 5 2 3	Belanja Modal	353.450.920,00	293.106.000,00	(60.344.920,00)	
05.01 02.16.01 082 002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	720.246.000,00	591.923.812,00	(128.322.188,00)	
05.01 02.16.01 082 002 5 2 1	Belanja Pegawai	19.080.000,00	14.080.000,00	(5.000.000,00)	
05.01 02.16.01 082 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	701.166.000,00	577.843.812,00	(123.322.188,00)	
05.01 02.16.01 082 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 082 003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	245.901.080,00	235.388.464,00	(10.512.616,00)	
05.01 02.16.01 082 003 5 2 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
05.01 02.16.01 082 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	242.401.080,00	231.888.464,00	(10.512.616,00)	
05.01 02.16.01 082 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	3.842.377.440,00	3.762.483.687,00	(79.893.753,00)	
05.01 02.16.01 083 001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.244.969.750,00	1.224.696.964,00	(20.272.786,00)	
05.01 02.16.01 083 001 5 2 1	Belanja Pegawai	34.350.000,00	33.000.000,00	(1.350.000,00)	
05.01 02.16.01 083 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.108.119.750,00	1.091.896.964,00	(16.222.786,00)	
05.01 02.16.01 083 001 5 2 3	Belanja Modal	102.500.000,00	99.800.000,00	(2.700.000,00)	
05.01 02.16.01 083 002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	60.910.000,00	59.128.000,00	(1.782.000,00)	
05.01 02.16.01 083 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	60.535.000,00	58.753.000,00	(1.782.000,00)	
05.01 02.16.01 083 002 5 2 3	Belanja Modal	375.000,00	375.000,00	-	
05.01 02.16.01 083 003	Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	82.162.080,00	79.997.004,00	(2.165.076,00)	
05.01 02.16.01 083 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82.162.080,00	79.997.004,00	(2.165.076,00)	
05.01 02.16.01 083 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	207.400.000,00	206.200.000,00	(1.200.000,00)	
05.01 02.16.01 083 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	207.400.000,00	206.200.000,00	(1.200.000,00)	
05.01 02.16.01 083 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	239.571.530,00	216.924.000,00	(22.647.530,00)	
05.01 02.16.01 083 005 5 2 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	-	
05.01 02.16.01 083 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	235.521.530,00	212.874.000,00	(22.647.530,00)	
05.01 02.16.01 083 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 006	Gelar Budaya Jogja	1.130.160.000,00	1.117.987.773,00	(12.172.227,00)	
05.01 02.16.01 083 006 5 2 1	Belanja Pegawai	9.075.000,00	9.075.000,00	-	
05.01 02.16.01 083 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.121.085.000,00	1.108.912.773,00	(12.172.227,00)	
05.01 02.16.01 083 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 02.16.01 083 007	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	477.376.080,00	472.671.464,00	(4.704.616,00)	
05.01 02.16.01 083 007 5 2 1	Belanja Pegawai	1.380.000,00	1.380.000,00	-	
05.01 02.16.01 083 007 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	474.996.080,00	470.456.464,00	(4.539.616,00)	
05.01 02.16.01 083 007 5 2 3	Belanja Modal	1.000.000,00	835.000,00	(165.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
05.01 02.16.01 083 008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	68.563.250,00	62.621.732,00	(5.941.518,00)	
05.01 02.16.01 083 008 5 2 1	Belanja Pegawai	4.770.000,00	1.970.000,00	(2.800.000,00)	
05.01 02.16.01 083 008 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.793.250,00	58.651.732,00	(141.518,00)	
05.01 02.16.01 083 008 5 2 3	Belanja Modal	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
05.01 02.16.01 083 009	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	331.264.750,00	322.256.750,00	(9.008.000,00)	
05.01 02.16.01 083 009 5 2 1	Belanja Pegawai	6.895.000,00	4.925.000,00	(1.970.000,00)	
05.01 02.16.01 083 009 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	324.369.750,00	317.331.750,00	(7.038.000,00)	
05.01 02.16.01 083 009 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8.663.083.697,00	8.143.749.016,00	(519.334.681,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8.663.083.697,00)	(8.143.749.016,00)	519.334.681,00	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN
ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.18 02.18.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8.051.916.592,00	7.860.969.363,42	(190.947.228,58)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.549.323.000,00	3.380.758.644,00	(168.564.356,00)	
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.549.323.000,00	3.380.758.644,00	(168.564.356,00)	
02.18 02.18.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4.502.593.592,00	4.480.210.719,42	(22.382.872,58)	
02.18 02.18.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.692.038.699,00	1.691.113.849,72	(924.849,28)	
02.18 02.18.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85.976.907,00	85.950.807,00	(26.100,00)	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85.976.907,00	85.950.807,00	(26.100,00)	
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.606.061.792,00	1.605.163.042,72	(898.749,28)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.556.711.792,00	1.555.834.042,72	(877.749,28)	
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	49.350.000,00	49.329.000,00	(21.000,00)	
02.18 02.18.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	319.088.824,00	312.505.026,00	(6.583.798,00)	
02.18 02.18.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	168.089.824,00	167.595.000,00	(494.824,00)	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	151.589.824,00	151.095.000,00	(494.824,00)	
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
02.18 02.18.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.999.000,00	144.910.026,00	(6.088.974,00)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150.999.000,00	144.910.026,00	(6.088.974,00)	
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.300.820,00	54.207.852,80	(92.967,20)	
02.18 02.18.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	54.300.820,00	54.207.852,80	(92.967,20)	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.300.820,00	54.207.852,80	(92.967,20)	
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	122.000.648,00	121.655.165,60	(345.482,40)	
02.18 02.18.01 086 001	Pengelolaan Arsip	69.180.000,00	69.013.632,80	(166.367,20)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	69.180.000,00	69.013.632,80	(166.367,20)	
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 086 002	Pengembangan Arsip	52.820.648,00	52.641.532,80	(179.115,20)	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	-	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	47.120.648,00	46.941.532,80	(179.115,20)	
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.18 02.18.01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	144.261.000,00	143.855.998,40	(405.001,60)	
02.18 02.18.01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	61.597.000,00	61.469.332,80	(127.667,20)	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	61.597.000,00	61.469.332,80	(127.667,20)	
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	82.664.000,00	82.386.665,60	(277.334,40)	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.214.000,00	75.936.665,60	(277.334,40)	
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3	Belanja Modal	6.450.000,00	6.450.000,00	-	
02.17 02.18.01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	1.540.683.601,00	1.536.557.614,60	(4.125.986,40)	
02.17 02.18.01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	1.420.086.601,00	1.416.040.254,60	(4.046.346,40)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.387.853.601,00	1.383.808.054,60	(4.045.546,40)	
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3	Belanja Modal	32.233.000,00	32.232.200,00	(800,00)	
02.17 02.18.01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	120.597.000,00	120.517.360,00	(79.640,00)	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.597.000,00	120.517.360,00	(79.640,00)	
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.17 02.18.01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	630.220.000,00	620.315.212,30	(9.904.787,70)	
02.17 02.18.01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	456.513.000,00	456.241.482,50	(271.517,50)	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	194.513.000,00	194.285.325,00	(227.675,00)	
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3	Belanja Modal	262.000.000,00	261.956.157,50	(43.842,50)	
02.17 02.18.01 085 002	Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan	173.707.000,00	164.073.729,80	(9.633.270,20)	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	173.707.000,00	164.073.729,80	(9.633.270,20)	
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8.051.916.592,00	7.860.969.363,42	(190.947.228,58)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8.051.916.592,00)	(7.860.969.363,42)	190.947.228,58	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
02.19 02.19.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.229.588.982,00	2.104.872.832,00	(124.716.150,00)	
02.19 02.19.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	713.156.000,00	632.082.027,00	(81.073.973,00)	
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	713.156.000,00	632.082.027,00	(81.073.973,00)	
02.19 02.19.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	1.516.432.982,00	1.472.790.805,00	(43.642.177,00)	
02.19 02.19.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	276.256.354,00	275.105.822,00	(1.150.532,00)	
02.19 02.19.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40.665.000,00	40.405.000,00	(260.000,00)	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40.665.000,00	40.405.000,00	(260.000,00)	
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	235.591.354,00	234.700.822,00	(890.532,00)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	174.603.354,00	173.712.822,00	(890.532,00)	
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	60.988.000,00	60.988.000,00	-	
02.19 02.19.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.547.500,00	11.728.311,00	(4.819.189,00)	
02.19 02.19.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.547.500,00	11.728.311,00	(4.819.189,00)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.547.500,00	11.728.311,00	(4.819.189,00)	
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	645.000,00	645.000,00	-	
02.19 02.19.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	645.000,00	645.000,00	-	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	645.000,00	645.000,00	-	
02.19 02.19.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.19 02.19.01 088	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.222.984.128,00	1.185.311.672,00	(37.672.456,00)	
02.19 02.19.01 088 001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	1.222.984.128,00	1.185.311.672,00	(37.672.456,00)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1	Belanja Pegawai	759.600.000,00	753.300.000,00	(6.300.000,00)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463.384.128,00	432.011.672,00	(31.372.456,00)	
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	2.229.588.982,00	2.104.872.832,00	(124.716.150,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2.229.588.982,00)	(2.104.872.832,00)	124.716.150,00	

URUSAN : 03. PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN
 ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	57.773.200,00	62.332.700,00	4.559.500,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.773.200,00	62.332.700,00	4.559.500,00	1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	181.939.500,00	196.839.200,00	14.899.700,00	
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.750.000,00	16.135.000,00	385.000,00	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.150.000,00	66.775.000,00	12.625.000,00	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	112.039.500,00	113.929.200,00	1.889.700,00	2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	8.981.767.223,00	8.720.906.049,00	(260.861.174,00)	
03.01 03.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.050.344.635,00	3.886.024.608,00	(164.320.027,00)	
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.050.344.635,00	3.886.024.608,00	(164.320.027,00)	
03.01 03.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	4.931.422.588,00	4.834.881.441,00	(96.541.147,00)	
03.01 03.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.578.220.520,00	1.576.429.894,00	(1.790.626,00)	
03.01 03.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.820.000,00	10.807.045,00	(12.955,00)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	10.807.045,00	(12.955,00)	
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.567.400.520,00	1.565.622.849,00	(1.777.671,00)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.553.765.520,00	1.552.197.849,00	(1.567.671,00)	
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	13.635.000,00	13.425.000,00	(210.000,00)	
03.01 03.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.675.000,00	369.397.925,00	(277.075,00)	
03.01 03.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	296.955.000,00	296.955.000,00	-	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	128.500.000,00	128.500.000,00	-	
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	168.455.000,00	168.455.000,00	-	
03.01 03.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72.720.000,00	72.442.925,00	(277.075,00)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	59.820.000,00	59.617.925,00	(202.075,00)	
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	12.900.000,00	12.825.000,00	(75.000,00)	
03.01 03.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.275.000,00	18.213.900,00	(61.100,00)	
03.01 03.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	18.275.000,00	18.213.900,00	(61.100,00)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	18.213.900,00	(61.100,00)	
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.01 03.01.01 089	Program Pembinaan Pertanian	811.863.396,00	752.538.162,00	(59.325.234,00)	
03.01 03.01.01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	678.812.586,00	619.668.712,00	(59.143.874,00)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	675.327.586,00	616.303.612,00	(59.023.974,00)	
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3	Belanja Modal	2.000.000,00	1.880.100,00	(119.900,00)	
03.01 03.01.01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	133.050.810,00	132.869.450,00	(181.360,00)	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	133.050.810,00	132.869.450,00	(181.360,00)	
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.03 03.01.01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	931.201.616,00	914.400.700,00	(16.800.916,00)	
03.03 03.01.01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	453.194.832,00	450.328.604,00	(2.866.228,00)	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	453.194.832,00	450.328.604,00	(2.866.228,00)	
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	478.006.784,00	464.072.096,00	(13.934.688,00)	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	478.006.784,00	464.072.096,00	(13.934.688,00)	
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.03 03.01.01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	1.222.187.056,00	1.203.900.860,00	(18.286.196,00)	
02.03 03.01.01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	405.123.736,00	401.272.200,00	(3.851.536,00)	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	405.123.736,00	401.272.200,00	(3.851.536,00)	
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	177.499.320,00	176.955.660,00	(543.660,00)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	135.076.200,00	134.880.660,00	(195.540,00)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3	Belanja Modal	42.423.120,00	42.075.000,00	(348.120,00)	
02.03 03.01.01 041 002	Pengembangan Lumbung Mataraman	639.564.000,00	625.673.000,00	(13.891.000,00)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323.964.000,00	321.327.000,00	(2.637.000,00)	
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3	Belanja Modal	315.600.000,00	304.346.000,00	(11.254.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	239.712.700,00	259.171.900,00	19.459.200,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	8.981.767.223,00	8.720.906.049,00	(260.861.174,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(8.742.054.523,00)	(8.461.734.149,00)	280.320.374,00	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

URUSAN : 03. PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA
 ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	7.364.810.633,00	5.407.690.814,00	(1.957.119.819,00)	
03.02 03.02.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.364.810.633,00	5.407.690.814,00	(1.957.119.819,00)	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	584.810.633,00	520.458.833,00	(64.351.800,00)	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	584.810.633,00	520.458.833,00	(64.351.800,00)	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	584.810.633,00	520.458.833,00	(64.351.800,00)	1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	(1.892.768.019,00)	
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	(1.892.768.019,00)	2)Perwal No 73/2000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	(1.892.768.019,00)	3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	32.836.874.353,00	27.112.113.078,50	(5.724.761.274,50)	
03.02 03.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.418.024.949,00	2.252.359.166,00	(165.665.783,00)	
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.418.024.949,00	2.252.359.166,00	(165.665.783,00)	
03.02 03.02.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	30.418.849.404,00	24.859.753.912,50	(5.559.095.491,50)	
03.02 03.02.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.582.750.955,00	1.420.380.497,20	(162.370.457,80)	
03.02 03.02.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52.145.740,00	44.294.940,00	(7.850.800,00)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.145.740,00	44.294.940,00	(7.850.800,00)	
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.530.605.215,00	1.376.085.557,20	(154.519.657,80)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.508.605.215,00	1.354.183.057,20	(154.422.157,80)	
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	22.000.000,00	21.902.500,00	(97.500,00)	
03.02 03.02.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	44.046.319,00	29.042.211,00	(15.004.108,00)	
03.02 03.02.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	44.046.319,00	29.042.211,00	(15.004.108,00)	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.046.319,00	29.042.211,00	(15.004.108,00)	
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	2.377.200,00	2.357.200,00	(20.000,00)	
03.02 03.02.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.377.200,00	2.357.200,00	(20.000,00)	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.377.200,00	2.357.200,00	(20.000,00)	
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.02 03.02.01 090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	9.847.689.511,00	9.545.128.332,43	(302.561.178,57)	
03.02 03.02.01 090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	688.950.000,00	573.662.735,00	(115.287.265,00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	616.185.000,00	502.496.100,00	(113.688.900,00)	
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3	Belanja Modal	72.765.000,00	71.166.635,00	(1.598.365,00)	
03.02 03.02.01 090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	1.716.833.992,00	1.595.698.731,20	(121.135.260,80)	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	-	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.693.033.992,00	1.571.898.731,20	(121.135.260,80)	
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 03.02.01 090 004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	6.060.405.519,00	6.036.895.866,23	(23.509.652,77)	
05.01 03.02.01 090 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 03.02.01 090 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.005.405.519,00	5.982.695.866,23	(22.709.652,77)	
05.01 03.02.01 090 004 5 2 3	Belanja Modal	55.000.000,00	54.200.000,00	(800.000,00)	
05.01 03.02.01 090 005	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	511.500.000,00	507.766.000,00	(3.734.000,00)	
05.01 03.02.01 090 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 03.02.01 090 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	421.500.000,00	418.886.000,00	(2.614.000,00)	
05.01 03.02.01 090 005 5 2 3	Belanja Modal	90.000.000,00	88.880.000,00	(1.120.000,00)	
05.01 03.02.01 090 006	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	870.000.000,00	831.105.000,00	(38.895.000,00)	
05.01 03.02.01 090 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 03.02.01 090 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000.000,00	831.105.000,00	(38.895.000,00)	
05.01 03.02.01 090 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	850.563.500,00	522.798.500,00	(327.765.000,00)	
03.02 03.02.01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	508.090.000,00	184.460.000,00	(323.630.000,00)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	508.090.000,00	184.460.000,00	(323.630.000,00)	
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	342.473.500,00	338.338.500,00	(4.135.000,00)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	342.473.500,00	338.338.500,00	(4.135.000,00)	
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.02 03.02.01 092	Program Pengembangan Taman Pintar	18.091.421.919,00	13.340.047.171,87	(4.751.374.747,13)	
03.02 03.02.01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	18.091.421.919,00	13.340.047.171,87	(4.751.374.747,13)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3.646.400.600,00	3.365.711.438,00	(280.689.162,00)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6.774.520.661,00	4.179.509.936,00	(2.595.010.725,00)	
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3	Belanja Modal	7.670.500.658,00	5.794.825.797,87	(1.875.674.860,13)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	7.364.810.633,00	5.407.690.814,00	(1.957.119.819,00)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	32.836.874.353,00	27.112.113.078,50	(5.724.761.274,50)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(25.472.063.720,00)	(21.704.422.264,50)	3.767.641.455,50	

Keterangan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar
- 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

URUSAN : 03. PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN
 ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	14.603.044.455,00	16.146.543.634,10	1.543.499.179,10	
03.05 03.05.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.603.044.455,00	16.146.543.634,10	1.543.499.179,10	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.997.641.700,00	10.982.772.884,00	985.131.184,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	9.997.641.700,00	10.982.772.884,00	985.131.184,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	9.934.895.700,00	10.910.008.884,00	975.113.184,00	1)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.746.000,00	72.764.000,00	10.018.000,00	2)PD No 13/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.605.402.755,00	5.163.770.750,10	558.367.995,10	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.247.478.259,00	3.465.105.692,10	217.627.433,10	3)Perwal No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.247.478.259,00	3.465.105.692,10	217.627.433,10	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	324.574.256,00	15.156.456,00	4)Perwal No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	324.574.256,00	15.156.456,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	-	-	5)Perwal No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01	Penyelenggaraan PMPS	-	-	-	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 31	Pendapatan Bunga Retribusi	20.325.896,00	39.356.224,00	19.030.328,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 31 01	Pendapatan Bunga Retribusi	20.325.896,00	39.356.224,00	19.030.328,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.028.180.800,00	1.334.734.578,00	306.553.778,00	
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.028.180.800,00	1.334.734.578,00	306.553.778,00	6)PD No 5/2012 7)Perwal No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	38.064.731.755,00	34.800.543.252,12	(3.264.188.502,88)	
03.05 03.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.984.625.085,00	6.702.844.424,00	(281.780.661,00)	
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	6.984.625.085,00	6.702.844.424,00	(281.780.661,00)	
03.05 03.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	31.080.106.670,00	28.097.698.828,12	(2.982.407.841,88)	
03.05 03.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.252.120.954,00	5.035.229.857,50	(216.891.096,50)	
03.05 03.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.543.000,00	90.127.180,00	(4.415.820,00)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	94.543.000,00	90.127.180,00	(4.415.820,00)	
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	5.157.577.954,00	4.945.102.677,50	(212.475.276,50)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.157.577.954,00	4.945.102.677,50	(212.475.276,50)	
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	296.857.500,00	270.571.600,00	(26.285.900,00)	
03.05 03.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	296.857.500,00	270.571.600,00	(26.285.900,00)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	296.857.500,00	270.571.600,00	(26.285.900,00)	
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.05 03.05.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.895.000,00	3.895.000,00	-	
03.05 03.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.895.000,00	3.895.000,00	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	3.895.000,00	-	
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 098	Program Pembinaan Perindustrian	678.767.712,00	673.414.330,00	(5.353.382,00)	
03.05 03.05.01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	41.320.000,00	41.320.000,00	-	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41.320.000,00	41.320.000,00	-	
03.05 03.05.01 098 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi	637.447.712,00	632.094.330,00	(5.353.382,00)	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	637.447.712,00	632.094.330,00	(5.353.382,00)	
03.05 03.05.01 098 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.05 03.05.01 099	Program Pengembangan Industri Logam	1.641.725.084,00	1.596.678.343,00	(45.046.741,00)	
03.05 03.05.01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	306.238.000,00	(3.179.800,00)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	271.827.800,00	270.605.000,00	(1.222.800,00)	
03.05 03.05.01 099 001 5 2 3	Belanja Modal	37.590.000,00	35.633.000,00	(1.957.000,00)	
03.05 03.05.01 099 002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	1.332.307.284,00	1.290.440.343,00	(41.866.941,00)	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.596.284,00	1.260.990.343,00	(41.605.941,00)	
03.05 03.05.01 099 002 5 2 3	Belanja Modal	29.711.000,00	29.450.000,00	(261.000,00)	
03.04 03.05.01 094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	984.860.140,00	907.611.812,00	(77.248.328,00)	
03.04 03.05.01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	391.776.000,00	341.432.000,00	(50.344.000,00)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.075.000,00	6.075.000,00	-	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	385.701.000,00	335.357.000,00	(50.344.000,00)	
03.04 03.05.01 094 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	258.458.704,00	236.557.140,00	(21.901.564,00)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 1	Belanja Pegawai	30.675.000,00	28.350.000,00	(2.325.000,00)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	227.783.704,00	208.207.140,00	(19.576.564,00)	
03.04 03.05.01 094 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	334.625.436,00	329.622.672,00	(5.002.764,00)	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254.980.436,00	249.977.672,00	(5.002.764,00)	
03.04 03.05.01 094 003 5 2 3	Belanja Modal	79.645.000,00	79.645.000,00	-	
03.04 03.05.01 095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar	9.295.951.616,00	9.110.428.465,00	(185.523.151,00)	
03.04 03.05.01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	5.060.856.580,00	4.983.559.782,00	(77.296.798,00)	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.049.456.580,00	4.972.607.782,00	(76.848.798,00)	
03.04 03.05.01 095 001 5 2 3	Belanja Modal	11.400.000,00	10.952.000,00	(448.000,00)	
03.04 03.05.01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	3.235.984.460,00	3.132.859.369,00	(103.125.091,00)	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.235.984.460,00	3.132.859.369,00	(103.125.091,00)	
03.04 03.05.01 095 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
03.04 03.05.01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	999.110.576,00	994.009.314,00	(5.101.262,00)	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	951.250.576,00	946.949.314,00	(4.301.262,00)	
03.04 03.05.01 095 003 5 2 3	Belanja Modal	47.860.000,00	47.060.000,00	(800.000,00)	
03.04 03.05.01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	4.785.431.824,00	4.570.168.608,00	(215.263.216,00)	
03.04 03.05.01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	203.880.000,00	202.584.000,00	(1.296.000,00)	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	203.880.000,00	202.584.000,00	(1.296.000,00)	
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	838.386.400,00	838.378.200,00	(8.200,00)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	838.386.400,00	838.378.200,00	(8.200,00)	
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	934.225.600,00	871.260.001,00	(62.965.599,00)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	934.225.600,00	871.260.001,00	(62.965.599,00)	
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	780.500.102,00	725.187.552,00	(55.312.550,00)	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	780.500.102,00	725.187.552,00	(55.312.550,00)	
03.04 03.05.01 096 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1.157.321.798,00	1.113.841.355,00	(43.480.443,00)	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	710.621.798,00	675.101.355,00	(35.520.443,00)	
03.04 03.05.01 096 005 5 2 3	Belanja Modal	446.700.000,00	438.740.000,00	(7.960.000,00)	
03.04 03.05.01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	871.117.924,00	818.917.500,00	(52.200.424,00)	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	871.117.924,00	818.917.500,00	(52.200.424,00)	
03.04 03.05.01 096 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
03.04 03.05.01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	8.140.496.840,00	5.929.700.812,62	(2.210.796.027,38)	
03.04 03.05.01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	4.961.449.925,00	2.750.998.847,78	(2.210.451.077,22)	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 1	Belanja Pegawai	660.307.912,00	374.998.829,78	(285.309.082,22)	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.538.881.867,00	2.127.652.811,00	(411.229.056,00)	
03.04 03.05.01 097 001 5 2 3	Belanja Modal	1.762.260.146,00	248.347.207,00	(1.513.912.939,00)	
03.04 03.05.01 097 002	Pengembangan Industri Kreatif	3.179.046.915,00	3.178.701.964,84	(344.950,16)	
03.04 03.05.01 097 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
03.04 03.05.01 097 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	924.568.000,00	924.353.050,00	(214.950,00)	
03.04 03.05.01 097 002 5 2 3	Belanja Modal	2.252.378.915,00	2.252.248.914,84	(130.000,16)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	14.603.044.455,00	16.146.543.634,10	1.543.499.179,10	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	38.064.731.755,00	34.800.543.252,12	(3.264.188.502,88)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(23.461.687.300,00)	(18.653.999.618,02)	4.807.687.681,98	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN
 ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.01 04.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6.769.744.403,00	6.557.239.289,50	(212.505.113,50)	
04.01 04.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.184.213.000,00	3.010.793.654,00	(173.419.346,00)	
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3.184.213.000,00	3.010.793.654,00	(173.419.346,00)	
04.01 04.01.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	3.585.531.403,00	3.546.445.635,50	(39.085.767,50)	
04.01 04.01.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	422.431.127,00	409.809.468,50	(12.621.658,50)	
04.01 04.01.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	65.845.000,00	65.315.649,00	(529.351,00)	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65.845.000,00	65.315.649,00	(529.351,00)	
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	356.586.127,00	344.493.819,50	(12.092.307,50)	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	283.334.127,00	271.241.819,50	(12.092.307,50)	
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	73.252.000,00	73.252.000,00	-	
04.01 04.01.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	324.818.000,00	323.372.977,00	(1.445.023,00)	
04.01 04.01.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	272.599.000,00	272.501.000,00	(98.000,00)	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.902.000,00	(98.000,00)	
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	270.599.000,00	270.599.000,00	-	
04.01 04.01.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	52.219.000,00	50.871.977,00	(1.347.023,00)	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.219.000,00	50.871.977,00	(1.347.023,00)	
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.605.460,00	1.579.000,00	(26.460,00)	
04.01 04.01.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.605.460,00	1.579.000,00	(26.460,00)	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.605.460,00	1.579.000,00	(26.460,00)	
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 100	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	490.749.740,00	485.407.700,00	(5.342.040,00)	
04.01 04.01.01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	89.005.620,00	88.946.360,00	(59.260,00)	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	89.005.620,00	88.946.360,00	(59.260,00)	
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	323.250.040,00	318.123.780,00	(5.126.260,00)	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1	Belanja Pegawai	11.775.000,00	11.775.000,00	-	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.475.040,00	76.272.780,00	(202.260,00)	
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3	Belanja Modal	235.000.000,00	230.076.000,00	(4.924.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.01 04.01.01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	78.494.080,00	78.337.560,00	(156.520,00)	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	78.494.080,00	78.337.560,00	(156.520,00)	
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 101	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	565.709.720,00	565.566.940,00	(142.780,00)	
04.01 04.01.01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	79.283.040,00	79.245.780,00	(37.260,00)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.075.000,00	6.075.000,00	-	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	73.208.040,00	73.170.780,00	(37.260,00)	
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	359.232.040,00	359.194.780,00	(37.260,00)	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359.232.040,00	359.194.780,00	(37.260,00)	
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	127.194.640,00	127.126.380,00	(68.260,00)	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	127.194.640,00	127.126.380,00	(68.260,00)	
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	412.418.700,00	412.151.960,00	(266.740,00)	
04.01 04.01.01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan	16.917.540,00	16.914.840,00	(2.700,00)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.917.540,00	16.914.840,00	(2.700,00)	
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	359.718.120,00	359.492.340,00	(225.780,00)	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	13.350.000,00	-	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	346.368.120,00	346.142.340,00	(225.780,00)	
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	35.783.040,00	35.744.780,00	(38.260,00)	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.783.040,00	35.744.780,00	(38.260,00)	
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	535.785.036,00	530.415.540,00	(5.369.496,00)	
04.01 04.01.01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	243.661.040,00	243.476.780,00	(184.260,00)	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	240.511.040,00	240.326.780,00	(184.260,00)	
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	180.028.956,00	177.207.580,00	(2.821.376,00)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	22.400.000,00	(2.600.000,00)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155.028.956,00	154.807.580,00	(221.376,00)	
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	112.095.040,00	109.731.180,00	(2.363.860,00)	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	-	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	103.345.040,00	100.981.180,00	(2.363.860,00)	
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.02 04.01.01 104	Program Penelitian dan Pengembangan	832.013.620,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	
04.02 04.01.01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	475.537.220,00	462.624.380,00	(12.912.840,00)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1	Belanja Pegawai	74.850.000,00	74.325.000,00	(525.000,00)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.687.220,00	45.630.780,00	(56.440,00)	
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3	Belanja Modal	355.000.000,00	342.668.600,00	(12.331.400,00)	
04.01 04.01.01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	42.545.320,00	41.861.140,00	(684.180,00)	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.545.320,00	41.861.140,00	(684.180,00)	
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.01 04.01.01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	313.931.080,00	313.656.530,00	(274.550,00)	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	20.900.000,00	-	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	68.331.080,00	68.166.530,00	(164.550,00)	
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3	Belanja Modal	224.700.000,00	224.590.000,00	(110.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	6.769.744.403,00	6.557.239.289,50	(212.505.113,50)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6.769.744.403,00)	(6.557.239.289,50)	212.505.113,50	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
: 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	22.592.167.883,00	20.820.674.242,90	(1.771.114.206,10)	
04.03 04.03.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.294.116.000,00	10.128.323.175,00	(1.165.413.391,00)	
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	11.294.116.000,00	10.128.323.175,00	(1.165.413.391,00)	
04.03 04.03.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	11.298.051.883,00	10.692.351.067,90	(605.700.815,10)	
04.03 04.03.01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	867.631.550,00	852.951.212,08	(14.680.337,92)	
04.03 04.03.01A 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	161.283.150,00	154.026.725,36	(7.256.424,64)	
04.03 04.03.01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.584.200,00	39.136.700,00	(447.500,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39.584.200,00	39.136.700,00	(447.500,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	121.698.950,00	114.890.025,36	(6.808.924,64)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.198.950,00	113.390.025,36	(6.808.924,64)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
04.03 04.03.01A 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105	<i>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</i>	695.351.400,00	687.935.086,72	(7.416.313,28)	
04.03 04.03.01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	314.652.600,00	314.412.123,36	(240.476,64)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	300.252.600,00	300.012.123,36	(240.476,64)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	260.336.400,00	253.250.463,36	(7.085.936,64)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	5.700.000,00	(600.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254.036.400,00	247.550.463,36	(6.485.936,64)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 105 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	120.362.400,00	120.272.500,00	(89.900,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.362.400,00	120.272.500,00	(89.900,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B	<u>BAGIAN HUKUM</u>	1.364.274.273,00	1.357.520.859,60	(6.753.413,40)	
04.03 04.03.01B 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	230.724.888,00	229.837.951,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	54.588.355,00	54.588.355,00	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.588.355,00	54.588.355,00	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	176.136.533,00	175.249.596,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	176.136.533,00	175.249.596,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106	<i>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum</i>	1.114.004.780,00	1.109.716.272,80	(4.288.507,20)	
04.03 04.03.01B 106 001	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	633.124.100,00	630.624.100,00	(2.500.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	10.500.000,00	(500.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	622.124.100,00	620.124.100,00	(2.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 002	Layanan Bantuan Hukum	390.949.300,00	390.263.200,00	(686.100,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1	Belanja Pegawai	210.075.000,00	210.075.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	180.874.300,00	180.188.200,00	(686.100,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	89.931.380,00	88.828.972,80	(1.102.407,20)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.500.000,00	(250.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	83.181.380,00	82.328.972,80	(852.407,20)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C	<u>BAGIAN PROTOKOL</u>	2.755.858.567,00	2.382.942.348,94	(372.916.218,06)	
04.03 04.03.01C 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.396.674.327,00	1.175.920.510,50	(220.753.816,50)	
04.03 04.03.01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	476.396.000,00	313.278.196,00	(163.117.804,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	476.396.000,00	313.278.196,00	(163.117.804,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	920.278.327,00	862.642.314,50	(57.636.012,50)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	826.054.327,00	782.388.314,50	(43.666.012,50)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	94.224.000,00	80.254.000,00	(13.970.000,00)	
04.03 04.03.01C 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	356.014.000,00	248.359.141,44	(107.654.858,56)	
04.03 04.03.01C 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.971.117,44	(28.882,56)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.971.117,44	(28.882,56)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	346.014.000,00	238.388.024,00	(107.625.976,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	346.014.000,00	238.388.024,00	(107.625.976,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107	<i>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolanan Pemerintahan Daerah</i>	999.970.240,00	955.462.697,00	(44.507.543,00)	
04.03 04.03.01C 107 001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	528.060.000,00	518.814.560,20	(9.245.439,80)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	528.060.000,00	518.814.560,20	(9.245.439,80)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	359.197.240,00	328.553.523,20	(30.643.716,80)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359.197.240,00	328.553.523,20	(30.643.716,80)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	112.713.000,00	108.094.613,60	(4.618.386,40)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.713.000,00	108.094.613,60	(4.618.386,40)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D	BAGIAN UMUM	3.101.413.349,00	2.976.334.648,00	(125.078.701,00)	
04.03 04.03.01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.928.697,00	279.771.874,80	(22.156.822,20)	
04.03 04.03.01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.384.000,00	7.331.200,00	(52.800,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.384.000,00	7.331.200,00	(52.800,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	294.544.697,00	272.440.674,80	(22.104.022,20)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	292.044.697,00	269.940.674,80	(22.104.022,20)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
04.03 04.03.01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	2.773.688.652,00	2.670.973.373,20	(102.715.278,80)	
04.03 04.03.01D 108 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	2.465.298.448,00	2.437.721.905,60	(27.576.542,40)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.891.327.698,00	1.866.262.155,60	(25.065.542,40)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3	Belanja Modal	573.970.750,00	571.459.750,00	(2.511.000,00)	
04.03 04.03.01D 108 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	205.817.784,00	149.728.610,40	(56.089.173,60)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205.817.784,00	149.728.610,40	(56.089.173,60)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	102.572.420,00	83.522.857,20	(19.049.562,80)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	102.572.420,00	83.522.857,20	(19.049.562,80)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E	<u>BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA</u>	933.165.886,00	922.201.179,39	(10.964.706,61)	
04.03 04.03.01E 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	298.542.646,00	293.144.879,39	(5.397.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	37.503.722,00	37.423.722,00	(80.000,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.503.722,00	37.423.722,00	(80.000,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	261.038.924,00	255.721.157,39	(5.317.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260.283.924,00	254.966.157,39	(5.317.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	755.000,00	755.000,00	-	
04.03 04.03.01E 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	101.432.500,00	99.629.420,00	(1.803.080,00)	
04.03 04.03.01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	89.300.000,00	87.941.230,00	(1.358.770,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.591.130,00	(408.870,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	60.300.000,00	59.350.100,00	(949.900,00)	
04.03 04.03.01E 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.132.500,00	11.688.190,00	(444.310,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.132.500,00	11.688.190,00	(444.310,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109	<i>Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</i>	532.494.740,00	528.746.880,00	(3.747.860,00)	
04.03 04.03.01E 109 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.794.740,00	122.396.380,00	(398.360,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.740,00	36.602.380,00	(398.360,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3	Belanja Modal	85.794.000,00	85.794.000,00	-	
04.03 04.03.01E 109 002	Pembinaan BUMD dan BLUD	26.015.000,00	25.795.000,00	(220.000,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.015.000,00	25.795.000,00	(220.000,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 003	Kerjasama Daerah	383.685.000,00	380.555.500,00	(3.129.500,00)	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	255.524.000,00	252.394.500,00	(3.129.500,00)	
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3	Belanja Modal	128.161.000,00	128.161.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	454.449.728,00	454.286.002,00	(163.726,00)	
04.03 04.03.01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.468.200,00	47.445.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat	4.625.000,00	4.625.000,00	-	
	Koordinasi dan Konsultasi				
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.625.000,00	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	42.843.200,00	42.820.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.843.200,00	42.820.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.326.024,00	154.326.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	142.450.000,00	142.450.000,00	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	142.450.000,00	142.450.000,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.876.024,00	11.876.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.876.024,00	11.876.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	251.932.104,00	251.791.078,00	(141.026,00)	
04.03 04.03.01F 110 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	38.737.040,00	38.722.780,00	(14.260,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38.737.040,00	38.722.780,00	(14.260,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	117.691.120,00	117.625.340,00	(65.780,00)	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117.691.120,00	117.625.340,00	(65.780,00)	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	95.503.944,00	95.442.958,00	(60.986,00)	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95.503.944,00	95.442.958,00	(60.986,00)	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G	BAGIAN ORGANISASI	931.072.420,00	900.513.053,90	(30.559.366,10)	
04.03 04.03.01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.065.560,00	278.151.233,90	(3.914.326,10)	
04.03 04.03.01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	51.540.000,00	50.484.941,00	(1.055.059,00)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	50.484.941,00	(1.055.059,00)	
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	230.525.560,00	227.666.292,90	(2.859.267,10)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	229.040.560,00	226.181.292,90	(2.859.267,10)	
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
04.03 04.03.01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.240.000,00	44.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.240.000,00	14.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	14.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03 04.03.01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	602.443.460,00	577.326.670,00	(25.116.790,00)	
04.03 04.03.01G 111 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	115.233.040,00	115.034.780,00	(198.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	77.500.000,00	77.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.733.040,00	37.534.780,00	(198.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 002	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	145.481.080,00	140.273.560,00	(5.207.520,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	37.500.000,00	37.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107.981.080,00	102.773.560,00	(5.207.520,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	167.432.840,00	164.403.580,00	(3.029.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.432.840,00	41.403.580,00	(3.029.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
05.01 04.03.01G 111 004 5 2	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	124.064.500,00	112.810.750,00	(11.253.750,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1	Belanja Pegawai	94.100.000,00	88.725.000,00	(5.375.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29.964.500,00	24.085.750,00	(5.878.750,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2	Implementasi Budaya Pemerintah Kota Yogyakarta	50.232.000,00	44.804.000,00	(5.428.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	-	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.032.000,00	19.604.000,00	(5.428.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H	<u>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN</u>	890.186.110,00	845.601.763,99	(44.584.346,01)	
04.03 04.03.01H 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	424.830.960,00	387.960.765,80	(36.870.194,20)	
04.03 04.03.01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.154.000,00	9.939.548,00	(214.452,00)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.154.000,00	9.939.548,00	(214.452,00)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	414.676.960,00	378.021.217,80	(36.655.742,20)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	381.176.960,00	344.861.417,80	(36.315.542,20)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	33.500.000,00	33.159.800,00	(340.200,00)	
04.03 04.03.01H 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	228.790.750,00	224.616.081,59	(4.174.668,41)	
04.03 04.03.01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	216.000.000,00	214.500.196,59	(1.499.803,41)	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	216.000.000,00	214.500.196,59	(1.499.803,41)	
04.03 04.03.01H 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.790.750,00	10.115.885,00	(2.674.865,00)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.790.750,00	10.115.885,00	(2.674.865,00)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 04.03.01H 112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	235.359.400,00	232.072.416,60	(3.286.983,40)	
02.10 04.03.01H 112 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaa Barang/Jasa	62.383.000,00	61.316.468,80	(1.066.531,20)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57.158.000,00	56.091.468,80	(1.066.531,20)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	70.957.400,00	70.874.914,40	(82.485,60)	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65.182.400,00	65.099.914,40	(82.485,60)	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	102.019.000,00	99.881.033,40	(2.137.966,60)	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96.244.000,00	94.106.033,40	(2.137.966,60)	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	22.592.167.883,00	20.820.674.242,90	(1.771.114.206,10)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(22.592.167.883,00)	(20.820.674.242,90)	1.771.114.206,10	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01A - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01A 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.840.244.550,00	1.706.783.754,08	(133.460.795,92)	
04.03 04.03.01A 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	972.613.000,00	853.832.542,00	(118.780.458,00)	
04.03 04.03.01A 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	972.613.000,00	853.832.542,00	(118.780.458,00)	
04.03 04.03.01A 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	867.631.550,00	852.951.212,08	(14.680.337,92)	
04.03 04.03.01A 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.283.150,00	154.026.725,36	(7.256.424,64)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.584.200,00	39.136.700,00	(447.500,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	39.584.200,00	39.136.700,00	(447.500,00)	
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	121.698.950,00	114.890.025,36	(6.808.924,64)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.198.950,00	113.390.025,36	(6.808.924,64)	
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
04.03 04.03.01A 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.272.400,00	(7.600,00)	
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.717.000,00	1.717.000,00	-	
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 00 5 2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	695.351.400,00	687.935.086,72	(7.416.313,28)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	314.652.600,00	314.412.123,36	(240.476,64)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	-	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	300.252.600,00	300.012.123,36	(240.476,64)	
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01A 105 002 5 2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	260.336.400,00	253.250.463,36	(7.085.936,64)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	5.700.000,00	(600.000,00)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	254.036.400,00	247.550.463,36	(6.485.936,64)	
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	120.362.400,00	120.272.500,00	(89.900,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	120.362.400,00	120.272.500,00	(89.900,00)	
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	1.840.244.550,00	1.706.783.754,08	(133.460.795,92)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(1.840.244.550,00)	(1.706.783.754,08)	133.460.795,92	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01B - BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01B 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.340.482.273,00	2.188.655.865,60	(151.826.407,40)	
04.03 04.03.01B 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	976.208.000,00	831.135.006,00	(145.072.994,00)	
04.03 04.03.01B 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	976.208.000,00	831.135.006,00	(145.072.994,00)	
04.03 04.03.01B 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.364.274.273,00	1.357.520.859,60	(6.753.413,40)	
04.03 04.03.01B 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	230.724.888,00	229.837.951,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	54.588.355,00	54.588.355,00	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	54.588.355,00	54.588.355,00	-	
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	176.136.533,00	175.249.596,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	176.136.533,00	175.249.596,80	(886.936,20)	
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.304.805,00	13.726.835,00	(1.577.970,00)	
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.239.800,00	4.239.800,00	-	
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01B 106 00 5 2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.114.004.780,00	1.109.716.272,80	(4.288.507,20)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	633.124.100,00	630.624.100,00	(2.500.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	10.500.000,00	(500.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	622.124.100,00	620.124.100,00	(2.000.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2	Layanan Bantuan Hukum	390.949.300,00	390.263.200,00	(686.100,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1	Belanja Pegawai	210.075.000,00	210.075.000,00	-	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	180.874.300,00	180.188.200,00	(686.100,00)	
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	89.931.380,00	88.828.972,80	(1.102.407,20)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.500.000,00	(250.000,00)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	83.181.380,00	82.328.972,80	(852.407,20)	
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	2.340.482.273,00	2.188.655.865,60	(151.826.407,40)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2.340.482.273,00)	(2.188.655.865,60)	151.826.407,40	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01C - BAGIAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01C 00 00 5	BELANJA DAERAH	6.009.629.567,00	5.405.011.084,94	(231.322.830,00)	
04.03 04.03.01C 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.253.771.000,00	3.022.068.736,00	(231.322.830,00)	
04.03 04.03.01C 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2.542.771.000,00	2.311.448.170,00	(231.322.830,00)	
	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	711.000.000,00	710.620.566,00	(379.434,00)	
04.03 04.03.01C 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	2.755.858.567,00	2.382.942.348,94	(372.916.218,06)	
04.03 04.03.01C 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.396.674.327,00	1.175.920.510,50	(220.753.816,50)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	476.396.000,00	313.278.196,00	(163.117.804,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	476.396.000,00	313.278.196,00	(163.117.804,00)	
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	920.278.327,00	862.642.314,50	(57.636.012,50)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	826.054.327,00	782.388.314,50	(43.666.012,50)	
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3	Belanja Modal	94.224.000,00	80.254.000,00	(13.970.000,00)	
04.03 04.03.01C 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	356.014.000,00	248.359.141,44	(107.654.858,56)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.971.117,44	(28.882,56)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.971.117,44	(28.882,56)	
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	346.014.000,00	238.388.024,00	(107.625.976,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	346.014.000,00	238.388.024,00	(107.625.976,00)	
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01C 107 00 5 2	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	999.970.240,00	955.462.697,00	(44.507.543,00)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	528.060.000,00	518.814.560,20	(9.245.439,80)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	528.060.000,00	518.814.560,20	(9.245.439,80)	
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	359.197.240,00	328.553.523,20	(30.643.716,80)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	359.197.240,00	328.553.523,20	(30.643.716,80)	
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	112.713.000,00	108.094.613,60	(4.618.386,40)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	112.713.000,00	108.094.613,60	(4.618.386,40)	
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	6.009.629.567,00	5.405.011.084,94	(231.322.830,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(6.009.629.567,00)	(5.405.011.084,94)	231.322.830,00	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01D - BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01D 00 00 5	BELANJA DAERAH	4.221.757.349,00	3.984.301.248,00	(237.456.101,00)	
04.03 04.03.01D 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.344.000,00	1.007.966.600,00	(112.377.400,00)	
04.03 04.03.01D 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.120.344.000,00	1.007.966.600,00	(112.377.400,00)	
04.03 04.03.01D 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.101.413.349,00	2.976.334.648,00	(125.078.701,00)	
04.03 04.03.01D 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.928.697,00	279.771.874,80	(22.156.822,20)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.384.000,00	7.331.200,00	(52.800,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7.384.000,00	7.331.200,00	(52.800,00)	
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	294.544.697,00	272.440.674,80	(22.104.022,20)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	292.044.697,00	269.940.674,80	(22.104.022,20)	
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
04.03 04.03.01D 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	25.097.400,00	(202.600,00)	
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	496.000,00	492.000,00	(4.000,00)	
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 00 5 2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	2.773.688.652,00	2.670.973.373,20	(102.715.278,80)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2	Pelayanan Kerumahtangaan	2.465.298.448,00	2.437.721.905,60	(27.576.542,40)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.891.327.698,00	1.866.262.155,60	(25.065.542,40)	
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3	Belanja Modal	573.970.750,00	571.459.750,00	(2.511.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01D 108 002 5 2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	205.817.784,00	149.728.610,40	(56.089.173,60)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	205.817.784,00	149.728.610,40	(56.089.173,60)	
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	102.572.420,00	83.522.857,20	(19.049.562,80)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	102.572.420,00	83.522.857,20	(19.049.562,80)	
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	4.221.757.349,00	3.984.301.248,00	(237.456.101,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.221.757.349,00)	(3.984.301.248,00)	237.456.101,00	

URUSAN : 04.03 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01E - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01E 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.153.370.886,00	1.959.201.760,39	(194.169.125,61)	
04.03 04.03.01E 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.220.205.000,00	1.037.000.581,00	(183.204.419,00)	
04.03 04.03.01E 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.220.205.000,00	1.037.000.581,00	(183.204.419,00)	
04.03 04.03.01E 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	933.165.886,00	922.201.179,39	(10.964.706,61)	
04.03 04.03.01E 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298.542.646,00	293.144.879,39	(5.397.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	37.503.722,00	37.423.722,00	(80.000,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.503.722,00	37.423.722,00	(80.000,00)	
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	261.038.924,00	255.721.157,39	(5.317.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	260.283.924,00	254.966.157,39	(5.317.766,61)	
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3	Belanja Modal	755.000,00	755.000,00	-	
04.03 04.03.01E 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101.432.500,00	99.629.420,00	(1.803.080,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	89.300.000,00	87.941.230,00	(1.358.770,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.591.130,00	(408.870,00)	
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3	Belanja Modal	60.300.000,00	59.350.100,00	(949.900,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.132.500,00	11.688.190,00	(444.310,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.132.500,00	11.688.190,00	(444.310,00)	
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	696.000,00	680.000,00	(16.000,00)	
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01E 109 00 5 2	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	532.494.740,00	528.746.880,00	(3.747.860,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	122.794.740,00	122.396.380,00	(398.360,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.740,00	36.602.380,00	(398.360,00)	
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3	Belanja Modal	85.794.000,00	85.794.000,00	-	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2	Pembinaan BUMD dan BLUD	26.015.000,00	25.795.000,00	(220.000,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	26.015.000,00	25.795.000,00	(220.000,00)	
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2	Kerjasama Daerah	383.685.000,00	380.555.500,00	(3.129.500,00)	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	255.524.000,00	252.394.500,00	(3.129.500,00)	
02.12 04.03.01E 109 003 5 2 3	Belanja Modal	128.161.000,00	128.161.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	2.153.370.886,00	1.959.201.760,39	(194.169.125,61)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2.153.370.886,00)	(1.959.201.760,39)	194.169.125,61	

URUSAN : 04.03 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01F - BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01F 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.175.672.728,00	1.055.689.498,00	(119.983.230,00)	
04.03 04.03.01F 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	721.223.000,00	601.403.496,00	(119.819.504,00)	
04.03 04.03.01F 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	721.223.000,00	601.403.496,00	(119.819.504,00)	
04.03 04.03.01F 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	454.449.728,00	454.286.002,00	(163.726,00)	
04.03 04.03.01F 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.468.200,00	47.445.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.625.000,00	4.625.000,00	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.625.000,00	-	
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	42.843.200,00	42.820.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.843.200,00	42.820.500,00	(22.700,00)	
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.326.024,00	154.326.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	142.450.000,00	142.450.000,00	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3	Belanja Modal	142.450.000,00	142.450.000,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.876.024,00	11.876.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.876.024,00	11.876.024,00	-	
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	723.400,00	723.400,00	-	
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 00 5 2	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	251.932.104,00	251.791.078,00	(141.026,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	38.737.040,00	38.722.780,00	(14.260,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38.737.040,00	38.722.780,00	(14.260,00)	
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01F 110 002 5 2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	117.691.120,00	117.625.340,00	(65.780,00)	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	117.691.120,00	117.625.340,00	(65.780,00)	
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	95.503.944,00	95.442.958,00	(60.986,00)	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	95.503.944,00	95.442.958,00	(60.986,00)	
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	1.175.672.728,00	1.055.689.498,00	(119.983.230,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(1.175.672.728,00)	(1.055.689.498,00)	119.983.230,00	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01G - BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03.04.03.01G 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03.04.03.01G 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.277.966.420,00	2.163.359.724,90	(114.606.695,10)	
04.03.04.03.01G 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.346.894.000,00	1.262.846.671,00	(84.047.329,00)	
04.03.04.03.01G 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.346.894.000,00	1.262.846.671,00	(84.047.329,00)	
04.03.04.03.01G 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	931.072.420,00	900.513.053,90	(30.559.366,10)	
04.03.04.03.01G 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.065.560,00	278.151.233,90	(3.914.326,10)	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	51.540.000,00	50.484.941,00	(1.055.059,00)	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	50.484.941,00	(1.055.059,00)	
04.03.04.03.01G 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	230.525.560,00	227.666.292,90	(2.859.267,10)	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	229.040.560,00	226.181.292,90	(2.859.267,10)	
04.03.04.03.01G 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.485.000,00	1.485.000,00	-	
04.03.04.03.01G 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.240.000,00	44.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 022 5 2 3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.240.000,00	14.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	14.719.750,00	(1.520.250,00)	
04.03.04.03.01G 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03.04.03.01G 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	323.400,00	315.400,00	(8.000,00)	
04.03.04.03.01G 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01G 111 00 5 2	Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	428.146.960,00	419.711.920,00	(8.435.040,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	115.233.040,00	115.034.780,00	(198.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1	Belanja Pegawai	77.500.000,00	77.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	37.733.040,00	37.534.780,00	(198.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	145.481.080,00	140.273.560,00	(5.207.520,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1	Belanja Pegawai	37.500.000,00	37.500.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	107.981.080,00	102.773.560,00	(5.207.520,00)	
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	167.432.840,00	164.403.580,00	(3.029.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1	Belanja Pegawai	123.000.000,00	123.000.000,00	-	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.432.840,00	41.403.580,00	(3.029.260,00)	
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 00 5 2	Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	174.296.500,00	157.614.750,00	(16.681.750,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	124.064.500,00	112.810.750,00	(11.253.750,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1	Belanja Pegawai	94.100.000,00	88.725.000,00	(5.375.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	29.964.500,00	24.085.750,00	(5.878.750,00)	
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2	Implementasi Budaya Pemerintah Kota Yogyakarta	50.232.000,00	44.804.000,00	(5.428.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	-	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	25.032.000,00	19.604.000,00	(5.428.000,00)	
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	2.277.966.420,00	2.163.359.724,90	(114.606.695,10)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2.277.966.420,00)	(2.163.359.724,90)	114.606.695,10	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01H - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.03 04.03.01H 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.03 04.03.01H 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.573.044.110,00	2.357.671.306,99	(215.372.803,01)	
04.03 04.03.01H 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.682.858.000,00	1.512.069.543,00	(170.788.457,00)	
04.03 04.03.01H 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	1.682.858.000,00	1.512.069.543,00	(170.788.457,00)	
04.03 04.03.01H 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	890.186.110,00	845.601.763,99	(44.584.346,01)	
04.03 04.03.01H 001 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	424.830.960,00	387.960.765,80	(36.870.194,20)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.154.000,00	9.939.548,00	(214.452,00)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.154.000,00	9.939.548,00	(214.452,00)	
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2	Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	414.676.960,00	378.021.217,80	(36.655.742,20)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	381.176.960,00	344.861.417,80	(36.315.542,20)	
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3	Belanja Modal	33.500.000,00	33.159.800,00	(340.200,00)	
04.03 04.03.01H 002 00 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228.790.750,00	224.616.081,59	(4.174.668,41)	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	216.000.000,00	214.500.196,59	(1.499.803,41)	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3	Belanja Modal	216.000.000,00	214.500.196,59	(1.499.803,41)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.790.750,00	10.115.885,00	(2.674.865,00)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.790.750,00	10.115.885,00	(2.674.865,00)	
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 00 5 2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	952.500,00	(252.500,00)	
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
02.10 04.03.01H 112 00 5 2	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	235.359.400,00	232.072.416,60	(3.286.983,40)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	62.383.000,00	61.316.468,80	(1.066.531,20)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57.158.000,00	56.091.468,80	(1.066.531,20)	
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	70.957.400,00	70.874.914,40	(82.485,60)	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	65.182.400,00	65.099.914,40	(82.485,60)	
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	102.019.000,00	99.881.033,40	(2.137.966,60)	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	-	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	96.244.000,00	94.106.033,40	(2.137.966,60)	
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA:	2.573.044.110,00	2.357.671.306,99	(215.372.803,01)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(2.573.044.110,00)	(2.357.671.306,99)	215.372.803,01	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 04.04 - SEKRETARIAT DPRD
: 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.04 04.04.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	53.494.473.438,00	42.121.045.842,30	(11.373.427.595,70)	
04.04 04.04.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.437.850.400,00	22.053.505.713,00	(1.384.344.687,00)	
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	23.437.850.400,00	22.053.505.713,00	(1.384.344.687,00)	
04.04 04.04.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	30.056.623.038,00	20.067.540.129,30	(9.989.082.908,70)	
04.04 04.04.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.424.565.699,00	3.709.359.963,23	(715.205.735,77)	
04.04 04.04.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	345.770.000,00	214.477.146,00	(131.292.854,00)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	345.770.000,00	214.477.146,00	(131.292.854,00)	
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	4.078.795.699,00	3.494.882.817,23	(583.912.881,77)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.872.180.699,00	2.303.632.817,23	(568.547.881,77)	
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.206.615.000,00	1.191.250.000,00	(15.365.000,00)	
04.04 04.04.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.006.425.380,00	645.299.066,00	(361.126.314,00)	
04.04 04.04.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	431.736.000,00	429.739.000,00	(1.997.000,00)	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	361.736.000,00	359.944.000,00	(1.792.000,00)	
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	70.000.000,00	69.795.000,00	(205.000,00)	
04.04 04.04.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	574.689.380,00	215.560.066,00	(359.129.314,00)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	574.689.380,00	215.560.066,00	(359.129.314,00)	
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.412.000,00	9.563.400,00	(848.600,00)	
04.04 04.04.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10.412.000,00	9.563.400,00	(848.600,00)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.412.000,00	9.563.400,00	(848.600,00)	
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 113	Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	9.050.484.959,00	5.090.573.813,96	(3.959.911.145,04)	
04.04 04.04.01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	829.416.400,00	723.564.500,00	(105.851.900,00)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	828.416.400,00	722.567.300,00	(105.849.100,00)	
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3	Belanja Modal	1.000.000,00	997.200,00	(2.800,00)	
04.04 04.04.01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	5.985.395.000,00	3.069.076.331,96	(2.916.318.668,04)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.982.395.000,00	3.069.076.331,96	(2.913.318.668,04)	
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.04 04.04.01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	2.235.673.559,00	1.297.932.982,00	(937.740.577,00)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.235.673.559,00	1.297.932.982,00	(937.740.577,00)	
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	15.564.735.000,00	10.612.743.886,11	(4.951.991.113,89)	
04.04 04.04.01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	1.774.210.000,00	873.466.325,98	(900.743.674,02)	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.210.000,00	873.466.325,98	(900.743.674,02)	
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	8.404.240.000,00	5.037.114.247,13	(3.367.125.752,87)	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.404.240.000,00	5.037.114.247,13	(3.367.125.752,87)	
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	5.386.285.000,00	4.702.163.313,00	(684.121.687,00)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.386.285.000,00	4.702.163.313,00	(684.121.687,00)	
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	53.494.473.438,00	42.121.045.842,30	(11.373.427.595,70)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(53.494.473.438,00)	(42.121.045.842,30)	11.373.427.595,70	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.05 04.05.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	4.971.074.436,00	4.732.018.771,74	(239.055.664,26)	
04.05 04.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.172.025.000,00	3.949.900.292,00	(222.124.708,00)	
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	4.172.025.000,00	3.949.900.292,00	(222.124.708,00)	
04.05 04.05.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	799.049.436,00	782.118.479,74	(16.930.956,26)	
04.05 04.05.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	443.184.952,00	434.457.255,74	(8.727.696,26)	
04.05 04.05.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.588.700,00	31.588.700,00	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31.588.700,00	31.588.700,00	-	
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	411.596.252,00	402.868.555,74	(8.727.696,26)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	411.448.252,00	402.720.555,74	(8.727.696,26)	
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	148.000,00	148.000,00	-	
04.05 04.05.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	78.289.500,00	73.785.106,00	(4.504.394,00)	
04.05 04.05.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	21.675.000,00	20.666.600,00	(1.008.400,00)	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	21.675.000,00	20.666.600,00	(1.008.400,00)	
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56.614.500,00	53.118.506,00	(3.495.994,00)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	56.614.500,00	53.118.506,00	(3.495.994,00)	
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	2.520.000,00	2.520.000,00	-	
04.05 04.05.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 115	<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</i>	166.366.100,00	164.772.850,00	(1.593.250,00)	
04.05 04.05.01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	10.048.700,00	9.697.600,00	(351.100,00)	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	8.348.700,00	7.997.600,00	(351.100,00)	
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 115 002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	156.317.400,00	155.075.250,00	(1.242.150,00)	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1	Belanja Pegawai	138.500.000,00	137.300.000,00	(1.200.000,00)	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.817.400,00	17.775.250,00	(42.150,00)	
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.05 04.05.01 116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	23.641.000,00	22.633.250,00	(1.007.750,00)	
04.05 04.05.01 116 001	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	10.641.000,00	9.993.250,00	(647.750,00)	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.641.000,00	9.993.250,00	(647.750,00)	
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	13.000.000,00	12.640.000,00	(360.000,00)	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.640.000,00	(360.000,00)	
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	15.053.200,00	14.154.400,00	(898.800,00)	
04.05 04.05.01 117 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	13.139.200,00	12.334.200,00	(805.000,00)	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.139.200,00	12.334.200,00	(805.000,00)	
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	1.914.000,00	1.820.200,00	(93.800,00)	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.914.000,00	1.820.200,00	(93.800,00)	
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	27.168.900,00	27.011.300,00	(157.600,00)	
04.05 04.05.01 118 001	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	10.414.500,00	10.391.100,00	(23.400,00)	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.414.500,00	10.391.100,00	(23.400,00)	
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	16.754.400,00	16.620.200,00	(134.200,00)	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.754.400,00	16.620.200,00	(134.200,00)	
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.05 04.05.01 128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	42.825.784,00	42.784.318,00	(41.466,00)	
04.05 04.05.01 128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Pengawasan	42.825.784,00	42.784.318,00	(41.466,00)	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35.225.784,00	35.184.318,00	(41.466,00)	
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	4.971.074.436,00	4.732.018.771,74	(239.055.664,26)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(4.971.074.436,00)	(4.732.018.771,74)	239.055.664,26	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	
04.06 04.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	172.812.109.006,00	153.478.795.369,00	(19.333.313.637,00)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	167.810.830.600,00	148.627.265.284,00	(19.183.565.316,00)	
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	167.810.830.600,00	148.627.265.284,00	(19.183.565.316,00)	
04.06 04.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	5.001.278.406,00	4.851.530.085,00	(149.748.321,00)	
04.06 04.06.01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.013.243.606,00	1.985.255.878,00	(27.987.728,00)	
04.06 04.06.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48.810.181,00	41.178.181,00	(7.632.000,00)	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	48.810.181,00	41.178.181,00	(7.632.000,00)	
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.964.433.425,00	1.944.077.697,00	(20.355.728,00)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	700.533.425,00	684.678.947,00	(15.854.478,00)	
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.263.900.000,00	1.259.398.750,00	(4.501.250,00)	
04.06 04.06.01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	194.356.000,00	188.474.371,00	(5.881.629,00)	
04.06 04.06.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	148.606.000,00	148.606.000,00	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	148.606.000,00	148.606.000,00	-	
04.06 04.06.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.750.000,00	39.868.371,00	(5.881.629,00)	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	39.868.371,00	(5.881.629,00)	
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	964.500,00	964.500,00	-	
04.06 04.06.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	964.500,00	964.500,00	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	964.500,00	964.500,00	-	
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	877.993.500,00	829.481.902,00	(48.511.598,00)	
04.06 04.06.01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	348.762.000,00	315.836.200,00	(32.925.800,00)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1	Belanja Pegawai	80.615.000,00	61.530.000,00	(19.085.000,00)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	268.147.000,00	254.306.200,00	(13.840.800,00)	
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 002	Pengembangan Karier ASN	306.978.000,00	301.486.102,00	(5.491.898,00)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1	Belanja Pegawai	231.600.000,00	228.000.000,00	(3.600.000,00)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.378.000,00	73.486.102,00	(1.891.898,00)	
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	32.206.000,00	32.112.600,00	(93.400,00)	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	19.756.000,00	19.662.600,00	(93.400,00)	
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKU M
04.06 04.06.01 119 004	Pengelolaan Penilaian Kompetensi	190.047.500,00	180.047.000,00	(10.000.500,00)	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190.047.500,00	180.047.000,00	(10.000.500,00)	
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	292.974.000,00	289.468.000,00	(3.506.000,00)	
04.06 04.06.01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	62.776.000,00	61.183.000,00	(1.593.000,00)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1	Belanja Pegawai	49.725.000,00	48.525.000,00	(1.200.000,00)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	13.051.000,00	12.658.000,00	(393.000,00)	
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	105.582.000,00	105.582.000,00	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1	Belanja Pegawai	47.425.000,00	47.425.000,00	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	58.157.000,00	58.157.000,00	-	
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	124.616.000,00	122.703.000,00	(1.913.000,00)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1	Belanja Pegawai	89.775.000,00	88.725.000,00	(1.050.000,00)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.841.000,00	33.978.000,00	(863.000,00)	
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	1.621.746.800,00	1.557.885.434,00	(63.861.366,00)	
04.06 04.06.01 121 001	Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN	44.180.800,00	38.594.800,00	(5.586.000,00)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	44.180.800,00	38.594.800,00	(5.586.000,00)	
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.389.626.000,00	1.379.305.634,00	(10.320.366,00)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	-	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.876.000,00	1.370.555.634,00	(10.320.366,00)	
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	187.940.000,00	139.985.000,00	(47.955.000,00)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	187.940.000,00	139.985.000,00	(47.955.000,00)	
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	172.812.109.006,00	153.478.795.369,00	(19.333.313.637,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT) :	(172.812.109.006,00)	(153.478.795.369,00)	19.333.313.637,00	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN
 ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	330.970.187.057,89	396.394.665.940,99	65.424.478.883,10	
04.07 04.07.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	330.970.187.057,89	396.394.665.940,99	65.424.478.883,10	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	59.910.087.013,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	63.000.000.000,00	78.279.066.037,00	15.279.066.037,00	1)PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	13.480.000.000,00	18.691.651.432,00	5.211.651.432,00	2)PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	17.700.000.000,00	24.790.772.505,00	7.090.772.505,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	17.300.000.000,00	20.236.266.301,00	2.936.266.301,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	5.970.000.000,00	6.104.786.668,00	134.786.668,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	2.250.000.000,00	2.171.035.455,00	(78.964.545,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	1.040.000.000,00	1.021.115.187,00	(18.884.813,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	860.000.000,00	625.387.197,00	(234.612.803,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	3.650.000.000,00	3.791.152.932,00	141.152.932,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	750.000.000,00	846.898.360,00	96.898.360,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	38.015.000.000,00	43.521.758.533,00	5.506.758.533,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	38.000.000.000,00	43.502.504.068,00	5.502.504.068,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03	Katering	15.000.000,00	19.254.465,00	4.254.465,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	3.450.000.000,00	3.870.424.584,00	420.424.584,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	900.556.000,00	932.733.067,00	32.177.067,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana	32.415.000,00	93.075.400,00	60.660.400,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05	Pameran	790.000.000,00	867.538.638,00	77.538.638,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07	Karaoke	140.000.000,00	150.848.363,00	10.848.363,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09	Permainan Bilyar dan Bowling	26.037.000,00	27.985.311,00	1.948.311,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10	Pacuan kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11	Permainan Ketangkasan	385.055.000,00	396.585.132,00	11.530.132,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12	Panti Pijat Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	450.000.000,00	511.268.268,00	61.268.268,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13	Pertandingan Olah Raga	13.937.000,00	13.937.875,00	875,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	712.000.000,00	876.452.530,00	164.452.530,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.156.071.238,00	1.156.071.238,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	4.690.000.000,00	5.706.164.497,00	1.016.164.497,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02	Reklame Kain	284.458.000,00	415.789.476,00	131.331.476,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	25.542.000,00	34.117.265,00	8.575.265,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06	Reklame Udara	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11	Reklame Baliho	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12	Reklame Cahaya/Film/Slide	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	251.049.591,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	251.049.591,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	275.287.372,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	275.287.372,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	5.600.000,00	100.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	5.600.000,00	100.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	14.017.233.954,00	3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	14.017.233.954,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	20.582.978.565,00	4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	20.582.978.565,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	30.958.006,98	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	30.958.006,98	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	693.501.557,00	693.501.557,50	0,50	5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02	PD. BPR Bank Jogja	12.265.548.919,00	12.265.548.921,00	2,00	6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03	PT, Bank Pembangunan Daerah DIY	21.829.330.811,00	21.829.330.811,85	0,85	7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	40.287.405,00	71.245.408,63	30.958.003,63	8)Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05	PD. Jogjatama Visesha	-	-	-	9)Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.271.018.365,89	18.754.452.229,01	5.483.433.863,12	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.513.815.076,00	1.620.611.826,00	106.796.750,00	10)Permendagri No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	-	71.263.000,00	71.263.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	96.105.963,00	96.105.963,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Empat	1.379.009.113,00	1.379.009.113,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	38.700.000,00	74.233.750,00	35.533.750,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02	Jasa Giro	3.550.000.000,00	6.167.302.851,00	2.617.302.851,00	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.550.000.000,00	6.167.302.851,00	2.617.302.851,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	5.144.000.000,00	6.242.796.178,63	1.098.796.178,63	11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04	Ganti Rugi Atas kekayaan Daerah (TPTGR)	500.000,00	500.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06	Denda Atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.875.791,00	293.507.070,32	289.631.279,32	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	941.310.969,00	1.210.226.621,00	268.915.652,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	412.158.358,89	628.516.419,06	216.358.060,17	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	115.225.461,00	165.210.136,00	49.984.675,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	47.137.443,89	70.276.459,39	23.139.015,50	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 08	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah	81.594.355,00	100.594.355,00	19.000.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 09	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Non Hibah	168.201.099,00	292.435.468,67	124.234.369,67	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11	Fasilitas Sosial dan Umum	55.545.000,00	55.545.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	462.673.600,00	1.065.360.600,00	602.687.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	197.256.000,00	799.943.000,00	602.687.000,00	12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	22.000.000,00	22.000.000,00	-	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04	Pengelolaan Reksa Arcade	243.417.600,00	243.417.600,00	-	13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 24	Denda Hasil Operasi Yustisi	124.214.000,00	138.046.000,00	13.832.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26	Jaminan Bongkar	277.476.460,00	306.549.309,00	29.072.849,00	14)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	277.476.460,00	306.549.309,00	29.072.849,00	15)Perwal No 20/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31	Pendapatan Bunga Pajak	785.449.111,00	1.025.490.354,00	240.041.243,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	32.140.930.660,00	30.204.145.786,43	(1.936.784.873,57)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.373.166.000,00	20.900.320.705,00	(1.472.845.295,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	22.373.166.000,00	20.900.320.705,00	(1.472.845.295,00)	
04.07 04.07.01 00 00	BELANJA LANGSUNG	9.767.764.660,00	9.303.825.081,43	(463.939.578,57)	
04.07 04.07.01 001	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	5.783.488.231,00	5.627.716.337,38	(155.771.893,62)	
04.07 04.07.01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12.900.000,00	9.693.570,00	(3.206.430,00)	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	9.693.570,00	(3.206.430,00)	
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	5.770.588.231,00	5.618.022.767,38	(152.565.463,62)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.769.447.731,00	5.616.882.267,38	(152.565.463,62)	
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3	Belanja Modal	1.140.500,00	1.140.500,00	-	
04.07 04.07.01 002	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	109.358.780,00	99.263.712,80	(10.095.067,20)	
04.07 04.07.01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	109.358.780,00	99.263.712,80	(10.095.067,20)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	109.358.780,00	99.263.712,80	(10.095.067,20)	
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 006	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	734.000,00	731.000,00	(3.000,00)	
04.07 04.07.01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	734.000,00	731.000,00	(3.000,00)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	734.000,00	731.000,00	(3.000,00)	
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 122	<i>Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran</i>	59.796.180,00	59.468.992,80	(327.187,20)	
04.07 04.07.01 122 001	Perencanaan Anggaran	47.982.780,00	47.677.892,80	(304.887,20)	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1	Belanja Pegawai	6.175.000,00	6.175.000,00	-	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	41.807.780,00	41.502.892,80	(304.887,20)	
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002	Pengendalian Anggaran	11.813.400,00	11.791.100,00	(22.300,00)	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.813.400,00	11.791.100,00	(22.300,00)	
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 123	<i>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer</i>	78.908.758,00	78.560.565,60	(348.192,40)	
04.07 04.07.01 123 001	Pengendalian Belanja Daerah	21.658.200,00	21.561.200,00	(97.000,00)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1	Belanja Pegawai	10.450.000,00	10.450.000,00	-	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.208.200,00	11.111.200,00	(97.000,00)	
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	57.250.558,00	56.999.365,60	(251.192,40)	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	-	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.025.558,00	51.774.365,60	(251.192,40)	
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	350.400.600,00	295.387.141,00	(55.013.459,00)	
04.07 04.07.01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	303.195.600,00	248.182.141,00	(55.013.459,00)	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1	Belanja Pegawai	35.700.000,00	28.875.000,00	(6.825.000,00)	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	267.495.600,00	219.307.141,00	(48.188.459,00)	
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	47.205.000,00	47.205.000,00	-	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1	Belanja Pegawai	28.875.000,00	28.875.000,00	-	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	18.330.000,00	-	
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan	817.326.791,00	802.519.107,40	(14.807.683,60)	
04.07 04.07.01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	463.407.795,00	456.171.417,60	(7.236.377,40)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	12.825.000,00	-	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	450.582.795,00	443.346.417,60	(7.236.377,40)	
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	87.398.346,00	80.485.897,80	(6.912.448,20)	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1	Belanja Pegawai	46.750.000,00	41.975.000,00	(4.775.000,00)	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40.648.346,00	38.510.897,80	(2.137.448,20)	
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	266.520.650,00	265.861.792,00	(658.858,00)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1	Belanja Pegawai	190.000.000,00	189.466.000,00	(534.000,00)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76.520.650,00	76.395.792,00	(124.858,00)	
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1.629.539.780,00	1.486.070.511,20	(143.469.268,80)	
04.07 04.07.01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	365.134.780,00	359.811.511,20	(5.323.268,80)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1	Belanja Pegawai	241.000.000,00	240.700.000,00	(300.000,00)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	124.134.780,00	119.111.511,20	(5.023.268,80)	
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	1.264.405.000,00	1.126.259.000,00	(138.146.000,00)	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.264.405.000,00	1.126.259.000,00	(138.146.000,00)	
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	938.211.540,00	854.107.713,25	(84.103.826,75)	
04.07 04.07.01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	463.323.280,00	452.237.352,80	(11.085.927,20)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	463.323.280,00	452.237.352,80	(11.085.927,20)	
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	330.380.280,00	269.598.022,24	(60.782.257,76)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	2.925.000,00	-	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327.455.280,00	266.673.022,24	(60.782.257,76)	
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	
04.07 04.07.01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	144.507.980,00	132.272.338,21	(12.235.641,79)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1	Belanja Pegawai	10.775.000,00	5.000.000,00	(5.775.000,00)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	75.107.780,00	72.284.492,80	(2.823.287,20)	
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3	Belanja Modal	58.625.200,00	54.987.845,41	(3.637.354,59)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	330.970.187.057,89	396.394.665.940,99	65.424.478.883,10	
	JUMLAH BELANJA DAERAH :	32.140.930.660,00	30.204.145.786,43	(1.936.784.873,57)	
	SURPLUS/DEFISIT :	298.829.256.397,89	366.190.520.154,56	67.361.263.756,67	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN
 ORGANISASI : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4	PENDAPATAN PPKD	1.159.957.479.936,75	1.136.576.648.797,42	(20.779.003.674,33)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	(21.481.524.080,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	(4.630.364.301,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	(3.651.085.401,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	45.569.393.017,00	43.680.510.229,00	(1.888.882.788,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	5.226.991.301,00	3.464.788.688,00	(1.762.202.613,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	(979.278.900,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	93.260.759,00	35.906.013,00	(57.354.746,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.651.338.439,00	788.276.289,00	(863.062.150,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	424.188,00	788.301,00	364.113,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	967.934.873,00	908.708.756,00	(59.226.117,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	(12.458.381.779,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	51.190.623.000,00	42.628.557.012,00	(8.562.065.988,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	17.073.162.000,00	15.502.024.106,00	(1.571.137.894,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	1.132.185.000,00	1.129.743.474,00	(2.441.526,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	940.400.000,00	891.681.800,00	(48.718.200,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	6.513.911.000,00	2.968.890.802,00	(3.545.020.198,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	2.556.255.000,00	2.556.255.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	8.020.134.000,00	7.039.472.000,00	(980.662.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	1.258.278.000,00	1.243.120.000,00	(15.158.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	1.529.631.000,00	1.485.526.105,00	(44.104.895,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19	Sanitasi	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20	Jalan	7.744.978.000,00	6.224.252.000,00	(1.520.726.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21	Pasar	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22	Pariwisata	4.421.689.000,00	3.587.591.725,00	(834.097.275,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	103.902.055.772,00	100.005.739.981,00	(3.896.315.791,00)	Informasi resmi Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	9.659.400.000,00	7.001.400.000,00	(2.658.000.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67.379.612.000,00	67.379.612.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	18.849.666.772,00	20.349.146.772,00	1.499.480.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	1.016.240.000,00	-	(1.016.240.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	291.464.000,00	-	(291.464.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1.758.980.000,00	1.522.849.200,00	(236.130.800,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1.412.105.000,00	1.366.399.230,00	(45.705.770,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.434.100.000,00	1.605.487.500,00	(828.612.500,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	564.662.000,00	551.028.879,00	(13.633.121,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	229.816.400,00	(114.233.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13	Pengawasan Obat dan Makanan	191.776.000,00	-	(191.776.000,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	702.520.405,67	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	62.517.650.000,00	59.813.911.135,00	(101.911.400,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 01 01	Pemerintah	33.184.750.000,00	28.836.922.535,00		
04.08 04.07.02 00 00 4 3 1 05	Hibah dari Luar Negeri		1.746.000.000,00		
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06	Hibah Dana BOSN	29.332.900.000,00	29.230.988.600,00	(101.911.400,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.588.802.138,00	47.368.670.845,00	(1.220.131.293,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.278.259.903,00	18.535.933.793,00	(1.742.326.110,00)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.766.527.500,00	29.209.668.052,00	3.443.140.552,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.705.200,00	40.333.314,00	8.628.114,00	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	24.698.590.062,75	25.810.732.872,00	1.112.142.809,25	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
04.07 04.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	326.033.399.931,09	139.501.121.733,58	#####	
04.07 04.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	326.033.399.931,09	139.501.121.733,58	#####	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	(11.398.369.592,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	(7.101.527.600,00)	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	#####	
	JUMLAH PENDAPATAN PPKD :	1.159.957.479.936,75	1.136.576.648.797,42	(20.779.003.674,33)	
	JUMLAH BELANJA PPKD :	326.033.399.931,09	139.501.121.733,58	#####	
	SURPLUS/DEFISIT :	833.924.080.005,66	997.075.527.063,84	165.753.274.523,18	

Keterangan :

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditian Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman

115

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6	PEMBIAYAAN				
04.07 04.07.01 00 00 6 1	PENERIMAAN	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	419.320.000,00	
	PEMBIAYAAN DAERAH				
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01	Pelampauan Penerimaan PAD	36.037.785.879,27	36.037.785.879,27	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01	Pajak Daerah	25.884.448.031,00	25.884.448.031,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02	Retribusi Daerah	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.074.306,01	39.074.306,01	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.114.263.542,26	10.114.263.542,26	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	125.933.792.469,40	125.933.792.469,40	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	43.735.526.059,00	43.735.526.059,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	11.838.483.465,19	11.838.483.465,19	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03	Belanja Barang dan Jasa	28.554.167.514,48	28.554.167.514,48	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04	Belanja Modal	26.546.846.520,21	26.546.846.520,21	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07	Belanja Hibah	6.351.935.193,00	6.351.935.193,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08	Belanja Bantuan Sosial	975.157.000,00	975.157.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 09	Belanja Bantuan Keuangan	21.557.591,00	21.557.591,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11	Belanja Tidak Terduga	7.910.119.126,52	7.910.119.126,52	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06	Sisa Belanja DAK	14.899.087.047,67	14.899.087.047,67	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15	DAK Non Fisik BOP PAUD	2.658.000.000,00	2.658.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16	DAK Non Fisik TPG	2.926.804.260,00	2.926.804.260,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	824.972.891,00	824.972.891,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	15.279.029,00	15.279.029,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	322.074.194,00	322.074.194,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	236.130.800,00	236.130.800,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22	DAK Non Fisik Tamsil Guru	5.695.147.500,00	5.695.147.500,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23	DAK Non Fisik Adminduk	45.705.770,00	45.705.770,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24	DAK Fisik Perdagangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 26	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	828.612.500,00	828.612.500,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 27	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Kopersi dan UKM	13.633.121,00	13.633.121,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 28	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	114.233.600,00	114.233.600,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 29	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 30	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	317.089.013,22	317.089.013,22	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 31	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	2.599.000,00	2.599.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 32	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	30.527.341,45	30.527.341,45	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 33	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 34	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 35	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	863.046.028,00	863.046.028,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 36	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	5.232.000,00	5.232.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 03	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09	Sisa Belanja BLUD	43.469.467.726,11	43.469.467.726,11	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01	Silpa BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	3.562.497.919,44	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02	Silpa BLUD RSUD	16.315.175.635,26	16.315.175.635,26	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.669.279.394,65	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	5.124.325.375,60	5.124.325.375,60	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05	Silpa BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	8.539.523.751,80	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06	Silpa BLUD UPT Cor Logam	82.005.512,20	82.005.512,20	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 07	Silpa Kas Dana BOS 2019	8.176.660.137,16	8.176.660.137,16	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	410.000.000,00	410.000.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	3.300.000,00	12.620.000,00	9.320.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	Jumlah Pembiayaan Netto	200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	419.320.000,00	
04.07 04.07.01 00 00 6 2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	382.914.304.828,36	-	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	114.300.951.984,00	317.386.305.271,00	123.508.432.761,00	555.195.690.016,00	109.424.751.237,00	269.965.585.252,94	111.735.452.998,63	491.125.789.488,57	(64.069.900.527,43)	88,46
01 01	URUSAN PENDIDIKAN	41.736.222.121,00	68.924.652.221,00	21.905.806.482,00	132.566.680.824,00	39.506.481.121,00	58.635.293.550,00	20.708.602.725,00	118.850.377.396,00	(13.716.303.428,00)	89,65
01 01 01	DINAS PENDIDIKAN	41.736.222.121,00	68.924.652.221,00	21.905.806.482,00	132.566.680.824,00	39.506.481.121,00	58.635.293.550,00	20.708.602.725,00	118.850.377.396,00	(13.716.303.428,00)	89,65
01 01 01 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.900.366.624,00	12.495.266.634,00	128.380.000,00	22.524.013.258,00	9.669.170.511,00	11.910.932.541,00	116.550.000,00	21.696.653.052,00	(827.360.206,00)	96,33
01 01 01 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	167.915.000,00	-	167.915.000,00	-	148.914.675,00	-	148.914.675,00	(19.000.325,00)	88,68
01 01 01 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.366.624,00	12.327.351.634,00	128.380.000,00	22.356.098.258,00	9.669.170.511,00	11.762.017.866,00	116.550.000,00	21.547.738.377,00	(808.359.881,00)	96,38
01 01 01 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	511.158.240,00	500.897.329,00	1.012.055.569,00	-	462.669.692,00	500.396.839,00	963.066.531,00	(48.989.038,00)	95,16
01 01 01 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	340.318.240,00	500.897.329,00	841.215.569,00	-	336.363.290,00	500.396.839,00	836.760.129,00	(4.455.440,00)	99,47
01 01 01 01 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	170.840.000,00	-	170.840.000,00	-	126.306.402,00	-	126.306.402,00	(44.533.598,00)	73,93
01 01 01 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	45.185.000,00	-	45.185.000,00	-	45.180.000,00	-	45.180.000,00	(5.000,00)	99,99
01 01 01 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	45.185.000,00	-	45.185.000,00	-	45.180.000,00	-	45.180.000,00	(5.000,00)	99,99
01 01 01 01 01 010	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	811.766.000,00	16.410.582.839,00	5.530.407.167,00	22.752.756.006,00	701.142.000,00	14.594.713.636,00	5.070.641.658,00	20.366.497.294,00	(2.386.258.712,00)	89,51
01 01 01 01 01 010 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	-	483.400.500,00	-	483.400.500,00	-	480.789.060,00	-	480.789.060,00	(2.611.440,00)	99,46
01 01 01 01 01 010 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	-	260.773.488,00	126.417.768,00	387.191.256,00	-	260.466.066,00	126.417.768,00	386.883.834,00	(307.422,00)	99,92
01 01 01 01 01 010 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	-	112.977.000,00	-	112.977.000,00	-	112.977.000,00	-	112.977.000,00	-	100,00
01 01 01 01 01 010 004	Pengelolaan BOS SD Negeri	811.766.000,00	15.553.431.851,00	5.403.989.399,00	21.769.187.250,00	701.142.000,00	13.740.481.510,00	4.944.223.890,00	19.385.847.400,00	(2.383.339.850,00)	89,05

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 01 01 01 01 011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	2.384.556.700,00	21.357.560.328,00	8.172.310.844,00	31.914.427.872,00	1.842.798.000,00	17.005.178.062,00	7.555.234.795,00	26.403.210.857,00	(5.511.217.015,00)	82,73
01 01 01 01 01 011 001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	-	785.855.000,00	-	785.855.000,00	-	785.836.000,00	-	785.836.000,00	(19.000,00)	100,00
01 01 01 01 01 011 002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	-	197.526.240,00	1.065.719.700,00	1.263.245.940,00	-	197.311.736,00	1.065.719.700,00	1.263.031.436,00	(214.504,00)	99,98
01 01 01 01 01 011 003	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	-	141.890.100,00	-	141.890.100,00	-	141.164.300,00	-	141.164.300,00	(725.800,00)	99,49
01 01 01 01 01 011 004	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1	269.440.000,00	1.692.462.038,00	215.215.000,00	2.177.117.038,00	245.264.000,00	1.146.916.522,00	213.504.300,00	1.605.684.822,00	(571.432.216,00)	73,75
01 01 01 01 01 011 005	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2	258.350.000,00	1.312.139.639,00	344.690.657,00	1.915.180.296,00	172.520.000,00	779.603.816,00	299.052.800,00	1.251.176.616,00	(664.003.680,00)	65,33
01 01 01 01 01 011 006	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3	176.715.000,00	1.107.261.579,00	290.455.000,00	1.574.431.579,00	101.385.000,00	1.012.702.494,00	265.228.800,00	1.379.316.294,00	(195.115.285,00)	87,61
01 01 01 01 01 011 007	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4	100.060.000,00	1.075.244.949,00	515.086.625,00	1.690.391.574,00	78.340.000,00	777.583.844,00	405.239.625,00	1.261.163.469,00	(429.228.105,00)	74,61
01 01 01 01 01 011 008	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5	156.400.000,00	1.706.403.822,00	525.759.800,00	2.388.563.622,00	82.200.000,00	1.316.630.717,00	422.324.500,00	1.821.155.217,00	(567.408.405,00)	76,24
01 01 01 01 01 011 009	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6	102.539.200,00	1.620.011.714,00	362.086.507,00	2.084.637.421,00	38.762.000,00	1.480.835.585,00	342.428.265,00	1.862.025.850,00	(222.611.571,00)	89,32
01 01 01 01 01 011 010	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7	96.552.000,00	1.032.990.214,00	437.251.755,00	1.566.793.969,00	58.830.000,00	1.000.378.014,00	437.152.355,00	1.496.360.369,00	(70.433.600,00)	95,50
01 01 01 01 01 011 011	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8	175.000.000,00	1.964.340.777,00	1.001.025.000,00	3.140.365.777,00	136.356.000,00	1.315.213.060,00	998.813.300,00	2.450.382.360,00	(689.983.417,00)	78,03
01 01 01 01 01 011 012	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9	106.400.000,00	1.246.736.994,00	317.535.500,00	1.670.672.494,00	106.400.000,00	1.042.737.357,00	306.901.500,00	1.456.038.857,00	(214.633.637,00)	87,15
01 01 01 01 01 011 013	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10	135.000.000,00	954.548.015,00	643.500.000,00	1.733.048.015,00	128.030.000,00	844.323.808,00	593.406.860,00	1.565.760.668,00	(167.287.347,00)	90,35
01 01 01 01 01 011 014	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11	130.828.000,00	738.278.348,00	282.232.800,00	1.151.339.148,00	128.470.000,00	635.200.543,00	269.850.899,00	1.033.521.442,00	(117.817.706,00)	89,77
01 01 01 01 01 011 015	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12	120.000.000,00	887.056.098,00	398.975.000,00	1.406.031.098,00	119.150.000,00	886.877.665,00	386.857.960,00	1.392.885.625,00	(13.145.473,00)	99,07
01 01 01 01 01 011 016	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13	152.867.500,00	725.660.518,00	216.650.000,00	1.095.178.018,00	110.890.000,00	607.292.908,00	187.079.300,00	905.262.208,00	(189.915.810,00)	82,66
01 01 01 01 01 011 017	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14	120.000.000,00	885.479.241,00	325.600.000,00	1.331.079.241,00	119.661.000,00	840.399.481,00	324.880.200,00	1.284.940.681,00	(46.138.560,00)	96,53
01 01 01 01 01 011 018	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15	150.000.000,00	1.843.332.091,00	818.827.500,00	2.812.159.591,00	119.900.000,00	1.249.402.213,00	670.649.400,00	2.039.951.613,00	(772.207.978,00)	72,54
01 01 01 01 01 011 019	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16	134.405.000,00	1.440.342.951,00	411.700.000,00	1.986.447.951,00	96.640.000,00	944.767.999,00	366.145.031,00	1.407.553.030,00	(578.894.921,00)	70,86
01 01 01 01 01 012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	3.099.625.000,00	1.840.075.568,00	1.355.141.330,00	6.294.841.898,00	3.035.550.000,00	1.640.363.614,00	1.332.553.300,00	6.008.466.914,00	(286.374.984,00)	95,45
01 01 01 01 01 012 001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	348.025.000,00	1.041.772.000,00	1.340.741.330,00	2.730.538.330,00	342.550.000,00	948.273.978,00	1.319.078.300,00	2.609.902.278,00	(120.636.052,00)	95,58
01 01 01 01 01 012 002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2.751.600.000,00	663.020.568,00	14.400.000,00	3.429.020.568,00	2.693.000.000,00	558.266.636,00	13.475.000,00	3.264.741.636,00	(164.278.932,00)	95,21
01 01 01 01 01 012 003	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	-	135.283.000,00	-	135.283.000,00	-	133.823.000,00	-	133.823.000,00	(1.460.000,00)	98,92
01 01 01 01 01 013	Program Pengembangan Pendidikan	25.539.907.797,00	16.264.823.612,00	6.218.669.812,00	48.023.401.221,00	24.257.820.610,00	12.976.256.005,00	6.133.226.133,00	43.367.302.748,00	(4.656.098.473,00)	90,30
01 01 01 01 01 013 001	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.490.000,00	276.418.800,00	-	304.908.800,00	28.490.000,00	276.418.800,00	-	304.908.800,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 01 01 01 01 013 002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.039.000.000,00	71.196.568,00	-	18.110.196.568,00	17.637.719.400,00	68.181.676,00	-	17.705.901.076,00	(404.295.492,00)	97,77
01 01 01 01 01 013 003	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	-	907.224.080,00	60.000.000,00	967.224.080,00	-	907.190.060,00	58.771.900,00	965.961.960,00	(1.262.120,00)	99,87
01 01 01 01 01 013 004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	590.400.000,00	456.820.600,00	-	1.047.220.600,00	582.800.000,00	454.816.636,00	-	1.037.616.636,00	(9.603.964,00)	99,08
01 01 01 01 01 013 005	Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK)	4.931.879.428,00	14.308.663.700,00	6.109.674.072,00	25.350.217.200,00	4.174.361.500,00	11.026.207.376,00	6.025.458.493,00	21.226.027.369,00	(4.124.189.831,00)	83,73
01 01 01 01 01 013 006	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	1.950.138.369,00	244.499.864,00	48.995.740,00	2.243.633.973,00	1.834.449.710,00	243.441.457,00	48.995.740,00	2.126.886.907,00	(116.747.066,00)	94,80
01 02	URUSAN KESEHATAN	69.811.641.863,00	188.609.617.977,00	41.100.404.573,00	299.521.664.413,00	67.310.927.116,00	153.592.157.867,73	34.437.581.357,00	255.340.666.340,73	(44.180.998.072,27)	85,25
01 02 01	DINAS KESEHATAN	24.143.174.063,00	121.409.830.534,00	12.071.455.573,00	157.624.460.170,00	21.196.162.434,00	107.574.310.618,99	7.684.488.144,00	136.454.961.196,99	(21.169.498.973,01)	86,57
01 02 01 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.395.797.300,00	82.372.700,00	4.478.170.000,00	-	4.292.775.700,00	81.912.300,00	4.374.688.000,00	(103.482.000,00)	97,69
01 02 01 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	105.340.000,00	-	105.340.000,00	-	68.840.078,00	-	68.840.078,00	(36.499.922,00)	65,35
01 02 01 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	4.290.457.300,00	82.372.700,00	4.372.830.000,00	-	4.223.935.622,00	81.912.300,00	4.305.847.922,00	(66.982.078,00)	98,47
01 02 01 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	257.122.000,00	-	257.122.000,00	-	211.300.391,00	-	211.300.391,00	(45.821.609,00)	82,18
01 02 01 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	76.211.000,00	-	76.211.000,00	-	75.115.000,00	-	75.115.000,00	(1.096.000,00)	98,56
01 02 01 02 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	180.911.000,00	-	180.911.000,00	-	136.185.391,00	-	136.185.391,00	(44.725.609,00)	75,28
01 02 01 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	36.495.000,00	-	36.495.000,00	-	35.814.336,00	-	35.814.336,00	(680.664,00)	98,13
01 02 01 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	36.495.000,00	-	36.495.000,00	-	35.814.336,00	-	35.814.336,00	(680.664,00)	98,13
01 02 01 02 01 014	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	16.292.124.063,00	26.460.704.730,00	2.790.993.996,00	45.543.822.789,00	14.796.230.531,00	21.513.031.141,17	2.005.616.416,00	38.314.878.088,17	(7.228.944.700,83)	84,13
01 02 01 02 01 014 001	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	625.033.000,00	287.591.366,00	100.148.848,00	1.012.773.214,00	537.534.130,00	219.261.053,00	72.593.320,00	829.388.503,00	(183.384.711,00)	81,89
01 02 01 02 01 014 002	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	406.072.430,00	271.104.662,00	63.389.200,00	740.566.292,00	356.629.754,00	206.871.178,00	43.662.100,00	607.163.032,00	(133.403.260,00)	81,99
01 02 01 02 01 014 003	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	1.062.024.750,00	381.033.933,00	101.600.000,00	1.544.658.683,00	898.714.672,00	235.976.316,00	83.989.800,00	1.218.680.788,00	(325.977.895,00)	78,90
01 02 01 02 01 014 004	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	943.475.000,00	547.508.369,00	111.750.000,00	1.602.733.369,00	841.093.133,00	352.511.950,00	36.137.914,00	1.229.742.997,00	(372.990.372,00)	76,73
01 02 01 02 01 014 005	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	441.044.101,00	237.142.954,00	121.150.000,00	799.337.055,00	380.951.305,00	185.943.611,00	115.223.000,00	682.117.916,00	(117.219.139,00)	85,34
01 02 01 02 01 014 006	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	608.105.825,00	358.557.750,00	46.941.000,00	1.013.604.575,00	523.483.270,00	218.189.732,00	42.452.250,00	784.125.252,00	(229.479.323,00)	77,36

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 007	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	1.549.666.906,00	824.417.502,00	77.400.000,00	2.451.484.408,00	1.526.616.256,00	771.509.771,00	74.734.400,00	2.372.860.427,00	(78.623.981,00)	96,79
01 02 01 02 01 014 008	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	964.590.040,00	728.452.911,00	65.030.000,00	1.758.072.951,00	864.914.204,00	477.704.186,00	59.925.500,00	1.402.543.890,00	(355.529.061,00)	79,78
01 02 01 02 01 014 009	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	586.901.691,00	244.172.805,00	43.300.000,00	874.374.496,00	549.504.435,00	221.805.818,00	35.432.000,00	806.742.253,00	(67.632.243,00)	92,27
01 02 01 02 01 014 010	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	634.290.972,00	463.172.996,00	149.533.313,00	1.246.997.281,00	599.196.612,00	329.253.341,00	99.890.169,00	1.028.340.122,00	(218.657.159,00)	82,47
01 02 01 02 01 014 011	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	1.270.932.000,00	882.740.287,00	285.000.000,00	2.438.672.287,00	1.106.652.701,00	565.665.461,00	222.042.230,00	1.894.360.392,00	(544.311.895,00)	77,68
01 02 01 02 01 014 012	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	1.248.900.000,00	1.114.371.446,00	321.840.000,00	2.685.111.446,00	982.591.365,00	697.940.263,00	120.424.353,00	1.800.955.981,00	(884.155.465,00)	67,07
01 02 01 02 01 014 013	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	736.401.939,00	464.419.250,00	4.800.000,00	1.205.621.189,00	651.964.946,00	303.154.471,17	4.671.700,00	959.791.117,17	(245.830.071,83)	79,61
01 02 01 02 01 014 014	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	459.028.000,00	399.622.381,00	92.773.600,00	951.423.981,00	408.362.952,00	234.889.172,00	26.988.400,00	670.240.524,00	(281.183.457,00)	70,45
01 02 01 02 01 014 015	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	1.646.000.000,00	913.206.034,00	195.000.000,00	2.754.206.034,00	1.602.523.504,00	712.547.245,00	132.890.083,00	2.447.960.832,00	(306.245.202,00)	88,88
01 02 01 02 01 014 016	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	1.542.187.620,00	965.196.335,00	99.786.653,00	2.607.170.608,00	1.420.561.188,00	919.177.360,00	87.417.600,00	2.427.156.148,00	(180.014.460,00)	93,10
01 02 01 02 01 014 017	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	645.046.989,00	445.673.000,00	86.925.500,00	1.177.645.489,00	639.127.215,00	391.510.061,00	81.676.800,00	1.112.314.076,00	(65.331.413,00)	94,45
01 02 01 02 01 014 018	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	922.422.800,00	713.739.252,00	82.606.375,00	1.718.768.427,00	905.808.889,00	619.067.768,00	59.801.700,00	1.584.678.357,00	(134.090.070,00)	92,20
01 02 01 02 01 014 019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	-	904.492.320,00	-	904.492.320,00	-	796.286.207,00	-	796.286.207,00	(108.206.113,00)	88,04
01 02 01 02 01 014 020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	-	1.035.702.760,00	42.050.000,00	1.077.752.760,00	-	964.319.922,00	41.444.000,00	1.005.763.922,00	(71.988.838,00)	93,32
01 02 01 02 01 014 021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	-	1.231.584.952,00	74.000.000,00	1.305.584.952,00	-	1.049.138.561,00	61.815.650,00	1.110.954.211,00	(194.630.741,00)	85,09
01 02 01 02 01 014 022	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	-	1.144.841.000,00	43.000.000,00	1.187.841.000,00	-	906.250.115,00	23.255.000,00	929.505.115,00	(258.335.885,00)	78,25
01 02 01 02 01 014 023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	-	821.811.200,00	34.700.000,00	856.511.200,00	-	771.796.579,00	28.307.930,00	800.104.509,00	(56.406.691,00)	93,41
01 02 01 02 01 014 024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	-	1.029.308.200,00	-	1.029.308.200,00	-	845.178.111,00	-	845.178.111,00	(184.130.089,00)	82,11
01 02 01 02 01 014 025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	-	654.771.493,00	55.999.507,00	710.771.000,00	-	601.837.658,00	55.545.850,00	657.383.508,00	(53.387.492,00)	92,49

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 014 026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	-	755.167.372,00	44.500.000,00	799.667.372,00	-	457.973.031,00	36.467.000,00	494.440.031,00	(305.227.341,00)	61,83
01 02 01 02 01 014 027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	-	698.048.000,00	46.770.000,00	744.818.000,00	-	637.470.890,00	38.228.450,00	675.699.340,00	(69.118.660,00)	90,72
01 02 01 02 01 014 028	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	-	974.507.068,00	52.500.000,00	1.027.007.068,00	-	778.574.705,00	32.780.000,00	811.354.705,00	(215.652.363,00)	79,00
01 02 01 02 01 014 029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	-	1.119.320.000,00	63.000.000,00	1.182.320.000,00	-	972.877.548,00	43.472.000,00	1.016.349.548,00	(165.970.452,00)	85,96
01 02 01 02 01 014 030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	-	657.582.950,00	41.000.000,00	698.582.950,00	-	540.870.778,00	29.536.581,00	570.407.359,00	(128.175.591,00)	81,65
01 02 01 02 01 014 031	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	-	849.825.092,00	29.000.000,00	878.825.092,00	-	799.008.187,00	26.993.564,00	826.001.751,00	(52.823.341,00)	93,99
01 02 01 02 01 014 032	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	-	682.028.390,00	33.000.000,00	715.028.390,00	-	479.858.941,00	19.400.000,00	499.258.941,00	(215.769.449,00)	69,82
01 02 01 02 01 014 033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	-	1.132.198.000,00	65.000.000,00	1.197.198.000,00	-	876.080.468,00	55.935.672,00	932.016.140,00	(265.181.860,00)	77,85
01 02 01 02 01 014 034	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	-	808.088.020,00	75.000.000,00	883.088.020,00	-	753.138.175,00	70.905.000,00	824.043.175,00	(59.044.845,00)	93,31
01 02 01 02 01 014 035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	-	922.725.680,00	-	922.725.680,00	-	861.797.700,00	-	861.797.700,00	(60.927.980,00)	93,40
01 02 01 02 01 014 036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	-	796.579.000,00	42.500.000,00	839.079.000,00	-	757.594.808,00	41.576.400,00	799.171.208,00	(39.907.792,00)	95,24
01 02 01 02 01 015	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.836.000.000,00	20.074.652.393,00	2.009.813.877,00	29.920.466.270,00	6.386.281.903,00	16.767.589.803,00	1.989.462.176,00	25.143.333.882,00	(4.777.132.388,00)	84,03
01 02 01 02 01 015 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	7.836.000.000,00	14.434.905.581,00	1.473.200.000,00	23.744.105.581,00	6.386.281.903,00	11.259.467.407,00	1.469.036.311,00	19.114.785.621,00	(4.629.319.960,00)	80,50
01 02 01 02 01 015 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama	-	5.639.746.812,00	536.613.877,00	6.176.360.689,00	-	5.508.122.396,00	520.425.865,00	6.028.548.261,00	(147.812.428,00)	97,61
01 02 01 02 01 016	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	14.000.000,00	49.590.387.319,00	6.276.711.000,00	55.881.098.319,00	12.600.000,00	45.072.445.993,00	2.867.878.752,00	47.952.924.745,00	(7.928.173.574,00)	85,81
01 02 01 02 01 016 001	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK)	-	143.940.600,00	6.232.711.000,00	6.376.651.600,00	-	134.407.872,00	2.827.410.802,00	2.961.818.674,00	(3.414.832.926,00)	46,45
01 02 01 02 01 016 002	Pelayanan Kesehatan Khusus	-	139.302.124,00	-	139.302.124,00	-	115.999.252,00	-	115.999.252,00	(23.302.872,00)	83,27
01 02 01 02 01 016 003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	-	48.177.691.595,00	-	48.177.691.595,00	-	43.895.556.642,00	-	43.895.556.642,00	(4.282.134.953,00)	91,11
01 02 01 02 01 016 004	Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119	14.000.000,00	1.129.453.000,00	44.000.000,00	1.187.453.000,00	12.600.000,00	926.482.227,00	40.467.950,00	979.550.177,00	(207.902.823,00)	82,49
01 02 01 02 01 017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	-	1.681.774.820,00	96.964.000,00	1.778.738.820,00	-	1.613.510.448,00	96.964.000,00	1.710.474.448,00	(68.264.372,00)	96,16
01 02 01 02 01 017 001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	-	369.511.400,00	-	369.511.400,00	-	366.954.280,00	-	366.954.280,00	(2.557.120,00)	99,31

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 02 01 02 01 017 002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	-	704.563.000,00	-	704.563.000,00	-	649.243.057,00	-	649.243.057,00	(55.319.943,00)	92,15
01 02 01 02 01 017 003	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	-	360.377.000,00	96.964.000,00	457.341.000,00	-	358.551.591,00	96.964.000,00	455.515.591,00	(1.825.409,00)	99,60
01 02 01 02 01 017 004	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	-	247.323.420,00	-	247.323.420,00	-	238.761.520,00	-	238.761.520,00	(8.561.900,00)	96,54
01 02 01 02 01 018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1.050.000,00	17.152.694.772,00	268.000.000,00	17.421.744.772,00	1.050.000,00	16.420.063.457,82	153.374.500,00	16.574.487.957,82	(847.256.814,18)	95,14
01 02 01 02 01 018 001	Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	-	159.874.000,00	23.000.000,00	182.874.000,00	-	152.945.600,00	22.275.000,00	175.220.600,00	(7.653.400,00)	95,81
01 02 01 02 01 018 002	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	1.050.000,00	9.380.126.772,00	-	9.381.176.772,00	1.050.000,00	9.349.658.294,00	-	9.350.708.294,00	(30.468.478,00)	99,68
01 02 01 02 01 018 003	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK)	-	7.612.694.000,00	245.000.000,00	7.857.694.000,00	-	6.917.459.563,82	131.099.500,00	7.048.559.063,82	(809.134.936,18)	89,70
01 02 01 02 01 019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan	-	1.760.202.200,00	546.600.000,00	2.306.802.200,00	-	1.647.779.349,00	489.280.000,00	2.137.059.349,00	(169.742.851,00)	92,64
01 02 01 02 01 019 001	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	-	72.996.000,00	-	72.996.000,00	-	70.188.126,00	-	70.188.126,00	(2.807.874,00)	96,15
01 02 01 02 01 019 002	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	-	1.597.206.200,00	-	1.597.206.200,00	-	1.489.929.047,00	-	1.489.929.047,00	(107.277.153,00)	93,28
01 02 01 02 01 019 003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	-	90.000.000,00	546.600.000,00	636.600.000,00	-	87.662.176,00	489.280.000,00	576.942.176,00	(59.657.824,00)	90,63
01 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	45.668.467.800,00	67.199.787.443,00	29.028.949.000,00	141.897.204.243,00	46.114.764.682,00	46.017.847.248,74	26.753.093.213,00	118.885.705.143,74	(23.011.499.099,26)	83,78
01 02 01 02 01 020	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	45.668.467.800,00	67.199.787.443,00	29.028.949.000,00	141.897.204.243,00	46.114.764.682,00	46.017.847.248,74	26.753.093.213,00	118.885.705.143,74	(23.011.499.099,26)	83,78
01 02 01 02 01 020 001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	39.078.415.800,00	44.113.334.643,00	8.419.500.000,00	91.611.250.443,00	39.749.896.965,00	24.618.483.382,00	7.868.487.195,00	72.236.867.542,00	(19.374.382.901,00)	78,85
01 02 01 02 01 020 002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	6.590.052.000,00	23.086.452.800,00	20.609.449.000,00	50.285.953.800,00	6.364.867.717,00	21.399.363.866,74	18.884.606.018,00	46.648.837.601,74	(3.637.116.198,26)	92,77
01 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.000.000,00	23.267.433.609,00	51.670.473.518,00	74.948.907.127,00	11.000.000,00	22.624.937.504,06	47.881.886.077,63	70.517.823.581,69	(4.431.083.545,31)	94,09
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.750.000,00	22.925.681.967,00	51.512.559.118,00	74.443.991.085,00	5.750.000,00	22.286.133.462,06	47.724.377.132,63	70.016.260.594,69	(4.427.730.490,31)	94,05
01 03 01 03 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.900.517.618,00	27.320.000,00	1.927.837.618,00	-	1.786.716.854,40	26.920.000,00	1.813.636.854,40	(114.200.763,60)	94,08
01 03 01 03 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	80.730.000,00	-	80.730.000,00	-	69.849.550,00	-	69.849.550,00	(10.880.450,00)	86,52
01 03 01 03 01 001 020	Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran	-	1.819.787.618,00	27.320.000,00	1.847.107.618,00	-	1.716.867.304,40	26.920.000,00	1.743.787.304,40	(103.320.313,60)	94,41
01 03 01 03 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	519.647.000,00	-	519.647.000,00	-	478.096.067,00	-	478.096.067,00	(41.550.933,00)	92,00
01 03 01 03 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	29.944.000,00	-	29.944.000,00	(20.056.000,00)	59,89
01 03 01 03 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	469.647.000,00	-	469.647.000,00	-	448.152.067,00	-	448.152.067,00	(21.494.933,00)	95,42
01 03 01 03 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11.182.675,00	-	11.182.675,00	-	10.906.400,00	-	10.906.400,00	(276.275,00)	97,53
01 03 01 03 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	11.182.675,00	-	11.182.675,00	-	10.906.400,00	-	10.906.400,00	(276.275,00)	97,53

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 03 01 03 01 021	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	5.750.000,00	165.418.648,00	23.686.342.000,00	23.857.510.648,00	5.750.000,00	135.456.877,28	23.112.873.532,63	23.254.080.409,91	(603.430.238,09)	97,47
01 03 01 03 01 021 001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	5.750.000,00	36.114.784,00	701.780.000,00	743.644.784,00	5.750.000,00	33.015.223,36	687.521.150,00	726.286.373,36	(17.358.410,64)	97,67
01 03 01 03 01 021 002	Pembangunan Gedung Pemerintah	-	93.483.864,00	22.984.562.000,00	23.078.045.864,00	-	91.415.153,92	22.425.352.382,63	22.516.767.536,55	(561.278.327,45)	97,57
01 03 01 03 01 021 003	Pengawasan Pembangunan	-	35.820.000,00	-	35.820.000,00	-	11.026.500,00	-	11.026.500,00	(24.793.500,00)	30,78
01 03 01 03 01 022	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	17.600.138.034,00	25.560.927.850,00	43.161.065.884,00	-	17.427.312.369,46	22.376.370.800,00	39.803.683.169,46	(3.357.382.714,54)	92,22
01 03 01 03 01 022 001	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	-	26.344.000,00	16.535.612.000,00	16.561.956.000,00	-	26.309.520,00	13.981.504.400,00	14.007.813.920,00	(2.554.142.080,00)	84,58
01 03 01 03 01 022 002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	2.383.114.848,00	2.377.986.536,00	4.761.101.384,00	-	2.252.315.970,86	2.125.637.000,00	4.377.952.970,86	(383.148.413,14)	91,95
01 03 01 03 01 022 003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	-	15.190.679.186,00	6.647.329.314,00	21.838.008.500,00	-	15.148.686.878,60	6.269.229.400,00	21.417.916.278,60	(420.092.221,40)	98,08
01 03 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	2.728.777.992,00	2.237.969.268,00	4.966.747.260,00	-	2.447.644.893,92	2.208.212.800,00	4.655.857.693,92	(310.889.566,08)	93,74
01 03 01 03 01 023 001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	-	107.885.280,00	143.780.000,00	251.665.280,00	-	103.214.700,00	131.685.000,00	234.899.700,00	(16.765.580,00)	93,34
01 03 01 03 01 023 002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	2.620.892.712,00	2.094.189.268,00	4.715.081.980,00	-	2.344.430.193,92	2.076.527.800,00	4.420.957.993,92	(294.123.986,08)	93,76
01 03 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	5.250.000,00	341.751.642,00	157.914.400,00	504.916.042,00	5.250.000,00	338.804.042,00	157.508.945,00	501.562.987,00	(3.353.055,00)	99,34
01 03 02 04 01 024	Program Pembinaan Tata Ruang	-	275.940.562,00	152.155.000,00	428.095.562,00	-	273.080.682,00	152.078.545,00	425.159.227,00	(2.936.335,00)	99,31
01 03 02 04 01 024 001	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	-	171.002.682,00	150.340.000,00	321.342.682,00	-	168.236.422,00	150.334.545,00	318.570.967,00	(2.771.715,00)	99,14
01 03 02 04 01 024 002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	-	75.063.040,00	1.415.000,00	76.478.040,00	-	75.015.680,00	1.380.000,00	76.395.680,00	(82.360,00)	99,89
01 03 02 04 01 024 003	Pembinaan Tata Ruang	-	29.874.840,00	400.000,00	30.274.840,00	-	29.828.580,00	364.000,00	30.192.580,00	(82.260,00)	99,73
01 03 02 04 01 025	Program Pengendalian Tata Ruang	5.250.000,00	65.811.080,00	5.759.400,00	76.820.480,00	5.250.000,00	65.723.360,00	5.430.400,00	76.403.760,00	(416.720,00)	99,46
01 03 02 04 01 025 001	Pengendalian Tata Ruang	5.250.000,00	36.561.040,00	3.051.200,00	44.862.240,00	5.250.000,00	36.510.580,00	2.722.200,00	44.482.780,00	(379.460,00)	99,15
01 03 02 04 01 025 002	Pengawasan Tata Ruang	-	397.000,00	180.000,00	577.000,00	-	397.000,00	180.000,00	577.000,00	-	100,00
01 03 02 04 01 025 003	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	-	28.853.040,00	2.528.200,00	31.381.240,00	-	28.815.780,00	2.528.200,00	31.343.980,00	(37.260,00)	99,88
01 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	131.450.000,00	10.386.550.466,00	7.976.909.088,00	18.494.909.554,00	87.550.000,00	10.045.319.714,28	7.860.792.720,00	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
01 04 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	131.450.000,00	10.386.550.466,00	7.976.909.088,00	18.494.909.554,00	87.550.000,00	10.045.319.714,28	7.860.792.720,00	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
01 04 01 03 01 026	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	131.450.000,00	10.386.550.466,00	7.976.909.088,00	18.494.909.554,00	87.550.000,00	10.045.319.714,28	7.860.792.720,00	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
01 04 01 03 01 026 001	Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)	-	1.748.210.961,00	3.754.103.920,00	5.502.314.881,00	-	1.744.868.401,00	3.730.079.000,00	5.474.947.401,00	(27.367.480,00)	99,50
01 04 01 03 01 026 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	27.500.000,00	7.153.342.131,00	883.046.000,00	8.063.888.131,00	22.750.000,00	7.040.290.303,20	877.478.000,00	7.940.518.303,20	(123.369.827,80)	98,47
01 04 01 03 01 026 003	Pengelolaan Rusunawa	-	298.122.074,00	441.437.968,00	739.560.042,00	-	294.462.618,88	435.578.000,00	730.040.618,88	(9.519.423,12)	98,71
01 04 01 03 01 026 004	Pengelolaan Air Limbah	103.950.000,00	1.186.875.300,00	2.898.321.200,00	4.189.146.500,00	64.800.000,00	965.698.391,20	2.817.657.720,00	3.848.156.111,20	(340.990.388,80)	91,86

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.595.985.000,00	20.082.116.491,00	501.758.000,00	22.179.859.491,00	1.561.200.000,00	19.166.505.396,90	495.035.969,00	21.222.741.365,90	(957.118.125,10)	95,68
01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.595.985.000,00	14.321.432.859,00	276.878.000,00	16.194.295.859,00	1.561.200.000,00	14.141.326.576,80	273.146.585,00	15.975.673.161,80	(218.622.697,20)	98,65
01 05 01 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.113.160.761,00	18.528.600,00	4.131.689.361,00	-	4.013.496.201,00	18.528.585,00	4.032.024.786,00	(99.664.575,00)	97,59
01 05 01 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	49.757.000,00	-	49.757.000,00	-	49.665.255,00	-	49.665.255,00	(91.745,00)	99,82
01 05 01 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	4.063.403.761,00	18.528.600,00	4.081.932.361,00	-	3.963.830.946,00	18.528.585,00	3.982.359.531,00	(99.572.830,00)	97,56
01 05 01 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	555.202.550,00	161.849.400,00	717.051.950,00	-	496.676.103,00	158.618.000,00	655.294.103,00	(61.757.847,00)	91,39
01 05 01 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	138.000.000,00	138.000.000,00	-	-	134.968.000,00	134.968.000,00	(3.032.000,00)	97,80
01 05 01 05 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	555.202.550,00	23.849.400,00	579.051.950,00	-	496.676.103,00	23.650.000,00	520.326.103,00	(58.725.847,00)	89,86
01 05 01 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	857.000,00	-	857.000,00	-	857.000,00	-	857.000,00	-	100,00
01 05 01 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	857.000,00	-	857.000,00	-	857.000,00	-	857.000,00	-	100,00
01 05 01 05 01 027	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	274.505.000,00	4.962.291.568,00	10.900.000,00	5.247.696.568,00	247.290.000,00	4.948.035.468,00	10.900.000,00	5.206.225.468,00	(41.471.100,00)	99,21
01 05 01 05 01 027 001	Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi	105.705.000,00	9.460.000,00	-	115.165.000,00	86.890.000,00	9.460.000,00	-	96.350.000,00	(18.815.000,00)	83,66
01 05 01 05 01 027 002	Operasi Ketertiban Umum	168.800.000,00	4.952.831.568,00	10.900.000,00	5.132.531.568,00	160.400.000,00	4.938.575.468,00	10.900.000,00	5.109.875.468,00	(22.656.100,00)	99,56
01 05 01 05 01 028	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	149.600.000,00	3.728.580.100,00	33.000.000,00	3.911.180.100,00	148.560.000,00	3.728.580.024,80	33.000.000,00	3.910.140.024,80	(1.040.075,20)	99,97
01 05 01 05 01 028 001	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	137.000.000,00	3.716.060.100,00	33.000.000,00	3.886.060.100,00	135.960.000,00	3.716.060.024,80	33.000.000,00	3.885.020.024,80	(1.040.075,20)	99,97
01 05 01 05 01 028 002	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	12.600.000,00	12.520.000,00	-	25.120.000,00	12.600.000,00	12.520.000,00	-	25.120.000,00	-	100,00
01 05 01 05 01 029	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	-	126.954.568,00	52.600.000,00	179.554.568,00	-	125.395.708,00	52.100.000,00	177.495.708,00	(2.058.860,00)	98,85
01 05 01 05 01 029 001	Peningkatan Kapasitas Pol PP	-	112.134.568,00	2.600.000,00	114.734.568,00	-	111.025.708,00	2.600.000,00	113.625.708,00	(1.108.860,00)	99,03
01 05 01 05 01 029 002	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	-	14.820.000,00	50.000.000,00	64.820.000,00	-	14.370.000,00	49.500.000,00	63.870.000,00	(950.000,00)	98,53
01 05 01 05 01 030	Program Perlindungan Masyarakat	1.171.880.000,00	834.386.312,00	-	2.006.266.312,00	1.165.350.000,00	828.286.072,00	-	1.993.636.072,00	(12.630.240,00)	99,37
01 05 01 05 01 030 001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1.161.080.000,00	110.579.352,00	-	1.271.659.352,00	1.154.550.000,00	109.396.062,00	-	1.263.946.062,00	(7.713.290,00)	99,39
01 05 01 05 01 030 002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	10.800.000,00	723.806.960,00	-	734.606.960,00	10.800.000,00	718.890.010,00	-	729.690.010,00	(4.916.950,00)	99,33
01 05 02	DINAS KEBAKARAN	-	2.979.124.773,00	-	2.979.124.773,00	-	2.427.004.906,50	-	2.427.004.906,50	(552.119.866,50)	81,47
01 05 01 05 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.352.436.555,00	-	1.352.436.555,00	-	1.236.637.836,30	-	1.236.637.836,30	(115.798.718,70)	91,44
01 05 01 05 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	59.069.555,00	-	59.069.555,00	-	57.201.555,00	-	57.201.555,00	(1.868.000,00)	96,84
01 05 01 05 02 001 020	Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran	-	1.293.367.000,00	-	1.293.367.000,00	-	1.179.436.281,30	-	1.179.436.281,30	(113.930.718,70)	91,19
01 05 01 05 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	131.045.818,00	-	131.045.818,00	-	101.926.418,00	-	101.926.418,00	(29.119.400,00)	77,78
01 05 01 05 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	65.000.000,00	-	65.000.000,00	-	47.993.000,00	-	47.993.000,00	(17.007.000,00)	73,84
01 05 01 05 02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	66.045.818,00	-	66.045.818,00	-	53.933.418,00	-	53.933.418,00	(12.112.400,00)	81,66

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%	
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12	
01 05 01 05 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	-	100,00
01 05 01 05 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-	-	100,00
01 05 01 05 02 031	Program Pencegahan Kebakaran	-	68.020.000,00	-	68.020.000,00	-	67.584.500,00	-	67.584.500,00	-	(435.500,00)	99,36
01 05 01 05 02 031 001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	100,00
01 05 01 05 02 031 002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	-	65.920.000,00	-	65.920.000,00	-	65.484.500,00	-	65.484.500,00	-	(435.500,00)	99,34
01 05 01 05 02 032	Program Penanggulangan Kebakaran	-	1.424.307.400,00	-	1.424.307.400,00	-	1.017.541.152,20	-	1.017.541.152,20	-	(406.766.247,80)	71,44
01 05 01 05 02 032 001	Penanganan Kebakaran	-	722.022.000,00	-	722.022.000,00	-	645.533.827,20	-	645.533.827,20	-	(76.488.172,80)	89,41
01 05 01 05 02 032 002	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	-	702.285.400,00	-	702.285.400,00	-	372.007.325,00	-	372.007.325,00	-	(330.278.075,00)	52,97
01 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.781.558.859,00	224.880.000,00	3.006.438.859,00	-	2.598.173.913,60	221.889.384,00	2.820.063.297,60	-	(186.375.561,40)	93,80
01 05 01 05 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	204.410.959,00	17.880.000,00	222.290.959,00	-	197.751.327,00	17.780.000,00	215.531.327,00	-	(6.759.632,00)	96,96
01 05 01 05 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	34.820.000,00	-	34.820.000,00	-	34.732.591,00	-	34.732.591,00	-	(87.409,00)	99,75
01 05 01 05 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	169.590.959,00	17.880.000,00	187.470.959,00	-	163.018.736,00	17.780.000,00	180.798.736,00	-	(6.672.223,00)	96,44
01 05 01 05 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	328.450.000,00	120.000.000,00	448.450.000,00	-	252.161.065,00	119.739.384,00	371.900.449,00	-	(76.549.551,00)	82,93
01 05 01 05 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	50.000.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	-	49.884.395,00	119.739.384,00	169.623.779,00	-	(376.221,00)	99,78
01 05 01 05 03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	278.450.000,00	-	278.450.000,00	-	202.276.670,00	-	202.276.670,00	-	(76.173.330,00)	72,64
01 05 01 05 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	540.000,00	-	540.000,00	-	540.000,00	-	540.000,00	-	-	100,00
01 05 01 05 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	540.000,00	-	540.000,00	-	540.000,00	-	540.000,00	-	-	100,00
01 05 01 05 03 033	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	-	2.248.157.900,00	87.000.000,00	2.335.157.900,00	-	2.147.721.521,60	84.370.000,00	2.232.091.521,60	-	(103.066.378,40)	95,59
01 05 01 05 03 033 001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	-	909.673.600,00	-	909.673.600,00	-	896.281.294,40	-	896.281.294,40	-	(13.392.305,60)	98,53
01 05 01 05 03 033 002	Penanganan Bencana Alam	-	1.188.484.300,00	87.000.000,00	1.275.484.300,00	-	1.104.979.727,20	84.370.000,00	1.189.349.727,20	-	(86.134.572,80)	93,25
01 05 01 05 03 033 003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	146.460.500,00	-	146.460.500,00	-	(3.539.500,00)	97,64
01 06	URUSAN SOSIAL	1.014.653.000,00	6.115.934.507,00	353.081.100,00	7.483.668.607,00	947.593.000,00	5.901.371.219,97	351.554.150,00	7.200.518.369,97	-	(283.150.237,03)	96,22
01 06 01	DINAS SOSIAL	1.014.653.000,00	6.115.934.507,00	353.081.100,00	7.483.668.607,00	947.593.000,00	5.901.371.219,97	351.554.150,00	7.200.518.369,97	-	(283.150.237,03)	96,22
01 06 01 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.337.232.288,00	35.081.100,00	1.372.313.388,00	-	1.320.927.566,80	34.148.500,00	1.355.076.066,80	-	(17.237.321,20)	98,74
01 06 01 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	99.960.000,00	-	99.960.000,00	-	98.471.110,00	-	98.471.110,00	-	(1.488.890,00)	98,51
01 06 01 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.237.272.288,00	35.081.100,00	1.272.353.388,00	-	1.222.456.456,80	34.148.500,00	1.256.604.956,80	-	(15.748.431,20)	98,76
01 06 01 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	292.282.400,00	295.000.000,00	587.282.400,00	-	272.645.120,07	294.415.650,00	567.060.770,07	-	(20.221.629,93)	96,56
01 06 01 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	17.338.000,00	295.000.000,00	312.338.000,00	-	16.542.200,00	294.415.650,00	310.957.850,00	-	(1.380.150,00)	99,56
01 06 01 06 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	274.944.400,00	-	274.944.400,00	-	256.102.920,07	-	256.102.920,07	-	(18.841.479,93)	93,15

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
01 06 01 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.275.000,00	-	12.275.000,00	(225.000,00)	98,20
01 06 01 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.275.000,00	-	12.275.000,00	(225.000,00)	98,20
01 06 01 06 01 034	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	457.550.000,00	3.246.061.879,00	-	3.703.611.879,00	390.490.000,00	3.079.090.889,70	-	3.469.580.889,70	(234.030.989,30)	93,68
01 06 01 06 01 034 001	Perlindungan Sosial	86.760.000,00	138.323.600,00	-	225.083.600,00	82.800.000,00	103.792.014,40	-	186.592.014,40	(38.491.585,60)	82,90
01 06 01 06 01 034 002	Jaminan dan Bantuan Sosial	172.200.000,00	448.729.000,00	-	620.929.000,00	168.000.000,00	421.226.887,20	-	589.226.887,20	(31.702.112,80)	94,89
01 06 01 06 01 034 003	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	160.790.000,00	958.124.400,00	-	1.118.914.400,00	102.140.000,00	882.982.732,80	-	985.122.732,80	(133.791.667,20)	88,04
01 06 01 06 01 034 004	Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma	37.800.000,00	1.700.884.879,00	-	1.738.684.879,00	37.550.000,00	1.671.089.255,30	-	1.708.639.255,30	(30.045.623,70)	98,27
01 06 01 06 01 035	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	181.800.000,00	570.764.500,00	-	752.564.500,00	181.800.000,00	569.958.400,20	-	751.758.400,20	(806.099,80)	99,89
01 06 01 06 01 035 001	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	61.200.000,00	97.118.500,00	-	158.318.500,00	61.200.000,00	97.060.903,40	-	158.260.903,40	(57.596,60)	99,96
01 06 01 06 01 035 002	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	120.600.000,00	473.646.000,00	-	594.246.000,00	120.600.000,00	472.897.496,80	-	593.497.496,80	(748.503,20)	99,87
01 06 01 06 01 036	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	375.303.000,00	657.093.440,00	23.000.000,00	1.055.396.440,00	375.303.000,00	646.474.243,20	22.990.000,00	1.044.767.243,20	(10.629.196,80)	98,99
01 06 01 06 01 036 001	Pendataan PMKS dan PSKS	342.903.000,00	320.036.440,00	23.000.000,00	685.939.440,00	342.903.000,00	316.211.928,80	22.990.000,00	682.104.928,80	(3.834.511,20)	99,44
01 06 01 06 01 036 002	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	32.400.000,00	337.057.000,00	-	369.457.000,00	32.400.000,00	330.262.314,40	-	362.662.314,40	(6.794.685,60)	98,16
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	12.946.090.615,00	97.381.265.345,00	36.006.910.217,00	146.334.266.177,00	12.638.859.770,00	93.541.442.095,16	32.039.046.313,87	138.219.348.179,03	(8.114.917.997,97)	94,45
02 01	URUSAN TENAGA KERJA	221.775.000,00	1.530.808.000,00	-	1.752.583.000,00	220.975.000,00	1.507.383.974,40	-	1.728.358.974,40	(24.224.025,60)	98,62
02 01 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	221.775.000,00	1.530.808.000,00	-	1.752.583.000,00	220.975.000,00	1.507.383.974,40	-	1.728.358.974,40	(24.224.025,60)	98,62
02 01 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi	104.600.000,00	1.277.656.000,00	-	1.382.256.000,00	103.800.000,00	1.256.761.194,40	-	1.360.561.194,40	(21.694.805,60)	98,43
02 01 02 11 01 037 001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	6.000.000,00	482.093.000,00	-	488.093.000,00	6.000.000,00	480.904.414,40	-	486.904.414,40	(1.188.585,60)	99,76
02 01 02 11 01 037 002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	98.600.000,00	795.563.000,00	-	894.163.000,00	97.800.000,00	775.856.780,00	-	873.656.780,00	(20.506.220,00)	97,71
02 01 02 11 01 038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	117.175.000,00	253.152.000,00	-	370.327.000,00	117.175.000,00	250.622.780,00	-	367.797.780,00	(2.529.220,00)	99,32
02 01 02 11 01 038 001	Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	59.175.000,00	121.245.000,00	-	180.420.000,00	59.175.000,00	118.792.780,00	-	177.967.780,00	(2.452.220,00)	98,64
02 01 02 11 01 038 002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	58.000.000,00	131.907.000,00	-	189.907.000,00	58.000.000,00	131.830.000,00	-	189.830.000,00	(77.000,00)	99,96
02 02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	137.950.000,00	2.398.134.826,00	405.556.928,00	2.941.641.754,00	137.050.000,00	2.366.126.287,91	400.315.650,00	2.903.491.937,91	(38.149.816,09)	98,70
02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	137.950.000,00	2.398.134.826,00	405.556.928,00	2.941.641.754,00	137.050.000,00	2.366.126.287,91	400.315.650,00	2.903.491.937,91	(38.149.816,09)	98,70
02 02 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	647.290.918,00	31.950.000,00	679.240.918,00	-	619.022.893,30	31.615.000,00	650.637.893,30	(28.603.024,70)	95,79
02 02 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	85.032.000,00	-	85.032.000,00	-	84.371.450,00	-	84.371.450,00	(660.550,00)	99,22

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 02 02 01 001 020	Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran	-	562.258.918,00	31.950.000,00	594.208.918,00	-	534.651.443,30	31.615.000,00	566.266.443,30	(27.942.474,70)	95,30
02 02 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	54.953.000,00	175.706.928,00	230.659.928,00	-	54.601.297,00	172.985.000,00	227.586.297,00	(3.073.631,00)	98,67
02 02 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2.400.000,00	175.706.928,00	178.106.928,00	-	2.400.000,00	172.985.000,00	175.385.000,00	(2.721.928,00)	98,47
02 02 02 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	52.553.000,00	-	52.553.000,00	-	52.201.297,00	-	52.201.297,00	(351.703,00)	99,33
02 02 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	71.402.824,00	-	71.402.824,00	-	71.321.194,40	-	71.321.194,40	(81.629,60)	99,89
02 02 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	71.402.824,00	-	71.402.824,00	-	71.321.194,40	-	71.321.194,40	(81.629,60)	99,89
02 02 02 01 039	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	86.850.000,00	640.896.108,00	100.000.000,00	827.746.108,00	86.850.000,00	638.901.737,60	97.815.650,00	823.567.387,60	(4.178.720,40)	99,50
02 02 02 01 039 001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	150.000,00	56.451.784,00	100.000.000,00	156.601.784,00	150.000,00	56.418.614,40	97.815.650,00	154.384.264,40	(2.217.519,60)	98,58
02 02 02 01 039 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	15.600.000,00	277.342.324,00	-	292.942.324,00	15.600.000,00	277.170.594,40	-	292.770.594,40	(171.729,60)	99,94
02 02 02 01 039 003	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A	71.100.000,00	307.102.000,00	-	378.202.000,00	71.100.000,00	305.312.528,80	-	376.412.528,80	(1.789.471,20)	99,53
02 02 02 01 040	Program Perlindungan Anak	51.100.000,00	983.591.976,00	97.900.000,00	1.132.591.976,00	50.200.000,00	982.279.165,61	97.900.000,00	1.130.379.165,61	(2.212.810,39)	99,80
02 02 02 01 040 001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	24.350.000,00	122.225.000,00	-	146.575.000,00	23.450.000,00	121.846.000,00	-	145.296.000,00	(1.279.000,00)	99,13
02 02 02 01 040 002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	26.750.000,00	861.366.976,00	97.900.000,00	986.016.976,00	26.750.000,00	860.433.165,61	97.900.000,00	985.083.165,61	(933.810,39)	99,91
02 03	URUSAN PANGAN	-	540.199.936,00	42.423.120,00	582.623.056,00	-	536.152.860,00	42.075.000,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
02 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	540.199.936,00	42.423.120,00	582.623.056,00	-	536.152.860,00	42.075.000,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
02 03 03 01 01 041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	-	540.199.936,00	42.423.120,00	582.623.056,00	-	536.152.860,00	42.075.000,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
02 03 03 01 01 041 001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	-	405.123.736,00	-	405.123.736,00	-	401.272.200,00	-	401.272.200,00	(3.851.536,00)	99,05
02 03 03 01 01 041 002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-	135.076.200,00	42.423.120,00	177.499.320,00	-	134.880.660,00	42.075.000,00	176.955.660,00	(543.660,00)	99,69
02 04	URUSAN PERTANAHAN	65.450.000,00	598.067.868,00	21.632.329.000,00	22.295.846.868,00	65.450.000,00	577.116.811,00	17.923.611.620,00	18.566.178.431,00	(3.729.668.437,00)	83,27
02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	65.450.000,00	598.067.868,00	21.632.329.000,00	22.295.846.868,00	65.450.000,00	577.116.811,00	17.923.611.620,00	18.566.178.431,00	(3.729.668.437,00)	83,27
02 04 02 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	342.568.688,00	3.000.000,00	345.568.688,00	-	340.628.772,00	2.999.700,00	343.628.472,00	(1.940.216,00)	99,44
02 04 02 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	31.078.000,00	-	31.078.000,00	-	30.776.169,00	-	30.776.169,00	(301.831,00)	99,03
02 04 02 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	311.490.688,00	3.000.000,00	314.490.688,00	-	309.852.603,00	2.999.700,00	312.852.303,00	(1.638.385,00)	99,48
02 04 02 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	45.435.000,00	500.000,00	45.935.000,00	-	43.034.050,00	500.000,00	43.534.050,00	(2.400.950,00)	94,77
02 04 02 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-	100,00
02 04 02 04 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45.435.000,00	-	45.435.000,00	-	43.034.050,00	-	43.034.050,00	(2.400.950,00)	94,72
02 04 02 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	60.773.080,00	-	60.773.080,00	-	60.684.940,00	-	60.684.940,00	(88.140,00)	99,85
02 04 02 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	60.773.080,00	-	60.773.080,00	-	60.684.940,00	-	60.684.940,00	(88.140,00)	99,85

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 04 02 04 01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	65.450.000,00	149.291.100,00	21.628.829.000,00	21.843.570.100,00	65.450.000,00	132.769.049,00	17.920.111.920,00	18.118.330.969,00	(3.725.239.131,00)	82,95
02 04 02 04 01 042 001	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	43.450.000,00	48.169.820,00	-	91.619.820,00	43.450.000,00	37.330.789,00	-	80.780.789,00	(10.839.031,00)	88,17
02 04 02 04 01 042 002	Pemanfaatan Pertanahan	6.600.000,00	42.753.040,00	21.628.829.000,00	21.678.182.040,00	6.600.000,00	37.199.280,00	17.920.111.920,00	17.963.911.200,00	(3.714.270.840,00)	82,87
02 04 02 04 01 042 003	Penyelesaian Masalah Pertanahan	15.400.000,00	58.368.240,00	-	73.768.240,00	15.400.000,00	58.238.980,00	-	73.638.980,00	(129.260,00)	99,82
02 05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	951.200.000,00	27.329.511.305,00	983.961.420,00	29.264.672.725,00	739.550.000,00	26.392.045.994,49	979.067.761,00	28.110.663.755,49	(1.154.008.969,51)	96,06
02 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	951.200.000,00	27.329.511.305,00	983.961.420,00	29.264.672.725,00	739.550.000,00	26.392.045.994,49	979.067.761,00	28.110.663.755,49	(1.154.008.969,51)	96,06
02 05 02 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3.068.530.306,00	6.800.000,00	3.075.330.306,00	-	3.034.387.657,81	6.770.000,00	3.041.157.657,81	(34.172.648,19)	98,89
02 05 02 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	14.393.730,00	-	14.393.730,00	-	13.923.730,00	-	13.923.730,00	(470.000,00)	96,73
02 05 02 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	3.054.136.576,00	6.800.000,00	3.060.936.576,00	-	3.020.463.927,81	6.770.000,00	3.027.233.927,81	(33.702.648,19)	98,90
02 05 02 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1.084.958.000,00	17.000.000,00	1.101.958.000,00	-	1.066.535.272,31	17.000.000,00	1.083.535.272,31	(18.422.727,69)	98,33
02 05 02 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	59.970.628,31	-	59.970.628,31	(29.371,69)	99,95
02 05 02 05 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	1.024.958.000,00	17.000.000,00	1.041.958.000,00	-	1.006.564.644,00	17.000.000,00	1.023.564.644,00	(18.393.356,00)	98,23
02 05 02 05 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02 05 02 05 01 005 006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02 05 02 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	100,00
02 05 02 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	6.466.600,00	-	100,00
02 05 02 05 01 043	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	22.550.000,00	1.242.534.960,00	8.935.000,00	1.274.019.960,00	22.550.000,00	1.231.660.661,00	8.935.000,00	1.263.145.661,00	(10.874.299,00)	99,15
02 05 02 05 01 043 001	Kajian Dampak Lingkungan	22.550.000,00	188.869.080,00	-	211.419.080,00	22.550.000,00	188.658.560,00	-	211.208.560,00	(210.520,00)	99,90
02 05 02 05 01 043 002	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	-	1.053.665.880,00	8.935.000,00	1.062.600.880,00	-	1.043.002.101,00	8.935.000,00	1.051.937.101,00	(10.663.779,00)	99,00
02 05 02 05 01 044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	922.116.850,00	-	929.616.850,00	7.500.000,00	910.187.470,00	-	917.687.470,00	(11.929.380,00)	98,72
02 05 02 05 01 044 001	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	7.500.000,00	532.247.700,00	-	539.747.700,00	7.500.000,00	522.626.280,00	-	530.126.280,00	(9.621.420,00)	98,22
02 05 02 05 01 044 002	Penataan dan Pemantauan Lingkungan	-	109.754.910,00	-	109.754.910,00	-	109.498.550,00	-	109.498.550,00	(256.360,00)	99,77
02 05 02 05 01 044 003	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	-	280.114.240,00	-	280.114.240,00	-	278.062.640,00	-	278.062.640,00	(2.051.600,00)	99,27
02 05 02 05 01 045	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	6.062.942.050,00	638.727.420,00	6.701.669.470,00	-	5.924.732.529,00	634.109.961,00	6.558.842.490,00	(142.826.980,00)	97,87
02 05 02 05 01 045 001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	-	965.950.380,00	604.619.420,00	1.570.569.800,00	-	943.754.450,00	601.338.461,00	1.545.092.911,00	(25.476.889,00)	98,38
02 05 02 05 01 045 002	Pertamanan dan Perindang Jalan	-	5.096.991.670,00	34.108.000,00	5.131.099.670,00	-	4.980.978.079,00	32.771.500,00	5.013.749.579,00	(117.350.091,00)	97,71
02 05 02 05 01 046	Program Pengelolaan Persampahan	921.150.000,00	14.941.962.539,00	312.499.000,00	16.175.611.539,00	709.500.000,00	14.218.075.804,37	312.252.800,00	15.239.828.604,37	(935.782.934,63)	94,21
02 05 02 05 01 046 001	Pengurangan Sampah	244.350.000,00	973.964.112,00	10.300.000,00	1.228.614.112,00	244.350.000,00	969.048.446,40	10.300.000,00	1.223.698.446,40	(4.915.665,60)	99,60
02 05 02 05 01 046 002	Penanganan Sampah	-	2.978.445.746,00	302.199.000,00	3.280.644.746,00	-	2.978.445.746,00	301.952.800,00	3.280.398.546,00	(246.200,00)	99,99
02 05 02 05 01 046 003	Pemungutan Retribusi Kebersihan	-	986.960.250,00	-	986.960.250,00	-	909.194.111,00	-	909.194.111,00	(77.766.139,00)	92,12
02 05 02 05 01 046 004	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	676.800.000,00	10.002.592.431,00	-	10.679.392.431,00	465.150.000,00	9.361.387.500,97	-	9.826.537.500,97	(852.854.930,03)	92,01

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.705.000,00	2.490.756.500,00	48.425.000,00	2.616.886.500,00	74.850.000,00	2.461.317.056,00	48.365.000,00	2.584.532.056,00	(32.354.444,00)	98,76
02 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.705.000,00	2.490.756.500,00	48.425.000,00	2.616.886.500,00	74.850.000,00	2.461.317.056,00	48.365.000,00	2.584.532.056,00	(32.354.444,00)	98,76
02 06 02 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	807.135.500,00	8.750.000,00	815.885.500,00	-	800.888.232,00	8.700.000,00	809.588.232,00	(6.297.268,00)	99,23
02 06 02 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	83.812.000,00	-	83.812.000,00	-	83.690.220,00	-	83.690.220,00	(121.780,00)	99,85
02 06 02 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	723.323.500,00	8.750.000,00	732.073.500,00	-	717.198.012,00	8.700.000,00	725.898.012,00	(6.175.488,00)	99,16
02 06 02 06 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	98.435.000,00	39.675.000,00	138.110.000,00	-	98.270.724,00	39.665.000,00	137.935.724,00	(174.276,00)	99,87
02 06 02 06 01 002 022	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	39.675.000,00	39.675.000,00	-	-	39.665.000,00	39.665.000,00	(10.000,00)	99,97
02 06 02 06 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	98.435.000,00	-	98.435.000,00	-	98.270.724,00	-	98.270.724,00	(164.276,00)	99,83
02 06 02 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	100,00
02 06 02 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	13.356.000,00	-	100,00
02 06 02 06 01 047	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.505.000,00	1.116.452.000,00	-	1.120.957.000,00	2.930.000,00	1.097.014.760,00	-	1.099.944.760,00	(21.012.240,00)	98,13
02 06 02 06 01 047 001	Pelayanan Identitas Penduduk	4.505.000,00	1.048.804.000,00	-	1.053.309.000,00	2.930.000,00	1.031.314.120,00	-	1.034.244.120,00	(19.064.880,00)	98,19
02 06 02 06 01 047 002	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	-	67.648.000,00	-	67.648.000,00	-	65.700.640,00	-	65.700.640,00	(1.947.360,00)	97,12
02 06 02 06 01 048	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	73.200.000,00	233.881.000,00	-	307.081.000,00	71.920.000,00	233.382.900,00	-	305.302.900,00	(1.778.100,00)	99,42
02 06 02 06 01 048 001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	44.800.000,00	197.009.000,00	-	241.809.000,00	43.520.000,00	196.617.280,00	-	240.137.280,00	(1.671.720,00)	99,31
02 06 02 06 01 048 002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	28.400.000,00	36.872.000,00	-	65.272.000,00	28.400.000,00	36.765.620,00	-	65.165.620,00	(106.380,00)	99,84
02 06 02 06 01 049	Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	221.497.000,00	-	221.497.000,00	-	218.404.440,00	-	218.404.440,00	(3.092.560,00)	98,60
02 06 02 06 01 049 001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	-	58.900.000,00	-	58.900.000,00	-	58.153.000,00	-	58.153.000,00	(747.000,00)	98,73
02 06 02 06 01 049 002	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	162.597.000,00	-	162.597.000,00	-	160.251.440,00	-	160.251.440,00	(2.345.560,00)	98,56
02 07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.082.530.115,00	26.027.091.374,00	9.201.819.539,00	45.311.441.028,00	10.011.545.000,00	25.556.242.405,54	9.032.560.133,20	44.600.347.538,74	(711.093.489,26)	98,43
02 07 01	KECAMATAN TEGALREJO	719.975.000,00	1.856.078.344,00	772.569.000,00	3.348.622.344,00	708.250.000,00	1.824.776.908,00	758.795.000,00	3.291.821.908,00	(56.800.436,00)	98,30
02 07 02 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.050.000,00	455.609.908,00	-	717.659.908,00	262.050.000,00	446.737.924,00	-	708.787.924,00	(8.871.984,00)	98,76
02 07 02 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	33.775.000,00	-	33.775.000,00	-	33.708.000,00	-	33.708.000,00	(67.000,00)	99,80
02 07 02 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.050.000,00	421.834.908,00	-	683.884.908,00	262.050.000,00	413.029.924,00	-	675.079.924,00	(8.804.984,00)	98,71
02 07 02 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	20.679.000,00	64.704.000,00	85.383.000,00	-	18.271.900,00	64.704.000,00	82.975.900,00	(2.407.100,00)	97,18
02 07 02 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	64.704.000,00	64.704.000,00	-	-	64.704.000,00	64.704.000,00	-	100,00
02 07 02 07 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	20.679.000,00	-	20.679.000,00	-	18.271.900,00	-	18.271.900,00	(2.407.100,00)	88,36
02 07 02 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	100,00
02 07 02 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	2.075.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 01 050	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	457.925.000,00	1.377.714.436,00	707.865.000,00	2.543.504.436,00	446.200.000,00	1.357.692.084,00	694.091.000,00	2.497.983.084,00	(45.521.352,00)	98,21
02 07 02 07 01 050 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	22.650.000,00	30.146.600,00	-	52.796.600,00	22.650.000,00	29.846.600,00	-	52.496.600,00	(300.000,00)	99,43
02 07 02 07 01 050 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	-	700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00	-	100,00
02 07 02 07 01 050 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo	675.000,00	75.893.500,00	-	76.568.500,00	675.000,00	75.893.500,00	-	76.568.500,00	-	100,00
02 07 02 07 01 050 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	107.000.000,00	146.955.784,00	276.365.000,00	530.320.784,00	103.250.000,00	144.657.496,00	266.150.000,00	514.057.496,00	(16.263.288,00)	96,93
02 07 02 07 01 050 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	130.050.000,00	209.279.784,00	181.500.000,00	520.829.784,00	128.250.000,00	206.185.496,00	179.385.000,00	513.820.496,00	(7.009.288,00)	98,65
02 07 02 07 01 050 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	126.700.000,00	556.655.784,00	-	683.355.784,00	123.200.000,00	548.674.496,00	-	671.874.496,00	(11.481.288,00)	98,32
02 07 02 07 01 050 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	61.850.000,00	238.769.484,00	250.000.000,00	550.619.484,00	59.175.000,00	232.421.496,00	248.556.000,00	540.152.496,00	(10.466.988,00)	98,10
02 07 02 07 01 050 008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	9.000.000,00	119.313.500,00	-	128.313.500,00	9.000.000,00	119.313.000,00	-	128.313.000,00	(500,00)	100,00
02 07 02	KECAMATAN JETIS	653.450.000,00	1.461.031.889,00	1.597.119.860,00	3.711.601.749,00	644.050.000,00	1.423.224.335,00	1.595.788.860,00	3.663.063.195,00	(48.538.554,00)	98,69
02 07 02 07 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	267.000.000,00	647.561.905,00	240.327.860,00	1.154.889.765,00	257.750.000,00	617.357.890,00	240.127.860,00	1.115.235.750,00	(39.654.015,00)	96,57
02 07 02 07 02 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	49.736.045,00	-	49.736.045,00	-	49.735.045,00	-	49.735.045,00	(1.000,00)	100,00
02 07 02 07 02 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.000.000,00	597.825.860,00	240.327.860,00	1.105.153.720,00	257.750.000,00	567.622.845,00	240.127.860,00	1.065.500.705,00	(39.653.015,00)	96,41
02 07 02 07 02 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	41.675.560,00	236.261.000,00	277.936.560,00	-	37.721.770,00	236.261.000,00	273.982.770,00	(3.953.790,00)	98,58
02 07 02 07 02 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	236.261.000,00	236.261.000,00	-	-	236.261.000,00	236.261.000,00	-	100,00
02 07 02 07 02 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	41.675.560,00	-	41.675.560,00	-	37.721.770,00	-	37.721.770,00	(3.953.790,00)	90,51
02 07 02 07 02 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	100,00
02 07 02 07 02 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	3.676.400,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 02 051	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	386.450.000,00	768.118.024,00	1.120.531.000,00	2.275.099.024,00	386.300.000,00	764.468.275,00	1.119.400.000,00	2.270.168.275,00	(4.930.749,00)	99,78
02 07 02 07 02 051 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	28.850.000,00	13.377.500,00	-	42.227.500,00	28.850.000,00	13.372.500,00	-	42.222.500,00	(5.000,00)	99,99
02 07 02 07 02 051 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	3.000.000,00	77.192.184,00	-	80.192.184,00	3.000.000,00	77.091.421,00	-	80.091.421,00	(100.763,00)	99,87
02 07 02 07 02 051 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	5.700.000,00	59.324.400,00	-	65.024.400,00	5.700.000,00	59.324.400,00	-	65.024.400,00	-	100,00
02 07 02 07 02 051 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	120.700.000,00	127.021.320,00	339.959.000,00	587.680.320,00	120.550.000,00	124.420.018,00	339.959.000,00	584.929.018,00	(2.751.302,00)	99,53
02 07 02 07 02 051 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	116.900.000,00	260.773.020,00	439.274.000,00	816.947.020,00	116.900.000,00	260.739.618,00	439.118.000,00	816.757.618,00	(189.402,00)	99,98
02 07 02 07 02 051 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	108.300.000,00	126.914.600,00	341.298.000,00	576.512.600,00	108.300.000,00	126.005.318,00	340.323.000,00	574.628.318,00	(1.884.282,00)	99,67
02 07 02 07 02 051 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	3.000.000,00	103.515.000,00	-	106.515.000,00	3.000.000,00	103.515.000,00	-	106.515.000,00	-	100,00
02 07 03	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	1.063.675.000,00	2.809.304.368,00	585.821.135,00	4.458.800.503,00	1.063.075.000,00	2.764.690.364,58	578.889.194,97	4.406.654.559,55	(52.145.943,45)	98,83
02 07 02 07 03 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	384.300.000,00	251.469.400,00	19.750.000,00	655.519.400,00	384.300.000,00	233.942.182,70	19.750.000,00	637.992.182,70	(17.527.217,30)	97,33
02 07 02 07 03 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	15.895.200,00	-	15.895.200,00	-	15.895.200,00	-	15.895.200,00	-	100,00
02 07 02 07 03 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	384.300.000,00	235.574.200,00	19.750.000,00	639.624.200,00	384.300.000,00	218.046.982,70	19.750.000,00	622.096.982,70	(17.527.217,30)	97,26
02 07 02 07 03 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	332.364.874,00	-	332.364.874,00	-	329.954.058,88	-	329.954.058,88	(2.410.815,12)	99,27
02 07 02 07 03 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	312.738.430,00	-	312.738.430,00	-	312.625.510,88	-	312.625.510,88	(112.919,12)	99,96
02 07 02 07 03 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	19.626.444,00	-	19.626.444,00	-	17.328.548,00	-	17.328.548,00	(2.297.896,00)	88,29
02 07 02 07 03 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	100,00
02 07 02 07 03 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 03 052	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	679.375.000,00	2.223.940.094,00	566.071.135,00	3.469.386.229,00	678.775.000,00	2.199.264.123,00	559.139.194,97	3.437.178.317,97	(32.207.911,03)	99,07
02 07 02 07 03 052 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	33.600.000,00	24.771.000,00	-	58.371.000,00	33.500.000,00	24.751.000,00	-	58.251.000,00	(120.000,00)	99,79
02 07 02 07 03 052 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	-	52.149.568,00	-	52.149.568,00	-	51.993.654,00	-	51.993.654,00	(155.914,00)	99,70
02 07 02 07 03 052 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	15.325.000,00	77.000.000,00	-	92.325.000,00	15.325.000,00	77.000.000,00	-	92.325.000,00	-	100,00
02 07 02 07 03 052 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	101.500.000,00	532.163.409,00	-	633.663.409,00	101.500.000,00	522.978.961,00	-	624.478.961,00	(9.184.448,00)	98,55
02 07 02 07 03 052 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	53.550.000,00	449.187.900,00	-	502.737.900,00	53.050.000,00	439.319.400,00	-	492.369.400,00	(10.368.500,00)	97,94
02 07 02 07 03 052 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	143.200.000,00	247.299.784,00	191.650.000,00	582.149.784,00	143.200.000,00	247.176.336,00	190.866.000,00	581.242.336,00	(907.448,00)	99,84
02 07 02 07 03 052 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	205.200.000,00	344.166.749,00	235.327.635,00	784.694.384,00	205.200.000,00	342.412.936,00	229.626.194,97	777.239.130,97	(7.455.253,03)	99,05
02 07 02 07 03 052 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	127.000.000,00	393.727.684,00	139.093.500,00	659.821.184,00	127.000.000,00	390.157.836,00	138.647.000,00	655.804.836,00	(4.016.348,00)	99,39
02 07 02 07 03 052 009	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	-	103.474.000,00	-	103.474.000,00	-	103.474.000,00	-	103.474.000,00	-	100,00
02 07 04	KECAMATAN DANUREJAN	556.050.000,00	1.313.877.484,00	506.703.500,00	2.376.630.984,00	550.650.000,00	1.277.589.579,29	499.641.118,91	2.327.880.698,20	(48.750.285,80)	97,95
02 07 02 07 04 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164.250.000,00	306.343.604,00	1.991.000,00	472.584.604,00	164.250.000,00	290.154.519,80	1.991.000,00	456.395.519,80	(16.189.084,20)	96,57
02 07 02 07 04 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	12.991.200,00	-	12.991.200,00	-	12.991.200,00	-	12.991.200,00	-	100,00
02 07 02 07 04 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.250.000,00	293.352.404,00	1.991.000,00	459.593.404,00	164.250.000,00	277.163.319,80	1.991.000,00	443.404.319,80	(16.189.084,20)	96,48
02 07 02 07 04 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	18.050.000,00	4.000.000,00	22.050.000,00	-	16.944.223,00	3.802.000,00	20.746.223,00	(1.303.777,00)	94,09
02 07 02 07 04 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	3.864.000,00	4.000.000,00	7.864.000,00	-	3.537.000,00	3.802.000,00	7.339.000,00	(525.000,00)	93,32
02 07 02 07 04 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	14.186.000,00	-	14.186.000,00	-	13.407.223,00	-	13.407.223,00	(778.777,00)	94,51
02 07 02 07 04 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	100,00
02 07 02 07 04 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 04 053	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	391.800.000,00	985.983.880,00	500.712.500,00	1.878.496.380,00	386.400.000,00	966.990.836,49	493.848.118,91	1.847.238.955,40	(31.257.424,60)	98,34
02 07 02 07 04 053 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	20.750.000,00	11.660.000,00	-	32.410.000,00	20.750.000,00	11.560.000,00	-	32.310.000,00	(100.000,00)	99,69
02 07 02 07 04 053 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	-	102.153.640,00	-	102.153.640,00	-	102.023.217,60	-	102.023.217,60	(130.422,40)	99,87
02 07 02 07 04 053 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	900.000,00	30.380.000,00	-	31.280.000,00	900.000,00	29.475.000,00	-	30.375.000,00	(905.000,00)	97,11
02 07 02 07 04 053 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	106.600.000,00	362.376.000,00	69.300.000,00	538.276.000,00	102.500.000,00	357.802.200,00	68.729.000,00	529.031.200,00	(9.244.800,00)	98,28
02 07 02 07 04 053 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	145.800.000,00	248.898.900,00	199.500.000,00	594.198.900,00	144.500.000,00	245.579.078,89	198.659.118,91	588.738.197,80	(5.460.702,20)	99,08
02 07 02 07 04 053 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	111.000.000,00	189.671.840,00	231.912.500,00	532.584.340,00	111.000.000,00	181.667.840,00	226.460.000,00	519.127.840,00	(13.456.500,00)	97,47
02 07 02 07 04 053 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	6.750.000,00	40.843.500,00	-	47.593.500,00	6.750.000,00	38.883.500,00	-	45.633.500,00	(1.960.000,00)	95,88
02 07 05	KECAMATAN GEDONGTENGEN	546.045.000,00	1.569.157.363,00	406.026.200,00	2.521.228.563,00	539.935.000,00	1.547.564.691,00	402.542.000,00	2.490.041.691,00	(31.186.872,00)	98,76
02 07 02 07 05 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	188.950.000,00	490.763.935,00	40.140.000,00	719.853.935,00	183.000.000,00	483.295.028,00	39.340.000,00	705.635.028,00	(14.218.907,00)	98,02
02 07 02 07 05 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	26.496.000,00	-	26.496.000,00	-	26.374.505,00	-	26.374.505,00	(121.495,00)	99,54
02 07 02 07 05 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.950.000,00	464.267.935,00	40.140.000,00	693.357.935,00	183.000.000,00	456.920.523,00	39.340.000,00	679.260.523,00	(14.097.412,00)	97,97
02 07 02 07 05 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	22.718.000,00	184.740.000,00	207.458.000,00	-	22.585.162,00	184.740.000,00	207.325.162,00	(132.838,00)	99,94
02 07 02 07 05 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	6.960.000,00	184.740.000,00	191.700.000,00	-	6.949.088,00	184.740.000,00	191.689.088,00	(10.912,00)	99,99
02 07 02 07 05 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	15.758.000,00	-	15.758.000,00	-	15.636.074,00	-	15.636.074,00	(121.926,00)	99,23
02 07 02 07 05 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.439.920,00	-	1.439.920,00	-	1.434.800,00	-	1.434.800,00	(5.120,00)	99,64
02 07 02 07 05 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.439.920,00	-	1.439.920,00	-	1.434.800,00	-	1.434.800,00	(5.120,00)	99,64
02 07 02 07 05 054	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	357.095.000,00	1.054.235.508,00	181.146.200,00	1.592.476.708,00	356.935.000,00	1.040.249.701,00	178.462.000,00	1.575.646.701,00	(16.830.007,00)	98,94
02 07 02 07 05 054 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	31.720.000,00	26.393.000,00	-	58.113.000,00	31.560.000,00	26.196.500,00	-	57.756.500,00	(356.500,00)	99,39
02 07 02 07 05 054 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	-	38.105.974,00	-	38.105.974,00	-	38.071.397,00	-	38.071.397,00	(34.577,00)	99,91

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 05 054 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	2.575.000,00	1.710.000,00	-	4.285.000,00	2.575.000,00	1.710.000,00	-	4.285.000,00	-	100,00
02 07 02 07 05 054 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	188.300.000,00	352.818.206,00	179.796.200,00	720.914.406,00	188.300.000,00	344.694.122,00	177.262.000,00	710.256.122,00	(10.658.284,00)	98,52
02 07 02 07 05 054 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	124.500.000,00	587.801.328,00	1.350.000,00	713.651.328,00	124.500.000,00	582.170.682,00	1.200.000,00	707.870.682,00	(5.780.646,00)	99,19
02 07 02 07 05 054 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	10.000.000,00	47.407.000,00	-	57.407.000,00	10.000.000,00	47.407.000,00	-	57.407.000,00	-	100,00
02 07 06	KECAMATAN PAKUALAMAN	494.800.000,00	1.382.058.800,00	146.851.000,00	2.023.709.800,00	493.800.000,00	1.369.814.860,00	146.273.900,00	2.009.888.760,00	(13.821.040,00)	99,32
02 07 02 07 06 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219.600.000,00	417.178.000,00	-	636.778.000,00	219.600.000,00	406.675.350,00	-	626.275.350,00	(10.502.650,00)	98,35
02 07 02 07 06 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	23.680.000,00	-	23.680.000,00	-	23.657.200,00	-	23.657.200,00	(22.800,00)	99,90
02 07 02 07 06 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.600.000,00	393.498.000,00	-	613.098.000,00	219.600.000,00	383.018.150,00	-	602.618.150,00	(10.479.850,00)	98,29
02 07 02 07 06 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	24.612.000,00	9.110.000,00	33.722.000,00	-	24.324.310,00	9.110.000,00	33.434.310,00	(287.690,00)	99,15
02 07 02 07 06 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	7.612.000,00	9.110.000,00	16.722.000,00	-	7.611.023,00	9.110.000,00	16.721.023,00	(977,00)	99,99
02 07 02 07 06 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	16.713.287,00	-	16.713.287,00	(286.713,00)	98,31
02 07 02 07 06 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	28.883.000,00	-	28.883.000,00	-	28.737.920,00	-	28.737.920,00	(145.080,00)	99,50
02 07 02 07 06 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	28.883.000,00	-	28.883.000,00	-	28.737.920,00	-	28.737.920,00	(145.080,00)	99,50
02 07 02 07 06 055	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	275.200.000,00	911.385.800,00	137.741.000,00	1.324.326.800,00	274.200.000,00	910.077.280,00	137.163.900,00	1.321.441.180,00	(2.885.620,00)	99,78
02 07 02 07 06 055 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	85.200.000,00	23.509.000,00	-	108.709.000,00	85.200.000,00	23.421.700,00	-	108.621.700,00	(87.300,00)	99,92
02 07 02 07 06 055 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	-	27.246.000,00	-	27.246.000,00	-	27.114.720,00	-	27.114.720,00	(131.280,00)	99,52
02 07 02 07 06 055 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2.500.000,00	16.930.000,00	-	19.430.000,00	2.500.000,00	16.840.000,00	-	19.340.000,00	(90.000,00)	99,54
02 07 02 07 06 055 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	101.800.000,00	424.134.000,00	50.741.000,00	576.675.000,00	100.800.000,00	423.796.320,00	50.625.000,00	575.221.320,00	(1.453.680,00)	99,75
02 07 02 07 06 055 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	80.900.000,00	363.121.800,00	87.000.000,00	531.021.800,00	80.900.000,00	362.591.120,00	86.538.900,00	530.030.020,00	(991.780,00)	99,81
02 07 02 07 06 055 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	4.800.000,00	56.445.000,00	-	61.245.000,00	4.800.000,00	56.313.420,00	-	61.113.420,00	(131.580,00)	99,79

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 07	KECAMATAN NGAMPILAN	474.100.000,00	1.048.466.608,00	627.330.300,00	2.149.896.908,00	474.100.000,00	1.013.933.752,02	623.114.699,97	2.111.148.451,99	(38.748.456,01)	98,20
02 07 02 07 07 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.000.000,00	416.520.156,00	59.774.300,00	659.294.456,00	183.000.000,00	391.651.016,00	59.768.300,00	634.419.316,00	(24.875.140,00)	96,23
02 07 02 07 07 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	22.918.700,00	-	22.918.700,00	-	22.918.700,00	-	22.918.700,00	-	100,00
02 07 02 07 07 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.000.000,00	393.601.456,00	59.774.300,00	636.375.756,00	183.000.000,00	368.732.316,00	59.768.300,00	611.500.616,00	(24.875.140,00)	96,09
02 07 02 07 07 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	26.856.000,00	-	26.856.000,00	-	26.415.811,00	-	26.415.811,00	(440.189,00)	98,36
02 07 02 07 07 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	4.170.000,00	-	4.170.000,00	-	4.169.155,00	-	4.169.155,00	(845,00)	99,98
02 07 02 07 07 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	22.686.000,00	-	22.686.000,00	-	22.246.656,00	-	22.246.656,00	(439.344,00)	98,06
02 07 02 07 07 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	100,00
02 07 02 07 07 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	5.371.200,00	-	100,00
02 07 02 07 07 056	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	291.100.000,00	599.719.252,00	567.556.000,00	1.458.375.252,00	291.100.000,00	590.495.725,02	563.346.399,97	1.444.942.124,99	(13.433.127,01)	99,08
02 07 02 07 07 056 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	18.400.000,00	9.378.400,00	-	27.778.400,00	18.400.000,00	9.378.400,00	-	27.778.400,00	-	100,00
02 07 02 07 07 056 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	-	27.689.784,00	-	27.689.784,00	-	27.689.784,00	-	27.689.784,00	-	100,00
02 07 02 07 07 056 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	12.400.000,00	36.386.000,00	-	48.786.000,00	12.400.000,00	36.386.000,00	-	48.786.000,00	-	100,00
02 07 02 07 07 056 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	150.100.000,00	262.154.784,00	227.272.000,00	639.526.784,00	150.100.000,00	261.058.723,02	225.300.399,97	636.459.122,99	(3.067.661,01)	99,52
02 07 02 07 07 056 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	102.200.000,00	191.576.784,00	340.284.000,00	634.060.784,00	102.200.000,00	183.449.534,00	338.046.000,00	623.695.534,00	(10.365.250,00)	98,37
02 07 02 07 07 056 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	8.000.000,00	72.533.500,00	-	80.533.500,00	8.000.000,00	72.533.284,00	-	80.533.284,00	(216,00)	100,00
02 07 08	KECAMATAN WIROBRAJAN	573.750.000,00	1.808.495.891,00	730.257.000,00	3.112.502.891,00	572.700.000,00	1.779.883.752,00	722.798.499,24	3.075.382.251,24	(37.120.639,76)	98,81
02 07 02 07 08 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	213.500.000,00	458.315.513,00	4.540.000,00	676.355.513,00	212.450.000,00	455.859.949,00	4.390.000,00	672.699.949,00	(3.655.564,00)	99,46
02 07 02 07 08 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	24.703.100,00	-	24.703.100,00	-	24.577.100,00	-	24.577.100,00	(126.000,00)	99,49
02 07 02 07 08 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.500.000,00	433.612.413,00	4.540.000,00	651.652.413,00	212.450.000,00	431.282.849,00	4.390.000,00	648.122.849,00	(3.529.564,00)	99,46
02 07 02 07 08 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	37.751.265,00	-	37.751.265,00	-	35.580.075,00	-	35.580.075,00	(2.171.190,00)	94,25
02 07 02 07 08 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	18.030.178,00	-	18.030.178,00	-	18.028.178,00	-	18.028.178,00	(2.000,00)	99,99
02 07 02 07 08 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	19.721.087,00	-	19.721.087,00	-	17.551.897,00	-	17.551.897,00	(2.169.190,00)	89,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 08 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	100,00
02 07 02 07 08 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	2.477.500,00	-	100,00
02 07 02 07 08 057	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	360.250.000,00	1.309.951.613,00	725.717.000,00	2.395.918.613,00	360.250.000,00	1.285.966.228,00	718.408.499,24	2.364.624.727,24	(31.293.885,76)	98,69
02 07 02 07 08 057 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	10.250.000,00	18.482.500,00	-	28.732.500,00	10.250.000,00	18.429.900,00	-	28.679.900,00	(52.600,00)	99,82
02 07 02 07 08 057 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	67.193.568,00	-	67.193.568,00	-	66.797.832,00	-	66.797.832,00	(395.736,00)	99,41
02 07 02 07 08 057 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	900.000,00	33.812.800,00	-	34.712.800,00	900.000,00	33.812.800,00	-	34.712.800,00	-	100,00
02 07 02 07 08 057 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	119.250.000,00	288.622.784,00	191.125.000,00	598.997.784,00	119.250.000,00	269.563.498,00	191.125.000,00	579.938.498,00	(19.059.286,00)	96,82
02 07 02 07 08 057 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	121.200.000,00	323.359.784,00	189.733.000,00	634.292.784,00	121.200.000,00	319.772.669,00	182.817.499,24	623.790.168,24	(10.502.615,76)	98,34
02 07 02 07 08 057 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	108.650.000,00	352.368.784,00	231.401.000,00	692.419.784,00	108.650.000,00	351.500.336,00	231.231.000,00	691.381.336,00	(1.038.448,00)	99,85
02 07 02 07 08 057 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	-	226.111.393,00	113.458.000,00	339.569.393,00	-	226.089.193,00	113.235.000,00	339.324.193,00	(245.200,00)	99,93
02 07 09	KECAMATAN MANTRIJERON	759.800.000,00	2.011.237.254,00	685.348.000,00	3.456.385.254,00	754.750.000,00	1.981.831.135,00	677.482.800,00	3.414.063.935,00	(42.321.319,00)	98,78
02 07 02 07 09 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.000.000,00	387.946.120,00	104.314.000,00	675.260.120,00	183.000.000,00	382.745.121,00	103.496.500,00	669.241.621,00	(6.018.499,00)	99,11
02 07 02 07 09 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	23.809.500,00	-	23.809.500,00	-	23.756.500,00	-	23.756.500,00	(53.000,00)	99,78
02 07 02 07 09 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.000.000,00	364.136.620,00	104.314.000,00	651.450.620,00	183.000.000,00	358.988.621,00	103.496.500,00	645.485.121,00	(5.965.499,00)	99,08
02 07 02 07 09 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	20.685.796,00	18.040.000,00	38.725.796,00	-	20.681.983,00	18.040.000,00	38.721.983,00	(3.813,00)	99,99
02 07 02 07 09 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	452.430,00	18.040.000,00	18.492.430,00	-	452.430,00	18.040.000,00	18.492.430,00	-	100,00
02 07 02 07 09 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	20.233.366,00	-	20.233.366,00	-	20.229.553,00	-	20.229.553,00	(3.813,00)	99,98
02 07 02 07 09 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	870.000,00	-	870.000,00	-	870.000,00	-	870.000,00	-	100,00
02 07 02 07 09 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	870.000,00	-	870.000,00	-	870.000,00	-	870.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 09 058	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	576.800.000,00	1.601.735.338,00	562.994.000,00	2.741.529.338,00	571.750.000,00	1.577.534.031,00	555.946.300,00	2.705.230.331,00	(36.299.007,00)	98,68
02 07 02 07 09 058 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	40.800.000,00	18.753.000,00	-	59.553.000,00	40.800.000,00	18.750.000,00	-	59.550.000,00	(3.000,00)	99,99
02 07 02 07 09 058 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	-	49.084.586,00	-	49.084.586,00	-	49.019.654,00	-	49.019.654,00	(64.932,00)	99,87
02 07 02 07 09 058 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	4.100.000,00	9.110.000,00	-	13.210.000,00	4.100.000,00	9.110.000,00	-	13.210.000,00	-	100,00
02 07 02 07 09 058 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	193.300.000,00	529.538.784,00	284.500.000,00	1.007.338.784,00	193.300.000,00	524.409.021,58	279.827.000,00	997.536.021,58	(9.802.762,42)	99,03
02 07 02 07 09 058 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	164.000.000,00	438.440.184,00	51.694.000,00	654.134.184,00	164.000.000,00	437.445.757,42	49.940.500,00	651.386.257,42	(2.747.926,58)	99,58
02 07 02 07 09 058 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	169.300.000,00	284.819.784,00	226.800.000,00	680.919.784,00	164.250.000,00	267.722.598,00	226.178.800,00	658.151.398,00	(22.768.386,00)	96,66
02 07 02 07 09 058 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	5.300.000,00	271.989.000,00	-	277.289.000,00	5.300.000,00	271.077.000,00	-	276.377.000,00	(912.000,00)	99,67
02 07 10	KECAMATAN KRATON	635.025.115,00	1.445.688.367,00	514.430.100,00	2.595.143.582,00	632.775.000,00	1.415.305.096,00	510.408.000,00	2.558.488.096,00	(36.655.486,00)	98,59
02 07 02 07 10 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	215.500.000,00	377.353.570,00	1.700.000,00	594.553.570,00	213.750.000,00	367.631.730,00	1.700.000,00	583.081.730,00	(11.471.840,00)	98,07
02 07 02 07 10 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	17.476.800,00	-	17.476.800,00	-	17.476.800,00	-	17.476.800,00	-	100,00
02 07 02 07 10 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.500.000,00	359.876.770,00	1.700.000,00	577.076.770,00	213.750.000,00	350.154.930,00	1.700.000,00	565.604.930,00	(11.471.840,00)	98,01
02 07 02 07 10 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	25.931.275,00	7.280.000,00	33.211.275,00	-	23.976.427,00	7.280.000,00	31.256.427,00	(1.954.848,00)	94,11
02 07 02 07 10 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	15.930.000,00	7.280.000,00	23.210.000,00	-	15.924.829,00	7.280.000,00	23.204.829,00	(5.171,00)	99,98
02 07 02 07 10 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	10.001.275,00	-	10.001.275,00	-	8.051.598,00	-	8.051.598,00	(1.949.677,00)	80,51
02 07 02 07 10 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	100,00
02 07 02 07 10 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	100,00
02 07 02 07 10 059	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	419.525.115,00	1.041.303.522,00	505.450.100,00	1.966.278.737,00	419.025.000,00	1.022.596.939,00	501.428.000,00	1.943.049.939,00	(23.228.798,00)	98,82
02 07 02 07 10 059 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	23.400.000,00	39.978.500,00	-	63.378.500,00	22.900.000,00	39.958.500,00	-	62.858.500,00	(520.000,00)	99,18
02 07 02 07 10 059 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	-	61.161.600,00	-	61.161.600,00	-	60.992.458,00	-	60.992.458,00	(169.142,00)	99,72
02 07 02 07 10 059 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	6.375.000,00	33.772.000,00	-	40.147.000,00	6.375.000,00	33.772.000,00	-	40.147.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 10 059 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	96.400.000,00	169.502.682,00	229.600.000,00	495.502.682,00	96.400.000,00	155.414.249,00	227.267.000,00	479.081.249,00	(16.421.433,00)	96,69
02 07 02 07 10 059 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	168.800.115,00	414.223.500,00	158.975.100,00	741.998.715,00	168.800.000,00	411.814.583,00	158.262.000,00	738.876.583,00	(3.122.132,00)	99,58
02 07 02 07 10 059 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	121.700.000,00	294.282.240,00	116.875.000,00	532.857.240,00	121.700.000,00	292.262.149,00	115.899.000,00	529.861.149,00	(2.996.091,00)	99,44
02 07 02 07 10 059 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	2.850.000,00	28.383.000,00	-	31.233.000,00	2.850.000,00	28.383.000,00	-	31.233.000,00	-	100,00
02 07 11	KECAMATAN GONDOMANAN	478.850.000,00	1.689.558.000,00	36.905.000,00	2.205.313.000,00	476.225.000,00	1.646.799.253,00	35.494.800,00	2.158.519.053,00	(46.793.947,00)	97,88
02 07 02 07 11 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.850.000,00	432.669.000,00	5.100.000,00	608.619.000,00	168.250.000,00	406.589.468,00	5.100.000,00	579.939.468,00	(28.679.532,00)	95,29
02 07 02 07 11 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	16.274.000,00	-	16.274.000,00	-	16.268.500,00	-	16.268.500,00	(5.500,00)	99,97
02 07 02 07 11 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.850.000,00	416.395.000,00	5.100.000,00	592.345.000,00	168.250.000,00	390.320.968,00	5.100.000,00	563.670.968,00	(28.674.032,00)	95,16
02 07 02 07 11 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	18.930.000,00	13.805.000,00	32.735.000,00	-	17.268.200,00	13.700.000,00	30.968.200,00	(1.766.800,00)	94,60
02 07 02 07 11 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	13.805.000,00	13.805.000,00	-	-	13.700.000,00	13.700.000,00	(105.000,00)	99,24
02 07 02 07 11 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	18.930.000,00	-	18.930.000,00	-	17.268.200,00	-	17.268.200,00	(1.661.800,00)	91,22
02 07 02 07 11 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	100,00
02 07 02 07 11 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	100,00
02 07 02 07 11 060	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan	308.000.000,00	1.236.489.000,00	18.000.000,00	1.562.489.000,00	307.975.000,00	1.221.471.585,00	16.694.800,00	1.546.141.385,00	(16.347.615,00)	98,95
02 07 02 07 11 060 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	38.675.000,00	23.330.000,00	-	62.005.000,00	38.650.000,00	23.330.000,00	-	61.980.000,00	(25.000,00)	99,96
02 07 02 07 11 060 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	36.688.000,00	-	36.688.000,00	-	36.574.300,00	-	36.574.300,00	(113.700,00)	99,69
02 07 02 07 11 060 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	5.900.000,00	50.140.000,00	-	56.040.000,00	5.900.000,00	50.140.000,00	-	56.040.000,00	-	100,00
02 07 02 07 11 060 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	116.675.000,00	444.591.000,00	12.000.000,00	573.266.000,00	116.675.000,00	433.337.985,00	10.694.800,00	560.707.785,00	(12.558.215,00)	97,81
02 07 02 07 11 060 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	146.750.000,00	640.841.000,00	6.000.000,00	793.591.000,00	146.750.000,00	637.190.300,00	6.000.000,00	789.940.300,00	(3.650.700,00)	99,54
02 07 02 07 11 060 006	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	-	40.899.000,00	-	40.899.000,00	-	40.899.000,00	-	40.899.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 12	KECAMATAN MERGANGSAN	744.100.000,00	1.931.812.950,00	645.859.869,00	3.321.772.819,00	732.750.000,00	1.874.791.026,00	640.766.816,40	3.248.307.842,40	(73.464.976,60)	97,79
02 07 02 07 12 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219.600.000,00	483.836.459,00	51.800.950,00	755.237.409,00	219.600.000,00	477.685.964,00	51.800.950,00	749.086.914,00	(6.150.495,00)	99,19
02 07 02 07 12 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	28.150.000,00	-	28.150.000,00	-	27.522.000,00	-	27.522.000,00	(628.000,00)	97,77
02 07 02 07 12 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.600.000,00	455.686.459,00	51.800.950,00	727.087.409,00	219.600.000,00	450.163.964,00	51.800.950,00	721.564.914,00	(5.522.495,00)	99,24
02 07 02 07 12 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	38.780.100,00	20.000.000,00	58.780.100,00	-	34.425.223,00	19.871.720,00	54.296.943,00	(4.483.157,00)	92,37
02 07 02 07 12 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	-	7.561.800,00	19.871.720,00	27.433.520,00	(2.566.480,00)	91,45
02 07 02 07 12 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	28.780.100,00	-	28.780.100,00	-	26.863.423,00	-	26.863.423,00	(1.916.677,00)	93,34
02 07 02 07 12 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.999.600,00	-	1.999.600,00	(400,00)	99,98
02 07 02 07 12 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.999.600,00	-	1.999.600,00	(400,00)	99,98
02 07 02 07 12 061	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	524.500.000,00	1.407.196.391,00	574.058.919,00	2.505.755.310,00	513.150.000,00	1.360.680.239,00	569.094.146,40	2.442.924.385,40	(62.830.924,60)	97,49
02 07 02 07 12 061 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	23.850.000,00	33.548.800,00	-	57.398.800,00	21.300.000,00	33.491.300,00	-	54.791.300,00	(2.607.500,00)	95,46
02 07 02 07 12 061 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	-	48.220.784,00	-	48.220.784,00	-	48.165.488,00	-	48.165.488,00	(55.296,00)	99,89
02 07 02 07 12 061 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	900.000,00	38.879.784,00	-	39.779.784,00	900.000,00	38.806.426,00	-	39.706.426,00	(73.358,00)	99,82
02 07 02 07 12 061 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	189.300.000,00	440.772.984,00	150.000.000,00	780.072.984,00	189.150.000,00	439.810.788,00	147.983.000,00	776.943.788,00	(3.129.196,00)	99,60
02 07 02 07 12 061 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	181.400.000,00	399.944.115,00	310.842.519,00	892.186.634,00	173.950.000,00	357.562.739,00	308.841.146,40	840.353.885,40	(51.832.748,60)	94,19
02 07 02 07 12 061 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	125.900.000,00	333.387.384,00	113.216.400,00	572.503.784,00	124.700.000,00	331.561.288,00	112.270.000,00	568.531.288,00	(3.972.496,00)	99,31
02 07 02 07 12 061 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	3.150.000,00	112.442.540,00	-	115.592.540,00	3.150.000,00	111.282.210,00	-	114.432.210,00	(1.160.330,00)	99,00
02 07 13	KECAMATAN UMBULHARJO	1.411.510.000,00	3.445.095.577,00	1.267.626.575,00	6.124.232.152,00	1.403.785.000,00	3.419.081.219,05	1.181.421.645,57	6.004.287.864,62	(119.944.287,38)	98,04
02 07 02 07 13 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	622.200.000,00	769.648.937,00	10.400.000,00	1.402.248.937,00	622.200.000,00	759.639.430,70	10.400.000,00	1.392.239.430,70	(10.009.506,30)	99,29
02 07 02 07 13 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	94.125.000,00	-	94.125.000,00	-	94.123.014,50	-	94.123.014,50	(1.985,50)	100,00
02 07 02 07 13 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.200.000,00	675.523.937,00	10.400.000,00	1.308.123.937,00	622.200.000,00	665.516.416,20	10.400.000,00	1.298.116.416,20	(10.007.520,80)	99,23
02 07 02 07 13 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	42.431.000,00	81.668.575,00	124.099.575,00	-	42.430.990,95	81.436.000,00	123.866.990,95	(232.584,05)	99,81
02 07 02 07 13 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	4.210.000,00	81.668.575,00	85.878.575,00	-	4.210.000,00	81.436.000,00	85.646.000,00	(232.575,00)	99,73
02 07 02 07 13 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	38.221.000,00	-	38.221.000,00	-	38.220.990,95	-	38.220.990,95	(9,05)	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 13 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.117.000,00	-	3.117.000,00	-	3.110.000,00	-	3.110.000,00	(7.000,00)	99,78
02 07 02 07 13 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.117.000,00	-	3.117.000,00	-	3.110.000,00	-	3.110.000,00	(7.000,00)	99,78
02 07 02 07 13 062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	789.310.000,00	2.629.898.640,00	1.175.558.000,00	4.594.766.640,00	781.585.000,00	2.613.900.797,40	1.089.585.645,57	4.485.071.442,97	(109.695.197,03)	97,61
02 07 02 07 13 062 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	18.000.000,00	42.098.000,00	-	60.098.000,00	18.000.000,00	42.076.000,00	-	60.076.000,00	(22.000,00)	99,96
02 07 02 07 13 062 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	-	28.899.820,00	-	28.899.820,00	-	28.878.352,00	-	28.878.352,00	(21.468,00)	99,93
02 07 02 07 13 062 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	900.000,00	88.376.000,00	-	89.276.000,00	900.000,00	88.376.000,00	-	89.276.000,00	-	100,00
02 07 02 07 13 062 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	102.100.000,00	319.153.000,00	198.000.000,00	619.253.000,00	99.700.000,00	316.714.431,40	196.736.000,00	613.150.431,40	(6.102.568,60)	99,01
02 07 02 07 13 062 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	153.075.000,00	261.647.820,00	187.170.000,00	601.892.820,00	151.275.000,00	260.516.154,40	185.500.000,00	597.291.154,40	(4.601.665,60)	99,24
02 07 02 07 13 062 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	113.500.000,00	296.551.000,00	144.000.000,00	554.051.000,00	113.500.000,00	294.462.564,40	143.163.000,00	551.125.564,40	(2.925.435,60)	99,47
02 07 02 07 13 062 007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	84.900.000,00	184.170.000,00	305.245.000,00	574.315.000,00	84.900.000,00	183.783.314,40	224.688.645,57	493.371.959,97	(80.943.040,03)	85,91
02 07 02 07 13 062 008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	109.800.000,00	440.934.000,00	64.353.000,00	615.087.000,00	109.800.000,00	437.619.432,00	64.225.000,00	611.644.432,00	(3.442.568,00)	99,44
02 07 02 07 13 062 009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	117.800.000,00	317.693.000,00	125.080.000,00	560.573.000,00	116.975.000,00	314.107.394,40	124.704.000,00	555.786.394,40	(4.786.605,60)	99,15
02 07 02 07 13 062 010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	81.675.000,00	479.741.000,00	151.710.000,00	713.126.000,00	78.975.000,00	476.763.154,40	150.569.000,00	706.307.154,40	(6.818.845,60)	99,04
02 07 02 07 13 062 011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo	7.560.000,00	170.635.000,00	-	178.195.000,00	7.560.000,00	170.604.000,00	-	178.164.000,00	(31.000,00)	99,98
02 07 14	KECAMATAN KOTAGEDE	732.250.000,00	1.712.236.468,00	678.972.000,00	3.123.458.468,00	726.300.000,00	1.685.387.076,00	659.142.798,14	3.070.829.874,14	(52.628.593,86)	98,32
02 07 02 07 14 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.750.000,00	563.658.036,00	25.750.000,00	730.158.036,00	140.500.000,00	543.599.135,00	25.673.780,00	709.772.915,00	(20.385.121,00)	97,21
02 07 02 07 14 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	53.269.700,00	-	53.269.700,00	-	53.232.700,00	-	53.232.700,00	(37.000,00)	99,93
02 07 02 07 14 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.750.000,00	510.388.336,00	25.750.000,00	676.888.336,00	140.500.000,00	490.366.435,00	25.673.780,00	656.540.215,00	(20.348.121,00)	96,99

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 07 02 07 14 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	24.796.432,00	43.522.000,00	68.318.432,00	-	24.508.933,00	43.183.400,00	67.692.333,00	(626.099,00)	99,08
02 07 02 07 14 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	300.000,00	43.522.000,00	43.822.000,00	-	300.000,00	43.183.400,00	43.483.400,00	(338.600,00)	99,23
02 07 02 07 14 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	24.496.432,00	-	24.496.432,00	-	24.208.933,00	-	24.208.933,00	(287.499,00)	98,83
02 07 02 07 14 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	100,00
02 07 02 07 14 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	100,00
02 07 02 07 14 063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	591.500.000,00	1.118.982.000,00	609.700.000,00	2.320.182.000,00	585.800.000,00	1.112.479.008,00	590.285.618,14	2.288.564.626,14	(31.617.373,86)	98,64
02 07 02 07 14 063 001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	212.650.000,00	24.000.000,00	-	236.650.000,00	211.750.000,00	24.000.000,00	-	235.750.000,00	(900.000,00)	99,62
02 07 02 07 14 063 002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	78.620.000,00	-	78.620.000,00	-	78.521.954,00	-	78.521.954,00	(98.046,00)	99,88
02 07 02 07 14 063 003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	4.350.000,00	44.828.000,00	-	49.178.000,00	4.350.000,00	44.828.000,00	-	49.178.000,00	-	100,00
02 07 02 07 14 063 004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	116.800.000,00	311.784.000,00	195.000.000,00	623.584.000,00	112.000.000,00	309.133.418,00	193.935.618,14	615.069.036,14	(8.514.963,86)	98,63
02 07 02 07 14 063 005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ponggan	125.600.000,00	388.940.000,00	130.000.000,00	644.540.000,00	125.600.000,00	388.902.318,00	113.520.000,00	628.022.318,00	(16.517.682,00)	97,44
02 07 02 07 14 063 006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	132.100.000,00	208.100.000,00	284.700.000,00	624.900.000,00	132.100.000,00	204.383.318,00	282.830.000,00	619.313.318,00	(5.586.682,00)	99,11
02 07 02 07 14 063 007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	-	62.710.000,00	-	62.710.000,00	-	62.710.000,00	-	62.710.000,00	-	100,00
02 07 02 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	239.150.000,00	542.992.011,00	-	782.142.011,00	238.400.000,00	531.569.358,60	-	769.969.358,60	(12.172.652,40)	98,44
02 07 02 02 01 129	Program Pemberdayaan Masyarakat	239.150.000,00	542.992.011,00	-	782.142.011,00	238.400.000,00	531.569.358,60	-	769.969.358,60	(12.172.652,40)	98,44
02 07 02 02 01 129 001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	59.125.000,00	385.652.227,00	-	444.777.227,00	58.425.000,00	385.543.044,20	-	443.968.044,20	(809.182,80)	99,82
02 07 02 02 01 129 002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	180.025.000,00	157.339.784,00	-	337.364.784,00	179.975.000,00	146.026.314,40	-	326.001.314,40	(11.363.469,60)	96,63
02 08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	418.780.500,00	3.210.333.260,00	425.980.000,00	4.055.093.760,00	412.664.770,00	3.007.111.717,00	408.240.000,00	3.828.016.487,00	(227.077.273,00)	94,40
02 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	418.780.500,00	3.210.333.260,00	425.980.000,00	4.055.093.760,00	412.664.770,00	3.007.111.717,00	408.240.000,00	3.828.016.487,00	(227.077.273,00)	94,40
02 08 02 08 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	766.398.860,00	404.980.000,00	1.171.378.860,00	-	657.861.447,00	387.340.000,00	1.045.201.447,00	(126.177.413,00)	89,23
02 08 02 08 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	26.740.000,00	-	26.740.000,00	-	15.629.380,00	-	15.629.380,00	(11.110.620,00)	58,45
02 08 02 08 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	739.658.860,00	404.980.000,00	1.144.638.860,00	-	642.232.067,00	387.340.000,00	1.029.572.067,00	(115.066.793,00)	89,95

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 08 02 08 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	169.237.600,00	-	169.237.600,00	-	116.864.070,00	-	116.864.070,00	(52.373.530,00)	69,05
02 08 02 08 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	64.749.600,00	-	64.749.600,00	-	50.476.000,00	-	50.476.000,00	(14.273.600,00)	77,96
02 08 02 08 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	104.488.000,00	-	104.488.000,00	-	66.388.070,00	-	66.388.070,00	(38.099.930,00)	63,54
02 08 02 08 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.320.000,00	-	2.320.000,00	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00	(435.000,00)	81,25
02 08 02 08 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.320.000,00	-	2.320.000,00	-	1.885.000,00	-	1.885.000,00	(435.000,00)	81,25
02 08 02 08 01 064	Program Pengendalian Penduduk	418.780.500,00	661.710.400,00	-	1.080.490.900,00	412.664.770,00	654.615.100,00	-	1.067.279.870,00	(13.211.030,00)	98,78
02 08 02 08 01 064 001	Pengendalian Penduduk	-	338.035.600,00	-	338.035.600,00	-	336.222.400,00	-	336.222.400,00	(1.813.200,00)	99,46
02 08 02 08 01 064 002	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	418.780.500,00	323.674.800,00	-	742.455.300,00	412.664.770,00	318.392.700,00	-	731.057.470,00	(11.397.830,00)	98,46
02 08 02 08 01 065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	1.610.666.400,00	21.000.000,00	1.631.666.400,00	-	1.575.886.100,00	20.900.000,00	1.596.786.100,00	(34.880.300,00)	97,86
02 08 02 08 01 065 001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	-	838.279.800,00	-	838.279.800,00	-	837.080.100,00	-	837.080.100,00	(1.199.700,00)	99,86
02 08 02 08 01 065 002	Pembinaan Pembangunan Keluarga	-	772.386.600,00	21.000.000,00	793.386.600,00	-	738.806.000,00	20.900.000,00	759.706.000,00	(33.680.600,00)	95,75
02 09	URUSAN PERHUBUNGAN	109.200.000,00	9.560.878.063,00	1.144.088.210,00	10.814.166.273,00	109.200.000,00	8.224.559.268,00	1.122.051.101,02	9.455.810.369,02	(1.358.355.903,98)	87,44
02 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	109.200.000,00	9.560.878.063,00	1.144.088.210,00	10.814.166.273,00	109.200.000,00	8.224.559.268,00	1.122.051.101,02	9.455.810.369,02	(1.358.355.903,98)	87,44
02 09 02 09 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.668.177.830,00	-	1.668.177.830,00	-	1.613.235.915,40	-	1.613.235.915,40	(54.941.914,60)	96,71
02 09 02 09 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	27.120.000,00	-	27.120.000,00	-	26.565.600,00	-	26.565.600,00	(554.400,00)	97,96
02 09 02 09 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.641.057.830,00	-	1.641.057.830,00	-	1.586.670.315,40	-	1.586.670.315,40	(54.387.514,60)	96,69
02 09 02 09 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	387.150.000,00	185.309.000,00	572.459.000,00	-	209.711.977,00	185.309.000,00	395.020.977,00	(177.438.023,00)	69,00
02 09 02 09 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	185.309.000,00	185.309.000,00	-	-	185.309.000,00	185.309.000,00	-	100,00
02 09 02 09 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	387.150.000,00	-	387.150.000,00	-	209.711.977,00	-	209.711.977,00	(177.438.023,00)	54,17
02 09 02 09 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	100,00
02 09 02 09 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	2.315.600,00	-	100,00
02 09 02 09 01 066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	-	1.155.242.344,00	550.681.000,00	1.705.923.344,00	-	1.150.799.115,40	541.569.811,02	1.692.368.926,42	(13.554.417,58)	99,21
02 09 02 09 01 066 001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	7.440.000,00	-	7.440.000,00	(60.000,00)	99,20
02 09 02 09 01 066 002	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	195.974.344,00	-	195.974.344,00	-	195.414.365,40	-	195.414.365,40	(559.978,60)	99,71
02 09 02 09 01 066 003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan	-	951.768.000,00	550.681.000,00	1.502.449.000,00	-	947.944.750,00	541.569.811,02	1.489.514.561,02	(12.934.438,98)	99,14
02 09 02 09 01 067	Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	42.000.000,00	1.296.954.793,00	338.598.210,00	1.677.553.003,00	42.000.000,00	1.278.033.260,20	326.967.290,00	1.647.000.550,20	(30.552.452,80)	98,18
02 09 02 09 01 067 001	Penyelenggaraan Angkutan	-	138.376.000,00	83.655.000,00	222.031.000,00	-	137.972.450,00	83.655.000,00	221.627.450,00	(403.550,00)	99,82
02 09 02 09 01 067 002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	479.434.306,00	254.943.210,00	734.377.516,00	-	466.895.857,60	243.312.290,00	710.208.147,60	(24.169.368,40)	96,71
02 09 02 09 01 067 003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	-	305.385.695,00	-	305.385.695,00	-	305.255.708,60	-	305.255.708,60	(129.986,40)	99,96

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 09 02 09 01 067 004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	42.000.000,00	373.758.792,00	-	415.758.792,00	42.000.000,00	367.909.244,00	-	409.909.244,00	(5.849.548,00)	98,59
02 09 02 09 01 068	Program Pengelolaan Perparkiran	67.200.000,00	5.051.037.496,00	69.500.000,00	5.187.737.496,00	67.200.000,00	3.970.463.400,00	68.205.000,00	4.105.868.400,00	(1.081.869.096,00)	79,15
02 09 02 09 01 068 001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	48.000.000,00	4.876.077.496,00	13.500.000,00	4.937.577.496,00	48.000.000,00	3.816.775.400,00	13.500.000,00	3.878.275.400,00	(1.059.302.096,00)	78,55
02 09 02 09 01 068 002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	19.200.000,00	174.960.000,00	56.000.000,00	250.160.000,00	19.200.000,00	153.688.000,00	54.705.000,00	227.593.000,00	(22.567.000,00)	90,98
02 10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.850.000,00	10.193.781.550,00	964.215.000,00	11.174.846.550,00	16.850.000,00	9.697.033.175,50	929.679.049,15	10.643.562.224,65	(531.284.325,35)	95,25
02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	16.850.000,00	10.193.781.550,00	964.215.000,00	11.174.846.550,00	16.850.000,00	9.697.033.175,50	929.679.049,15	10.643.562.224,65	(531.284.325,35)	95,25
02 10 02 10 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	855.905.930,00	8.470.000,00	864.375.930,00	-	745.242.203,50	8.470.000,00	753.712.203,50	(110.663.726,50)	87,20
02 10 02 10 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	21.340.000,00	-	21.340.000,00	-	20.785.000,00	-	20.785.000,00	(555.000,00)	97,40
02 10 02 10 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	834.565.930,00	8.470.000,00	843.035.930,00	-	724.457.203,50	8.470.000,00	732.927.203,50	(110.108.726,50)	86,94
02 10 02 10 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	53.821.000,00	97.725.000,00	151.546.000,00	-	43.042.602,00	96.871.049,15	139.913.651,15	(11.632.348,85)	92,32
02 10 02 10 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	97.725.000,00	97.725.000,00	-	-	96.871.049,15	96.871.049,15	(853.950,85)	99,13
02 10 02 10 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	53.821.000,00	-	53.821.000,00	-	43.042.602,00	-	43.042.602,00	(10.778.398,00)	79,97
02 10 02 10 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	100,00
02 10 02 10 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	100,00
02 10 02 10 01 006 006	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	-	7.099.264.900,00	858.020.000,00	7.957.284.900,00	-	6.769.161.086,00	824.338.000,00	7.593.499.086,00	(363.785.814,00)	95,43
02 10 02 10 01 006 001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	-	509.960.000,00	60.000.000,00	569.960.000,00	-	508.852.000,00	59.400.000,00	568.252.000,00	(1.708.000,00)	99,70
02 10 02 10 01 006 002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	-	6.434.012.900,00	668.020.000,00	7.102.032.900,00	-	6.108.753.686,00	636.634.000,00	6.745.387.686,00	(356.645.214,00)	94,98
02 10 02 10 01 006 003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	-	155.292.000,00	130.000.000,00	285.292.000,00	-	151.555.400,00	128.304.000,00	279.859.400,00	(5.432.600,00)	98,10
02 10 02 10 01 006 004	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	4.200.000,00	1.117.614.080,00	-	1.121.814.080,00	4.200.000,00	1.096.733.345,00	-	1.100.933.345,00	(20.880.735,00)	98,14
02 10 02 10 01 006 001	Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi	4.200.000,00	1.117.614.080,00	-	1.121.814.080,00	4.200.000,00	1.096.733.345,00	-	1.100.933.345,00	(20.880.735,00)	98,14
02 10 02 10 01 006 005	Program Peningkatan Komunikasi Publik	12.650.000,00	1.066.575.640,00	-	1.079.225.640,00	12.650.000,00	1.042.253.939,00	-	1.054.903.939,00	(24.321.701,00)	97,75
02 10 02 10 01 006 001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	-	845.585.640,00	-	845.585.640,00	-	840.195.219,00	-	840.195.219,00	(5.390.421,00)	99,36
02 10 02 10 01 006 002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	12.650.000,00	220.990.000,00	-	233.640.000,00	12.650.000,00	202.058.720,00	-	214.708.720,00	(18.931.280,00)	91,90
02 11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	67.250.000,00	2.115.190.750,00	23.950.000,00	2.206.390.750,00	60.125.000,00	2.087.734.196,40	23.950.000,00	2.171.809.196,40	(34.581.553,60)	98,43
02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67.250.000,00	2.115.190.750,00	23.950.000,00	2.206.390.750,00	60.125.000,00	2.087.734.196,40	23.950.000,00	2.171.809.196,40	(34.581.553,60)	98,43
02 11 02 11 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	806.943.000,00	23.950.000,00	830.893.000,00	-	801.612.401,60	23.950.000,00	825.562.401,60	(5.330.598,40)	99,36
02 11 02 11 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	87.686.000,00	-	87.686.000,00	-	87.386.369,00	-	87.386.369,00	(299.631,00)	99,66
02 11 02 11 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	719.257.000,00	23.950.000,00	743.207.000,00	-	714.226.032,60	23.950.000,00	738.176.032,60	(5.030.967,40)	99,32

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 11 02 11 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	87.751.000,00	-	87.751.000,00	-	82.975.600,00	-	82.975.600,00	(4.775.400,00)	94,56
02 11 02 11 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02 11 02 11 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	87.751.000,00	-	87.751.000,00	-	82.975.600,00	-	82.975.600,00	(4.775.400,00)	94,56
02 11 02 11 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	100,00
02 11 02 11 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	1.953.000,00	-	100,00
02 11 02 11 01 072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	-	381.164.950,00	-	381.164.950,00	-	374.264.843,60	-	374.264.843,60	(6.900.106,40)	98,19
02 11 02 11 01 072 001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	-	330.288.850,00	-	330.288.850,00	-	323.432.410,80	-	323.432.410,80	(6.856.439,20)	97,92
02 11 02 11 01 072 002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	-	50.876.100,00	-	50.876.100,00	-	50.832.432,80	-	50.832.432,80	(43.667,20)	99,91
02 11 02 11 01 073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	67.250.000,00	837.378.800,00	-	904.628.800,00	60.125.000,00	826.928.351,20	-	887.053.351,20	(17.575.448,80)	98,06
02 11 02 11 01 073 001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	24.500.000,00	214.345.800,00	-	238.845.800,00	24.500.000,00	212.789.151,20	-	237.289.151,20	(1.556.648,80)	99,35
02 11 02 11 01 073 002	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	42.750.000,00	623.033.000,00	-	665.783.000,00	35.625.000,00	614.139.200,00	-	649.764.200,00	(16.018.800,00)	97,59
02 12	URUSAN PENANAMAN MODAL	-	2.503.498.000,00	194.866.000,00	2.698.364.000,00	-	2.450.611.235,00	193.425.000,00	2.644.036.235,00	(54.327.765,00)	97,99
02 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	2.503.498.000,00	194.866.000,00	2.698.364.000,00	-	2.450.611.235,00	193.425.000,00	2.644.036.235,00	(54.327.765,00)	97,99
02 12 02 12 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.492.957.000,00	34.616.000,00	1.527.573.000,00	-	1.481.471.685,00	33.400.000,00	1.514.871.685,00	(12.701.315,00)	99,17
02 12 02 12 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	56.705.000,00	-	56.705.000,00	-	55.908.479,00	-	55.908.479,00	(796.521,00)	98,60
02 12 02 12 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.436.252.000,00	34.616.000,00	1.470.868.000,00	-	1.425.563.206,00	33.400.000,00	1.458.963.206,00	(11.904.794,00)	99,19
02 12 02 12 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	479.370.000,00	-	479.370.000,00	-	441.894.500,00	-	441.894.500,00	(37.475.500,00)	92,18
02 12 02 12 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	410.000.000,00	-	410.000.000,00	-	372.636.800,00	-	372.636.800,00	(37.363.200,00)	90,89
02 12 02 12 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	69.370.000,00	-	69.370.000,00	-	69.257.700,00	-	69.257.700,00	(112.300,00)	99,84
02 12 02 12 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	36.474.000,00	-	36.474.000,00	-	34.044.380,00	-	34.044.380,00	(2.429.620,00)	93,34
02 12 02 12 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	36.474.000,00	-	36.474.000,00	-	34.044.380,00	-	34.044.380,00	(2.429.620,00)	93,34
02 12 02 12 01 074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	262.058.400,00	160.250.000,00	422.308.400,00	-	261.621.072,00	160.025.000,00	421.646.072,00	(662.328,00)	99,84
02 12 02 12 01 074 001	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	-	128.598.000,00	-	128.598.000,00	-	128.417.996,00	-	128.417.996,00	(180.004,00)	99,86
02 12 02 12 01 074 002	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	-	67.402.400,00	-	67.402.400,00	-	67.327.760,00	-	67.327.760,00	(74.640,00)	99,89
02 12 02 12 01 074 003	Pengelolaan Data Perizinan	-	62.411.000,00	110.250.000,00	172.661.000,00	-	62.228.916,00	110.250.000,00	172.478.916,00	(182.084,00)	99,89
02 12 02 12 01 074 004	Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan	-	3.647.000,00	50.000.000,00	53.647.000,00	-	3.646.400,00	49.775.000,00	53.421.400,00	(225.600,00)	99,58
02 12 02 12 01 075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	-	2.816.000,00	-	2.816.000,00	-	2.701.200,00	-	2.701.200,00	(114.800,00)	95,92
02 12 02 12 01 075 001	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	-	2.816.000,00	-	2.816.000,00	-	2.701.200,00	-	2.701.200,00	(114.800,00)	95,92

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 12 02 12 01 076	Program Pengembangan Penanaman Modal	-	157.854.000,00	-	157.854.000,00	-	157.384.638,00	-	157.384.638,00	(469.362,00)	99,70
02 12 02 12 01 076 001	Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	-	67.181.000,00	-	67.181.000,00	-	66.921.540,00	-	66.921.540,00	(259.460,00)	99,61
02 12 02 12 01 076 002	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal	-	90.673.000,00	-	90.673.000,00	-	90.463.098,00	-	90.463.098,00	(209.902,00)	99,77
02 12 02 12 01 077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	71.968.600,00	-	71.968.600,00	-	71.493.760,00	-	71.493.760,00	(474.840,00)	99,34
02 12 02 12 01 077 001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	-	35.719.600,00	-	35.719.600,00	-	35.622.180,00	-	35.622.180,00	(97.420,00)	99,73
02 12 02 12 01 077 003	Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta	-	36.249.000,00	-	36.249.000,00	-	35.871.580,00	-	35.871.580,00	(377.420,00)	98,96
02 13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	22.000.000,00	2.411.223.992,00	-	2.433.223.992,00	22.000.000,00	2.342.624.601,00	-	2.364.624.601,00	(68.599.391,00)	97,18
02 13 01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	22.000.000,00	2.411.223.992,00	-	2.433.223.992,00	22.000.000,00	2.342.624.601,00	-	2.364.624.601,00	(68.599.391,00)	97,18
02 13 02 13 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	355.297.008,00	-	355.297.008,00	-	351.506.890,00	-	351.506.890,00	(3.790.118,00)	98,93
02 13 02 13 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	60.820.000,00	-	60.820.000,00	-	60.800.000,00	-	60.800.000,00	(20.000,00)	99,97
02 13 02 13 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	294.477.008,00	-	294.477.008,00	-	290.706.890,00	-	290.706.890,00	(3.770.118,00)	98,72
02 13 02 13 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	26.076.000,00	-	26.076.000,00	-	22.667.055,00	-	22.667.055,00	(3.408.945,00)	86,93
02 13 02 13 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02 13 02 13 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	26.076.000,00	-	26.076.000,00	-	22.667.055,00	-	22.667.055,00	(3.408.945,00)	86,93
02 13 02 13 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	996.600,00	-	996.600,00	(3.400,00)	-
02 13 02 13 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	996.600,00	-	996.600,00	(3.400,00)	-
02 13 02 13 01 078	Program Pengembangan Kepemudaan	-	228.267.432,00	-	228.267.432,00	-	228.137.568,00	-	228.137.568,00	(129.864,00)	99,94
02 13 02 13 01 078 001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	-	177.441.648,00	-	177.441.648,00	-	177.355.072,00	-	177.355.072,00	(86.576,00)	99,95
02 13 02 13 01 078 002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	-	50.825.784,00	-	50.825.784,00	-	50.782.496,00	-	50.782.496,00	(43.288,00)	99,91
02 13 02 13 01 079	Program Pengembangan Olah Raga	22.000.000,00	1.800.583.552,00	-	1.822.583.552,00	22.000.000,00	1.739.316.488,00	-	1.761.316.488,00	(61.267.064,00)	96,64
02 13 02 13 01 079 001	Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat	-	1.587.889.568,00	-	1.587.889.568,00	-	1.526.769.192,00	-	1.526.769.192,00	(61.120.376,00)	96,15
02 13 02 13 01 079 002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	22.000.000,00	212.693.984,00	-	234.693.984,00	22.000.000,00	212.547.296,00	-	234.547.296,00	(146.688,00)	99,94
02 14	URUSAN STATISTIK	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
02 14 02 14 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
02 14 02 14 01 070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
02 14 02 14 01 070 001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	9.000.000,00	34.178.000,00	-	43.178.000,00	8.500.000,00	31.167.000,00	-	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 15	URUSAN PERSANDIAN	1.100.000,00	994.189.000,00	423.775.000,00	1.419.064.000,00	1.100.000,00	991.301.008,00	422.125.642,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
02 15 02 10 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	1.100.000,00	994.189.000,00	423.775.000,00	1.419.064.000,00	1.100.000,00	991.301.008,00	422.125.642,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
02 15 02 10 01 080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1.100.000,00	994.189.000,00	423.775.000,00	1.419.064.000,00	1.100.000,00	991.301.008,00	422.125.642,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
02 15 02 10 01 080 001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	-	748.605.000,00	188.475.000,00	937.080.000,00	-	746.162.008,00	187.347.992,00	933.510.000,00	(3.570.000,00)	99,62
02 15 02 10 01 080 002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	550.000,00	48.760.000,00	75.300.000,00	124.610.000,00	550.000,00	48.751.000,00	75.253.450,00	124.554.450,00	(55.550,00)	99,96
02 15 02 10 01 080 003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	550.000,00	196.824.000,00	160.000.000,00	357.374.000,00	550.000,00	196.388.000,00	159.524.200,00	356.462.200,00	(911.800,00)	99,74
02 16	URUSAN KEBUDAYAAN	-	617.217.347,00	88.000.000,00	705.217.347,00	-	546.368.338,00	86.125.000,00	632.493.338,00	(72.724.009,00)	89,69
02 16 02 16 01	DINAS KEBUDAYAAN	-	617.217.347,00	88.000.000,00	705.217.347,00	-	546.368.338,00	86.125.000,00	632.493.338,00	(72.724.009,00)	89,69
02 16 02 16 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	408.596.227,00	8.000.000,00	416.596.227,00	-	384.751.318,00	6.625.000,00	391.376.318,00	(25.219.909,00)	93,95
02 16 02 16 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	42.800.000,00	-	42.800.000,00	-	34.114.600,00	-	34.114.600,00	(8.685.400,00)	79,71
02 16 02 16 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	365.796.227,00	8.000.000,00	373.796.227,00	-	350.636.718,00	6.625.000,00	357.261.718,00	(16.534.509,00)	95,58
02 16 02 16 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	97.462.000,00	80.000.000,00	177.462.000,00	-	55.896.904,00	79.500.000,00	135.396.904,00	(42.065.096,00)	76,30
02 16 02 16 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	79.500.000,00	79.500.000,00	(500.000,00)	99,38
02 16 02 16 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	97.462.000,00	-	97.462.000,00	-	55.896.904,00	-	55.896.904,00	(41.565.096,00)	57,35
02 16 02 16 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	111.159.120,00	-	111.159.120,00	-	105.720.116,00	-	105.720.116,00	(5.439.004,00)	95,11
02 16 02 16 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	111.159.120,00	-	111.159.120,00	-	105.720.116,00	-	105.720.116,00	(5.439.004,00)	95,11
02 17	URUSAN PERPUSTAKAAN	-	1.876.670.601,00	294.233.000,00	2.170.903.601,00	-	1.862.684.469,40	294.188.357,50	2.156.872.826,90	(14.030.774,10)	99,35
02 17 02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	1.876.670.601,00	294.233.000,00	2.170.903.601,00	-	1.862.684.469,40	294.188.357,50	2.156.872.826,90	(14.030.774,10)	99,35
02 17 02 18 01 084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	-	1.508.450.601,00	32.233.000,00	1.540.683.601,00	-	1.504.325.414,60	32.232.200,00	1.536.557.614,60	(4.125.986,40)	99,73
02 17 02 18 01 084 001	Pengelolaan Perpustakaan	-	1.387.853.601,00	32.233.000,00	1.420.086.601,00	-	1.383.808.054,60	32.232.200,00	1.416.040.254,60	(4.046.346,40)	99,72
02 17 02 18 01 084 002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	-	120.597.000,00	-	120.597.000,00	-	120.517.360,00	-	120.517.360,00	(79.640,00)	99,93
02 17 02 18 01 085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	-	368.220.000,00	262.000.000,00	630.220.000,00	-	358.359.054,80	261.956.157,50	620.315.212,30	(9.904.787,70)	98,43
02 17 02 18 01 085 001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	-	194.513.000,00	262.000.000,00	456.513.000,00	-	194.285.325,00	261.956.157,50	456.241.482,50	(271.517,50)	99,94
02 17 02 18 01 085 002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	-	173.707.000,00	-	173.707.000,00	-	164.073.729,80	-	164.073.729,80	(9.633.270,20)	94,45
02 18	URUSAN KEARSIPAN	5.700.000,00	2.253.689.991,00	72.300.000,00	2.331.689.991,00	5.700.000,00	2.245.358.892,52	72.279.000,00	2.323.337.892,52	(8.352.098,48)	99,64
02 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.700.000,00	2.253.689.991,00	72.300.000,00	2.331.689.991,00	5.700.000,00	2.245.358.892,52	72.279.000,00	2.323.337.892,52	(8.352.098,48)	99,64
02 18 02 18 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.642.688.699,00	49.350.000,00	1.692.038.699,00	-	1.641.784.849,72	49.329.000,00	1.691.113.849,72	(924.849,28)	99,95
02 18 02 18 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	85.976.907,00	-	85.976.907,00	-	85.950.807,00	-	85.950.807,00	(26.100,00)	99,97
02 18 02 18 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.556.711.792,00	49.350.000,00	1.606.061.792,00	-	1.555.834.042,72	49.329.000,00	1.605.163.042,72	(898.749,28)	99,94

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
02 18 02 18 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	302.588.824,00	16.500.000,00	319.088.824,00	-	296.005.026,00	16.500.000,00	312.505.026,00	(6.583.798,00)	97,94
02 18 02 18 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	151.589.824,00	16.500.000,00	168.089.824,00	-	151.095.000,00	16.500.000,00	167.595.000,00	(494.824,00)	99,71
02 18 02 18 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	150.999.000,00	-	150.999.000,00	-	144.910.026,00	-	144.910.026,00	(6.088.974,00)	95,97
02 18 02 18 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	54.300.820,00	-	54.300.820,00	-	54.207.852,80	-	54.207.852,80	(92.967,20)	99,83
02 18 02 18 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	54.300.820,00	-	54.300.820,00	-	54.207.852,80	-	54.207.852,80	(92.967,20)	99,83
02 18 02 18 01 086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	5.700.000,00	116.300.648,00	-	122.000.648,00	5.700.000,00	115.955.165,60	-	121.655.165,60	(345.482,40)	99,72
02 18 02 18 01 086 001	Pengelolaan Arsip	-	69.180.000,00	-	69.180.000,00	-	69.013.632,80	-	69.013.632,80	(166.367,20)	99,76
02 18 02 18 01 086 002	Pengembangan Arsip	5.700.000,00	47.120.648,00	-	52.820.648,00	5.700.000,00	46.941.532,80	-	52.641.532,80	(179.115,20)	99,66
02 18 02 18 01 087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	-	137.811.000,00	6.450.000,00	144.261.000,00	-	137.405.998,40	6.450.000,00	143.855.998,40	(405.001,60)	99,72
02 18 02 18 01 087 001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	61.597.000,00	-	61.597.000,00	-	61.469.332,80	-	61.469.332,80	(127.667,20)	99,79
02 18 02 18 01 087 002	Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	-	76.214.000,00	6.450.000,00	82.664.000,00	-	75.936.665,60	6.450.000,00	82.386.665,60	(277.334,40)	99,66
02 19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	759.600.000,00	695.844.982,00	60.988.000,00	1.516.432.982,00	753.300.000,00	658.502.805,00	60.988.000,00	1.472.790.805,00	(43.642.177,00)	97,12
02 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA	759.600.000,00	695.844.982,00	60.988.000,00	1.516.432.982,00	753.300.000,00	658.502.805,00	60.988.000,00	1.472.790.805,00	(43.642.177,00)	97,12
02 19 02 19 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	215.268.354,00	60.988.000,00	276.256.354,00	-	214.117.822,00	60.988.000,00	275.105.822,00	(1.150.532,00)	99,58
02 19 02 19 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	40.665.000,00	-	40.665.000,00	-	40.405.000,00	-	40.405.000,00	(260.000,00)	99,36
02 19 02 19 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	174.603.354,00	60.988.000,00	235.591.354,00	-	173.712.822,00	60.988.000,00	234.700.822,00	(890.532,00)	99,62
02 19 02 19 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	16.547.500,00	-	16.547.500,00	-	11.728.311,00	-	11.728.311,00	(4.819.189,00)	70,88
02 19 02 19 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
02 19 02 19 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	16.547.500,00	-	16.547.500,00	-	11.728.311,00	-	11.728.311,00	(4.819.189,00)	70,88
02 19 02 19 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	645.000,00	-	645.000,00	-	645.000,00	-	645.000,00	-	100,00
02 19 02 19 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	645.000,00	-	645.000,00	-	645.000,00	-	645.000,00	-	100,00
02 19 02 19 01 090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	759.600.000,00	463.384.128,00	-	1.222.984.128,00	753.300.000,00	432.011.672,00	-	1.185.311.672,00	(37.672.456,00)	96,92
02 19 02 19 01 090 001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	759.600.000,00	463.384.128,00	-	1.222.984.128,00	753.300.000,00	432.011.672,00	-	1.185.311.672,00	(37.672.456,00)	96,92
03	URUSAN PILIHAN	4.368.743.512,00	39.868.946.856,00	10.377.421.804,00	54.615.112.172,00	3.800.420.267,78	35.286.558.782,90	6.974.307.239,87	46.061.286.290,55	(8.553.825.881,45)	84,34
03 01	URUSAN PERTANIAN	1.485.000,00	2.579.558.916,00	196.990.000,00	2.778.033.916,00	1.485.000,00	2.518.509.781,00	196.585.100,00	2.716.579.881,00	(61.454.035,00)	97,79
03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.485.000,00	2.579.558.916,00	196.990.000,00	2.778.033.916,00	1.485.000,00	2.518.509.781,00	196.585.100,00	2.716.579.881,00	(61.454.035,00)	97,79
03 01 03 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.564.585.520,00	13.635.000,00	1.578.220.520,00	-	1.563.004.894,00	13.425.000,00	1.576.429.894,00	(1.790.626,00)	99,89
03 01 03 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	10.820.000,00	-	10.820.000,00	-	10.807.045,00	-	10.807.045,00	(12.955,00)	99,88
03 01 03 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.553.765.520,00	13.635.000,00	1.567.400.520,00	-	1.552.197.849,00	13.425.000,00	1.565.622.849,00	(1.777.671,00)	99,89

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 01 03 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	188.320.000,00	181.355.000,00	369.675.000,00	-	188.117.925,00	181.280.000,00	369.397.925,00	(277.075,00)	99,93
03 01 03 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	128.500.000,00	168.455.000,00	296.955.000,00	-	128.500.000,00	168.455.000,00	296.955.000,00	-	100,00
03 01 03 01 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	59.820.000,00	12.900.000,00	72.720.000,00	-	59.617.925,00	12.825.000,00	72.442.925,00	(277.075,00)	99,62
03 01 03 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	18.275.000,00	-	18.275.000,00	-	18.213.900,00	-	18.213.900,00	(61.100,00)	99,67
03 01 03 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	18.275.000,00	-	18.275.000,00	-	18.213.900,00	-	18.213.900,00	(61.100,00)	99,67
03 01 03 01 01 089	Program Pembinaan Pertanian	1.485.000,00	808.378.396,00	2.000.000,00	811.863.396,00	1.485.000,00	749.173.062,00	1.880.100,00	752.538.162,00	(59.325.234,00)	92,69
03 01 03 01 01 089 001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	1.485.000,00	675.327.586,00	2.000.000,00	678.812.586,00	1.485.000,00	616.303.612,00	1.880.100,00	619.668.712,00	(59.143.874,00)	91,29
03 01 03 01 01 089 002	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian	-	133.050.810,00	-	133.050.810,00	-	132.869.450,00	-	132.869.450,00	(181.360,00)	99,86
03 02	URUSAN PARIWISATA	3.670.200.600,00	11.541.477.627,00	7.765.265.658,00	22.976.943.885,00	3.389.511.438,00	8.206.580.675,40	5.887.894.932,87	17.483.987.046,27	(5.492.956.838,73)	76,09
03 02 01	DINAS PARIWISATA	3.670.200.600,00	11.541.477.627,00	7.765.265.658,00	22.976.943.885,00	3.389.511.438,00	8.206.580.675,40	5.887.894.932,87	17.483.987.046,27	(5.492.956.838,73)	76,09
03 02 03 02 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.560.750.955,00	22.000.000,00	1.582.750.955,00	-	1.398.477.997,20	21.902.500,00	1.420.380.497,20	(162.370.457,80)	89,74
03 02 03 02 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	52.145.740,00	-	52.145.740,00	-	44.294.940,00	-	44.294.940,00	(7.850.800,00)	84,94
03 02 03 02 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.508.605.215,00	22.000.000,00	1.530.605.215,00	-	1.354.183.057,20	21.902.500,00	1.376.085.557,20	(154.519.657,80)	89,90
03 02 03 02 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	44.046.319,00	-	44.046.319,00	-	29.042.211,00	-	29.042.211,00	(15.004.108,00)	65,94
03 02 03 02 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03 02 03 02 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	44.046.319,00	-	44.046.319,00	-	29.042.211,00	-	29.042.211,00	(15.004.108,00)	65,94
03 02 03 02 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.377.200,00	-	2.377.200,00	-	2.357.200,00	-	2.357.200,00	(20.000,00)	99,16
03 02 03 02 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.377.200,00	-	2.377.200,00	-	2.357.200,00	-	2.357.200,00	(20.000,00)	99,16
03 02 03 02 01 090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	23.800.000,00	2.309.218.992,00	72.765.000,00	2.405.783.992,00	23.800.000,00	2.074.394.831,20	71.166.635,00	2.169.361.466,20	(236.422.525,80)	90,17
03 02 03 02 01 090 001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	-	616.185.000,00	72.765.000,00	688.950.000,00	-	502.496.100,00	71.166.635,00	573.662.735,00	(115.287.265,00)	83,27
03 02 03 02 01 090 002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	23.800.000,00	1.693.033.992,00	-	1.716.833.992,00	23.800.000,00	1.571.898.731,20	-	1.595.698.731,20	(121.135.260,80)	92,94
03 02 02 16 01 091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	850.563.500,00	-	850.563.500,00	-	522.798.500,00	-	522.798.500,00	(327.765.000,00)	61,46
03 02 02 16 01 091 001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	508.090.000,00	-	508.090.000,00	-	184.460.000,00	-	184.460.000,00	(323.630.000,00)	36,30
03 02 02 16 01 091 002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	-	342.473.500,00	-	342.473.500,00	-	338.338.500,00	-	338.338.500,00	(4.135.000,00)	98,79
03 02 02 16 01 092	Program Pengembangan Taman Pintar	3.646.400.600,00	6.774.520.661,00	7.670.500.658,00	18.091.421.919,00	3.365.711.438,00	4.179.509.936,00	5.794.825.797,87	13.340.047.171,87	(4.751.374.747,13)	73,74
03 02 02 16 01 092 001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	3.646.400.600,00	6.774.520.661,00	7.670.500.658,00	18.091.421.919,00	3.365.711.438,00	4.179.509.936,00	5.794.825.797,87	13.340.047.171,87	(4.751.374.747,13)	73,74
03 03	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	931.201.616,00	-	931.201.616,00	-	914.400.700,00	-	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
03 03 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	931.201.616,00	-	931.201.616,00	-	914.400.700,00	-	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
03 03 03 01 01 093	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	-	931.201.616,00	-	931.201.616,00	-	914.400.700,00	-	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
03 03 03 01 01 093 001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	-	453.194.832,00	-	453.194.832,00	-	450.328.604,00	-	450.328.604,00	(2.866.228,00)	99,37
03 03 03 01 01 093 002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	-	478.006.784,00	-	478.006.784,00	-	464.072.096,00	-	464.072.096,00	(13.934.688,00)	97,08

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 04	URUSAN PERDAGANGAN	697.057.912,00	16.982.770.447,00	2.347.865.146,00	20.027.693.505,00	409.423.829,78	16.105.039.696,00	824.744.207,00	17.339.207.732,78	(2.688.485.772,22)	86,58
03 04 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	697.057.912,00	16.982.770.447,00	2.347.865.146,00	20.027.693.505,00	409.423.829,78	16.105.039.696,00	824.744.207,00	17.339.207.732,78	(2.688.485.772,22)	86,58
03 04 03 05 01 094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	36.750.000,00	868.465.140,00	79.645.000,00	984.860.140,00	34.425.000,00	793.541.812,00	79.645.000,00	907.611.812,00	(77.248.328,00)	92,16
03 04 03 05 01 094 001	Pembinaan Usaha Perdagangan	6.075.000,00	385.701.000,00	-	391.776.000,00	6.075.000,00	335.357.000,00	-	341.432.000,00	(50.344.000,00)	87,15
03 04 03 05 01 094 002	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	30.675.000,00	227.783.704,00	-	258.458.704,00	28.350.000,00	208.207.140,00	-	236.557.140,00	(21.901.564,00)	91,53
03 04 03 05 01 094 003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	-	254.980.436,00	79.645.000,00	334.625.436,00	-	249.977.672,00	79.645.000,00	329.622.672,00	(5.002.764,00)	98,50
03 04 03 05 01 095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	-	9.236.691.616,00	59.260.000,00	9.295.951.616,00	-	9.052.416.465,00	58.012.000,00	9.110.428.465,00	(185.523.151,00)	98,00
03 04 03 05 01 095 001	Pengelolaan Kebersihan Pasar	-	5.049.456.580,00	11.400.000,00	5.060.856.580,00	-	4.972.607.782,00	10.952.000,00	4.983.559.782,00	(77.296.798,00)	98,47
03 04 03 05 01 095 002	Pengelolaan Pengamanan dan Penerbitan Pasar	-	3.235.984.460,00	-	3.235.984.460,00	-	3.132.859.369,00	-	3.132.859.369,00	(103.125.091,00)	96,81
03 04 03 05 01 095 003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	-	951.250.576,00	47.860.000,00	999.110.576,00	-	946.949.314,00	47.060.000,00	994.009.314,00	(5.101.262,00)	99,49
03 04 03 05 01 096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	-	4.338.731.824,00	446.700.000,00	4.785.431.824,00	-	4.131.428.608,00	438.740.000,00	4.570.168.608,00	(215.263.216,00)	95,50
03 04 03 05 01 096 001	Pengelolaan Pendapatan Pasar	-	203.880.000,00	-	203.880.000,00	-	202.584.000,00	-	202.584.000,00	(1.296.000,00)	99,36
03 04 03 05 01 096 002	Penataan Lahan dan Pedagang	-	838.386.400,00	-	838.386.400,00	-	838.378.200,00	-	838.378.200,00	(8.200,00)	100,00
03 04 03 05 01 096 003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	-	934.225.600,00	-	934.225.600,00	-	871.260.001,00	-	871.260.001,00	(62.965.599,00)	93,26
03 04 03 05 01 096 004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	-	780.500.102,00	-	780.500.102,00	-	725.187.552,00	-	725.187.552,00	(55.312.550,00)	92,91
03 04 03 05 01 096 005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	-	710.621.798,00	446.700.000,00	1.157.321.798,00	-	675.101.355,00	438.740.000,00	1.113.841.355,00	(43.480.443,00)	96,24
03 04 03 05 01 096 006	Pengembangan Pasar Tradisional	-	871.117.924,00	-	871.117.924,00	-	818.917.500,00	-	818.917.500,00	(52.200.424,00)	94,01
03 04 03 05 01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	660.307.912,00	2.538.881.867,00	1.762.260.146,00	4.961.449.925,00	374.998.829,78	2.127.652.811,00	248.347.207,00	2.750.998.847,78	(2.210.451.077,22)	55,45
03 04 03 05 01 097 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	660.307.912,00	2.538.881.867,00	1.762.260.146,00	4.961.449.925,00	374.998.829,78	2.127.652.811,00	248.347.207,00	2.750.998.847,78	(2.210.451.077,22)	55,45
03 05	URUSAN PERINDUSTRIAN	-	7.806.065.250,00	67.301.000,00	7.873.366.250,00	-	7.514.706.130,50	65.083.000,00	7.579.789.130,50	(293.577.119,50)	96,27
03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	7.806.065.250,00	67.301.000,00	7.873.366.250,00	-	7.514.706.130,50	65.083.000,00	7.579.789.130,50	(293.577.119,50)	96,27
03 05 03 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.252.120.954,00	-	5.252.120.954,00	-	5.035.229.857,50	-	5.035.229.857,50	(216.891.096,50)	95,87
03 05 03 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	94.543.000,00	-	94.543.000,00	-	90.127.180,00	-	90.127.180,00	(4.415.820,00)	95,33
03 05 03 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	5.157.577.954,00	-	5.157.577.954,00	-	4.945.102.677,50	-	4.945.102.677,50	(212.475.276,50)	95,88
03 05 03 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	296.857.500,00	-	296.857.500,00	-	270.571.600,00	-	270.571.600,00	(26.285.900,00)	91,15
03 05 03 05 01 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	296.857.500,00	-	296.857.500,00	-	270.571.600,00	-	270.571.600,00	(26.285.900,00)	91,15
03 05 03 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	100,00
03 05 03 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	3.895.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
03 05 03 05 01 098	Program Pembinaan Perindustrian	-	678.767.712,00	-	678.767.712,00	-	673.414.330,00	-	673.414.330,00	(5.353.382,00)	99,21
03 05 03 05 01 098 001	Pembinaan Teknis Perindustrian	-	41.320.000,00	-	41.320.000,00	-	41.320.000,00	-	41.320.000,00	-	100,00
03 05 03 05 01 098 002	Pembinaan Sarana Produksi	-	637.447.712,00	-	637.447.712,00	-	632.094.330,00	-	632.094.330,00	(5.353.382,00)	99,16
03 05 03 05 01 099	Program Pengembangan Industri Logam	-	1.574.424.084,00	67.301.000,00	1.641.725.084,00	-	1.531.595.343,00	65.083.000,00	1.596.678.343,00	(45.046.741,00)	97,26
03 05 03 05 01 099 001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	-	271.827.800,00	37.590.000,00	309.417.800,00	-	270.605.000,00	35.633.000,00	306.238.000,00	(3.179.800,00)	98,97
03 05 03 05 01 099 002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	-	1.302.596.284,00	29.711.000,00	1.332.307.284,00	-	1.260.990.343,00	29.450.000,00	1.290.440.343,00	(41.866.941,00)	96,86
03 06 03 06	URUSAN TRANSMIGRASI	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
03 06 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
03 06 02 11 01 037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
03 06 02 11 01 037 001	Penempatan Transmigrasi	-	27.873.000,00	-	27.873.000,00	-	27.321.800,00	-	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02
04	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG	1.928.990.000,00	53.125.786.876,00	5.279.225.450,00	60.334.002.326,00	1.877.171.000,00	41.990.146.986,87	5.218.877.742,00	49.086.195.728,87	(11.247.806.597,13)	81,36
04 01	URUSAN PERENCANAAN	68.100.000,00	2.106.566.783,00	578.851.000,00	2.753.517.783,00	65.500.000,00	2.088.876.585,50	573.927.000,00	2.728.303.585,50	(25.214.197,50)	99,08
04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	68.100.000,00	2.106.566.783,00	578.851.000,00	2.753.517.783,00	65.500.000,00	2.088.876.585,50	573.927.000,00	2.728.303.585,50	(25.214.197,50)	99,08
04 01 04 01 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	349.179.127,00	73.252.000,00	422.431.127,00	-	336.557.468,50	73.252.000,00	409.809.468,50	(12.621.658,50)	97,01
04 01 04 01 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	65.845.000,00	-	-	-	65.315.649,00	-	-	-	-
04 01 04 01 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	-	283.334.127,00	73.252.000,00	356.586.127,00	-	271.241.819,50	73.252.000,00	344.493.819,50	(12.092.307,50)	96,61
04 01 04 01 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	54.219.000,00	270.599.000,00	324.818.000,00	-	52.773.977,00	270.599.000,00	323.372.977,00	(1.445.023,00)	99,56
04 01 04 01 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	2.000.000,00	270.599.000,00	272.599.000,00	-	1.902.000,00	270.599.000,00	272.501.000,00	(98.000,00)	99,96
04 01 04 01 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	52.219.000,00	-	52.219.000,00	-	50.871.977,00	-	50.871.977,00	(1.347.023,00)	97,42
04 01 04 01 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.605.460,00	-	1.605.460,00	-	1.579.000,00	-	1.579.000,00	(26.460,00)	98,35
04 01 04 01 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.605.460,00	-	1.605.460,00	-	1.579.000,00	-	1.579.000,00	(26.460,00)	98,35
04 01 04 01 01 100	Program Bidang Ekonomi	11.775.000,00	243.974.740,00	235.000.000,00	490.749.740,00	11.775.000,00	243.556.700,00	230.076.000,00	485.407.700,00	(5.342.040,00)	98,91
04 01 04 01 01 100 001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	89.005.620,00	-	89.005.620,00	-	88.946.360,00	-	88.946.360,00	(59.260,00)	99,93
04 01 04 01 01 100 002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	11.775.000,00	76.475.040,00	235.000.000,00	323.250.040,00	11.775.000,00	76.272.780,00	230.076.000,00	318.123.780,00	(5.126.260,00)	98,41
04 01 04 01 01 100 003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	-	78.494.080,00	-	78.494.080,00	-	78.337.560,00	-	78.337.560,00	(156.520,00)	99,80

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 01 04 01 01 101	Program Bidang Fisik	6.075.000,00	559.634.720,00	-	565.709.720,00	6.075.000,00	559.491.940,00	-	565.566.940,00	(142.780,00)	99,97
04 01 04 01 01 101 001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	6.075.000,00	73.208.040,00	-	79.283.040,00	6.075.000,00	73.170.780,00	-	79.245.780,00	(37.260,00)	99,95
04 01 04 01 01 101 002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	359.232.040,00	-	359.232.040,00	-	359.194.780,00	-	359.194.780,00	(37.260,00)	99,99
04 01 04 01 01 101 003	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	127.194.640,00	-	127.194.640,00	-	127.126.380,00	-	127.126.380,00	(68.260,00)	99,95
04 01 04 01 01 102	Program Bidang Sosial	13.350.000,00	399.068.700,00	-	412.418.700,00	13.350.000,00	398.801.960,00	-	412.151.960,00	(266.740,00)	99,94
04 01 04 01 01 102 001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	-	16.917.540,00	-	16.917.540,00	-	16.914.840,00	-	16.914.840,00	(2.700,00)	99,98
04 01 04 01 01 102 002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	13.350.000,00	346.368.120,00	-	359.718.120,00	13.350.000,00	346.142.340,00	-	359.492.340,00	(225.780,00)	99,94
04 01 04 01 01 102 003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	-	35.783.040,00	-	35.783.040,00	-	35.744.780,00	-	35.744.780,00	(38.260,00)	99,89
04 01 04 01 01 103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	36.900.000,00	498.885.036,00	-	535.785.036,00	34.300.000,00	496.115.540,00	-	530.415.540,00	(5.369.496,00)	99,00
04 01 04 01 01 103 001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	3.150.000,00	240.511.040,00	-	243.661.040,00	3.150.000,00	240.326.780,00	-	243.476.780,00	(184.260,00)	99,92
04 01 04 01 01 103 002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	25.000.000,00	155.028.956,00	-	180.028.956,00	22.400.000,00	154.807.580,00	-	177.207.580,00	(2.821.376,00)	98,43
04 01 04 01 01 103 003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	8.750.000,00	103.345.040,00	-	112.095.040,00	8.750.000,00	100.981.180,00	-	109.731.180,00	(2.363.860,00)	97,89
04 02	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	95.750.000,00	156.563.620,00	579.700.000,00	832.013.620,00	95.225.000,00	155.658.450,00	567.258.600,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
04 02 04 01 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	95.750.000,00	156.563.620,00	579.700.000,00	832.013.620,00	95.225.000,00	155.658.450,00	567.258.600,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
04 02 04 01 01 104	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	95.750.000,00	156.563.620,00	579.700.000,00	832.013.620,00	95.225.000,00	155.658.450,00	567.258.600,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
04 02 04 01 01 104 001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	74.850.000,00	45.687.220,00	355.000.000,00	475.537.220,00	74.325.000,00	45.630.780,00	342.668.600,00	462.624.380,00	(12.912.840,00)	97,28
04 02 04 01 01 104 002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	-	42.545.320,00	-	42.545.320,00	-	41.861.140,00	-	41.861.140,00	(684.180,00)	98,39
04 02 04 01 01 104 003	Pemantapan Inovasi Daerah	20.900.000,00	68.331.080,00	224.700.000,00	313.931.080,00	20.900.000,00	68.166.530,00	224.590.000,00	313.656.530,00	(274.550,00)	99,91
04 03	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	503.300.000,00	9.249.815.633,00	1.370.639.750,00	11.123.755.383,00	501.950.000,00	8.681.417.471,31	1.351.368.846,59	10.534.736.317,90	(589.019.065,10)	94,70
04 03 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH	503.300.000,00	9.249.815.633,00	1.370.639.750,00	11.123.755.383,00	501.950.000,00	8.681.417.471,31	1.351.368.846,59	10.534.736.317,90	(589.019.065,10)	94,70
04 03 04 03 01A	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.700.000,00	845.431.550,00	1.500.000,00	867.631.550,00	20.100.000,00	831.351.212,08	1.500.000,00	852.951.212,08	(14.680.337,92)	98,31
04 03 04 03 01A 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	159.783.150,00	1.500.000,00	161.283.150,00	-	152.526.725,36	1.500.000,00	154.026.725,36	(7.256.424,64)	95,50
04 03 04 03 01A 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	39.584.200,00	-	39.584.200,00	-	39.136.700,00	-	39.136.700,00	(447.500,00)	98,87
04 03 04 03 01A 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	120.198.950,00	1.500.000,00	121.698.950,00	-	113.390.025,36	1.500.000,00	114.890.025,36	(6.808.924,64)	94,41
04 03 04 03 01A 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	9.280.000,00	-	9.280.000,00	-	9.272.400,00	-	9.272.400,00	(7.600,00)	99,92
04 03 04 03 01A 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	9.280.000,00	-	9.280.000,00	-	9.272.400,00	-	9.272.400,00	(7.600,00)	99,92
04 03 04 03 01A 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01A 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	1.717.000,00	-	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01A 105	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	20.700.000,00	674.651.400,00	-	695.351.400,00	20.100.000,00	667.835.086,72	-	687.935.086,72	(7.416.313,28)	98,93
04 03 04 03 01A 105 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	14.400.000,00	300.252.600,00	-	314.652.600,00	14.400.000,00	300.012.123,36	-	314.412.123,36	(240.476,64)	99,92
04 03 04 03 01A 105 002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan	6.300.000,00	254.036.400,00	-	260.336.400,00	5.700.000,00	247.550.463,36	-	253.250.463,36	(7.085.936,64)	97,28
04 03 04 03 01A 105 003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	-	120.362.400,00	-	120.362.400,00	-	120.272.500,00	-	120.272.500,00	(89.900,00)	99,93
04 03 04 03 01B	BAGIAN HUKUM	227.825.000,00	1.136.449.273,00	-	1.364.274.273,00	227.075.000,00	1.130.445.859,60	-	1.357.520.859,60	(6.753.413,40)	99,50
04 03 04 03 01B 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	230.724.888,00	-	230.724.888,00	-	229.837.951,80	-	229.837.951,80	(886.936,20)	99,62
04 03 04 03 01B 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	54.588.355,00	-	54.588.355,00	-	54.588.355,00	-	54.588.355,00	-	100,00
04 03 04 03 01B 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	176.136.533,00	-	176.136.533,00	-	175.249.596,80	-	175.249.596,80	(886.936,20)	99,50
04 03 04 03 01B 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	15.304.805,00	-	15.304.805,00	-	13.726.835,00	-	13.726.835,00	(1.577.970,00)	89,69
04 03 04 03 01B 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
04 03 04 03 01B 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	15.304.805,00	-	15.304.805,00	-	13.726.835,00	-	13.726.835,00	(1.577.970,00)	89,69
04 03 04 03 01B 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	100,00
04 03 04 03 01B 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	4.239.800,00	-	100,00
04 03 04 03 01B 106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	227.825.000,00	886.179.780,00	-	1.114.004.780,00	227.075.000,00	882.641.272,80	-	1.109.716.272,80	(4.288.507,20)	99,62
04 03 04 03 01B 106 001	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	622.124.100,00	-	633.124.100,00	10.500.000,00	620.124.100,00	-	630.624.100,00	(2.500.000,00)	99,61
04 03 04 03 01B 106 002	Layanan Bantuan Hukum	210.075.000,00	180.874.300,00	-	390.949.300,00	210.075.000,00	180.188.200,00	-	390.263.200,00	(686.100,00)	99,82
04 03 04 03 01B 106 003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	6.750.000,00	83.181.380,00	-	89.931.380,00	6.500.000,00	82.328.972,80	-	88.828.972,80	(1.102.407,20)	98,77
04 03 04 03 01C	BAGIAN PROTOKOL	-	2.661.634.567,00	94.224.000,00	2.755.858.567,00	-	2.302.688.348,94	80.254.000,00	2.382.942.348,94	(372.916.218,06)	86,47
04 03 04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.302.450.327,00	94.224.000,00	1.396.674.327,00	-	1.095.666.510,50	80.254.000,00	1.175.920.510,50	(220.753.816,50)	84,19
04 03 04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	476.396.000,00	-	476.396.000,00	-	313.278.196,00	-	313.278.196,00	(163.117.804,00)	65,76
04 03 04 03 01C 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	826.054.327,00	94.224.000,00	920.278.327,00	-	782.388.314,50	80.254.000,00	862.642.314,50	(57.636.012,50)	93,74
04 03 04 03 01C 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	356.014.000,00	-	356.014.000,00	-	248.359.141,44	-	248.359.141,44	(107.654.858,56)	69,76
04 03 04 03 01C 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	9.971.117,44	-	9.971.117,44	(28.882,56)	99,71
04 03 04 03 01C 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	346.014.000,00	-	346.014.000,00	-	238.388.024,00	-	238.388.024,00	(107.625.976,00)	68,90
04 03 04 03 01C 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01C 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01C 107	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	-	999.970.240,00	-	999.970.240,00	-	955.462.697,00	-	955.462.697,00	(44.507.543,00)	95,55
04 03 04 03 01C 107 001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	-	528.060.000,00	-	528.060.000,00	-	518.814.560,20	-	518.814.560,20	(9.245.439,80)	98,25
04 03 04 03 01C 107 002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	-	359.197.240,00	-	359.197.240,00	-	328.553.523,20	-	328.553.523,20	(30.643.716,80)	91,47
04 03 04 03 01C 107 003	Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	-	112.713.000,00	-	112.713.000,00	-	108.094.613,60	-	108.094.613,60	(4.618.386,40)	95,90

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01D	BAGIAN UMUM	-	2.524.942.599,00	576.470.750,00	3.101.413.349,00	-	2.402.374.898,00	573.959.750,00	2.976.334.648,00	(125.078.701,00)	95,97
04 03 04 03 01D 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	299.428.697,00	2.500.000,00	301.928.697,00	-	277.271.874,80	2.500.000,00	279.771.874,80	(22.156.822,20)	92,66
04 03 04 03 01D 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	7.384.000,00	-	7.384.000,00	-	7.331.200,00	-	7.331.200,00	(52.800,00)	99,28
04 03 04 03 01D 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	292.044.697,00	2.500.000,00	294.544.697,00	-	269.940.674,80	2.500.000,00	272.440.674,80	(22.104.022,20)	92,50
04 03 04 03 01D 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	25.097.400,00	-	25.097.400,00	(202.600,00)	99,20
04 03 04 03 01D 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
04 03 04 03 01D 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	25.097.400,00	-	25.097.400,00	(202.600,00)	99,20
04 03 04 03 01D 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	496.000,00	-	496.000,00	-	492.000,00	-	492.000,00	(4.000,00)	99,19
04 03 04 03 01D 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	496.000,00	-	496.000,00	-	492.000,00	-	492.000,00	(4.000,00)	99,19
04 03 04 03 01D 108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	-	2.199.717.902,00	573.970.750,00	2.773.688.652,00	-	2.099.513.623,20	571.459.750,00	2.670.973.373,20	(102.715.278,80)	96,30
04 03 04 03 01D 108 001	Pelayanan Kerumahtanggaan	-	1.891.327.698,00	573.970.750,00	2.465.298.448,00	-	1.866.262.155,60	571.459.750,00	2.437.721.905,60	(27.576.542,40)	98,88
04 03 04 03 01D 108 002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	-	205.817.784,00	-	205.817.784,00	-	149.728.610,40	-	149.728.610,40	(56.089.173,60)	72,75
04 03 04 03 01D 108 003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	-	102.572.420,00	-	102.572.420,00	-	83.522.857,20	-	83.522.857,20	(19.049.562,80)	81,43
04 03 04 03 01E	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	-	658.155.886,00	275.010.000,00	933.165.886,00	-	648.141.079,39	274.060.100,00	922.201.179,39	(10.964.706,61)	98,82
04 03 04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	297.787.646,00	755.000,00	298.542.646,00	-	292.389.879,39	755.000,00	293.144.879,39	(5.397.766,61)	98,19
04 03 04 03 01E 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	37.503.722,00	-	37.503.722,00	-	37.423.722,00	-	37.423.722,00	(80.000,00)	99,79
04 03 04 03 01E 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	260.283.924,00	755.000,00	261.038.924,00	-	254.966.157,39	755.000,00	255.721.157,39	(5.317.766,61)	97,96
04 03 04 03 01E 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	41.132.500,00	60.300.000,00	101.432.500,00	-	40.279.320,00	59.350.100,00	99.629.420,00	(1.803.080,00)	98,22
04 03 04 03 01E 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	29.000.000,00	60.300.000,00	89.300.000,00	-	28.591.130,00	59.350.100,00	87.941.230,00	175.882.460	#####
04 03 04 03 01E 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	12.132.500,00	-	12.132.500,00	-	11.688.190,00	-	11.688.190,00	(444.310,00)	96,34
04 03 04 03 01E 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	696.000,00	-	696.000,00	-	680.000,00	-	680.000,00	(16.000,00)	97,70
04 03 04 03 01E 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	696.000,00	-	696.000,00	-	680.000,00	-	680.000,00	(16.000,00)	97,70
04 03 04 03 01E 109	Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	-	318.539.740,00	213.955.000,00	532.494.740,00	-	314.791.880,00	213.955.000,00	528.746.880,00	(3.747.860,00)	99,30
04 03 04 03 01E 109 001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	-	37.000.740,00	85.794.000,00	122.794.740,00	-	36.602.380,00	85.794.000,00	122.396.380,00	(398.360,00)	99,68
04 03 04 03 01E 109 002	Pembinaan BUMD dan BLUD	-	26.015.000,00	-	26.015.000,00	-	25.795.000,00	-	25.795.000,00	(220.000,00)	99,15
04 03 04 03 01E 109 003	Kerjasama Daerah	-	255.524.000,00	128.161.000,00	383.685.000,00	-	252.394.500,00	128.161.000,00	380.555.500,00	(3.129.500,00)	99,18

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01F	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	-	311.999.728,00	142.450.000,00	454.449.728,00	-	311.836.002,00	142.450.000,00	454.286.002,00	(163.726,00)	99,96
04 03 04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	47.468.200,00	-	47.468.200,00	-	47.445.500,00	-	47.445.500,00	(22.700,00)	99,95
04 03 04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	4.625.000,00	-	4.625.000,00	-	4.625.000,00	-	4.625.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	42.843.200,00	-	42.843.200,00	-	42.820.500,00	-	42.820.500,00	(22.700,00)	99,95
04 03 04 03 01F 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	11.876.024,00	142.450.000,00	154.326.024,00	-	11.876.024,00	142.450.000,00	154.326.024,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	142.450.000,00	142.450.000,00	-	-	142.450.000,00	142.450.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	11.876.024,00	-	11.876.024,00	-	11.876.024,00	-	11.876.024,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	723.400,00	-	723.400,00	-	723.400,00	-	723.400,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	723.400,00	-	723.400,00	-	723.400,00	-	723.400,00	-	100,00
04 03 04 03 01F 110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	-	251.932.104,00	-	251.932.104,00	-	251.791.078,00	-	251.791.078,00	(141.026,00)	99,94
04 03 04 03 01F 110 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	-	38.737.040,00	-	38.737.040,00	-	38.722.780,00	-	38.722.780,00	(14.260,00)	99,96
04 03 04 03 01F 110 002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	-	117.691.120,00	-	117.691.120,00	-	117.625.340,00	-	117.625.340,00	(65.780,00)	99,94
04 03 04 03 01F 110 003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	-	95.503.944,00	-	95.503.944,00	-	95.442.958,00	-	95.442.958,00	(60.986,00)	99,94
04 03 04 03 01G	BAGIAN ORGANISASI	238.000.000,00	487.290.920,00	31.485.000,00	756.775.920,00	238.000.000,00	473.413.303,90	31.485.000,00	742.898.303,90	(13.877.616,10)	98,17
04 03 04 03 01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	280.580.560,00	1.485.000,00	282.065.560,00	-	276.666.233,90	1.485.000,00	278.151.233,90	(3.914.326,10)	98,61
04 03 04 03 01G 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	51.540.000,00	-	51.540.000,00	-	50.484.941,00	-	50.484.941,00	(1.055.059,00)	97,95
04 03 04 03 01G 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	229.040.560,00	1.485.000,00	230.525.560,00	-	226.181.292,90	1.485.000,00	227.666.292,90	(2.859.267,10)	98,76
04 03 04 03 01G 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	16.240.000,00	30.000.000,00	46.240.000,00	-	14.719.750,00	30.000.000,00	44.719.750,00	(1.520.250,00)	96,71
04 03 04 03 01G 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
04 03 04 03 01G 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	16.240.000,00	-	16.240.000,00	-	14.719.750,00	-	14.719.750,00	(1.520.250,00)	90,64
04 03 04 03 01G 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	323.400,00	-	323.400,00	-	315.400,00	-	315.400,00	(8.000,00)	97,53
04 03 04 03 01G 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	323.400,00	-	323.400,00	-	315.400,00	-	315.400,00	(8.000,00)	97,53
04 03 04 03 01G 111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	238.000.000,00	190.146.960,00	-	428.146.960,00	238.000.000,00	181.711.920,00	-	419.711.920,00	(8.435.040,00)	98,03
04 03 04 03 01G 111 001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	77.500.000,00	37.733.040,00	-	115.233.040,00	77.500.000,00	37.534.780,00	-	115.034.780,00	(198.260,00)	99,83
04 03 04 03 01G 111 002	Pemantapan Pelayanan Publik	37.500.000,00	107.981.080,00	-	145.481.080,00	37.500.000,00	102.773.560,00	-	140.273.560,00	(5.207.520,00)	96,42
04 03 04 03 01G 111 003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	123.000.000,00	44.432.840,00	-	167.432.840,00	123.000.000,00	41.403.580,00	-	164.403.580,00	(3.029.260,00)	98,19

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 03 04 03 01H	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	16.775.000,00	623.911.110,00	249.500.000,00	890.186.110,00	16.775.000,00	581.166.767,40	247.659.996,59	845.601.763,99	(44.584.346,01)	94,99
04 03 04 03 01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	391.330.960,00	33.500.000,00	424.830.960,00	-	354.800.965,80	33.159.800,00	387.960.765,80	(36.870.194,20)	91,32
04 03 04 03 01H 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	10.154.000,00	-	10.154.000,00	-	9.939.548,00	-	9.939.548,00	(214.452,00)	97,89
04 03 04 03 01H 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	381.176.960,00	33.500.000,00	414.676.960,00	-	344.861.417,80	33.159.800,00	378.021.217,80	(36.655.742,20)	91,16
04 03 04 03 01H 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	12.790.750,00	216.000.000,00	228.790.750,00	-	10.115.885,00	214.500.196,59	224.616.081,59	(4.174.668,41)	98,18
04 03 04 03 01H 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	216.000.000,00	216.000.000,00	-	-	214.500.196,59	214.500.196,59	(1.499.803,41)	99,31
04 03 04 03 01H 002 024	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	12.790.750,00	-	12.790.750,00	-	10.115.885,00	-	10.115.885,00	(2.674.865,00)	79,09
04 03 04 03 01H 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1.205.000,00	-	1.205.000,00	-	952.500,00	-	952.500,00	(252.500,00)	79,05
04 03 04 03 01H 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	1.205.000,00	-	1.205.000,00	-	952.500,00	-	952.500,00	(252.500,00)	79,05
04 03 04 03 01H 112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	16.775.000,00	218.584.400,00	-	235.359.400,00	16.775.000,00	215.297.416,60	-	232.072.416,60	(3.286.983,40)	98,60
04 03 04 03 01H 112 001	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	5.225.000,00	57.158.000,00	-	62.383.000,00	5.225.000,00	56.091.468,80	-	61.316.468,80	(1.066.531,20)	98,29
04 03 04 03 01H 112 002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	65.182.400,00	-	70.957.400,00	5.775.000,00	65.099.914,40	-	70.874.914,40	(82.485,60)	99,88
04 03 04 03 01H 112 003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	96.244.000,00	-	102.019.000,00	5.775.000,00	94.106.033,40	-	99.881.033,40	(2.137.966,60)	97,90
04 04	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	3.000.000,00	28.776.008.038,00	1.277.615.000,00	30.056.623.038,00	-	18.805.497.929,30	1.262.042.200,00	20.067.540.129,30	(9.989.082.908,70)	66,77
04 04 01	SEKRETARIAT DPRD	3.000.000,00	28.776.008.038,00	1.277.615.000,00	30.056.623.038,00	-	18.805.497.929,30	1.262.042.200,00	20.067.540.129,30	(9.989.082.908,70)	66,77
04 04 04 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3.217.950.699,00	1.206.615.000,00	4.424.565.699,00	-	2.518.109.963,23	1.191.250.000,00	3.709.359.963,23	(715.205.735,77)	83,84
04 04 04 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	345.770.000,00	-	345.770.000,00	-	214.477.146,00	-	214.477.146,00	(131.292.854,00)	62,03
04 04 04 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2.872.180.699,00	1.206.615.000,00	4.078.795.699,00	-	2.303.632.817,23	1.191.250.000,00	3.494.882.817,23	(583.912.881,77)	85,68
04 04 04 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	936.425.380,00	70.000.000,00	1.006.425.380,00	-	575.504.066,00	69.795.000,00	645.299.066,00	(361.126.314,00)	64,12
04 04 04 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	361.736.000,00	70.000.000,00	431.736.000,00	-	359.944.000,00	69.795.000,00	429.739.000,00	(1.997.000,00)	99,54
04 04 04 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	574.689.380,00	-	574.689.380,00	-	215.560.066,00	-	215.560.066,00	(359.129.314,00)	37,51
04 04 04 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10.412.000,00	-	10.412.000,00	-	9.563.400,00	-	9.563.400,00	(848.600,00)	91,85
04 04 04 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	10.412.000,00	-	10.412.000,00	-	9.563.400,00	-	9.563.400,00	(848.600,00)	91,85
04 04 04 01 113	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	3.000.000,00	9.046.484.959,00	1.000.000,00	9.050.484.959,00	-	5.089.576.613,96	997.200,00	5.090.573.813,96	(3.959.911.145,04)	56,25
04 04 04 01 113 001	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	-	828.416.400,00	1.000.000,00	829.416.400,00	-	722.567.300,00	997.200,00	723.564.500,00	(105.851.900,00)	87,24
04 04 04 01 113 002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	3.000.000,00	5.982.395.000,00	-	5.985.395.000,00	-	3.069.076.331,96	-	3.069.076.331,96	(2.916.318.668,04)	51,28
04 04 04 01 113 003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	-	2.235.673.559,00	-	2.235.673.559,00	-	1.297.932.982,00	-	1.297.932.982,00	(937.740.577,00)	58,06
04 04 04 01 114	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	15.564.735.000,00	-	15.564.735.000,00	-	10.612.743.886,11	-	10.612.743.886,11	(4.951.991.113,89)	68,18
04 04 04 01 114 001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	-	1.774.210.000,00	-	1.774.210.000,00	-	873.466.325,98	-	873.466.325,98	(900.743.674,02)	49,23
04 04 04 01 114 002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	-	8.404.240.000,00	-	8.404.240.000,00	-	5.037.114.247,13	-	5.037.114.247,13	(3.367.125.752,87)	59,94
04 04 04 01 114 003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	-	5.386.285.000,00	-	5.386.285.000,00	-	4.702.163.313,00	-	4.702.163.313,00	(684.121.687,00)	87,30

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 05	URUSAN INSPEKTORAT	147.800.000,00	651.101.436,00	148.000,00	799.049.436,00	146.600.000,00	635.370.479,74	148.000,00	782.118.479,74	(16.930.956,26)	97,88
04 05 01	INSPEKTORAT DAERAH	147.800.000,00	651.101.436,00	148.000,00	799.049.436,00	146.600.000,00	635.370.479,74	148.000,00	782.118.479,74	(16.930.956,26)	97,88
04 05 04 05 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	443.036.952,00	148.000,00	443.184.952,00	-	434.309.255,74	148.000,00	434.457.255,74	(8.727.696,26)	98,03
04 05 04 05 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	31.588.700,00	-	31.588.700,00	-	31.588.700,00	-	31.588.700,00	-	100,00
04 05 04 05 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	411.448.252,00	148.000,00	411.596.252,00	-	402.720.555,74	148.000,00	402.868.555,74	(8.727.696,26)	97,88
04 05 04 05 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	78.289.500,00	-	78.289.500,00	-	73.785.106,00	-	73.785.106,00	(4.504.394,00)	94,25
04 05 04 05 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	21.675.000,00	-	21.675.000,00	-	20.666.600,00	-	20.666.600,00	(1.008.400,00)	95,35
04 05 04 05 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	56.614.500,00	-	56.614.500,00	-	53.118.506,00	-	53.118.506,00	(3.495.994,00)	93,82
04 05 04 05 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	100,00
04 05 04 05 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	100,00
04 05 04 05 01 115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	140.200.000,00	26.166.100,00	-	166.366.100,00	139.000.000,00	25.772.850,00	-	164.772.850,00	(1.593.250,00)	99,04
04 05 04 05 01 115 001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.700.000,00	8.348.700,00	-	10.048.700,00	1.700.000,00	7.997.600,00	-	9.697.600,00	(351.100,00)	96,51
04 05 04 05 01 115 002	Pembinaan Ketaatan Aparatur	138.500.000,00	17.817.400,00	-	156.317.400,00	137.300.000,00	17.775.250,00	-	155.075.250,00	(1.242.150,00)	99,21
04 05 04 05 01 116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	23.641.000,00	-	23.641.000,00	-	22.633.250,00	-	22.633.250,00	(1.007.750,00)	95,74
04 05 04 05 01 116 001	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	10.641.000,00	-	10.641.000,00	-	9.993.250,00	-	9.993.250,00	(647.750,00)	93,91
04 05 04 05 01 116 002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	12.640.000,00	-	12.640.000,00	(360.000,00)	97,23
04 05 04 05 01 117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	-	15.053.200,00	-	15.053.200,00	-	14.154.400,00	-	14.154.400,00	(898.800,00)	94,03
04 05 04 05 01 117 001	Audit Bidang Pembangunan Fisik	-	13.139.200,00	-	13.139.200,00	-	12.334.200,00	-	12.334.200,00	(805.000,00)	93,87
04 05 04 05 01 117 002	Review Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.914.000,00	-	1.914.000,00	-	1.820.200,00	-	1.820.200,00	(93.800,00)	95,10
04 05 04 05 01 118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	27.168.900,00	-	27.168.900,00	-	27.011.300,00	-	27.011.300,00	(157.600,00)	99,42
04 05 04 05 01 118 001	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	-	10.414.500,00	-	10.414.500,00	-	10.391.100,00	-	10.391.100,00	(23.400,00)	99,78
04 05 04 05 01 118 002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	-	16.754.400,00	-	16.754.400,00	-	16.620.200,00	-	16.620.200,00	(134.200,00)	99,20
04 05 04 05 01 128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	7.600.000,00	35.225.784,00	-	42.825.784,00	7.600.000,00	35.184.318,00	-	42.784.318,00	(41.466,00)	99,90
04 05 04 05 01 128 001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	7.600.000,00	35.225.784,00	-	42.825.784,00	7.600.000,00	35.184.318,00	-	42.784.318,00	(41.466,00)	99,90
04 06	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	520.340.000,00	3.068.432.406,00	1.412.506.000,00	5.001.278.406,00	495.405.000,00	2.948.120.335,00	1.408.004.750,00	4.851.530.085,00	(149.748.321,00)	97,01
04 06 01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	520.340.000,00	3.068.432.406,00	1.412.506.000,00	5.001.278.406,00	495.405.000,00	2.948.120.335,00	1.408.004.750,00	4.851.530.085,00	(149.748.321,00)	97,01
04 06 04 06 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	749.343.606,00	1.263.900.000,00	2.013.243.606,00	-	725.857.128,00	1.259.398.750,00	1.985.255.878,00	(27.987.728,00)	98,61
04 06 04 06 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	48.810.181,00	-	48.810.181,00	-	41.178.181,00	-	41.178.181,00	(7.632.000,00)	84,36
04 06 04 06 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	700.533.425,00	1.263.900.000,00	1.964.433.425,00	-	684.678.947,00	1.259.398.750,00	1.944.077.697,00	(20.355.728,00)	98,96

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 06 04 06 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	45.750.000,00	148.606.000,00	194.356.000,00	-	39.868.371,00	148.606.000,00	188.474.371,00	(5.881.629,00)	96,97
04 06 04 06 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	148.606.000,00	148.606.000,00	-	-	148.606.000,00	148.606.000,00	-	100,00
04 06 04 06 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45.750.000,00	-	45.750.000,00	-	39.868.371,00	-	39.868.371,00	(5.881.629,00)	87,14
04 06 04 06 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	964.500,00	-	964.500,00	-	964.500,00	-	964.500,00	-	100,00
04 06 04 06 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	964.500,00	-	964.500,00	-	964.500,00	-	964.500,00	-	100,00
04 06 04 06 01 119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	324.665.000,00	553.328.500,00	-	687.946.000,00	301.980.000,00	527.501.902,00	-	649.434.902,00	(38.511.098,00)	94,40
04 06 04 06 01 119 001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	80.615.000,00	268.147.000,00	-	348.762.000,00	61.530.000,00	254.306.200,00	-	315.836.200,00	(32.925.800,00)	90,56
04 06 04 06 01 119 002	Pengembangan Karir ASN	231.600.000,00	75.378.000,00	-	306.978.000,00	228.000.000,00	73.486.102,00	-	301.486.102,00	(5.491.898,00)	98,21
04 06 04 06 01 119 003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	12.450.000,00	19.756.000,00	-	32.206.000,00	12.450.000,00	19.662.600,00	-	32.112.600,00	(93.400,00)	99,71
04 06 04 06 01 119 004	Operasional Assesment Centre	-	190.047.500,00	-	190.047.500,00	-	180.047.000,00	-	180.047.000,00	(10.000.500,00)	94,74
04 06 04 06 01 120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	186.925.000,00	106.049.000,00	-	292.974.000,00	184.675.000,00	104.793.000,00	-	289.468.000,00	(3.506.000,00)	98,80
04 06 04 06 01 120 001	Mutasi Data Kepegawaian	49.725.000,00	13.051.000,00	-	62.776.000,00	48.525.000,00	12.658.000,00	-	61.183.000,00	(1.593.000,00)	97,46
04 06 04 06 01 120 002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	47.425.000,00	58.157.000,00	-	105.582.000,00	47.425.000,00	58.157.000,00	-	105.582.000,00	-	100,00
04 06 04 06 01 120 003	Penatausahaan Kepegawaian	89.775.000,00	34.841.000,00	-	124.616.000,00	88.725.000,00	33.978.000,00	-	122.703.000,00	(1.913.000,00)	98,46
04 06 04 06 01 121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	8.750.000,00	1.612.996.800,00	-	1.621.746.800,00	8.750.000,00	1.549.135.434,00	-	1.557.885.434,00	(63.861.366,00)	96,06
04 06 04 06 01 121 001	Analisa Kebutuhan Diklat	-	44.180.800,00	-	44.180.800,00	-	38.594.800,00	-	38.594.800,00	(5.586.000,00)	87,36
04 06 04 06 01 121 002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8.750.000,00	1.380.876.000,00	-	1.389.626.000,00	8.750.000,00	1.370.555.634,00	-	1.379.305.634,00	(10.320.366,00)	99,26
04 06 04 06 01 121 003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	-	187.940.000,00	-	187.940.000,00	-	139.985.000,00	-	139.985.000,00	(47.955.000,00)	74,48
04 07	URUSAN KEUANGAN	590.700.000,00	9.117.298.960,00	59.765.700,00	9.767.764.660,00	572.491.000,00	8.675.205.736,02	56.128.345,41	9.303.825.081,43	(463.939.578,57)	95,25
04 07 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	590.700.000,00	9.117.298.960,00	59.765.700,00	9.767.764.660,00	572.491.000,00	8.675.205.736,02	56.128.345,41	9.303.825.081,43	(463.939.578,57)	95,25
04 07 04 07 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.782.347.731,00	1.140.500,00	5.783.488.231,00	-	5.626.575.837,38	1.140.500,00	5.627.716.337,38	(155.771.893,62)	97,31
04 07 04 07 01 001 018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	9.693.570,00	-	9.693.570,00	(3.206.430,00)	75,14
04 07 04 07 01 001 019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.769.447.731,00	1.140.500,00	5.770.588.231,00	-	5.616.882.267,38	1.140.500,00	5.618.022.767,38	(152.565.463,62)	97,36
04 07 04 07 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	109.358.780,00	-	109.358.780,00	-	99.263.712,80	-	99.263.712,80	(10.095.067,20)	90,77
04 07 04 07 01 002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
04 07 04 07 01 002 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	109.358.780,00	-	109.358.780,00	-	99.263.712,80	-	99.263.712,80	(10.095.067,20)	90,77
04 07 04 07 01 006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	734.000,00	-	734.000,00	-	731.000,00	-	731.000,00	(3.000,00)	99,59
04 07 04 07 01 006 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	734.000,00	-	734.000,00	-	731.000,00	-	731.000,00	(3.000,00)	99,59
04 07 04 07 01 122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	6.175.000,00	53.621.180,00	-	59.796.180,00	6.175.000,00	53.293.992,80	-	59.468.992,80	(327.187,20)	99,45
04 07 04 07 01 122 001	Perencanaan Anggaran	6.175.000,00	41.807.780,00	-	47.982.780,00	6.175.000,00	41.502.892,80	-	47.677.892,80	(304.887,20)	99,36
04 07 04 07 01 122 002	Pengendalian Anggaran	-	11.813.400,00	-	11.813.400,00	-	11.791.100,00	-	11.791.100,00	(22.300,00)	99,81

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
04 07 04 07 01 123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	15.675.000,00	63.233.758,00	-	78.908.758,00	15.675.000,00	62.885.565,60	-	78.560.565,60	(348.192,40)	99,56
04 07 04 07 01 123 001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	10.450.000,00	11.208.200,00	-	21.658.200,00	10.450.000,00	11.111.200,00	-	21.561.200,00	(97.000,00)	99,55
04 07 04 07 01 123 002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	5.225.000,00	52.025.558,00	-	57.250.558,00	5.225.000,00	51.774.365,60	-	56.999.365,60	(251.192,40)	99,56
04 07 04 07 01 124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	64.575.000,00	285.825.600,00	-	350.400.600,00	57.750.000,00	237.637.141,00	-	295.387.141,00	(55.013.459,00)	84,30
04 07 04 07 01 124 001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35.700.000,00	267.495.600,00	-	303.195.600,00	28.875.000,00	219.307.141,00	-	248.182.141,00	(55.013.459,00)	81,86
04 07 04 07 01 124 002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	28.875.000,00	18.330.000,00	-	47.205.000,00	28.875.000,00	18.330.000,00	-	47.205.000,00	-	100,00
04 07 04 07 01 125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	249.575.000,00	567.751.791,00	-	817.326.791,00	244.266.000,00	558.253.107,40	-	802.519.107,40	(14.807.683,60)	98,19
04 07 04 07 01 125 001	Pelayanan Pajak Daerah	12.825.000,00	450.582.795,00	-	463.407.795,00	12.825.000,00	443.346.417,60	-	456.171.417,60	(7.236.377,40)	98,44
04 07 04 07 01 125 002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	46.750.000,00	40.648.346,00	-	87.398.346,00	41.975.000,00	38.510.897,80	-	80.485.897,80	(6.912.448,20)	92,09
04 07 04 07 01 125 003	Penetapan Pajak Daerah	190.000.000,00	76.520.650,00	-	266.520.650,00	189.466.000,00	76.395.792,00	-	265.861.792,00	(658.858,00)	99,75
04 07 04 07 01 126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	241.000.000,00	1.388.539.780,00	-	1.629.539.780,00	240.700.000,00	1.245.370.511,20	-	1.486.070.511,20	(143.469.268,80)	91,20
04 07 04 07 01 126 001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	241.000.000,00	124.134.780,00	-	365.134.780,00	240.700.000,00	119.111.511,20	-	359.811.511,20	(5.323.268,80)	98,54
04 07 04 07 01 126 002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	-	1.264.405.000,00	-	1.264.405.000,00	-	1.126.259.000,00	-	1.126.259.000,00	(138.146.000,00)	89,07
04 07 04 07 01 127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	13.700.000,00	865.886.340,00	58.625.200,00	938.211.540,00	7.925.000,00	791.194.867,84	54.987.845,41	854.107.713,25	(84.103.826,75)	91,04
04 07 04 07 01 127 001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	-	463.323.280,00	-	463.323.280,00	-	452.237.352,80	-	452.237.352,80	(11.085.927,20)	97,61
04 07 04 07 01 127 002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	2.925.000,00	327.455.280,00	-	330.380.280,00	2.925.000,00	266.673.022,24	-	269.598.022,24	(60.782.257,76)	81,60
04 07 04 07 01 127 003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	10.775.000,00	75.107.780,00	58.625.200,00	144.507.980,00	5.000.000,00	72.284.492,80	54.987.845,41	132.272.338,21	(12.235.641,79)	91,53
05 01	URUSAN KEISTIMEWAAN	487.530.000,00	15.427.232.449,00	37.797.598.335,00	53.712.360.784,00	471.035.000,00	15.080.788.434,23	37.555.961.129,56	53.107.784.563,79	(604.576.220,21)	98,87
05 01 01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	34.251.759.500,00	34.251.759.500,00	-	-	34.096.595.764,35	34.096.595.764,35	(155.163.735,65)	99,55
05 01 01 03 01 022	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	-	-	28.443.203.000,00	28.443.203.000,00	-	-	28.289.025.745,49	28.289.025.745,49	(154.177.254,51)	99,46
05 01 01 03 01 022 004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	-	-	28.443.203.000,00	28.443.203.000,00	-	-	28.289.025.745,49	28.289.025.745,49	(154.177.254,51)	99,46
05 01 01 03 01 022 005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
05 01 01 03 01 023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	-	5.808.556.500,00	5.808.556.500,00	-	-	5.807.570.018,86	5.807.570.018,86	(986.481,14)	99,98
05 01 01 03 01 023 003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	-	-	5.808.556.500,00	5.808.556.500,00	-	-	5.807.570.018,86	5.807.570.018,86	(986.481,14)	99,98
05 01 02 04 01	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	246.100.000,00	783.416.000,00	210.034.000,00	1.239.550.000,00	246.100.000,00	738.288.250,00	204.480.050,37	1.188.868.300,37	(50.681.699,63)	95,91
05 01 02 04 01 042	Program Pengelolaan Pertanahan	246.100.000,00	783.416.000,00	210.034.000,00	1.239.550.000,00	246.100.000,00	738.288.250,00	204.480.050,37	1.188.868.300,37	(50.681.699,63)	95,91
05 01 02 04 01 042 004	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	134.000.000,00	351.141.000,00	210.034.000,00	695.175.000,00	134.000.000,00	312.172.750,00	204.480.050,37	650.652.800,37	(44.522.199,63)	93,60
05 01 02 04 01 042 005	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	112.100.000,00	432.275.000,00	-	544.375.000,00	112.100.000,00	426.115.500,00	-	538.215.500,00	(6.159.500,00)	98,87

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
05 01 02 16 01	DINAS KEBUDAYAAN	101.580.000,00	5.711.832.430,00	622.825.920,00	6.436.238.350,00	90.460.000,00	5.501.622.968,00	555.210.400,00	6.147.293.368,00	(288.944.982,00)	95,51
05 01 02 16 01 081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	18.480.000,00	639.697.830,00	160.500.000,00	818.677.830,00	18.480.000,00	637.291.214,00	159.094.400,00	814.865.614,00	(3.812.216,00)	99,53
05 01 02 16 01 081 001	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	18.480.000,00	639.697.830,00	160.500.000,00	818.677.830,00	18.480.000,00	637.291.214,00	159.094.400,00	814.865.614,00	(3.812.216,00)	99,53
05 01 02 16 01 082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	22.580.000,00	1.399.152.160,00	353.450.920,00	1.775.183.080,00	17.580.000,00	1.259.258.067,00	293.106.000,00	1.569.944.067,00	(205.239.013,00)	88,44
05 01 02 16 01 082 001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	-	455.585.080,00	353.450.920,00	809.036.000,00	-	449.525.791,00	293.106.000,00	742.631.791,00	(66.404.209,00)	91,79
05 01 02 16 01 082 002	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	19.080.000,00	701.166.000,00	-	720.246.000,00	14.080.000,00	577.843.812,00	-	591.923.812,00	(128.322.188,00)	82,18
05 01 02 16 01 082 003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	3.500.000,00	242.401.080,00	-	245.901.080,00	3.500.000,00	231.888.464,00	-	235.388.464,00	(10.512.616,00)	95,72
05 01 02 16 01 083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	60.520.000,00	3.672.982.440,00	108.875.000,00	3.842.377.440,00	54.400.000,00	3.605.073.687,00	103.010.000,00	3.762.483.687,00	(79.893.753,00)	97,92
05 01 02 16 01 083 001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	34.350.000,00	1.108.119.750,00	102.500.000,00	1.244.969.750,00	33.000.000,00	1.091.896.964,00	99.800.000,00	1.224.696.964,00	(20.272.786,00)	98,37
05 01 02 16 01 083 002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	-	60.535.000,00	375.000,00	60.910.000,00	-	58.753.000,00	375.000,00	59.128.000,00	(1.782.000,00)	97,07
05 01 02 16 01 083 003	Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	-	82.162.080,00	-	82.162.080,00	-	79.997.004,00	-	79.997.004,00	(2.165.076,00)	97,36
05 01 02 16 01 083 004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	-	207.400.000,00	-	207.400.000,00	-	206.200.000,00	-	206.200.000,00	(1.200.000,00)	99,42
05 01 02 16 01 083 005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.050.000,00	235.521.530,00	-	239.571.530,00	4.050.000,00	212.874.000,00	-	216.924.000,00	(22.647.530,00)	90,55
05 01 02 16 01 083 006	Gelar Budaya Jogja	9.075.000,00	1.121.085.000,00	-	1.130.160.000,00	9.075.000,00	1.108.912.773,00	-	1.117.987.773,00	(12.172.227,00)	98,92
05 01 02 16 01 083 007	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	1.380.000,00	474.996.080,00	1.000.000,00	477.376.080,00	1.380.000,00	470.456.464,00	835.000,00	472.671.464,00	(4.704.616,00)	99,01
05 01 02 16 01 083 008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	4.770.000,00	58.793.250,00	5.000.000,00	68.563.250,00	1.970.000,00	58.651.732,00	2.000.000,00	62.621.732,00	(5.941.518,00)	91,33
05 01 02 16 01 083 009	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	6.895.000,00	324.369.750,00	-	331.264.750,00	4.925.000,00	317.331.750,00	-	322.256.750,00	(9.008.000,00)	97,28
05 01 03 02 01	DINAS PARIWISATA	-	7.296.905.519,00	145.000.000,00	7.441.905.519,00	-	7.232.686.866,23	143.080.000,00	7.375.766.866,23	(66.138.652,77)	99,11
05 01 03 02 01 090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	-	7.296.905.519,00	145.000.000,00	7.441.905.519,00	-	7.232.686.866,23	143.080.000,00	7.375.766.866,23	(66.138.652,77)	99,11
05 01 03 02 01 090 004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosof	-	6.005.405.519,00	55.000.000,00	6.060.405.519,00	-	5.982.695.866,23	54.200.000,00	6.036.895.866,23	(23.509.652,77)	99,61
05 01 03 02 01 090 005	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	-	421.500.000,00	90.000.000,00	511.500.000,00	-	418.886.000,00	88.880.000,00	507.766.000,00	(3.734.000,00)	99,27
05 01 03 02 01 090 006	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	-	870.000.000,00	-	870.000.000,00	-	831.105.000,00	-	831.105.000,00	(38.895.000,00)	95,53
05 01 04 03 01	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)	119.300.000,00	54.996.500,00	-	174.296.500,00	113.925.000,00	43.689.750,00	-	157.614.750,00	(16.681.750,00)	90,43
05 01 04 03 01 111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	119.300.000,00	54.996.500,00	-	174.296.500,00	113.925.000,00	43.689.750,00	-	157.614.750,00	(16.681.750,00)	90,43
05 01 04 03 01 111 004	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	94.100.000,00	29.964.500,00	-	124.064.500,00	88.725.000,00	24.085.750,00	-	112.810.750,00	(11.253.750,00)	90,93
05 01 04 03 01 111 005	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
05 01 04 03 01 111 006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	25.200.000,00	25.032.000,00	-	50.232.000,00	25.200.000,00	19.604.000,00	-	44.804.000,00	(5.428.000,00)	89,19

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
		JENIS BELANJA			JUMLAH ANGGARAN BELANJA	JENIS BELANJA			JUMLAH REALISASI BELANJA		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10-6	12
05 01 02 11 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	18.450.000,00	331.550.000,00	-	350.000.000,00	18.450.000,00	318.820.550,00	-	337.270.550,00	(12.729.450,00)	96,36
05 01 02 11 01 097	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	18.450.000,00	331.550.000,00	-	350.000.000,00	18.450.000,00	318.820.550,00	-	337.270.550,00	(12.729.450,00)	96,36
05 01 02 11 01 097 002	Pengembangan Industri Kreatif	18.450.000,00	331.550.000,00	-	350.000.000,00	18.450.000,00	318.820.550,00	-	337.270.550,00	(12.729.450,00)	96,36
05 01 03 01 01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	323.964.000,00	315.600.000,00	639.564.000,00	-	321.327.000,00	304.346.000,00	625.673.000,00	(13.891.000,00)	97,83
05 01 03 01 01 111	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	-	323.964.000,00	315.600.000,00	639.564.000,00	-	321.327.000,00	304.346.000,00	625.673.000,00	(13.891.000,00)	97,83
05 01 03 01 01 111 004	Pengembangan Lumbung Mataraman	-	323.964.000,00	315.600.000,00	639.564.000,00	-	321.327.000,00	304.346.000,00	625.673.000,00	(13.891.000,00)	97,83
05 01 03 05 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.100.000,00	924.568.000,00	2.252.378.915,00	3.179.046.915,00	2.100.000,00	924.353.050,00	2.252.248.914,84	3.178.701.964,84	(344.950,16)	99,99
05 01 03 05 01 097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	2.100.000,00	924.568.000,00	2.252.378.915,00	3.179.046.915,00	2.100.000,00	924.353.050,00	2.252.248.914,84	3.178.701.964,84	(344.950,16)	99,99
05 01 03 05 01 097 002	Pengembangan Industri Kreatif	2.100.000,00	924.568.000,00	2.252.378.915,00	3.179.046.915,00	2.100.000,00	924.353.050,00	2.252.248.914,84	3.178.701.964,84	(344.950,16)	99,99
	JUMLAH :	134.032.306.111,00	523.189.536.797,00	212.969.588.567,00	870.191.431.475,00	128.212.237.274,78	455.864.521.552,10	193.523.645.423,93	777.600.404.250,81	(92.591.027.224,19)	89,36

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I.4
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
01	PELAYANAN UMUM	640.867.236.298,09	418.514.455.874,62	(222.352.780.423,47)	65,30
01 02 10	Komunikasi dan Informatika	14.710.081.550,00	13.941.124.652,65	(768.956.897,35)	94,77
01 02 14	Statistik	43.178.000,00	39.667.000,00	(3.511.000,00)	91,87
01 02 15	Persandian	1.419.064.000,00	1.414.526.650,00	(4.537.350,00)	99,68
01 02 18	Kearsipan	5.881.012.991,00	5.704.096.536,52	(176.916.454,48)	96,99
01 04 01	Perencanaan	5.937.730.783,00	5.739.097.239,50	(198.633.543,50)	96,65
01 04 02	Penelitian dan Pengembangan	832.013.620,00	818.142.050,00	(13.871.570,00)	98,33
01 04 03	Sekretariat Daerah	22.592.167.883,00	20.820.674.242,90	(1.771.493.640,10)	92,16
01 04 04	Sekretariat DPRD	53.494.473.438,00	42.121.045.842,30	(11.373.427.595,70)	78,74
01 04 05	Inspektorat	4.971.074.436,00	4.732.018.771,74	(239.055.664,26)	95,19
01 04 06	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	172.812.109.006,00	153.478.795.369,00	(19.333.313.637,00)	88,81
01 04 07	Kuangan	358.174.330.591,09	169.705.267.520,01	(188.469.063.071,08)	47,38
03	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	37.127.359.473,00	35.493.443.821,90	(1.633.915.651,10)	95,60
03 01 05	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	34.897.770.491,00	33.388.570.989,90	(1.509.199.501,10)	95,68
03 02 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.229.588.982,00	2.104.872.832,00	(124.716.150,00)	94,41
04	EKONOMI	152.244.053.819,00	143.697.831.367,68	(8.546.222.451,32)	94,39
04 02 01	Tenaga Kerja	1.752.583.000,00	1.728.358.974,40	(24.224.025,60)	98,62
04 02 03	Pangan	582.623.056,00	578.227.860,00	(4.395.196,00)	99,25
04 02 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.260.689.028,00	73.550.142.898,74	(2.710.546.129,26)	96,45
04 02 09	Perhubungan	15.434.690.273,00	13.662.738.371,02	(1.771.951.901,98)	88,52
04 02 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.805.193.540,00	5.585.767.859,40	(219.425.680,60)	96,22
04 02 12	Penanaman Modal	5.916.526.000,00	5.622.052.163,00	(294.473.837,00)	95,02
04 03 01	Pertanian	7.467.942.551,00	7.228.277.489,00	(239.665.062,00)	96,79
04 03 03	Kelautan dan Perikanan	931.201.616,00	914.400.700,00	(16.800.916,00)	98,20
04 03 04	Perdagangan	23.206.740.420,00	20.517.909.697,62	(2.688.830.722,38)	88,41
04 03 05	Perindustrian	14.857.991.335,00	14.282.633.554,50	(575.357.780,50)	96,13
04 03 06	Transmigrasi	27.873.000,00	27.321.800,00	(551.200,00)	98,02

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH BELANJA	JUMLAH BELANJA	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	8 = 3+4+5+6+7	14 = 9+10+11+12+13	15=14-8	16
05	LINGKUNGAN HIDUP	68.536.360.568,00	62.965.768.746,86	(5.570.591.821,14)	91,87
05 02 04	Pertanahan	25.758.125.868,00	21.858.949.698,37	(3.899.176.169,63)	84,86
05 02 05	Lingkungan Hidup	42.778.234.700,00	41.106.819.048,49	(1.671.415.651,51)	96,09
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	134.882.738.181,00	129.586.736.353,32	(5.296.001.827,68)	96,07
06 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.387.828.627,00	111.593.073.919,04	(4.794.754.707,96)	95,88
06 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.494.909.554,00	17.993.662.434,28	(501.247.119,72)	97,29
07	KESEHATAN	380.992.775.173,00	329.896.116.710,73	(51.096.658.462,27)	86,59
07 01 02	Kesehatan	375.449.756.413,00	324.743.706.389,73	(50.706.050.023,27)	86,49
07 01 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.543.018.760,00	5.152.410.321,00	(390.608.439,00)	92,95
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	41.499.958.050,00	35.255.862.094,50	(6.244.095.955,50)	84,95
08 02 16	Kebudayaan	8.663.083.697,00	8.143.749.016,00	(519.334.681,00)	94,01
08 03 02	Pariwisata	32.836.874.353,00	27.112.113.078,50	(5.724.761.274,50)	82,57
10	PENDIDIKAN	360.019.761.048,00	342.101.530.647,90	(17.918.230.400,10)	95,02
10 01 01	Pendidikan	353.886.851.455,00	336.286.388.976,00	(17.600.462.479,00)	95,03
10 02 13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.962.005.992,00	3.658.268.845,00	(303.737.147,00)	92,33
10 02 17	Perpustakaan	2.170.903.601,00	2.156.872.826,90	(14.030.774,10)	99,35
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	21.049.348.861,00	20.087.722.870,88	(961.625.990,12)	95,43
11 01 06	Sosial	11.063.947.607,00	10.596.828.300,97	(467.119.306,03)	95,78
11 02 06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5.101.826.500,00	4.934.665.617,00	(167.160.883,00)	96,72
11 02 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.883.574.754,00	4.556.228.952,91	(327.345.801,09)	93,30
	JUMLAH :	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	PEJ. NEG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Walikota	1								1
Wakil Walikota	1								1
JUMLAH KEPDA	2								2
Golongan IV/e	0						3		3
Golongan IV/d	0		1				6		7
Golongan IV/c	0		21				25		46
Golongan IV/b	0		5	51	1		110	1	168
Golongan IV/a	0			83	83		811	6	983
JUMLAH GOLONGAN IV	0	0	27	134	84	0	955	7	1207
Golongan III/d	0			8	308		415	50	781
Golongan III/c	0				202		260	137	599
Golongan III/b	0				35		513	419	967
Golongan III/a	0						205	325	530
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	8	545	0	1393	931	2877
Golongan II/d	0						54	263	317
Golongan II/c	0						32	238	270
Golongan II/b	0						7	175	182
Golongan II/a	0						2	52	54
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	95	728	823
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0		92	92
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0		10	10
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0		2	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0			0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	104	104
TOTAL	2	0	27	142	629	0	2443	1770	5013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	86.255.692.984,99	
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	59.910.087.013,00	
4 1 1 01	Pajak Hotel	63.000.000.000,00	78.279.066.037,00	15.279.066.037,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0102	Hotel Bintang Lima	13.480.000.000,00	18.691.651.432,00	5.211.651.432,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0103	Hotel Bintang Empat	17.700.000.000,00	24.790.772.505,00	7.090.772.505,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
4 1 1 0104	Hotel Bintang Tiga	17.300.000.000,00	20.236.266.301,00	2.936.266.301,00	Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 0105	Hotel Bintang Dua	5.970.000.000,00	6.104.786.668,00	134.786.668,00	
4 1 1 0106	Hotel Bintang Satu	2.250.000.000,00	2.171.035.455,00	(78.964.545,00)	
4 1 1 0107	Hotel Melati Tiga	1.040.000.000,00	1.021.115.187,00	(18.884.813,00)	
4 1 1 0108	Hotel Melati Dua	860.000.000,00	625.387.197,00	(234.612.803,00)	
4 1 1 0109	Hotel Melati Satu	3.650.000.000,00	3.791.152.932,00	141.152.932,00	
4 1 1 0112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	750.000.000,00	846.898.360,00	96.898.360,00	
4 1 1 02	Pajak Restoran	38.015.000.000,00	43.521.758.533,00	5.506.758.533,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0201	Restoran	38.000.000.000,00	43.502.504.068,00	5.502.504.068,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0203	Katering	15.000.000,00	19.254.465,00	4.254.465,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
					Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 03	Pajak Hiburan.	3.450.000.000,00	3.870.424.584,00	420.424.584,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0301	Tontonan Film/Bioskop	900.556.000,00	932.733.067,00	32.177.067,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0302	Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana	32.415.000,00	93.075.400,00	60.660.400,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
4 1 1 0305	Pameran	790.000.000,00	867.538.638,00	77.538.638,00	Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 0307	Karaoke	140.000.000,00	150.848.363,00	10.848.363,00	
4 1 1 0309	Permainan Bilyar dan Bowling	26.037.000,00	27.985.311,00	1.948.311,00	
4 1 1 0310	Pacuan kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-	
4 1 1 0311	Permainan Ketangkasan	385.055.000,00	396.585.132,00	11.530.132,00	
4 1 1 0312	Panti Pijat Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	450.000.000,00	511.268.268,00	61.268.268,00	
4 1 1 0313	Pertandingan Olah Raga	13.937.000,00	13.937.875,00	875,00	
4 1 1 0314	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	712.000.000,00	876.452.530,00	164.452.530,00	
4 1 1 04	Pajak Reklame.	5.000.000.000,00	6.156.071.238,00	1.156.071.238,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 0401	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	4.690.000.000,00	5.706.164.497,00	1.016.164.497,00	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 0403	Reklame Kain	284.458.000,00	415.789.476,00	131.331.476,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
4 1 1 0405	Reklame Melekat/Sticker	-	-	-	Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 0407	Reklame Berjalan	25.542.000,00	34.117.265,00	8.575.265,00	
4 1 1 0408	Reklame Udara	-	-	-	
4 1 1 0411	Reklame Baliho	-	-	-	
4 1 1 0412	Reklame Cahaya	-	-	-	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	
4 1 1 0501	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
					tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
					- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
					Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 1 07 4 1 1 0701	Pajak Parkir Pajak Parkir	1.600.000.000,00 1.600.000.000,00	1.851.049.591,00 1.851.049.591,00	251.049.591,00 251.049.591,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 08 4 1 1 0801	Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00 1.300.000.000,00	1.575.287.372,00 1.575.287.372,00	275.287.372,00 275.287.372,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 09 4 1 1 0901	Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00 5.500.000,00	5.600.000,00 5.600.000,00	100.000,00 100.000,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 12 4 1 1 1201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00 82.500.000.000,00	96.517.233.954,00 96.517.233.954,00	14.017.233.954,00 14.017.233.954,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)
4 1 1 13 4 1 1 1301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.000.000.000,00 43.000.000.000,00	63.582.978.565,00 63.582.978.565,00	20.582.978.565,00 20.582.978.565,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	3.663.875.163,00	
4 1 2 01 4 1 2 01 01	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan. a. Kesehatan Hewan b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	17.382.933.426,00 196.565.200,00 57.773.200,00 138.792.000,00	20.172.661.189,00 271.253.500,00 62.332.700,00 208.920.800,00	2.789.727.763,00 74.688.300,00 4.559.500,00 70.128.800,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	148.692.805,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat a. TPU Utoroloyo b. TPU Pracimoloyo c. TPU Sasonoloyo d. TPU Sariloyo	97.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 27.000.000,00 15.000.000,00	119.200.000,00 34.140.000,00 33.555.000,00 30.680.000,00 20.825.000,00	22.200.000,00 9.140.000,00 3.555.000,00 3.680.000,00 5.825.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	1.295.380.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar.	9.934.895.700,00	10.910.008.884,00	975.113.184,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	(17.567.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 2 01 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	511.400.026,00	792.602.500,00	281.202.474,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.746.000,00	72.764.000,00	10.018.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13)
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.011.402.133,00	930.582.033,00	(80.820.100,00)	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.710.000,00	32.495.000,00	(6.215.000,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	806.502.633,00	717.382.833,00	(89.119.800,00)	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan.	54.150.000,00	66.775.000,00	12.625.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	112.039.500,00	113.929.200,00	1.889.700,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.252.435.800,00	2.207.403.300,00	954.967.500,00	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	903.157.500,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	202.435.800,00	254.245.800,00	51.810.000,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	30.958.006,98	
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	30.958.006,98	
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	693.501.557,00	693.501.557,50	0,50	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	12.265.548.919,00	12.265.548.921,00	2,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)
4 1 3 01 03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	21.829.330.811,00	21.829.330.811,85	0,85	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	40.287.405,00	71.245.408,63	30.958.003,63	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
4 1 3 01 05	PD Jogjatama Visessa	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visessa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	22.650.772.802,01	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.513.815.076,00	1.620.611.826,00	106.796.750,00	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	-	71.263.000,00	71.263.000,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	96.105.963,00	96.105.963,00	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.379.009.113,00	1.379.009.113,00	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	38.700.000,00	74.233.750,00	35.533.750,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02	Jasa Giro	3.550.000.000,00	6.167.302.851,00	2.617.302.851,00	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.550.000.000,00	6.167.302.851,00	2.617.302.851,00	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	5.144.000.000,00	6.242.796.178,63	1.098.796.178,63	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	500.000,00	500.000,00	-	
4 1 4 06	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.875.791,00	293.507.070,32	289.631.279,32	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	941.310.969,00	1.210.226.621,00	268.915.652,00	
4 1 4 08	Pendapatan Denda Retribusi	220.821.600,00	378.394.800,00	157.573.200,00	
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	412.158.358,89	628.516.419,06	216.358.060,17	
4 1 4 10 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	115.225.461,00	165.210.136,00	49.984.675,00	
4 1 4 10 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	47.137.443,89	70.276.459,39	23.139.015,50	
4 1 4 10 08	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah	81.594.355,00	100.594.355,00	19.000.000,00	
4 1 4 10 09	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Non Hibah	168.201.099,00	292.435.468,67	124.234.369,67	
4 1 4 11	Fasilitas Sosial dan Umum	55.545.000,00	55.545.000,00	-	
4 1 4 15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	842.241.600,00	1.401.713.300,00	559.471.700,00	
4 1 4 15 01	Sewa Lahan Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 03	Sewa Penginapan Awak Bus Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 04	Sewa Hotel Terminal	-	-	-	
4 1 4 15 05	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 02	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	571.824.000,00	1.131.295.700,00	559.471.700,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 15 03	Pengelolaan Wisma Nqestilaras	22.000.000,00	22.000.000,00	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 04	Pengelolaan Reksa Arcade	243.417.600,00	243.417.600,00	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	(1.892.768.019,00)	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	(1.892.768.019,00)	
4 1 4 17	Pendapatan BLUD RSUD	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD RSUD	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	16.372.361.908,25	
4 1 4 18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.247.478.259,00	3.465.105.692,10	217.627.433,10	
4 1 4 18 01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.247.478.259,00	3.465.105.692,10	217.627.433,10	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 19	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.458.891.000,00	23.047.942.795,00	(410.948.205,00)	Peraturan Walikota Yogyakarta No 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4 1 4 19 01	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	782.950.000,00	787.602.641,00	4.652.641,00	
4 1 4 19 02	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	607.811.000,00	614.635.014,00	6.824.014,00	
4 1 4 19 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.326.120.000,00	1.171.761.213,00	(154.358.787,00)	
4 1 4 19 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.248.200.000,00	1.408.651.986,00	160.451.986,00	
4 1 4 19 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2	605.113.000,00	648.485.963,00	43.372.963,00	
4 1 4 19 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	878.144.000,00	795.354.387,00	(82.789.613,00)	
4 1 4 19 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.012.875.000,00	2.096.805.599,00	83.930.599,00	
4 1 4 19 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.657.805.000,00	1.339.368.853,00	(318.436.147,00)	
4 1 4 19 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	755.077.000,00	809.766.851,00	54.689.851,00	
4 1 4 19 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	985.688.000,00	1.002.463.002,00	16.775.002,00	
4 1 4 19 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.960.800.000,00	1.821.923.755,00	(138.876.245,00)	
4 1 4 19 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.624.515.000,00	1.632.813.423,00	8.298.423,00	
4 1 4 19 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	901.617.000,00	815.504.190,00	(86.112.810,00)	
4 1 4 19 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	603.080.000,00	623.496.528,00	20.416.528,00	
4 1 4 19 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.626.341.000,00	2.610.753.621,00	(15.587.379,00)	
4 1 4 19 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.293.617.000,00	2.349.408.612,00	55.791.612,00	
4 1 4 19 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.092.764.000,00	1.053.745.445,00	(39.018.555,00)	
4 1 4 19 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.496.374.000,00	1.465.401.712,00	(30.972.288,00)	
4 1 4 20	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	15.544.227.518,00	17.954.638.518,95	2.410.411.000,95	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
4 1 4 20 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	15.544.227.518,00	17.954.638.518,95	2.410.411.000,95	
4 1 4 21	Pendapatan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	324.574.256,00	15.156.456,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
4 1 4 21 01	Pendapatan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	324.574.256,00	15.156.456,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 1 4 23	Pendapatan BUKP	16.734.314,00	32.290.672,59	15.556.358,59	
4 1 4 23 01	Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP	16.734.314,00 9.562.465,00 7.171.849,00	32.290.672,59 18.451.812,92 13.838.859,67	15.556.358,59 8.889.347,92 6.667.010,67	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017
4 1 4 24	Denda Hasil Operasi Yustisi	124.214.000,00	138.046.000,00	13.832.000,00	
4 1 4 25	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	-	-	
4 1 4 25 01	Penyelenggaraan PMPS	-	-	-	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta
4 1 4 26	Jaminan Bongkar	277.476.460,00	306.549.309,00	29.072.849,00	
4 1 4 26 01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	277.476.460,00	306.549.309,00	29.072.849,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 31	Pendapatan Bunga Pajak	785.449.111,00	1.025.490.354,00	240.041.243,00	
4 1 4 32	Pendapatan Bunga Retribusi	20.325.896,00	39.356.224,00	19.030.328,00	
4 1 4 34	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.028.180.800,00	1.334.734.578,00	306.553.778,00	
4 1 4 34 01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.028.180.800,00	1.334.734.578,00	306.553.778,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 2	DANA PERIMBANGAN	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	(21.481.524.080,00)	
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	(4.630.364.301,00)	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	(3.651.085.401,00)	
4 2 1 01 03	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	45.569.393.017,00	43.680.510.229,00	(1.888.882.788,00)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 2 1 01 05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	5.226.991.301,00	3.464.788.688,00	(1.762.202.613,00)	Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	(979.278.900,00)	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	93.260.759,00	35.906.013,00	(57.354.746,00)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.651.338.439,00	788.276.289,00	(863.062.150,00)	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	424.188,00	788.301,00	364.113,00	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	967.934.873,00	908.708.756,00	(59.226.117,00)	
4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	(12.458.381.779,00)	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	51.190.623.000,00	42.628.557.012,00	(8.562.065.988,00)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 2 3 01 02	Pelayanan Rujukan	17.073.162.000,00	15.502.024.106,00	(1.571.137.894,00)	
4 2 3 01 03	Pelayanan Kefarmasian	1.132.185.000,00	1.129.743.474,00	(2.441.526,00)	
4 2 3 01 04	Keluarga Berencana	940.400.000,00	891.681.800,00	(48.718.200,00)	
4 2 3 01 08	Lingkungan Hidup	-	-	-	
4 2 3 01 13	Pelayanan Kesehatan Dasar	6.513.911.000,00	2.968.890.802,00	(3.545.020.198,00)	
4 2 3 01 15	Perumahan dan Permukiman	2.556.255.000,00	2.556.255.000,00	-	
4 2 3 01 16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	8.020.134.000,00	7.039.472.000,00	(980.662.000,00)	
4 2 3 01 17	Bidang Pendidikan	1.258.278.000,00	1.243.120.000,00	(15.158.000,00)	
4 2 3 01 18	Pengendalian Penyakit	1.529.631.000,00	1.485.526.105,00	(44.104.895,00)	
4 2 3 01 19	Sanitasi	-	-	-	
4 2 3 01 20	Jalan	7.744.978.000,00	6.224.252.000,00	(1.520.726.000,00)	
4 2 3 01 21	Pasar	-	-	-	
4 2 3 01 22	Pariwisata	4.421.689.000,00	3.587.591.725,00	(834.097.275,00)	
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	103.902.055.772,00	100.005.739.981,00	(3.896.315.791,00)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 2 3 02 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	9.659.400.000,00	7.001.400.000,00	(2.658.000.000,00)	
4 2 3 02 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67.379.612.000,00	67.379.612.000,00	-	
4 2 3 02 04	Bantuan Operasional Kesehatan	18.849.666.772,00	20.349.146.772,00	1.499.480.000,00	
4 2 3 02 05	Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	
4 2 3 02 06	Akreditasi Puskesmas	1.016.240.000,00	-	(1.016.240.000,00)	
4 2 3 02 07	Jaminan Persalinan	291.464.000,00	-	(291.464.000,00)	
4 2 3 02 08	Bantuan Operasional KB	1.758.980.000,00	1.522.849.200,00	(236.130.800,00)	
4 2 3 02 09	Pelayanan Adminduk	1.412.105.000,00	1.366.399.230,00	(45.705.770,00)	
4 2 3 02 10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.434.100.000,00	1.605.487.500,00	(828.612.500,00)	
4 2 3 02 11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	564.662.000,00	551.028.879,00	(13.633.121,00)	
4 2 3 02 12	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	229.816.400,00	(114.233.600,00)	
4 2 3 02 13	Pengawasan Obat dan Makanan	191.776.000,00	-	(191.776.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	(1.899.307.059,33)	
4 3 1	Pendapatan Hibah	62.517.650.000,00	59.813.911.135,00	(2.703.738.865,00)	
4 3 1 01 01	Pemerintah	33.184.750.000,00	28.836.922.535,00	(4.347.827.465,00)	
4 3 1 05	Hibah dari Luar Negeri	-	1.746.000.000,00	1.746.000.000,00	
4 3 1 06	Hibah Dana BOSN	29.332.900.000,00	29.230.988.600,00	(101.911.400,00)	
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.588.802.138,00	47.368.670.845,00	(1.220.131.293,00)	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.278.259.903,00	18.535.933.793,00	(1.742.326.110,00)	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.766.527.500,00	29.209.668.052,00	3.443.140.552,00	
4 3 3 01 07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.705.200,00	40.333.314,00	8.628.114,00	
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	24.698.590.062,75	25.810.732.872,00	1.112.142.809,25	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	
4 3 4 01 02	Dana Insentif Daerah	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
	Jumlah :	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
LAPORAN PERUBAHAN SAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(AUDITED)

NO	URAIAN	Reff	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
3	Sub Total (1-2)		-	-
4				
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
6	Sub Total (3+5)		382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
7				
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
9	Lain-lain		-	-
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (6+8+9)	5.2.4.	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 DAN 2019
(AUDITED)

Uraian	Reff	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	391.886.153.632,00	455.418.040.451,00	(63.531.886.819,00)	(13,95)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	23.972.475.207,83	32.721.998.352,00	(8.749.523.144,17)	(26,74)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.4.1.1.c	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01	5.884.622.748,97	20,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.d	156.135.741.306,28	184.304.487.065,30	(28.168.745.759,02)	(15,28)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		606.853.996.845,09	701.419.529.818,31	(94.565.532.973,22)	(13,48)
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.4.1.2.a				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.a.1	47.145.298.917,00	27.070.845.600,00	20.074.453.317,00	74,16
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.a.2	1.733.679.359,00	1.904.476.800,00	(170.797.441,00)	(8,97)
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.a.3	627.247.170.000,00	700.372.564.000,00	(73.125.394.000,00)	(10,44)
Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.a.4	142.634.296.993,00	145.960.291.302,00	(3.325.994.309,00)	(2,28)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		818.760.445.269,00	875.308.177.702,00	(56.547.732.433,00)	(6,46)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.4.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.4.1.2.b.1	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.4.1.2.b.2	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00	47.369.964.600,00	72,52
Pendapatan Hibah	5.4.1.2.b.3	-	-	-	-
Dana Tunjangan Pendidikan	5.4.1.2.b.4	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		112.688.603.600,00	65.318.639.000,00	47.369.964.600,00	72,52
Transfer Pemerintah Provinsi	5.4.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.c.1	120.518.721.716,00	135.442.888.519,00	(14.924.166.803,00)	(11,02)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.4.1.2.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.1.2.c.3	53.579.338.517,42	1.236.000.000,00	52.343.338.517,42	4.234,90
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		174.098.060.233,42	136.678.888.519,00	37.419.171.714,42	27,38
Jumlah Pendapatan Transfer		1.105.547.109.102,42	1.077.305.705.221,00	28.241.403.881,42	2,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.a	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00	29.128.922.535,00	-
Pendapatan Hibah Aset	5.4.1.3.b	42.272.520.681,75	-	42.272.520.681,75	-
Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.3.c	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.d	15.233.238.476,53	-	15.233.238.476,53	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		88.088.681.693,28	1.454.000.000,00	86.634.681.693,28	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.800.489.787.640,79	1.780.179.235.039,31	20.310.552.601,48	#DIV/0! 1,14
BEBAN	5.4.2				
BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	728.843.486.449,78	758.691.887.722,78	(29.848.401.273,00)	(3,93)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	476.053.839.740,76	537.573.961.358,62	(61.520.121.617,86)	(11,44)
Beban Bunga	5.4.2.1.3	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.5	38.725.063.808,00	79.389.047.945,00	(40.663.984.137,00)	(51,22)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	25.029.937.400,00	11.551.423.000,00	13.478.514.400,00	116,68
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.1.7	-	-	-	-
Beban Penyusutan	5.4.2.1.8	153.809.532.958,89	162.251.344.396,22	(8.441.811.437,33)	(5,20)
Beban penyisihan	5.4.2.1.9	8.894.784.298,57	3.306.466.252,30	5.588.318.046,27	169,01
Beban amortisasi	5.4.2.1.10	7.496.572.437,38	6.246.635.065,94	1.249.937.371,44	20,01
Beban Premi	5.4.2.1.11	-	-	-	-
Beban Lain-lain	5.4.2.1.12	-	-	-	-
Jumlah Beban Operasi		1.438.853.217.093,38	1.559.010.765.740,86	(120.157.548.647,48)	(7,71)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.a	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.b	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	5.4.2.2.c	583.430.060,00	1.228.210.990,00	(644.780.930,00)	(52,50)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.d	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.e	777.359.018,00	753.036.006,00	24.323.012,00	3,23
Beban transfer Dana Otonomi Khusus	5.4.2.2.f	-	-	-	-
Beban Tidak Terduga	5.4.2.2.g	-	317.693.064,00	(317.693.064,00)	(100,00)
Jumlah Beban Transfer		1.360.789.078,00	2.298.940.060,00	(938.150.982,00)	(40,81)
Jumlah Beban Operasi dan Transfer		1.440.214.006.171,38	1.561.309.705.800,86	(121.095.699.629,48)	(7,76)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		360.275.781.469,41	218.869.529.238,45	141.406.252.230,96	64,61

Uraian	Reff	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON	5.4.3				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.1			-	
Surplus Penjualan Aset Non lancar		-	159.000.000,00	(159.000.000,00)	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	
Jumlah Surplus Non Operasional		-	159.000.000,00	(159.000.000,00)	-
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	
Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	159.000.000,00	(159.000.000,00)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA					
POS LUAR BIASA	5.4.4			(159.000.000,00)	-
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1				
Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.a			-	-
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2				
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.a	74.385.331.447,58		74.385.331.447,58	-
Jumlah beban Luar Biasa		74.385.331.447,58	-	74.385.331.447,58	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		(74.385.331.447,58)	-	(74.385.331.447,58)	-
SURPLUS/ DEFISIT- LO		285.890.450.021,83	219.028.529.238,45	66.861.920.783,38	30,53

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV
L P E

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(AUDITED)

NO	URAIAN	Ref	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp
1	Ekuitas Awal	5.6.1	4.234.883.563.121,72	4.084.409.554.757,17
2	Surplus/defisit LO	5.6.2	285.890.450.021,83	219.028.529.238,45
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3	-	-
4	Ekuitas Mutasi	5.6.4	(23.536.272.660,72)	(68.554.520.873,90)
5	Ekuitas Akhir	5.6.5	4.497.237.740.482,83	4.234.883.563.121,72

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V
NERACA

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 N E R A C A
 PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
 (AUDITED)

Uraian	Reff	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
A S E T	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	326.448.450.039,90	176.886.586.123,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	13.656.115,00	34.639.092,00
Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.c	5.434.645.537,16	8.176.660.137,16
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.d	13.090.669,00	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.e	51.052.615.180,75	35.593.273.260,17
Kas Lainnya	5.3.1.1.g	-	-
Piutang Pajak	5.3.1.1.i	128.534.908.185,00	102.125.917.028,00
Penyisihan piutang pajak	5.3.1.1.i 1)	(52.378.915.827,08)	(46.638.938.595,95)
Piutang pajak netto	5.3.1.1.i 2)	76.155.992.357,92	55.486.978.432,05
Piutang Retribusi	5.3.1.1.j	3.971.869.559,00	3.156.534.910,00
Penyisihan piutang retribusi	5.3.1.1.j 1)	(2.801.120.003,00)	(1.599.833.267,80)
Piutang retribusi netto	5.3.1.1.j 2)	1.170.749.556,00	1.556.701.642,20
Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	5.3.1.1.k	158.724.999,00	169.124.999,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	5.3.1.1.k 1)	(158.724.999,00)	(169.124.999,00)
Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman Netto	5.3.1.1.k 2)	-	-
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.l	225.000.000,00	247.000.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.l 1)	(1.125.000,00)	(1.235.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.1.l 2)	223.875.000,00	245.765.000,00
Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.m	1.200.000,00	2.000.000,00
Penyisihan Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.1.m 1)	(6.000,00)	(10.000,00)
Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.1.m 2)	1.194.000,00	1.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Sewa	5.3.1.1.n	1.646.911.168,00	1.524.845.168,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa	5.3.1.1.n 1)	(1.270.543.138,00)	(1.323.897.188,00)
Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto	5.3.1.1.n 2)	376.368.030,00	200.947.980,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.o	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.o 1)	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	5.3.1.1.o 2)	-	-
Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.p	1.602.395.078,00	2.049.012.238,00
Penyisihan Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.p 1)	(8.011.975,39)	(10.245.061,19)
Piutang Transfer - Dana Bagi Hasil Netto	5.3.1.1.p 2)	1.594.383.102,61	2.038.767.176,81
Piutang PAD Lainnya	5.3.1.1.q	36.739.432.450,00	32.276.757.330,00
Penyisihan Piutang PAD Lainnya	5.3.1.1.q 1)	(20.611.261.945,97)	(18.863.248.444,57)
Piutang PAD Lainnya Netto	5.3.1.1.q 2)	16.128.170.504,03	13.413.508.885,43
Piutang Lainnya	5.3.1.1.r	4.964.904.450,00	19.636.859.641,60
Penyisihan piutang lainnya	5.3.1.1.r 1)	(448.992.142,47)	(446.377.149,96)
Nilai bersih piutang lainnya	5.3.1.1.r 2)	4.515.912.307,53	19.190.482.491,64
Asuransi Dibayar Dimuka	5.3.1.1.s	69.050.075,61	1.603.287.437,68
Sewa Dibayar Dimuka		382.333.333,33	
Persediaan	5.3.1.1.s	49.343.251.887,51	36.723.783.804,99
Jumlah Aset Lancar		532.923.737.696,35	351.153.371.463,13
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.a		
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.a 1)	708.269.692,00	710.489.692,00
Penyisihan investasi non permanen	5.3.1.2.a 2)	(708.269.692,00)	(710.489.692,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-

Uraian	Reff	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Investasi Permanen	5.3.1.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.b.1)	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.b.2)	-	-
Jumlah Investasi Permanen		540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
Jumlah Investasi Jangka Panjang		540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a)	1.906.244.295.189,22	1.884.638.446.869,22
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b)	806.756.272.814,68	754.164.705.849,33
Bangunan dan Gedung	5.3.1.3.c)	1.127.571.463.054,25	1.076.780.987.891,51
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d)	2.219.972.704.639,17	2.108.434.251.782,83
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e)	42.180.666.375,67	41.148.254.654,97
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f)	23.523.372.875,51	22.997.204.784,98
Akumulasi penyusutan	5.3.1.3.g)	(2.749.541.284.642,50)	(2.569.454.513.819,91)
Jumlah Aset Tetap		3.376.707.490.306,00	3.318.709.338.013,44
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.5.a	2.752.564.455,00	2.798.981.468,00
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.5.b	1.150.000.000,00	1.375.000.000,00
Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.3.1.5.b 1)	(5.750.000,00)	(6.875.000,00)
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	5.3.1.5.b 2)	1.144.250.000,00	1.368.125.000,00
Tagihan Sewa	5.3.1.5.c	92.440.000,00	184.880.000,00
Penyisihan Tagihan Sewa	5.3.1.5.c 1)	(462.200,00)	(924.400,00)
Tagihan Sewa Netto	5.3.1.5.c 2)	91.977.800,00	183.955.600,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.d	-	-
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.d 1)	-	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto	5.3.1.5.d 2)	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.e	6.408.300.000,00	7.269.300.000,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.f	50.474.681.122,68	47.395.971.027,68
Akumulasi amortisasi	5.3.1.5.f 1)	(27.488.170.485,98)	(19.991.598.048,60)
Aset Tak Berwujud Netto	5.3.1.5.f 2)	22.986.510.636,70	27.404.372.979,08
Aset Lain -lain	5.3.1.5.g	22.617.386.359,52	5.357.144.501,83
Jumlah Aset Lainnya		56.000.989.251,22	44.381.879.548,91
JUMLAH ASET		4.506.498.945.235,37	4.246.893.437.243,72
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.1.6		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.1.6.a	2.800.717.168,45	3.054.754.868,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.1.6.b	2.106.062.705,09	2.439.982.267,00
Utang Belanja	5.3.1.6.c	4.354.424.879,00	6.515.136.987,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.6.d	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.261.204.752,54	12.009.874.122,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.1.7		
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.1.7.a	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		9.261.204.752,54	12.009.874.122,00
EKUITAS	5.3.1.8.	4.497.237.740.482,83	4.234.883.563.121,72
JUMLAH EKUITAS		4.497.237.740.482,83	4.234.883.563.121,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.506.498.945.235,37	4.246.893.437.243,72

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI
LAPORAN ARUS KAS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
Metode Langsung
(AUDITED)

Uraian	Reff	Tahun 2020	Tahun 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	342.780.587.013,00	451.265.948.031,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	23.310.646.522,00	32.428.343.731,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.d	160.602.899.336,90	175.277.755.146,26
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.e	47.145.298.917,00	27.070.845.600,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.f	1.733.679.359,00	1.904.476.800,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g	627.247.170.000,00	700.372.564.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.h	142.634.296.993,00	145.960.291.302,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.i	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.j	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.k		
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.l	120.965.338.876,00	133.393.876.281,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.m		1.236.000.000,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.n	53.579.338.517,42	-
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.o	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.p	-	-
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.q	-	-
Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.r	-	-
Total Arus Masuk Kas		1.698.130.408.368,30	1.764.657.743.841,27
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Operasi	5.5.1.2.1		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1).a	728.710.179.778,78	760.532.062.428,28
Pembayaran Barang	5.5.1.2.1).b	455.864.521.552,10	553.387.490.228,89
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.1).c	-	-
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.1).d	-	-
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.1).e	38.725.063.808,00	79.389.047.945,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.1).f	25.029.937.400,00	11.551.423.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.1).g	1.360.789.078,00	1.981.246.996,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1.2.1).h		
Jumlah Belanja Operasi		1.249.690.491.616,88	1.406.841.270.598,17
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.2).	74.385.331.447,58	317.693.064,00
Total Arus Keluar Kas		1.324.075.823.064,46	1.407.158.963.662,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		374.054.585.303,84	357.498.780.179,10
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.a	1.546.378.076,00	534.748.601,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.b	74.233.750,00	567.926.050,00
Total Arus Masuk Kas		1.620.611.826,00	1.102.674.651,00

Uraian	Reff	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	17.920.111.920,00	25.569.058.040,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	54.368.762.898,42	96.719.552.169,17
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	41.131.637.105,54	54.312.514.794,87
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	5.5.2.2.d	70.226.071.861,47	101.225.143.404,83
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	3.834.203.993,50	828.300.673,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.f	6.042.857.645,00	48.779.803.117,30
Penyertaan Modal Pada BUMD	5.5.2.2.g	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.h		
Total Arus Keluar Kas		213.523.645.423,93	364.709.372.199,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(211.903.033.597,93)	(363.606.697.548,17)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.a	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.3.1.b	410.000.000,00	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5.5.3.1.c	-	5.725.732,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.5.3.1.d	12.620.000,00	
Pelepasan Investasi	5.5.3.1.e	-	
Jumlah Arus Masuk Kas		422.620.000,00	5.725.732,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.a	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.c	-	-
Total Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		422.620.000,00	5.725.732,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan PFK	5.5.4.1.a	103.641.949.565,72	113.015.922.965,64
Penggunaan UP	5.5.4.1.b	13.157.465.201,2	13.577.131.452,76
Pengembalian UP	5.5.4.1.c	11.109.262.083,8	6.804.229.455,24
Sisa UP	5.5.4.1.d	7.272.715,0	34.639.092,00
Penggunaan TU	5.5.4.1.e	73.513.706.835,4	69.457.031.421,48
Pengembalian TU	5.5.4.1.f	2.144.707.809,5	1.166.455.511,48
Sisa TU	5.5.4.1.g	0,00	0,00
Total Arus Masuk Kas		203.574.364.210,62	204.055.409.898,60
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Penyetoran PFK	5.5.4.2.a	103.641.949.565,72	113.015.922.965,64
Pengeluaran SP2D UP	5.5.4.2.b	24.274.000.000,0	20.416.000.000,00
Pengeluaran SP2D TU	5.5.4.2.c	75.658.414.644,9	70.623.486.932,96
Total Arus Keluar Kas		203.574.364.210,62	204.055.409.898,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		162.574.171.705,91	(6.102.191.637,07)
SALDO AWAL KAS		220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	5.5.5	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.5.6.a		
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan BOS Propinsi dan BOSDA)	5.5.6.b	-	-
Saldo di Bendahara Penerimaan atas titipan pajak hiburan	5.5.6.c	-	-
Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	5.5.6.d	-	50.559.818,66
Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	5.5.6.e	-	44.692.271,22
Titipan Bank BPD Uji SIM BPD	5.5.6.f	4.213,45	-
Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Toilet Taman Pintar	5.5.6.g	48.148.500,00	255.773.400,00
SALDO AKHIR KAS	5.5.6	382.962.457.541,81	220.691.158.612,33

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan tahun 2020; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Yogyakarta dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan Tahun Anggaran 2020 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2020.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah :

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2020

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas, serta keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.



BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI LAINNYA

Memuat informasi tentang hal-hal lainnya yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi perkembangan penyerahan pengelolaan Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pasca penyelesaian sengketa hukum dengan PT. Perwita Karya dan perkembangan divestasi atas kepemilikan saham Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara AdhiloKa.

BAB VIII PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB II KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2020

2.1. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

26/NKB.YK/X/2019
5/NKB/DPRD/X/2019

Tanggal 23 Oktober 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2020. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2020.

Dalam Kebijakan Umum APBD TA 2020 dinyatakan bahwa penyusunan RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2020 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2020 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2020 yaitu "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Tema pembangunan di atas dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan Wilayah;
3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; dan
4. Pendukung Prioritas Pembangunan

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah: "***Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya***".

Tematik pembangunan ini selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut ini:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang
7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi



2.1.1. Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, antara lain Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Pendidikan.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2014 hingga 2018, pertumbuhannya cenderung naik. Sektor ini juga memiliki pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 6,36 persen setiap tahunnya.

Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 5,20 persen

2.1.1.2. Inflasi

Inflasi pada tahun 2014 adalah sebesar 7,32 persen. Pada tahun 2015-2017 inflasi Kota Yogyakarta terus menurun hingga mencapai 2,29 persen pada tahun 2017. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Kemudian, angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 2,66 persen.

Dengan memperhatikan fluktuasi tingkat inflasi dari tahun 2014-2018, maka laju inflasi pada tahun 2020 diharapkan dapat ditekan pada level 2,29 persen.

2.1.1.3. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita, yang merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.

2.1.1.4. Angka Pengangguran Terbuka

Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.



Selama tahun 2014-2018, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -27,95%. Pada tahun 2014, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 9,03% dan turun menjadi 2,32% pada tahun 2018. Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,94 persen.

2.1.1.5. Ketimpangan Pendapatan

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,397.

2.1.1.6. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 85.

2.1.1.7. Tingkat Kemiskinan

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6,15 persen.

2.1.2. Target Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2020

Target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
 Target Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1.	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	6,15 %
2.	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	57,13
3.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	85,6
4.	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,397
5.	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,2 %
6.	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas menurut BPS	1,564
		Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/ atau dipantau	5.400
7.	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,44 th
		Angka harapan lama sekolah	17,22 th
8.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,36 th
9.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	61 %
10.	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	76,7 %
11.	kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,24
12.	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	42,34
13.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini pemeriksaan BPK WTP	WTP



2.1.3. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Penyusunan anggaran tahun 2020 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

2.1.3.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.1.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah



- menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - i. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - j. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - k. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian objek Hasil Pengelolaan Dana bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.1.3.1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017, dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBHCHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017, dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017, dan Tahun Anggaran 2016, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Pendapatan DBh-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

2.1.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



2. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

6. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
8. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah



tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.
10. Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan.
11. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
12. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan



2.1.3.1.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
10. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.

2.1.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target



capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

2.1.3.2.1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta



- Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - h. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.



4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.



6. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Per tanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan



keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1.3.2.2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2. Belanja Pegawai
 - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian



Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan



Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Belanja Modal

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKAPerangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.



Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Aktual.
- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan



jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.3. Pembiayaan Daerah

2.1.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2019.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
5. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2.1.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah



- daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
 3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
 4. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 5. Dalam Rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah.
 6. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.



7. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portfolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
8. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
9. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.2. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga dibuatlah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

20/NKB.YK/VIII/2020
1/NKB/DPRD/VIII/2020

Pada tanggal 19 Agustus 2020 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari



sektor-sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit.

Asumsi dasar yang pada perkembangannya mengalami perubahan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 2020

a. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.885.417.118.316,00 dan setelah perubahan menjadi Rp1.556.365.293.802,00.

b. Asumsi Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik target maupun sasarannya di tahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perubahan belanja daerah. Pada APBD 2020 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1.998.768.133.912,00 dan setelah perubahan menjadi Rp1.756.705.426.942,00

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD TA 2020 sebelum perubahan sebesar Rp153.831.015.596,00 kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp220.340.133.122,45.

2.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2020, dari sisi pendapatan daerah terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berdampak cukup signifikan pada perekonomian nasional dan daerah. Sampai dengan pertengahan tahun 2020, perkembangan perekonomian global, nasional, dan daerah belum menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini tentu berpengaruh pada perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY secara umum.

Aktivitas perekonomian Kota Yogyakarta yang didorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan mengakibatkan sektor perekonomian lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan yang cukup dalam. Penurunan tersebut pada akhirnya memberikan kontribusi negatif bagi Pendapatan Asli Daerah.



2.2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp671.770.478.946,00 dan setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp423.924.737.167,00.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2020, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2.2.1.2. Perubahan Dana Perimbangan

Arah kebijakan dana perimbangan pada tahun anggaran 2020 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dialokasikan berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.

Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar Rp908.779.706.475,00 dan menjadi sebesar Rp831.640.015.831,00 setelah perubahan.

Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp41.712.972.475,00 sebelum perubahan dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp47.645.930.000,00. Dana Alokasi Umum sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp701.377.143.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp631.639.948.000,00. Sedangkan Dana Alokasi Khusus sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp165.689.591.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp152.354.137.831,00.



2.2.1.3. Perubahan Dana Perimbangan

Arah kebijakan dana perimbangan pada tahun anggaran 2020 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dialokasikan berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
3. Keputusan Gubernur DIY Nomor 116/KEP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 8/KEP/2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp304.866.932.895,00 menjadi sebesar Rp300.800.540.804,00 pada perubahan anggaran tahun anggaran 2020.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah sebelum perubahan sebesar Rp27.057.600.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp29.332.900.000,00. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun anggaran 2020 sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp117.026.683.895,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp119.363.884.803,75; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp92.136.508.000,00 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp83.457.615.000,00; serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tetap sebesar Rp68.646.141.000,00.

2.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan pada data realisasi belanja baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai
Alokasi belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp681.991.005.406,00 dan menjadi sebesar Rp637.504.212.692,00 setelah perubahan.
2. Belanja Bunga
Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Belanja Subsidi



Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

4. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp62.515.172.200,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp50.123.433.400,00. Dengan kata lain, pemberian hibah setelah perubahan menurun sebesar Rp12.391.738.800,00 atau sebesar -19,82 persen.

5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pedoman ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp47.341.295.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp32.131.465.000,00. Dengan kata lain, pemberian bantuan sosial setelah perubahan menurun sebesar Rp15.209.830.000,00 atau sebesar -32,13 persen.

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2020 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2020 ini Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebelum perubahan sebesar Rp1.319.092.478,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.360.789.078,00.



8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, pada tahun 2020 bencana non alam berupa pandemi Covid-19, maka dalam rangka percepatan penanganan pandemi tersebut dialokasikan anggaran pada belanja tidak terduga untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Dengan demikian, terjadi penambahan besaran belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp174.257.424.843,45.

2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Belanja Langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender;
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis

2.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan sejumlah Rp153.831.015.596,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp220.340.133.122,45.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.



Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Secara ringkas perbandingan APBD 2020, KUPA 2020 dan APBDP 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

URAIAN	APBD 2020	KUPA 2020	APBD-P 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.885.417.118.316,00	1.556.365.293.801,75	1.636.876.158.348,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	671.770.478.946,00	423.924.737.167,00	476.918.678.411,89
Pajak Daerah	451.106.500.000,00	234.890.300.000,00	282.870.500.000,00
Retribusi Daerah	33.813.710.477,00	20.428.860.833,00	19.646.771.359,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.001.411.395,00	34.871.537.581,00	34.828.668.692,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	151.848.857.074,00	133.734.038.753,00	139.572.738.361,00
DANA PERIMBANGAN	908.779.706.475,00	831.640.015.831,00	840.241.969.349,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.712.972.475,00	47.645.930.000,00	53.509.342.577,00
Dana Alokasi Umum	701.377.143.000,00	631.639.948.000,00	631.639.948.000,00
Dana Alokasi Khusus	165.689.591.000,00	152.354.137.831,00	155.092.678.772,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.866.932.895,00	300.800.540.803,75	319.715.510.587,75
Hibah	27.057.600.000,00	29.332.900.000,00	62.517.650.000,00
Dana Darurat			-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Pemda Lainnya	117.026.683.895,00	119.363.884.803,75	119.363.884.804,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	92.136.508.000,00	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00
Bantuan Keuangan dari Prov / Pemda Lainnya	68.646.141.000,00	68.646.141.000,00	54.376.360.784,00
BELANJA DAERAH	1.998.768.133.912,00	1.756.705.426.924,00	1.837.219.591.471,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.666.565.084,00	895.377.325.013,00	967.028.159.996,09
Belanja Pegawai	681.991.005.406,00	637.504.212.692,00	640.994.760.065,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	62.515.172.200,00	50.123.433.400,00	50.123.433.400,00
Belanja Bantuan Sosial	47.341.295.000,00	32.131.465.000,00	32.131.465.000,00
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	-	-	-
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes, Parpol	1.319.092.478,00	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	174.257.424.843,00	242.417.712.453,09
BELANJA LANGSUNG	1.202.101.568.828,00	861.328.101.911,00	870.191.431.475,00
Belanja Pegawai	138.163.800.611,00		134.032.306.111,00
Belanja Barang dan Jasa	723.991.264.203,00		523.189.536.797,00
Belanja Modal	339.946.504.014,00		212.969.588.567,00
Surplus/(Defisit)	(113.351.015.596,00)	(200.340.133.122,25)	(200.343.433.122,45)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	220.343.433.122,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153.831.015.596,00	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	3.300.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.480.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	40.480.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pembiayaan Netto	113.351.015.596,00	200.340.133.122,45	200.343.433.122,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			



Terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 baik anggaran yang tercantum dalam APBD murni, KUPA maupun APBD Perubahan sebagai akibat adanya dinamika pembahasan baik di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) maupun akibat adanya evaluasi Gubernur DIY terhadap Raperda APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi keuangan daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kota Yogyakarta secara ringkas sebagaimana tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

a. Format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3.
Ringkasan APBD Kota Yogyakarta T.A 2020

Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	103,84
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23
1.2.	DANA PERIMBANGAN	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	91,35
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	99,41
1.3.1.	Pendapatan Hibah	62.517.650.000,00	59.813.911.135,00	95,68
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	101,34
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Prov atau Pemda lainnya	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	98,53
2.	BELANJA DAERAH	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	967.028.159.996,09	739.999.064.237,58	76,52
2.1.1.	Belanja Pegawai	640.994.760.065,00	600.497.942.504,00	93,68
2.1.4.	Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes & Parpol	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2.2.	BELANJA LANGSUNG	870.191.431.475,00	777.600.404.250,81	89,36
2.2.1.	Belanja Pegawai	134.032.306.111,00	128.212.237.274,78	95,66
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13
2.2.3.	Belanja Modal	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87
	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	(90,92)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	100,19
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	3.300.000,00	12.620.000,00	
3.1.7.	Penerimaan Pembiayaan-Pelepasan Investasi		410.000.000,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	100,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	382.914.304.828,36	-

b. Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Tabel 2.4.
Ringkasan APBD Kota Yogyakarta T.A 2020

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	5.1.1	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	103,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.126.772.729.936,75	1.105.993.726.262,42	98,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	92,81
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	63,90
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.3)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.a.4)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.b	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3)	-	-	-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Transfer Pemda Lainnya	5.1.1.2.c	173.740.245.587,75	174.544.677.393,42	100,46
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	101,34
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2)	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3)	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	98,53
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5.1.1.3	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16
BELANJA	5.1.2	1.835.858.802.393,09	1.516.238.679.410,39	82,59
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,43
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02
Belanja Barang	5.1.2.1.b	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90
BELANJA MODAL	5.1.2.2	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,46
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,46
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98,09
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82,66
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68
Belanja Tak Terduga		242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68
TRANSFER	5.1.2.4	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.a	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	777.359.018,00	777.359.018,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60
SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	(90,92)
PEMBIAYAAN	5.1.3			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	100,19
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.a	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	100,00
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.b	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.c	-	410.000.000,00	100,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.3.1.d	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.3.1.e	3.300.000,00	12.620.000,00	382,42
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	100,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.3	-	382.914.304.828,36	



2. 3.1. Pendapatan

Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 memiliki beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur dan menjadi landasan hukum pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada PD. Jogjatama Vishesha;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
10. Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
13. Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
14. Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
16. Perda Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;



23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2005 Penetapan Besaran Harga Sewa Pemakaian Lahan Bagi Pedagang Makanan / Minuman Didalam Kios Buku Lantai Ii Komplek Taman Pintar Kota Yogyakarta;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Swara Adhiloka;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
28. Perwal No 47 tahun 2010 ttg Penetapan Besaran Sewa Tanah dan atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah daerah untuk kegiatan Usaha;
29. Perwal No 73 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Sarana dan Prasarana di Taman Pintar Yogyakarta;
30. Perwal No 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar;
33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesa;
36. Perwal No. 19 Tahun 2013 Mekanisme dan tarif Pemanfaatan Area Komersial di Taman Pintar Yogyakarta;
37. Perwal Nomor 27 Tahun 2013 ttg Besaran Tarif Sewa Pasar Ikan Higienis
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar;
41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
44. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis RS Pratama Yogyakarta;
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi;



47. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta;
48. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2017 Tarif Pemanfaatan Fasilitas Di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
49. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
50. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik;
51. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
52. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online;
53. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
54. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta;
55. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Deposito; dan
56. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
57. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
58. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
59. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
60. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
61. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
62. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
63. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah;
64. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta;
65. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

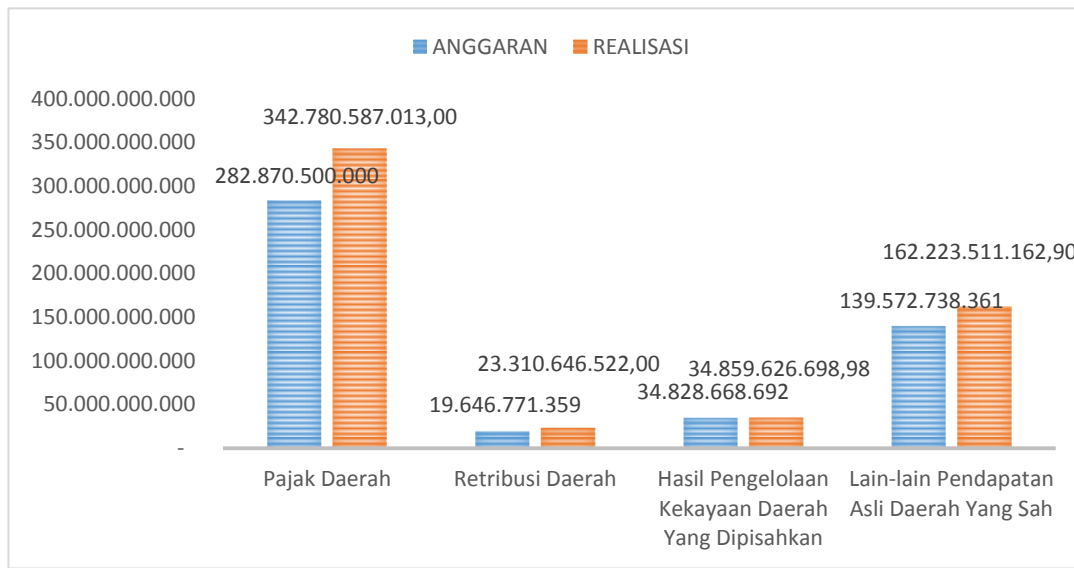


2.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp563.174.371.396,88 atau 118,09%, menurun 18,3 % dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp689.049.725.509,27 dimana semua komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah berhasil mencapai target di atas 100%. Secara grafis target dan realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020



Pencapaian target komponen PAD Tahun 2020 yang melampaui 100 % adalah Pajak Daerah sebesar 121,18%, Retribusi Daerah sebesar 118,65%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,09 % dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 116,23 %.

Dilihat dari komposisi PAD Kota Yogyakarta, maka kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dengan nominal Rp342.780.587.013,00 atau menyumbang PAD sebesar 60,87%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No.	Jenis PAD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Daerah	342.780.587.013,00	60,87%
2	Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	4,14%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.859.626.698,98	6,19%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	162.223.511.162,90	28,81%
	Jumlah	563.174.371.396,88	100%

Dilihat dari trend kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, menunjukkan adanya kontribusi yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 34,26 % maka 4 (empat) tahun berikutnya pada tahun 2020 sudah mencapai 33,13%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.6.

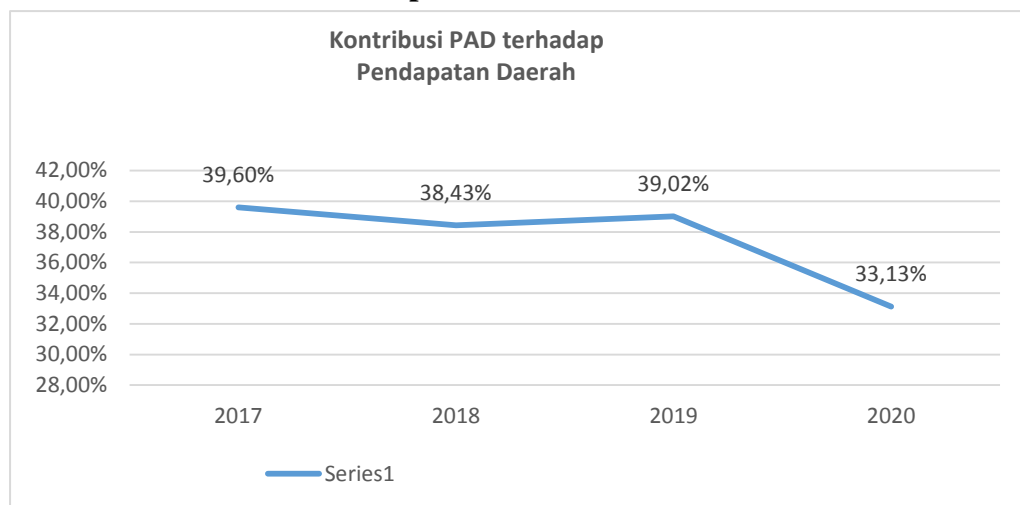
Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020

NO	TAHUN	PAD	PENDAPATAN DAERAH	KONTRIBUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	540.504.305.181,63	1.577.679.933.045,20	34,26%
2	2017	657.049.376.703,22	1.659.277.141.816,66	39,60%
3	2018	667.493.075.470,14	1.736.919.997.852,52	38,43%
4	2019	689.049.725.509,27	1.765.760.418.492,27	39,02%
5	2020	563.174.371.396,88	1.699.751.020.194,30	33,13%

Trend kontribusi PAD Kota Yogyakarta secara lebih jelas terlihat secara grafis sebagai berikut :

Gambar 2.2.

Tren Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020



2.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta pada Tahun 2020 masih mendominasi pada Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dengan kontribusi sebesar Rp1.105.993.726.262,42 atau mencapai 98,16%. Secara lebih detail, komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020

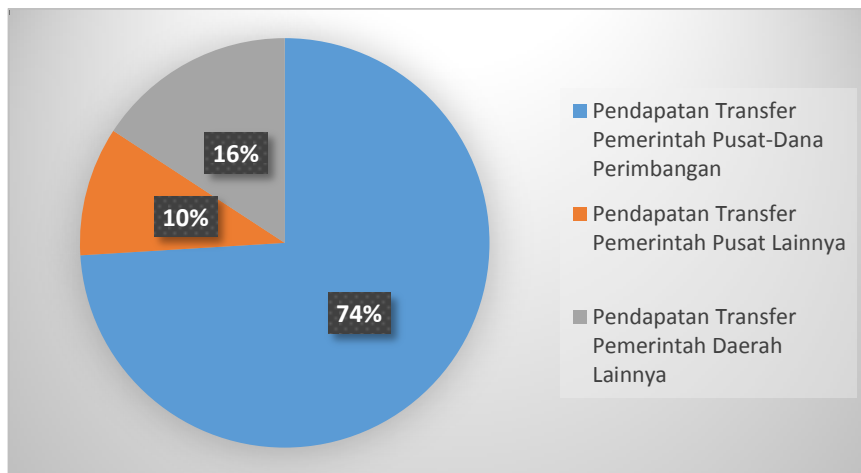
NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44%
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91%
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	173.740.245.587,75	174.544.677.393,42	100,46%
	JUMLAH	1.126.772.729.936,75	1.105.993.726.262,42	98,16%

Dilihat dari realisasi pencapaian target, Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020 tercapai sebesar 98,16 %, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tercapai sebesar 97,44 %, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tercapai sebesar 99,91 % dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tercapai sebesar 100,46 %.



Komposisi Pendapatan Transfer didominasi dari Dana Perimbangan dengan kontribusi sebesar 74,03 %, sisanya diperoleh dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 15,78 % dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 10,19 %. Secara grafis komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Komposisi Pendapatan Transfer Tahun 2020



2.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain PAD dan Pendapatan Dana Transfer, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp30.582.922.535,00 atau 92,16 % dari target yang ditetapkan.

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut hanya berasal dari Pendapatan Hibah. Secara lebih rinci komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Hibah	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16%
2	Dana Darurat	-	-	
3	Pendapatan Lainnya	-	-	
	JUMLAH	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16%

2.3.2. Belanja dan Transfer

2.3.2.1. Belanja

Realisasi penyerapan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.9.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
BELANJA	5.1.2	1.835.858.802.393,09	1.516.238.679.410,39	82,59
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,43
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02
Belanja Barang	5.1.2.1.b	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90
BELANJA MODAL	5.1.2.2	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	52.219.038.568,00	39.899.841.256,42	76,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	39.514.306.889,00	41.043.237.105,54	103,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	71.814.860.891,00	70.207.032.961,47	97,76
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	805.835.519,00	810.344.057,50	100,56
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	26.986.717.700,00	23.643.078.123,00	87,61
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68
Belanja Tak Terduga		242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68

Anggaran Belanja Daerah tercapai pada realisasi 82,59 %, yang terdiri dari komponen Belanja Operasi dengan realisasi 90,43 %, Belanja Modal 90,87 % dan Belanja Tak Terduga 30,68 %. Secara proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

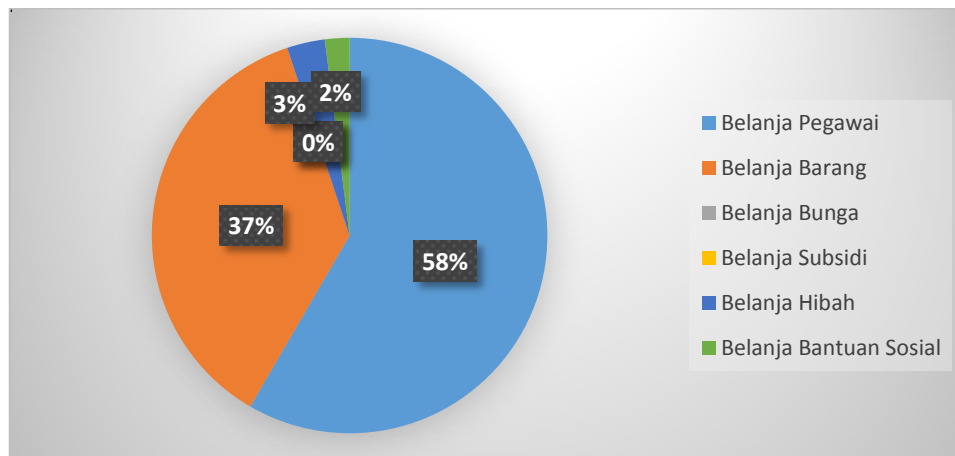
Tabel 2.10.
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2020

Uraian	Reff	Realisasi	Proporsi
1	2	3	4
BELANJA	5.1.2	1.516.238.679.410,39	100,00%
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.248.329.702.538,88	82,33%
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	728.710.179.778,78	48,06%
Belanja Barang	5.1.2.1.b	455.864.521.552,10	30,07%
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	38.725.063.808,00	2,55%
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	25.029.937.400,00	1,65%
BELANJA MODAL	5.1.2.2	193.523.645.423,93	12,76%
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	17.920.111.920,00	1,18%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	39.899.841.256,42	2,63%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	41.043.237.105,54	2,71%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	70.207.032.961,47	4,63%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	810.344.057,50	0,05%
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	23.643.078.123,00	1,56%
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	74.385.331.447,58	4,91%
Belanja Tak Terduga		74.385.331.447,58	4,91%



Proporsi terbesar Belanja Daerah berasal dari Belanja Operasi mencapai Rp1.248.329.702.538,88 atau 82,33 %, diikuti Belanja Modal dengan proporsi 12,76%. Sedangkan proporsi terkecil berasal dari Belanja Tak Terduga yang hanya 4,91 % dari total Belanja Daerah. Dilihat secara parsial, Belanja Operasi Tahun 2020 Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

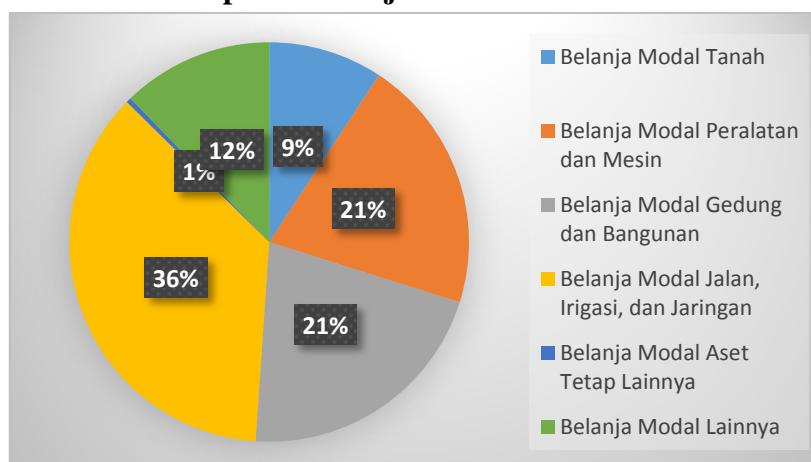
Gambar 2.4.
Komposisi Belanja Operasi Tahun 2020



Belanja Operasi Tahun 2020 didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp728.710.179.778,78 dengan proporsi 58,37% berturut-turut diikuti Belanja Barang dengan proporsi 36,52%, Belanja Hibah dengan proporsi 3,10% dan Belanja Bantuan Sosial dengan proporsi 2,01%

Sedangkan Belanja Modal Tahun 2020 Kota Yogyakarta, didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan proporsi sebesar 36,28 %. Secara lebih rinci, komposisi Belanja Modal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.5.
Komposisi Belanja Modal Tahun 2020



2.3.2.2. Transfer

Realisasi Transfer sebagai bagian dari Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020 mencapai Rp1.360.789.078,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Secara lebih rinci, komponen Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

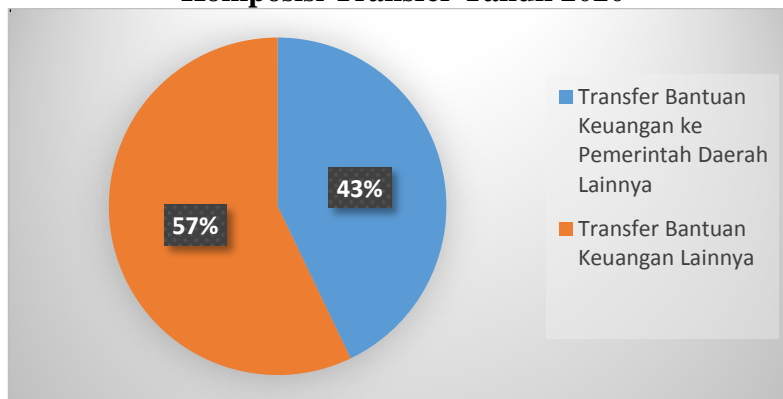


Tabel 2.11.
Target dan Realisasi Transfer Daerah Tahun 2020

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
TRANSFER	5.1.2.4	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.a	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	777.359.018,00	777.359.018,00	100,00

Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020 hanya terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp583.430.060,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp777.359.018,00. Secara grafis komposisi Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.6.
Komposisi Transfer Tahun 2020



2.3.3. Pembiayaan Daerah

2.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagai seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Penerimaan pada Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No.	Penerimaan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	100,00%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	410.000.000,00	100,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
6	Penerimaan Piutang Daerah	3.300.000,00	12.620.000,00	382,42%
7	Pelepasan Investasi	-	-	



	Jumlah	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	100,19%
--	--------	--------------------	--------------------	---------

Target Penerimaan terealisasi Rp220.762.753.122,45 atau 100,19%, dimana komponen Penerimaan Tahun 2020 hanya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp220.340.133.122,45, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp410.000.000,00 dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp12.620.000,00.

2.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13.

Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No.	Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan			
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00%
3	Pembayaran Pokok Utang			
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00%

Target pengeluaran tercapai realisasi pada angka Rp20.000.000.000,00 atau 100%, dimana pengeluaran pembiayaan tahun 2020 hanya satu komponen yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada PT. BPD DIY.

2.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp382.914.304.828,36. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel perkembangan SiLPA 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.14.

Perkembangan SiLPA APBD Kota Yogyakarta Tahun 2016 s.d. 2020

NO	TAHUN	SiLPA	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	117.651.486.141,87	-42,70%
2	2017	254.103.922.554,36	115,98%
3	2018	226.442.324.759,52	-10,89%
4	2019	220.340.133.122,45	-2,69%
5	2020	382.914.304.828,36	73,78%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2020 sebesar Rp382.914.304.828,36, naik 73,78% dibandingkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2019 yang besarnya Rp220.340.133.122,45.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	103,84
BELANJA	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60
Surplus (defisit)	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	(90,92)
PEMBIAYAAN			
1.Penerimaan Pembiayaan	220.343.433.122,45	220.762.753.122,45	100,19
2.Pengeluaran	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	200.343.433.122,45	200.762.753.122,45	100,21

**Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2019 dan 2020**

Uraian	2019	2020	%
PENDAPATAN	1.765.760.418.492,27	1.699.751.020.194,30	(3,74)
BELANJA	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	(12,51)
Surplus (defisit)	31.167.082.630,93	182.151.551.705,91	484,44
PEMBIAYAAN			
1.Penerimaan Pembiayaan	226.448.050.491,52	220.762.753.122,45	(2,51)
2.Pengeluaran	37.275.000.000,00	20.000.000.000,00	(46,34)
Pembiayaan Netto	189.173.050.491,52	200.762.753.122,45	6,13

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.699.751.020.194,30 atau 103,84% dari target sebesar Rp1.636.876.158.348,64 turun 3,74% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.765.760.418.492,27.

3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dana Perimbangan mempunyai kontribusi terbesar yaitu sebesar 48,17%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,13% serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 18,70%. Gambaran lebih lengkap realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Kontribusi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020
Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah**

Uraian	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
1 PAD	563.174.371.396,88	33,13
2 Dana Perimbangan	818.760.445.269,00	48,17
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	317.816.203.528,42	18,70
Pendapatan Daerah	1.699.751.020.194,30	100,00



Tabel 3.4 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09
2	Dana Perimbangan	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	99,41
Pendapatan Daerah		1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	103,84

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah

Uraian		2019	2020	%
1	PAD	689.049.725.509,27	563.174.371.396,88	(18,27)
2	Pendapatan Transfer	875.308.177.702,00	818.760.445.269,00	(6,46)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	201.402.515.281,00	317.816.203.528,42	57,80
Pendapatan Daerah		1.765.760.418.492,27	1.699.751.020.194,30	(3,74)

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp563.174.371.396,88 atau 118,09% dari target sebesar Rp476.918.678.411,89 menurun sebesar 18,27% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp689.049.725.509,27.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi PAD Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target	Realisasi	%
1.Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18
2.Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65
3.Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23
Jumlah PAD	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Uraian	2019	2020	%
1.Pajak Daerah	451.265.948.031,00	342.780.587.013,00	(24,04)
2.Retribusi Daerah	32.428.343.731,00	23.310.646.522,00	(28,12)
3.Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	28.975.003.950,01	34.859.626.698,98	20,31
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	176.380.429.797,26	162.223.511.162,90	(8,03)
Jumlah PAD	689.049.725.509,27	563.174.371.396,88	(18,27)



Dari tabel 3.6 terlihat bahwa untuk sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah terealisasi melebihi target. Secara lebih rinci berikut akan disampaikan target dan realisasi anggaran masing-masing sumber PAD.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri 10 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2020 melebihi target yaitu sebesar Rp342.780.587.013,00 atau sebesar 121,18% dari target Rp282.870.500,00 mengalami penurunan 24,04% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp451.265.948.031,00.

Target dan realisasi per jenis pajak Tahun Anggaran 2020 serta perkembangannya dibanding Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target	Realisasi	%
1.Pajak Hotel	63.000.000.000,00	78.279.066.037,00	124,25
2.Pajak Restoran	38.015.000.000,00	43.521.758.533,00	114,49
3.Pajak Hiburan	3.450.000.000,00	3.870.424.584,00	112,19
4.Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.156.071.238,00	123,12
5.Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	105,38
6.Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	115,69
7.Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	121,18
8. Pajak sarang burung walet	5.500.000,00	5.600.000,00	101,82
9. PBB	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	116,99
10. Pajak BPHTB	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	147,87
Jumlah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18

Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Jenis Pajak	2019	2020	%
1.Pajak Hotel	161.297.192.790,00	78.279.066.037,00	(51,47)
2.Pajak Restoran	63.237.228.654,00	43.521.758.533,00	(31,18)
3.Pajak Hiburan	12.702.230.080,00	3.870.424.584,00	(69,53)
4.Pajak Reklame	7.449.951.971,00	6.156.071.238,00	(17,37)
5.Pajak Penerangan Jalan	52.374.696.494,00	47.421.117.139,00	(9,46)
6.Pajak Parkir	3.050.479.181,00	1.851.049.591,00	(39,32)
7. Pajak Air Tanah	2.546.299.969,00	1.575.287.372,00	(38,13)
8. Pajak Sarang Burung	6.650.000,00	5.600.000,00	(15,79)
9. Pajak Bumi dan Bangunan	86.550.328.189,00	96.517.233.954,00	11,52
10. Pajak BPHTB	62.050.890.703,00	63.582.978.565,00	2,47
Jumlah	451.265.948.031,00	342.780.587.013,00	(24,04)

1) Pajak Hotel

Pada Tahun Anggaran 2020 pendapatan pajak hotel terealisasi sebesar Rp 78.279.066.037,00 atau sebesar 124,25% dari target sebesar Rp63.000.000.000,00, atau turun sebesar 51,47% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp161.297.192.790,00



Tercapainya realisasi pajak hotel antara lain karena adanya peningkatan kenaikan tingkat hunian pada jumlah kamar hotel karena penurunan room rate sebagai upaya hotel untuk menarik pengunjung di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara rutin dan penagihan secara insentif terhadap obyek pajak, adanya pemasangan alat pantau transaksi dan adanya peningkatan kunjungan wisata pada saat liburan (cuti bersama) yang mengakibatkan adanya peningkatan kunjungan Hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran terealisasi sebesar Rp43.521.758.533,00 atau sebesar 114,49% dari target sebesar Rp38.015.000.000,00 menurun 31,18% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.237.228.654,00

Tercapainya realisasi pajak restoran antara lain disebabkan karena bertambahnya tamu pembeli dengan go food/delivery pada masa pandemi serta tamu pembeli di restoran terutama bagi tamu hotel yang tidak menyediakan *food & beverage* selama masa pandemi.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp3.870.424.584,00 atau sebesar 112,19% dari target sebesar Rp3.450.000.000,00, menurun 69,53% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.702.230.080,00.

Tercapainya realisasi pajak hiburan antara lain disebabkan karena omset pendapatan bioskop sudah tinggi sebelum masa pandemi sebelum kemudian tutup setelah adanya pandemi, KRKB Gembiraloka sudah mulai menerima pengunjung secara terbatas, dan adanya usaha ketangkasan baru.

4) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame tahun 2020 sebesar Rp6.156.071.238,00 atau sebesar 123,12% dari target sebesar Rp5.000.000.000,00 menurun 17,37% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.449.951.971,00.

Meningkatnya realisasi pajak reklame antara lain disebabkan karena adanya pembayaran videotron dan billboard teralisasi sesuai perkiraan, bertambahnya reklame insidental, dan bertambahnya jumlah penyelenggaraan reklame berjalan berupa reklame yang terpasang di mobil box yang beroperasi di Wilayah Kota Yogyakarta.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp47.421.117.139,00 atau sebesar 105,38% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 mengalami penurunan 9,46% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp52.374.696.494,00.

Tercapainya Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena adanya pembayaran pelanggan PLN yang non subsidi meskipun dengan kenaikan tarif daya listrik. Sedangkan pelanggan PLN bersubsidi dibebaskan pembayarannya pada beberapa bulan masa pandemi.

6) Pajak Parkir

Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp1.851.049.591,00 atau sebesar 115,69% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.600.000.000,00, menurun sebesar 39,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.050.479.181,00.



Tercapainya realisasi Pajak Parkir disebabkan karena pembayaran sebelum pandemi sudah mencapai target tahapan dan setelah masa pandemi ada pembayaran tunggakan pajak parkir.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp1.575.287.372,00 atau sebesar 121,18% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.300.000.000,00, menurun sebesar 38,13% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.546.299.969,00

Tercapainya realisasi Pajak Air Tanah disebabkan karena banyak wajib pajak air tanah yang membayar SKPD air tanah yang sudah mendapat keringanan pajak selama masa pandemi.

8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet terealisasi Rp5.600.000,00 atau sebesar 101,82% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.500.000,00 menurun 15,79% dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.650.000,00.

Tercapainya target antara lain karena dilakukannya pembinaan kepada pengelola sarang burung walet untuk melakukan pembayaran pajak setelah transaksi jual beli.

9) Pajak PBB

Pajak PBB terealisasi sebesar Rp 96.517.233.954,00 atau sebesar 116,99% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp82.500.000.000,00, meningkat 11,52% dibanding tahun 2019 sebesar Rp86.550.328.189,00.

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain karena banyak wajib pajak yang membayar tagihan pajaknya setelah mendapatkan stimulus dan pengurangan pajak serta kebijakan bulan bebas denda. Selain itu juga dilakukan upaya jemput bola pelayanan PBB sampai ke tingkat kelurahan sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB.

10) Pajak BPHTB

Pajak BPHTB terealisasi sebesar Rp63.582.978.565,00 atau sebesar 147,87% dari target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.000.000.000,00 meningkat 2,47% dari tahun 2019 sebesar Rp62.050.890.703,00.

Tercapainya target Pajak BPHTB antara lain disebabkan karena adanya kenaikan NJOP PBB-P2 Tahun 2020 dan banyak wajib pajak BPHTB waris dan hibah waris yang melakukan pembayaran dan validasi di tahun 2020 karena adanya keringanan pajak BPHTB sebesar 75% sampai dengan Desember 2020.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 14 jenis. Sebagian besar jenis retribusi terealisasi melebihi target, beberapa jenis retribusi lainnya tidak mencapai target. Tabel 3.10 berikut memperlihatkan target dan realisasi masing-masing jenis retribusi.



Tabel 3.10 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.565.200,00	271.253.500,00	138,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	105,61
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	97.000.000,00	119.200.000,00	122,89
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	138,98
5	Retribusi Pelayanan Pasar	9.934.895.700,00	10.910.008.884,00	109,82
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	97,11
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	511.400.026,00	792.602.500,00	154,99
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.746.000,00	72.764.000,00	115,97
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.710.000,00	32.495.000,00	83,94
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	806.502.633,00	717.382.833,00	88,95
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.150.000,00	66.775.000,00	123,31
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	112.039.500,00	113.929.200,00	101,69
13	Retribusi IMB	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	186,02
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	202.435.800,00	254.245.800,00	125,59
	Jumlah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65

Tabel 3.11 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020

	Jenis Retribusi	2019	2020	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	292.521.700,00	271.253.500,00	(7,27)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.820.420.597,00	2.797.792.305,00	(26,77)
3	Retribusi Pelayanan Pemakanan dan pengabuan mayat	123.580.000,00	119.200.000,00	(3,54)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.562.625.000,00	4.618.765.000,00	(29,62)
5	Retribusi Pelayanan Pasar	14.788.015.434,00	10.910.008.884,00	(26,22)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	830.330.000,00	590.275.000,00	(28,91)
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	791.072.500,00	792.602.500,00	0,19
8	Retribusi Tera/ Tera Ulang		72.764.000,00	
9	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	67.880.000,00	32.495.000,00	(52,13)
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.581.164.000,00	717.382.833,00	(54,63)
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	89.685.000,00	66.775.000,00	(25,54)
12	Retr. Penj. Produksi Usaha Daerah	298.213.000,00	113.929.200,00	(61,80)
13	Retribusi IMB	2.961.112.800,00	1.953.157.500,00	(34,04)
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	221.723.700,00	254.245.800,00	14,67
	Jumlah	32.428.343.731,00	23.310.646.522,00	(28,12)

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp23.310.646.522,00 atau 118,65% dari target sebesar Rp19.646.771.359,00, menurun 28,12 % dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp32.428.343.731,00. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 14 jenis. Optimalisasi retribusi daerah terus diupayakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 jenis Retribusi yang realisasinya mencapai target yaitu:



1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp271.253.500,00 atau sebesar 138% dari target sebesar Rp196.565.200,00 atau menurun sebesar 7,27% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp292.521.700,00,00.

Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan, pengaruh kondisi cuaca yang mengakibatkan banyak hewan peliharaan sakit, dan adanya program lanjutan pengawasan kualitas air di Puskesmas dan Dinkes dalam 3 bulan terakhir sehingga terjadi peningkatan permintaan pengujian sampel untuk pengujian kualitas air.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan terealisasi sebesar Rp2.797.792.305,00 atau sebesar 105,61% dari target sebesar Rp2.649.099.500,00 atau menurun 26,77% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.820.420.597,00.

Tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan adanya pembayaran piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2019, dan meningkatnya koordinasi antara petugas retribusi UPT dengan pengelola pemungutan retribusi di wilayah yang didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu sehingga dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan retribusi dapat diminimalisir.

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pemakaman Umum pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp119.200.000,00 atau sebesar 122,89% dari target Rp97.000.000,00, menurun 3,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp123.580.000,00.

Tercapainya pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan adanya kemudahan mekanisme pembayaran karena sudah tersistem melalui JSS sehingga memudahkan warga untuk mengakses. Adanya pembayaran tunggakan ditahun-tahun sebelumnya dan juga adanya penambahan penggunaan tempat pemakaman karena pandemi Covid-19 juga meningkatkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp10.910.008.884,00 atau sebesar 109,92% dari target sebesar Rp9.934.895.700,00 atau menurun 26,25% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.788.015.434,00.

Tercapainya pendapatan retribusi pelayanan pasar disebabkan karena adanya penyediaan fasilitas protokol kesehatan yang memadai dan meningkatnya kesadaran pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan ekonomi di pasar sudah berangsur normal sejak triwulan III.



5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp.4.618.765.000,00 atau sebesar 138,98% dari target sebesar Rp3.323.385.000,00, menurun 29,62% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.562.625.000,00.

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena aktivitas ekonomi yang sudah mulai beroperasi lagi meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melebihi perkiraan.

6) Retribusi Pengolahan Air Limbah

Retribusi Pengolahan Air Limbah terealisasi sebesar Rp792.602.500,00 atau sebesar 154,99% dari target sebesar Rp511.400.026,00 atau meningkat 0,19% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp791.072.500,00.

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena petugas aktif melakukan sosialisasi sebelum adanya pandemi Covid-19 sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu meningkat.

7) Retribusi Tera/ Tera Ulang

Retribusi Tera/ Tera Ulang terealisasi sebesar Rp72.764.000,00 atau sebesar 115,97% dari target sebesar Rp62.746.000,00

Tercapainya target pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian tera/ tera ulang relatif tinggi, petugas aktif melakukan usaha jemput bola di lokasi, serta banyak wajib retribusi yang berasal dari luar daerah melakukan pengujian di UPT Metrologi Kota Yogyakarta.

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp66.775.000,00 atau sebesar 123,31% dari target sebesar Rp54.150.000,00, menurun 25,54% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.685.000,00.

Tercapainya target pendapatan retribusi rumah potong hewan antara lain disebabkan karena adanya penambahan jagal baru yang aktif memotongkan sapi di RPH Giwangan.

9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp.113.929.200,00 atau sebesar 101,69% dari target sebesar Rp112.039.500,00, menurun 61,80% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp298.213.000,00.

Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan karena hasil penjualan pada komoditas tanaman hias dan buah-buahan meningkat akibat adanya peningkatan animo masyarakat untuk budidaya pertanian dan tanaman hias selama masa pandemi Covid-19.

10) Retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 1.953.157.500,00 atau sebesar 186,02% dari target sebesar Rp1.050.000.000,00 menurun 34,04% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.961.112.800, 00.



Tercapainya target pendapatan Retribusi Izin Membangun Bangunan (IMB) antara lain karena adanya promosi investasi melalui media sosial dan pelayanan secara online sehingga memudahkan pemohon untuk mengurus perizinan IMB.

11) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp254.245.800,00 atau sebesar 125,59% dari target sebesar Rp202.435.800,00 meningkat 14,67% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp221.723.700,00.

Tercapainya target pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA disebabkan karena banyak tenaga kerja asing yang sudah mulai bekerja pada perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta sehingga pandemi Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan retribusi.

Sebagian jenis retribusi tidak mencapai target yaitu:

1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp590.275.000,00 atau sebesar 97,11% dari target Rp607.842.000,00, menurun 28,91% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp830.330.000,00.

Hal ini antara lain disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak beroperasi selama 2 bulan, dan pemilik kendaraan lebih memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan primer.

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp32.495.000,00 atau sebesar 83,94% dari target sebesar Rp38.710.000,00, menurun 52,13% dibanding tahun 2019 sebesar Rp67.880.000,00.

Tidak tercapainya target pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak event yang dibatalkan sehingga berimbas pada menurunnya jumlah penggunaan/peminjaman kekayaan daerah.

3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp717.382.833,00 atau sebesar 88,95% dari target sebesar Rp806.502.633,00, menurun 54,63% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.581.164.000,00.

Hal ini antara lain karena belum pulihnya aktivitas wisata di Kota Yogyakarta akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga jumlah kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir menurun.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari PDAM Tirtamarta, PD BPR Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan PD



Jogjatama Vishesha. Dasar pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah:

- 1) PDAM Tirtamarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 76 Tahun 2019 sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- 2) PD BPR Bank Jogja, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
- 3) PD Jogjatama Vishesha, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

Adapun perkembangan Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020 PDAM Tirtamarta, PD. BPR Bank Jogja, BPD, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan PD Jogjatama Vishesha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan APBD Tahun Anggaran 2019 – 2020

Uraian	2019	2020	%
1. PDAM Tirtamarta	802.301.741,50	693.501.557,50	(13,56)
2. BPR. Bank Jogja	9.754.106.355,00	12.265.548.921,00	25,75
3. BPD	18.340.935.744,08	21.829.330.811,85	19,02
4. BUKP	57.146.041,43	71.245.408,63	24,67
5. PD Jogjatama Vishesha	20.514.068,00	-	(100,00)
Jumlah	28.975.003.950,01	34.859.626.698,98	20,31

Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp34.859.626.698,98 meningkat 20,31% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp28.975.003.950,01 yang berasal dari PDAM Tirtamarta, PD BPR Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah, BUKP dan PD Jogjatama Vishesha. Realisasi dari PDAM Tirtamarta sebesar Rp693.501.557,50 menurun 13,56%, PD BPR Bank Jogja sebesar Rp12.265.548.921,00 meningkat 25,75%, Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp21.829.330.811,85 meningkat 19,02%, laba BUKP sebesar Rp71.245.408,63 meningkat 24,67% dan laba PD Jogjatama Vishesha sebesar Rp0,00 menurun 100% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 hal ini disebabkan karena PD Jogjatama Vishesha mengalami kerugian pada tahun 2019.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp162.223.511.162,90 atau sebesar 116,23% dari target sebesar Rp139.572.738.360,89. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.13 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
APBD Tahun Anggaran 2020**

	Uraian	Target	Realisasi	%	Proporsi
1	Hasil Penjualan aset Daerah	1.513.815.076,00	1.620.611.826,00	107,05	1,00
2	Jasa Giro	3.550.000.000,00	6.167.302.851,00	173,73	3,80
3	Bunga Deposito	5.144.000.000,00	6.242.796.178,63	121,36	3,85
4	TPTGR	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.875.791,00	293.507.070,32	7572,83	0,18
6	Pendapatan denda pajak	941.310.969,00	1.210.226.621,00	128,57	0,75
7	Pendapatan denda retribusi	220.821.600,00	378.394.800,00	171,36	0,23
8	Pendapatan dari Pengembalian	412.158.358,89	628.516.419,06	152,49	0,39
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	55.545.000,00	55.545.000,00	100,00	0,03
10	Pendapatan dari barang milik daerah	842.241.600,00	1.401.713.300,00	166,43	0,86
11	Pendapatan BLUD Taman Pintar	6.780.000.000,00	4.887.231.981,00	72,08	3,01
12	Pendapatan BLUD RSUD	75.296.074.808,00	91.668.436.716,25	121,74	56,51
13	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.247.478.259,00	3.465.105.692,10	106,70	2,14
14	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.458.891.000,00	23.047.942.795,00	98,25	14,21
15	Pendapatan Rumah Sakit Pratama	15.544.227.518,00	17.954.638.518,95	115,51	11,07
16	Pendapatan BLUD UPT Logam	309.417.800,00	324.574.256,00	104,90	0,20
17	Denda hasil operasi yustisi	124.214.000,00	138.046.000,00	111,14	0,09
18	Pendapatan BUKP	16.734.314,00	32.290.672,59	192,96	0,02
19	Penyelenggaraan PMPS	-	-	0,00	0,00
20	Jaminan Bongkar	277.476.460,00	306.549.309,00	110,48	0,19
21	Pendapatan bunga pajak	785.449.111,00	1.025.490.354,00	130,56	0,63
22	Pendapatan bunga retribusi	20.325.896,00	39.356.224,00	193,63	0,02
23	Pendapatan dari pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar	1.028.180.800,00	1.334.734.578,00	129,82	0,82
		139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23	100,00

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp 91.668.436.716,25 (56,51%), Pendapatan BLUD Puskesmas Rp23.047.942.795,00 (14,21%), Pendapatan RS Pratama Rp17.954.638.518,95 (11,07%), Bunga Deposito sebesar Rp6.242.796.178,63 (3,85%), Jasa Giro sebesar Rp 6.167.302.851,00 (3,80%), Pendapatan BLUD Taman Pintar Rp4.887.231.981,00 (3,01%), Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis sebesar Rp3.465.105.692,10 (2,14%), Pendapatan dari Pengembalian Rp628.516.419,06 (0,39%), Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp1.210.226.621,00 (0,75%), Pendapatan Bunga Pajak sebesar Rp1.025.490.354,00 (0,63%), Pendapatan dari barang milik daerah sebesar Rp1.401.713.300,00 (0,86%), Pendapatan dari Pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar sebesar Rp1.334.734.578,00 (0,82%), Hasil Penjualan Aset Daerah sebesar Rp1.620.611.826,00 (1%), Pendapatan BLUD UPT Logam sebesar Rp324.574.256,00 (0,20%), Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp293.507.070,32 (0,18%), Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp 378.394.800,00 (0,23%), Jaminan Bongkar sebesar Rp306.549.309,00 (0,19%), Denda hasil operasi yustisi sebesar Rp138.046.000,00 (0,09%), Pendapatan Bunga Retribusi sebesar Rp39.356.224,00 (0,02%), Pendapatan BUKP sebesar Rp32.290.672,59 (0,02%), TPTGR sebesar Rp500.000,00 (0,00%), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rp. 55.545.000,00 (0,03%).



Dana Perimbangan

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp818.760.445.269,00 atau sebesar 97,44% dari target sebesar Rp840.241.969.349,00, menurun sebesar 6,46% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp875.308.177.702,00. Target dan realisasi Dana Perimbangan berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	91,35
2	Dana Alokasi Umum	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30
3	Dana Alokasi Khusus	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97
	Jumlah	840.241.969.349,00	818.760.445.269,00	97,44

Tabel 3.15 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 dan 2020

No	Uraian	2019	2020	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.975.322.400,00	48.878.978.276,00	68,69
2	Dana Alokasi Umum	700.372.564.000,00	627.247.170.000,00	(10,44)
3	Dana Alokasi Khusus	145.960.291.302,00	142.634.296.993,00	(2,28)
	Jumlah	875.308.177.702,00	818.760.445.269,00	(6,46)

a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pada Tahun Anggaran 2020 pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp48.878.978.276,00 atau 91,35% dari target sebesar Rp53.509.342.577,00. Apabila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp28.975.322.400,00 pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak meningkat sebesar 68,69%. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi sumber-sumber Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	92,81
	PPH 25,29 dan 21	45.569.393.017,00	43.680.510.229,00	95,85
	Bagi Hasil PBB:	5.226.991.301,00	3.464.788.688,00	66,29
	Bagi hasil PBB sektor pertambangan & Migas	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	5.226.991.301,00	3.464.788.688,00	66,29
	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	63,90
	Provisi SD Hutan	93.260.759,00	35.906.013,00	38,50
	SDA Perikanan	1.651.338.439,00	788.276.289,00	47,74
	Pertambangan Minyak Bumi	424.188,00	788.301,00	185,84
	Cukai Tembakau	967.934.873,00	908.708.756,00	93,88
	Jumlah	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	91,35



Perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020

No	Uraian	2019	2020	%
1	Bagi Hasil Pajak	27.070.845.600,00	47.145.298.917,00	74,16
	PPh 25,29 dan 21	23.314.737.000,00	43.680.510.229,00	87,35
	Bagi hasil PBB:	3.756.108.600,00	3.464.788.688,00	(7,76)
	Bagi hasil PBB sektor pertambangan & Migas	0,00	0,00	-
	Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3.756.108.600,00	3.464.788.688,00	(7,76)
	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	-	0,00	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.904.476.800,00	1.733.679.359,00	(8,97)
	Provisi SD Hutan	1.782.000,00	35.906.013,00	1.914,93
	SDA Perikanan	590.155.800,00	788.276.289,00	33,57
	Pertambangan Minyak Bumi		788.301,00	-
	Cukai Tembakau	1.312.539.000,00	908.708.756,00	(30,77)
	Jumlah	28.975.322.400,00	48.878.978.276,00	68,69

Bagi Hasil Pajak pada tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp47.145.298.917,00 atau 92,81% dari target sebesar Rp50.796.384.318,00 meningkat 74,16% dari tahun 2019 sebesar Rp27.070.845.600,00.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp43.680.510.229,00 atau sebesar 95,85% dari target sebesar Rp45.569.393.017,00, meningkat 87,35% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.314.737.000,00.

Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp3.464.788.688,00 atau sebesar 66,29% dari target Rp5.226.991.301,00 menurun sebesar 7,76% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.756.108.600,00.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.733.679.359,00 atau sebesar 63,90% dari target sebesar Rp2.712.958.259,00, menurun 8,97% dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.904.476.800,00.

Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.733.679.359,00 terdiri dari Provisi sumber Daya Hutan sebesar Rp35.906.013,00, Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp788.276.289,00, Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp. 788.301,00 dan dari Cukai Tembakau sebesar Rp908.708.756,00.

b. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp627.247.170.000,00 atau 99,30% dari target, dan menurun sebesar 10,44% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp700.372.564.000,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp142.634.296.993,00 atau 91,97% dari target sebesar Rp155.092.628.772,00, menurun sebesar 2,28% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp145.960.291.302,00. Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp42.628.557.012,00 yang dipergunakan untuk bidang Pelayanan Rujukan sebesar Rp15.502.024.106,00, bidang Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp1.129.743.474,00, bidang Keluarga Berencana sebesar Rp891.681.800,00, bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp0,00, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp2.968.890.802,00, Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.556.255.000,00, bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah



(Jalan) sebesar Rp7.039.472.000,00, bidang pendidikan sebesar Rp1.243.120.000,00, bidang Pengendalian Penyakit sebesar Rp1.485.526.105,00, DAK Sanitasi sebesar Rp0,00, bidang Jalan sebesar Rp6.224.252.000,00, dan bidang pariwisata sebesar Rp3.587.591.725,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp100.005.739.981,00 yang dipergunakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp7.001.400.000,00, Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp67.379.612.000,00, Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp20.349.146.772,00, Akreditasi Puskesmas Rp 0,00, Jaminan Persalinan Rp0,00, Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp1.522.849.200,00, Pelayanan Adminduk Rp1.366.399.230,00, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp1.605.487.500,00, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp 551.028.879,00 dan Dana Pelayanan Kepariwisata Rp229.816.400,00.

3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp317.816.203.528,42,00 atau 99,41% dari target sebesar Rp 319.715.510.587,75 yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp59.813.911.135,00 atau 95,68%, yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp28.836.922.535,00, Pendapatan Hibah dari Luar Negeri sebesar Rp1.746.000.000,00 berasal dari Australia dan digunakan membiayai kegiatan sanitasi di Kota Yogyakarta untuk pembangunan sambungan rumah dan saluran pembawa air limbah dan Pendapatan Hibah Dana BOSNAS Rp29.230.988.600,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi terealisasi sebesar Rp120.965.338.876,00 atau 101,34%, yang bersumber Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp47.368.670.845,00, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp18.535.933.793,00, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor sebesar Rp29.209.668.052,00, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp40.333.314,00, dan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp25.810.732.872,00.

Pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang dianggarkan Rp83.457.615.000,00 terealisasi sebesar Rp83.457.615.000,00 atau 100% berupa Dana Insentif Daerah.

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp54.376.360.784,00 terealisasi Rp53.579.338.517,42 atau 98,53% yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan sebesar Rp53.113.338.517,42, Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (2 kelurahan) sebesar Rp286.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Jambanisasi (15 penerima) sebesar Rp180.000.000,00.

3.2. Belanja

Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.517.599.468.488,39 atau sebesar 82,60% dari anggaran, menurun sebesar 12,51% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.734.593.335.861,34. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya refocusing APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19. Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 3.18.



Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target	Realisasi	%	Proporsi
Belanja Tidak Langsung	967.028.159.996,09	739.999.064.237,58	76,52	48,76
Belanja Pegawai	640.994.760.065,00	600.497.942.504,00	93,68	
Belanja Bunga	-	-	-	
Bunga Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26	
Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	
Belanja Tidak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	
Belanja Langsung	870.191.431.475,00	777.600.404.250,81	89,36	51,24
Belanja Pegawai	134.032.306.111,00	128.212.237.274,78	95,66	
Belanja Barang	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13	
Belanja Modal	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87	
Jumlah Belanja	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60	

Perkembangan Realisasi Belanja APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Uraian	2019	2020	%
Belanja Tidak Langsung	716.969.657.199,00	739.999.064.237,58	3,21
Belanja Pegawai	623.730.246.194,00	600.497.942.504,00	(3,72)
Belanja Bunga	-	-	-
Bunga Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	79.389.047.945,00	38.725.063.808,00	(51,22)
Belanja Bantuan Sosial	11.551.423.000,00	25.029.937.400,00	116,68
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.981.246.996,00	1.360.789.078,00	(31,32)
Belanja Tidak Terduga	317.693.064,00	74.385.331.447,58	23.314,21
Belanja Langsung	1.017.623.678.662,34	777.600.404.250,81	(23,59)
Belanja Pegawai	136.801.816.234,28	128.212.237.274,78	(6,28)
Belanja Barang	553.387.490.228,89	455.864.521.552,10	(17,62)
Belanja Modal	327.434.372.199,17	193.523.645.423,93	(40,90)
Jumlah Belanja	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	(12,51)

3.2.1. Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja APBD sebesar 48,76%. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp739.999.064.237,58 meningkat sebesar 3,21% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp716.969.657.199,00 hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya realisasi belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp640.994.760.065,00 terealisasi sebesar Rp600.497.942.504,00 atau 93,68% dari anggaran atau menurun 3,72% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp623.730.246.194,00. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk belanja untuk tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.



Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp50.123.433.400,00 terealisasi sebesar Rp38.725.063.808,00 atau 77,26% dari anggaran yang antara lain merupakan hibah kepada Pemerintah sebesar Rp884.573.000,00, hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp4.765.617.366,00, BOS kepada SD Swasta sebesar Rp12.551.989.366,00, BOS kepada SMP Swasta sebesar Rp8.402.448.829,00, BOS kepada PAUD Swasta sebesar Rp10.185.562.199,00, dan Dana BOP Kesejahteraan Rp1.934.873.048,00. Realisasi Belanja Hibah menurun 51,22% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp79.389.047.945,00. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya refocusing APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp32.131.465.000,00 terealisasi sebesar Rp25.029.937.400,00 atau 77,90% dari anggaran yang antara lain digunakan untuk Bantuan Sosial Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat sebesar Rp135.000.000,00, dan Bantuan Sosial Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan sebesar Rp24.894.937.400,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial meningkat 116,68% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp11.551.423.000,00.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.360.789.078,00 terealisasi sebesar Rp1.360.789.078,00 atau 100% dari anggaran yang antara lain digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Provinsi DIY sebesar Rp583.430.060,00 dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp777.359.018,00 dengan rincian untuk PDI-P sebesar Rp284.739.534,00, Demokrat sebesar Rp33.364.172,00, PAN sebesar Rp119.496.942,00, PKS sebesar Rp86.828.862,00, Golkar sebesar Rp58.857.680,00, PPP sebesar Rp27.344.010,00, Gerindra Rp107.570.336,00 dan Nasdem sebesar Rp59.157.482,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik menurun 31,32% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp1.981.246.996,00.

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp242.417.712.453,09 terealisasi sebesar Rp74.385.331.447,58 atau 30,68% dari anggaran, yang digunakan untuk mengembalikan kelebihan pendapatan pajak sebesar Rp167.029.034,00, tanggap darurat bencana Covid-19 di Kota Yogyakarta sebesar Rp73.706.075.971,00 serta mengembalikan sisa belanja Dana Hibah Pemerintah Pusat atas nama Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp512.226.442,58. Realisasi Belanja Tidak Terduga meningkat 23.314,21% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp317.693.064,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya refocusing APBD Tahun Anggaran 2020 yang dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta melalui Belanja Tidak Terduga.

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Proporsi belanja langsung terhadap Belanja APBD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 51,24%. Realisasi belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp777.600.404.250,81 atau 89,36% dari anggaran yang terdiri dari belanja pegawai Rp128.212.237.274,78, belanja barang jasa Rp455.864.521.552,10 dan belanja modal Rp193.523.645.423,93. Realisasi Belanja langsung menurun 23,59% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp1.017.623.678.662,34 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp136.801.816.234,28, belanja barang Rp553.387.490.228,89, dan belanja modal Rp327.434.372.199,17.



Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target	Realisasi	%	Proporsi
Belanja Operasi	1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,43	82,26
Belanja Pegawai	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02	
Belanja Barang dan Jasa	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13	
Belanja Bunga	-	-	-	
Bunga Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26	
Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90	
Belanja Modal	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87	12,75
Belanja Modal Tanah	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,16	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,46	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,46	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98,09	
Belanja Modal Lainnya	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82,66	
Belanja Tak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	4,90
Belanja Tak Terduga	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	
Belanja Transfer	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	0,09
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan ke	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Lainnya	777.359.018,00	777.359.018,00	100,00	
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
Jumlah Belanja dan transfer	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60	

3.2.2. Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dan Proporsi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi terhadap Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.21 Realisasi dan Proporsi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi terhadap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Realisasi	Proporsi
	Urusan Wajib:	1.008.331.743.150,60	66,44
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	800.505.635.245,57	52,75
	-Pendidikan	336.286.388.976,00	22,16
	-Kesehatan	324.743.706.389,73	21,40
	-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.496.478.154,69	5,11
	-Perumahan	17.993.662.434,28	1,19
	-Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.388.570.989,90	2,20
	-Sosial	10.596.828.300,97	0,70
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	207.826.107.905,03	13,69
	-Tenaga Kerja	1.728.358.974,40	0,11
	-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.556.228.952,91	0,30
	-Pangan	578.227.860,00	0,04
	-Pertanahan	20.670.081.398,00	1,36
	-Lingkungan hidup	41.106.819.048,49	2,71
	-Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4.934.665.617,00	0,33
	-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.550.142.898,74	4,85
	-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.152.410.321,00	0,34
	-Perhubungan	13.662.738.371,02	0,90
	-Komunikasi dan Informatika	13.941.124.652,65	0,92
	-Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah	5.248.497.309,40	0,35
	-Penanaman Modal	5.622.052.163,00	0,37
	-Kepemudaan dan Olah Raga	3.658.268.845,00	0,24
	-Statistik	39.667.000,00	0,00
	-Persandian	1.414.526.650,00	0,09
	-Kebudayaan	1.996.455.648,00	0,13
	-Perpustakaan	2.156.872.826,90	0,14
	-Kearsipan	5.704.096.536,52	0,38
	-Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.104.872.832,00	0,14
III	Urusan Pilihan	58.902.514.488,55	3,88
	-Pertanian	6.602.604.489,00	0,44
	-Pariwisata	19.736.346.212,27	1,30
	-Kelautan dan Perikanan	914.400.700,00	0,06
	-Perdagangan	17.339.207.732,78	1,14
	-Industri	14.282.633.554,50	0,94
	-Ketransmigrasian	27.321.800,00	0,00
IV	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang	397.257.426.285,45	26,18
	-Perencanaan	5.739.097.239,50	0,38
	-Penelitian dan Pengembangan	818.142.050,00	0,05
	-Sekretariat Daerah	20.663.059.492,90	1,36
	-Sekretariat DPRD	42.121.045.842,30	2,78
	-Inspektorat	4.732.018.771,74	0,31
	-Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	153.478.795.369,00	10,11
	-Keuangan	169.705.267.520,01	11,18
V	Urusan Keistimewaan	53.107.784.563,79	3,50
	-Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.096.595.764,35	2,25
	-Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.188.868.300,37	0,08
	-Dinas Kebudayaan	6.147.293.368,00	0,41
	-Dinas Pariwisata	7.375.766.866,23	0,49
	-Sekretariat (Bagian Organisasi)	157.614.750,00	0,01
	-Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	337.270.550,00	0,02
	-Dinas Pertanian	625.673.000,00	0,04
	-Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.178.701.964,84	0,21
	Jumlah	1.517.599.468.488,39	100,00



Tabel 3.22 Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi APBD Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	875.929.304.647,00	800.505.635.245,57	91,39
	-Pendidikan	353.886.851.455,00	336.286.388.976,00	95,03
	-Kesehatan	375.449.756.413,00	324.743.706.389,73	86,49
	-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.136.069.127,00	77.496.478.154,69	94,35
	-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.494.909.554,00	17.993.662.434,28	97,29
	-Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	34.897.770.491,00	33.388.570.989,90	95,68
	-Sosial	11.063.947.607,00	10.596.828.300,97	95,78
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	220.870.215.942,00	207.826.107.905,03	94,09
	-Tenaga Kerja	1.752.583.000,00	1.728.358.974,40	98,62
	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.883.574.754,00	4.556.228.952,91	93,30
	-Pangan	582.623.056,00	578.227.860,00	99,25
	-Pertanahan	24.518.575.868,00	20.670.081.398,00	84,30
	- Lingkungan hidup	42.778.234.700,00	41.106.819.048,49	96,09
	- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5.101.826.500,00	4.934.665.617,00	96,72
	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.260.689.028,00	73.550.142.898,74	96,45
	-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.543.018.760,00	5.152.410.321,00	92,95
	- Perhubungan	15.434.690.273,00	13.662.738.371,02	88,52
	-Komunikasi dan Informatika	14.710.081.550,00	13.941.124.652,65	94,77
	-Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah	5.455.193.540,00	5.248.497.309,40	96,21
	-Penanaman Modal	5.916.526.000,00	5.622.052.163,00	95,02
	-Kepemudaan dan Olah Raga	3.962.005.992,00	3.658.268.845,00	92,33
	- Statistik	43.178.000,00	39.667.000,00	91,87
	-Persandian	1.419.064.000,00	1.414.526.650,00	99,68
	-Kebudayaan	2.226.845.347,00	1.996.455.648,00	89,65
	-Perpustakaan	2.170.903.601,00	2.156.872.826,90	99,35
	-Kearsipan	5.881.012.991,00	5.704.096.536,52	96,99
	- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.229.588.982,00	2.104.872.832,00	94,41
III	Urusan Pilihan	68.068.106.841,00	58.902.514.488,55	86,53
	-Pertanian	6.828.378.551,00	6.602.604.489,00	96,69
	-Pariwisata	25.394.968.834,00	19.736.346.212,27	77,72
	-Kelautan dan Perikanan	931.201.616,00	914.400.700,00	98,20
	-Perdagangan	20.027.693.505,00	17.339.207.732,78	86,58
	-Perindustrian	14.857.991.335,00	14.282.633.554,50	96,13
	-Transmigrasi	27.873.000,00	27.321.800,00	98,02
IV	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	618.639.603.257,09	397.257.426.285,45	64,21
	-Perencanaan	5.937.730.783,00	5.739.097.239,50	96,65
	-Penelitian dan Pengembangan	832.013.620,00	818.142.050,00	98,33
	-Sekretariat Daerah	22.417.871.383,00	20.663.059.492,90	92,17
	-Sekretariat DPRD	53.494.473.438,00	42.121.045.842,30	78,74
	-Inspektorat	4.971.074.436,00	4.732.018.771,74	95,19
	-Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	172.812.109.006,00	153.478.795.369,00	88,81
	-Keuangan	358.174.330.591,09	169.705.267.520,01	47,38
V	Urusan Keistimewaan	53.712.360.784,00	53.107.784.563,79	98,87
	- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	34.251.759.500,00	34.096.595.764,35	99,55
	- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.239.550.000,00	1.188.868.300,37	95,91
	- Dinas Kebudayaan	6.436.238.350,00	6.147.293.368,00	95,51
	- Dinas Pariwisata	7.441.905.519,00	7.375.766.866,23	99,11
	- Sekretariat (Bagian Organisasi)	174.296.500,00	157.614.750,00	90,43
	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tena	350.000.000,00	337.270.550,00	96,36
	- Dinas Pertanian	639.564.000,00	625.673.000,00	97,83
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.179.046.915,00	3.178.701.964,84	99,99
	Jumlah	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60

Belanja berdasar urusan wajib mempunyai proporsi sebesar 66,44% terhadap belanja daerah. Belanja menurut urusan wajib dibedakan menjadi 2 (dua) urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Porsi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 52,75% terhadap belanja daerah meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.

Belanja urusan Pendidikan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non formal dan PAUD dan Program Pengembangan Pendidikan. Realisasi belanja urusan pendidikan sebesar Rp336.286.388.976,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp353.886.851.455,00.



Belanja urusan kesehatan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja. Realisasi Belanja urusan kesehatan sebesar Rp324.743.706.389,73 atau 86,49% dari anggaran sebesar Rp375.449.756.413,00.

Belanja urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembangunan Gedung Pemerintah, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase, Program Pembinaan Tata Ruang, Program Pengendalian Tata Ruang. Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp77.496.478.154,69 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp82.136.069.127,00.

Belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman digunakan untuk melaksanakan Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan. Realisasi belanja urusan perumahan sebesar Rp17.993.662.434,28 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp18.494.909.554,00.

Belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan, Program Perlindungan Masyarakat, Program Pencegahan Kebakaran, Program Penanggulangan Kebakaran, Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam. Realisasi belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp33.388.570.989,9 atau 95,68% dari anggaran sebesar Rp34.897.770.491,00.

Belanja urusan sosial digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial. Realisasi belanja urusan sosial sebesar Rp10.596.828.300,97 atau 95,78% dari anggaran sebesar Rp11.063.947.607,00.

Porsi Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 13,69% terhadap belanja daerah yang meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Belanja urusan Tenaga Kerja digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Realisasi belanja urusan Tenaga Kerja sebesar Rp1.728.358.974,40 atau 98,62% dari anggaran sebesar Rp1.752.583.000,00.



Belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Anak. Realisasi belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp4.556.228.952,91 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp4.883.574.754,00.

Belanja urusan Pangan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Ketahanan Pangan. Realisasi belanja urusan Pangan sebesar Rp578.227.860,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp582.623.056,00.

Belanja urusan Pertanahan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Pertanahan. Realisasi belanja urusan Pertanahan sebesar Rp20.670.081.398,00 atau 84,30% dari anggaran sebesar Rp24.518.575.868,00.

Belanja urusan lingkungan hidup digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi belanja urusan lingkungan hidup sebesar Rp41.106.819.048,49 atau 96,09% dari anggaran sebesar Rp42.778.234.700,00.

Belanja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Realisasi belanja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp4.934.665.617,00 atau 96,72% dari anggaran sebesar Rp5.101.826.500,00.

Belanja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi belanja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp73.550.142.898,74 atau 96,45% dari anggaran sebesar Rp76.260.689.028,00.

Belanja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengendalian Penduduk, Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Realisasi belanja urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp5.152.410.321,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp5.543.018.760,00.

Belanja urusan Perhubungan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Lalu Lintas, Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas, Program Pengelolaan



Perparkiran. Realisasi belanja urusan Perhubungan sebesar Rp13.662.738.371,02 atau 88,52% dari anggaran sebesar Rp15.434.690.273,00.

Belanja urusan Komunikasi dan Informatika digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik, Program Peningkatan Komunikasi Publik. Realisasi belanja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp13.941.124.626,65 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp14.710.081.550,00.

Belanja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Realisasi belanja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.248.497.309,40 atau 96,21% dari anggaran sebesar Rp5.455.193.540,00.

Belanja urusan Penanaman Modal digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan. Realisasi belanja urusan Penanaman Modal sebesar Rp5.622.052.163,00 atau 95,02% dari anggaran sebesar Rp5.916.526.000,00.

Belanja urusan Kepemudaan dan olah raga digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Kepemudaan, Program Pengembangan olah raga. Realisasi belanja urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp3.658.268.845,00 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp3.962.005.992,00.

Belanja urusan Statistik digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Statistik. Realisasi belanja urusan statistik sebesar Rp39.667.000,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp43.178.000,00.

Belanja urusan Persandian digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Persandian. Realisasi belanja urusan Persandian sebesar Rp1.414.526.650,00 atau 99,68% dari anggaran sebesar Rp1.419.064.000,00.

Belanja urusan Kebudayaan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi belanja urusan Kebudayaan sebesar Rp1.996.455.648,00 atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp2.226.845.347,00.

Belanja urusan Perpustakaan digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan. Realisasi belanja urusan Perpustakaan sebesar Rp2.156.872.826,90 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp2.170.903.601,00.

Belanja urusan Kearsipan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan, Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip. Realisasi belanja urusan Kearsipan sebesar Rp5.704.096.536,52 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp5.881.012.991,00.

Belanja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi belanja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp2.104.872.832,00 atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp2.229.588.982,00.

Porsi belanja Urusan Pilihan meliputi urusan Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar 3,88 % dari belanja daerah.

Belanja urusan Pertanian digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Pertanian. Realisasi belanja urusan Pertanian sebesar Rp6.602.604.489,00 atau 96,69% dari anggaran sebesar Rp6.828.378.551,00.

Belanja urusan Pariwisata digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata, Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Taman Pintar. Realisasi belanja urusan Pariwisata sebesar Rp19.736.346.212,27 atau 77,72% dari anggaran sebesar Rp25.394.968.834,00.

Belanja urusan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan. Realisasi belanja urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp914.400.700,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp931.201.616,00.

Belanja urusan Perdagangan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar, Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar, Program Pengembangan Pusat Bisnis. Realisasi belanja urusan Perdagangan sebesar Rp17.339.207.732,78 atau 86,58% dari anggaran sebesar Rp20.027.693.505,00.

Belanja urusan Perindustrian digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Perindustrian, Program Pengembangan Industri Logam. Realisasi belanja urusan Perindustrian sebesar Rp14.282.633.554,50 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp14.857.991.335,00.

Belanja urusan Transmigrasi digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi. Realisasi belanja urusan Transmigrasi sebesar Rp27.321.800,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp27.873.000,00.

Porsi belanja Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,



Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan sebesar 26,18% dari belanja daerah.

Belanja urusan Perencanaan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Bidang Ekonomi, Program Bidang Fisik, Program Bidang Sosial . Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Realisasi belanja urusan perencanaan sebesar Rp5.739.097.239,50 atau 96,65% dari anggaran sebesar Rp5.937.730.783,00.

Belanja urusan Penelitian dan Pengembangan digunakan untuk melaksanakan Program penelitian dan Pengembangan. Realisasi belanja urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp818.142.050,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp832.013.620,00.

Belanja urusan Sekretariat daerah digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat daerah dan Kerumahtanggaan, Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Daerah Asli Daerah dan Kerjasama, Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Realisasi belanja urusan Sekretariat Daerah sebesar Rp20.663.059.492,90 atau 92,17% dari anggaran sebesar Rp22.417.871.383,00.

Belanja urusan Sekretariat DPRD digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan, Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan. Realisasi belanja urusan Sekretariat DPRD sebesar Rp42.121.045.842,30 atau 78,74% dari anggaran sebesar Rp53.494.473.438,00.

Belanja urusan Inspektorat digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya, Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan. Realisasi belanja urusan Inspektorat sebesar Rp4.732.018.771,74 atau 95,19% dari anggaran sebesar Rp4.971.074.436,00.

Belanja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara, Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Realisasi belanja urusan



Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp153.478.795.369,00 atau 88,81% dari anggaran sebesar Rp172.812.109.006,00.

Belanja urusan Keuangan digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer, Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Program Pembukuan dan penagihan Pajak Daerah, Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset. Realisasi belanja urusan Keuangan sebesar Rp169.705.267.520,01 atau 47,38% dari anggaran sebesar Rp358.174.330.591,09.

Porsi belanja Urusan Keistimewaan meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 3,50% dari belanja daerah.

Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakan untuk melaksanakan Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase. Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp34.096.595.764,35 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp34.251.759.500,00

Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pertanahan. Realisasi belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp1.188.868.300,37 atau 95,91% dari anggaran sebesar Rp1.239.550.000,00

Belanja Dinas Kebudayaan digunakan untuk melaksanakan Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa, Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi. Realisasi belanja Dinas Kebudayaan sebesar Rp6.147.293.368,00 atau 95,51% dari anggaran sebesar Rp6.436.238.350,00

Belanja Dinas Pariwisata digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata. Realisasi belanja Dinas Kebudayaan sebesar Rp7.375.766.866,23 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp7.441.905.519,00

Belanja Sekretariat Daerah digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah. Realisasi belanja Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) sebesar Rp157.614.750,00 atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp174.296.500,00

Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro. Realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebesar Rp337.270.550,00 atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00

Belanja Dinas Pertanian dan Pangan digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Ketahanan Pangan. Realisasi belanja Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp625.673.000,00 atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp639.564.000,00

Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Pusat Bisnis. Realisasi belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.178.701.964,84 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp3.179.046.915,00



3.3. Pembiayaan Daerah

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp220.340.133.122,45 berasal dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019	Rp220.340.133.122,45
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp410.000.000,00
- Penerimaan Piutang Daerah	Rp12.620.000,00

3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00 dipergunakan untuk:

- penyertaan modal kepada PT BPD DIY	Rp20.000.000.000,00
--------------------------------------	---------------------

3.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp382.914.304.828,36 yang terdiri dari :

a. Sisa Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2020	Rp 326.475.196.823,90
b. Sisa Kas RSUD Tahun 2020	Rp 35.746.744.809,51
c. Sisa Kas Taman Pintar Tahun 2020	Rp 1.087.890.837,44
d. Sisa Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2020	Rp 4.313.105.563,43
e. Sisa Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis Tahun 2020	Rp 2.383.386.238,97
f. Sisa Kas di BLUD UPT Pratama Tahun 2020	Rp 7.379.376.649,75
g. Sisa Kas di BLUD UPT Logam Tahun 2020	Rp 93.958.368,20
h. Sisa BOS Tahun 2020	Rp 5.434.645.537,16

Jumlah Sisa Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa kas yang dibatasi penggunaannya yang merupakan sisa dana hibah pariwisata sejumlah Rp1.863.178.897,00 yang akan disetorkan ke rekening kas negara pada tahun 2021.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi, sedangkan Laporan Keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun perangkat daerah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan daerah lain terkait kelembagaan maupun penyertaan modal terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah (Tipe A), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, dan Bagian Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian, membidangi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dan Bagian Layanan Pengadaan;
 - d. Asisten Umum, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Bagian Organisasi;
2. Sekretariat DPRD (Tipe B);
3. Inspektorat Daerah (Tipe A);
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan (Tipe A);
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga (Tipe B);
 - c. Dinas Kesehatan (Tipe A);
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
 - e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Tipe B);
 - f. Dinas Kebakaran (Tipe C);
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A);
 - h. Dinas Sosial (Tipe A);
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Tipe A);
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B);
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A);
 - n. Dinas Pertanian dan Pangan (Tipe B);
 - o. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 - p. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Tipe A);
 - q. Dinas Perhubungan (Tipe B);
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe A);



- s. Dinas Kebudayaan (Tipe A);
- t. Dinas Pariwisata (Tipe A);
- u. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Tipe A);
5. Badan, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe A);
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B);
6. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan;
7. Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa;
9. Rumah Sakit Jogja;
10. Lembaga lain: Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. BUMD, terdiri dari :
 - a. PT. Bank BPD DIY;
 - b. Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
 - c. Perumda BPR Bank Jogja;
 - d. PT. Radio Swara Adiloka;
 - e. PD. Jogjatama Vishesha.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan akuntansi tersebut di atas meliputi :

1) Pendapatan

A. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Yogyakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.



B. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan; atau
2. pendapatan direalisasi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan sudah sesuai dengan nilai pajak yang dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil).
3. Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
6. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



2) Beban dan Belanja

A. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

B. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah kota Yogyakarta.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
4. Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan non-APBD.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.
2. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga jaga.

C. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

D. Penilaian



Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain :

1. transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
2. transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
3. Transfer Pemerintah Provinsi;
4. Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada RKUD dan/atau diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Perpres terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan Kepala Daerah/peraturan kepala daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut :

- a. berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. hibah mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BI.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima.

2. Pengeluaran Pembiayaan



Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, yang diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening – rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

6) Piutang

A. Definisi

Piutang adalah hak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

1. Piutang Pajak Daerah ;
2. Piutang Retribusi Daerah;
3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
2. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
3. Bagian Lancar TPTGR;
4. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan;



5. Bagian Lancar Tagihan Sewa.
- c. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 2. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 3. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
 1. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 3. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pihak ketiga.

B. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang berdasarkan pungutan dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen lain yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang berdasarkan perikatan yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, kerjasama, sewa, penjualan, dan kemitraan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pemerintah Pusat mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan piutang, mengingat kepastian penyalurannya tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan piutang transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.



Walaupun demikian, piutang transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang/badan/lembaga dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Piutang yang timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bagi hasil, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bagi hasil pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - c. Bagian Lancar TP/TGR



Pengukuran TP/TGR dinilai sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

e. Bagian Lancar Tagihan Sewa

Piutang sewa dinilai berdasarkan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Sewa yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Yogyakarta dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat, tetapi belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dengan terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3. Pengukuran piutang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

5. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang.

Penghapustagihan piutang dilakukan setelah penetapan penghapusbukuan piutang.

6. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

D. Penilaian



Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sesuai dengan jenis piutang, yaitu:

1. Piutang dari pungutan
 - a. Piutang Pajak (*self assessment dan official assessment*):
 - 1) Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 4) Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
 - b. Piutang Retribusi:
 - 1) Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - 4) Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c. Piutang selain piutang pajak dan retribusi:
 - 1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
 - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua;
 - 4) Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga;

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Penyisihan Piutang

N o.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %



Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

7) Persediaan

A. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau mati tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Pengakuan

Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

C. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length*



transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau *First In First Out (FIFO)*.

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan.

8) Investasi

A. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibagi menjadi:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Tabel 4.2. Klasifikasi Investasi

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito
	Investasi Jangka Pendek Lainnya



Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

C. Pengukuran

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominalnya:
- b. Investasi dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya:
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

3. Investasi non permanen dana bergulir

Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas dana bergulir merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kualitas dana bergulir didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan dana bergulir adalah kualitas dana bergulir, sebagai berikut :

- 1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
- 3) Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua;



- 4) Kualitas Macet, umur piutang1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.

Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penyisihan Dana Bergulir

N o.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

4. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Kota Yogyakarta, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai menggunakan metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Yogyakarta setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

9) Aset Tetap

A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah/Pemerintah Kota Yogyakarta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

Batasan nilai kapitalisasi untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Berikut adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap:

Tabel 4.4. Biaya-biaya yang dapat Distribusi

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
1	Tanah	- harga pembelian atau biaya pembebasan tanah - biaya appraisal/penilai harga tanah - biaya yang dikeluarkan dalam rangka



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
		<p>memperoleh hak/ biaya pembuat sertifikat, (pengukuran,permohonan sk,pembelian tanda batas)</p> <ul style="list-style-type: none">- biaya pelepasan (1% dari harga beli)- biaya pematangan, (dalam rangka penyiapan lahan)- Ijin Peruntukan Lahan (IPL)- honor panitia pengadaan, panitia penerima ,tim musyawarah/negosiasi.- Biaya Sosialisasi.
2	Peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none">- harga pembelian- biaya pengangkutan/distribusi- biaya instalasi/pemasangan- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas)- pajak- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.
3	Gedung dan bangunan	<ul style="list-style-type: none">- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman,perjalanan dinas,)- harga pembelian atau biaya konstruksi,- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL,UKL/UPL)- biaya pengurusan IMBB- pajak,- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.- Biaya Sosialisasi.
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	<ul style="list-style-type: none">- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman,perjalanan dinas,)- biaya perolehan atau biaya konstruksi,- biaya perencanaan, pengawasan,



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Aset	Biaya yang Dikapitalisasikan
		<ul style="list-style-type: none">konsultan- pajak- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.- Biaya Sosialisasi.
5	Aset tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none">- harga pembelian,- biaya pengangkutan/distribusi- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)- pajak,- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.
6	Konstruksi dalam pengerjaan	<ul style="list-style-type: none">- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)- harga pembelian atau biaya konstruksi,- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL)- biaya pengurusan IMBB- pajak,- honor panitia/pejabat pengadaan serta penerima.- Biaya Sosialisasi.

Pembebanan atribusi dilakukan secara proposional berdasarkan harga pembelian per unit barang.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat



aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau (c) bertambah volume, dan/atau (d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul*, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional untuk penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dan dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan serta hewan, ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

9. Aset Bersejarah



Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Penghapusbukuan Aset Tetap

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

10) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset – aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
- biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan – bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;



- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya - biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya - biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata – rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi yang dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

11) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, yang didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi perpindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan –LRA dalam pos lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



12) Aset Lainnya

A. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

B. Pengakuan

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Yogyakarta secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kota Yogyakarta disertai dengan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.



b. Hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual berupa suatu karya seni yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

c. Hak Paten

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

d. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada, antara lain:

1) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

2) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kota Yogyakarta atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk penghentian



penggunaan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap.

C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota Yogyakarta ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Yogyakarta.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

b. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:



- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode pelaporan serta dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.

Tabel 4.6. Amortisasi

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	
1	Lisensi	Sesuai perjanjian
1	Hak Cipta	Tidak terbatas
1	Hak Paten	Tidak terbatas
1	Aset Tak Berwujud Lainnya:	
	1) Royalti	Tidak terbatas
	2) Software	Tidak terbatas selama masih dipakai
	3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3
	4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	-
	5) Aset Lain-lain	-



13) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1.PENDAPATAN

	<u>Realisasi 2020</u> <u>Rp</u>	<u>Realisasi 2019</u> <u>Rp</u>
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :	1.699.751.020.194,30	1.765.760.418.492,27
5.1.1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	563.174.371.396,88	689.049.725.509,27
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :		
5.1.1. 1. a. Pendapatan Pajak Daerah	342.780.587.013,00	451.265.948.031,00
Pajak Daerah berasal dari 10 jenis pajak yaitu:		
1) Pajak Hotel	78.279.066.037,00	161.297.192.790,00
a) Berbintang:	71.994.512.361,00	145.827.001.540,00
Bintang Lima	18.691.651.432,00	41.456.693.174,00
Bintang Empat	24.790.772.505,00	36.355.926.399,00
Bintang Tiga	20.236.266.301,00	43.044.652.512,00
Bintang Dua	6.104.786.668,00	16.438.946.977,00
Bintang Satu	2.171.035.455,00	8.530.782.478,00
b) Melati:	5.437.655.316,00	14.256.845.917,00
Melati Tiga	1.021.115.187,00	2.917.661.459,00
Melati Dua	625.387.197,00	1.692.529.032,00
Melati Satu	3.791.152.932,00	9.646.655.426,00
c) Losmen/Rumah penginapan/pesangrahan/rumah kos	846.898.360,00	1.213.345.333,00
	<i>Jumlah Pajak Hotel</i>	78.279.066.037,00
2) Pajak Restoran	43.521.758.533,00	63.237.228.654,00
a) Restoran	43.502.504.068,00	63.164.465.780,00
b) Rumah Makan		
c) Kantin		
d) Warung		
e) Katering	19.254.465,00	72.762.874,00
f) Sekaten		
	<i>Jumlah Pajak Restoran</i>	43.521.758.533,00
3) Pajak Hiburan	3.870.424.584,00	12.702.230.080,00
a) Gedung Bioskop/Tontonan Film	932.733.067,00	4.934.475.169,00
b) Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	93.075.400,00	186.872.200,00
c) Pameran	867.538.638,00	3.096.930.200,00
f) Karaoke	150.848.363,00	381.933.891,00
d) Permainan bilyar	27.985.311,00	55.287.496,00
e) Balap Kendaraan Bermotor		
f) Permainan Ketangkasan	396.585.132,00	941.978.826,00
g) Mandi Uap/Spa	511.268.268,00	1.500.032.933,00
h) Pertandingan Olah Raga	13.937.875,00	334.008.073,00
i) Pusat Kebugaran	876.452.530,00	1.270.711.292,00
j) Insidentil		
k) Lain-lain Pertunjukan		
	<i>Jumlah Pajak Hiburan</i>	3.870.424.584,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
4) Pajak Reklame	6.156.071.238,00	7.449.951.971,00
a) Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron	5.706.164.497,00	6.619.927.369,00
b) Reklame kain	415.789.476,00	689.606.416,00
c) Reklame melekat/stiker	-	-
d) Reklame berjalan	34.117.265,00	110.880.462,00
e) Reklame udara	-	1.743.750,00
f) Reklame baliho	-	-
g) Reklame cahaya	-	27.793.974,00
5) Pajak Penerangan Jalan	47.421.117.139,00	52.374.696.494,00
6) Pajak Parkir	1.851.049.591,00	3.050.479.181,00
7) Pajak Air Tanah	1.575.287.372,00	2.546.299.969,00
8) Pajak sarang Burung Walet	5.600.000,00	6.650.000,00
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.517.233.954,00	86.550.328.189,00
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	63.582.978.565,00	62.050.890.703,00
5.1.1. 1. b. Pendapatan Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	32.428.343.731,00
Retribusi Daerah terdiri dari 16 enam belas) jenis retribusi yaitu :		
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, :		
a) Retribusi Kesehatan Hewan	62.332.700,00	71.617.700,00
b) Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air	208.920.800,00	220.904.000,00
	271.253.500,00	292.521.700,00
	<i>Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.797.792.305,00	3.820.420.597,00
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	119.200.000,00	123.580.000,00
a) TPU Utoroloyo Kec. Tegalrejo	34.140.000,00	36.340.000,00
b) TPU Pracimoloyo Kec. Wirobrajan	33.555.000,00	37.580.000,00
c) TPU Sariloyo Kec. Mantrijeron	20.825.000,00	35.230.000,00
d) TPU Sasonoloyo Kec. Mergangsan	30.680.000,00	14.430.000,00
4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	4.618.765.000,00	6.562.625.000,00
a) TJU (Dinas Perhubungan)	4.618.765.000,00	6.562.625.000,00
b) TJU (UPT Malioboro)	-	-
c) Parkir PMPS (Kec. Gondomanan)	-	-
5) Retribusi Pasar, :	10.910.008.884,00	14.788.015.434,00
a) Kios	3.508.425.963,00	4.870.986.995,00
b) Los	2.402.138.610,00	3.122.546.567,00
c) Lapak	344.978.520,00	443.506.402,00
d) Gudang (tempat penyimpanan barang)	42.970.125,00	38.604.000,00
e) Siaran Radio	3.922.500,00	6.372.000,00
f) Bongkar Muat	267.436.800,00	321.556.000,00
g) Kamar Mandi	784.171.350,00	1.005.163.400,00
h) Parkir	2.531.821.875,00	3.200.427.500,00
-Tempat Khusus Parkir(TKP)	1.976.886.975,00	2.548.304.000,00
-Parkir Tepi Jalan Umum(TJU)	554.934.900,00	652.123.500,00
i) Sewa Lahan	711.403.407,00	1.077.777.467,00
j) Pemakaian Listrik		
k) Penerimaan piutang	312.739.734,00	701.075.103,00
l) Pendapatan lain-lain		
	10.910.008.884,00	14.788.015.434,00
	<i>Jumlah Retribusi Pasar</i>	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	590.275.000,00	830.330.000,00
7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair	792.602.500,00	791.072.500,00
8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	72.764.000,00	
9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.495.000,00	67.880.000,00
10) Retribusi Terminal :		
a) Bus Cepat		
b) Bus AKDP		
c) Retribusi Bus Perkotaan		
d) Parkir Bus		
e) Jasa Ruang Tunggu		
f) Parkir Pengunjung		
g) Penitipan Barang		
<i>Jumlah Retribusi Terminal</i>	-	-
11) Retribusi Tempat Khusus Parkir	717.382.833,00	1.581.164.000,00
a) - Dikelola Dinas Perhubungan	196.924.000,00	552.826.000,00
b) - Dikelola UPT Malioboro	520.458.833,00	1.028.338.000,00
12) Retribusi Rumah Potong Hewan, :		
a) Ongkos Periksa		
b) Sewa Kandang Peristirahatan		
c) Sewa Tempat Pemotongan		
d) Pemakaian Pelayuan Daging		
e) pemotongan	66.775.000,00	89.685.000,00
f) Periksa Hewan Betina		
g) Pemeriksaan Hasil Monitoring Daging		
<i>Jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan</i>	66.775.000,00	89.685.000,00
13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, terdiri dari :	113.929.200,00	298.213.000,00
a) Kebun Hortikultura	20.280.000,00	26.200.500,00
b) Kebun Bibit Tegalrejo	33.331.200,00	50.822.400,00
c) Kebun Bibit Giwangan	-	27.385.600,00
d) Kebun Plasma Nutfah Pisang	31.893.000,00	38.109.500,00
e) Balai Benih Ikan Mendungan	13.340.000,00	12.760.000,00
f) Balai Benih Ikan Nitikan	15.085.000,00	12.435.000,00
g) PASTY Sub Raiser	-	130.500.000,00
<i>Jumlah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	113.929.200,00	298.213.000,00
14) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.953.157.500,00	2.961.112.800,00
a) - IMB (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)	1.953.157.500,00	2.958.873.500,00
b) - IMB Kecamatan	-	2.239.300,00
15) Retribusi Ijin Gangguan		
a) - HO (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan)		
b) - HO Kecamatan		
16) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	254.245.800,00	221.723.700,00
5.1.1. 1. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01
Terdiri dari :		
1) PD Air Minum Tirtamarta	693.501.557,50	802.301.741,50
2) PD BPR Bank Jogja	12.265.548.921,00	9.754.106.355,00
3) Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 21.829.330.811,85 berupa :		
a) Deviden	21.829.330.811,85	18.340.935.744,08
b) Dana Pembangunan		
4) Laba BUKP	71.245.408,63	57.146.041,43
5) PD Jogjatama vishesha	-	20.514.068,00
<i>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
51.1. 1. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar	162.223.511.162,90	176.380.429.797,26
Terdiri dari :		
1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1.620.611.826,00	1.102.674.651,00
a) Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai	71.263.000,00	6.524.600,00
b) Penjualan kendaraan dinas roda dua	96.105.963,00	149.429.114,00
c) Penjualan kendaraan dinas roda empat	1.379.009.113,00	378.794.887,00
d) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan	74.233.750,00	567.926.050,00
2) Jasa Giro sebesar Rp 6.167.302.851,00 berupa :	6.167.302.851,00	3.044.745.330,00
a) Jasa giro Kasda	5.652.568.586,00	2.841.918.466,00
b) Jasa giro kantor/Dinas/Bagian	514.734.265,00	202.826.864,00
3) Pendapatan Bunga Deposito	6.242.796.178,63	17.190.898.900,68
a) Rekening Deposito pada PT. Bank BPD DIY	2.903.124.979,00	6.870.833.362,00
b) Rekening Deposito pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-	2.972.732.876,68
c) Rekening Deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	795.073.094,00
d) Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	2.699.622.628,00
e) Rekening Deposito pada PT. Bank Bukopin Tbk.	2.719.499.967,63	2.742.773.927,00
f) Rekening Deposito pada PT. Bank Mega Tbk.	277.123.290,00	1.045.102.739,00
g) Rekening Deposito pada PT. Bank OCBC NISP Tbk.		
h) Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	343.047.942,00	
i) Rekening Deposito pada PT. Bank Sinarmas	-	64.760.274,00
4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah (TP/TGR)	500.000,00	1.070.000,00
5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	293.507.070,32	444.576.214,65
6) Denda Pajak	1.210.226.621,00	2.856.472.125,00
a) Pendapatan denda pajak hotel	43.533.121,00	951.234.380,00
b) Pendapatan denda pajak Restoran	75.156.726,00	204.992.277,00
c) Pendapatan denda pajak Hiburan	3.129.876,00	12.594.604,00
d) Pendapatan denda pajak Reklame	5.876.637,00	27.678.106,00
e) Pendapatan denda pajak Parkir	1.916.998,00	3.251.045,00
f) Pendapatan denda pajak Air Tanah	9.192.928,00	48.026.286,00
g) Pendapatan denda pajak Bumi dan Bangunan	1.071.420.335,00	1.608.695.427,00
7) Denda retribusi Jasa Umum (Dinas Perhubungan)	378.394.800,00	418.284.200,00
8) Setoran pendapatan dari pengembalian berasal dari:	628.516.419,06	4.942.923.617,32
a) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	165.210.136,00	73.502.093,00
b) Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	70.276.459,39	221.916.930,55
c) setoran kelebihan pembayaran kpd Pihak Ketiga		
d) Penerimaan Sisa dari realisasi belanja		
e) Pendapatan dari pengembalian hibah	100.594.355,00	788.434.661,00
f) Pendapatan dari pengembalian lainnya	292.435.468,67	3.859.069.932,77
- Pendapatan dari pengembalian Selain Hibah	292.435.468,67	
- Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS	-	181.882.863,00
Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS SD	-	114.014.732,00
Pendapatan Lain- lain dari Dana BOS SMP	-	67.868.131,00
9) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	55.545.000,00	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
10) Pendapatan dari Barang Milik Daerah	1.401.713.300,00	1.903.049.400,00
a) Sewa Lahan Terminal		
b) Sewa penginapan awak bus		
c) Sewa Hotel Terminal		
d) Sewa Kantin Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	6.000.000,00
e) Sewa Gedung sebesar Rp 1.131.295.700,00 berasal dari :	1.131.295.700,00	1.653.159.400,00
- Dinas Pendidikan / Edotel		
- Dinas Kimpraswil/ Rusunawa	331.352.700,00	360.797.600,00
- BPKAD	799.943.000,00	1.292.361.800,00
f) Penerimaan dari Fihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah sebesar Rp		
- Hotel Kayu Manis (Pesanggrahan Ngestilaras)	22.000.000,00	5.000.000,00
- PT Bumi Kusuma Santosa (Reksa Arcade)	243.417.600,00	238.890.000,00
<i>Jumlah Penerimaan dari Fihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah</i>	265.417.600,00	243.890.000,00
11) Pendapatan BLUD Taman Pintar	4.887.231.981,00	14.784.210.000,10
12) Pendapatan BLUD RSUD	91.668.436.716,25	78.121.244.026,00
13) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.465.105.692,10	5.666.389.889,20
14) Pendapatan BLUD Puskesmas	23.047.942.795,00	25.678.328.467,00
a) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	787.602.641,00	917.445.181,00
b) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	614.635.014,00	666.722.318,00
c) Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.171.761.213,00	1.450.086.067,00
d) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.408.651.986,00	1.476.785.639,00
e) Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2	648.485.963,00	750.606.900,00
f) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	795.354.387,00	940.618.405,00
g) Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.096.805.599,00	2.468.366.677,00
h) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.339.368.853,00	1.432.076.445,00
i) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	809.766.851,00	867.517.084,00
j) Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.002.463.002,00	1.157.756.583,00
k) Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	1.821.923.755,00	2.187.601.068,00
l) Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.632.813.423,00	1.759.944.631,00
m) Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	815.504.190,00	906.812.748,00
n) Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	623.496.528,00	694.222.526,00
o) Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.610.753.621,00	2.783.868.741,00
p) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.349.408.612,00	2.444.883.790,00
q) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.053.745.445,00	1.108.730.432,00
r) Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.465.401.712,00	1.664.283.232,00
15) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	17.954.638.518,95	15.422.522.731,29
16) Pendapatan BLUD UPT Logam	324.574.256,00	502.276.911,00
17) Denda Hasil Operasi Yustisi	138.046.000,00	129.384.000,00
18) Pendapatan BUKP	32.290.672,59	23.577.042,02
a) Dana BUKP Pembinaan BUKP	18.451.812,92	13.472.595,43
b) Jasa Produksi BUKP	13.838.859,67	10.104.446,59
19) Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	-	-
20) Jaminan Bongkar	306.549.309,00	368.843.986,00
21) Penerimaan Pendapatan Terminal	-	-
22) Sewa Media Reklame	-	-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
23) Pendapatan Bunga Pajak	1.025.490.354,00	2.126.474.511,00
a) Pendapatan Bunga Pajak Hotel	628.806.315,00	1.682.068.421,00
b) Pendapatan Bunga Pajak Restoran	340.891.089,00	369.379.390,00
c) Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	7.874.061,00	42.979.615,00
d) Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	-
e) Pendapatan Bunga Pajak Parkir	42.771.369,00	30.994.467,00
f) Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	5.023.520,00	969.618,00
g) Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	124.000,00	83.000,00
24) Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum (Din. Perindag)	39.356.224,00	36.543.594,00
25) Pendapatan denda administrasi	-	-
a) Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP	-	-
b) Denda Retribusi Penggantian Biaya Akte Catatan Sipil	-	-
26) Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.334.734.578,00	1.615.940.201,00
Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.326.288.778,00	1.593.771.300,00
Denda Listrik Pasar	8.445.800,00	22.168.901,00
27) Bagi Hasil Laba Koperasi Pola Syariah		
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	162.223.511.162,90	176.380.429.797,26
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	563.174.371.396,88	689.049.725.509,27
	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.1. 2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR	1.105.993.726.262,42	1.075.256.692.983,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan Transfer yang terdiri dari :		
5.1.1. 2. a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	818.760.445.269,00	875.308.177.702,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari :		
1) Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu :		
a) Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :	3.464.788.688,00	3.756.108.600,00
(1) PBB migas		
(2) Upah Pungut PBB		
(3) Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat	3.464.788.688,00	3.756.108.600,00
(4) Pertambangan		
b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	43.680.510.229,00	23.314.737.000,00
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</i>	47.145.298.917,00	27.070.845.600,00
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
a) Provisi Sumber Daya Hutan	35.906.013,00	1.782.000,00
b) Sumberdaya Alam Perikanan	788.276.289,00	590.155.800,00
c) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	788.301,00	
d) Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	908.708.756,00	1.312.539.000,00
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</i>	1.733.679.359,00	1.904.476.800,00
3) Dana Alokasi Umum	627.247.170.000,00	700.372.564.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
4) Dana Alokasi Khusus	142.634.296.993,00	145.960.291.302,00
a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.628.557.012,00	49.435.128.281,00
(1) DAK Fisik Bidang Pelayanan Dasar		
(2) DAK Fisik Bidang Pelayanan Rujukan	15.502.024.106,00	17.192.622.745,00
(3) DAK Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian	1.129.743.474,00	879.491.267,00
(4) DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana	891.681.800,00	407.900.000,00
(5) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	-	279.390.000,00
(6) DAK Pelayanan Kesehatan Dasar	2.968.890.802,00	4.011.013.033,00
(7) DAK Peralatan Pendukung Imunisasi		
(8) DAK Perumahan dan Permukiman	2.556.255.000,00	3.211.800.000,00
(9) DAK Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	7.039.472.000,00	8.831.592.700,00
(10) DAK Bidang Pendidikan	1.243.120.000,00	2.511.579.488,00
(11) DAK Pengendalian Penyakit	1.485.526.105,00	482.054.000,00
(12) DAK Sanitasi	-	2.477.808.148,00
(13) DAK Jalan	6.224.252.000,00	9.149.876.900,00
(14) DAK Pasar	-	
(15) DAK Pariwisata	3.587.591.725,00	
b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.005.739.981,00	96.525.163.021,00
(1) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.001.400.000,00	6.538.805.819,00
(2) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	67.379.612.000,00	72.251.345.280,00
(3) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	20.349.146.772,00	9.852.341.533,00
(4) DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit		
(5) DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	-	562.320.000,00
(6) DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	-	499.000.000,00
(7) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.522.849.200,00	1.213.769.008,00
(8) DAK Non Fisik Pelayanan Adminduk	1.366.399.230,00	1.273.243.381,00
(9) DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.605.487.500,00	3.041.300.000,00
(10) DAK Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	551.028.879,00	380.000.000,00
(12) DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	229.816.400,00	913.038.000,00
(13) DAK Pengawasan Obat dan Makanan	-	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	818.760.445.269,00	875.308.177.702,00
5.1.1. 2. b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari :		
1) Dana Otonomi Khusus		
2) Dana Keistimewaan		
3) Dana Penyesuaian, yaitu :	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00
a) Tunjangan Profesi Guru PNSD		
b) Dana Tambahan Penghasilan bagi PNSD		
c) Dana Insentif Daerah	83.457.615.000,00	35.760.859.000,00
d) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi		
e) Bantuan Operasional Sekolah	29.230.988.600,00	29.557.780.000,00
BOSN	29.230.988.600,00	29.557.780.000,00
BOSN SD	17.973.808.600,00	17.546.580.000,00
BOSN SMP	11.257.180.000,00	12.011.200.000,00
BOS Prov	-	-
BOS Prov SD		
BOS Prov SMP		
4) Pendapatan Hibah	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.1. 2. c. Transfer Pemerintah Provinsi	174.544.677.393,42	134.629.876.281,00
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :		
a) Pajak Kendaraan Bermotor	47.368.670.845,00	50.129.201.000,00
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.535.933.793,00	29.834.114.000,00
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.209.668.052,00	32.990.808.000,00
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah		
e) Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan		
f) Bagi hasil Pajak air permukaan	40.333.314,00	35.818.000,00
g) Bagi hasil Pajak Rokok Kota Yogyakarta	25.810.732.872,00	20.403.935.281,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.965.338.876,00	133.393.876.281,00
2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
3) Pendapatan Lainnya		
Pendapatan Lainnya sebesar Rp 53.579.338.517,42 berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari :		
Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta	466.000.000,00	1.236.000.000,00
- Bantuan Keuangan UEP PKH	-	450.000.000,00
- Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban	180.000.000,00	270.000.000,00
- Bantuan Keuangan Padat Karya Infrastruktur	286.000.000,00	516.000.000,00
Dana Keistimewaan	53.113.338.517,42	
Jumlah Pendapatan Lainnya	53.579.338.517,42	1.236.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	174.544.677.393,42	134.629.876.281,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.105.993.726.262,42	1.075.256.692.983,00
5.1.1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :		
5.1.1. 3. a. Pendapatan Hibah	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
- Pemerintah	28.836.922.535,00	
- Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	1.746.000.000,00	
5.1.1. 3. b. Pendapatan Dana Darurat		
5.1.1. 3. c. Pendapatan Lainnya		
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.699.751.020.194,30	1.765.760.418.492,27



5.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 berdasarkan kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.2. 1. BELANJA OPERASI	1.248.329.702.538,88	1.404.860.023.602,17
Realisasi Belanja Operasi terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai	728.710.179.778,78	760.532.062.428,28
1) Belanja gaji dan Tunjangan	426.872.467.299,00	436.621.717.756,00
2) Tambahan Penghasilan PNS	151.438.699.206,00	159.916.722.770,00
3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.678.420.566,00	8.034.863.866,00
4) Insentif Pemungutan Pajak	13.639.746.400,00	17.955.781.100,00
5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	868.609.033,00	1.201.160.702,00
6) Belanja Pegawai BLUD		
7) Uang Lembur	465.150.000,00	488.610.000,00
8) Belanja Pegawai Dana BOS	6.718.301.500,00	14.384.532.150,00
9) Uang Piket	4.933.660.000,00	3.926.830.000,00
10) Uang Kelayan Panti	139.690.000,00	194.313.000,00
11) Honorarium Pelaksana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)		
12) Honorarium PNS	58.627.987.927,78	47.374.814.794,00
13) Honorarium Non PNS	57.327.447.847,00	70.432.716.290,28
b. Belanja Barang dan Jasa	455.864.521.552,10	553.387.490.228,89
1) Belanja Barang dan jasa BLUD		
2) Belanja Bahan Pakai Habis	9.675.045.944,78	11.604.198.793,09
3) Belanja Bahan/Material	57.121.999.533,45	74.534.130.906,60
4) Belanja Jasa Kantor	171.784.554.060,05	126.676.178.553,21
5) Belanja Premi Asuransi	42.867.293.318,00	33.676.690.310,15
6) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.485.211.491,02	10.632.609.387,90
7) Belanja Cetak dan Penggandaan	7.001.765.422,00	12.936.477.782,00
8) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.646.763.000,00	6.155.517.000,00
9) Belanja Sewa Sarana Mobilitas	148.050.000,00	443.110.000,00
10) Belanja Sewa Alat Berat	0,00	26.500.000,00
11) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.874.911.950,00	9.154.363.805,00
12) Belanja Makanan dan Minuman	22.824.089.764,50	47.059.512.084,25
13) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	739.308.205,00	1.745.343.524,00
14) Belanja Pakaian Kerja	1.611.909.096,00	1.776.853.795,00
15) Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	314.615.200,00	332.222.500,00
16) Belanja Perjalanan Dinas	10.874.602.667,07	26.579.151.409,81
17) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	133.840.000,00	368.576.000,00
18) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.817.780.405,00	8.624.612.350,00
19) Belanja Pemeliharaan	45.866.090.348,03	68.299.218.664,88
20) Belanja Jasa Konsultansi	5.091.241.300,00	5.315.525.660,00
21) Belanja Barang Dana BOS	41.245.127.756,00	49.210.542.284,00
22) Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	21.950.000,00
23) Belanja Hibah Barang atau Jasa	233.092.000,00	179.280.000,00
24) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.510.738.480,00	3.086.627.000,00
25) Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar(KBM)	200.000.000,00	17.111.665.000,00
26) Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS		
27) Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/ Masyarakat/ Lembaga	102.000.000,00	90.000.000,00
28) Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.800.128.957,20	21.978.151.600,00
29) Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	4.496.929.000,00	5.567.919.600,00
30) Belanja Barang Kelayan Panti dan Akomodasi	85.463.600,00	112.976.400,00
31) Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	4.311.970.054,00	10.087.585.819,00
c. Belanja Bunga		
d. Belanja Subsidi		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
e. Belanja Hibah	38.725.063.808,00	79.389.047.945,00
1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah	881.361.000,00	1.259.645.450,00
2) Belanja Hibah Kepada Masyarakat		
3) Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.765.617.366,00	47.342.470.016,00
4) Belanja Hibah Dana BOS	33.078.085.442,00	30.786.932.479,00
5) Belanja Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat		
Merupakan konversi Belanja Langsung Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat menjadi Belanja Hibah		
f. Belanja Bantuan Sosial	25.029.937.400,00	11.551.423.000,00
1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	135.000.000,00	9.695.180.000,00
1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain		724.393.000,00
2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	24.894.937.400,00	1.131.850.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.248.329.702.538,88	1.404.860.023.602,17
5.1.2. 2. BELANJA MODAL	193.523.645.423,93	327.434.372.199,17
Realisasi Belanja Modal terdiri dari :		
a. Belanja Modal Tanah	17.920.111.920,00	25.569.058.040,00
1) Tanah untuk Bangunan Gedung	849.101.400,00	17.982.757.800,00
2) Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	17.071.010.520,00	7.378.227.240,00
3) Pematangan Tanah	0,00	208.073.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.368.762.898,42	96.719.552.169,17
1) Alat-alat Berat/Besar	0,00	2.171.319.500,00
2) Alat-alat Angkutan	1.039.069.733,00	19.076.406.400,40
3) Alat Bengkel/Alat Bantu	378.891.717,00	2.651.641.483,00
4) Alat Pertanian dan Peternakan (Alat Pengolah Sampah)	291.967.100,00	692.196.212,64
5) Alat Kantor Dan Rumah Tangga	22.518.329.013,40	36.440.007.765,95
6) Alat Studio Dan Alat Komunikasi	2.420.181.780,00	4.381.991.185,00
7) Alat Ukur/Alat Uji/Alat Peraga	296.811.080,00	1.396.311.240,00
8) Alat Kedokteran/Kesehatan	26.641.046.582,00	27.194.260.252,25
9) Alat Laboratorium	5.526.000,00	1.173.537.300,00
10) Alat Keamanan (Penyelamatan)	776.939.893,02	1.541.880.829,93
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.131.637.105,54	54.312.514.794,87
1) Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja	38.479.617.635,17	40.903.251.382,29
2) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara	147.764.000,00	1.146.603.833,79
3) Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	113.874.000,00	200.680.000,00
4) Pengadaan/Konstruksi Tugu	343.174.750,37	
5) Pengadaan Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1.938.935.000,00	6.465.466.310,08
6) Pengadaan Bangunan Lainnya	108.271.720,00	5.596.513.268,71
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.226.071.861,47	101.225.143.404,83
1) Pengadaan Jalan	48.901.153.271,62	24.818.351.391,23
2) Pengadaan Jembatan	408.658.000,00	9.758.765.000,00
3) Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.084.230.095,99	17.387.670.856,89
4) Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku		
5) Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.232.607.018,86	34.865.709.981,71
6) Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
7) Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	87.680.000,00	1.135.331.500,00
8) Pengadaan Jaringan Listrik	7.428.224.710,00	13.223.022.265,00
9) Pengadaan Jaringan	83.518.765,00	36.292.410,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.834.203.993,50	828.300.673,00
f. Belanja Modal Lainnya	6.042.857.645,00	48.779.803.117,30
Belanja Modal Jasa Konsultansi	6.042.857.645,00	
JUMLAH BELANJA MODAL	193.523.645.423,93	327.434.372.199,17



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.2. 3. BELANJA TAK TERDUGA	74.385.331.447,58	317.693.064,00
Realisasi Belanja Tak Terduga digunakan untuk :		
- pengembalian kelebihan setor belanja tahun 2019	-	664.440,00
- pengembalian kelebihan pendapatan pajak	167.029.034,00	317.028.624,00
- Tanggap darurat bencana covid-19 di Kota Yogyakarta	73.706.075.971,00	
- pengembalian sisa belanja Dana Hibah Pemerintah Pusat atas nama Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA. 2020	512.226.442,58	
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	74.385.331.447,58	317.693.064,00
5.1.2. 4. TRANSFER	1.360.789.078,00	1.981.246.996,00
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
c. Transfer Bagi Hasil Lainnya		
2. Transfer Bantuan Keuangan	1.360.789.078,00	1.981.246.996,00
a. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	583.430.060,00	1.228.210.990,00
- Provinsi DIY (IPAL)	583.430.060,00	528.210.990,00
- Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara bagi Transmigran	-	700.000.000,00
b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
c. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	777.359.018,00	753.036.006,00
- PDI-P	284.739.534,00	273.898.708,00
- Demokrat	33.364.172,00	40.096.220,00
- PAN	119.496.942,00	112.009.072,00
- PKS	86.828.862,00	73.541.661,00
- Golkar	58.857.680,00	60.230.624,00
- PPP	27.344.010,00	53.767.651,00
- Gerindra	107.570.336,00	99.013.056,00
- Nasdem	59.157.482,00	40.479.014,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.517.599.468.488,39	1.734.593.335.861,34



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.2. 5. SURPLUS/DEFISIT	182.151.551.705,91	31.167.082.630,93
5.1.3. PEMBIAYAAN		
5.1.3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.762.753.122,45	226.448.050.491,52
Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dari :	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
- Pajak Daerah	25.884.448.031,00	9.416.763.422,00
- Retribusi Daerah	39.074.306,01	596.538.491,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	18.385.338,83
- Lain-lain PAD Yang Sah	10.114.263.542,26	43.571.415.267,31
- Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	43.735.526.059,00	25.681.568.793,00
- Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	11.838.483.465,19	363.668.294,63
- Belanja Barang Dan Jasa	28.554.167.514,48	10.279.079.490,14
- Belanja Modal	26.546.846.520,21	10.948.838.770,68
- Belanja Hibah	6.351.935.193,00	15.354.933.450,00
- Belanja Bantuan Sosial	975.157.000,00	1.036.565.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan	21.557.591,00	
- Belanja Tak Terduga	7.910.119.126,52	5.833.628.968,00
- DAK Bidang Infrastruktur	-	2.599.000,00
- DAK Fisik Lingkungan Hidup	-	4.728.000,00
- DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah	-	25.625.428,00
- DAK Non Fisik BOP PAUD	2.658.000.000,00	4.494.000.000,00
- DAK Non Fisik TPG PNSG	2.926.804.260,00	8.444.614.920,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	824.972.891,00	694.658.467,00
- DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	15.279.029,00	
- DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	322.074.194,00	
- DAK Non Fisik Jaminan Persalinan		
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	236.130.800,00	624.030.992,00
- DAK Non Fisik Admindak	45.705.770,00	32.010.619,00
- Dana Penyesuaian BOS	8.176.660.137,16	6.346.193.738,16
- Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	5.695.147.500,00	5.807.897.500,00
- DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	828.612.500,00	
- DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	13.633.121,00	
- DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	114.233.600,00	
- DAK Fisik Reguler Bidang kesehatan dan KB	317.089.013,22	
- DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	2.599.000,00	
- DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	30.527.341,45	
- DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	863.046.028,00	
- DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	5.232.000,00	
- Silpa BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	4.400.934.134,34
- Silpa BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
- Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.551.719.416,40
- Silpa BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
- Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	5.124.325.375,60	4.368.821.546,06
- Silpa BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	600.000,00
- Pencairan Dana Cadangan	-	179.508.045,00
- Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	45.205.464.516,55
b. Pencairan Dana Cadangan		
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410.000.000,00	
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	5.725.732,00
e. Penerimaan Piutang Daerah	12.620.000,00	
f. Pelepasan Investasi	-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.762.753.122,45	226.448.050.491,52



	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	Rp	Rp
5.1.3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
b. Penyertaan Modal :	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
- Penyertaan modal kepada PD BPR Bank Jogja		
- Penyertaan modal kepada PDAM Tirtamarta		
- Penyertaan modal kepada PT BPD DIY	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	200.762.753.122,45	189.173.050.491,52
5.1.3. 3 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TA 2020	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum Daerah yang terdiri dari :	326.475.196.823,90	176.870.665.396,34
- Kas di Kas Daerah	326.448.450.039,90	176.836.026.304,34
- Deposito		
- Sisa U P/ T U	7.272.715,00	34.639.092,00
- Titipan di Kas Bendahara Penerimaan	13.090.669,00	
- Titipan di Kas Bendahara Pengeluaran	6.383.400,00	
Sisa BOS	5.434.645.537,16	8.176.660.137,16
Sisa Kas BLUD RSUD	35.746.744.809,51	16.315.175.635,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	1.087.890.837,44	3.562.497.919,44
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	2.383.386.238,97	1.669.279.394,65
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	4.313.105.563,43	5.124.325.375,60
Sisa Kas BLUD UPT Pratama	7.379.376.649,75	8.539.523.751,80
Sisa Kas BLUD UPT Logam	93.958.368,20	82.005.512,20
JUMLAH SiLPA TA 2020	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
Jumlah tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum	176.870.665.396,34	188.549.873.780,14
- Kas di Kas Daerah	176.836.026.304,34	68.225.493.976,14
- Deposito	-	120.000.000.000,00
- Sisa U P/ T U	34.639.092,00	324.379.804,00
Sisa Kas BOS	8.176.660.137,16	6.413.442.731,16
Sisa Kas BLUD RSUD	16.315.175.635,26	15.455.907.772,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	3.562.497.919,44	4.400.934.134,34
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	1.669.279.394,65	1.551.719.416,40
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	5.124.325.375,60	4.368.821.546,06
Sisa Kas BLUD RS Pratama	8.539.523.751,80	5.667.427.499,56
Sisa Kas BLUD UPT Logam	82.005.512,20	34.197.879,60
	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN ((SiLPA/SiKPA))	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 yang terdiri dari :		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kas Umum	326.475.196.823,90	176.870.665.396,34
- Kas di Kas Daerah	326.448.450.039,90	176.836.026.304,34
- Deposito	-	-
- Sisa U P/ T U	7.272.715,00	34.639.092,00
- Titipan di Kas Bendahara Penerimaan	13.090.669,00	
- Titipan di Kas Bendahara Pengeluaran	6.383.400,00	
	-	
Sisa BOS	5.434.645.537,16	8.176.660.137,16
Sisa Kas BLUD RSUD	35.746.744.809,51	16.315.175.635,26
Sisa Kas BLUD Taman Pintar	1.087.890.837,44	3.562.497.919,44
Sisa Kas BLUD UPT Pusat Bisnis	2.383.386.238,97	1.669.279.394,65
Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	4.313.105.563,43	5.124.325.375,60
Sisa Kas BLUD RS Pratama	7.379.376.649,75	8.539.523.751,80
Sisa Kas BLUD UPT Logam	93.958.368,20	82.005.512,20
	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.2.4. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 dan 2019		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. A S E T

5.3.1.1. ASET LANCAR

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Kas di Kas Daerah	326.448.450.039,90	176.886.586.123,00
<p>Kas di Kas Daerah sebesar Rp326.448.450.039,90 merupakan saldo kas Pemerintah Kota Yogyakarta yang seluruhnya berada di Rekening Kas Umum Daerah di Bank BPD DIY. Terdiri dari Rp326.448.450.039,90 merupakan Saldo Kas di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Jumlah tersebut termasuk Rp1.863.178.897,00 yang ada di Rekening Koran BPD DIY yang merupakan sisa Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang harus dikembalikan atau disetor ke RKUN.</p>		
b. Kas di Bendahara Pengeluaran		
1) Sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang	7.272.715,00	34.639.092,00
2) Pajak Belum Disetor		
3) Titipan di Bendahara Pengeluaran	6.383.400,00	
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	13.656.115,00	34.639.092,00
<p>Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.272.715,00 merupakan sisa uang persediaan (UP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.765.671,00 dan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp507.044,00 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kebudayaan.</p> <p>Titipan di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas di BLUD UPT Logam yang masuk pada rekening Bendahara Pengeluaran UPT Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat di Lampiran 1B.</p>		
c. Kas di Bendahara Dana BOS		
(a) Sisa Kas BOSNAS dan BOS provinsi pada SDN Se-Kota Yogyakarta	2.286.048.450,16	3.698.087.250,16
(b) Sisa Kas BOSNAS dan BOS provinsi pada SMPN Se-Kota Yogyakarta	3.148.597.087,00	4.478.572.887,00
(c) Sisa Kas BOSDA	-	-
Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS	5.434.645.537,16	8.176.660.137,16
<p>Jumlah Kas dan Setara Kas tersebut tidak termasuk sisa kas Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Bendahara sekolah dan di Rekening siswa yang belum dibelanjakan sampai dengan akhir tahun 2020. Saldo akhir JPD untuk sekolah dalam kota Tahun 2020 yang belum dibelanjakan sebesar Rp252.060.719,00 dan untuk Saldo akhir JPD untuk sekolah luar kota tahun 2020 sebesar Rp 0,00. Rincian sisa kas BOS di sekolah-sekolah dan JPD terdapat pada Lampiran 1C</p>		
d. Kas di Bendahara Penerimaan	13.090.669,00	-
<p>Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo rekening Giro di Bank BNI 2018778895 tampungan penerimaan pendapatan pajak PBB di BPKAD sebesar Rp13.090.669,00</p>		
e. Kas di BLUD		
1) Kas di BLUD RSUD	35.746.744.809,51	16.315.175.635,26
2) Kas di BLUD Taman Pintar	1.136.039.337,44	3.818.271.319,44
3) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Danurejan I	188.036.452,20	229.822.314,20
4) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Danurejan II	140.227.274,14	132.755.292,14
5) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gedongtengen	171.619.108,00	218.538.683,00
6) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondokusuman I	533.442.357,64	354.533.368,64
7) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondokusuman II	160.592.002,00	194.223.955,00
8) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Gondomanan	146.689.710,00	135.460.575,00
9) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Jetis	162.554.580,00	438.609.408,00
10) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kotagede I	37.092.914,00	100.267.951,00
11) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kotagede II	122.321.744,00	119.297.146,00
12) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Kraton	235.431.361,00	261.308.481,00
13) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Mantrijeron	405.435.650,00	477.872.287,00
14) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Mergangsan	892.452.988,00	1.060.595.546,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
15) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Ngampilan	159.716.722,45	304.003.649,62
16) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Pakualaman	301.599.235,00	348.343.231,00
17) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Tegalrejo	290.657.823,00	127.865.034,00
18) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Umbulharjo I	235.805.702,00	313.553.238,00
19) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Umbulharjo II	26.312.858,00	84.881.489,00
20) Kas di BLUD Unit Kerja Pusk. Wirobrajan	103.117.082,00	222.393.727,00
21) Kas di BLUD RS Pratama	7.379.376.649,75	8.539.523.751,80
22) Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis	2.383.390.452,42	1.713.971.665,87
23) Kas di BLUD UPT Logam	93.958.368,20	82.005.512,20
Jumlah Kas di BLUD	51.052.615.180,75	35.593.273.260,17

Kas di BLUD RSUD sebesar Rp35.746.744.809,51 terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001162 sebesar Rp3.931.084.009,26, saldo rekening giro pada Bank BNI No. 371.195.0001 sebesar Rp449.165.079,00, saldo rekening giro pada Bank Mandiri No. 137-00-1396574-0 sebesar Rp336.394.654,25, Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp30.101.067,00 dan deposito sebesar Rp31.000.000.000,00 pada Bank BPD DIY. Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD Taman Pintar sebesar Rp1.136.039.337,44 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.000341 sebesar Rp63.162.911,44, sisa kas di Bendahara Penerimaan Rp52.876.426,00 kas kecil sebesar Rp20.000.000,00 dan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 yang seluruhnya ditempatkan pada Bank BPD DIY. Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Danurejan I sebesar Rp188.036.452,20 terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001326 sebesar Rp181.736.452,20 dan Rp6.300.000,00 di Kas BLUD Bendahara .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Danurejan II sebesar Rp140.227.274,14 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001333 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gedongtengen sebesar Rp171.619.108,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001330 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondokusuman I sebesar Rp533.442.357,64 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001293 .

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondokusuman II sebesar Rp160.592.002,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001327.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Gondomanan sebesar Rp146.689.710,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001296.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Jetis sebesar Rp162.554.580,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001268.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kotagede I sebesar Rp37.092.914,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001295.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kotagede II sebesar Rp122.321.744,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001325.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kraton sebesar Rp235.431.361,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001328.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Mantrijeron sebesar Rp405.435.650,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001294.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Mergangsan sebesar Rp892.452.988,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001271.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Ngampilan sebesar Rp159.716.722,45 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001331

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Pakualaman sebesar Rp301.599.235,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001332.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Tegalrejo sebesar Rp290.657.823,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001270.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Umbulharjo I sebesar Rp235.805.702,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001269.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Umbulharjo II sebesar Rp23.312.858,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001329.

Kas di BLUD Unit Kerja Puskesmas Wirobrajan sebesar Rp103.117.082,00 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001324.

Kas di BLUD RS Pratama sebesar Rp7.379.376.649,75 terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001469 sebesar Rp7.176.278.018,95, saldo rekening giro Bank Mandiri Nomor rekening No. 137-00-1600008-1 sebesar Rp203.098.630,80.

Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.383.390.452,42 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001290 sebesar Rp383.390.452,42, deposito sebesar Rp2.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank BRI Sebesar Rp1.000.000.000,00, Bank BPD DIY sebesar Rp500.000.000,00 dan Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 dan titipan transfer uji coba SIM oleh BPD DIY sebesar Rp4.213,45, Rincian deposito terdapat pada **Lampiran 1D**.

Kas di BLUD UPT Logam Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp93.958.368,20 merupakan saldo rekening giro pada Bank BPD DIY No. 006.111.001515 sebesar Rp93.958.368,20.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
f. Kas Lainnya	-	-

Jumlah kas lainnya merupakan sisa kas dana bergulir pada Dinas Koperasi, UMK, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindagkoptan

Kas di Tim Dana Bergulir adalah Kas atas penerimaan Dana Bergulir yang ada pada rekening:

Nama & No. Rekening	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
PT. BPD DIY No.006.211.011841 a.n Disperindagkop untuk angsuran pokok PEW Th.2006	-	-
PT BPD DIY No.006.221.014560 a.n Disperindagkop untuk Angsuran bunga PEW Th.2006	-	-
PT. BPD DIY No.006.221.008966 a.n Disperindagkop untuk Angsuran pokok LKM	-	-
PT. BPD DIY No.006.221.008483 a.n Disperindagkop untuk Cad likuiditas Pokja	-	-
PT BPD DIY 'No.006.221.008484 Pokja dan Fasilitas	-	-
PT BPD DIY No.006.221.011047 Cadangan Resiko Pokja	-	-
PD BPR Bank JogJa No.32/22.7985 a.n Dinas Perekonomian untuk Angsuran pokok dan bunga Tenda PKL	-	-
Jumlah	-	-

Rincian sisa kas dana bergulir terdapat pada **Lampiran 1E**.

JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	382.962.457.541,81	220.691.158.612,33
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
g. PIUTANG PAJAK	128.534.908.185,00	102.125.917.028,00

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Piutang Pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp128.534.908.185,00 dan Rp102.125.917.028,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pajak Hotel	5.768.548.376,00	6.009.137.605,00
2) Pajak Restoran	5.563.610.868,00	4.397.149.006,00
3) Pajak Hiburan	2.321.688.016,00	1.833.748.516,00
4) Pajak Reklame	6.846.875.828,00	6.020.168.151,00
5) Pajak Parkir	965.161.552,00	1.003.546.605,00
6) Pajak Air Bawah Tanah	538.744.030,00	493.881.530,00
7) PBB	106.530.279.515,00	82.368.285.615,00
	128.534.908.185,00	102.125.917.028,00

Piutang Pajak yang disajikan merupakan piutang pokok pajak. Piutang PBB sebesar Rp 106.530.279.515,00 sudah termasuk pelimpahan piutang dari KPP Pratama yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp48.641.639.274,00.

Piutang Pajak dan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2020 tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

Umur Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1) < 1 tahun	39.401.731.696,00	197.008.658,48	39.204.723.037,52
2) 1 -2 tahun	28.152.184.316,00	2.815.218.431,60	25.336.965.884,40
3) 2 - 5 tahun	23.228.606.872,00	11.614.303.436,00	11.614.303.436,00
4) > 5 tahun	37.752.385.301,00	37.752.385.301,00	0,00
	128.534.908.185,00	52.378.915.827,08	76.155.992.357,92

Daftar Piutang Pajak dan Rincian saldo Piutang Pajak berdasarkan umur dapat dilihat pada **Lampiran 2A dan Lampiran 2B** Persentase penyisihan piutang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penyelesaian piutang pajak sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
h. PIUTANG RETRIBUSI	3.971.869.559,00	3.156.534.910,00

Piutang retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Piutang Retribusi yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Bayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.971.869.559,00 dan Rp3.156.534.910,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	108.073.457,00	111.005.034,00
2) Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	980.500,00	980.500,00
3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.210.149.995,00	643.708.551,00
4) Retribusi Pasar (Kios, Los, Lapak)	2.219.533.119,00	1.868.189.698,00
5) Retribusi Parkir	191.542.388,00	291.061.027,00
6) Retribusi IMBB	241.590.100,00	241.590.100,00
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI	3.971.869.559,00	3.156.534.910,00

Rincian saldo Piutang Retribusi berdasarkan umur dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.971.869.559,00 tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) < 1 bulan	488.877.000,00	2.444.385,00	486.432.615,00
2) > 1 -3 bulan	258.339.500,00	25.833.950,00	232.505.550,00
3) > 3 - 12 bulan	903.622.782,00	451.811.391,00	451.811.391,00
4) >12 bulan	2.321.030.277,00	2.321.030.277,00	0,00
	3.971.869.559,00	2.801.120.003,00	1.170.749.556,00

Persentase penyisihan piutang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penyelesaian piutang retribusi sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
i. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN	158.724.999,00	169.124.999,00

Jumlah tersebut merupakan piutang yang sudah jatuh tempo terakhir pada tahun 2015 namun masih ada realisasi pembayaran atas dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada 18 BMT di Kota Yogyakarta sebesar Rp158.724.999,00. Penyajian saldo akun Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dilakukan untuk kepentingan penyisihan piutang dan penghitungan beban penyisihan piutang sehingga dimungkinkan dalam bagian lancar piutang ada piutang dalam kategori diragukan atau macet. Penyajian tersebut berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16. Bagian Lancar Pemberian Pinjaman dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	0,00	0,00	0,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	158.724.999,00	158.724.999,00	0,00
	158.724.999,00	158.724.999,00	0,00

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan pemberian pinjaman sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Tagihan Pemberian Pinjaman dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
j. BAGIAN LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN	225.000.000,00	247.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan bagian lancar piutang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)	-	22.000.000
2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa (BOT)	225.000.000	225.000.000
JUMLAH BAG. LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN	225.000.000,00	247.000.000,00

Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	225.000.000,00	1.125.000,00	223.875.000,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	0,00	0,00	0,00
	225.000.000,00	1.125.000,00	223.875.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build, Operate and Transferred* (BOT). Kemitraan ini dimaksudkan untuk membangun dan mengelola aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan di akhir masa perjanjian, aset yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selama masa pengelolaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak mendapatkan kontribusi pendapatan sesuai perjanjian. Rincian kemitraan BOT adalah sebagai berikut :

1) *Pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis.*

Kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras dimulai pada tanggal 16 Agustus 2004, berlaku selama jangka waktu 15 tahun dan berakhir pada tahun 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan investasi dalam bentuk aset tanah dan bangunan sebesar Rp861.000.000,00 dan investasi pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00.

2) *Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa.*

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade) dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 untuk jangka waktu 20 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2025. Investasi yang disertakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seluruh nilai tanah dan bangunan dengan nilai Rp6.408.300.000,00, sedangkan investasi pihak ketiga sebesar Rp6.895.566.560,00.

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan bagi hasil kemitraan sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5A**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
k. PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN	1.200.000,00	2.000.000,00

Piutang denda timbul karena Hotel Kayu Manis tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap Bagi Hasil Kemitraan tahun 2019

1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)	1.200.000,00	2.000.000,00
JUMLAH PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN	1.200.000,00	2.000.000,00

Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	1.200.000,00	6.000,00	1.194.000,00
2) Kurang Lancar	-	-	-
3) Diragukan	-	-	-
4) Macet	-	-	-
	1.200.000,00	6.000,00	1.194.000,00

Rincian Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5C**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
k. BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA	1.646.911.168,00	1.524.845.168,00
Jumlah tersebut merupakan bagian lancar piutang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas Tagihan Sewa kerjasama penyewaan aset oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut:		
1) Pengelolaan Pasar Ikan Higienis Terpadu oleh PT Bummy Harapan Umat	60.000.000,00	60.000.000,00
2) Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita Dinas Pendidikan	-	12.693.000,00
3) Tagihan atas hak pengelolaan titik reklame	1.149.239.168,00	1.149.239.168,00
4) Tagihan sewa ruang oleh PD Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-
5) Tagihan sewa sebagian ruang Dinas Perijinan oleh PT. BPD DIY	-	61.000.000,00
6) Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita	-	-
7) Tagihan sewa Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	243.941.000,00	140.622.000,00
8) Tagihan sewa fotocopy Dinas Pendidikan oleh Dharma Wanita	8.851.000,00	8.851.000,00
9) Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	184.880.000,00	92.440.000,00
JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA	1.646.911.168,00	1.524.845.168,00

Bagian Lancar Tagihan Sewa dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	201.414.000,00	1.007.070,00	200.406.930,00
2) Kurang Lancar	172.579.000,00	17.257.900,00	155.321.100,00
3) Diragukan	41.280.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00
4) Macet	1.231.638.168,00	1.231.638.168,00	0,00
	1.646.911.168,00	1.270.543.138,00	376.368.030,00

Penyajian saldo akun Bagian Lancar Tagihan Sewa per 31 Desember 2020 dilakukan untuk kepentingan penyisihan piutang dan penghitungan beban penyisihan piutang sehingga dimungkinkan dalam bagian lancar piutang ada piutang dalam kategori diragukan atau macet.

Penyelesaian piutang bagian lancar tagihan pemberian pinjaman sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Sewa dapat dilihat pada **Lampiran 6**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
I. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI	-	-

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
m. PIUTANG TRANSFER-DANA BAGI HASIL	1.602.395.078,00	2.049.012.238,00

Jumlah piutang transfer 2020 merupakan piutang bagi hasil pajak daerah provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No. 09/KEP/2021 tentang Bagi Hasil Kurang Bayar Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020. Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang transfer yang akan diterima pada tahun 2021.

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	1.602.395.078,00	8.011.975,39	1.594.383.102,61
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	0,00	0,00	0,00
	1.602.395.078,00	8.011.975,39	1.594.383.102,61

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
n. PIUTANG PAD LAINNYA	36.739.432.450,00	32.276.757.330,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PAD lainnya per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

1) Piutang denda Pasar Ikan Higienis PT. Bummy Harapan Umat	6.760.000,00	6.760.000,00
2) Piutang denda sewa hunian Rusunawa Cokrodirjan	23.140.000,00	15.251.500,00
3) Piutang denda keterlambatan pengadaan barang (CV. Restu Biyung)	36.874.656,00	36.874.656,00
4) Piutang denda PBB	34.435.820.803,00	29.949.432.704,00
5) Piutang denda pajak hotel	732.357.691,00	733.019.805,00
6) Piutang denda pajak restoran	23.463.160,00	16.767.111,00
7) Piutang denda pajak Hiburan	8.350.407,00	15.458.455,00
8) Piutang denda pajak parkir	806.600,00	806.600,00
9) Piutang bunga pajak hotel	908.971.036,00	1.165.846.544,00
10) Piutang bunga pajak restoran	301.835.344,00	232.090.308,00
11) Piutang bunga pajak hiburan	141.630.225,00	-
12) Piutang bunga pajak reklame	-	-
13) Piutang bunga pajak parkir	70.178.488,00	55.205.607,00
14) Piutang bunga pajak air bawah tanah	-	-
15) Piutang denda titik reklame (PT Oscar Sembilan Pariwara)	49.244.040,00	49.244.040,00
	36.739.432.450,00	32.276.757.330,00

JUMLAH PIUTANG PAD LAINNYA

Piutang denda keterlambatan pengadaan barang dari CV. Restu Biyung merupakan reklas dari piutang Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2016

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	3.165.993.214,00	15.829.966,07	3.150.163.247,93
2) Kurang Lancar	9.723.484.829,00	972.348.482,90	8.751.136.346,10
3) Diragukan	8.453.741.820,00	4.226.870.910,00	4.226.870.910,00
4) Macet	15.396.212.587,00	15.396.212.587,00	0,00
	36.739.432.450,00	20.611.261.945,97	16.128.170.504,03

Penyelesaian Piutang PAD Lainnya sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih

Rincian Piutang PAD Lainnya ada pada **Lampiran 8A**.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
o. PIUTANG LAINNYA	4.964.904.450,00	19.636.859.641,60
Piutang lainnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:		
1) Piutang sewa kios makanan minuman dan pengelolaan kamar mandi/WC kios buku di kompleks Taman Pintar	304.512.500,00	232.780.200,00
2) Piutang RSUD	1.891.170.638,00	12.969.674.620,00
3) Piutang Listrik Kios Buku di Kompleks Taman Pintar	4.321.190,00	4.321.190,00
4) Piutang tagihan air Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	38.148.150,00	23.649.550,00
5) Piutang Puskesmas	2.726.751.972,00	6.406.434.081,60
JUMLAH PIUTANG LAINNYA	4.964.904.450,00	19.636.859.641,60

Piutang lainnya dan penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.964.904.450,00 dikelompokkan berdasarkan umur sebagai berikut :

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	4.067.213.354,00	20.336.066,77	4.046.877.287,23
2) Kurang Lancar	240.864.417,00	24.086.441,70	216.777.975,30
3) Diragukan	504.514.090,00	252.257.045,00	252.257.045,00
4) Macet	152.312.589,00	152.312.589,00	0,00
	4.964.904.450,00	448.992.142,47	4.515.912.307,53

Penyelesaian piutang lainnya sampai saat ini masih dilakukan dengan berbagai upaya penagihan terhadap piutang yang masih ada kemungkinan tertagih.

Rincian piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8B**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
p. ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	69.050.075,61	1.603.287.437,68

Jumlah tersebut merupakan asuransi dibayar dimuka untuk premi asuransi Barang Milik Daerah kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibayar pada tahun 2020 sebesar Rp48.750.000,00 pada BPKAD dan asuransi dibayar dimuka bangunan gedung sebesar Rp17.968.096,43 dan asuransi kendaraan sebesar Rp2.331.979,18 pada Dinas Pariwisata yang dibayar tahun 2020 Rincian asuransi dibayar di muka dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
q. SEWA DIBAYAR DIMUKA	382.333.333,33	-

Jumlah tersebut merupakan sewa dibayar dimuka untuk sewa tanah milik Kraton untuk pasar Beringharjo, Pingit, Ngasem



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
r. PERSEDIAAN	49.343.251.887,51	36.723.783.804,99
<p>Persediaan dinilai berdasar metode perpetual FIFO bulanan. Jumlah tersebut di atas merupakan sisa persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai, diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Yogyakarta dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:</p>		
1) ATK	3.835.942.427,24	3.951.882.155,47
2) Pakaian Dinas	146.377.872,60	284.165.131,71
3) Spare part Kendaraan	-	2.044.750,00
4) Bahan Kebersihan	1.944.023.453,29	1.011.545.271,16
5) Barang Cetakan	2.719.989.810,46	3.425.410.162,82
6) Karcis	488.402.045,00	366.975.645,00
7) Alat Listrik/Elektronik	1.557.539.965,74	1.917.467.123,50
8) Obat-obatan	17.046.406.878,65	14.324.574.427,46
9) Bahan Material	813.963.511,90	2.086.958.406,10
10) Bahan Makanan	-	2.009.595,00
11) Tanaman Hias	28.542.500,00	-
12) Peralatan Kerja	695.515.873,90	556.429.237,74
13) Reagen dan Alat Laboratorium	4.292.708.842,70	2.010.109.444,75
14) Rambu dan APPIL	-	-
15) Bahan Komputer	892.580.890,25	754.413.667,50
16) BBM dan Pelumas	92.385.134,00	175.459.090,00
17) Alat Kesehatan	1.037.920.288,91	-
18) Alat Bahan Kimia/Medis	6.037.892.500,59	1.937.519.384,81
19) Vaksin	1.059.052.841,20	638.096.354,75
20) Perlengkapan Rumah Tangga	2.802.651.327,77	2.193.222.075,36
21) Barang Hibah/Hadiah	2.969.542.877,10	73.714.721,00
22) Bibit Ikan	7.955.710,00	12.627.010,00
23) Alat Kontrasepsi	130.877.548,00	80.313.395,00
24) Lain-lain (Materai, Bendera, Alat Pusaka)	114.597.336,00	-
25) Peralatan Uji	349.832.156,00	371.550.297,00
26) Linen	237.885.596,20	150.274.352,20
27) Tanaman	2.120.000,00	202.132.500,00
28) Tanaman Buah	9.834.500,00	-
29) Bahan / Bibit Tanaman Kebun Plasma	7.314.000,00	-
30) Bahan / Bibit Tanaman Di Laboratorium Kuljar	-	-
31) Benda Pos	20.856.000,00	190.439.606,66
32) Pakaian Olahraga	540.000,00	4.450.000,00
JUMLAH PERSEDIAAN	49.343.251.887,51	36.723.783.804,99

Jumlah persediaan di atas termasuk obat yang kadaluwarsa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.199.388,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.374.310.808,36 dan pada RSUD sebesar Rp46.893.136,68. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

JUMLAH ASET LANCAR 532.923.737.696,35 351.153.371.463,13



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24

a. INVESTASI NON PERMANEN

INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA **708.269.692,00** **710.489.692,00**
Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir yang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* (NRV) yaitu sebesar jumlah penyaluran dana bergulir kepada masyarakat dikurangi angsuran pokok dan ditambah dengan saldo rekening tabungan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
1) Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan	48.632.554,00	48.632.554,00
2) Program Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	504.889.188,00	507.109.188,00
3) Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta	154.747.950,00	154.747.950,00
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA	708.269.692,00	710.489.692,00

Investasi non permanen dan penyisihan investasi non permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp719.202.724,00 tersebut berdasarkan umurnya dikelompokkan sebagai berikut :

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	0,00	0,00	0,00
2) Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00
3) Diragukan	0,00	0,00	0,00
4) Macet	708.269.692,00	708.269.692,00	0,00
	708.269.692,00	708.269.692,00	0,00

Penyajian dana bergulir sesuai NRV-nya sejalan dengan Akuntansi Dana Bergulir sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang diterbitkan pada Agustus 2008. Perhitungan NRV dan rincian rekening Dana Bergulir pada **Lampiran 11.**

Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan tujuan untuk memperkuat struktur keuangan/permodalan dalam bentuk dana bergulir. Program ini telah disalurkan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Tahun 2003 sebesar Rp973.000.000,00 (53 KSP/LKM), Pokja Tahun 2006 sebesar Rp910.000.000,00 (50 KSP/LKM), Pokja Tahun 2007 Rp299.000.000,00, dan Pokja Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (38 KSP/LKM). Bank pelaksana yang ditunjuk adalah BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta.

Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) disalurkan kepada pengusaha/kelompok usaha mikro dan kecil non pedagang kaki lima dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) dalam bentuk dana bergulir. Program ini telah disalurkan melalui Pokja Tahun 2006 sebesar Rp1.048.000.000,00 (28 kelompok) dan Pokja Tahun 2007 sebesar Rp912.000.000,00 (23 kelompok). Bank pelaksana yang ditunjuk adalah BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
b. INVESTASI PERMANEN	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
1) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
1) PT. Bank BPD DIY	209.145.000.000,00	189.145.000.000,00
2) PD. BPR Bank Jogja	166.617.302.951,26	175.269.284.949,09
3) PDAM Tirtamarta	59.031.759.063,41	57.598.423.658,80
4) BUKP se-Kota Yogyakarta	411.000.000,00	411.000.000,00
5) PT. Radio Swara Adhiloka	0,00	270.481.312,48
6) PD. Jogjatama Vishesha	105.661.665.967,12	109.954.658.297,87
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24

Penilaian atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap perusahaan daerah/BUMD sebagaimana tersebut di atas menggunakan Metode Ekuitas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
2) INVESTASI PERMANEN LAINNYA	-	-
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	540.866.727.981,79	532.648.848.218,24

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.3.1.3. ASET TETAP	3.376.707.490.306,00	3.318.709.338.013,44

Jumlah tersebut merupakan saldo aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Pemerintah Kota Yogyakarta sejak Tahun 2015 telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Oleh sebab itu, maka Aset Tetap Tahun 2015 telah dilakukan penyusutan. Penyajian aset tetap mempedomani Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
a) Tanah	1.906.244.295.189,22	1.884.638.446.869,22
b) Peralatan dan Mesin	806.756.272.814,68	754.164.705.849,33
c) Bangunan Gedung	1.127.571.463.054,25	1.076.780.987.891,51
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.219.972.704.639,17	2.108.434.251.782,83
e) Aset Tetap Lainnya	42.180.666.375,67	41.148.254.654,97
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.523.372.875,51	22.997.204.784,98
g) Akumulasi Penyusutan	(2.749.541.284.642,50)	(2.569.454.513.819,91)
JUMLAH ASET TETAP	3.376.707.490.306,00	3.318.709.338.013,44



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a) Tanah

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan aset tetap tanah sebesar Rp. 55.316.191.038,00 yang terdiri dari : Belanja Modal Tanah untuk Perkantoran sejumlah 1 bidang senilai Rp. 848.831.400,00 , Belanja Modal Tanah untuk RTHP sejumlah 9 bidang senilai Rp.12.541.651.240,00 , Belanja Modal Tanah untuk Fasilitas umum sejumlah 2 bidang senilai Rp. 4.529.629.280,00 , Selain itu terdapat hibah sejumlah 5 bidang tanah untuk fasilitas umum senilai Rp. 917.645.000,00 , Hasil pensertifikatan tanah kegiatan identifikasi tanah negara untuk fasilitas umum senilai Rp. 4.591.250.000,00 serta Terdapat penggabungan sertifikat tanah sejumlah 8 bidang menjadi 4 bidang tanah menjadi senilai Rp. 31.887.184.118,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2020 sebesar Rp. 33.710.342.718,00 yang terdiri dari koreksi pencatatan penggabungan sertifikat tanah Rp. 31.887.342.718,00 dan koreksi pencatatan pemisahan aset gedung Kelurahan Patehan yang masih dicatat di aset tanah Kelurahan Patehan sebesar Rp. 1.823.000.000,00

Dari aset tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 99 bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Kota Yogyakarta, merupakan pinjam pakai tanah Kraton. Rincian Pinjam Pakai Tanah Kraton dapat dilihat pada **Lampiran CaLK 13H**

b) Peralatan dan Mesin

Total Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp.Rp. 83.546.676.176,48 yang terdiri dari : Belanja Modal sebesar Rp. 51.917.282.453,47 , belanja barang dan jasa sebesar Rp.440.125.586,37 , belanja tidak terduga (covid-19) sebesar Rp. 12.800.268.994,00 , Hibah sebesar Rp. 753.581.964,75 , Koreksi Pencatatan Rp. 14.074.512.098,30 , Terdapat juga kapitalisasi pemeliharaan senilai Rp.1.177.543.058,22 , Reklasifikasi aset lain lain barang tidak ditemukan sensus 2018 yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.383.362.021,37.

Pada Tahun 2020 terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.32.610.535.932,52 yang terdiri dari penghapusan barang daerah sebesar Rp. 14.096.358.459,64 dan koreksi pencatatan sebesar Rp.319.810.867,00 dan reklasifikasi ke aset lain-lain atas barang rusak hasil sensus mandiri (lanjutan sensus Tahun 2018) sebesar Rp.18.194.366.605,87.

Nilai penambahan dan pengurangan tersebut termasuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp300.000,00. Namun demikian saldo peralatan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.806.756.272.814,68 sudah tidak termasuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp300.000,00 dengan nilai sebesar Rp. 14.506.185.148,61

c) Bangunan gedung

Penambahan aset tetap bangunan gedung Tahun 2020 sebesar Rp.53.244.809.823,62 yang terdiri dari : Belanja Modal senilai Rp.28.511.886.903,97 , belanja barang dan jasa sebesar Rp.6.204.910,34 , belanja tidak terduga (Covid-19) sebesar Rp. 1.568.514.760,00 , koreksi pencatatan sebesar Rp.4.476.039.090,70 , Kapitalisasi aset senilai Rp.10,886,758,393,74 , reklasifikasi aset lain lain barang tidak ditemukan sensus 2018 yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp.363.850.000,00. dan dari KDP kantor Dinas Lingkungan Hidup Rp.7,431,555,764,87.

Terdapat pengurangan aset tetap bangunan gedung Tahun 2020 sebesar Rp.2.731.796.606,95 yang terdiri dari : penghapusan barang daerah sebesar Rp.2.717.294.713,17 , reklasifikasi ke bangunan gedung dan aset lain-lain hasil sensus 2018 yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp.14.501.893,78.

Nilai penambahan dan pengurangan tersebut termasuk Bangunan dan Gedung yang nilainya dibawah Rp.10.000.000,00. Namun demikian saldo peralatan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.127.571.463.054,25 sudah tidak termasuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp300.000,00 dengan nilai sebesar Rp. 75.938.276.518,06

d) Jalan Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp.111.931.072.902,30 yang terdiri dari : Belanja Modal sebesar Rp.50.893.064.230,65 , belanja barang dan jasa sebesar Rp.322.877.254,51 , hibah dari kementerian PUPR sebesar Rp.40.412.948.697,00 dan hibah street furniture dari OJK senilai Rp.150.000.000,00 , kapitalisasi nilai aset akibat kegiatan pemeliharaan sebesar Rp.20.057.914.925,14 , reklasifikasi dari aset lain-lain hasil sensus 2018 yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp.94.267.795,00.

Terdapat pengurangan aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 akibat penghapusan barang milik daerah sebesar Rp.308.964.409,46.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

e) Aset tetap lainnya

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar Rp. 2.818.487.450,32 yang terdiri dari : Belanja Modal senilai Rp.2.712.809.308,75 , belanja barang dan jasa sebesar Rp.8.487.866,57 , hibah sebesar Rp.61.104.375,00 , koreksi pencatatan sebesar Rp.10.038.800,00 , reklasifikasi dari hasil sensus 2018 yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp.26.047.100,00.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp.1.786.075.729,74, yang terdiri dari Penghapusan barang milik daerah sebesar Rp.807.769.613,69 dan reklasifikasi barang rusak hasil sensus mandiri tahun 2020 ke aset lain-lain sebesar Rp.978.306.116,05.

f) Konstruksi dalam pengerjaan

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 dari Penambahan Belanja Modal sebesar Rp.7.957.723.855,40.

Reklasifikasi bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup ke aset gedung dan bangunan senilai Rp.7.431.555.764,87

g) Akumulasi Penyusutan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan akumulasi penyusutan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.749.541.284.642,50 yang terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
1) Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2020	2.569.454.513.819,91	2.373.370.499.192,87
2) Penyesuaian penyusutan	26.277.237.863,70	38.111.543.820,33
3) Penyusutan Tahun 2020	153.809.532.958,89	157.972.470.806,71
	2.749.541.284.642,50	2.569.454.513.819,91

Akumulasi Penyusutan tersebut tidak termasuk penyusutan Aset Tetap Lainnya yang belum disusutkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengatur umur ekonomis dari Aset Tetap Lainnya.

Dengan adanya kebijakan Penyusutan Aset Tetap tersebut, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp 3.376.707.490.306,00

Rekap Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 13A - Lampiran 13H**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.3.1.4. DANA CADANGAN	-	-

Dana Cadangan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pembayaran sebagian Kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Perwita Karya sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta.

Rekening Dana Cadangan ditutup pada tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

		<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
5.3.1.5. ASET LAINNYA		56.000.989.251,22	44.381.879.548,91
a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya		2.752.564.455,00	2.798.981.468,00
1) Kas Jaminan Bongkar adalah Kas titipan Jaminan Bongkar, yang ada pada rekening:			
Nama & No. Rekening	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	
(a) Giro BPD DIY No. 006.111.001060 a.n. DPDPK-Jabong Reklame Permanen untuk Menampung uang jabong reklame permanen	1.784.310.036,00	1.835.475.991,00	
(b) Tabungan BPD DIY No. 006.221.016.390 a.n. DPDPK-Jabong Reklame Insidentil untuk Menampung uang jabong reklame insidentil	168.254.419,00	163.505.477,00	
(c) Deposito BPD DIY No a.n. DPDPK-Jabong Permanen untuk Menampung deposito jabong reklame permanen	800.000.000,00	800.000.000,00	
Jumlah	2.752.564.455,00	2.798.981.468,00	
b. TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN		1.150.000.000,00	1.375.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang jangka panjang atas Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :			
		<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
1) Pengelolaan Penginapan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis (BOT)		-	-
2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa (BOT)		1.150.000.000,00	1.375.000.000,00
JUMLAH TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN		1.150.000.000,00	1.375.000.000,00
<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	1.150.000.000,00	5.750.000,00	1.144.250.000,00
2) Kurang Lancar	-	-	0,00
3) Diragukan	-	-	0,00
4) Macet	-	-	0,00
1.150.000.000,00		5.750.000,00	1.144.250.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build, Operate and Transferred* (BOT). Kemitraan ini dimaksudkan untuk membangun dan mengelola aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan diakhir masa perjanjian, aset yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selama masa pengelolaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak mendapatkan kontribusi pendapatan sesuai perjanjian. Rincian kemitraan BOT adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras oleh Hotel Kayu Manis.

Kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras dimulai pada tanggal 16 Agustus 2004, berlaku selama jangka waktu 15 tahun dan berakhir pada Tahun 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan investasi dalam bentuk aset tanah dan bangunan sebesar Rp861.000.000,00 dan investasi pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00.

2) Pengelolaan Reksa Arcade oleh PT Bumi Kusuma Santosa.

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade) dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 untuk jangka waktu 20 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2025. Investasi yang disertakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seluruh nilai tanah dan bangunan dengan nilai Rp6.408.300.000,00, sedangkan investasi pihak ketiga sebesar Rp6.895.566.560,00.

Rincian Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dapat dilihat pada **Lampiran 5B**.

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
c. TAGIHAN SEWA	92.440.000,00	184.880.000,00

Jumlah tersebut merupakan piutang atas Tagihan Sewa kerjasama penyewaan aset oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang disajikan kembali berdasarkan penerapan Akuntansi Piutang sesuai Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
1) Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-
2) Sewa sebagian Gedung Perijinan oleh BPD DIY Cabang Senopati	-	-
3) Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita (Balaikota)	-	-
4) Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan	-	-
5) Tagihan sewa tempat fotocopy Dinas Pendidikan	-	-
6) Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	92.440.000,00	184.880.000,00
JUMLAH TAGIHAN SEWA	92.440.000,00	184.880.000,00

Tagihan sewa dikelompokkan sebagai berikut:

<u>Umur Piutang</u>	<u>Nilai Piutang</u>	<u>Penyisihan</u>	<u>Nilai Bersih</u>
1) Lancar	92.440.000,00	462.200,00	91.977.800,00
2) Kurang Lancar	-	-	0,00
3) Diragukan	-	-	0,00
4) Macet	-	-	0,00
	92.440.000,00	462.200,00	91.977.800,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
--	-------------------------------	-------------------------------

d. TUNTUTAN GANTI RUGI

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 atas Piutang TPTGR yang jatuh tempo Tahun 2019 dan seterusnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
--	-------------------------------	-------------------------------

e. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengelolaan aset daerah, dalam bentuk kerjasama Built, Operate, and Transferred (BOT) serta kerjasama pengelolaan aset. Jumlah tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 jumlah tersebut merupakan nilai aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikerjasamakan, yang terdiri dari :

1) Kerjasama dengan PT. Perwita Karya atas Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan (BOT hingga Tahun 2032)		
2) Kerjasama dengan Hotel Kayumanis atas Pemanfaatan Pesanggrahan Ngestilaras (BOT hingga Tahun 2020) berakhir 16 februari 2020,	-	861.000.000,00
3) Kerjasama dengan PT. Bumi Kusuma Santosa atas Pemanfaatan Reksa Arcade (BOT hingga Tahun 2025)	6.408.300.000,00	6.408.300.000,00

JUMLAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 6.408.300.000,00 7.269.300.000,00

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
--	-------------------------------	-------------------------------

f. ASET TAK BERWUJUD

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tak berwujud berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebanyak 253 buah dan Kajian/penelitian sebanyak 370 buah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Manajemen (253 buah)	13.277.339.171,13	12.218.054.271,13
2) Kajian/penelitian (370 buah)	37.197.341.951,55	35.177.916.756,55
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(27.488.170.485,98)	(19.991.598.048,60)

JUMLAH ASET TAK BERWUJUD 22.986.510.636,70 27.404.372.979,08

Jumlah tersebut termasuk SISMIOP, POS PBB dan SIM Perencanaan yang belum diketahui nilainya karena dokumen pendukung yang belum ditemukan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15A dan Lampiran 15B**.

Penilaian beban amortisasi berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebesar Rp27.488.170.485,98, yang merupakan penjumlahan dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019 sebesar Rp19.991.598.048,60 ditambah dengan Beban Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp7.496.572.437,38. Perhitungan akumulasi amortisasi sudah mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
g. ASET LAIN-LAIN	22.617.386.359,52	5.357.144.501,83

Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu berupa Penyertaan pada Yayasan Purna Bhakti (YARNATI), aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak ditemukan fisiknya dan belum diproses lebih lanjut, aset yang masih dalam proses penghapusan dan aset tetap hasil lanjutan sensus barang daerah tahun 2018 yang tidak diketemukan dalam kondisi rusak yang belum diproses lebih lanjut. Jumlah penyertaan pada Yarnati semula adalah sebesar Rp.495.000.000,00 dan sudah ada realisasi pembayaran kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1992-2004 sebesar Rp411.680.000,00 sehingga saldo yang masih ada di Yarnati adalah sebesar Rp83.320.000,00.

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 berupa aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak diketemukan fisiknya dan belum diproses lebih lanjut sebesar Rp.2.664.269.115,62, aset yang masih dalam proses penghapusan Rp.549.486.776,22, aset tetap hasil lanjutan sensus barang daerah tahun 2018 yang diketemukan rusak sebesar Rp 19.320.310.467,68. dibanding aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.357,144,501.83 terjadi pengurangan sebesar Rp.2.060,068,609.99 karena aset yang tidak diketemukan fisiknya adalah sebagai berikut:

1) Penyertaan Kepada Yarnati	83.320.000,00	83.320.000,00
2) Aset tetap hasil sensus 2013 yang belum diketemukan	2.664.269.115,62	3.046.131.957,63
3) Aset yang masih dalam proses penghapusan	549.486.776,22	549.486.776,22
4) Aset barang rusak	19.320.310.467,68	1.678.205.767,98
5) Aset yang tidak laku dilelang		-

JUMLAH ASET LAIN-LAIN

22.617.386.359,52

5.357.144.501,83

Aset bersejarah (*heritage asset*) yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 450 unit bangunan yang dikelola oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dari aset bersejarah sebanyak 450 buah gedung tersebut, terdiri dari 13 gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan 437 buah gedung milik perseorangan/swasta/lembaga lainnya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

YARNATI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris M.M.I. Wiardi, SH No. 7 tanggal 4 Desember 1990 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD yang telah pensiun dengan memberikan Tunjangan Purna Bhakti (TPB). Penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada YARNATI sebesar Rp495.000.000,00 dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 1992. Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2004 - 2009 sudah tidak lagi mengikuti program TPB dari YARNATI.

Aset Kerjasama dengan PT. Perwita Karya atas Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan (BOT hingga Tahun 2032) di reklasifikasi ke Aset Tetap sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dengan PT. Perwita Karya pada tahun 2018.

JUMLAH ASET LAINNYA

56.000.989.251,22

44.381.879.548,91



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.1.6. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
a. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	2.800.717.168,45	3.054.754.868,00
Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
1) Potongan Askes, Taspen, IHT, Taperum dan pajak yang belum disetor (rincian pada Lampiran 17)	-	-
2) Saldo rekening jaminan bongkar reklame	2.752.564.455,00	2.798.981.468,00
3) Kas di BLU Taman Pintar berupa titipan pihak ketiga atas Theater 4D (Mahaka), toilet, hutang pajak layanan, dan utang jangka pendek lainnya bulan Desember 2020 yang belum diberikan	48.148.500,00	255.773.400,00
4) Titipan Bank BPD DIY Uji Coba SIM BPD DIY	4.213,45	-
	2.800.717.168,45	3.054.754.868,00

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
b. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	2.106.062.705,09	2.439.982.267,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka untuk sewa gedung, sewa foodcourt Taman Pintar dan pemakaman di 4 (empat) kecamatan per 31 Desember 2020 yang jasanya akan diberikan dalam tahun 2020 dan seterusnya. Rincian lebih lanjut tentang Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
c. UTANG BELANJA	4.354.424.879,00	6.515.136.987,00
Rincian utang belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari:		
1) Utang Listrik	516.409.837,00	682.121.953,00
2) Utang Telepon	8.342.306,00	8.179.736,00
3) Utang Air (PDAM)	5.876.513,00	3.879.992,00
4) Utang Belanja Barang dan Jasa	52.898.020,00	1.930.320.847,00
-Belanja Bagi Hasil Retribusi (Dinas Perhubungan)	25.175.000,00	
-Belanja Jasa Pemeriksaan Lab (Dinas Kesehatan)	21.302.000,00	
-Belanja Jasa Pengolahan limbah Lab/Sampah Medis (Dinas Kesehatan)	565.620,00	
-Belanja Barang Persediaan (RSUD)	5.855.400,00	
5) Utang Belanja Modal	-	48.162.000,00
6) Utang Belanja Pegawai	3.757.898.203,00	3.624.591.532,00
-Belanja Gaji dan Tunjangan (Dinas Kesehatan)	40.655.000,00	
-Belanja Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	3.717.243.203,00	
7) Utang Belanja lainnya	13.000.000,00	217.880.927,00
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan (Dinas Kesehatan)	13.000.000,00	
Jumlah utang belanja	4.354.424.879,00	6.515.136.987,00

Jumlah tersebut merupakan utang belanja listrik, telepon, air, utang belanja barang, utang belanja modal, utang belanja pegawai dan utang belanja lainnya per 31 Desember 2020 yang dibayar pada tahun 2021. Rincian lebih lanjut tentang utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
d. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.261.204.752,54	12.009.874.122,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.1.7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
a. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA		

5.3.1.8. EKUITAS

	<u>31 Desember 2020</u> Rp	<u>31 Desember 2019</u> Rp
	4.497.237.740.482,83	4.234.883.563.121,72

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban. Pada LKPD Berbasis Akruwal, Neraca tidak menyajikan Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan secara terpisah, namun menyajikan Ekuitas secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. PENDAPATAN-LO

	Realisasi Penerimaan 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :	1.699.751.020.194,30	296.375.935.685,50	195.637.168.239,00	1.800.489.787.640,79	1.780.179.235.039,31
5.4.1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	563.174.371.396,88	237.267.781.449,22	193.588.156.001,00	606.853.996.845,09	701.419.529.818,31
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :					
5.4.1. 1. a. Pendapatan Pajak Daerah	342.780.587.013,00	151.234.395.712,00	102.128.829.093,00	391.886.153.632,00	455.418.040.451,00
Pajak Daerah berasal dari 10 jenis pajak yaitu:					
1) Pajak Hotel	78.279.066.037,00	2.563.228.308,00	2.060.809.573,00	78.781.484.772,00	159.377.794.658,00
2) Pajak Restoran	43.521.758.533,00	1.925.543.089,00	759.081.227,00	44.688.220.395,00	61.905.033.537,00
3) Pajak Hiburan	3.870.424.584,00	579.042.097,00	12.667.720,00	4.436.798.961,00	12.896.312.173,00
4) Pajak Reklame	6.156.071.238,00	2.430.691.381,00	1.140.486.940,00	7.446.275.679,00	7.721.417.328,00
5) Pajak Penerangan Jalan	47.421.117.139,00	-	-	47.421.117.139,00	52.374.696.494,00
6) Pajak Parkir	1.851.049.591,00	5.102.400,00	13.564.067,00	1.842.587.924,00	2.995.003.072,00
7) Pajak Air Tanah	1.575.287.372,00	1.638.090.267,00	1.575.287.372,00	1.638.090.267,00	2.480.488.635,00
8) Pajak sarang Burung Walet	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00	6.650.000,00
9) PBB	96.517.233.954,00	142.092.698.170,00	96.566.932.194,00	142.042.999.930,00	93.609.753.851,00
10) BPHTB	63.582.978.565,00	-	-	63.582.978.565,00	62.050.890.703,00
Piutang Pendapatan pajak Daerah 2020 sebesar Rp 151.234.395.712,00 yang merupakan mutasi tambah piutang pada tahun 2020, dan sebesar Rp 102.128.829.093,00 yang merupakan mutasi kurang piutang pada tahun 2020.					
Rincian mutasi piutang pajak ada pada Lampiran 2C .					
5.4.1. 1. b. Pendapatan Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	2.590.212.463,50	1.928.383.777,67	23.972.475.207,83	32.721.998.352,00
Retribusi Daerah terdiri dari 16 (enam belas) jenis retribusi yaitu :					
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, :					
a) Pemeriksaan Kualitas Air	208.920.800,00	-	-	208.920.800,00	220.904.000,00
b) Pos Kesehatan Hewan	62.332.700,00	-	-	62.332.700,00	71.617.700,00
<i>Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	<i>271.253.500,00</i>			<i>271.253.500,00</i>	<i>292.521.700,00</i>
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.797.792.305,00	2.016.696.849,00	1.450.255.405,00	3.364.233.749,00	3.681.981.703,00
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman umum	119.200.000,00	60.397.083,00	65.869.999,67	113.727.083,33	88.681.667,00
a) Kec. Tegalarjo	34.140.000,00	15.659.583,33	16.084.583,33	33.715.000,00	26.798.750,00
b) Kec. Wirobrajan	33.555.000,00	21.788.750,00	24.126.666,67	31.217.083,33	28.907.916,67
c) Kec. Mergangsan	30.680.000,00	14.790.833,00	13.905.416,33	31.565.416,67	26.500.000,33
d) Kec. Mantriweron	20.825.000,00	8.157.916,67	11.753.333,34	17.229.583,33	6.475.000,00
4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	4.618.765.000,00	-	99.518.639,00	4.519.246.361,00	6.562.625.000,00
a) Din. Pariwisata (UPT Malioboro)	-	-	-	-	-
b) Dinas Perhubungan	4.618.765.000,00	-	99.518.639,00	4.519.246.361,00	6.562.625.000,00
c) Kec. Gondomanan (PMPS)	-	-	-	-	-
5) Retribusi Pasar, :					
a) Kios	3.508.425.963,00	303.479.796,50	212.149.643,00	3.599.756.116,50	4.985.266.332,00
b) Los	2.402.138.610,00	198.897.635,00	93.139.221,00	2.507.897.024,00	3.471.245.703,00
c) Lapak	344.978.520,00	10.741.100,00	7.450.870,00	348.268.750,00	447.519.777,00
d) Gudang (tempat penyimpanan barang)	42.970.125,00	-	-	42.970.125,00	38.604.000,00
e) Siaran Radio	3.922.500,00	-	-	3.922.500,00	6.372.000,00
f) Bongkar Muat	267.436.800,00	-	-	267.436.800,00	321.556.000,00
g) Kamar Mandi	784.171.350,00	-	-	784.171.350,00	1.005.163.400,00
h) Parkir:					
TKP	1.976.886.975,00	-	-	1.976.886.975,00	2.548.304.000,00
TJU	554.934.900,00	-	-	554.934.900,00	652.123.500,00
i) Sewa Lahan	711.403.407,00	-	-	711.403.407,00	1.077.777.467,00
j) Pemakaian Listrik	-	-	-	-	-
k) Penerimaan piutang	312.739.734,00	-	-	312.739.734,00	701.075.103,00
l) Pendapatan lain-lain (denda listrik)	-	-	-	-	-
- kas di bendahara penerimaan	-	-	-	-	-
<i>Jumlah Retribusi Pasar</i>	<i>10.910.008.884,00</i>	<i>513.118.531,50</i>	<i>312.739.734,00</i>	<i>11.110.387.681,50</i>	<i>15.255.007.282,00</i>
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	590.275.000,00	-	-	590.275.000,00	830.330.000,00
7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair	792.602.500,00	-	-	792.602.500,00	791.072.500,00
8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perindag)	72.764.000,00	-	-	72.764.000,00	-
9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.495.000,00	-	-	32.495.000,00	67.880.000,00
a) DPUPKP	10.110.000,00	-	-	10.110.000,00	13.020.000,00
b) Dinas Pertanian & Pangan	16.135.000,00	-	-	16.135.000,00	16.560.000,00
c) Dinas Kebakaran	6.250.000,00	-	-	6.250.000,00	38.300.000,00
10) Retribusi Tempat Khusus Parkir	717.382.833,00	-	-	717.382.833,00	1.581.164.000,00
a) Dinas Perhubungan	196.924.000,00	-	-	196.924.000,00	552.826.000,00
b) Dinas Pariwisata	520.458.833,00	-	-	520.458.833,00	1.028.338.000,00
11) Retribusi Rumah Potong Hewan	66.775.000,00	-	-	66.775.000,00	89.685.000,00
12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	113.929.200,00	-	-	113.929.200,00	298.213.000,00
13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.953.157.500,00	-	-	1.953.157.500,00	2.958.873.500,00
14) Retribusi Ijin Gangguan (HO)	-	-	-	-	-
15) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kecamatan:					
a) Kecamatan Tegalarjo	-	-	-	-	-
b) Kecamatan Jetis	-	-	-	-	-
c) Kecamatan Gondokusuman	-	-	-	-	325.000,00
d) Kecamatan Danurejan	-	-	-	-	-
e) Kecamatan Gedongtengen	-	-	-	-	-
f) Kecamatan Pakualaman	-	-	-	-	-
g) Kecamatan Ngampilan	-	-	-	-	555.200,00
h) Kecamatan Wirobrajan	-	-	-	-	-
i) Kecamatan Mantriweron	-	-	-	-	-
j) Kecamatan Kraton	-	-	-	-	-
k) Kecamatan Gondomanan	-	-	-	-	-
l) Kecamatan Mergangsan	-	-	-	-	-
m) Kecamatan Umbulharjo	-	-	-	-	992.100,00
n) Kecamatan Kotagede	-	-	-	-	367.000,00
16) Ret. Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Asing / IMTA (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenagakerja)	254.245.800	-	-	254.245.800,00	221.723.700,00

Penambahan pendapatan retribusi daerah 2020 sebesar Rp 2.590.212.463,50 merupakan mutasi tambah piutang dan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2020. Sedangkan pengurangan pendapatan retribusi daerah 2020 sebesar Rp 1.928.383.777,67 merupakan mutasi kurang piutang tahun 2020 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021, 2022, dst.

Rincian mutasi tambah piutang retribusi ada pada **Lampiran 3**.

Penerimaan retribusi termasuk penerimaan retribusi pasar di akhir tahun yang masih ada di pemungut dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi Penerimaan 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
5.4.1. 1. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar :	34.859.626.698,98	-	-	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01
Terdiri dari :					
1) PD Air Minum Tirtamarta	693.501.557,50	-	-	693.501.557,50	802.301.741,50
2) PD BPR Bank Jogja	12.265.548.921,00	-	-	12.265.548.921,00	9.754.106.355,00
3) Bank Pembangunan Daerah DIY terdiri dari :					
a) Deviden	21.829.330.811,85	-	-	21.829.330.811,85	18.340.935.744,08
b) Dana Pembangunan	-	-	-	-	-
	21.829.330.811,85	-	-	21.829.330.811,85	18.340.935.744,08
4) Laba BUKP	71.245.408,63	-	-	71.245.408,63	57.146.041,43
5) PD Jogiatama Visesha	-	-	-	-	20.514.068,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	34.859.626.698,98	-	-	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01
5.4.1. 1. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar:	162.223.511.162,90	83.443.173.273,72	89.530.943.130,33	156.135.741.306,28	184.304.487.065,30
Terdiri dari :					
1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1.620.611.826,00	-	-	1.620.611.826,00	1.102.674.651,00
a) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	71.263.000,00	-	-	71.263.000,00	6.524.600,00
b) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	96.105.963,00	-	-	96.105.963,00	149.429.114,00
c) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.379.009.113,00	-	-	1.379.009.113,00	378.794.887,00
d) Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	74.233.750,00	-	-	74.233.750,00	567.926.050,00
2) Jasa Giro	6.167.302.851,00	-	-	6.167.302.851,00	3.044.745.330,00
3) Pendapatan Bunga Deposito	6.242.796.178,63	-	-	6.242.796.178,63	17.190.898.900,68
a) Rekening Deposito Pada PT. BPD DIY	2.903.124.979,00	-	-	2.903.124.979,00	6.870.833.362,00
b) Rekening Deposito Pada PT. BTN	-	-	-	-	2.972.732.876,68
c) Rekening Deposito Pada PT. BNI	-	-	-	-	795.073.094,00
d) Rekening Deposito Pada PT. BRI	-	-	-	-	2.699.622.628,00
e) Rekening Deposito Pada PT. Bank Bukopin	2.719.499.967,63	-	-	2.719.499.967,63	2.742.773.927,00
f) Rekening Deposito Pada PT. Bank Mega	277.123.290,00	-	-	277.123.290,00	1.045.102.739,00
g) Rekening Deposito Pada PT. Bank OCBC NISP	-	-	-	-	-
h) Rekening Deposito Pada PT. Bank Jateng	343.047.942,00	-	-	343.047.942,00	-
i) Rekening Deposito pada PT. Bank Sinarmas	-	-	-	-	64.760.274,00
4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah	500.000,00	-	-	500.000,00	1.070.000,00
5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	293.507.070,32	-	-	293.507.070,32	444.576.214,65
6) Denda Pajak	1.210.226.621,00	8.781.610.355,00	1.077.673.915,00	8.914.163.061,00	4.952.162.292,68
a) Denda Pajak Hotel	43.533.121,00	-	662.114,00	42.871.007,00	904.619.192,00
b) Denda Pajak Restoran	75.156.726,00	9.669.149,00	2.973.100,00	81.852.775,00	215.973.888,00
c) Denda Pajak Hiburan	3.129.876,00	9.480.782,00	1.130.375,00	11.480.283,00	12.594.604,00
d) Denda Pajak Reklame	5.876.637,00	-	-	5.876.637,00	27.678.106,00
e) Denda Pajak Parkir	1.916.998,00	-	-	1.916.998,00	4.057.645,00
f) Denda Pajak Air Tanah	9.192.928,00	-	-	9.192.928,00	48.026.286,00
g) Denda Pajak PBB	1.071.420.335,00	8.762.460.424,00	1.072.908.326,00	8.760.972.433,00	3.739.212.571,68
7) Denda retribusi	378.394.800,00	-	-	378.394.800,00	418.284.200,00
8) Setoran pendapatan dari pengembalian berasal dari:	628.516.419,06	-	-	628.516.419,06	4.942.923.617,32
a) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	165.210.136,00	-	-	165.210.136,00	73.502.093,00
b) Pengembalian Hasil Pemeriksaan	70.276.459,39	-	-	70.276.459,39	221.916.930,55
c) Pendapatan dari pengembalian Hibah	100.594.355,00	-	-	100.594.355,00	788.434.661,00
d) Pendapatan dari pengembalian Lainnya	292.435.468,67	-	-	292.435.468,67	3.677.187.069,77
e) Pendapatan lain-Lain dari Dana BOS	-	-	-	-	181.882.863,00
9) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	55.545.000,00	-	-	55.545.000,00	-
10) Pendapatan dari Barang Milik Daerah	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00
a) Sewa Kantin Pada Gd. Pengujian Kendaraan	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00
11) Sewa Gedung	1.131.295.700,00	991.423.995,25	850.280.133,33	1.272.439.561,92	989.813.146,76
a) Dinas Pendidikan/Edotel	-	-	-	-	-
b) DPUPKP (Rusunawa)	331.352.700,00	285.466.500,00	177.850.800,00	438.968.400,00	439.218.800,00
c) BPKAD	799.943.000,00	705.957.495,25	672.429.333,33	833.471.161,92	550.594.346,76
12) Penerimaan dari Pihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah berasal dari :	265.417.600,00	-	800.000,00	264.617.600,00	243.890.000,00
a) Hotel Kayu Manis (Pesanggrahan Ngestilaras)	22.000.000,00	-	800.000,00	21.200.000,00	5.000.000,00
b) PT Bumi Kusuma Santosa (Reksa Arcade)	243.417.600,00	-	-	243.417.600,00	238.890.000,00
13) Denda Hasil Operasi Yustisi	138.046.000,00	-	-	138.046.000,00	129.384.000,00
14) Penyelenggaraan PMPS	-	-	-	-	-
15) Pendapatan BLUD Taman Pintar	4.887.231.981,00	516.930.466,67	268.608.200,00	5.135.554.247,67	15.037.188.400,10
16) Pendapatan BLUD RSUD	91.668.436.716,25	59.548.949.643,00	70.585.074.974,00	80.632.311.385,25	82.250.895.415,00
17) Jasa Bongkar Reklame	306.549.309,00	-	-	306.549.309,00	368.843.986,00
18) Pendapatan bunga Pajak	1.025.490.354,00	778.956.663,00	624.652.250,00	1.179.794.767,00	2.202.319.538,00
a) Pendapatan Bunga Pajak Hotel	628.806.315,00	440.665.422,00	495.442.461,00	574.029.276,00	1.799.646.649,00
b) Pendapatan Bunga Pajak Restoran	340.891.089,00	194.055.337,00	124.310.301,00	410.636.125,00	342.125.617,00
c) Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	7.874.061,00	142.704.260,00	1.074.035,00	149.504.286,00	32.327.101,00
d) Pendapatan Bunga Pajak Reklame	-	-	-	-	-
e) Pendapatan Bunga Pajak Parkir	42.771.369,00	1.531.644,00	3.825.453,00	40.477.560,00	27.167.553,00
f) Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	5.023.520,00	-	-	5.023.520,00	969.618,00
g) Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	124.000,00	-	-	124.000,00	83.000,00
19) Pendapatan dari pengelolaan BUKP	32.290.672,59	-	-	32.290.672,59	23.577.042,02
20) Pendapatan BLUD Puskesmas	23.047.942.795,00	845.708.500,00	861.844.350,00	23.031.806.945,00	25.635.316.967,00
a) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I	787.602.641,00	7.280.000,00	6.116.500,00	788.766.141,00	917.445.181,00
b) Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II	614.635.014,00	17.570.000,00	18.035.100,00	614.169.914,00	668.294.318,00
c) Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.171.761.213,00	15.303.000,00	14.515.000,00	1.172.549.213,00	1.445.529.067,00
d) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I	1.408.651.986,00	3.360.000,00	2.380.000,00	1.409.631.986,00	1.476.785.639,00
e) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II	648.485.963,00	5.378.000,00	4.670.000,00	649.193.963,00	748.759.900,00
f) Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	795.354.387,00	12.210.000,00	11.310.150,00	796.254.237,00	933.058.405,00
g) Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.096.805.599,00	312.156.000,00	309.959.000,00	2.099.002.599,00	2.428.441.677,00
h) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I	1.339.368.853,00	4.180.000,00	5.421.600,00	1.338.127.253,00	1.431.357.945,00
i) Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II	809.766.851,00	29.910.000,00	23.645.000,00	816.031.851,00	864.852.084,00
j) Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.002.463.002,00	13.965.000,00	12.600.000,00	1.003.828.002,00	1.160.066.583,00
k) Pendapatan BLUD Puskesmas Mantriweron	1.821.923.755,00	2.345.000,00	5.335.000,00	1.818.933.755,00	2.189.791.068,00
l) Pendapatan BLUD Puskesmas Mergansan	1.632.813.423,00	33.648.000,00	36.925.500,00	1.629.535.923,00	1.753.502.131,00
m) Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	815.504.190,00	8.095.000,00	7.295.000,00	816.304.190,00	906.272.748,00
n) Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	623.496.528,00	11.493.500,00	13.607.000,00	621.383.028,00	693.069.026,00
o) Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.610.753.621,00	308.302.000,00	330.204.000,00	2.588.851.621,00	2.810.303.741,00
p) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I	2.349.408.612,00	25.750.000,00	24.910.000,00	2.350.248.612,00	2.436.058.790,00
q) Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II	1.053.745.445,00	6.713.000,00	5.877.000,00	1.054.581.445,00	1.104.575.432,00
r) Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.465.401.712,00	28.050.000,00	29.038.500,00	1.464.413.212,00	1.667.153.232,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi Penerimaan 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
21) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	3.465.105.692,10	141.056.333,00	92.133.683,00	3.514.028.342,10	5.582.611.056,20
22) Pendapatan BLUD RS Pratama	17.954.638.518,95	11.838.537.317,80	15.169.875.625,00	14.623.300.211,75	17.582.551.601,89
23) Pendapatan bunga Retribusi	39.356.224,00	-	-	39.356.224,00	36.543.594,00
24) Pendapatan denda administrasi	-	-	-	-	-
25) Pendapatan BLUD UPT Logam	324.574.256,00	-	-	324.574.256,00	502.276.911,00
26) Pendapatan dari pembayaran listrik pasar	1.326.288.778,00	-	-	1.326.288.778,00	1.593.771.300,00
27) Pendapatan denda listrik pasar	8.445.800,00	-	-	8.445.800,00	22.168.901,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.223.511.162,90	83.443.173.273,72	89.530.943.130,33	156.135.741.306,28	184.304.487.065,30
Penambahan lain-lain PAD yang sah 2020 sebesar Rp 83.443.173.273,72 merupakan mutasi tambah piutang dan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2020. Sedangkan pengurangan lain-lain PAD yang sah 2020 sebesar Rp 89.530.943.130,33 merupakan mutasi kurang piutang tahun 2020 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021, 2022, dst.					
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	563.174.371.396,88	237.267.781.449,22	193.588.156.001,00	606.853.996.845,09	701.419.529.818,31
5.4.1. 2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR	1.105.993.726.262,42	1.602.395.078,00	2.049.012.238,00	1.105.547.109.102,42	1.077.305.705.221,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan Transfer yang terdiri dari :					
5.4.1. 2. a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	818.760.445.269,00	-	-	818.760.445.269,00	875.308.177.702,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari :					
1) Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu :					
a) Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :					
(1) PBB migas					
(2) Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas					
(3) Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat					
(4) Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan					
<i>Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan</i>					
b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
c) Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29					
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</i>					
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
a) Provisi Sumber Daya Hutan					
b) Sumberdaya Alam Perikanan					
c) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi					
d) Cukai Tembakau					
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</i>					
3) Dana Alokasi Umum					
4) Dana Alokasi Khusus					
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>					
5.4.1. 2. b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	112.688.603.600,00	-	-	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari :					
1) Dana Otonomi Khusus					
2) Dana Penyesuaian, yaitu :					
a) Dana Penyesuaian Cukai Tembakau					
b) Dana Tambahan Penghasilan bagi PNSD					
c) Dana Penyesuaian Identif Daerah					
d) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi					
e) Bantuan Operasional Sekolah					
BOSN SD					
BOSN SMP					
f) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana					
<i>Jumlah Dana Penyesuaian</i>					
3) Pendapatan Hibah					
1) Hibah Pemerintah Pusat					
2) Hibah yang diterima SD Negeri					
3) Hibah yang diterima SMP Negeri					
4) Hibah Pasar Pingit					
4) Dana Tunjangan Pendidikan					
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>					
5.4.1. 2. c. Transfer Pemerintah Provinsi	174.544.677.393,42	1.602.395.078,00	2.049.012.238,00	174.098.060.233,42	136.678.888.519,00
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari :					
a) Pajak Kendaraan Bermotor					
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah					
e) Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan					
f) Bagi hasil Pajak air permukaan					
g) Bagi hasil Pajak Rokok Kota Yogyakarta					
<i>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>					
2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
3) Pendapatan Lainnya					
Pendapatan Lainnya sebesar Rp53.579.338.517,42 berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Keistimewaan sebesar Rp53.113.338.517,42 yang terdiri dari :					
a) Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta					
b) Bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa					
c) Dana Keistimewaan					
<i>Jumlah Pendapatan Lainnya</i>					
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</i>					
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.105.993.726.262,42	1.602.395.078,00	2.049.012.238,00	1.105.547.109.102,42	1.077.305.705.221,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.4.1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

	Realisasi Penerimaan 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
Realisasi Pendapatan Hibah					
5.4.1. 3. a. Pendapatan Hibah	30.582.922.535,00		-	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
1) Hibah Pemerintah Pusat	28.836.922.535,00		-	28.836.922.535,00	1.454.000.000,00
2) Hibah dari Luar Negeri	1.746.000.000,00		-	1.746.000.000,00	-
3) Hibah yang diterima SD Negeri	-		-	-	-
4) Hibah yang diterima SMP Negeri	-		-	-	-
5) Hibah Pasar Pingit	-		-	-	-
b. Pendapatan Hibah Aset		42.272.520.681,75		42.272.520.681,75	-
c. Pendapatan Dana Darurat					
d. Pendapatan Lainnya (Hibah Persediaan)		15.233.238.476,53		15.233.238.476,53	-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.582.922.535,00	57.505.759.158,28	-	88.088.681.693,28	1.454.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.699.751.020.194,30	296.375.935.685,50	195.637.168.239,00	1.800.489.787.640,79	1.780.179.235.039,31

5.4.2. BEBAN

Realisasi Beban Operasi tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi Belanja LRA 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
5.4.2. 1. BEBAN OPERASI	1.248.329.702.538,88	254.494.806.332,94	63.971.291.778,44	1.438.853.217.093,38	1.559.010.765.740,86
Realisasi Beban Operasi terdiri dari :					
1. Beban Pegawai	728.710.179.778,78	3.757.898.203,00	3.624.591.532,00	728.843.486.449,78	758.691.887.722,78
a. Beban Pegawai (BLUD/BOSNAS/BOSPROV) - LO					-
b. Beban Gaji dan Tunjangan - LO	426.872.467.299,00	40.655.000,00	808.352,00	426.912.313.947,00	436.618.804.647,00
c. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	151.438.699.206,00	-	-	151.438.699.206,00	159.916.722.770,00
d. Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	7.678.420.566,00	-	-	7.678.420.566,00	8.034.863.866,00
e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	13.639.746.400,00	-	-	13.639.746.400,00	17.955.781.100,00
f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	868.609.033,00	-	-	868.609.033,00	1.201.160.702,00
g. Uang Lembur - LO	465.150.000,00	-	-	465.150.000,00	488.610.000,00
h. Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS - LO	6.718.301.500,00	-	-	6.718.301.500,00	14.384.532.150,00
i. Beban Uang Picket - LO	4.933.660.000,00	-	-	4.933.660.000,00	3.926.830.000,00
j. Beban Uang Kelayan Panti - LO	139.690.000,00	-	-	139.690.000,00	194.313.000,00
k. Beban Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar					
l. Honorarium PNS	58.627.987.927,78	3.717.243.203,00	3.623.783.180,00	58.721.447.950,78	45.537.553.197,50
m. Honorarium Non PNS	57.327.447.847,00	-	-	57.327.447.847,00	70.432.716.290,28
2. Beban Barang dan Jasa	455.864.521.552,10	80.522.465.744,00	60.333.147.555,34	476.053.839.740,76	537.573.961.358,62
a. Beban Barang dan Jasa					
b. Beban Bahan Pakai Habis	9.675.045.944,78	12.417.809.149,69	7.958.293.545,47	14.134.561.549,00	14.704.629.168,50
- Beban Persediaan Barang Pakai habis					-
c. Beban Persediaan Bahan/ Material	57.121.999.533,45	61.003.684.417,99	39.897.620.033,87	78.228.063.917,57	65.412.615.888,32
- Beban Persediaan Bahan/Material					-
d. Beban Jasa Kantor	171.784.554.060,05	590.671.276,00	898.664.760,00	171.476.560.576,05	126.111.852.991,21
e. Beban Premi Asuransi	42.867.293.318,00	1.603.287.437,68	69.050.075,61	44.401.530.680,07	33.182.372.259,73
f. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.485.211.491,02	-	-	7.485.211.491,02	10.629.924.830,90
g. Beban Cetak dan Penggandaan	7.001.765.422,00	4.342.354.934,82	3.232.453.255,46	8.111.667.101,36	11.359.291.568,68
- Beban Persediaan Barang Cetak					-
h. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.646.763.000,00	-	382.333.333,33	2.264.429.666,67	6.155.517.000,00
i. Beban Sewa Sarana Mobilitas	148.050.000,00	-	-	148.050.000,00	443.110.000,00
j. Beban Sewa Alat Berat	-	-	-	-	26.500.000,00
k. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.874.911.950,00	-	-	3.874.911.950,00	9.154.363.805,00
l. Beban Makanan dan Minuman	22.824.089.764,50	-	-	22.824.089.764,50	47.020.407.926,25
m. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	739.308.205,00	322.017.306,71	137.857.872,60	923.467.639,11	1.635.599.006,29
- Beban Persediaan Pakaian Dinas					-
n. Beban Pakaian Kerja	1.611.909.096,00	-	8.520.000,00	1.603.389.096,00	1.766.963.795,00
o. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	314.615.200,00	8.880.300,00	540.000,00	322.955.500,00	327.772.500,00
p. Beban Perjalanan Dinas	10.874.602.667,07	-	-	10.874.602.667,07	26.579.151.409,81
q. Beban Pemeliharaan	45.866.090.348,03	-	-	45.866.090.348,03	58.274.288.761,93
r. Beban Jasa Konsultasi	5.091.241.300,00	-	-	5.091.241.300,00	5.315.525.660,00
s. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	133.840.000,00	-	-	133.840.000,00	368.576.000,00
t. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.817.780.405,00	-	-	1.817.780.405,00	8.624.612.350,00
u. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.496.929.000,00	-	-	4.496.929.000,00	5.567.919.600,00
v. Beban Barang Dana BOS	41.245.127.756,00	-	7.696.128.803,90	33.548.998.952,10	49.210.542.284,00
w. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.510.738.480,00	-	-	1.510.738.480,00	3.080.227.000,00
x. Beban hibah barang atau jasa	233.092.000,00	233.760.921,11	51.685.875,10	415.167.046,01	3.219.868.734,00
y. Beban Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	17.111.665.000,00
z. Beban Barang Lainnya					21.950.000,00
aa. Beban Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Mas	102.000.000,00	-	-	102.000.000,00	90.000.000,00
ab. Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/	11.800.128.957,20	-	-	11.800.128.957,20	21.978.151.600,00
ac. Beban Barang Kelayan Panti	85.463.600,00	-	-	85.463.600,00	112.976.400,00
ad. Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	4.311.970.054,00	-	-	4.311.970.054,00	10.087.585.819,00
3. Beban Bunga					
4. Beban Subsidi					
5. Beban Hibah	38.725.063.808,00	-	-	38.725.063.808,00	79.389.047.945,00
a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	881.361.000,00	-	-	881.361.000,00	1.259.645.450,00
b. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat					47.342.470.016,00
c. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.765.617.366,00	-	-	4.765.617.366,00	-
d. Beban Hibah Dana BOS	33.078.085.442,00	-	-	33.078.085.442,00	30.786.932.479,00
d. Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat					-
Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat merupakan konversi beban hibah dari beban barang jasa					-
6. Beban Bantuan Sosial	25.029.937.400,00	-	-	25.029.937.400,00	11.551.423.000,00
a. Beban Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga	135.000.000,00	-	-	135.000.000,00	9.695.180.000,00
b. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non					724.393.000,00
c. Beban Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan	24.894.937.400,00	-	-	24.894.937.400,00	1.131.850.000,00
7. Beban Bantuan Keuangan					
a. Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota					-
b. Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik					-



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Realisasi Belanja LRA 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
8. Beban Penyusutan	-	153.809.532.958,89	-	153.809.532.958,89	162.251.344.396,22
9. Beban penyisihan piutang	-	8.908.336.989,67	13.552.691,10	8.894.784.298,57	3.306.466.252,30
10. Beban amortisasi	-	7.496.572.437,38	-	7.496.572.437,38	6.246.635.065,94
11. Beban Premi JKK dan JKN	-	-	-	-	-
12. Beban Lain-lain	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.248.329.702.538,88	254.494.806.332,94	63.971.291.778,44	1.438.853.217.093,38	1.559.010.765.740,860
Rincian belanja dibayar dimuka dan pembayaran utang serta rincian utang belanja terdapat pada lampiran 19A					
Beban penyusutan terdiri dari:	-	153.809.532.958,89	-	153.809.532.958,89	162.251.344.396,223
- penyusutan Peralatan dan Mesin	-	94.459.437.739,52	-	94.459.437.739,52	100.548.312.847,78
- penyusutan Gedung dan Bangunan	-	24.361.859.740,62	-	24.361.859.740,62	24.365.034.207,29
- penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	34.988.235.478,75	-	34.988.235.478,75	37.337.997.341,15
Beban penyisihan terdiri dari :					
- penyisihan piutang pendapatan pajak sebesar	-	5.751.403.289,83	11.426.058,70	5.739.977.231,13	1.662.615.441,36
- penyisihan piutang pendapatan retribusi sebesar	-	1.303.736.951,20	-	1.303.736.951,20	175.127.058,10
- penyisihan piutang Lainnya	-	77.241.354,45	-	77.241.354,45	56.072.969,28
- penyisihan piutang transfer	-	8.011.975,39	-	8.011.975,39	10.245.061,19
- penyisihan piutang PAD lainnya sebesar	-	1.758.227.038,80	2.126.632,40	1.756.100.406,40	648.632.787,71
- penyisihan dana bergulir	-	-	-	-	-
- penyisihan bagian lancar TGR	-	-	-	-	-
- penyisihan bagian lancar tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	-	-	-	-
- Penyisihan Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	-	-	-	10.000,00
- penyisihan bagian lancar tagihan sewa	-	9.716.380,00	-	9.716.380,00	753.762.934,66
- penyisihan bagian lancar pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
- penyisihan tagihan bagi hasil kemitraan	-	-	-	-	-
- penyisihan tagihan sewa	-	-	-	-	-
- penyisihan TGR	-	-	-	-	-
Jumlah Penyisihan	-	8.908.336.989,67	13.552.691,10	8.894.784.298,57	3.306.466.252,30
Beban amortisasi sebesar	-	7.496.572.437,38	-	7.496.572.437,38	6.246.635.065,94
- amortisasi aset tidak berwujud berupa software	-	-	-	-	-
- amortisasi aset tidak berwujud berupa hasil kajian	-	7.496.572.437,38	-	7.496.572.437,38	6.246.635.065,94
Beban Lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.					
5.4.2. 2. BEBAN TRANSFER					
Realisasi Beban Transfer tahun 2020 terdiri dari:					
a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-
b. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
c. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah daerah Lainnya	583.430.060,00	-	-	583.430.060,00	1.228.210.990,00
d. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-
e. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	777.359.018,00	-	-	777.359.018,00	753.036.006,00
f. Beban transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
g. Beban Tidak Terduga	74.385.331.447,58	-	74.385.331.447,58	-	317.693.064,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	75.746.120.525,58	-	74.385.331.447,58	1.360.789.078,00	2.298.940.060,00
JUMLAH BEBAN	1.324.075.823.064,46	254.494.806.332,94	138.356.623.226,02	1.440.214.006.171,38	1.561.309.705.800,86
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				360.275.781.469,41	218.869.529.238,45
	Realisasi Belanja LRA 2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pengurangan 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2020 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2019 (Rp)
5.4.3. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON					159.000.000,00
5.4.3. 1. SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non lancar	-	-	-	-	159.000.000,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus Non Operasional					159.000.000,00
5.4.3. 2. DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan Aset Nonlancar/penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Defisit Non Operasional					
5.4.4. POS LUAR BIASA					
5.4.4. 1. PENDAPATAN LUAR BIASA					
a. Pendapatan Luar Biasa					
1) Penerimaan Aset Metrologi	-	-	-	-	-
5.4.4. 2. BEBAN LUAR BIASA					
a. Beban Luar Biasa	-	74.385.331.447,58	-	74.385.331.447,58	-
1) Penyerahan Aset SMA/SMK ke Provinsi DIY:	-	74.385.331.447,58	-	74.385.331.447,58	-
2) Hutang kepada Pihak Ketiga - Bank BNI	-	-	-	-	-
3) Hutang kepada Pihak Ketiga - PT. Perwita Karya	-	-	-	-	-
4) Beban Tak Terduga	-	74.385.331.447,58	-	74.385.331.447,58	-
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	-	(74.385.331.447,58)	-	(74.385.331.447,58)	-
TOTAL BEBAN	1.324.075.823.064,46	328.880.137.780,52	138.356.623.226,02	1.514.599.337.618,96	1.561.309.705.800,86
Surplus/defisit LO				285.890.450.021,83	219.028.529.238,45



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	374.054.585.303,84	357.498.780.179,10

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	1.698.130.408.368,30	1.764.657.743.841,27
a. Penerimaan Pajak Daerah	342.780.587.013,00	451.265.948.031,00
b. Penerimaan Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	32.428.343.731,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.859.626.698,98	28.975.003.950,01
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	160.602.899.336,90	175.277.755.146,26
e. Penerimaan Dana Bagi hasil Pajak	47.145.298.917,00	27.070.845.600,00
f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.733.679.359,00	1.904.476.800,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	627.247.170.000,00	700.372.564.000,00
h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	142.634.296.993,00	145.960.291.302,00
i. Penerimaan Otonomi Khusus	0,00	0,00
j. Penerimaan Dana Penyesuaian	112.688.603.600,00	65.318.639.000,00
k. Penerimaan Hibah	0,00	0,00
l. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	120.965.338.876,00	133.393.876.281,00
m. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.236.000.000,00
n. Penerimaan Lainnya	53.579.338.517,42	0,00
o. Penerimaan Hibah	30.582.922.535,00	1.454.000.000,00
p. Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
q. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
r. Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	1.324.075.823.064,46	1.407.158.963.662,17
1). Belanja Operasi	1.249.690.491.616,88	1.406.841.270.598,17
a. Pembayaran Pegawai	728.710.179.778,78	760.532.062.428,28
b. Pembayaran Barang	455.864.521.552,10	553.387.490.228,89
c. Pembayaran Bunga	0,00	0,00
d. Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
e. Pembayaran Hibah	38.725.063.808,00	79.389.047.945,00
f. Pembayaran Bantuan Sosial	25.029.937.400,00	11.551.423.000,00
g. Pembayaran Bantuan Keuangan	1.360.789.078,00	1.981.246.996,00
h. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
2). Belanja Tak Terduga	74.385.331.447,58	317.693.064,00
<i>Arus Kas Bersih</i>	374.054.585.303,84	357.498.780.179,10

Jumlah arus kas bersih Tahun 2020 sebesar Rp 374.054.585.303,84 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dari aktivitas operasi menambah saldo Kas sebesar Rp 374.054.585.303,84



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(211.903.033.597,93)	(363.606.697.548,17)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	1.620.611.826,00	1.102.674.651,00
a. Penjualan atas peralatan dan mesin	1.546.378.076,00	534.748.601,00
b. Penjualan atas gedung dan bangunan	74.233.750,00	567.926.050,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	213.523.645.423,93	364.709.372.199,17
a. Perolehan Tanah	17.920.111.920,00	25.569.058.040,00
b. Perolehan Peralatan dan Mesin	54.368.762.898,42	96.719.552.169,17
c. Perolehan Gedung dan Bangunan	41.131.637.105,54	54.312.514.794,87
d. Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	70.226.071.861,47	101.225.143.404,83
e. Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.834.203.993,50	828.300.673,00
f. Perolehan Aset Lainnya	6.042.857.645,00	48.779.803.117,30
g. Penyertaan Modal Pada BUMD	20.000.000.000,00	37.275.000.000,00
h. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Arus Kas Bersih	(211.903.033.597,93)	(363.606.697.548,17)

Jumlah arus kas bersih Tahun 2020 sebesar -Rp 211.903.033.597,93 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dari aktivitas investasi mengurangi saldo Kas sebesar Rp211.903.033.597,93

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	422.620.000,00	5.725.732,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah arus masuk dan arus keluar kas pada Bendahara Umum Daerah yang ditujukan untuk penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang dan penyertaan modal.

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	422.620.000,00	5.725.732,00
a. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410.000.000,00	
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	5.725.732,00
d. Penerimaan Piutang Daerah	12.620.000,00	0,00
e. Pelepasan Investasi	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	0,00	0,00
a. Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
b. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	422.620.000,00	5.725.732,00

Jumlah arus kas bersih Tahun 2020 sebesar Rp 422.620.000,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 dari aktivitas pendanaan menambah saldo Kas sebesar Rp 422.620.000,00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0,00	0,00
<p>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus masuk dan arus keluar kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan Penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.</p> <p>Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019 Aktivitas Transitoris Tahun 2020 terdiri dari penerimaan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga dari BUD, Penggunaan dan pengembalian Uang Persediaan, Penerimaan sisa uang persediaan dan Pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran serta Penggunaan dan pengembalian Tambah Uang Persediaan, Penerimaan sisa tambah uang persediaan dan Pemberian tambah uang persediaan kepada bendahara pengeluaran..</p>		
	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
1. Arus Masuk Kas yang diperoleh dari:	203.574.364.210,62	204.055.409.898,60
a. Penerimaan PFK	103.641.949.565,72	113.015.922.965,64
b. Penggunaan UP	13.157.465.201,22	13.577.131.452,76
c. Pengembalian UP	11.109.262.083,78	6.804.229.455,24
d. Sisa UP 2020	7.272.715,00	34.639.092,00
e. Penggunaan TU	73.513.706.835,40	69.457.031.421,48
f. Pengembalian TU	2.144.707.809,50	1.166.455.511,48
g. Sisa TU 2020	0,00	0,00
2. Arus Keluar Kas digunakan untuk:	203.574.364.210,62	204.055.409.898,60
a. Penyeteroran PFK	103.641.949.565,72	113.015.922.965,64
b. Pengeluaran SP2D UP	24.274.000.000,00	20.416.000.000,00
c. Pengeluaran SP2D TU	75.658.414.644,90	70.623.486.932,96
<i>Arus Kas Bersih</i>	-	-

Jumlah arus kas masuk Tahun 2020 sebesar Rp203.574.364.210,62 terdiri dari pemungutan PFK Tahun 2020 sebesar Rp103.641.949.565,72, penggunaan uang persediaan sebesar Rp13.157.465.201,22, pengembalian uang persediaan sebesar Rp11.109.262.083,78 dan Sisa uang persediaan 2020 sebesar Rp7.272.715,00, penggunaan TU sebesar Rp73.513.706.835,40, pengembalian TU sebesar Rp2.144.707.809,50 dan Sisa TU 2020 sebesar Rp0,00.

Jumlah arus kas keluar Tahun 2020 sebesar Rp203.574.364.210,62 terdiri dari penyeteroran kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp103.641.949.565,72, pemberian uang persediaan sebesar Rp24.274.000.000,00 dan pemberian TU sebesar Rp75.658.414.644,90.

Jumlah arus kas bersih Tahun 2020 dari aktivitas transitoris nol.

	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
5.5.5. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
<p>Dari keempat arus kas bersih tersebut di atas didapat saldo Kas dan Setara Kas tahun 2020 sebesar Rp 382.914.304.828,36</p> <p>Hal ini berarti saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 382.914.304.828,36 mengalami kenaikan sebesar Rp162.574.171.705,91 jika dibandingkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 220.340.133.122,45</p>		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
1. Kas di Kas Daerah	326.448.450.039,90	176.836.026.304,34
2. Deposito	-	-
3. Kas di Bendahara Pengeluaran :		
a. Sisa Uang Persediaan	7.272.715,00	34.639.092,00
b. Pajak Belum Disetor	-	-
c. Pendapatan Belum Disetor	-	-
d. Kewajiban kpd Pihak Ketiga	-	-
e. Sisa TU Bendahara	-	-
f. Titipan di Kas Bendahara	6.383.400,00	-
4. Kas di Bendahara Penerimaan	13.090.669,00	-
5. Kas di Tim Dana Bergulir	-	-
6. Kas di BLUD RSUD	35.746.744.809,51	16.315.175.635,26
7. Kas di BLUD Taman Pintar	1.087.890.837,44	3.562.497.919,44
8. KAS BLUD PUSKESMAS DANUREJAN I	188.036.452,20	229.822.314,20
9. KAS BLUD PUSKESMAS DANUREJAN II	140.227.274,14	132.755.292,14
10. KAS BLUD PUSKESMAS GEDONGTENGEN	171.619.108,00	218.538.683,00
11. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I	533.442.357,64	354.533.368,64
12. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II	160.592.002,00	194.223.955,00
13. KAS BLUD PUSKESMAS GONDOMANAN	146.689.710,00	135.460.575,00
14. KAS BLUD PUSKESMAS JETIS	162.554.580,00	438.609.408,00
15. KAS BLUD PUSKESMAS KOTEGEDE I	37.092.914,00	100.267.951,00
16. KAS BLUD PUSKESMAS KOTAGEDE II	122.321.744,00	119.297.146,00
17. KAS BLUD PUSKESMAS KRATON	235.431.361,00	261.308.481,00
18. KAS BLUD PUSKESMAS MANTRIJERON	405.435.650,00	477.872.287,00
19. KAS BLUD PUSKESMAS MERGANGSAN	892.452.988,00	1.060.595.546,00
20. KAS BLUD PUSKESMAS NGAMPILAN	159.716.722,45	304.003.649,62
21. KAS BLUD PUSKESMAS PAKUALAMAN	301.599.235,00	348.343.231,00
22. KAS BLUD PUSKESMAS TEGALREJO	290.657.823,00	127.865.034,00
23. KAS BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO I	235.805.702,00	313.553.238,00
24. KAS BLUD PUSKESMAS UMBULHARJO II	26.312.858,00	84.881.489,00
25. KAS BLUD PUSKESMAS WIROBRAJAN	103.117.082,00	222.393.727,00
26. Kas di BLUD RS Pratama	7.379.376.649,75	8.539.523.751,80
27. Kas di BLUD UPT Pusat Bisnis	2.383.386.238,97	1.669.279.394,65
28. Kas Jaminan Bongkar	-	-
29. Sisa Kas BOSNAS dan BOS Provinsi	5.434.645.537,16	8.176.660.137,16
30. Kas di BLUD UPT Logam	93.958.368,20	82.005.512,20
	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.5.6. SALDO AKHIR KAS	382.962.457.541,81	220.691.158.612,33
a. Jumlah Kas dan Setara Kas	382.914.304.828,36	220.340.133.122,45
b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan (sisa kas BOSNAS dan BOS Propinsi)	-	-
c. Saldo di Bendahara Penerimaan atas titipan pajak hiburan	-	-
d. Setoran Ke Kas Daerah melewati tahun anggaran	0,00	50.559.818,66
e. Setoran ke Kas BLUD UPT Pusat Bisnis hasil pemeriksaan	0,00	44.692.271,22
f. Titipan Bank BPD Uji SIM BPD	4.213,45	0,00
g. Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Toilet Taman Pintar	47.268.500,00	255.773.400,00
i. Utang Belanja Honorarium Jasa Pembinaan Keamanan Taman Pintar	880.000,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	382.962.457.541,81	220.691.158.612,33



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/defisit LO, Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Ekuitas akhir.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
5.6.1. EKUITAS AWAL	4.234.883.563.121,72	4.084.409.554.757,17
Ekuitas awal 2020 sebesar Rp 4.234.883.563.121,72. Ekuitas ini merupakan ekuitas akhir tahun 2019		
Ekuitas awal tahun 2020 sebesar RpRp4.234.883.563.121,72 merupakan selisih dari total aset akhir tahun 2019 sebesar Rp4.246.893.437.243,72 dan kewajiban akhir tahun 2019 sebesar Rp12.009.874.122,00		
5.6.2. SURPLUS/DEFISIT LO	285.890.450.021,83	219.028.529.238,45
Surplus/Defisit LO tahun 2019 sebesar Rp219.028.529.238,45 dan surplus/defisit LO tahun 2020 sebesar Rp285.890.450.021,83 yang merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.		
5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,-	0,-
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp0,-		
JUMLAH		
5.6.4. EKUITAS MUTASI	(23.536.272.660,72)	(68.554.520.873,90)
Ekuitas mutasi terdiri dari:		
- Penyesuaian penyisihan piutang	272.800.174,13	776.613.356,01
- Penerimaan Tagihan Pemberian Pinjaman - MKPL BMT	-	(5.725.732,00)
- Penerimaan Tagihan Dana Bergulir - PEW	-	-
- Pengurangan akumulasi penyusutan dari penghapusan aset	-	5.319.394.560,21
- Pengurangan nilai aset tetap	-	(1.705.451.420,09)
- Koreksi Aset	15.116.839.439,00	703.531.600,00
- Persediaan dari BTT	18.669.500.544,90	-
- Aset Tetap dari BTT	14.368.783.754,00	-
- Hibah persediaan	-	6.106.423.463,30
- BM yang tidak menjadi aset	-	(56.441.651,00)
- Ekstrakomp	(88.592.630.880,53)	(91.539.332.261,63)
- Penyesuaian penyusutan aset	(25.082.323.738,54)	(38.743.158.368,70)
- Penyesuaian Investasi Permanen	11.782.120.236,45	54.319.781.706,87
- Pelepasan Aset Tanah Investasi Bank Jogja	-	(4.540.000.000,00)
- Koreksi atas aset barang rusak	-	15.398.139,13
- Koreksi atas aset barang tidak ketemu	-	6.406.000,00
- Penyesuaian Piutang Pendapatan Pajak	22.696.575.462,00	-
- Penyesuaian Piutang Pendapatan Retribusi	(148.033.046,50)	752.818.624,00
- Penyesuaian Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	3.782.117.736,40	33.327.732,00
- Penyesuaian Penyisihan Piut Bag Hasil Kemitraan	-	10.000,00
- Penyesuaian Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	1.337.120,00
- Koreksi Beban Penyisihan	-	546.258,00
Penyesuaian Aset Tanah	2.768.091.400,00	-
Penyesuaian Aset Peralatan dan Mesin	(853.738.499,82)	-
Penyesuaian Aset Gedung dan Bangunan	747.167.532,33	-
Penyesuaian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	768.471.197,87	-
Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	165.766.027,59	-
Penyesuaian Investasi non permanen	2.220.000,00	-
JUMLAH	(23.536.272.660,72)	(68.554.520.873,90)
5.6.5. EKUITAS AKHIR	4.497.237.740.482,83	4.234.883.563.121,72
Ekuitas akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.234.883.563.121,72. dan ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp4.497.237.740.482,83. Ekuitas ini merupakan hasil dari penjumlahan ekuitas awal tahun ditambah surplus/defisit-LO dan ekuitas mutasi.		



BABVI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ}24'19''$ sampai $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}15'24''$ sampai $07^{\circ}24'26''$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati);
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan);
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon);
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan);

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 ha) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Luas Kota Yogyakarta sekitar 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 250 kampung, 616 RW dan 2534 RT. Luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan,
Kelurahan dan Luas

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km ²
1.	Tegalrejo	Kricak	3	13	61	0,82
		Karangwaru	5	14	56	0,70
		Bener	2	7	26	0,57
		Tegalrejo	4	12	47	0,85
2.	Jetis	Bumijo	3	13	57	0,58
		Cokrodingratan	3	11	57	0,66
		Gowongan	3	13	52	0,46
3.	Gondokusuman	Demangan	3	12	44	0,47
		Kotabaru	1	4	20	0,71
		Klitren	4	16	63	0,68
		Baciro	6	21	87	1,06
		Terban	4	12	58	0,80



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km ²
4.	Danurejan	Suryatmajan	6	14	43	0,28
		Tegalpanggung	5	16	66	0,35
		Bausasran	5	12	49	0,47
5.	Gedongtengen	Sosromenduran	7	14	54	0,50
		Pringgokusuman	7	22	84	0,46
6.	Ngampilan	Ngampilan	9	13	70	0,45
		Notoprajan	5	8	50	0,37
7.	Wirobrajan	Pakuncen	7	12	56	0,65
		Wirobrajan	3	12	58	0,67
		Patangpuluhan	3	10	51	0,44
8.	Mantrijeron	Gedongkiwo	3	18	86	0,86
		Suryodiningratan	4	17	70	0,90
		Mantrijeron	5	20	75	0,85
9.	Kraton	Patehan	4	10	44	0,40
		Panembahan	5	18	78	0,66
		Kadipaten	4	15	53	0,34
10.	Gondomanan	Ngupasan	4	13	49	0,67
		Prawirodirjan	4	18	61	0,45
11.	Pakualaman	Purwokinanti	4	10	47	0,33
		Gunungketur	3	9	36	0,30
12.	Mergangsan	Keparakan	4	13	58	0,53
		Wirogunan	7	24	76	0,85
		Brontokusuman	6	23	84	0,93
13.	Umbulharjo	Semaki	3	10	34	0,66
		Muja-muju	4	12	55	1,53
		Tahunan	8	12	50	0,78
		Warungboto	5	9	38	0,83
		Pandeyan	7	13	52	1,38
		Sorosutan	17	18	70	1,68
		Giwangan	7	13	44	1,26



No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah			Luas
			Kampung	RW	RT	Km ²
14.	Kotagede	Rejowinangun	9	13	50	1,25
		Prenggan	17	13	57	0,99
		Purbayan	18	14	58	0,83
	Jumlah	45	250	616	2.534	32,50

Sumber : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335 Tahun 2018 tentang Jumlah RT dan RW se-Kota Yogyakarta Periode 2018 – 2021.

b. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2020 sebanyak 414.704 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 202.282 orang
- Perempuan : 212.422 orang.

Secara terperinci distribusi penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.2
Distribusi Frekuensi Penduduk Kota Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tegalrejo	18.206	19.050	37.256	8,98
2	Jetis	13.191	13.939	27.130	6,54
3	Gondokusuman	20.737	22.188	42.925	10,35
4	Danurejan	10.430	10.895	21.325	5,14
5	Gedongtengen	9.662	10.039	19.701	4,75
6	Ngampilan	9.051	9.388	18.439	4,45
7	Wirobrajan	13.657	14.351	28.008	6,75
8	Mantrijeron	17.282	18.180	35.462	8,55
9	Kraton	10.580	11.199	21.779	5,25
10	Gondomanan	7.283	7.678	14.961	3,61
11	Pakulaman	5.137	5.585	10.722	2,59
12	Mergangsan	15.488	16.472	31.960	7,71
13	Umbulharjo	34.505	35.937	70.442	16,99



14	Kotagede	17.073	17.521	34.594	8,34
Jumlah					100,00

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2020 mencapai 12.760 orang per kilometer persegi.

c. Organisasi Pemerintahan Daerah

Perangkat daerah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan daerah lain terkait kelembagaan maupun penyertaan modal terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, dan Bagian Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian, membidangi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dan Bagian Layanan Pengadaan;
 - d. Asisten Umum, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Bagian Organisasi;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Kebakaran;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Dinas Kebudayaan;
 - t. Dinas Pariwisata;
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;



5. Badan, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan;
7. Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa;
9. Rumah Sakit Jogja;
10. Lembaga lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Penyertaan modal (investasi) Daerah, terdiri dari :
 - a. PT Bank BPD DIY
 - b. Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
 - c. Perumda BPR Bank Jogja;
 - d. PT Radio Swara Adiloka;
 - e. PD. Jogjatama Vishesha;
 - f. BUKP se-Kota Yogyakarta.



BABVII

INFORMASI LAINNYA

1. Penyerahan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan kepada Pemerintah Pusat

Penyerahan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Pemerintah Pusat sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Adapun kronologis proses penyerahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Maret 2016 dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi P3D terminal penumpang Yogyakarta oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
2. Pada tanggal 31 Mei 2016 disampaikan surat Walikota Yogyakarta Nomor 800/2010 perihal pemenuhan kelengkapan data pengalihan P3D Terminal tipe A kepada Kementerian Perhubungan (Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat).
3. Penyelesaian perkara Terminal Giwangan antara Pemkot Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya sampai dengan terbitnya sertifikat pengembalian hak pengelolaan Terminal Giwangan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diuraikan pada poin (A).
4. Pada tanggal 13 Februari 2017 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor 801/216/DJPD/2017 telah menyampaikan surat keputusan pengalihan PNS Daerah ke Kementerian Perhubungan sebanyak 20 orang.
5. Pada tanggal 20-21 Juni 2019 menghadiri undangan rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Pengalihan Aset Terminal Tipe A di Dirjend Perhubungan Darat beserta jajaran Kementerian Perhubungan terkait dengan potensi pembagian tapak Terminal tipe A Giwangan untuk kepentingan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pada tanggal 20 Agustus 2019 menghadiri undangan rapat di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY acara Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Aset Terminal A Giwangan koordinasi tahapan Penyelesaian Pengalihan Aset pada Terminal Giwangan.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan berkaitan dengan hasil jawaban koordinasi pembagian tapak Terminal tipe A Giwangan (sesuai dengan uraian kegiatan angka 5).



Dalam rangka mengembalikan hak atas tanah Terminal Penumpang Tipe A Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pasca penyelesaian perkara terminal Giwangan sekaligus dalam rangka proses penyerahan pengelolaan terminal tipe A kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan Revisi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT. Perwita Karya menjadi sepenuhnya atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 590/2205 tanggal 17 Juni 2019 perihal Permohonan Penghapusan Hak Pengelolaan a.n. PT. Perwita Karya;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan permohonan pelepasan HGB sertifikat Nomor : 00188 atas nama PT. Perwita karya dan menghapus catatan HPL sertifikat Nomor : 1/Giwangan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 590/2340 tanggal 27 Juni 2019 perihal Permohonan Percepatan Pelepasan HGB dan Penghapusan Catatan HPL Terminal Giwangan Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengajukan permohonan informasi terkait perkembangan proses pelepasan HGB dan Penghapusan Catatan HPL Terminal Giwangan Kota Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Yogyakarta melalui surat Nomor : 640/3120 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Percepatan Penghapusan Hak Pengelolaan a.n. PT. Perwita Karya.

Dengan demikian proses penyerahan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan, karena menunggu proses pelepasan HGB sertifikat Nomor : 00188 atas nama PT. Perwita Karya dan menghapus catatan HPL sertifikat Nomor : 1/Giwangan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

2. Divestasi PT. Radio Swara Adhiloka

PT. Radio Swara Adhiloka adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan penyertaan modal dari pengambilalihan saham oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006.

PT. Radio Swara Adhiloka berkedudukan di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan berdasarkan akta Notaris nomor 17 tanggal 25 Agustus 1990 dibuat



dihadapan Notaris Koeshariati Tito, SH., yang telah berubah beberapa kali Anggaran Dasar melalui rapat umum pemegang saham, terakhir dengan Akta Notaris nomor 10 oleh Hj. Pandam Nurwulan, SH., M.Hum., dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2008.

Dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka adalah :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; dan
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka Dalam Bentuk Pengambilalihan Saham.

Adapun susunan pemegang saham PT. Radio Swara Adhiloka sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp.)	% Kepemilikan Saham
1.	Pemerintah Kota Yogyakarta	690	690.000.000,00	99,28 %
2.	Ny. Hj. Badi'ah	5	5.000.000,00	0,72 %
	Total	695	695.000.000,00	100,00 %

Pertimbangan penyertaan modal pada PT. Radio Swara Adhiloka adalah untuk peningkatan pelayanan keprograman radio dalam rangka mendukung Taman Pintar Yogyakarta, menjadi radio edukasi anak di wilayah Kota Yogyakarta. PT. Radio Swara Adhiloka pada awalnya memiliki kantor dan ruang siaran di kawasan Taman Pintar Yogyakarta dengan nama udara sebagai Radio Anak Jogja pada frekuensi FM 99,9 Mhz.

Seiring pemberlakuan penuh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005, maka sesuai dengan Izin Siaran Radio (ISR) FM PT. Radio Swara Adhiloka yang diterbitkan Kementerian Kominfo RI, maka PT. Radio Swara Adhiloka harus melakukan siaran dan berpindah operasi di Wonosari Gunung Kidul pada tahun 2013.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Nomor : 37/LHP/XVIII.YOG/11/2016 atas Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 - 2016 pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka BPK RI merekomendasikan untuk segera menyusun kajian atas keberadaan dan kelangsungan operasional PT. Radio Swara Adhiloka.



Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan P2EB FEB UGM untuk melakukan analisis atas kelayakan divestasi penyertaan modal pada PT. Radio Swara Adhiloka. Dari hasil analisis tersebut P2EB FEB UGM merekomendasikan Pemerintah Kota Yogyakarta mendivestasi kepemilikan Radio Swara Adhiloka, dengan pertimbangan :

1. Secara historis analisis keuangan menunjukkan tren kerugian dan prediksi juga menunjukkan hal yang sama, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 24 ayat (1) :”Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi”;
2. Keberadaan PT. Radio Swara Adhiloka sudah tidak sesuai dengan tujuan penyertaan modal semula; dan
3. Peluang untuk merealisasikan pendapatan dan keuntungan hanya bisa jika perusahaan dan/atau pemegang saham melakukan investasi tambahan.

Tahapan divestasi PT. Radio Swara Adhiloka yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta melalui surat Walikota Yogyakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 570/1231 tanggal 2 April 2019 perihal Permohonan Persetujuan Divestasi PT. Radio Swara Adhiloka;
2. Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Perseroan Terbatas Radio Swara Adhiloka dengan Keputusan Walikota Nomor 354 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Perseroan Terbatas Radio Swara Adhiloka dan Keputusan Walikota Nomor 302 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Tim Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Perseroan Terbatas Radio Swara Adhiloka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta memberikan persetujuan atas rencana divestasi PT. Radio Swara Adhiloka melalui Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Persetujuan Divestasi atas Kepemilikan Saham pada PT. Radio Swara Adhiloka;
4. Audit Keuangan Due Dilligence atas Laporan Keuangan PT. Radio Swara Adhiloka untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 30 September 2019 melalui jasa Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro;
5. Analisis penilaian bisnis untuk mengetahui nilai pasar saham PT. Radio Swara Adhiloka melalui Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirman Alfiantori & Rekan yang



memberikan kesimpulan nilai pasar 100% saham pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.404.000.000,00 (Empat ratus empat juta rupiah);

6. Persetujuan penjualan saham dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui surat Walikota Yogyakarta Nomor 032/4913 tanggal 19 Desember 2019 tentang Persetujuan Penjualan dan Harga Limit dengan besaran HPS Rp690.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
7. Menyerahkan penjualan secara lelang atas kepemilikan saham PT. Radio Swara Adhiloka milik Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melalui surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 028/6090 tanggal 27 Desember 2019 tentang Permohonan Lelang Barang Bergerak Tidak Berwujud (Kepemilikan Saham) dan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 602/12241 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Permohonan Lelang Ulang Barang Bergerak Tidak Berwujud (Kepemilikan Saham).

Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan lelang atas kepemilikan saham pada PT. Radio Swara Adhiloka sebanyak 3 (tiga) kali. Lelang pertama kepemilikan saham pada PT. Radio Swara Adhiloka dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2020 sesuai surat Penetapan Jadwal Lelang Barang Bergerak Tidak Berwujud (Kepemilikan Saham) Nomor S-1378/WKN.09/KNL.06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari KPKNL Yogyakarta. Lelang pertama ini belum berhasil mendapatkan pemenang lelang.

Lelang kedua juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 September 2020 sesuai surat Penetapan Jadwal Lelang Barang Bergerak Tidak Berwujud (Kepemilikan Saham) Nomor S-1795/WKN.09/KNL.06/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari KPKNL Yogyakarta. Pada lelang kedua ini juga belum berhasil mendapatkan pemenang lelang.

Selanjutnya Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Perseroan Terbatas Radio Swara Adhiloka melaksanakan proses divestasi penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT. Radio Swara Adhiloka secara mandiri. Berdasarkan surat Walikota Yogyakarta Nomor 575/15802 tanggal 18 November 2020 tentang Persetujuan Penjualan dan Harga Limit yang menetapkan besaran harga limit sebesar Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah), Tim Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Perseroan Terbatas Radio Swara Adhiloka melakukan lelang saham pada tanggal 1 Desember 2020



dan berhasil mendapatkan pemenang lelang dengan harga penjualan sebesar Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah). Dengan terjualnya saham PT Radio Swara Adhiloika (PT RSA) tersebut maka penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PT RSA telah divestasi dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020.



BAB VIII PENUTUP

Dari uraian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.699.751.020.194,30 atau 103,84% dari target sebesar Rp1.636.876.158.348,64.

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp563.174.371.396,63 atau 118,09% dari target Rp476.918.678.411,89 yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp342.780.587.013,00 atau 121,18% dari target;
- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp23.310.646.522,00 atau 118,65% dari target;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp34.859.626.698,98 atau 100,09% dari target;
- d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp162.223.511.162,65 atau 116,23% dari target.

Pendapatan Transfer tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.105.993.726.262,42 atau 98,16% dari target, yang terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.145.298.917,00 atau 92,81% dari target;
- b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.733.679.359,00 atau 63,90% dari target;
- c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp627.247.170.000,00 atau 99,30% dari target;
- d. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp142.634.296.993,00 atau 91,97% dari target.
- e. Dana Penyesuaian sebesar Rp112.688.603.600,00 atau 99,91% dari target;
- f. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp120.965.338.876,00 atau 101,34% dari target;
- g. Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp53.579.338.517,42 atau 98,53% dari target.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp30.582.922.535,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat atau 92,16% dari target.

2. Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.517.599.468.488,39 atau 82,60% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp1.248.329.702.538,88 atau sebesar 90,65% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp771.630.859.084,00 terealisasi sebesar Rp728.710.179.778,78 atau 94,44% dari anggaran. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp523.189.536.797,00 terealisasi sebesar Rp455.864.521.552,10 atau sebesar 87,13% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp50.123.433.400,00 terealisasi Rp38.725.063.808,00 atau 77,26% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp32.131.465.000,00 terealisasi sebesar Rp25.029.937.400,00 atau 77,90% dari anggaran.



b. Belanja Modal

Belanja Modal teralisasi sebesar Rp193.523.645.423,93 atau 90,87% dari anggaran. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

c. Belanja Tak Terduga.

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp245.813.919.545,09 terealisasi sebesar Rp74.385.331.447,58 atau 30,26% dari anggaran.

d. Transfer

Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp1.360.789.078,00 terealisasi sebesar Rp1.360.789.078,00 atau 100,00% dari anggaran.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp220.762.753.122,45 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp410.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp12.620.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada PT. Bank BPD DIY.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp382.914.304.828,36.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 sebesar Rp220.340.133.122,45;
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, sebesar Rp220.340.133.122,45;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp382.914.304.828,36.

C. Neraca

1. Aset

Neraca per 31 Desember 2020 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp4.506.498.945.235,37 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp532.923.737.696,35, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp540.866.727.981,79 Aset Tetap sebesar Rp3.376.707.490.306,00, Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp56.000.989.251,22.

2. Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2020 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp9.261.204.752,54, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

3. Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2020 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp4.497.237.740.482,83.



D. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp1.800.489.787.640,79 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp606.853.996.845,09, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.105.547.109.102,42 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp88.088.681.693,28.

2. Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2020 sebesar Rp1.440.214.006.171,38 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp1.438.853.217.093,38, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp1.360.789.078,00.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2020 sebesar Rp360.275.781.469,41.

4. Surplus Non Operasional

Pada tahun 2020 tidak terdapat Surplus Non Operasional.

5. Pendapatan Luar Biasa

Pada tahun 2020 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa.

6. Beban Luar Biasa

Pada tahun 2020 terdapat Beban Luar Biasa sebesar Rp74.385.331.447,58.

7. Surplus/Defisit-LO

Surplus-LO tahun 2020 sebesar Rp285.890.450.021,83.

E. Laporan Arus Kas

Saldo kas BUD dan BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp382.914.304.828,36 bertambah sebesar Rp162.574.171.705,66 dibanding saldo kas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp220.340.133.122,45. Bertambahnya kas sebesar Rp162.574.171.705,66 disebabkan oleh arus kas bersih dari aktivitas operasi surplus sebesar Rp374.054.585.303,59, arus kas bersih dari aktifitas investasi defisit sebesar Rp211.903.033.597,93, arus kas bersih aktivitas pendanaan surplus sebesar Rp422.620.000,00 dan tidak ada selisih pada arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp382.962.457.541,81 terdiri dari:

1. Saldo kas BUD dan BLUD sebesar Rp382.914.304.828,36;
2. Titipan Bank BPD DIY - Uji SIM BPD pada rekening UPT Pusat Bisnis sebesar Rp4.213,45; dan
3. Titipan Pihak Ketiga atas Teater 4D, Toilet Taman Pintar dan Belanja Honorarium Jasa Pembinaan Tenaga Keamanan sebesar Rp47.268.500,00.
4. Hutang belanja honorarium jasa pembinaan keamanan Taman Pintar sebesar Rp880.000,00

F. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp4.234.883.563.121,72 merupakan ekuitas akhir tahun 2019.

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2020 sebesar Rp285.890.450.021,83 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2020, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



3. Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar (Rp23.536.272.660,72) terdiri dari Penyesuaian penyisihan piutang Rp272.800.174,13, koreksi aset Rp15.116.839.439,00, persediaan dari BTT Rp18.669.500.544,90, aset tetap dari BTT Rp14.368.783.754,00, ekstrakomp (Rp88.592.630.880,53), penyesuaian penyusutan aset (Rp25.082.323.738,54), Penyesuaian investasi permanen Rp11.782.120.236,45, Penyesuaian Piutang Pendapatan Pajak Rp22.696.575.462,00, Penyesuaian piutang pendapatan retribusi (Rp148.033.046,50), Penyesuaian piutang pendapatan Lain-lain PAD yang sah Rp3.782.117.736,40, Penyesuaian aset tanah Rp2.768.091.400,00, Penyesuaian aset peralatan dan mesin (Rp853.738.499,82), Penyesuaian aset gedung dan bangunan Rp747.167.532,33, Penyesuaian aset jalan irigasi dan jaringan Rp768.471.197,87, Penyesuaian aset tetap lainnya Rp165.766.027,59 dan Penyesuaian Investasi non permanen Rp2.220.000,00

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp4.234.883.563.121,72 dan Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp4.497.237.740.482,83.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG
DAERAH

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	1994 - 2020	55.486.978.432,05	151.240.763.428,00	130.571.749.502,13	76.155.992.357,92
2	Piutang Retribusi	1994 - 2020	1.556.701.642,20	2.680.780.004,00	3.066.732.090,20	1.170.749.556,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN
PIUTANG TAK TERTAGIH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	NRV
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak	128.534.908.185,00	52.378.915.827,08	76.155.992.357,92
2	Piutang Retribusi	3.971.869.559,00	2.801.120.003,00	1.170.749.556,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X
DAFTAR REKAPITULASI DANA
BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA
BERGULIR

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	SKPD	Uraian	Plafond Kredit	Saldo Awal 2020	Pengurangan dr Plafon Kredit	Jumlah	Jumlah Penyisihan	NRV
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan LKM						
		Pokja 2003-Tahap I	190.000.000,00	-	190.000.000,00	-		
		Pokja 2003-Tahap II	413.000.000,00	16.023.817,00	396.976.183,00	16.023.817,00		
		Pokja 2003-Tahap III	370.000.000,00	10.687.614,00	359.312.386,00	10.687.614,00		
		Jumlah Pokja 2003	973.000.000,00	26.711.431,00	946.288.569,00	26.711.431,00		
		Pokja 2006-Kelompok I	385.000.000,00	7.000.000,00	378.000.000,00	7.000.000,00		
		Pokja 2006-Kelompok II	525.000.000,00	-	525.000.000,00	-		
		Jumlah Pokja 2006	910.000.000,00	7.000.000,00	903.000.000,00	7.000.000,00		
		Pokja 2007	299.000.000,00	6.318.047,00	293.214.685,00	5.785.315,00		
		Pokja 2008	500.000.000,00	196.403.967,00	303.596.033,00	196.403.967,00		
		Pengurangan Tahun 2010		(170.686.133,00)	170.686.133,00	(170.686.133,00)		
		Pengurangan Tahun 2011		(13.086.132,00)	13.086.132,00	(13.086.132,00)		
		Pengurangan Tahun 2013		(265.000,00)	265.000,00	(265.000,00)		
		Pengurangan Tahun 2016		(3.230.894,00)	3.230.894,00	(3.230.894,00)		
		Jumlah	2.682.000.000,00	48.632.554,00	2.633.367.446,00	48.632.554,00	48.632.554,00	-
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)						
		Tahun 2006	1.048.000.000,00	330.125.700,00	726.954.600,00	321.045.400,00		
		Tahun 2007	912.000.000,00	185.163.788,00	728.156.212,00	183.843.788,00		
		Jumlah	1.960.000.000,00	515.289.488,00	1.455.110.812,00	504.889.188,00	504.889.188,00	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Tahun 2006	1.250.000.000,00	166.225.882,00	1.095.252.050,00	154.747.950,00		
		TOTAL	5.892.000.000,00	730.147.924,00	5.183.730.308,00	708.269.692,00	708.269.692,00	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tahun Penyer-taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyer-taan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2003	PDAM Tirtamarta	Perda No 17/2018	Uang	88.603.385.979,38	43.397.922.979,38	-	43.397.922.979,38	45.205.463.000,00	-	-	43.397.922.979,38
2	2003	PD BPR Bank Jogja	Perda No 8/2019	Uang	350.000.000.000,00	104.540.000.000,00	-	104.540.000.000,00	245.460.000.000,00	-	-	104.540.000.000,00
3		PT. BPD DIY	Perda No 17/2018	Uang	468.000.000.000,00	189.145.000.000,00	20.000.000.000,00	209.145.000.000,00	258.855.000.000,00	-	-	209.145.000.000,00
4		BUKP se Kota Yk	Perda Prov. DIY No. 1/ 1989	Uang	411.000.000,00	411.000.000,00	-	411.000.000,00	-	-	-	411.000.000,00
5	2006	PT Radio Swara Adhiloka	AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006	Uang	690.000.000,00	690.000.000,00	(690.000.000,00)	-	690.000.000,00	-	-	-
6	2012	PD Jogjatama Vishesa	Perda No 12/2012	Uang	117.667.020.000,00	117.667.020.000,00	-	117.667.020.000,00	-	-	-	117.667.020.000,00
			Jumlah :		1.025.371.405.979,38	455.850.942.979,38	19.310.000.000,00	475.160.942.979,38	550.210.463.000,00	-	-	475.160.942.979,38

Keterangan :

- 1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyer-taan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
- 2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyer-taan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja
- 3) Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Perda Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2012 tentang Penyer-taan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesa

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XII
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Tanah	1.884.638.446.869,22	125.269.769.851,00	103.663.921.531,00	1.906.244.295.189,22
2	Peralatan dan Mesin	754.164.705.849,33	87.707.132.016,16	35.115.565.050,82	806.756.272.814,68
3	Gedung dan Bangunan	1.076.780.987.891,51	61.538.401.524,10	10.747.926.361,36	1.127.571.463.054,25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.108.434.251.782,83	112.589.879.094,57	1.051.426.238,23	2.219.972.704.639,17
5	Aset Tetap Lainnya	41.148.254.654,97	2.818.487.450,32	1.786.075.729,63	42.180.666.375,67
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.997.204.784,98	7.957.723.855,40	7.431.555.764,87	23.523.372.875,51
	Jumlah	5.888.163.851.832,84	397.881.393.791,55	159.796.470.675,91	6.126.248.774.948,51

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	SALDO AKHIR	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
1	DINAS PENDIDIKAN	-	131.261.186.452,60	278.473.526.477,44	365.703.189,96	31.009.619.532,82	38.942.847,28	441.148.978.500,10	10.077.020.360,10	431.071.958.140,00
2	DINAS KESEHATAN	-	100.060.603.052,66	106.278.334.034,77	144.475.901,93	254.361.566,50	-	206.737.774.555,85	1.096.201.941,86	205.641.572.613,99
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	218.298.329.619,76	28.146.256.668,37	531.825.230,00	27.954.100,00	-	247.004.365.618,13	374.204.451,90	246.630.161.166,23
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	21.689.058.697,41	297.352.267.722,76	2.140.199.154.793,17	1.480.708.956,20	19.400.905.778,23	2.480.122.095.947,77	58.530.011.246,79	2.421.592.084.700,98
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	8.416.735.410,29	2.271.538.353,04	-	3.604.200,00	-	10.691.877.963,33	64.603.533,71	10.627.274.429,62
6	DINAS KEBAKARAN	-	19.448.006.763,46	2.783.571.968,52	4.854.405.206,85	903.625,00	938.992.500,00	28.025.880.063,83	24.154.075,55	28.001.725.988,28
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	12.773.096.616,19	1.036.786.090,00	3.614.421.469,62	2.137.290,00	94.400.000,00	17.520.841.465,81	53.747.877,45	17.467.093.588,36
8	DINAS SOSIAL	-	5.954.071.943,84	4.932.813.629,89	-	24.471.840,00	-	10.911.357.413,73	134.817.652,03	10.776.539.761,70
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3.521.087.278,63	3.666.712.545,62	-	26.738.950,00	-	7.214.538.774,25	69.443.103,70	7.145.095.670,55
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.223.680.744.643,00	2.778.693.145,70	2.887.884.712,42	-	96.267.651,00	-	1.229.443.590.152,12	37.803.781,93	1.229.405.786.370,19
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	41.874.726.064,74	30.588.768.265,98	3.003.599.595,05	2.234.407.969,47	598.749.550,00	78.300.251.445,25	6.002.703.505,92	72.297.547.939,33
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.236.710.785,48	1.832.536.706,50	-	5.554.500,00	14.675.000,00	11.089.476.991,98	54.088.331,56	11.035.388.660,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	2.511.619.569,61	4.983.699.444,51	905.284.338,51	420.609.335,32	-	8.821.212.687,95	150.263.349,54	8.670.949.338,41
14	KECAMATAN JETIS	-	2.054.144.511,50	4.039.743.198,65	1.389.619.863,35	46.329.004,54	-	7.529.836.578,04	89.522.457,93	7.440.314.120,11
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	2.001.032.306,99	8.161.338.619,06	1.997.009.173,56	146.832.872,72	24.000.000,00	12.330.212.972,33	130.989.893,06	12.199.223.079,27
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	1.769.712.171,67	5.186.207.085,35	514.327.040,03	40.762.704,54	-	7.511.009.001,59	136.935.613,67	7.374.073.387,92
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	1.534.786.663,11	3.051.451.544,60	759.466.248,99	185.223.636,36	-	5.530.928.093,06	68.097.400,25	5.462.830.692,81
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	1.947.671.441,32	4.568.016.995,10	284.454.000,00	26.833.636,36	-	6.826.976.072,78	183.349.413,13	6.643.626.659,65
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	1.271.941.318,27	3.724.760.518,49	883.264.116,54	196.249.451,36	-	6.076.215.404,66	66.884.517,41	6.009.330.887,25
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	1.532.959.325,86	3.842.441.336,43	1.317.839.604,22	195.945.141,49	-	6.889.185.408,00	157.252.297,19	6.731.933.110,81
21	KECAMATAN MANTRIJEON	-	1.756.935.332,85	3.421.476.306,86	1.188.976.327,73	214.848.041,49	-	6.582.236.008,93	73.323.475,28	6.508.912.533,65
22	KECAMATAN KRATON	-	1.503.947.285,88	3.959.191.370,86	1.250.892.299,92	42.125.754,54	-	6.756.156.711,20	90.465.731,34	6.665.690.979,86
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	1.578.902.769,73	3.371.075.457,76	599.404.750,00	189.068.686,36	-	5.738.451.663,85	155.223.439,79	5.583.228.224,06
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	2.206.704.029,01	4.736.541.945,70	1.268.664.549,32	209.921.536,49	-	8.421.832.060,52	127.227.154,09	8.294.604.906,43
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	3.267.223.415,91	17.490.143.958,24	2.792.087.244,30	149.817.696,81	-	23.699.272.315,26	187.867.242,15	23.511.405.073,11
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	1.842.861.267,46	7.902.067.534,94	273.843.118,14	74.003.691,49	-	10.092.775.612,03	244.075.660,41	9.848.699.951,62
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	4.253.158.733,74	1.194.196.999,96	-	1.405.025,00	-	5.448.760.758,70	104.098.342,03	5.344.662.416,67
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	16.936.179.721,86	45.202.404.896,56	582.111.320,01	54.621.196,46	-	62.775.317.134,89	9.932.698.344,09	52.842.618.790,80
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	42.472.392.938,58	7.913.178.527,68	449.629.243,26	15.209.632,00	-	50.850.410.341,52	129.539.133,20	50.720.871.208,32
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	2.788.357.998,51	-	-	152.233.100,00	-	2.940.591.098,51	58.893.556,42	2.881.697.542,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	5.100.051.365,73	15.275.250.280,49	-	2.102.700,00	-	20.377.404.346,22	21.497.413,48	20.355.906.932,74
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	1.705.845.167,16	313.413.000,00	-	8.975.000,00	-	2.028.233.167,16	20.802.888,23	2.007.430.278,93

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	SALDO AKHIR	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	1.824.554.037,47	1.136.459.705,50	-	77.150.000,00	298.689.800,00	3.336.853.542,97	21.981.162,13	3.314.872.380,84
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	7.934.600.360,69	4.207.456.924,44	-	2.377.555.270,08	16.500.000,00	14.536.112.555,21	88.772.838,06	14.447.339.717,15
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	830.539.736,75	-	-	1.346.800,00	-	831.886.536,75	18.216.653,15	813.669.883,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	7.969.825.227,46	8.881.348.470,29	570.920.376,71	35.300.500,00	142.007.500,00	17.599.402.074,46	292.832.280,71	17.306.569.793,75
37	DINAS PARIWISATA	-	34.353.794.361,98	53.840.303.915,91	3.591.406.489,87	1.077.862.766,46	1.643.272.900,00	94.506.640.434,22	65.492.242,30	94.441.148.191,92
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	28.554.649.186,99	130.114.172.056,82	391.570.451,13	151.026.900,00	163.352.000,00	159.374.770.594,94	230.351.786,47	159.144.418.808,47
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.063.439.214,53	715.563.000,00	-	8.981.423,00	-	3.787.983.637,53	34.783.214,32	3.753.200.423,21
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	25.185.083.016,36	30.514.536.872,55	-	296.617.281,80	79.090.000,00	56.075.327.170,71	590.221.161,49	55.485.106.009,22
41	SEKRETARIAT DPRD	-	13.540.451.153,91	8.996.784.097,96	-	244.018.020,01	69.795.000,00	22.851.048.271,88	78.775.065,92	22.772.273.205,96
42	INSPEKTORAT	-	2.768.824.412,72	7.041.057.050,48	-	19.149.140,00	-	9.829.030.603,20	33.502.656,56	9.795.527.946,64
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	3.678.660.451,01	1.280.461.805,79	-	17.586.750,00	-	4.976.709.006,80	29.645.617,20	4.947.063.389,60
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	682.563.550.546,22	6.539.488.222,10	45.256.748.215,59	46.248.348.697,00	330.965.000,00	-	780.939.100.680,91	123.291.712,98	780.815.808.967,93
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	9.669.815.415,79	2.937.251.260,43	-	3.258.500,00	-	12.610.325.176,22	188.788.090,19	12.421.537.086,03
	JUMLAH TOTAL	1.906.244.295.189,22	821.262.457.963,29	1.203.509.739.572,31	2.219.972.704.639,17	42.180.666.375,67	23.523.372.875,51	6.216.693.236.615,17	90.444.461.666,67	6.126.248.774.948,50

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN/JENIS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pendidikan	38.942.847,28	-	-	38.942.847,28
2	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Prasarana Wilayah	19.079.554.237,70	7.752.907.305,40	7.431.555.764,87	19.400.905.778,23
3	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kebakaran	938.992.500,00	-	-	938.992.500,00
4	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.400.000,00	-	-	94.400.000,00
5	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup	532.675.550,00	66.074.000,00	-	598.749.550,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	14.675.000,00	-	14.675.000,00
7	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Kecamatan Gondokusuman	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00
8	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kebudayaan	298.689.800,00	-	-	298.689.800,00
9	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	16.500.000,00	-	16.500.000,00
10	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Pangan	142.007.500,00	-	-	142.007.500,00
11	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pariwisata	1.629.500.350,00	13.772.550,00	-	1.643.272.900,00
12	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	163.352.000,00	-	-	163.352.000,00
13	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Sekretariat Daerah	79.090.000,00	-	-	79.090.000,00
14	Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Sekretariat DPRD	-	69.795.000,00	-	69.795.000,00
	Jumlah	22.997.204.784,98	7.957.723.855,40	7.431.555.764,87	23.523.372.875,51

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**LAMPIRAN XV
DAFTAR REKAPITULASI
ASET LAINNYA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Kas yang dibatasi penggunaannya	2.798.981.468,00	4.748.942,00	51.165.955,00	2.752.564.455,00
2	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	1.368.125.000,00	1.125.000,00	225.000.000,00	1.144.250.000,00
3	Tagihan Sewa	183.955.600,00	462.200,00	92.440.000,00	91.977.800,00
4	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.269.300.000,00	0,00	861.000.000,00	6.408.300.000,00
6	Aset Tak Berwujud	27.404.372.979,08	3.078.710.095,00	7.496.572.437,38	22.986.510.636,70
7	Aset Lain-lain	5.357.144.501,83	17.260.241.857,69	0,00	22.617.386.359,52
	Jumlah	44.381.879.548,91	20.345.288.094,69	8.726.178.392,38	56.000.989.251,22

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XVI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk Pembayaran sebagian kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta	Perda Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009		-	-	-	-	-
JUMLAH				-	-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XVII
DAFTAR PINJAMAN DAN OBLIGASI
DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PINJAMAN DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Prosentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	C	7	8	9	10	11	12
JUMLAH				-				-	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XVIII
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2				3
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.054.754.868,00	48.152.713,45	302.190.413,00	2.800.717.168,45
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.439.982.267,00	1.301.171.911,01	1.635.091.472,92	2.106.062.705,09
3	Utang Belanja	6.515.136.987,00	4.354.424.879,00	6.515.136.987,00	4.354.424.879,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	12.009.874.122,00	5.703.749.503,46	8.452.418.872,92	9.261.204.752,54

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIX
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG

LAMPIRAN XX
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG
BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR
TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGAARAN
BERIKUTNYA

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir TA 2020 (Rp)	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya (Rp)
1	2	3	4	5	6
NIHIL					
			JUMLAH :	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XXI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH/
PERUSAHAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
TAHUN 2020

No	Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aktiva lancar	Aktiva Tidak lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang/Lainnya	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17 x 8	
1	Bidang Perbankan																		
	- PD BPR Bank Jogja	1	S	910.647.996.222,00	13.659.121.389,00	4.667.373.830,00	928.974.491.441,00	787.868.211.055,00	-	787.868.211.055,00	-	100.000.000.000,00		37.934.329.401,00	3.171.950.986,00	141.106.280.387,00			
	Sub Total (1)			910.647.996.222,00	13.659.121.389,00	4.667.373.830,00	928.974.491.441,00	787.868.211.055,00	-	787.868.211.055,00	-	100.000.000.000,00	-	37.934.329.401,00	3.171.950.986,00	141.106.280.387,00			
2	Bidang Jasa Lainnya																		
	- PDAM Tirta Marta	1	S	39.412.727.673,30	28.595.689.762,39	16.414.140,00	68.024.831.575,69	9.629.874.348,48	26.512.687.040,00	36.142.561.388,48	-	46.859.766.642,20	-	(16.498.533.502,53)	1.521.037.047,54	31.882.270.187,21			
	Sub Total (2)			39.412.727.673,30	28.595.689.762,39	16.414.140,00	68.024.831.575,69	9.629.874.348,48	26.512.687.040,00	36.142.561.388,48	-	46.859.766.642,20	-	(16.498.533.502,53)	1.521.037.047,54	31.882.270.187,21			
3	Bidang Jasa Lainnya																		
	- PD Jogjatama Vishesha	1	S	2.147.538.283,12	102.749.715.125,33	-	104.897.253.408,45	475.452.521,31	107.472.929,00	582.925.450,31	-	117.667.020.000,00	-	189.174.728,00	(13.541.866.769,87)	104.314.327.958,13			
	Sub Total (3)			2.147.538.283,12	102.749.715.125,33	-	104.897.253.408,45	475.452.521,31	107.472.929,00	582.925.450,31	-	117.667.020.000,00	-	189.174.728,00	(13.541.866.769,87)	104.314.327.958,13			
	Total Seluruh Bidang			952.208.262.178,42	145.004.526.276,72	4.683.787.970,00	1.101.896.576.425,14	797.973.537.924,79	26.620.159.969,00	824.593.697.893,79	-	264.526.786.642,20	-	21.624.970.626,47	(8.848.878.736,33)	277.302.878.532,34			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

DAFTAR LAMPIRAN CALK

LAMPIRAN	URAIAN
1A	Daftar Deposito
1B	Rincian Kas di Bendahara
1C	Rincian Dana BOS dan Laporan Sisa Dana JPD
1D	Daftar Deposito di BLUD
1E	Rincian Dana Bergulir
2A	Daftar Piutang Pajak
2B	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur
3	Rincian Piutang Retribusi Berdasarkan Umur
4	Rincian Tagihan Pemberian Pinjaman
5A	Rincian Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
5B	Rincian Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
5C	Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
6A	Mutasi Bagian Lancar Tagihan Sewa
6B	Mutasi Tagihan Sewa
7A	Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
8A	Mutasi Piutang PAD Lainnya
8B	Mutasi Piutang Lainnya
9	Asuransi Dibayar Di Muka
10	Persediaan
11	Perhitungan Net Realizable Value (NRV) Dana Bergulir
12	Mutasi Penyertaan Modal
13A	Mutasi Aset Tetap
13B	Mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD
13C	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD
13D	Mutasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung per SKPD
13E	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
13F	Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD
13G	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD
13H	Daftar Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Kraton
14	Daftar Piutang TPTGR
15A	Aset Tak Berwujud - Software
15B	Aset Tak Berwujud - Kajian
16	Rincian Bangunan Aset Bersejarah
17	Rincian Utang PFK
18	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka
19	Utang Belanja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DEPOSITO
Per 31 Desember 2020

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank Pembangunan Daerah DIY	-	-
2	Bank Bukopin	-	-
3	Bank Mega	-	-
4	Bank Jateng	-	-
	JUMLAH		-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DEPOSITO BLUD TAMAN PINTAR
Per 31 Desember 2020

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank BPD DIY	006 311 009437	1.000.000.000
	Jumlah		1.000.000.000

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DEPOSITO BLUD RS JOGJA
Per 31 Desember 2020

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank BPD DIY	006 311 009315	2.000.000.000
2	Bank BPD DIY	006 311 009316	2.000.000.000
3	Bank BPD DIY	006 311 009314	2.000.000.000
4	Bank BPD DIY	006 311 009363	2.000.000.000
5	Bank BPD DIY	006 311 009364	2.000.000.000
6	Bank BPD DIY	006 311 009507	2.000.000.000
7	Bank BPD DIY	006 311 009508	1.000.000.000
8	Bank BPD DIY	006 311 009564	2.000.000.000
9	Bank BPD DIY	006 311 009565	2.000.000.000
10	Bank BPD DIY	006 311 009616	2.000.000.000
11	Bank BPD DIY	006 311 009655	1.000.000.000
12	Bank BPD DIY	006 311 009692	2.000.000.000
13	Bank BPD DIY	006 311 009731	1.000.000.000
14	Bank BPD DIY	006 311 009777	1.000.000.000
15	Bank BPD DIY	006 311 009803	1.000.000.000
16	Bank BPD DIY	006 311 009802	2.000.000.000
17	Bank BPD DIY	006 311 009860	2.000.000.000
18	Bank BPD DIY	006 311 010060	1.000.000.000
19	Bank BPD DIY	006 311 010066	1.000.000.000
	Jumlah		31.000.000.000

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DEPOSITO BLUD UPT PUSAT BISNIS
Per 31 Desember 2020

No.	Bank	No. Rekening	Nilai Nominal (Rp)
1	Bank Mandiri	137 02 0506254-6	500.000.000
2	Bank BRI	780 901 000354404	500.000.000
3	Bank BRI	780 901 000400409	500.000.000
4	Bank BPD DIY	006 311 009499	500.000.000
	Jumlah		2.000.000.000

Lampiran 1B

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (SISA UP/TU)
Per 31 Desember 2020

No.	SKPD	Sisa UP/TU/LS (Rp)	TGL PENYETORAN
1	Dinas Kebudayaan	507.044,00	Pengembalian UP Dinas Kebudayaan, disetor dengan STS No. 93 Tanggal 07 Januari 2021
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.765.671,00	Pengembalian UP Dinas Pengendalian Penduduk dan KB disetor dengan STS No 132 Tanggal 11 Januari 2021
	JUMLAH	7.272.715,00	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN TITIPAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
Per 31 Desember 2020

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	UPT Logam Dinas Perindag	6.383.400,00	Telah dipidabhukukan ke rekening BLUD UPT Logam Dinas Perindag pada 4 Januari 2021
	JUMLAH	6.383.400,00	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Per 31 Desember 2020

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BPKAD	13.090.669,00	Telah dipidabhukukan ke rekening Kas Daerah pada 4 Januari 2021
	JUMLAH	13.090.669,00	

RINCIAN DANA BOS SEKOLAH SD NEGERI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	SISA BOS 2019 AUDITED		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS 2020	REALISASI BOS 2020			JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL BOS KINERJA	JUMLAH REALISASI BOS 2020	SALDO AKHIR BOS 2020
		SISA BOSN	JUMLAH SISA BOS 2019 AUDITED			JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BELANJA MODAL				
1	SD Negeri Baciro	39.240.027,00	39.240.027,00	138.870.000,00	138.870.000,00	-	98.754.674,00	59.544.070,00	75.000,00	-	158.373.744,00	19.736.283,00
2	SD Negeri Badran	9.347.594,00	9.347.594,00	126.630.000,00	126.630.000,00	13.200.000,00	94.707.260,00	22.815.500,00	-	-	130.722.760,00	5.254.834,00
3	SD Negeri Balirejo	12.334.091,00	12.334.091,00	119.430.000,00	119.430.000,00	-	88.957.259,00	37.425.900,00	-	-	126.383.159,00	5.380.932,00
4	SD Negeri Baluwarti	2.478.757,00	2.478.757,00	145.890.000,00	145.890.000,00	23.704.000,00	68.842.025,00	31.499.895,00	-	-	124.045.920,00	24.322.837,00
5	SD Negeri Bangirejo 1	24.488.992,00	24.488.992,00	244.800.000,00	244.800.000,00	39.048.000,00	179.008.898,00	46.748.540,00	-	-	264.805.438,00	4.483.554,00
6	SD Negeri Bangunrejo 1	49.151.263,00	49.151.263,00	120.330.000,00	120.330.000,00	15.000.000,00	62.592.624,00	31.401.000,00	-	-	108.993.624,00	60.487.639,00
7	SD Negeri Bangunrejo 2	18.864.151,00	18.864.151,00	69.930.000,00	69.930.000,00	-	42.900.343,00	37.948.370,00	-	730.000,00	81.578.713,00	7.215.438,00
8	SD Negeri Bener	14.804.029,00	14.804.029,00	156.960.000,00	156.960.000,00	-	107.983.321,00	55.569.730,00	-	-	163.553.051,00	8.210.978,00
9	SD Negeri Bhayangkara	75.010.337,00	75.010.337,00	434.160.000,00	434.160.000,00	-	400.257.390,00	82.752.700,00	-	-	483.010.090,00	26.160.247,00
10	SD Negeri Blunyahrejo	63.053.852,00	63.053.852,00	133.560.000,00	133.560.000,00	13.500.000,00	119.241.914,00	42.446.700,00	-	-	175.188.614,00	21.425.238,00
11	SD Negeri Bumijo	18.677.483,00	18.677.483,00	140.400.000,00	140.400.000,00	-	117.977.029,00	37.022.000,00	-	-	154.999.029,00	4.078.454,00
12	SD Negeri Cokrokusuman	36.041.051,00	36.041.051,00	42.480.000,00	42.480.000,00	-	34.409.320,00	22.787.600,00	-	-	57.196.920,00	21.324.131,00
13	SD Negeri Dalem	18.249.018,00	18.249.018,00	139.320.000,00	139.320.000,00	-	109.429.228,00	43.236.000,00	-	-	152.665.228,00	4.903.790,00
14	SD Negeri Demangan	78.440.315,00	78.440.315,00	276.930.000,00	276.930.000,00	16.500.000,00	143.741.104,00	108.352.100,00	-	-	268.593.204,00	86.777.111,00
15	SD Negeri Gambiran	6.514.826,00	6.514.826,00	47.250.000,00	47.250.000,00	-	38.223.305,00	12.025.600,00	-	-	50.248.905,00	3.515.921,00
16	SD Negeri Gedongkiwo	30.787.178,00	30.787.178,00	298.710.000,00	298.710.000,00	10.800.000,00	220.750.705,00	64.610.300,00	-	-	296.161.005,00	33.336.173,00
17	SD Negeri Gedongkuning	127.026.729,00	127.026.729,00	301.950.000,00	301.950.000,00	-	176.262.384,00	174.627.430,00	-	-	350.889.814,00	78.086.915,00
18	SD Negeri Gedongtengen	17.602.111,00	17.602.111,00	261.900.000,00	261.900.000,00	-	220.489.377,00	48.708.400,00	-	-	269.197.777,00	10.304.334,00
19	SD Negeri Giwangan	17.845.644,00	17.845.644,00	311.310.000,00	311.310.000,00	14.400.000,00	165.621.230,00	96.620.069,00	-	-	276.641.299,00	52.514.345,00
20	SD Negeri Glagah	218.821.201,00	218.821.201,00	438.300.000,00	438.300.000,00	-	422.574.752,00	177.113.630,00	-	-	599.688.382,00	57.432.819,00
21	SD Negeri Golo	15.648.613,00	15.648.613,00	241.830.000,00	241.830.000,00	-	190.631.612,00	63.588.800,00	-	-	254.220.412,00	3.258.201,00
22	SD Negeri Gondolayu	12.870.209,00	12.870.209,00	131.940.000,00	131.940.000,00	-	97.734.375,00	39.454.200,00	-	-	137.188.575,00	7.621.634,00
23	SD Negeri Jetis 1	29.441.871,00	29.441.871,00	285.120.000,00	285.120.000,00	-	263.850.001,00	42.281.600,00	-	-	306.131.601,00	8.430.270,00
24	SD Negeri Jetis 2	39.140,00	39.140,00	39.330.000,00	39.330.000,00	-	32.213.169,00	6.999.943,00	-	-	39.213.112,00	156.028,00
25	SD Negeri Jetisharjo	243.993.901,25	243.993.901,25	299.340.000,00	299.340.000,00	16.200.000,00	206.834.599,00	172.065.897,00	-	-	395.100.496,00	148.233.405,25
26	SD Negeri Karanganyar	9.371.566,00	9.371.566,00	82.080.000,00	82.080.000,00	-	68.219.383,00	19.466.300,00	-	-	87.685.683,00	3.765.883,00
27	SD Negeri Karangmulyo	9.842.602,00	9.842.602,00	92.520.000,00	92.520.000,00	8.400.000,00	58.054.056,00	32.162.000,00	-	-	98.616.056,00	3.746.546,00
28	SD Negeri Karangrejo	6.557.073,00	6.557.073,00	104.400.000,00	104.400.000,00	-	81.709.442,00	26.513.373,00	-	-	108.222.815,00	2.734.258,00
29	SD Negeri Karang Sari	7.053.972,00	7.053.972,00	58.770.000,00	58.770.000,00	-	34.803.840,00	24.050.840,00	-	-	58.854.680,00	6.969.292,00
30	SD Negeri Keputran 1	59.623.955,00	59.623.955,00	336.960.000,00	336.960.000,00	-	257.176.156,00	79.210.700,00	-	-	336.386.856,00	60.197.099,00
31	SD Negeri Keputran 2	122.789.046,00	122.789.046,00	426.420.000,00	426.420.000,00	26.250.000,00	412.381.108,00	89.323.300,00	-	-	527.954.408,00	21.254.638,00
32	SD Negeri Keputran A	128.134.955,00	128.134.955,00	438.120.000,00	438.120.000,00	-	382.131.917,00	122.703.500,00	-	-	504.835.417,00	61.419.538,00
33	SD Negeri Kintelan 1	17.502.335,00	17.502.335,00	142.380.000,00	142.380.000,00	-	117.584.779,00	33.682.250,00	-	-	151.267.029,00	8.615.306,00
34	SD Negeri Kintelan 2	6.039.798,00	6.039.798,00	88.468.600,00	88.468.600,00	12.000.000,00	42.834.715,00	27.205.100,00	-	-	82.039.815,00	12.468.583,00
35	SD Negeri Klitren	162.290.681,00	162.290.681,00	123.030.000,00	123.030.000,00	-	145.845.199,00	11.457.500,00	-	-	157.302.699,00	128.017.982,00
36	SD Negeri Kotagede 1	36.914.471,00	36.914.471,00	459.360.000,00	459.360.000,00	-	421.345.599,00	54.140.000,00	-	-	475.485.599,00	20.788.872,00
37	SD Negeri Kotagede 3	39.868.023,00	39.868.023,00	314.280.000,00	314.280.000,00	23.844.000,00	252.652.028,00	72.035.065,00	-	-	348.531.093,00	5.616.930,00
38	SD Negeri Kotagede 4	61.807.665,00	61.807.665,00	151.740.000,00	151.740.000,00	-	156.497.442,00	38.466.000,00	-	-	194.963.442,00	18.584.223,00
39	SD Negeri Kotagede 5	7.376.002,00	7.376.002,00	149.490.000,00	149.490.000,00	18.000.000,00	117.158.228,00	17.579.400,00	-	-	152.737.628,00	4.128.374,00
40	SD Negeri Kraton	8.104.977,00	8.104.977,00	85.140.000,00	85.140.000,00	13.200.000,00	60.589.336,00	10.966.900,00	-	-	84.756.236,00	8.488.741,00
41	SD Negeri Kyai Mojo	44.725.954,00	44.725.954,00	151.200.000,00	151.200.000,00	-	125.258.236,00	53.268.412,00	-	-	178.526.648,00	17.399.306,00

RINCIAN SISA DANA BOS SEKOLAH SMP NEGERI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	SISA BOS 2019 AUDITED	JUMLAH SISA BOS 2019 AUDITED	PENDAPATAN		JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS 2020	REALISASI BOS 2020			Pengembalian Belanja	TOTAL BELANJA	Pengembalian KASDA (Koreksi BPK)	Pengeluaran selain Belanja (Titipan-titipan)	TOTAL PENGELUARAN	SALDO AKHIR BOS 2020
		SISA BOSN		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	Titipan-titipan (Uang Bendahara yang belum diambil, Pajak yang belum disetor, Penerimaan Bunga Bank, Dll)		JUMLAH BELANJA PEGAWAI	JUMLAH BELANJA BARANG JASA	JUMLAH BELANJA MODAL						
1	SMP N 1	234.657.161	234.657.161	866.140.000	5.552.447	871.692.447	69.288.000	470.049.778	87.284.300	0	626.622.078	0	5.552.447	632.174.525	474.175.083
2	SMP N 2	178.469.457	178.469.457	768.240.000	3.569.667	771.809.667	102.000.000	503.762.416	61.954.600	0	667.717.016	0	3.569.667	671.286.683	278.992.441
3	SMP N 3	93.669.326	93.669.326	660.220.000	2.003.213	662.223.213	24.000.000	521.575.873	107.213.800	0	652.789.673	0	2.003.213	654.792.886	101.099.653
4	SMP N 4	457.933.011	457.933.011	548.460.000	6.139.228	554.599.228	-	484.101.044	270.860.000	0	754.961.044	0	6.139.228	761.100.272	251.431.967
5	SMP N 5	53.755.930	53.755.930	1.010.900.000	2.269.044	1.013.169.044	-	770.930.712	48.524.000	0	819.454.712	0	2.269.044	821.723.756	245.201.218
6	SMP N 6	338.941.504	338.941.504	776.930.000	5.504.268	782.434.268	-	950.613.261	30.329.000	18.000	980.924.261	0	5.504.268	986.428.529	134.947.243
7	SMP N 7	81.611.755	81.611.755	666.600.000	2.569.376	669.169.376	-	603.587.800	111.912.355	0	715.500.155	0	2.569.376	718.069.531	32.711.600
8	SMP N 8	915.132.700	915.132.700	1.024.870.000	9.839.459	1.034.709.459	-	1.009.324.216	803.464.500	0	1.812.788.716	0	9.839.459	1.822.628.175	127.213.984
9	SMP N 9	235.456.436	235.456.436	665.940.000	4.286.150	670.226.150	2.400.000	497.756.921	119.676.000	0	619.832.921	66.416.156	4.286.150	690.535.227	215.147.359
10	SMP N 10	451.604.567	451.604.567	567.050.000	5.929.949	572.979.949	3.150.000	449.471.861	390.983.900	0	843.605.761	0	5.929.949	849.535.710	175.048.806
11	SMP N 11	203.176.623	203.176.623	430.320.000	3.890.357	434.210.357	-	419.775.538	123.684.599	0	543.460.137	0	3.890.357	547.350.494	90.036.486
12	SMP N 12	152.662.522	152.662.522	546.370.000	1.950.605	548.320.605	900.000	574.562.510	115.982.960	900.000	690.545.470	0	1.950.605	692.496.075	8.487.052
13	SMP N 13	126.153.119	126.153.119	435.050.000	3.001.142	438.051.142	18.000.000	355.398.578	47.363.500	0	420.762.078	0	3.001.142	423.763.220	140.441.041
14	SMP N 14	345.289.419	345.289.419	429.110.000	4.213.339	433.323.339	-	566.938.993	173.879.600	0	740.818.593	0	4.213.339	745.031.932	33.580.826
15	SMP N 15	364.232.323	364.232.323	1.086.250.000	7.879.708	1.094.129.708	-	715.871.332	236.500.000	0	952.371.332	0	7.879.708	960.251.040	498.110.991
16	SMP N 16	245.827.034	245.827.034	774.730.000	6.447.691	781.177.691	-	586.178.197	92.407.500	0	678.585.697	0	6.447.691	685.033.388	341.971.337
	JUMLAH	4.478.572.887	4.478.572.887	11.257.180.000	75.045.643	11.332.225.643	219.738.000	9.479.899.030	2.822.020.614	918.000	12.520.739.644	66.416.156	75.045.643	12.662.201.443	3.148.597.087

LAMPIRAN 1C-3

LAPORAN SISA DANA JPD TAHUN 2020 YANG BELUM DI BELANJAKAN

NO	SEKOLAH DALAM KOTA	Saldo Akhir JPD	
		Uang Yang Dikelola Bendahara	
		Tunai	Kas di Bank
1	TK NEGERI	-	-
2	TK SWASTA	-	-
3	SD NEGERI	33.706.270	15.105.752
4	SD SWASTA	66.349.800	83.259.450
5	SMP NEGERI	2.145.528	686.150
6	SMP SWASTA	15.819.462	3.865.320
7	SMA NEGERI	-	-
8	SMA SWASTA	1.900.000	950.000
9	SMK NEGERI	11.550.000	11.388.088
10	SMK SWASTA	420.000	4.914.899
11	PKBM	-	-
12	PANTI ASUHAN	-	-
TOTAL		131.891.060	120.169.659
SISA DANA			252.060.719

NO	SEKOLAH LUAR KOTA	Saldo Akhir JPD	
		Uang Yang Dikelola Bendahara	
		Tunai	Kas di Bank
1	TK NEGERI	-	-
2	TK SWASTA	-	-
3	SD NEGERI	-	-
4	SD SWASTA	-	-
5	SMP NEGERI	-	-
6	SMP SWASTA	-	-
7	SMA NEGERI	-	-
8	SMA SWASTA	-	-
9	SMK NEGERI	-	-
10	SMK SWASTA	-	-
11	SLB	-	-
TOTAL		-	-
SISA DANA			-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN REKENING DANA BERGULIR
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	No. Rekening Tabungan	Atas Nama	Peruntukan	Bank	Saldo Per 31 Desember 2020 Rp	Keterangan
1	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan LKM	006.221.008483	Disperindagkop Kota Yk	Penampung pokok dana bergulir	BPD DIY	-	
		006.221.008484	Cad. Likuiditas Pokja/Sarjono	Bunga untuk cadangan likuiditas	BPD DIY	-	
		006.221.008966	Op. Pokja & Fas/Sri Harnanik Ir	Bunga untuk ops Pokja & Fas	BPD DIY	-	
		006.221.011047	Cad. Resiko Pokja Cnl/Sarjono	Bunga untuk cadangan resiko	BPD DIY	-	
					Jumlah		
2	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	006.211.011841	Disperindagkop	Penampung pokok dana bergulir	BPD DIY	-	
		006.221.014560	Disperindagkop Yk/Bambang S	Bunga tahun 2006	BPD DIY	-	
					Jumlah		
3	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta	32/22.7985	Dinas Perekonomian Kota	Penampung pokok dan bunga dana bergulir	Bank Jogja	-	
TOTAL						-	

Lampiran 2A

DAFTAR PIUTANG PAJAK
Per 31 Desember 2020

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Pajak ABT	PBB	JUMLAH
1	1994	-	-	-	-	-	-	416.479.787,00	416.479.787,00
2	1995	-	-	-	-	-	-	704.346.566,00	704.346.566,00
3	1996	-	-	-	-	-	-	521.573.024,00	521.573.024,00
4	1997	-	-	-	-	-	-	500.041.101,00	500.041.101,00
5	1998	-	-	-	-	-	-	626.060.723,00	626.060.723,00
6	1999	-	-	-	-	-	-	632.926.447,00	632.926.447,00
7	2000	-	-	-	-	-	-	319.144.638,00	319.144.638,00
8	2001	-	-	-	-	-	-	363.623.898,00	363.623.898,00
9	2002	4.754.000,00	20.192.700,00	19.183.241,00	-	-	-	387.153.158,00	431.283.099,00
10	2003	3.580.000,00	25.681.250,00	13.705.201,00	-	3.566.160,00	-	592.413.427,00	638.946.038,00
11	2004	4.046.000,00	48.586.640,00	23.008.455,00	-	9.296.120,00	-	684.327.925,00	769.265.140,00
12	2005	5.385.500,00	52.433.184,00	71.936.153,00	14.506.867,00	6.371.640,00	-	887.420.449,00	1.038.053.793,00
13	2006	7.127.500,00	124.066.712,00	4.733.500,00	12.399.342,00	13.973.640,00	-	1.270.931.935,00	1.433.232.629,00
14	2007	6.608.500,00	113.350.750,00	7.104.049,00	118.281.262,00	13.350.640,00	-	1.596.315.781,00	1.855.010.982,00
15	2008	9.354.500,00	112.490.000,00	6.270.244,00	163.014.342,00	7.026.640,00	-	2.311.641.685,00	2.609.797.411,00
16	2009	13.336.000,00	113.361.545,00	26.701.934,00	127.846.823,00	8.761.640,00	-	3.413.359.098,00	3.703.367.040,00
17	2010	21.374.102,00	173.142.695,00	43.113.000,00	298.365.532,00	20.271.600,00	-	3.289.077.082,00	3.845.344.011,00
18	2011	13.277.400,00	88.757.000,00	10.578.689,00	211.336.787,00	12.791.500,00	302.176,00	3.256.036.807,00	3.593.080.359,00
19	2012	21.709.736,00	103.678.772,00	9.954.065,00	223.321.148,00	51.793.900,00	4.592.864,00	3.425.193.537,00	3.840.244.022,00
20	2013	652.778.041,00	164.579.503,00	64.853.922,00	471.281.315,00	25.794.400,00	20.351.280,00	3.336.465.130,00	4.736.103.591,00
21	2014	147.249.120,00	427.153.931,00	295.803.397,00	479.396.235,00	319.207.639,00	20.874.168,00	3.484.776.512,00	5.174.461.002,00
		910.580.399,00	1.567.474.682,00	596.945.850,00	2.119.749.653,00	492.205.519,00	46.120.488,00	32.019.308.710,00	37.752.385.301,00
22	2015	112.271.367,00	338.414.612,00	438.456.999,00	848.295.754,00	-	14.824.552,00	4.566.829.812,00	6.319.093.096,00
23	2016	241.230.773,00	547.492.980,00	74.291.499,00	63.938.561,00	-	33.722.152,00	4.648.585.571,00	5.609.261.536,00
24	2017	716.129.721,00	397.785.462,00	9.477.410,00	1.856.843.165,00	258.257.042,00	74.963.397,00	7.986.796.043,00	11.300.252.240,00
		1.069.631.861,00	1.283.693.054,00	522.225.908,00	2.769.077.480,00	258.257.042,00	123.510.101,00	17.202.211.426,00	23.228.606.872,00
25	2018	2.461.447.776,00	758.820.421,00	403.115.324,00	136.957.235,00	195.577.154,00	42.114.860,00	10.079.851.522,00	14.077.884.292,00
26	2019	155.792.889,00	322.744.793,00	228.325.111,00	203.178.782,00	14.019.437,00	83.091.687,00	13.067.147.325,00	14.074.300.024,00
		2.617.240.665,00	1.081.565.214,00	631.440.435,00	340.136.017,00	209.596.591,00	125.206.547,00	23.146.998.847,00	28.152.184.316,00
27	2020	1.171.095.451,00	1.630.877.918,00	571.075.823,00	1.617.912.678,00	5.102.400,00	243.906.894,00	34.161.760.532,00	39.401.731.696,00
		1.171.095.451,00	1.630.877.918,00	571.075.823,00	1.617.912.678,00	5.102.400,00	243.906.894,00	34.161.760.532,00	39.401.731.696,00
	JUMLAH	5.768.548.376,00	5.563.610.868,00	2.321.688.016,00	6.846.875.828,00	965.161.552,00	538.744.030,00	106.530.279.515,00	128.534.908.185,00

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR
Per 31 Desember 2020

(dalam Rp)

No.	Jenis Piutang	Umur				Jumlah
		< 1 tahun	1 - 2 tahun	2 - 5 tahun	> 5 tahun	
1	Pajak Hotel	1.171.095.451,00	2.617.240.665,00	1.069.631.861,00	910.580.399,00	5.768.548.376,00
2	Pajak Restoran	1.630.877.918,00	1.081.565.214,00	1.283.693.054,00	1.567.474.682,00	5.563.610.868,00
3	Pajak Hiburan	571.075.823,00	631.440.435,00	522.225.908,00	596.945.850,00	2.321.688.016,00
4	Pajak Reklame	1.617.912.678,00	340.136.017,00	2.769.077.480,00	2.119.749.653,00	6.846.875.828,00
5	Pajak Parkir	5.102.400,00	209.596.591,00	258.257.042,00	492.205.519,00	965.161.552,00
6	Pajak Air Bawah Tanah	243.906.894,00	125.206.547,00	123.510.101,00	46.120.488,00	538.744.030,00
7	PBB	34.161.760.532,00	23.146.998.847,00	17.202.211.426,00	32.019.308.710,00	106.530.279.515,00
	Jumlah sebelum penyisihan	39.401.731.696,00	28.152.184.316,00	23.228.606.872,00	37.752.385.301,00	128.534.908.185,00
	Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Pajak	197.008.658,48	2.815.218.431,60	11.614.303.436,00	37.752.385.301,00	52.378.915.827,08
	Jumlah Piutang pajak setelah penyisihan	39.204.723.037,52	25.336.965.884,40	11.614.303.436,00	-	76.155.992.357,92

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI BERDASARKAN UMUR
Per 31 Desember 2020

(dalam Rp)

No	Jenis Piutang	Umur				Jumlah
		< 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 -12 bulan	> 12 bulan	
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	-	-	-	108.073.457,00	108.073.457,00
2	Piutang Pelayanan Kesehatan Puskesmas	-	-	-	980.500,00	980.500,00
3	Piutang Retribusi Sampah/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	488.877.000,00	258.339.500,00	390.504.250,00	72.429.245,00	1.210.149.995,00
4	Piutang Retribusi Pasar (Dinas Pengelolaan Pasar)					
	- Kios	-	-	303.479.797,00	949.856.246,00	1.253.336.043,00
	- Los	-	-	198.897.635,00	738.514.311,00	937.411.946,00
	- Lapak	-	-	10.741.100,00	18.044.030,00	28.785.130,00
		-	-	513.118.532,00	1.706.414.587,00	2.219.533.119,00
5	Piutang Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	-	-	-	191.542.388,00	191.542.388,00
6	Piutang Retribusi IMBB Dinas Perizinan	-	-	-	241.590.100,00	241.590.100,00
	Jumlah sebelum penyisihan	488.877.000,00	258.339.500,00	903.622.782,00	2.321.030.277,00	3.971.869.559,00
	Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Retribusi	2.444.385,00	25.833.950,00	451.811.391,00	2.321.030.277,00	2.801.120.003,00
	Jumlah Piutang Retribusi setelah penyisihan	486.432.615,00	232.505.550,00	451.811.391,00	-	1.170.749.556,00

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Nilai Pinjaman (Rp)	Realisasi Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Pemberian Pinjaman per 31/12/2020 (Rp)	Tagihan Pemberian Pinjaman per 31/12/2020 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah	
									Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
1	Pedagang Kios Buku komplek Taman Pintar (lantai I)	Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 (s.d. 2008)	Pemberian pinjaman tanpa bunga untuk angsuran ke-1 sampai ke-6 sewa kios buku di komplek taman Pintar.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pedagang Kios Buku komplek Taman Pintar (lantai II)	Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 (s.d. 2010)	Pemberian pinjaman tanpa bunga untuk angsuran ke-1 sampai ke-6 sewa kios buku di komplek taman Pintar.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Koperasi Pola Syariah	Perjanjian No.27/Perj.Yk/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta	Pemberian pinjaman kepada Koperasi Jasa keuangan Syariah dg jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian (3-12-2012).	3	1.000.000.000	841.275.001	158.724.999	-	-	-	-	158.724.999	158.724.999	
JUMLAH						1.000.000.000	841.275.001	158.724.999,00	-	-	-	158.724.999,00	158.724.999,00	
									Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
									Penyisihan Tagihan Pemberian Pinjaman	-	-	-	158.724.999,00	158.724.999,00
									Tagihan Pemberian Pinjaman Netto	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Total Nilai Kontribusi (Rp)	Pembebasan pembayaran kontribusi	Realisasi Pembayaran s.d. 31/12/2020 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2020 (Rp)	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2020 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah
										Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesangrahan Ngestilaras Kaliurang	15	345.000.000	21.000.000	324.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Bumi Kusuma Santosa	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 34 tgl. 30 Agustus 2004 (s.d. 2025)	Pembangunan & pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade)	20	4.000.000.000	-	2.625.000.000	225.000.000	1.150.000.000	225.000.000	-	-	-	225.000.000,00
JUMLAH										225.000.000	-	-	-	225.000.000
Persentase penyisihan										0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan										1.125.000,00	-	-	-	1.125.000,00
Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto										223.875.000,00	-	-	-	223.875.000,00

Keterangan :

Th 2006 Hotel Kayu Manis mendapatkan pembebasan pembayaran kontribusi sebesar Rp10.000.000,00 (April-Agustus 2006) karena adanya penutupan kawasan Kaliurang akibat siaga Merapi.

Th 2010 ada pembebasan sebesar Rp 3.000.000,00 (Nopember - Desember 2010) karena terjadinya erupsi merapi.

Th 2011 ada pembebasan sebesar Rp 8.000.000,00 (Januari - April 2011) akibat erupsi merapi

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Total Nilai Kontribusi (Rp)	Pembebasan pembayaran kontribusi	Realisasi Pembayaran s.d. 31/12/2020 (Rp)	Bag.Lancar Tag.Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2020 (Rp)	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31/12/2020 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah		
										Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet			
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesangrahan Ngestilaras Kaliurang	15	345.000.000	21.000.000	324.000.000	-	-	-				-		
2	PT Bumi Kusuma Santosa	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 34 tgl. 30 Agustus 2004 (s.d. 2025)	Pembangunan & pengelolaan aset eks Pasar Reksonegaran (Reksa Arcade)	20	4.000.000.000	-	2.625.000.000	225.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000				1.150.000.000,00		
														-		
	JUMLAH				4.345.000.000	21.000.000	2.949.000.000	225.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000		
											Persentase penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
											Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5.750.000,00	-	-	-	5.750.000,00
											Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Netto	1.144.250.000,00	-	-	-	1.144.250.000,00

Keterangan :

Th 2006 Hotel Kayu Manis mendapatkan pembebasan pembayaran kontribusi sebesar Rp10.000.000,00 (April-Agustus 2006) karena adanya penutupan kawasan Kaliurang akibat siaga Merapi.

Th 2010 ada pembebasan sebesar Rp 3.000.000,00 (Nopember - Desember 2010) karena terjadinya erupsi merapi.

Th 2011 ada pembebasan sebesar Rp 8.000.000,00 (Januari - April 2011) akibat erupsi merapi

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PIUTANG DENDA TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga	No & tgl. Perjanjian	Lingkup perjanjian	Jangka waktu (th)	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran per 31/12/2019 (Rp)	Realisasi Pembayaran 31/12/2020 (Rp)	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran per 31/12/2020 (Rp)	Kualitas Piutang				Jumlah
								Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Hotel Kayu Manis	Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH No. 30 tgl. 16 Agustus 2004 (s.d. 2020)	Rehabilitasi & penambahan bangunan serta pengelolaan aset pesanggrahan Ngestilaras Kaliurang	15	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00
JUMLAH								1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
								0,50%	10%	50%	100%	
								6.000,00	-	-	-	6.000,00
								1.194.000,00	-	-	-	1.194.000,00

Keterangan :

Piutang denda timbul karena Hotel Kayu Manis tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Tetap Bagi Hasil Kemitraan tahun 2019

MUTASI BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA
Per 31 Desember 2020

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2020	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Pengelolaan Pasar Ikan Higienis Terpadu oleh PT Bummy Harapan Umat	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	60.000.000,00
2	Tagihan atas hak pengelolaan titik reklame	1.149.239.168,00	-	-	1.149.239.168,00	0	0	0	1.149.239.168,00	1.149.239.168,00
3	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-	-	-	0	0	0	-	-
4	Sewa sebagian Gedung Perijinan oleh BPD DIY Cabang Senopati	61.000.000,00	-	61.000.000,00	-	0	0	0	-	-
5	Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita (Balaikota)	-	-	-	-	0	0	0	-	-
6	Tagihan sewa Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	140.622.000,00	268.517.000,00	165.198.000,00	243.941.000,00	108974000	71288000	41280000	22.399.000,00	243.941.000,00
7	Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan	12.693.000,00	-	12.693.000,00	-	0	0	0	-	-
8	Tagihan sewa tempat fotocopy Dinas Pendidikan	8.851.000,00	-	-	8.851.000,00	0	8851000	0	-	8.851.000,00
9	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	92.440.000,00	92.440.000,00	-	184.880.000,00	92440000	92440000	0	-	184.880.000,00
	JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA	1.524.845.168,00	360.957.000,00	238.891.000,00	1.646.911.168,00	201.414.000,00	172.579.000,00	41.280.000,00	1.231.638.168,00	1.646.911.168,00
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa					1.007.070,00	17.257.900,00	20.640.000,00	1.231.638.168,00	1.270.543.138,00
	Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto					200.406.930,00	155.321.100,00	20.640.000,00	-	376.368.030,00

MUTASI TAGIHAN SEWA
Per 31 Desember 2020

No.	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2020	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MJ dan Kec. DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa sebagian Gedung Perijinan oleh BPD DIY Cabang Senopati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan sewa gedung Kantin Dharma Wanita (Balaikota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan sewa kantin Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan sewa tempat fotocopy Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan sewa ruang oleh PD. BPR. Bank Jogja (Eks Kecamatan Jetis)	184.880.000,00	-	92.440.000,00	92.440.000,00	92.440.000,00	-	-	-	92.440.000,00
	JUMLAH BAGIAN LANCAR TAGIHAN SEWA	184.880.000,00	-	92.440.000,00	92.440.000,00	92.440.000,00	-	-	-	92.440.000,00
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa					462.200,00	-	-	-	462.200,00
	Bagian Lancar Tagihan Sewa Netto					91.977.800,00	-	-	-	91.977.800,00

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
MUTASI BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI
Per 31 Desember 2020

(dalam Rp)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020	Kualitas Piutang				Jumlah
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Saldo	0,00								
2	Reklasifikasi		0,00							
3	Tahun 2018			0,00	0,00	0,00				0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi					-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto					-	-	-	-	-

MUTASI PIUTANG PAD LAINNYA
Per 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo per 31 Desember 2020	Kualitas Piutang				Jumlah
			Mutasi	Koreksi	Mutasi	Koreksi		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang denda Pasar Ikan Higienis PT. Bummy Harapan Umat	6.760.000,00	-	-	-	-	6.760.000,00				6.760.000,00	6.760.000,00
2	Piutang denda sewa hunian Rusunawa Cokrodirjan	15.251.500,00	11.528.500,00	263.000,00	3.903.000,00	-	23.140.000,00	9.870.500,00	7.237.500,00	3.979.000,00	2.053.000,00	23.140.000,00
3	Piutang denda keterlambatan pengadaan barang (CV. Restu Biyung) (Reklas dari Piutang TP/TGR)	36.874.656,00					36.874.656,00	36.874.656,00				36.874.656,00
4	Piutang denda PBB	29.949.432.704,00	8.762.460.424,00		1.072.908.326,00	3.203.163.999,00	34.435.820.803,00	2.049.705.942,00	8.758.473.360,00	8.257.837.707,00	15.369.803.794,00	34.435.820.803,00
5	Piutang denda pajak hotel	733.019.805,00			662.114,00		732.357.691,00	561.464.958,00	170.892.733,00	-	-	732.357.691,00
6	Piutang denda pajak restoran	16.767.111,00	9.669.149,00		2.973.100,00		23.463.160,00	9.669.149,00	8.008.511,00	5.785.500,00	-	23.463.160,00
7	Piutang denda pajak hiburan	15.458.455,00	9.480.782,00	-	16.588.830,00	-	8.350.407,00	8.350.407,00				8.350.407,00
8	Piutang denda pajak parkir	806.600,00					806.600,00		806.600,00			806.600,00
9	Piutang bunga pajak hotel	1.165.846.544,00	440.665.422,00		474.176.137,00	223.364.793,00	908.971.036,00	169.191.535,00	686.572.398,00	53.207.103,00	-	908.971.036,00
10	Piutang bunga pajak restoran	232.090.308,00	194.055.337,00		124.310.301,00		301.835.344,00	128.460.158,00	68.163.005,00	105.212.181,00	-	301.835.344,00
11	Piutang bunga pajak hiburan	0,00	142.704.260,00	-	1.074.035,00	-	141.630.225,00	141.630.225,00				141.630.225,00
12	Piutang bunga pajak reklame	0,00					-	-	-	-	-	-
13	Piutang bunga pajak parkir	55.205.607,00	1.531.644,00	18.960.702,00	3.825.453,00	1.694.012,00	70.178.488,00	1.531.644,00	23.330.722,00	27.720.329,00	17.595.793,00	70.178.488,00
14	Piutang bunga pajak air bawah tanah	0,00					-	-	-	-	-	-
15	Piutang denda titik reklame (PT. Oscar Sembilan Pariwara)	49.244.040,00		-			49.244.040,00	49.244.040,00				49.244.040,00
	JUMLAH PIUTANG LAINNYA	32.276.757.330,00	9.572.095.518,00	19.223.702,00	1.700.421.296,00	3.428.222.804,00	36.739.432.450,00	3.165.993.214,00	9.723.484.829,00	8.453.741.820,00	15.396.212.587,00	36.739.432.450,00
	Persentase penyisihan							0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan piutang PAD lainnya							15.829.966,07	972.348.482,90	4.226.870.910,00	15.396.212.587,00	20.611.261.945,97
	Piutang PAD Lainnya Netto							3.150.163.247,93	8.751.136.346,10	4.226.870.910,00	-	16.128.170.504,03

MUTASI PIUTANG LAINNYA
Per 31 Desember 2020

LAMPIRAN 8B

No	Keterangan	Saldo per Desember 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo per 31 Desember 2020	Kualitas Piutang				Jumlah
			Mutasi	Koreksi	Mutasi	Koreksi		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang sewa kios makanan minuman dan pengelolaan kamar mandi/WC kios buku di komplek Taman Pintar	232.780.200,00	273.763.800,00	51.249.900,00	251.983.200,00	1.298.200,00	304.512.500,00	245.526.900,00	39.250.000,00	19.735.600,00	-	304.512.500,00
2	Piutang RSUD	12.969.674.620,00	59.548.949.643,00	1.860,00	70.585.074.974,00	42.380.511,00	1.891.170.638,00	1.173.560.282,00	190.998.417,00	477.630.690,00	48.981.249,00	1.891.170.638,00
3	Piutang Listrik Kios Buku di Kompleks Taman Pintar	4.321.190,00	-	-	-	-	4.321.190,00	-	-	-	4.321.190,00	4.321.190,00
4	Piutang air Rusunawa Grha Bina Harapan dan Cokrodirjan	23.649.550,00	22.140.000,00	1.108.400,00	8.749.800,00	-	38.148.150,00	17.180.500,00	10.616.000,00	7.147.800,00	3.203.850,00	38.148.150,00
5	Piutang Puskesmas	6.406.434.081,60	12.653.845.817,80	2.676.949.675,00	16.031.719.975,00	2.978.757.627,40	2.726.751.972,00	2.630.945.672,00	-	-	95.806.300,00	2.726.751.972,00
	JUMLAH PIUTANG LAINNYA	19.636.859.641,60	72.498.699.260,80	2.729.309.835,00	86.877.527.949,00	3.022.436.338,40	4.964.904.450,00	4.067.213.354,00	240.864.417,00	504.514.090,00	152.312.589,00	4.964.904.450,00
	Persentase penyisihan							0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan piutang lainnya						4.964.904.450,00	20.336.066,77	24.086.441,70	252.257.045,00	152.312.589,00	448.992.142,47
	Piutang Lainnya Netto							4.046.877.287,23	216.777.975,30	252.257.045,00	-	4.515.912.307,53

ASURANSI DIBAYAR DI MUKA
Per 31 Desember 2020

NO	SKPD	Jenis Asuransi	Periode	Jumlah Premi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2019	Penambahan 2020	Beban 2020	Asuransi dibayar di muka Kendaraan 2020	Asuransi dibayar di muka Bangunan 2020	Asuransi dibayar di muka 2020
1	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0219-2323-0319-0001-00	13/03/2019 - 10/03/2020	30.932.500,00	6.017.006,85	-	6.017.006,85		-	-
2	Taman Pintar	Asuransi Bangunan ASKRIDA No. 0281-2323-0319-0002-00	13/03/2019 - 13/03/2020	66.964.500,00	13.025.971,23	-	13.025.971,23		-	-
3	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0519-0005-00	01/04/2019 - 01/04/2020	5.091.500,00	1.255.438,36	-	1.255.438,36	-		-
4	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan ASKRIDA No. 0203-2323-0419-0002-00	01/04/2019- 01/04/2020	4.683.625,00	1.154.866,44	-	1.154.866,44	-		-
5	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan EKA LLOYD JAYA No. 06022119000002	25/9/2019 - 25/9/2020	1.301.458,00	952.025,44	-	952.025,44	-		-
6	Taman Pintar	Asuransi Kendaraan EKA LLOYD JAYA No. 06022119000003	25/9/2019 - 25/9/2020	4.585.025,00	3.353.977,19	-	3.353.977,19	-		-
7	Taman Pintar	Asuransi Bangunan Sinar Mas No. 12.000.0000.41718	13/3/2020 - 13/03/2021	63.199.200,00	-	63.199.200,00	50.905.656,99		12.293.543,01	12.293.543,01
8	Taman Pintar	Asuransi Bangunan Sinar Mas No. 12.000.0000.41863	13/3/2020 - 13/03/2021	29.172.000,00	-	29.172.000,00	23.497.446,58		5.674.553,42	5.674.553,42
9	Taman Pintar	Asuransi Bangunan Sinar Mas No. 12.000.0000.60795	15/4/20-15/4/2021	4.776.200,00	-	4.776.200,00	3.415.310,14	1.360.889,86		1.360.889,86
10	Taman Pintar	Asuransi Bangunan Sinar Mas No. 12.000.0000.61314	15/4/20-15/4/2021	3.408.150,00	-	3.408.150,00	2.437.060,68	971.089,32		971.089,32
							-			
		Total Asuransi Dibayar Di Muka Dinas Pariwisata			25.759.285,51	100.555.550,00	106.014.759,90	2.331.979,18	17.968.096,43	20.300.075,61
11	BPKAD	Asuransi Kendaraan, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 YK No 02/Kontrak/Asuransi-Kendaraan/VIII/2019	28/8/2019 - 28/8/2020	502.209.361,71	334.806.241,14	-	334.806.241,14	-		-
12	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Perekonomian, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Yk, No. 05/Kontrak-Asuransi Bangunan Perekonomian/IX/2019	20/9/2019 - 20/9/2020	856.960.014,20	642.720.010,65	-	642.720.010,65		-	-
13	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Perekonomian, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Yk, No. 11/Kontrak-Asuransi BangunanKesehatan/XI/2019	22/11/2019 - 22/11/2020	366.265.932,21	335.743.771,19	-	335.743.771,19		-	-
14	BPKAD	Asuransi Bangunan Gedung Bangunan Pemerintahan, PT Asuransi Sinar Mas, Sleman No;08/Kontrak -Asuransi Bangunan Pemerintahan/XI/2019	14/11/2019 - 14/11/2020	317.109.755,03	264.258.129,19	-	264.258.129,19		-	-
15	BPKAD	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah, premi Asuransi Kendaraan, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan No. SPK/001/A.s. Kendaraan/X/2020	27/10/2020-27/10/2021	58.500.000,00	-	58.500.000,00	9.750.000,00	48.750.000,00		48.750.000,00
		BPKAD			1.577.528.152,17	58.500.000,00	1.587.278.152,17	48.750.000,00	-	48.750.000,00
		Total Asuransi Dibayar Di Muka						51.081.979,18	17.968.096,43	69.050.075,61

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERSEDIAAN Per 31 Desember 2020

NO	JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH (Rp)
1	ATK	3.835.942.427,24
2	Pakaian Dinas	146.377.872,60
3	Spare part Kendaraan	-
4	Bahan Kebersihan	1.944.023.453,29
5	Barang Cetak	2.719.989.810,46
6	Karcis	488.402.045,00
7	Alat Listrik/Elektronik	1.557.539.965,74
8	Obat-obatan	17.046.406.878,65
9	Bahan Material	813.963.511,90
10	Bahan Makanan	-
11	Tanaman Hias	28.542.500,00
12	Peralatan Kerja	695.515.873,90
13	Reagen dan Alat Laboratorium	4.292.708.842,70
14	Rambu dan APPIL	-
15	Bahan Komputer	892.580.890,25
16	BBM dan Pelumas	92.385.134,00
17	Alat Kesehatan	1.037.920.288,91
18	Alat Bahan Kimia/Medis	6.037.892.500,59
19	Vaksin	1.059.052.841,20
20	Perlengkapan Rumah Tangga	2.802.651.327,77
21	Barang Hibah/Hadiah	2.969.542.877,10
22	Bibit Ikan	7.955.710,00
23	Alat Kontrasepsi	130.877.548,00
24	Lain-lain (Materai, Bendera, Alat Pusaka)	114.597.336,00
25	Peralatan Uji	349.832.156,00
26	Linen	237.885.596,20
27	Tanaman	2.120.000,00
28	Tanaman Buah	9.834.500,00
29	Bahan / Bibit Tanaman Kebun Plasma	7.314.000,00
30	Bahan / Bibit Tanaman Di Laboratorium Kuljar	0,00
31	Benda Pos	20.856.000,00
32	Pakaian Olahraga	540.000,00
	JUMLAH	49.343.251.887,51

REKAPITULASI LAPORAN SALDO BARANG PERSEDIAAN PER KODE REKENING AKHIR TAHUN 2020

NO.	SKPD	ATK	Pakaian Dinas	Spare part Kendaraan	Bahan Kebersihan	Barang Cetak	Karcis	Alat Listrik/Elektronik	Obat-obatan	Bahan Material	Bahan Makanan	Tanaman Hias
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	2.329.919.300,74	900.000,00	-	1.048.781.434,85	105.891.661,21	0,00	297.852.214,74	224.569.309,60	-	-	-
2	Dinas Pariwisata	77.958.819,00	-	-	52.514.780,00	28.981.580,00	28.280.960,00	217.818.805,00	-	9.000.000,00	-	-
3	Dinas Kesehatan	495.479.545,52	86.820.757,60	-	400.191.978,94	618.914.117,25	0,00	32.951.575,00	8.026.472.619,44	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah	104.691.469,51	989.000,00	-	108.529.363,00	313.157.350,00	0,00	-	8.780.065.369,63	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota	60.195.780,00	-	-	24.886.200,00	3.250.000,00	0,00	801.553.486,00	-	759.824.986,90	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.000,00	-	-	-	1.050.000,00	0,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Kebakaran	17.767.275,00	-	-	12.751.650,00	12.145.000,00	0,00	3.273.950,00	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	73.859.640,00	-	-	5.802.570,00	300.781.050,00	335.727.850,00	10.784.556,00	-	5.499.250,00	-	-
9	Bappeda	14.512.639,00	-	-	2.316.105,00	16.700,00	0,00	181.000,00	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	39.265.600,00	2.520.000,00	-	1.888.480,00	193.355.500,00	0,00	891.500,00	50.000,00	7.207.150,00	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.974.600,00	-	-	-	397.797.227,00	0,00	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	5.496.550,00	-	-	4.122.000,00	8.552.500,00	0,00	-	-	-	-	-
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	726.095,00	-	-	1.275.000,00	773.775,00	0,00	55.000,00	3.685.659,00	-	-	-
14	Dinas Sosial	4.332.050,00	-	-	325.000,00	77.662.500,00	0,00	-	52.645,00	-	-	-
15	Dinas Pertanian dan Pangan	6.911.900,00	-	-	4.392.000,00	10.701.400,00	2.495.000,00	3.256.650,00	6.549.628,00	-	-	23.571.500
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.731.745,00	-	-	186.627.000,00	175.584.900,00	121.898.235,00	83.050.590,00	4.789.647,98	22.704.625,00	-	4.971.000
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.454.750,00	-	-	18.000,00	525.000,00	0,00	992.500,00	-	-	-	-
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	22.630,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
19	Kantor Kesatuan Bangsa	13.523.125,00	-	-	3.219.400,00	8.953.300,00	0,00	2.395.100,00	-	-	-	-
20	Sekretariat DPRD	69.202.323,28	-	-	12.888.600,00	75.075.500,00	0,00	50.499.170,00	-	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	23.853.599,00	-	-	12.515.790,00	3.759.700,00	0,00	3.623.500,00	-	-	-	-
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.090.500,00	-	-	3.474.300,00	1.190.000,00	0,00	217.500,00	-	-	-	-
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	6.704.900,00	-	-	1.272.250,00	-	0,00	-	-	-	-	-
	c. Bagian Layanan Pengadaan	11.578.550,00	-	-	1.297.040,00	807.200,00	0,00	-	-	-	-	-
	d. Bagian Hukum	164.700,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	e. Bagian Protokol	1.937.469,00	-	-	2.714.000,00	475.000,00	0,00	665.000,00	-	-	-	-
	f. Bagian Umum	-	-	-	3.683.000,00	-	0,00	2.571.000,00	-	-	-	-
	g. Bagian P3ADK	754.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	h. Bagian Organisasi	623.480,00	-	-	75.200,00	1.287.500,00	0,00	170.000,00	-	-	-	-
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.314.666,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Dipindahkan	3.429.409.102,05	91.229.757,60	-	1.883.045.351,79	2.336.928.760,46	488.402.045,00	1.509.179.596,74	17.046.234.878,65	804.236.011,90	-	28.542.500

NO.	SKPD	ATK	Pakaian Dinas	Spare part Kendaraan	Bahan Kebersihan	Barang Cetak	Karcis	Alat Listrik/Elektronik	Obat-obatan	Bahan Material	Bahan Makanan	Tanaman Hias
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Inspektorat	7.855.875,00	0,00	0	3.831.792,50	6.879.200,00	0,00	1.868.500,00	0,00	0,00	0	0
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	9.697.100,00	15.300.000,00	0	1.933.500,00	5.336.800,00	0,00	990.000,00	172.000,00	0,00	0	0
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	117.337.615,00	0,00	0	659.760,00	15.355.000,00	0,00	21.882.050,00	0,00	9.000.000,00	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	91.540.900,00	11.890.215,00	0	-	262.810.200,00	0,00	-	0,00	0,00	0	0
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	24.422.420,00	0,00	0	-	53.835.500,00	0,00	-	0,00	0,00	0	0
28	Satuan Polisi Pamong Praja	13.050.825,00	21.957.900,00	0	2.552.000,00	-	0,00	2.889.500,00	0,00	0,00	0	0
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.449.750,00	6.000.000,00	0	25.611.925,00	19.438.200,00	0,00	3.017.000,00	0,00	500.000,00	0	0
30	Dinas Kebudayaan	10.478.665,15	0,00	0	538.500,00	4.708.500,00	0,00	580.500,00	0,00	0,00	0	0
31	Kecamatan Tegalrejo	2.298.350,00	0,00	0	237.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0	0
32	Kecamatan Jetis	33.994.300,24	0,00	0	5.202.555,00	-	0,00	6.954.670,00	0,00	0,00	0	0
33	Kecamatan Gondokusuman	14.319.600,00	0,00	0	8.763.886,00	95.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0	0
34	Kecamatan Danurejan	9.399.300,00	0,00	0	2.620.000,00	-	0,00	2.697.500,00	0,00	0,00	0	0
35	Kecamatan Gedongtengen	5.072.236,80	0,00	0	724.193,00	1.329.250,00	0,00	214.000,00	0,00	227.500,00	0	0
36	Kecamatan Pakualaman	1.059.730,00	0,00	0	101.065,00	-	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0	0
37	Kecamatan Ngampilan	17.903.990,00	0,00	0	4.145.000,00	5.152.500,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Kecamatan Wirobrajan	238.000,00	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0	0
39	Kecamatan Mantriweron	3.966.300,00	0,00	0	547.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0	0
40	Kecamatan Kraton	378.400,00	0,00	0	-	2.012.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0	0
41	Kecamatan Gondomanan	4.487.600,00	0,00	0	1.672.675,00	1.250.000,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0	0
42	Kecamatan Mergangsan	6.250.918,00	0,00	0	-	291.400,00	0,00	1.883.599,00	0,00	0,00	0	0
43	Kecamatan Umbulharjo	8.524.335,00	0,00	0	179.750,00	3.255.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0	0
44	Kecamatan Kotagede	15.807.115,00	0,00	0	1.656.500,00	1.312.500,00	0,00	1.859.550,00	0,00	0,00	0	0
	Jumlah jalan	406.533.325,19	55.148.115,00	0	60.978.101,50	383.061.050,00	0,00	48.360.369,00	172.000,00	9.727.500,00	0	0
	JUMLAH (A)	3.835.942.427	146.377.872,60	-	1.944.023.453,29	2.719.989.810,46	488.402.045,00	1.557.539.965,74	17.046.406.878,65	813.963.511,90	-	28.542.500

NO.	SKPD	Peralatan Kerja	Reagen dan Alat Laboratorium	Rambu dan APPIL	Bahan Komputer	BBM dan Pelumas	Alat Kesehatan	Alat Bahan Kimia/Medis	Vaksin	Perlengkapan Rumah Tangga	Barang Hibah/Hadiah	Bibit Ikan	Alat Kontrasepsi
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Dinas Pendidikan	245.402.272,30	-	0,00	348.591.682,75	2.812.000,00	71.106.025,00	73.482.745,00	0,00	278.211.716,29	824.000,00	-	0,00
2	Dinas Pariwisata	104.364.800,00	-	0,00	49.714.000,00	-	-	2.090.000,00	0,00	376.250,00	-	-	0,00
3	Dinas Kesehatan	15.924.965,00	4.253.103.493	0,00	139.610.320,00	3.617.584,00	925.766.698,91	5.918.540.575,59	1.059.052.841,20	287.093.666,68	8.409.875,10	-	841.108,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	605.000,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	98.396,00	2.835.696.478,00	-	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota	-	6.320.000	0,00	24.681.000,00	1.959.500,00	-	3.975.000,00	0,00	8.751.680,00	-	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.267.500,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	1.192.396.613,00	-	-	0,00
7	Dinas Kebakaran	-	-	0,00	5.137.500,00	11.250.000,00	-	-	0,00	1.943.000,00	-	-	0,00
8	Dinas Perhubungan	1.336.192,00	-	0,00	39.139.321,00	6.505.000,00	-	-	0,00	2.780.000,00	-	-	0,00
9	Bappeda	-	-	0,00	16.418.700,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.828.400,00	33.285.350	0,00	10.640.000,00	-	-	-	0,00	16.523.200,00	35.225.000,00	-	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	225.000,00	-	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	0,00	1.521.800,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	0,00	3.780.000,00	-	41.047.565,00	10,00	0,00	2.918.000,00	-	-	130.036.440,00
14	Dinas Sosial	-	-	0,00	3.038.000,00	-	-	18.111.500,00	0,00	2.590.625,00	-	-	0,00
15	Dinas Pertanian dan Pangan	173.950.700,00	-	0,00	4.860.000,00	720.000,00	-	18.340.750,00	0,00	548.475,00	-	7.955.710,00	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.336.044,60	-	0,00	21.310.840,00	64.921.050,00	-	1.689.920,00	0,00	927.359.340,00	-	-	0,00
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa	-	-	0,00	13.178.775,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
20	Sekretariat DPRD	-	-	0,00	5.872.500,00	-	-	-	0,00	53.146.250,00	-	-	0,00
21	Sekretariat Daerah	-	-	0,00	43.143.545,50	306.000,00	-	1.312.000,00	0,00	190.900,00	45.435.524,00	-	0,00
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	0,00	14.246.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	-	-	0,00	550.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	c. Bagian Layanan Pengadaan	-	-	0,00	27.637.545,50	306.000,00	-	-	0,00	110.900,00	-	-	0,00
	d. Bagian Hukum	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	e. Bagian Protokol	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	f. Bagian Umum	-	-	0,00	-	-	-	1.312.000,00	0,00	80.000,00	45.435.524,00	-	0,00
	g. Bagian P3ADK	-	-	0,00	250.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	h. Bagian Organisasi	-	-	0,00	460.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	0,00	73.791.700,00	-	-	-	0,00	400.000,00	-	-	0,00
	Jumlah Dipindahkan	679.015.873,90	4.292.708.843	-	804.429.684,25	92.091.134,00	1.037.920.288,91	6.037.542.500,59	1.059.052.841,20	2.775.553.111,97	2.925.590.877,10	7.955.710,00	130.877.548,00

NO.	SKPD	Peralatan Kerja	Reagen dan Alat Laboratorium	Rambu dan APPL	Bahan Komputer	BBM dan Pelumas	Alat Kesehatan	Alat Bahan Kimia/Medis	Vaksin	Perlengkapan Rumah Tangga	Barang Hibah/Hadiah	Bibit Ikan	Alat Kontrasepsi
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
23	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498.775,80	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Pendididkan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	21.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.700,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	21.932.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	10.273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	-	204.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	3.371.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.173.300,00	1.500.000,00	0,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	42.452.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Tegalrejo	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Jetis	0,00	0,00	0,00	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gondokusuman	0,00	0,00	0,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Danurejan	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Gedongtengen	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pakualaman	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Ngampilan	16.500.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.765,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Wirobrajan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Mantriweron	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Kraton	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Gondomanan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Mergangsan	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Umbulharjo	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kotagede	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.468.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah jalan	16.500.000,00	0,00	0,00	88.151.206,00	294.000,00	0,00	350.000,00	0,00	27.098.215,80	43.952.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH (A)	695.515.873,90	4.292.708.842,70	0,00	892.580.890,25	92.385.134,00	1.037.920.288,91	6.037.892.500,59	1.059.052.841,20	2.802.651.327,77	2.969.542.877,10	7.955.710,00	130.877.548,00

NO.	SKPD	LAIN-LAIN (MATERAI, BENDERA, ALAT PUSAKA)	Peralatan Uji	Linen	Tanaman	Tanaman Buah	BAHAN / BIBIT TANAMAN KEBUN	BAHAN / BIBIT TANAMAN DI LABORATORIUM	BENDA POS	PAKAIAN OLAHRAGA	JUMLAH
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Dinas Pendidikan	92.082.836,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.000,00	540.000,00	5.127.762.198,48
2	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.099.994,00
3	Dinas Kesehatan	1.636.000,00	0,00	136.627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	22.411.078.920,94
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	101.250.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	12.245.673.522,34
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawan Permukiman Kota	900.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.297.632,90
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.929.113,00
7	Dinas Kebakaran	3.318.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.586.375,00
8	Dinas Perhubungan	198.000,00	349.832.156,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.132.395.585,00
9	Bappeda	1.119.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.564.144,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	168.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.848.180,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.996.827,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	519.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.211.850,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.297.544,00
14	Dinas Sosial	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.000,00	0,00	111.506.320,00
15	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	8.300,00	2.120.000,00	9.834.500,00	7.314.000,00	0,00	0,00	0,00	283.530.513,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	708.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.682.937,58
17	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.250,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	450.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.630,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa	1.233.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502.700,00
20	Sekretariat DPRD	900.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.584.343,28
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	134.854.558,50
	a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.278.300,00
	b. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	8.905.150,00
	c. Bagian Layanan Pengadaan	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.737.235,50
	d. Bagian Hukum	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00
	e. Bagian Protokol	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.469,00
	f. Bagian Umum	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.081.524,00
	g. Bagian P3ADK	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
	h. Bagian Organisasi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	2.892.180,00
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506.366,00
	Jumlah Dipindahkan	103.231.836,00	349.832.156,00	237.885.596,20	2.120.000,00	9.834.500,00	7.314.000,00	-	13.668.000,00	540.000,00	48.184.372.505,02

NO.	SKPD	LAIN-LAIN (MATERAI, BENDERA, ALAT PUSAKA)	Peralatan Uji	Linen	Tanaman	Tanaman Buah	BAHAN / BIBIT TANAMAN KEBUN PLASMA	BAHAN / BIBIT TANAMAN DI LABORATORIUM KULJAR	BENDA POS	PAKAIAN OLAH RAGA	JUMLAH
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
23	Inspektorat	72.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	33.976.143,30
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.278.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	58.949.100,00
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	7.188.000,00	-	193.355.081,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.912.500,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	382.706.815,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	78.461.920,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	43.340.225,00
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	72.151.225,00
30	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	61.398.165,15
31	Kecamatan Tegalrejo	648.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3.613.850,00
32	Kecamatan Jetis	2.427.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	54.696.525,24
33	Kecamatan Gondokusuman	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	29.323.986,00
34	Kecamatan Danurejan	147.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	17.862.800,00
35	Kecamatan Gedongtengen	351.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	12.096.679,80
36	Kecamatan Pakualaman	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1.397.795,00
37	Kecamatan Ngampilan	222.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	47.891.255,00
38	Kecamatan Wirobrajan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	238.000,00
39	Kecamatan Mantriweron	279.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	5.388.100,00
40	Kecamatan Kraton	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	2.390.400,00
41	Kecamatan Gondomanan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7.872.775,00
42	Kecamatan Mergangsan	60.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	8.761.792,00
43	Kecamatan Umbulharjo	27.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	14.531.085,00
44	Kecamatan Kotagede	942.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	28.475.665,00
	Jumlah jalan	11.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188.000,00	0,00	1.158.879.382,49
	JUMLAH (A)	114.597.336,00	349.832.156,00	237.885.596,20	2.120.000,00	9.834.500,00	7.314.000,00	0,00	20.856.000,00	540.000,00	49.343.251.887,51

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERHITUNGAN NET REALIZABLE VALUE (NRV) DANA BERGULIR
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Plafond Kredit	Saldo Awal 2019	Pengurangan di Plafon Kredit (Pokok)	Saldo Akhir (Pokok)	Kualitas Piutang			
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada								
	Pokja 2003-Tahap I	190.000.000,00	-	190.000.000,00	-				
	Pokja 2003-Tahap II	413.000.000,00	16.023.817,00	396.976.183,00	16.023.817,00				
	Pokja 2003-Tahap III	370.000.000,00	10.687.614,00	359.312.386,00	10.687.614,00				
	Jumlah Pokja 2003	973.000.000,00	26.711.431,00	946.288.569,00	26.711.431,00				26.711.431,00
	Pokja 2006-Kelompok I	385.000.000,00	7.000.000,00	378.000.000,00	7.000.000,00				
	Pokja 2006-Kelompok II	525.000.000,00	-	525.000.000,00	-				
	Jumlah Pokja 2006	910.000.000,00	7.000.000,00	903.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
	Pokja 2007	299.000.000,00	6.318.047,00	293.214.685,00	5.785.315,00				
	Pokja 2008	500.000.000,00	196.403.967,00	303.596.033,00	196.403.967,00				
	Pengurangan Tahun 2010		(170.686.133,00)	170.686.133,00	(170.686.133,00)				
	Pengurangan Tahun 2011		(13.086.132,00)	13.086.132,00	(13.086.132,00)				
	Pengurangan Tahun 2013		(265.000,00)	265.000,00	(265.000,00)				
	Pengurangan Tahun 2016		(3.230.894,00)	3.230.894,00	(3.230.894,00)				
	Jumlah	2.682.000.000,00	48.632.554,00	2.633.367.446,00	48.632.554,00				14.921.123,00
2	Dana Bergulir kepada Kelompok UMK								
	Tahun 2006	1.048.000.000,00	321.945.400,00	726.954.600,00	321.045.400,00				
	Tahun 2007	912.000.000,00	185.163.788,00	728.156.212,00	183.843.788,00				
	Jumlah	1.960.000.000,00	507.109.188,00	1.455.110.812,00	504.889.188,00				504.889.188,00
3	Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Tahun 2006	1.250.000.000,00	154.747.950,00	1.095.252.050,00	154.747.950,00				154.747.950,00
	TOTAL	5.892.000.000,00	710.489.692,00	5.183.730.308,00	708.269.692,00	-	-	-	708.269.692,00
	Persentase penyisihan					0,50%	10%	50%	100%
	Penyisihan investasi non permanen					-	-	-	708.269.692,00
	Jumlah investasi non permanen					-	-	-	-

MUTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2019		Koreksi Penambahan (Rp)	Penambahan Investasi Permanen Tahun 2020 (Rp)	Koreksi Pengurangan (Rp)	Pengurangan Investasi Permanen Tahun 2020 (Rp)	Saldo 31 Des 2020		Keterangan
		Nilai (Rp)	% Kepemilikan					Nilai (Rp)	% Kepemilikan	
1	Bank BPD DIY	189.145.000.000,00	11,70%	-	20.000.000.000,00	-	-	209.145.000.000,00	11,70%	Metode Biaya
2	PD BPR Bank Jogja	175.269.284.949,09	100,00%	(25.426.360,00)	3.638.993.283,17		12.265.548.921,00	166.617.302.951,26	100%	Koreksi penambahan/ pengurangan merupakan koreksi karena penyesuaian LK BUMD 2019 Audited. Penambahan Investasi merupakan realisasi penyertaan modal + laba tahun berjalan. Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2019 yang disetor tahun 2020.
3	PDAM Tirtamarta	57.598.423.658,80	100,00%	(599.046.024,61)	2.725.882.986,72		693.501.557,50	59.031.759.063,41	100%	Koreksi penambahan/ pengurangan merupakan koreksi karena penyesuaian LK BUMD 2019 Audited. Penambahan Investasi merupakan realisasi penyertaan modal + laba tahun berjalan. Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2019 yang disetor tahun 2020.
4	BUKP se Kota Yogyakarta	411.000.000,00		-		-		411.000.000,00		Metode Biaya
5	PT. Radio Swara Adhiloka	270.481.312,48	99,28%	-		1.477.598,76	269.003.713,72	0,00	99,28%	Koreksi penambahan/ pengurangan merupakan koreksi karena penyesuaian LK BUMD 2019 Audited. Pengurangan merupakan kerugian tahun berjalan yang menjadi bagian Pemkot Yk
6	PD. Jogjatama Vishesha	109.954.658.297,87	100,00%	-		492.155.000,00	3.800.837.330,75	105.661.665.967,12	100%	Koreksi penambahan/ pengurangan merupakan koreksi karena penyesuaian LK BUMD 2019 Audited. Pengurangan merupakan bagian laba tahun 2019 yang disetor tahun 2020 + rugi tahun berjalan.
	Jumlah	532.648.848.218,24		(624.472.384,61)	26.364.876.269,89	493.632.598,76	17.028.891.522,97	540.866.727.981,79		

MUTASI ASET TETAP TAHUN 2020

Halaman 1

KETERANGAN	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG		
		PENAMBAHAN	KOREKSI/REKLASIFIKASI /MUTASI	TOTAL PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI/ REKLASIFIKASI/ MUTASI	TOTAL PENGURANGAN
2	3	4	5	7=4+5+6	8	9	11=8+9+10
TANAH	1.884.638.446.869,22	55.316.191.038,00	69.953.578.813,00	125.269.769.851,00	31.887.342.718,00	71.776.578.813,00	103.663.921.531,00
PERALATAN DAN MESIN	770.326.317.719,33	79.851.855.846,89	7.855.276.169,27	87.707.132.016,16	14.096.358.459,65	22.674.633.312,55	36.770.991.772,20
BANGUNAN DAN GEDUNG	1.152.996.726.355,65	34.637.910.629,62	26.900.490.894,48	61.538.401.524,10	2.635.075.217,25	8.390.313.090,18	11.025.388.307,43
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.108.350.596.227,33	91.969.803.684,47	20.620.075.410,10	112.589.879.094,57	308.964.490,46	658.806.192,27	967.770.682,73
ASET TETAP LAINNYA	41.148.254.655,09	2.792.440.350,32	26.047.100,00	2.818.487.450,32	807.769.613,69	978.306.116,05	1.786.075.729,74
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	22.997.204.784,98	7.957.723.855,40	-	7.957.723.855,40	-	7.431.555.764,87	7.431.555.764,87
JUMLAH	5.980.457.546.611,59	272.525.925.404,70	125.355.468.386,85	397.881.393.791,55	49.735.510.499,05	111.910.193.288,92	161.645.703.787,97

KETERANGAN	SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
2	12=3+7-11	13	14=12-13	15	16
TANAH	1.906.244.295.189,22	-	1.906.244.295.189,22		1.906.244.295.189,22
PERALATAN DAN MESIN	821.262.457.963,29	14.506.185.148,61	806.756.272.814,68	610.294.302.940,07	1.417.050.575.754,75
BANGUNAN DAN GEDUNG	1.203.509.739.572,31	75.938.276.518,06	1.127.571.463.054,25	328.290.292.678,95	1.455.861.755.733,20
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.219.972.704.639,17	-	2.219.972.704.639,17	1.810.956.689.023,48	4.030.929.393.662,65
ASET TETAP LAINNYA	42.180.666.375,67	-	42.180.666.375,67		42.180.666.375,67
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23.523.372.875,51	-	23.523.372.875,51		23.523.372.875,51
JUMLAH	6.216.693.236.615,17	90.444.461.666,67	6.126.248.774.948,50	2.749.541.284.642,50	8.875.790.059.591,00

MUTASI ASET TANAH PER SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.306.127.354.254,00	19.394.311.920,00	-	-	-	31.887.342.718,00	-	69.953.578.813,00	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN GONDOMANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	578.511.092.615,22	35.921.879.118,00	-	69.953.578.813,00	-	-	1.823.000.000,00	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.884.638.446.869,22	55.316.191.038,00	-	69.953.578.813,00	-	31.887.342.718,00	1.823.000.000,00	69.953.578.813,00	-

NO	NAMA SKPD	KOREKSI				SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-			-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-			-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-			-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-			-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	-	-			-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-			-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-			-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-			-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.223.680.744.643,00	1.223.680.744.643,00			1.223.680.744.643,00	-	1.223.680.744.643,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-			-	-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	-			-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-	-			-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	-			-	-	-
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	-			-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	-			-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	-			-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	-			-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	-			-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-	-			-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-	-			-	-	-
23	KECAMATAN GANDOMANAN	-	-			-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	-			-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	-			-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	-			-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-			-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	-			-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-			-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-			-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-			-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-			-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-			-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-			-	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-			-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-			-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	-	-			-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-			-	-	-
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-			-	-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-			-	-	-
42	INSPEKTORAT	-	-			-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-			-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	682.563.550.546,22	682.563.550.546,22			682.563.550.546,22	-	682.563.550.546,22
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-			-	-	-
	JUMLAH	1.906.244.295.189,22	1.906.244.295.189,22	-	-	1.906.244.295.189,22	-	1.906.244.295.189,22

MUTASI ASET PERALATAN DAN MESIN PER SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN				
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI	
1	DINAS PENDIDIKAN	116.244.556.375,51	26.117.428.586,67	376.538.486,00				2.160.032.972,07	318.864.967,00	-	8.998.439.056,52
2	DINAS KESEHATAN	99.128.549.068,34	6.678.053.554,00					1.326.424.541,97		23.110.000,00	4.396.465.027,71
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	195.524.231.876,06	22.754.566.201,20			9.031.542,50	10.500.000,00				
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.846.526.645,91	3.359.562.508,25			18.330.000,00	6.250.000,00	255.387.156,75		286.223.300,00	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.594.249.826,41	490.312.585,00			651.151.583,12		147.250.000,00		171.728.584,24	
6	DINAS KEBAKARAN	19.387.780.332,52	25.343.280,00			1.015.000,00	698.962.366,50	309.256.540,34		355.837.675,22	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.593.948.078,68	3.997.791.500,00	176.559.430,22			6.477.607,29				-
8	DINAS SOSIAL	5.500.217.195,96	222.562.750,00	5.000.000,00				42.580.000,00			17.633.682,41
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.934.490.778,63	445.575.000,00			143.065.000,00		1.275.000,00			768.500,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.594.686.581,86	207.479.750,37			10.700.000,00	22.454.565,11	53.825.201,64		2.802.550,00	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43.576.470.814,28	261.058.200,00	17.000.000,00				1.962.367.075,55		17.435.873,99	
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.204.270.785,48	33.690.000,00								1.250.000,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	2.428.710.006,91	25.440.000,00	86.362.000,00			21.089.727,31	8.790.000,00			41.192.164,61
14	KECAMATAN JETIS	1.811.810.142,35	247.617.860,00				7.529.582,41			9.099.727,34	3.713.345,92
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	2.068.127.779,12	22.700.000,00				475.000,00	7.000.000,00			83.270.472,13
16	KECAMATAN DANUREJAN	1.781.862.829,54	1.991.000,00				19.743.934,76			11.420.692,63	22.464.900,00
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.534.112.557,33	58.835.000,00			1.696.000,00	3.496.117,91				63.353.012,13
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.813.326.960,34	17.620.300,00			143.608.300,00	17.996.661,66	4.509.400,00			40.371.380,68
19	KECAMATAN NGAMPILAN	1.227.963.666,02	68.308.300,00					10.000.000,00			14.330.647,75
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	1.499.744.497,84	4.390.000,00					8.899.000,00			
21	KECAMATAN MANTRIJERON	1.565.802.710,82	242.505.496,84					2.324.000,00		9.000.000,00	40.048.874,81
22	KECAMATAN KRATON	1.453.232.357,17	47.476.984,62				25.790.344,09	21.602.400,00			950.000,00
23	KECAMATAN GONDOMANAN	1.460.328.902,58	137.800.272,64				7.412.287,34				26.638.692,83
24	KECAMATAN MERGANGSAN	1.716.941.881,44	447.826.096,40				41.936.051,17				
25	KECAMATAN UMBULHARJO	3.393.880.717,46	28.250.000,00				122.600,00				155.029.901,55
26	KECAMATAN KOTAGEDE	1.740.825.943,74	166.428.580,00				8.400.000,00	11.460.000,00			61.333.256,28
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.878.596.046,17	387.740.000,00				27.129.153,94	40.306.466,37			
28	DINAS PERHUBUNGAN	16.766.456.564,53	609.272.290,00			11.420.692,63		85.000.000,00		53.724.774,52	312.245.050,78
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	43.306.501.933,82	481.655.000,00	391.272.992,00		1.600.000,00	59.034.727,28	1.077.971.714,52		689.700.000,00	
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.691.407.998,51	23.950.000,00			138.000.000,00		65.000.000,00			
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	4.988.808.086,27	148.050.000,00				72.164.012,73	99.430.733,27		9.540.000,00	
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.682.735.167,16		3.090.750,00		23.110.000,00		3.090.750,00			
33	DINAS KEBUDAYAAN	1.686.955.732,27	20.460.000,00				118.541.814,17	1.403.508,97			
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.603.950.289,54	195.937.874,45			309.650.000,00	56.593.992,22	231.531.795,52			
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	690.704.576,75	139.835.160,00								
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.618.839.166,98	66.975.186,49	12.825.000,00		17.435.873,99	276.450.000,00	22.700.000,00			
37	DINAS PARIWISATA	29.731.989.297,64	7.120.070.552,00				135.227.498,55	33.088.381,79	2.796.333.618,01		
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.727.874.795,04	712.351.700,60	84.959.000,00			122.350.000,00	59.980.331,12	244.048.000,00		3.914.868.639,77
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.011.395.460,41	66.968.300,00	3.283.800,00				18.208.345,88			
40	SEKRETARIAT DAERAH	25.268.089.501,33	1.114.278.727,36	12.151.600,00		461.000.000,00	377.205.734,07	997.154.498,69	945.900,00	1.045.335.147,71	
41	SEKRETARIAT DPRD	12.072.733.916,31	1.191.250.000,00				276.467.237,60				
42	INSPEKTORAT	2.683.160.345,66	81.170.000,00				29.502.034,52	25.007.967,46			
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.693.645.779,67	1.265.498.750,00					262.514.927,91		17.969.150,75	
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	9.139.317.909,09	106.848.000,00			511.622.088,73	4.814.682,29	1.773.972.844,73		1.449.141.613,28	
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.456.505.839,85	8.930.500,00	8.500.000,00		1.215.579.075,94	-	19.700.000,00			
	JUMLAH	770.326.317.719,33	79.851.855.846,89	1.177.543.058,22	4.166.617.429,98	2.368.813.681,07	14.096.358.459,65	319.810.867,00	4.152.069.089,68	18.194.366.605,87	

NO	NAMA SKPD	KOREKSI				SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	131.261.186.452,60	131.261.186.452,60			131.261.186.452,60	9.660.657.482,18	121.600.528.970,42
2	DINAS KESEHATAN	100.060.603.052,66	100.060.603.052,65			100.060.603.052,66	1.060.943.162,54	98.999.659.890,11
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	218.298.329.619,76	218.298.329.619,76			218.298.329.619,76	357.181.401,07	217.941.148.218,69
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.689.058.697,41	21.689.058.697,41			21.689.058.697,41	70.628.825,04	21.618.429.872,37
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.416.735.410,29	8.416.735.410,29			8.416.735.410,29	64.603.533,71	8.352.131.876,58
6	DINAS KEBAKARAN	19.448.006.763,46	19.448.006.763,46			19.448.006.763,46	24.154.075,55	19.423.852.687,91
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.774.776.616,19	12.774.776.616,19		1.680.000,00	12.773.096.616,19	44.997.877,45	12.728.098.738,74
8	DINAS SOSIAL	5.950.071.943,84	5.950.071.943,84	4.000.000,00		5.954.071.943,84	108.877.515,05	5.845.194.428,79
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.521.087.278,63	3.521.087.278,63			3.521.087.278,63	69.443.103,70	3.451.644.174,93
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.778.693.145,70	2.778.693.145,70			2.778.693.145,70	37.803.781,93	2.740.889.363,77
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.874.726.064,74	41.874.726.064,74			41.874.726.064,74	213.649.501,76	41.661.076.562,99
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.236.710.785,48	9.236.710.785,48			9.236.710.785,48	51.542.911,48	9.185.167.874,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	2.511.619.569,61	2.511.619.569,61			2.511.619.569,61	90.872.446,50	2.420.747.123,11
14	KECAMATAN JETIS	2.054.144.511,50	2.054.144.511,50			2.054.144.511,50	71.587.965,97	1.982.556.545,53
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	2.001.032.306,99	2.001.032.306,99			2.001.032.306,99	114.137.708,07	1.886.894.598,92
16	KECAMATAN DANUREJAN	1.769.712.171,67	1.769.712.171,67			1.769.712.171,67	97.762.446,97	1.671.949.724,70
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.534.786.663,11	1.534.786.663,11			1.534.786.663,11	68.097.400,25	1.466.689.262,86
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.947.671.441,32	1.947.671.441,32			1.947.671.441,32	58.240.161,11	1.889.431.280,21
19	KECAMATAN NGAMPILAN	1.271.941.318,27	1.271.941.318,27			1.271.941.318,27	60.737.548,09	1.211.203.770,18
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	1.532.959.325,86	1.532.959.325,86			1.532.959.325,86	70.114.203,77	1.462.845.122,09
21	KECAMATAN MANTRIJEON	1.756.935.332,85	1.756.935.332,85			1.756.935.332,85	60.390.071,37	1.696.545.261,48
22	KECAMATAN KRATON	1.503.947.285,88	1.503.947.285,88			1.503.947.285,88	74.605.136,84	1.429.342.149,04
23	KECAMATAN GONDOMANAN	1.578.902.769,73	1.578.902.769,73			1.578.902.769,73	77.997.055,79	1.500.905.713,94
24	KECAMATAN MERGANGSAN	2.206.704.029,01	2.206.704.029,01			2.206.704.029,01	127.227.154,09	2.079.476.874,92
25	KECAMATAN UMBULHARJO	3.267.223.415,91	3.267.223.415,91			3.267.223.415,91	172.868.642,31	3.094.354.773,60
26	KECAMATAN KOTAGEDE	1.842.861.267,46	1.842.861.267,46			1.842.861.267,46	60.489.660,41	1.782.371.607,05
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.253.158.733,74	4.253.158.733,74			4.253.158.733,74	13.485.342,07	4.239.673.391,67
28	DINAS PERHUBUNGAN	16.936.179.721,86	16.936.179.721,86			16.936.179.721,86	128.093.917,63	16.808.085.804,23
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	42.472.392.938,58	42.472.392.938,58			42.472.392.938,58	125.939.133,20	42.346.453.805,38
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.788.357.998,51	2.788.357.998,51			2.788.357.998,51	58.893.556,42	2.729.464.442,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	5.100.051.365,73	5.100.051.365,73			5.100.051.365,73	21.497.413,48	5.078.553.952,25
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.705.845.167,16	1.705.845.167,16			1.705.845.167,16	20.802.888,23	1.685.042.278,93
33	DINAS KEBUDAYAAN	1.824.554.037,47	1.824.554.037,47			1.824.554.037,47	20.881.162,13	1.803.672.875,34
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.934.600.360,69	7.934.600.360,69			7.934.600.360,69	70.238.927,72	7.864.361.432,97
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	830.539.736,75	830.539.736,75			830.539.736,75	18.216.653,15	812.323.083,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.969.825.227,46	7.969.825.227,46			7.969.825.227,46	176.265.655,81	7.793.559.571,65
37	DINAS PARIWISATA	34.224.042.111,98	34.224.042.111,98	132.252.000,00	2.499.750,00	34.353.794.361,98	55.794.586,55	34.297.999.775,43
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.548.599.186,99	28.548.599.186,99	6.050.000,00		28.554.649.186,99	202.199.786,47	28.352.449.400,52
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.063.439.214,53	3.063.439.214,53			3.063.439.214,53	34.783.214,32	3.028.656.000,21
40	SEKRETARIAT DAERAH	25.189.290.016,36	25.189.290.016,36		4.207.000,00	25.185.083.016,36	288.080.493,63	24.897.002.522,73
41	SEKRETARIAT DPRD	13.540.451.153,91	13.540.451.153,91			13.540.451.153,91	78.775.065,92	13.461.676.087,99
42	INSPEKTORAT	2.768.824.412,72	2.768.824.412,72			2.768.824.412,72	28.511.656,56	2.740.312.756,16
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.678.660.451,01	3.678.660.451,01			3.678.660.451,01	19.145.617,20	3.659.514.833,81
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	6.539.488.222,10	6.539.488.222,10			6.539.488.222,10	90.291.712,98	6.449.196.509,12
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.669.815.415,79	9.669.815.415,79			9.669.815.415,79	84.677.592,14	9.585.137.823,65
	JUMLAH	821.128.542.713,29	821.128.542.713,29	142.302.000,00	8.386.750,00	821.262.457.963,29	14.506.185.148,61	806.756.272.814,68

MUTASI ASET BANGUNAN DAN GEDUNG PER SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	275.400.988.745,53	1.360.178.641,00	2.010.679.128,02			288.740.037,11		9.580.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	107.650.412.806,08		591.460.450,00				1.963.539.221,31		
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.074.415.529,37		4.071.841.139,00						
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	271.599.322.448,26	23.904.516.868,46	564.815.999,60				5.860.819.793,82		
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.271.538.353,04								
6	DINAS KEBAKARAN	2.938.156.452,94		165.636.726,62			320.221.211,04			
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	873.231.451,00		163.554.639,00						
8	DINAS SOSIAL	4.786.600.979,89	119.903.750,00	174.511.900,00			148.203.000,00			
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	548.612.615,02		147.483.101,53	2.970.616.829,07					
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.718.351.365,64		169.533.346,78						
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.913.772.656,39	424.771.742,60	209.728.818,40			959.504.951,41			
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.832.536.706,50								
13	KECAMATAN TEGALREJO	4.920.495.444,50	11.508.763,04	51.695.236,97						
14	KECAMATAN JETIS	3.445.806.181,00	474.151.017,65	119.786.000,00						
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8.106.853.619,06		54.485.000,00						
16	KECAMATAN DANUREJAN	5.097.774.751,98	81.957.333,37	6.475.000,00						
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	2.589.186.544,59		462.265.000,01						
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	1.725.961.724,35	119.821.500,00		2.722.233.770,75					
19	KECAMATAN NGAMPILAN	3.724.760.518,49								
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	3.621.664.257,82	220.777.078,61							
21	KECAMATAN MANTRIJERON	3.035.510.803,70	138.238.503,17	247.727.000,00						
22	KECAMATAN KRATON	3.943.330.776,36	15.860.594,50							
23	KECAMATAN GONDOMANAN	3.342.831.073,76	28.244.384,00							
24	KECAMATAN MERGANGSAN	4.745.582.066,43	173.069.000,01					182.109.120,74		
25	KECAMATAN UMBULHARJO	17.104.180.660,33	125.914.768,64	168.236.963,05	167.969.194,00		76.157.627,78			
26	KECAMATAN KOTAGEDE	7.692.073.434,94	183.586.000,00	26.408.100,00						
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.194.196.999,96								
28	DINAS PERHUBUNGAN	44.331.152.979,32	512.323.811,02			363.850.000,00			4.921.893,78	
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	7.864.185.644,43		48.992.883,25						
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	15.312.268.280,49					37.018.000,00			
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	313.413.000,00								
33	DINAS KEBUDAYAAN	954.100.705,50	113.474.000,00	68.885.000,00						
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.171.681.480,56	6.204.910,34	111.790.029,46				82.219.495,92		
35	KANTOR KESATUAN BANGSA									
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.504.365.656,78	371.255.913,51	49.500.000,00			43.773.100,00			
37	DINAS PARIWISATA	51.152.026.891,63	2.780.542.600,00	76.105.100,00			168.370.675,72			
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	129.751.169.056,82		363.003.000,00						
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	444.964.000,00	270.599.000,00							
40	SEKRETARIAT DAERAH	30.112.161.570,98	1.500.000,00	592.229.183,14			191.353.881,57			
41	SEKRETARIAT DPRD	8.996.784.097,96								
42	INSPEKTORAT	7.041.057.050,48								
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.131.855.805,79		346.248.000,00			197.642.000,00			
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	40.080.139.907,55	3.199.510.449,70	35.540.248,91	2.145.648.342,05		204.090.732,62			
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.937.251.260,43								
	JUMLAH	1.152.996.726.355,65	34.637.910.629,62	11.098.616.993,74	8.006.468.135,87	363.850.000,00	2.635.075.217,25	82.219.495,92	8.006.468.135,87	14.501.893,78

NO	NAMA SKPD	SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KOREKSI		SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
				KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	278.473.526.477,44	278.473.526.477,44			278.473.526.477,44	416.362.877,92	278.057.163.599,52
2	DINAS KESEHATAN	106.278.334.034,77	106.278.334.034,77			106.278.334.034,77	35.258.779,32	106.243.075.255,45
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	28.146.256.668,37	28.146.256.668,37			28.146.256.668,37	17.023.050,83	28.129.233.617,54
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	290.207.835.522,50	290.207.835.522,50	7.431.555.764,87	287.123.564,61	297.352.267.722,76	58.459.382.421,75	238.892.885.301,01
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.271.538.353,04	2.271.538.353,04			2.271.538.353,04		2.271.538.353,04
6	DINAS KEBAKARAN	2.783.571.968,52	2.783.571.968,52			2.783.571.968,52		2.783.571.968,52
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.036.786.090,00	1.036.786.090,00			1.036.786.090,00	8.750.000,00	1.028.036.090,00
8	DINAS SOSIAL	4.932.813.629,89	4.932.813.629,89			4.932.813.629,89	25.940.136,98	4.906.873.492,91
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.666.712.545,62	3.666.712.545,62			3.666.712.545,62		3.666.712.545,62
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.887.884.712,42	2.887.884.712,42			2.887.884.712,42		2.887.884.712,42
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.588.768.265,98	30.588.768.265,98			30.588.768.265,98	5.789.054.004,16	24.799.714.261,83
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.832.536.706,50	1.832.536.706,50			1.832.536.706,50	2.545.420,08	1.829.991.286,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	4.983.699.444,51	4.983.699.444,51			4.983.699.444,51	59.390.903,04	4.924.308.541,47
14	KECAMATAN JETIS	4.039.743.198,65	4.039.743.198,65			4.039.743.198,65	17.934.491,96	4.021.808.706,69
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8.161.338.619,06	8.161.338.619,06			8.161.338.619,06	16.852.184,99	8.144.486.434,07
16	KECAMATAN DANUREJAN	5.186.207.085,35	5.186.207.085,35			5.186.207.085,35	39.173.166,70	5.147.033.918,65
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	3.051.451.544,60	3.051.451.544,60			3.051.451.544,60		3.051.451.544,60
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	4.568.016.995,10	4.568.016.995,10			4.568.016.995,10	125.109.252,02	4.442.907.743,08
19	KECAMATAN NGAMPILAN	3.724.760.518,49	3.724.760.518,49			3.724.760.518,49	6.146.969,32	3.718.613.549,17
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	3.842.441.336,43	3.842.441.336,43			3.842.441.336,43	87.138.093,42	3.755.303.243,01
21	KECAMATAN MANTRIJEJON	3.421.476.306,86	3.421.476.306,86			3.421.476.306,86	12.933.403,91	3.408.542.902,95
22	KECAMATAN KRATON	3.959.191.370,86	3.959.191.370,86			3.959.191.370,86	15.860.594,50	3.943.330.776,36
23	KECAMATAN GANDOMANAN	3.371.075.457,76	3.371.075.457,76			3.371.075.457,76	77.226.384,00	3.293.849.073,76
24	KECAMATAN MERGANGSAN	4.736.541.945,70	4.736.541.945,70			4.736.541.945,70		4.736.541.945,70
25	KECAMATAN UMBULHARJO	17.490.143.958,24	17.490.143.958,24			17.490.143.958,24	14.998.599,84	17.475.145.358,40
26	KECAMATAN KOTAGEDE	7.902.067.534,94	7.902.067.534,94			7.902.067.534,94	183.586.000,00	7.718.481.534,94
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.194.196.999,96	1.194.196.999,96			1.194.196.999,96	90.612.999,96	1.103.584.000,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	45.202.404.896,56	45.202.404.896,56			45.202.404.896,56	9.804.604.426,46	35.397.800.470,10
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	7.913.178.527,68	7.913.178.527,68			7.913.178.527,68	3.600.000,00	7.909.578.527,68
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-			-		-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	15.275.250.280,49	15.275.250.280,49			15.275.250.280,49		15.275.250.280,49
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	313.413.000,00	313.413.000,00			313.413.000,00		313.413.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN	1.136.459.705,50	1.136.459.705,50			1.136.459.705,50	1.100.000,00	1.135.359.705,50
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.207.456.924,44	4.207.456.924,44			4.207.456.924,44	18.533.910,34	4.188.923.014,10
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-			-		-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.881.348.470,29	8.881.348.470,29			8.881.348.470,29	116.566.624,90	8.764.781.845,39
37	DINAS PARIWISATA	53.840.303.915,91	53.840.303.915,91			53.840.303.915,91	9.697.655,75	53.830.606.260,16
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	130.114.172.056,82	130.114.172.056,82			130.114.172.056,82	28.152.000,00	130.086.020.056,82
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	715.563.000,00	715.563.000,00			715.563.000,00		715.563.000,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	30.514.536.872,55	30.514.536.872,55			30.514.536.872,55	302.140.667,86	30.212.396.204,69
41	SEKRETARIAT DPRD	8.996.784.097,96	8.996.784.097,96			8.996.784.097,96		8.996.784.097,96
42	INSPEKTORAT	7.041.057.050,48	7.041.057.050,48			7.041.057.050,48	4.991.000,00	7.036.066.050,48
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.280.461.805,79	1.280.461.805,79			1.280.461.805,79	10.500.000,00	1.269.961.805,79
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	45.256.748.215,59	45.256.748.215,59			45.256.748.215,59	33.000.000,00	45.223.748.215,59
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.937.251.260,43	2.937.251.260,43			2.937.251.260,43	104.110.498,05	2.833.140.762,38
	JUMLAH	1.196.365.307.372,05	1.196.365.307.372,05	7.431.555.764,87	287.123.564,61	1.203.509.739.572,31	75.938.276.518,06	1.127.571.463.054,25

MUTASI ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	47.810.500,00			317.892.689,96					
2	DINAS KESEHATAN	144.475.901,93								
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	531.825.230,00								
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.078.639.530.469,76	41.692.622.900,58	20.057.914.925,14						
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
6	DINAS KEBAKARAN	4.854.405.206,85								
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.614.421.469,62								
8	DINAS SOSIAL									
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG									
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.630.456.775,47					308.964.490,46		317.892.689,96	
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
13	KECAMATAN TEGALREJO	561.602.338,50	343.682.000,01							
14	KECAMATAN JETIS	584.676.618,13	804.943.245,22							
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	1.010.726.126,79	986.283.046,77							
16	KECAMATAN DANUREJAN	13.595.000,00	500.732.040,03							
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	598.598.569,24	160.867.679,75							
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	284.454.000,00								
19	KECAMATAN NGAMPILAN	440.805.834,30	442.458.282,24							
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	487.176.201,84	830.663.402,38							
21	KECAMATAN MANTRIHERON	963.799.527,73	225.176.800,00							
22	KECAMATAN KRATON	756.795.844,64	494.096.455,28							
23	KECAMATAN GONDOMANAN	271.772.200,00	327.632.550,00							
24	KECAMATAN MERGANGSAN	1.268.664.549,32	-							
25	KECAMATAN UMBULHARJO	1.395.105.316,25	1.396.981.928,05							
26	KECAMATAN KOTAGEDE		273.843.118,14							
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
28	DINAS PERHUBUNGAN	487.843.525,01				94.267.795,00				
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	447.203.194,11	2.426.049,15							
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN									
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA									
33	DINAS KEBUDAYAAN									
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
35	KANTOR KESATUAN BANGSA									
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	570.920.376,71								
37	DINAS PARIWISATA	566.443.000,00	3.024.963.489,87							
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	342.088.451,13	49.482.000,00							
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
40	SEKRETARIAT DAERAH									
41	SEKRETARIAT DPRD									
42	INSPEKTORAT									
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	5.835.400.000,00	40.412.948.697,00							
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	JUMLAH	2.108.350.596.227,33	91.969.803.684,47	20.057.914.925,14	317.892.689,96	94.267.795,00	308.964.490,46	-	317.892.689,96	-

NO	NAMA SKPD	KOREKSI			SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	365.703.189,96	365.703.189,96			-	365.703.189,96
2	DINAS KESEHATAN	144.475.901,93	144.475.901,93			-	144.475.901,93
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	531.825.230,00	531.825.230,00			-	531.825.230,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.140.390.068.295,48	2.140.390.068.295,49	150.000.000,00	340.913.502,31	-	2.140.199.154.793,17
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-			-	-
6	DINAS KEBAKARAN	4.854.405.206,85	4.854.405.206,85			-	4.854.405.206,85
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.614.421.469,62	3.614.421.469,62			-	3.614.421.469,62
8	DINAS SOSIAL	-	-			-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-			-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-	-			-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.003.599.595,05	3.003.599.595,05			-	3.003.599.595,05
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-			-	-
13	KECAMATAN TEGALREJO	905.284.338,51	905.284.338,51			-	905.284.338,51
14	KECAMATAN JETIS	1.389.619.863,35	1.389.619.863,35			-	1.389.619.863,35
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	1.997.009.173,56	1.997.009.173,56			-	1.997.009.173,56
16	KECAMATAN DANUREJAN	514.327.040,03	514.327.040,03			-	514.327.040,03
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	759.466.248,99	759.466.248,99			-	759.466.248,99
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	284.454.000,00	284.454.000,00			-	284.454.000,00
19	KECAMATAN NGAMPILAN	883.264.116,54	883.264.116,54			-	883.264.116,54
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	1.317.839.604,22	1.317.839.604,22			-	1.317.839.604,22
21	KECAMATAN MANTRIJEJON	1.188.976.327,73	1.188.976.327,73			-	1.188.976.327,73
22	KECAMATAN KRATON	1.250.892.299,92	1.250.892.299,92			-	1.250.892.299,92
23	KECAMATAN GONDOMANAN	599.404.750,00	599.404.750,00			-	599.404.750,00
24	KECAMATAN MERGANGSAN	1.268.664.549,32	1.268.664.549,32			-	1.268.664.549,32
25	KECAMATAN UMBULHARJO	2.792.087.244,30	2.792.087.244,30			-	2.792.087.244,30
26	KECAMATAN KOTAGEDE	273.843.118,14	273.843.118,14			-	273.843.118,14
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-			-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	582.111.320,01	582.111.320,01			-	582.111.320,01
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	449.629.243,26	449.629.243,26			-	449.629.243,26
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-			-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	-			-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-			-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	-			-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-			-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	-			-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	570.920.376,71	570.920.376,71			-	570.920.376,71
37	DINAS PARIWISATA	3.591.406.489,87	3.591.406.489,87			-	3.591.406.489,87
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	391.570.451,13	391.570.451,13			-	391.570.451,13
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	-			-	-
41	SEKRETARIAT DPRD	-	-			-	-
42	INSPEKTORAT	-	-			-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-			-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	46.248.348.697,00	46.248.348.697,00			-	46.248.348.697,00
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-			-	-
	JUMLAH	2.220.163.618.141,48	2.220.163.618.141,49	150.000.000,00	340.913.502,31	2.219.972.704.639,17	2.219.972.704.639,17

MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER SKPD TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	30.576.286.968,91	2.200.234.905,32				793.955.225,37			972.947.116,05
2	DINAS KESEHATAN	250.904.366,50	8.566.200,00							5.109.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	250.000,00	3.216.200,00			24.487.900,00				
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.480.708.956,20								
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.604.200,00								
6	DINAS KEBAKARAN	903.625,00								
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.137.290,00								
8	DINAS SOSIAL	22.805.340,00	1.666.500,00							
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.638.950,00	100.000,00							
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	96.267.651,00								
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.245.224.357,79					10.816.388,32			
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.554.500,00								
13	KECAMATAN TEGALREJO	231.453.335,32	189.156.000,00							
14	KECAMATAN JETIS	42.429.004,54	3.900.000,00							
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	147.082.872,72								250.000,00
16	KECAMATAN DANUREJAN	40.422.704,54	340.000,00							
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	185.123.636,36	100.000,00							
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	26.713.636,36	120.000,00							
19	KECAMATAN NGAMPILAN	196.029.451,36	220.000,00							
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	195.945.141,49								
21	KECAMATAN MANTRIJERON	214.848.041,49								
22	KECAMATAN KRATON	41.825.754,54	300.000,00							
23	KECAMATAN GONDONANAN	188.968.686,36	100.000,00							
24	KECAMATAN MERGANGSAN	209.921.536,49								
25	KECAMATAN UMBULHARJO	149.597.696,81	220.000,00							
26	KECAMATAN KOTAGEDE	73.783.691,49	220.000,00							
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.245.825,00				159.200,00				
28	DINAS PERHUBUNGAN	54.621.196,46								
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	15.209.632,00								
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	152.233.100,00								
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	2.102.700,00								
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.975.000,00								
33	DINAS KEBUDAYAAN	77.150.000,00								
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.054.732.925,08	322.822.345,00							
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	1.046.800,00	300.000,00							
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	33.900.500,00				1.400.000,00				
37	DINAS PARIWISATA	1.077.862.766,46								
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	92.638.900,00	58.388.000,00							
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.981.423,00								
40	SEKRETARIAT DAERAH	298.390.281,80	1.225.000,00				2.998.000,00			
41	SEKRETARIAT DPRD	243.020.820,01	997.200,00							
42	INSPEKTORAT	18.901.140,00	248.000,00							
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17.586.750,00								
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	330.965.000,00								
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.258.500,00								
	JUMLAH	41.148.254.655,09	2.792.440.350,32	-	-	26.047.100,00	807.769.613,69	-	-	978.306.116,05

NO	NAMA SKPD	KOREKSI			SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	31.009.619.532,82	31.009.619.532,82			-	31.009.619.532,82
2	DINAS KESEHATAN	254.361.566,50	254.361.566,50			-	254.361.566,50
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	27.954.100,00	27.954.100,00			-	27.954.100,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.480.708.956,20	1.480.708.956,20			-	1.480.708.956,20
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.604.200,00	3.604.200,00			-	3.604.200,00
6	DINAS KEBAKARAN	903.625,00	903.625,00			-	903.625,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.137.290,00	2.137.290,00			-	2.137.290,00
8	DINAS SOSIAL	24.471.840,00	24.471.840,00			-	24.471.840,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.738.950,00	26.738.950,00			-	26.738.950,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	96.267.651,00	96.267.651,00			-	96.267.651,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.234.407.969,47	2.234.407.969,47			-	2.234.407.969,47
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.554.500,00	5.554.500,00			-	5.554.500,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	420.609.335,32	420.609.335,32			-	420.609.335,32
14	KECAMATAN JETIS	46.329.004,54	46.329.004,54			-	46.329.004,54
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	146.832.872,72	146.832.872,72			-	146.832.872,72
16	KECAMATAN DANUREJAN	40.762.704,54	40.762.704,54			-	40.762.704,54
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	185.223.636,36	185.223.636,36			-	185.223.636,36
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	26.833.636,36	26.833.636,36			-	26.833.636,36
19	KECAMATAN NGAMPILAN	196.249.451,36	196.249.451,36			-	196.249.451,36
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	195.945.141,49	195.945.141,49			-	195.945.141,49
21	KECAMATAN MANTRIJERON	214.848.041,49	214.848.041,49			-	214.848.041,49
22	KECAMATAN KRATON	42.125.754,54	42.125.754,54			-	42.125.754,54
23	KECAMATAN GONDONANAN	189.068.686,36	189.068.686,36			-	189.068.686,36
24	KECAMATAN MERGANGSAN	209.921.536,49	209.921.536,49			-	209.921.536,49
25	KECAMATAN UMBULHARJO	149.817.696,81	149.817.696,81			-	149.817.696,81
26	KECAMATAN KOTAGEDE	74.003.691,49	74.003.691,49			-	74.003.691,49
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.405.025,00	1.405.025,00			-	1.405.025,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	54.621.196,46	54.621.196,46			-	54.621.196,46
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	15.209.632,00	15.209.632,00			-	15.209.632,00
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	152.233.100,00	152.233.100,00			-	152.233.100,00
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	2.102.700,00	2.102.700,00			-	2.102.700,00
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.975.000,00	8.975.000,00			-	8.975.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN	77.150.000,00	77.150.000,00			-	77.150.000,00
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.377.555.270,08	2.377.555.270,08			-	2.377.555.270,08
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	1.346.800,00	1.346.800,00			-	1.346.800,00
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35.300.500,00	35.300.500,00			-	35.300.500,00
37	DINAS PARIWISATA	1.077.862.766,46	1.077.862.766,46			-	1.077.862.766,46
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	151.026.900,00	151.026.900,00			-	151.026.900,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.981.423,00	8.981.423,00			-	8.981.423,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	296.617.281,80	296.617.281,80			-	296.617.281,80
41	SEKRETARIAT DPRD	244.018.020,01	244.018.020,01			-	244.018.020,01
42	INSPEKTORAT	19.149.140,00	19.149.140,00			-	19.149.140,00
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17.586.750,00	17.586.750,00			-	17.586.750,00
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	330.965.000,00	330.965.000,00			-	330.965.000,00
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.258.500,00	3.258.500,00			-	3.258.500,00
	JUMLAH	42.180.666.375,67	42.180.666.375,67	-	-	-	42.180.666.375,67

MUTASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan per SKPD Tahun 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	38.942.847,28								
2	DINAS KESEHATAN									
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.079.554.237,70	7.752.907.305,40							
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
6	DINAS KEBAKARAN	938.992.500,00								
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.400.000,00								
8	DINAS SOSIAL									
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG									
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	532.675.550,00	66.074.000,00							
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		14.675.000,00							
13	KECAMATAN TEGALREJO									
14	KECAMATAN JETIS									
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN		24.000.000,00							
16	KECAMATAN DANUREJAN									
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN									
18	KECAMATAN PAKUALAMAN									
19	KECAMATAN NGAMPILAN									
20	KECAMATAN WIROBRAJAN									
21	KECAMATAN MANTRIJERON									
22	KECAMATAN KRATON									
23	KECAMATAN GONDOMANAN									
24	KECAMATAN MERGANGSAN									
25	KECAMATAN UMBULHARJO									
26	KECAMATAN KOTAGEDE									
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
28	DINAS PERHUBUNGAN									
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN									
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN									
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA									
33	DINAS KEBUDAYAAN	298.689.800,00								
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		16.500.000,00							
35	KANTOR KESATUAN BANGSA									
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	142.007.500,00								
37	DINAS PARIWISATA	1.629.500.350,00	13.772.550,00							
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	163.352.000,00								
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
40	SEKRETARIAT DAERAH	79.090.000,00								
41	SEKRETARIAT DPRD		69.795.000,00							
42	INSPEKTORAT									
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG									
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	JUMLAH	22.997.204.784,98	7.957.723.855,40	-	-	-	-	-	-	-

NO	NAMA SKPD	KOREKSI				SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	38.942.847,28	38.942.847,28			38.942.847,28	-	38.942.847,28
2	DINAS KESEHATAN	-				-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-				-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.832.461.543,10	26.832.461.543,10		7.431.555.764,87	19.400.905.778,23	-	19.400.905.778,23
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-				-	-	-
6	DINAS KEBAKARAN	938.992.500,00	938.992.500,00			938.992.500,00	-	938.992.500,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.400.000,00	94.400.000,00			94.400.000,00	-	94.400.000,00
8	DINAS SOSIAL	-				-	-	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-				-	-	-
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	-				-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	598.749.550,00	598.749.550,00			598.749.550,00	-	598.749.550,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.675.000,00	14.675.000,00			14.675.000,00	-	14.675.000,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	-				-	-	-
14	KECAMATAN JETIS	-				-	-	-
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	24.000.000,00	24.000.000,00			24.000.000,00	-	24.000.000,00
16	KECAMATAN DANUREJAN	-				-	-	-
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-				-	-	-
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-				-	-	-
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-				-	-	-
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-				-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIJERON	-				-	-	-
22	KECAMATAN KRATON	-				-	-	-
23	KECAMATAN GONDONANAN	-				-	-	-
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-				-	-	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-				-	-	-
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-				-	-	-
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-				-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	-				-	-	-
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-				-	-	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-				-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-				-	-	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-				-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	298.689.800,00	298.689.800,00			298.689.800,00	-	298.689.800,00
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.500.000,00	16.500.000,00			16.500.000,00	-	16.500.000,00
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-				-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	142.007.500,00	142.007.500,00			142.007.500,00	-	142.007.500,00
37	DINAS PARIWISATA	1.643.272.900,00	1.643.272.900,00			1.643.272.900,00	-	1.643.272.900,00
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	163.352.000,00	163.352.000,00			163.352.000,00	-	163.352.000,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	79.090.000,00	79.090.000,00			79.090.000,00	-	79.090.000,00
41	SEKRETARIAT DPRD	69.795.000,00	69.795.000,00			69.795.000,00	-	69.795.000,00
42	INSPEKTORAT	-				-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-				-	-	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	-				-	-	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-				-	-	-
	JUMLAH	30.954.928.640,38	30.954.928.640,38	-	7.431.555.764,87	23.523.372.875,51	-	23.523.372.875,51

DAFTAR PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH KRATON

NO	PERUNTUKAN TANAH	LUAS (M2)	ALAMAT	NOMOR PERJANJIAN	KETERANGAN
1	Kant. Kec. Kraton	1.184	Jl. Rotowijayan 6 Yk	003.B/HT/KPK/2014	
2	Pusk. Kraton	590	Musikanan Kec. Kraton	013.B/HT/KPK/2014	
3	Kant. Kec, KUA, dan Koramil	2.836	Jl. Jlagran Lor 52 Yk	002.B/HT/KPK/2014	
4	Puskesmas Gedongtengen	1.090	Jl. Pringgokusuman 30 Yk	014.B/HT/KPK/2014	
5	Kant. Kec. Ngampilan	1.523	Jl. KH.Wakhid Hasim	015.B/HT/KPK/2014	
6	Puskesmas Ngampilan	347	Serangan NG II/125 Yk	011.B/HT/KPK/2014	
7	Kant.Kec.& Pusk. Jetis	3.459	Jl. Diponegoro 91 Yk	010.B/HT/KPK/2014	
8	Pusk. Pemb.Joyonegaran	103	Joyonegaran Yk	017.B/HT/KPK/2014	
9	Pusk. Pembt. Badran	211	Jl.Tentara Rakyat Mataram No. 11 Yk	007.B/HT/KPK/2014	
10	Pusk. Mergangsan (RS. Pratama)	3.775	Jl. Kol. Sugiyono 98 Yk.	008.B/HT/KPK/2014	
11	Kant.Kec.Pusk.Pembt.dan	1.986	Jl. Munggur 32 Yk	018.B/HT/KPK/2014	
12	Kant. Kec. Kotagede	2.252	Jl. Wijadisoro 39 Yk	007.B/HT/KPK/2014	
13	SLTP. Negeri 12 Yk	4.487	Jl. Tentara Pelajar	005.B/HT/KPK/2014	
14	Gedung Serba Guna	340	Kel. Purwokinanti Yk.	004.B/HT/KPK/2014	
15	Kant. Kel. Notoprajan	584	Jl. KH. Wakhid Hasyim Yk	033.B/HT/KPK/2012	
16	Pasar Ngasem	7.125	Kel. Patehan	019.B/HT/KPK/2019	
17	Pasar Pingit	3.155	Jl. Kyai Mojo Kel. Bumijo	018.B/HT/KPK/2016	
18	SLTP Negeri 4 Yk	3.890	Jl. Hayam Wuruk No. 18 Yk	024.B/HT/KPK/2016	
19	Kantor Lurah Kadipaten	432	Kadipaten Kidul	034.B/HT/KPK/2012	
20	Kantor Lurah Gowongan	362	Gowongan Lor Jt III/210 Yk	025.B/HT/KPK/2016	
21	Rumah Dinas Camat Ngampilan	370	Gendingan Kel. Notoprajan	023.B/HT/KPK/2016	
22	Kantor BTKL	3.847	Taman Jl. Polowijan Kel. Patehan	022.B/HT/KPK/2016	
23	Kantor KUA Ngampilan	221	Jl. KH. Wachid Hasyim	021.B/HT/KPK/2016	
24	Lapangan Olah Raga Pakel	7.579	Pakel Kel. Sorosutan	020.B/HT/KPK/2016	
25	Lap. Olah Raga Karangwaru	10.222	Karangwaru Lor	028.B/HT/KPK/2016	
26	Depo Sampah Baciro	1.570	Baciro Kel. Semaki	029.B/HT/KPK/2016	
27	Kantor Lurah Brontokusuman	280	Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yk	027.B/HT/KPK/2016	
28	Kantor Lurah Patehan	218	Taman Kel. Patehan	017.B/HT/KPK/2018	
29	Dinas Lingkungan Hidup	4.355	Jl. Bimasakti No. 1 Kel. Demangan	038.B/HT/KPK/2016	
30	Ex Stasiun Dongkelan	280	Jl. Bantul Km.4 Kel. Gedongkiwo	035.B/HT/KPK/2016	
31	SD. Sosrowijayan	2.047	Jl. Sosrowijayan No. 21 Yk	037.B/HT/KPK/2016	
32	SMP Negeri 16 Yk	5.516	Taman Kel. Patehan	043.B/HT/KPK/2016	
33	Terminal Parkir Ngabean	5.503	Ngabean Kel. Notoprajan	034.B/HT/KPK/2016	

DAFTAR PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH KRATON

34	Kantor Lurah Purbayan	2.157	Jl. Kemasan No. 39 A Kel. Purbayan	040.B/HT/KPK/2016	
35	Pasar Patuk	2.412	Jl. Bayangkara Kel. Ngupasan	042.B/HT/KPK/2016	
36	Pasar Serangan	4.403	Jl. RE. Martadinata Kel. Pakuncen	039.B/HT/KPK/2016	
37	Lapangan Karang	10.021	Kel. Prenggan	041.B/HT/KPK/2016	
38	Puskesmas. Danurejan	1.083	Jl. Krasak Kel. Bausasran	036.B/HT/KPK/2016	
39	Balai Pertemuan Bangirejo	454	Kel. Karangwaru	012.B/HT/KPK/2017	
40	Puskesmas Nitikan	941	Kel. Sorosutan	011.B/HT/KPK/2017	
41	Puskesmas Gondokusuman II	419	Kel. Terban	010.B/HT/KPK/2017	
42	Puskesmas Pakel Baru	237	Kel. Sorosutan	009.B/HT/KPK/2017	
43	SD. Karangayar	1.032	Kel. Brontokusuman	013.B/HT/KPK/2017	
44	SD. Kintelan II	925	Kel. Keparakan	005.B/HT/KPK/2017	
45	Balai Serbaguna Mergangsan	766	Kel Wirogunan	016.B/HT/KPK/2017	
46	SD N Keputran I, IV, VII	3,031	Kel Panembahan	002.B/HT/KPK/2017	
47	SD N Sagan	898	Kel Terban	015.B/HT/KPK/2017	
48	SD N Sapen	1.098	Kel Demangan	014.B/HT/KPK/2017	
49	Pasar Senen	2,091	Kel Ngampilan	0346/HT/KPK/2007	
50	SD N. Kraton	742	Kadipaten	006.B/HT/KPK/2017	
51	SD N Keputran VIII, X, XI	2,995	Kel Patehan	003.B/HT/KPK/2017	
52	SD N Keputran II, V, IX	2,905	Kel Patehan	007.B/HT/KPK/2017	
53	Balai RW & TK Tompeyan	833	Kel Tegalrejo	008.B/HT/KPK/2017	
54	Taman Parkir dan Kios Senopati	4.647	Jl. P Senopati	030.B/HT/KPK/2016	
55	Kel Mantrijeron	524	Kel Mantrijeron	021.B/HT/KPK/2018	
56	SMP N 15	12.703	Kel. Bausasran	018.B/HT/KPK/2018	
57	SD N Widoro	1.645	Kel. Tegalpanggung	014.B/HT/KPK/2018	
58	Balai RW I, II, III Panembahan	339	Kel. Panembahan	015.B/HT/KPK/2018	
59	SMP N 5	14.852	Kel. Kotabaru	004.B/HT/KPK/2017	
60	Karantina Anjing dan Polsek	562	Kel. Mantrijeron	016.B/HT/KPK/2020	
61	Kantor Sektor Sampah Krasak	179	Kel. Kotabaru	07.B/HT/KPK/2020	
62	SMP Negeri 6	6.282	Kel. Cokrodiningratan	12.B/HT/KPK/2019	
63	Kantor Kel Terban dan	894	Kel. Terban	11.B/HT/KPK/2019	
	Tempat Parkir Kel Terban	550	Kel. Terban		
64	Pustu Patuk	132	Kel. Ngampilan	08.B/HT/KPK/2019	
65	Rumah Dinas Puskesmas	315	Kel. Bumijo	09.B/HT/KPK/2019	
66	Kantor Sektor Sampah Jlagran	496	Kel. Pringgokusuman	10.B/HT/kpk/2019	
67	Depo sampah Jl. Bribjen katamso	132	Kel. Keparakan	06.B/HT/KPK/2020	
68	Puskesmas Gondomanan	477	Kel. Prawirodirjan	07.B/HT/KPK/2019	
69	SD. Serangan	1.567	Kel. Notoprajan	14.B/HT/KPK/2019	

DAFTAR PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH KRATON

70	SD. Klitren	870	Kel. Klitren	15.B/HT/KPK/2019	
71	SD. Gondolayu	2.363	Kel. Cokrodiningratan	006.B/HT/KPK/2019	
72	Kantor Arsip dan Puskesmas	4.214	Kel. Ngampilan	13.B/HT/KPK/2019	
73	Panti Asuhan/Sosial	11.651	Kel Gowongan	006.B/HT/KPK/2011	
74	TK Balai Serbaguna (Pingit Lor)	520	Kel Bumijo	004.B/HT/KPK/2011	
75	Wisma PSIM	5100	Kel Semaki	005.B/HT/KPK/2011	
76	TPA (tempat penitipan anak)	636	Kel Ngupasan	003.B/HT/KPK/2011	
77	Depo sampah/Taman (Jlagran)	775	Kel Pringgokusuman	26.B/HT/KPK/2010	
78	Kantor kel Wirogunan Lama	329	Kel Wirogunan	20.B/HT/KPK/2018	
79	Pasar Beringharjo	26.645	Kel Ngupasan	036.B/HT/KPK/2012	
80	Pasar Kotagede	6.093	Kel Purbayan	034.B/HT/KPK/2012	
81	Eks SD Kadipaten	683	Kel Patehan	035.B/HT/KPK/2012	
82	SMP Negeri 3	5.841	Kel Sosromenduran	032.B/HT/KPK/2012	
83	TK Dharma Rini	1.167	Kel Klitren	016.B/HT/KPK/2014	
84	Kantor Kel Pandeyan	1.783	Kel,Pandeyan	048,B/HT/KPK/2018	
85	Balai RW Wirogunan	264	Kel. Wirogunan	002,B/HT/KPK/2018	
86	RTHP Kadipaten	570	Kel .Kadipaten	003,B/HT/KPK/2018	
87	Kantor RW Keparakan	93	Kel.Keparakan	004,B/HT/KPK/2018	
88	Gedung Paud dan RTHP Mujamuju	918	Kel. Mujamuju	047,B/HT/KPK/2018	
89	Balai RW Tegalpanggung	213	Kel. Tegalpanggung	17,B/HT/KPK/2019	
90	UPT Pendiidkan Non Formal	1.040	Kel Baciro	016,B/HT/KPK/2019	
91	Kantor Pemadam Kebakaran	611	Kel Ngupasan	018,B/HT/KPK/2020	
92	Balai Serbaguna dan TK Prawirodirjan (TK Mekarsari)	682	Kel Prawirodirjan	038,B/HT/KPK/2017	
93	Kantor Kecamatan Gondomanan	800	Kel Prawirodirjan	05,B/HT/KPK/2019	
94	Balai RW 07 Baciro	345	Kel Baciro	15,B/HT/KPK/2020	
95	Fasilitas Umum (Lapangan Olah Raga) Surokarsan	388	Kel Wirogunan	017,B/HT/KPK/2020	
96	Pengembangan SMP N 1	3.573	Kel Terban	021,B/HT/KPK/2020	
97	Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat Mergangsan	3.062	Kel Brontokusuman	022,B/HT/KPK/2020	
98	Fasilitas umum rumah susun	374	Kel Mujamuju	028,B/HT/KPK/2020	
99	RS Pratama	1.860	Kel Brontokusuman	029,B/HT/KPK/2020	

MUTASI TOTAL ASET PER SKPD TAHUN 2020

halaman 1

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			
			PENAMBAHAN BARU	PENAMBAHAN NILAI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	PENGURANGAN NILAI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI
1	DINAS PENDIDIKAN	422.308.585.437,24	29.677.842.132,99	2.387.217.614,02	317.892.689,96	-	3.242.728.234,54	318.864.967,00	-	9.980.966.172,57
2	DINAS KESEHATAN	207.174.342.142,84	6.686.619.754,00	591.460.450,00	-	-	1.326.424.541,97	-	1.986.649.221,31	4.401.574.027,71
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	220.130.722.635,43	22.757.782.401,20	4.071.841.139,00	9.031.542,50	34.987.900,00	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	2.389.645.642.757,83	76.709.609.582,69	20.622.730.924,74	18.330.000,00	6.250.000,00	255.387.156,75	-	6.147.043.093,82	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.869.392.379,45	490.312.585,00	-	651.151.583,12	-	147.250.000,00	-	171.728.584,24	-
6	DINAS KEBAKARAN	28.120.238.117,31	25.343.280,00	165.636.726,62	1.015.000,00	698.962.366,50	629.477.751,38	-	355.837.675,22	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.178.138.289,30	3.997.791.500,00	340.114.069,22	-	6.477.607,29	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	10.309.623.515,85	344.133.000,00	179.511.900,00	241.024.774,52	41.480.905,77	190.783.000,00	-	-	17.633.682,41
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	3.509.742.343,65	445.675.000,00	147.483.101,53	3.113.681.829,07	-	1.275.000,00	-	-	768.500,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.311.536.659.852,50	19.601.791.670,37	169.533.346,78	10.700.000,00	22.454.565,11	31.941.167.919,64	-	69.956.381.363,00	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80.898.600.153,94	751.903.942,60	226.728.818,40	-	-	3.241.652.905,74	-	335.328.563,95	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.042.361.991,98	48.365.000,00	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00
13	KECAMATAN TEGALREJO	8.142.261.125,23	569.786.763,05	138.057.236,97	-	21.089.727,31	8.790.000,00	-	-	41.192.164,61
14	KECAMATAN JETIS	5.884.721.946,02	1.530.612.122,87	119.786.000,00	-	7.529.582,41	-	-	9.099.727,34	3.713.345,92
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	11.332.790.397,69	1.032.983.046,77	54.485.000,00	-	475.000,00	7.000.000,00	-	-	83.520.472,13
16	KECAMATAN DANUREJAN	6.933.655.286,06	585.020.373,40	6.475.000,00	-	19.743.934,76	-	-	11.420.692,63	22.464.900,00
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	4.907.021.307,52	219.802.679,75	462.265.000,01	1.696.000,00	3.496.117,91	-	-	-	63.353.012,13
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	3.850.456.321,05	137.561.800,00	-	2.865.842.070,75	17.996.661,66	4.509.400,00	-	-	40.371.380,68
19	KECAMATAN NGAMPILAN	5.589.559.470,17	510.986.582,24	-	-	-	10.000.000,00	-	-	14.330.647,75
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	5.804.530.098,99	1.055.830.480,99	-	-	37.723.828,02	8.899.000,00	-	-	-
21	KECAMATAN MANTRIHERON	5.779.961.083,74	605.920.800,00	247.727.000,00	-	-	2.324.000,00	-	9.000.000,00	40.048.874,81
22	KECAMATAN KRATON	6.195.184.732,71	557.734.034,40	-	-	25.790.344,09	21.602.400,00	-	-	950.000,00
23	KECAMATAN GONDOMANAN	5.263.900.862,70	493.777.206,64	-	-	7.412.287,34	-	-	-	26.638.692,83
24	KECAMATAN MERGANGSAN	7.941.110.033,68	620.895.096,41	-	-	41.936.051,17	-	-	182.109.120,74	-
25	KECAMATAN UMBULHARJO	22.042.764.390,85	1.551.366.696,69	168.236.963,05	167.969.194,00	122.600,00	76.157.627,78	-	-	155.029.901,55
26	KECAMATAN KOTAGEDE	9.506.683.070,17	624.077.698,14	26.408.100,00	-	8.400.000,00	11.460.000,00	-	-	61.333.256,28
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.074.038.871,13	387.740.000,00	-	-	27.288.353,94	40.306.466,37	-	-	-
28	DINAS PERHUBUNGAN	61.640.074.265,32	1.121.596.101,02	-	11.420.692,63	458.117.795,00	85.000.000,00	-	53.724.774,52	317.166.944,56
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	51.633.100.404,36	484.081.049,15	440.265.875,25	1.600.000,00	59.034.727,28	1.077.971.714,52	-	689.700.000,00	-
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN PELAKSIAN	2.843.641.098,51	23.950.000,00	-	138.000.000,00	-	65.000.000,00	-	-	-
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	20.303.179.066,76	148.050.000,00	-	-	72.164.012,73	136.448.733,27	-	9.540.000,00	-
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.005.123.167,16	-	3.090.750,00	23.110.000,00	-	3.090.750,00	-	-	-
33	DINAS KEBUDAYAAN	3.016.896.237,77	133.934.000,00	68.885.000,00	-	118.541.814,17	1.403.508,97	-	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.830.364.695,18	541.465.129,79	111.790.029,46	309.650.000,00	56.593.992,22	231.531.795,52	82.219.495,92	-	-
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	691.751.376,75	140.135.160,00	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16.870.033.200,47	438.231.100,00	62.325.000,00	17.435.873,99	277.850.000,00	66.473.100,00	-	-	-
37	DINAS PARIWISATA	84.157.822.305,73	12.939.349.191,87	76.105.100,00	135.227.498,55	33.088.381,79	2.964.704.293,72	-	-	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	162.077.123.202,99	820.221.700,60	447.962.000,00	122.350.000,00	59.980.331,12	244.048.000,00	-	-	3.914.868.639,77
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.465.340.883,41	337.567.300,00	3.283.800,00	-	-	18.208.345,88	-	-	-
40	SEKRETARIAT DAERAH	55.757.731.354,11	1.117.003.727,36	604.380.783,14	461.000.000,00	377.205.734,07	1.191.506.380,26	945.900,00	1.045.335.147,71	-
41	SEKRETARIAT DPRD	21.312.538.834,28	1.262.042.200,00	-	-	276.467.237,60	-	-	-	-
42	INSPEKTORAT	9.743.118.536,14	81.418.000,00	-	-	29.502.034,52	25.007.967,46	-	-	-
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.843.088.335,46	1.265.498.750,00	346.248.000,00	-	-	460.156.927,91	-	17.969.150,75	-
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	633.896.915.431,86	79.641.186.264,70	35.540.248,91	72.610.849.243,78	4.814.682,29	1.978.063.577,35	1.823.000.000,00	1.449.141.613,28	-
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.397.015.600,28	8.930.500,00	8.500.000,00	1.215.579.075,94	-	19.700.000,00	-	-	-
	JUMLAH	5.980.457.546.611,59	272.525.925.404,70	32.334.074.977,10	82.444.557.068,81	2.852.978.576,07	49.735.510.499,05	2.225.030.362,92	82.430.008.728,51	19.187.174.615,70

NO	NAMA SKPD			KOREKSI		SALDO AKHIR UNAUDITED	EKSTRAKOMP	ASET TETAP UNAUDITED
		SALDO AKHIR	CEK SIMBADA	KURANG CATAT	LEBIH CATAT			
1	DINAS PENDIDIKAN	441.148.978.500,10	441.148.978.500,10	-	-	441.148.978.500,10	10.077.020.360,10	431.071.958.140,00
2	DINAS KESEHATAN	206.737.774.555,85	206.737.774.555,85	-	-	206.737.774.555,85	1.096.201.941,86	205.641.572.613,99
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	247.004.365.618,13	247.004.365.618,13	-	-	247.004.365.618,13	374.204.451,90	246.630.161.166,23
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKAAN	2.480.600.133.014,69	2.480.600.133.014,71	7.581.555.764,87	8.059.592.831,79	2.480.122.095.947,77	58.530.011.246,79	2.421.592.084.700,98
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.691.877.963,33	10.691.877.963,33	-	-	10.691.877.963,33	64.603.533,71	10.627.274.429,62
6	DINAS KEBAKARAN	28.025.880.063,83	28.025.880.063,83	-	-	28.025.880.063,83	24.154.075,55	28.001.725.988,28
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.522.521.465,81	17.522.521.465,81	-	1.680.000,00	17.520.841.465,81	53.747.877,45	17.467.093.588,36
8	DINAS SOSIAL	10.907.357.413,73	10.907.357.413,73	4.000.000,00	-	10.911.357.413,73	134.817.652,03	10.776.539.761,70
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	7.214.538.774,25	7.214.538.774,25	-	-	7.214.538.774,25	69.443.103,70	7.145.095.670,55
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.229.443.590.152,12	1.229.443.590.152,12	-	-	1.229.443.590.152,12	37.803.781,93	1.229.405.786.370,19
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78.300.251.445,25	78.300.251.445,25	-	-	78.300.251.445,25	6.002.703.505,92	72.297.547.939,33
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.089.476.991,98	11.089.476.991,98	-	-	11.089.476.991,98	54.088.331,56	11.035.388.660,42
13	KECAMATAN TEGALREJO	8.821.212.687,95	8.821.212.687,95	-	-	8.821.212.687,95	150.263.349,54	8.670.949.338,41
14	KECAMATAN JETIS	7.529.836.578,04	7.529.836.578,04	-	-	7.529.836.578,04	89.522.457,93	7.440.314.120,11
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	12.330.212.972,33	12.330.212.972,33	-	-	12.330.212.972,33	130.989.893,06	12.199.223.079,27
16	KECAMATAN DANUREJAN	7.511.009.001,59	7.511.009.001,59	-	-	7.511.009.001,59	136.935.613,67	7.374.073.387,92
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	5.530.928.093,06	5.530.928.093,06	-	-	5.530.928.093,06	68.097.400,25	5.462.830.692,81
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	6.826.976.072,78	6.826.976.072,78	-	-	6.826.976.072,78	183.349.413,13	6.643.626.659,65
19	KECAMATAN NGAMPILAN	6.076.215.404,66	6.076.215.404,66	-	-	6.076.215.404,66	66.884.517,41	6.009.330.887,25
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	6.889.185.408,00	6.889.185.408,00	-	-	6.889.185.408,00	157.252.297,19	6.731.933.110,81
21	KECAMATAN MANTRIJERON	6.582.236.008,93	6.582.236.008,93	-	-	6.582.236.008,93	73.323.475,28	6.508.912.533,65
22	KECAMATAN KRATON	6.756.156.711,20	6.756.156.711,20	-	-	6.756.156.711,20	90.465.731,34	6.665.690.979,86
23	KECAMATAN GONDOMANAN	5.738.451.663,85	5.738.451.663,85	-	-	5.738.451.663,85	155.223.439,79	5.583.228.224,06
24	KECAMATAN MERGANGSAN	8.421.832.060,52	8.421.832.060,52	-	-	8.421.832.060,52	127.227.154,09	8.294.604.906,43
25	KECAMATAN UMBULHARJO	23.699.272.315,26	23.699.272.315,26	-	-	23.699.272.315,26	187.867.242,15	23.511.405.073,11
26	KECAMATAN KOTAGEDE	10.092.775.612,03	10.092.775.612,03	-	-	10.092.775.612,03	244.075.660,41	9.848.699.951,62
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.448.760.758,70	5.448.760.758,70	-	-	5.448.760.758,70	104.098.342,03	5.344.662.416,67
28	DINAS PERHUBUNGAN	62.775.317.134,89	62.775.317.134,89	-	-	62.775.317.134,89	9.932.698.344,09	52.842.618.790,80
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	50.850.410.341,52	50.850.410.341,52	-	-	50.850.410.341,52	129.539.133,20	50.720.871.208,32
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN KEMAHASISWAAN	2.940.591.098,51	2.940.591.098,51	-	-	2.940.591.098,51	58.893.556,42	2.881.697.542,09
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	20.377.404.346,22	20.377.404.346,22	-	-	20.377.404.346,22	21.497.413,48	20.355.906.932,74
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.028.233.167,16	2.028.233.167,16	-	-	2.028.233.167,16	20.802.888,23	2.007.430.278,93
33	DINAS KEBUDAYAAN	3.336.853.542,97	3.336.853.542,97	-	-	3.336.853.542,97	21.981.162,13	3.314.872.380,84
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.536.112.555,21	14.536.112.555,21	-	-	14.536.112.555,21	88.772.838,06	14.447.339.717,15
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	831.886.536,75	831.886.536,75	-	-	831.886.536,75	18.216.653,15	813.669.883,60
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17.599.402.074,46	17.599.402.074,46	-	-	17.599.402.074,46	292.832.280,71	17.306.569.793,75
37	DINAS PARIWISATA	94.376.888.184,22	94.376.888.184,22	132.252.000,00	2.499.750,00	94.506.640.434,22	65.492.242,30	94.441.148.191,92
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	159.368.720.594,94	159.368.720.594,94	6.050.000,00	-	159.374.770.594,94	230.351.786,47	159.144.418.808,47
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.787.983.637,53	3.787.983.637,53	-	-	3.787.983.637,53	34.783.214,32	3.753.200.423,21
40	SEKRETARIAT DAERAH	56.079.534.170,71	56.079.534.170,71	-	4.207.000,00	56.075.327.170,71	590.221.161,49	55.485.106.009,22
41	SEKRETARIAT DPRD	22.851.048.271,88	22.851.048.271,88	-	-	22.851.048.271,88	78.775.065,92	22.772.273.205,96
42	INSPEKTORAT	9.829.030.603,20	9.829.030.603,20	-	-	9.829.030.603,20	33.502.656,56	9.795.527.946,64
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.976.709.006,80	4.976.709.006,80	-	-	4.976.709.006,80	29.645.617,20	4.947.063.389,60
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	780.939.100.680,91	780.939.100.680,91	-	-	780.939.100.680,91	123.291.712,98	780.815.808.967,93
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.610.325.176,22	12.610.325.176,22	-	-	12.610.325.176,22	188.788.090,19	12.421.537.086,03
	JUMLAH	6.217.037.358.432,09	6.217.037.358.432,10	7.723.857.764,87	8.067.979.581,79	6.216.693.236.615,17	90.444.461.666,67	6.126.248.774.948,50

**REKAPITULASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	-	131.261.186.452,60	278.473.526.477,44	365.703.189,96	31.009.619.532,82	38.942.847,28	441.148.978.500,10
2	DINAS KESEHATAN	-	100.060.603.052,66	106.278.334.034,77	144.475.901,93	254.361.566,50	-	206.737.774.555,85
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	218.298.329.619,76	28.146.256.668,37	531.825.230,00	27.954.100,00	-	247.004.365.618,13
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	21.689.058.697,41	297.352.267.722,76	2.140.199.154.793,17	1.480.708.956,20	19.400.905.778,23	2.480.122.095.947,77
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	8.416.735.410,29	2.271.538.353,04	-	3.604.200,00	-	10.691.877.963,33
6	DINAS KEBAKARAN	-	19.448.006.763,46	2.783.571.968,52	4.854.405.206,85	903.625,00	938.992.500,00	28.025.880.063,83
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	12.773.096.616,19	1.036.786.090,00	3.614.421.469,62	2.137.290,00	94.400.000,00	17.520.841.465,81
8	DINAS SOSIAL	-	5.954.071.943,84	4.932.813.629,89	-	24.471.840,00	-	10.911.357.413,73
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3.521.087.278,63	3.666.712.545,62	-	26.738.950,00	-	7.214.538.774,25
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.223.680.744.643,00	2.778.693.145,70	2.887.884.712,42	-	96.267.651,00	-	1.229.443.590.152,12
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	41.874.726.064,74	30.588.768.265,98	3.003.599.595,05	2.234.407.969,47	598.749.550,00	78.300.251.445,25
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.236.710.785,48	1.832.536.706,50	-	5.554.500,00	14.675.000,00	11.089.476.991,98
13	KECAMATAN TEGALREJO	-	2.511.619.569,61	4.983.699.444,51	905.284.338,51	420.609.335,32	-	8.821.212.687,95
14	KECAMATAN JETIS	-	2.054.144.511,50	4.039.743.198,65	1.389.619.863,35	46.329.004,54	-	7.529.836.578,04
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	-	2.001.032.306,99	8.161.338.619,06	1.997.009.173,56	146.832.872,72	24.000.000,00	12.330.212.972,33
16	KECAMATAN DANUREJAN	-	1.769.712.171,67	5.186.207.085,35	514.327.040,03	40.762.704,54	-	7.511.009.001,59
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	-	1.534.786.663,11	3.051.451.544,60	759.466.248,99	185.223.636,36	-	5.530.928.093,06
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	-	1.947.671.441,32	4.568.016.995,10	284.454.000,00	26.833.636,36	-	6.826.976.072,78
19	KECAMATAN NGAMPILAN	-	1.271.941.318,27	3.724.760.518,49	883.264.116,54	196.249.451,36	-	6.076.215.404,66
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	-	1.532.959.325,86	3.842.441.336,43	1.317.839.604,22	195.945.141,49	-	6.889.185.408,00
21	KECAMATAN MANTRIHERON	-	1.756.935.332,85	3.421.476.306,86	1.188.976.327,73	214.848.041,49	-	6.582.236.008,93
22	KECAMATAN KRATON	-	1.503.947.285,88	3.959.191.370,86	1.250.892.299,92	42.125.754,54	-	6.756.156.711,20
23	KECAMATAN GANDOMANAN	-	1.578.902.769,73	3.371.075.457,76	599.404.750,00	189.068.686,36	-	5.738.451.663,85
24	KECAMATAN MERGANGSAN	-	2.206.704.029,01	4.736.541.945,70	1.268.664.549,32	209.921.536,49	-	8.421.832.060,52
25	KECAMATAN UMBULHARJO	-	3.267.223.415,91	17.490.143.958,24	2.792.087.244,30	149.817.696,81	-	23.699.272.315,26
26	KECAMATAN KOTAGEDE	-	1.842.861.267,46	7.902.067.534,94	273.843.118,14	74.003.691,49	-	10.092.775.612,03
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	4.253.158.733,74	1.194.196.999,96	-	1.405.025,00	-	5.448.760.758,70
28	DINAS PERHUBUNGAN	-	16.936.179.721,86	45.202.404.896,56	582.111.320,01	54.621.196,46	-	62.775.317.134,89
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	42.472.392.938,58	7.913.178.527,68	449.629.243,26	15.209.632,00	-	50.850.410.341,52
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	2.788.357.998,51	-	-	152.233.100,00	-	2.940.591.098,51
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	-	5.100.051.365,73	15.275.250.280,49	-	2.102.700,00	-	20.377.404.346,22
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	1.705.845.167,16	313.413.000,00	-	8.975.000,00	-	2.028.233.167,16
33	DINAS KEBUDAYAAN	-	1.824.554.037,47	1.136.459.705,50	-	77.150.000,00	298.689.800,00	3.336.853.542,97
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	7.934.600.360,69	4.207.456.924,44	-	2.377.555.270,08	16.500.000,00	14.536.112.555,21
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	-	830.539.736,75	-	-	1.346.800,00	-	831.886.536,75
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	7.969.825.227,46	8.881.348.470,29	570.920.376,71	35.300.500,00	142.007.500,00	17.599.402.074,46
37	DINAS PARIWISATA	-	34.353.794.361,98	53.840.303.915,91	3.591.406.489,87	1.077.862.766,46	1.643.272.900,00	94.506.640.434,22
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	28.554.649.186,99	130.114.172.056,82	391.570.451,13	151.026.900,00	163.352.000,00	159.374.770.594,94
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.063.439.214,53	715.563.000,00	-	8.981.423,00	-	3.787.983.637,53
40	SEKRETARIAT DAERAH	-	25.185.083.016,36	30.514.536.872,55	-	296.617.281,80	79.090.000,00	56.075.327.170,71
41	SEKRETARIAT DPRD	-	13.540.451.153,91	8.996.784.097,96	-	244.018.020,01	69.795.000,00	22.851.048.271,88
42	INSPEKTORAT	-	2.768.824.412,72	7.041.057.050,48	-	19.149.140,00	-	9.829.030.603,20
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	3.678.660.451,01	1.280.461.805,79	-	17.586.750,00	-	4.976.709.006,80
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	682.563.550.546,22	6.539.488.222,10	45.256.748.215,59	46.248.348.697,00	330.965.000,00	-	780.939.100.680,91
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	9.669.815.415,79	2.937.251.260,43	-	3.258.500,00	-	12.610.325.176,22
	JUMLAH TOTAL	1.906.244.295.189,22	821.262.457.963,29	1.203.509.739.572,31	2.219.972.704.639,17	42.180.666.375,67	23.523.372.875,51	6.216.693.236.615,17

NO	NAMA SKPD	EKSTRAKOMP	ASET TETAP AUDITED	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	DINAS PENDIDIKAN	10.077.020.360,10	431.071.958.140,00	17.905.760.389,61	197.853.334.308,38	233.218.623.831,62
2	DINAS KESEHATAN	1.096.201.941,86	205.641.572.613,99	12.925.536.920,57	95.383.109.534,70	110.258.463.079,29
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	374.204.451,90	246.630.161.166,23	34.372.261.902,87	169.521.232.266,89	77.108.928.899,34
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.530.011.246,79	2.421.592.084.700,98	40.670.518.073,80	1.825.169.718.405,09	596.422.366.295,89
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64.603.533,71	10.627.274.429,62	886.003.096,89	7.169.352.157,47	3.457.922.272,15
6	DINAS KEBAKARAN	24.154.075,55	28.001.725.988,28	1.230.347.430,57	17.801.617.385,82	10.200.108.602,46
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53.747.877,45	17.467.093.588,36	2.393.252.457,03	7.345.737.623,91	10.121.355.964,45
8	DINAS SOSIAL	134.817.652,03	10.776.539.761,70	646.105.071,15	6.290.579.571,56	4.485.960.190,14
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	69.443.103,70	7.145.095.670,55	494.741.786,15	2.285.865.809,29	4.859.229.861,25
10	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	37.803.781,93	1.229.405.786.370,19	351.115.265,17	3.342.659.544,79	1.226.063.126.825,40
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.002.703.505,92	72.297.547.939,33	4.662.319.400,30	36.215.141.927,68	36.082.406.011,65
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	54.088.331,56	11.035.388.660,42	816.849.113,82	8.494.287.624,17	2.541.101.036,25
13	KECAMATAN TEGALREJO	150.263.349,54	8.670.949.338,41	409.932.660,38	2.640.485.142,10	6.030.464.196,31
14	KECAMATAN JETIS	89.522.457,93	7.440.314.120,11	428.105.741,59	2.424.857.220,02	5.015.456.900,09
15	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	130.989.893,06	12.199.223.079,27	533.828.446,12	3.004.241.131,65	9.194.981.947,62
16	KECAMATAN DANUREJAN	136.935.613,67	7.374.073.387,92	317.465.535,43	2.963.284.861,89	4.410.788.526,04
17	KECAMATAN GEDONGTENGEN	68.097.400,25	5.462.830.692,81	282.195.204,56	2.845.747.241,45	2.617.083.451,36
18	KECAMATAN PAKUALAMAN	183.349.413,13	6.643.626.659,65	391.785.716,69	1.980.398.584,28	4.663.228.075,37
19	KECAMATAN NGAMPILAN	66.884.517,41	6.009.330.887,25	278.514.771,65	2.122.869.582,45	3.886.461.304,80
20	KECAMATAN WIROBRAJAN	157.252.297,19	6.731.933.110,81	350.268.441,28	1.971.721.286,85	4.760.211.823,97
21	KECAMATAN MANTRIJERON	73.323.475,28	6.508.912.533,65	345.027.176,28	2.013.349.265,65	4.495.563.268,00
22	KECAMATAN KRATON	90.465.731,34	6.665.690.979,86	297.452.256,12	1.905.233.271,73	4.760.457.708,13
23	KECAMATAN GONDOMANAN	155.223.439,79	5.583.228.224,06	297.117.589,87	1.944.684.539,47	3.638.543.684,60
24	KECAMATAN MERGANGSAN	127.227.154,09	8.294.604.906,43	409.338.071,23	2.558.366.120,79	5.736.238.785,64
25	KECAMATAN UMBULHARJO	187.867.242,15	23.511.405.073,11	931.315.970,77	5.217.902.837,03	18.293.502.236,08
26	KECAMATAN KOTAGEDE	244.075.660,41	9.848.699.951,62	388.909.415,66	2.936.253.337,38	6.912.446.614,24
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	104.098.342,03	5.344.662.416,67	425.236.932,19	3.718.178.134,68	1.626.484.282,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	9.932.698.344,09	52.842.618.790,80	2.828.514.132,19	30.033.856.560,11	22.808.762.230,70
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	129.539.133,20	50.720.871.208,32	5.963.338.027,27	36.542.295.338,20	14.178.575.870,12
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	58.893.556,42	2.881.697.542,09	296.878.113,80	1.952.662.869,78	929.034.672,31
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	21.497.413,48	20.355.906.932,74	711.045.084,95	7.516.667.311,45	12.839.239.621,30
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	20.802.888,23	2.007.430.278,93	237.462.908,94	1.237.355.936,70	770.074.342,23
33	DINAS KEBUDAYAAN	21.981.162,13	3.314.872.380,84	216.932.605,85	1.627.646.581,02	1.687.225.799,81
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	88.772.838,06	14.447.339.717,15	920.763.644	6.749.611.527	7.697.728.189,89
35	KANTOR KESATUAN BANGSA	18.216.653,15	813.669.883,60	83.081.197	552.114.009	261.555.874,78
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.832.280,71	17.306.569.793,75	1.041.641.126,46	8.920.330.830,34	8.386.238.963,40
37	DINAS PARIWISATA	65.492.242,30	94.441.148.191,92	4.590.049.780,50	38.333.821.747,20	56.107.326.444,73
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	230.351.786,47	159.144.418.808,47	4.604.631.198,11	93.495.682.294,30	65.648.736.514,17
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34.783.214,32	3.753.200.423,21	441.486.049,84	2.333.079.279,30	1.420.121.143,91
40	SEKRETARIAT DAERAH	590.221.161,49	55.485.106.009,22	3.298.805.890,44	29.408.585.176,71	26.076.520.832,51
41	SEKRETARIAT DPRD	78.775.065,92	22.772.273.205,96	1425954984	12.549.806.681,32	10.222.466.524,64
42	INSPEKTORAT	33.502.656,56	9.795.527.946,64	455.261.719,59	2.923.608.909,45	6.871.919.037,19
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	29.645.617,20	4.947.063.389,60	588.437.315,18	2.394.988.336,83	2.552.075.052,77
44	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	123.291.712,98	780.815.808.967,93	1.824.526.956,83	46.655.732.157,20	734.160.076.810,73
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	188.788.090,19	12.421.537.086,03	839.417.386,55	9.193.230.379,32	3.228.306.706,71
	JUMLAH TOTAL	90.444.461.666,67	6.126.248.774.948,50	153.809.532.958,89	2.749.541.284.642,49	3.376.707.490.306,01

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PIUTANG TPTGR PER Per 31 Desember 2020

No	Nama	Jumlah Piutang	Jumlah	Penambahan	Pelunasan/	Saldo	Beban	Beban	Kualitas Piutang				Jumlah	
			0	1	Angsuran 2020	Per 31 Desember 2020	Tahun 2020	Tahun 2021 dst	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
I TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP):														
1	Ety Sugiyarti	Kehilangan kas Rp 94.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					-
	Bendahara BLH	diangsur 179 bln @ Rp 525.150,00												-
		mulai bln September '07												-
														-
II TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR):														
														-
														-
		Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,50%	10%	50%	100%	0%	
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-

Persentase penyesihan
 Penyesihan Tagihan Pemberian Pinjaman
 Tagihan Pemberian Pinjaman Netto

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ASET TAK BERWUJUD - SOFTWARE
Per 31 Desember 2020

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
1	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	SIM Pembelajaran Interaktif	Desember	2009	Software	44.005.000,00
2	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Website Perpustakaan	Desember	2011	Software	12.815.000,00
3	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Sirkulasi Perpustakaan	Desember	2011	Software	25.015.100,00
4	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Sim Tiket Elektrik	Desember	2012	Software	50.000.000,00
5	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Dubbing Film Planetarium	Juni	2012	Software	8.000.000,00
6	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software website Taman Pintar	Desember	2013	Software	51.950.000,00
7	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	SIM Pemasaran	Desember	2013	Software	43.400.000,00
8	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Ticketing	Oktober	2016	Software	112.925.938,00
9	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Sistem Otomatisasi Video 4D	Desember	2016	Software	37.073.810,00
10	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Redesign Website Taman Pintar	Desember	2017	Software	15.400.000,00
11	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Aplikasi Interaktif berbasis flash informasi tentang radia	Desember	2017	Software	52.665.800,00
12	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Komputer Animasi Mekanika Fluida	Mei	2019	Software	49.450.000,00
13	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Pengembangan Sistem E-Ticketing	September	2019	Software	24.200.000,00
14	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Software Coreldraw Graphics Suite 2019	Oktober	2019	Software	24.000.000,00
15	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Aplikasi SIM Sarana & Prasarana	Desember	2018	Software	49.797.000,00
16	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Aplikasi Interaktif Animasi Perkembangbiakan & Daur Hidup	Desember	2018	Software	49.350.000,00
17	Dinas Pariwisata	Software aplikasi e-booking kampung wisata	Desember	2020	Software	88.880.000,00
	Jumlah Dinas Pariwisata					738.927.648,00
18	RSUD	Software Aplikasi Program SIM RS	September	2010	Software	158.400.000,00
19	RSUD	Software Windows 8	Juli	2013	Software	33.535.600,00
20	RSUD	Website RSUD	November	2013	Software	5.300.000,00
21	RSUD	SIM Inventory Farmasi	Oktober	2013	Software	49.600.000,00
22	RSUD	Modul Aplikasi Touchsreen	November	2015	Software	15.007.631,00
23	RSUD	Modul Integrasi SIM RS BPJS	November	2015	Software	38.519.587,00
24	RSUD	Modul Jasa Medik	November	2015	Software	50.025.437,00
25	RSUD	Modul SMS Gateway	November	2015	Software	25.012.719,00
26	RSUD	Replikasi	November	2015	Software	7.503.816,00
27	RSUD	Modul SIM RS (SKM/BRM)	Oktober	2015	Software	25.012.719,00
28	RSUD	Modul Antrian	November	2015	Software	25.012.719,00
29	RSUD	Software modul pendaftaran dan laporan	Desember	2019	Software	16.500.000,00
30	RSUD	Software PACS	Desember	2019	Software	2.635.000.000,00
31	RSUD	SIM RS	Desember	2020	Software	395.825.000,00
	Jumlah RSUD					3.480.255.228,00
32	BAPPEDA	Aplikasi Software SIM Musrenbang	Desember	2011	Software	50.000.000,00
33	BAPPEDA	Penyempurnaan SIM Perencanaan Pembangunan	Desember	2012	Software	44.000.000,00
34	BAPPEDA	SIM RAPAT	Desember	2017	Software	17.210.500,00
35	BAPPEDA	SOFWARE LEMHANAS	Desember	2019	Software	36.296.126,82
	Jumlah Bappeda					147.506.626,82

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
36	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Arsip	-	2002	Software	9.080.000,00
37	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Capil	-	2002	Software	11.540.000,00
38	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Kepegawaian	-	2002	Software	13.380.000,00
39	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Monografi Kecamatan/Kelurahan	-	2004	Software	9.340.000,00
40	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Retribusi Kebersihan	-	2003	Software	23.975.000,00
41		SIM Retribusi Kebersihan	-	2020	Software	9.900.000,00
42	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM pelayanan Perijinan	-	2003	Software	11.519.000,00
43	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM IMBB	-	2003	Software	36.261.000,00
44	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Retribusi Assainering dan Pemakaman	-	2004	Software	47.767.500,00
45	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Pelayanan Perijinan	-	2005	Software	57.997.000,00
46	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Web Pelayanan Puskesmas	-	2005	Software	127.265.600,00
47	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pasar	-	2006	Software	237.072.000,00
48	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Perlengkapan (SIMKAP)	-	2007	Software	59.026.000,00
49	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Aplikasi Penggajian Berbasis Web	-	2008	Software	82.808.000,00
50	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Presensi Sidik Jari	-	2008	Software	46.090.000,00
51	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Kecamatan Berbasis Web	-	2008	Software	62.707.700,00
52	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM barang Daerah	-	2008	Software	38.401.000,00
53	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Database Pemerintahan Terpadu	-	2009	Software	72.853.000,00
54	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Web Service PBB	-	2009	Software	97.702.000,00
55	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Agenda Dewan	November	2012	Software	25.560.000,00
56	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Mapatda	Desember	2012	Software	94.500.000,00
57		SIM Mapatda	Oktober	2014	Software	48.559.500,00
58		Pengembangan SIM Mapatda	Desember	2015	Software	44.211.590,00
59		Pengembangan SIM Mapatda		2016	Software	47.498.000,00
60	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Perencanaan	-	0	Software	-
61	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software SIPKD	-	2008	Software	145.839.000,00
62	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pelaporan	Desember	2012	Software	6.200.000,00
63		Pengembangan SIM Pelaporan	Desember	2013	Software	19.387.000,00
64		Pengembangan SIM Pelaporan	November	2015	Software	9.900.000,00
65	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Mastercame	November	2013	Software	148.000.000,00
66	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Aplikasi Layanan Uji Kendaraan	November	2013	Software	23.520.000,00
67	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Aplikasi Eksekutif	Desember	2013	Software	22.248.000,00
68	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pengukuran Kinerja	November	2014	Software	49.747.500,00
69	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Anggaran	Desember	2014	Software	49.489.000,00
70	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Digilib	Desember	2014	Software	49.610.000,00
71	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SISMIOIP	Juni	2014	Software	9.900.000,00
72		Pengembangan SISMIOIP Modul Penetapan	Desember	2015	Software	9.900.000,00
73	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Monografi Kelurahan	Juli	2014	Software	9.900.000,00
74	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Samsucakep	Oktober	2014	Software	9.900.000,00
75		Pengembangan Samsucakep	April	2015	Software	9.900.000,00
76	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Assaenering	September	2014	Software	9.900.000,00
77	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Anjab	Desember	2014	Software	15.810.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
78	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Persediaan	Desember	2014	Software	18.480.000,00
79	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Wistle Blower Sistem Inspektorat	Desember	2014	Software	18.480.000,00
80	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Organisasi	Desember	2014	Software	18.480.000,00
81	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Freezy	Agustus	2014	Software	3.000.000,00
82	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Software Solidworks	November	2014	Software	140.000.000,00
83	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM Posyandu	April	2015	Software	9.900.000,00
84	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan/redesign KBS Online	April	2015	Software	9.900.000,00
85	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM dan Web Bag. Organisasi	September	2015	Software	9.900.000,00
86	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengadaan Aplikasi Video Streaming CCTV	Juli	2015	Software	46.035.000,00
87	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Redesign Web Dinas Pendidikan	Juli	2015	Software	49.775.000,00
88	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pemberdayaan Masyarakat	Oktober	2015	Software	31.625.000,00
89	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan Website Bag Hukum	November	2015	Software	9.900.000,00
90	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan Web Perhubungan	Oktober	2015	Software	38.802.500,00
91	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM UPT Logam	November	2015	Software	47.410.000,00
92	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Peserta KB	Desember	2015	Software	47.300.000,00
93	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SIM Pembangunan Sektoral	Desember	2015	Software	9.900.000,00
94	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIM Pemberdayaan Masyarakat Tahap II	Desember	2015	Software	50.862.600,00
95	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	SIPKD Modul Aset	Desember	2015	Software	53.380.700,00
96	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan SIM/Web BKD	Desember	2016	Software	49.258.000,00
97	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan Web BPBD	Desember	2016	Software	46.024.000,00
98	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan aplikasi SIKS dan integrasi database	Desember	2016	Software	48.680.500,00
99	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pembangunan SIM Kelaikan Fungsi bangunan	Desember	2016	Software	39.550.500,00
100	Bagian Teknologi, Inf & Telematika	Pengembangan SISMIOB PBB dan SIM Pos PBB	Desember	2016	Software	49.230.500,00
101	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan SIM MAPATDA	Desember	2017	Software	53.203.450,00
102		Pengembangan SIM MAPATDA	Desember	2020	Software	39.457.000,00
103	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Data Warehouse	Desember	2017	Software	52.658.500,00
104	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-SPTPD Hotel dan Restoran	Desember	2017	Software	52.391.000,00
105	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Desember	2017	Software	50.883.500,00
106	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan UPIK Versi Mobile	Desember	2017	Software	52.055.500,00
107	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan SIM Peserta KB	Desember	2017	Software	50.851.900,00
108	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Perencanaan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
109	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Samsucakep	Desember	2017	Software	9.900.000,00
110	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pemberdayaan Masyarakat	Desember	2017	Software	9.900.000,00
111	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIMPEG	Desember	2017	Software	9.900.000,00
112	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Uji Kendaraan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
113	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM E-Office	Desember	2017	Software	9.900.000,00
114	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pelaporan	Desember	2017	Software	9.900.000,00
115	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pasar	Desember	2017	Software	9.900.000,00
116	Diskominfo dan Persandian	Licency Vivotek	Agustus	2018	Software	48.000.000,00
117	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Smart City	September	2018	Software	49.890.500,00
118	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi Situs C	September	2018	Software	143.697.973,63
119	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi Situs C	September	2018	Software	23.146.063,04
120	Diskominfo dan Persandian	Perangkat Lunak Pengujian Keamanan Aplikasi Situs C	September	2018	Software	71.256.184,64
121	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Datawarehouse	Oktober	2018	Software	50.910.000,00
122	Diskominfo dan Persandian	Licency Virtualisasi	Oktober	2018	Software	220.200.000,00
123	Diskominfo dan Persandian	Licency Virtualisasi	Oktober	2018	Software	51.480.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
124	Diskominfo dan Persandian	Licency Streaming	Nopember	2018	Software	38.000.000,00
125	Diskominfo dan Persandian	Licency XiBo For Android	Nopember	2018	Software	25.800.000,00
126	Diskominfo dan Persandian	Licency Visio Profesional	Nopember	2018	Software	16.900.000,00
127	Diskominfo dan Persandian	Licency Xen Server	Desember	2018	Software	45.280.000,00
128	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi SIG	Desember	2018	Software	49.993.000,00
129	Diskominfo dan Persandian	Sofware Aplikasi e-Tax	Desember	2018	Software	140.879.500,00
130	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi SIM e-Kinerja	Desember	2018	Software	49.148.000,00
131	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi ASET	Desember	2018	Software	68.893.000,00
132	Diskominfo dan Persandian	Integrasi OSS dan Customisasi Aplikasi	Desember	2018	Software	98.839.000,00
133	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi SIM Monev	Juli	2018	Software	9.900.000,00
134	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Database Pemerintahan Terpadu	Agustus	2018	Software	9.900.000,00
135	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI	Oktober	2018	Software	9.900.000,00
136	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIMAPATDA	Desember	2018	Software	9.900.000,00
137	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Presensi	Mei	2018	Software	9.900.000,00
138	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Presensi	Maret	2018	Software	9.900.000,00
139	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov	Mei	2018	Software	50.589.450,00
140	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Portal Website	Juni	2018	Software	50.121.000,00
141	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov II	September	2019	Software	49.867.500,00
142	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov I	Oktober	2019	Software	99.384.000,00
143	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov III	November	2019	Software	48.330.000,00
144	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi e-Gov IV	Desember	2019	Software	50.064.000,00
145	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Aplikasi Pendaftaran PKB Online	September	2019	Software	9.900.000,00
146	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pemberdayaan (Penambahan Modul Intervensi Pelatihan)	Maret	2019	Software	9.900.000,00
147	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM Presensi	Mei	2019	Software	9.900.000,00
148	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM Pemberdayaan Masyarakat	Agustus	2019	Software	9.900.000,00
149	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan SIM PKB	Maret	2019	Software	9.900.000,00
150	Diskominfo dan Persandian	Lisensi XiBo For Android	Maret	2019	Software	11.600.000,00
151	Diskominfo dan Persandian	Lisensi Vast Vivotek	Maret	2019	Software	24.625.000,00
152	Diskominfo dan Persandian	Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jogja Smart City (JSS)	Maret	2019	Software	720.000,00
153	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan Aplikasi Layanan Pajak	Desember	2019	Software	49.659.500,00
154	Diskominfo dan Persandian	Implementasi Aplikasi Sistem Manajemen Alat Transportasi	Desember	2019	Software	49.742.000,00
155	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan Aplikasi Kanal Tunggal Layanan Pembayaran Pajak Non PBB dan Retribusi	September	2019	Software	49.544.500,00
156	Diskominfo dan Persandian	Pembangunan SIM Aplikasi Smart Data Tahun 2019	Oktober	2019	Software	49.247.000,00
157	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Webservice PBB dan Retribusi Pasar	Oktober	2019	Software	9.900.000,00
158	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan dan Optimalisasi Service Data Kependudukan (Web Service NIK)	Oktober	2019	Software	9.900.000,00
159	Diskominfo dan Persandian	Perbaikan Aplikasi Web Bappeda (Aplikasi Jurnal Pemeliharaan dan Pengembangan Kota Yk.	Mei	2019	Software	9.900.000,00
160	Diskominfo dan Persandian	Integrasi pelayanan aduan kedaruratan, kebakaran dan layanan mobil jenazah dengan aplikasi Tracking Kendaraan	Desember	2019	Software	9.900.000,00
161	Diskominfo dan Persandian	Pengembangan SISMOP	Desember	2019	Software	9.900.000,00
162	Diskominfo dan Persandian	Lisensi SIP Phone	Agustus	2019	Software	75.675.000,00
163	Diskominfo dan Persandian	Billing System	Agustus	2019	Software	25.000.000,00
164	Diskominfo dan Persandian	Lisensi SIP Phone	November	2019	Software	75.675.000,00
165	Diskominfo dan Persandian	Perpanjangan Licency Alat pemindai	November	2019	Software	200.379.242,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
166	Diskominfo dan Persandian	Aplikasi Monitoring Siswa	April	2020	Software	9.900.000,00
167	Diskominfo dan Persandian	SIM Presensi (Modul Apel)	April	2020	Software	9.900.000,00
168	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Aplikasi e-SHBJ	Juli	2020	Software	9.900.000,00
169	Diskominfo dan Persandian	Penyempurnaan Aplikasi SIMBADA	Juli	2020	Software	9.900.000,00
170	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan Aplikasi Mapatda dan e-SPTPD	Juli	2020	Software	9.900.000,00
171	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan SIM Pemberdayaan (Modul Pengolahan Data Survey KSJPS)	Oktober	2020	Software	9.900.000,00
172	Diskominfo dan Persandian	Pemeliharaan AIAMIOP Modul Pengurangan dan Penetapan PBB	November	2020	Software	9.900.000,00
173	Diskominfo dan Persandian	Pembuatan Aplikasi Layanan PBB On-Line	Desember	2020	Software	69.047.000,00
	Jumlah Diskominfo					5.640.022.953,31
174	DPDPK (Pemberian dari KPP Pratama)	SISMIOP	-	2012	Software	-
175	DPDPK (Pemberian dari KPP Pratama)	SIM Pos PBB	-	2009	Software	-
176	DPDPK	SIPKD	-	2008	Software	-
177		Pengembangan Aplikasi SIPKD	Desember	2013	Software	14.190.000,00
178		Pengembangan Aplikasi SIPKD	Desember	2014	Software	49.775.000,00
179	DPDPK	Aplikasi Lampiran Perda APBD	Desember	2016	Software	15.000.000,00
	Jumlah BPKAD					78.965.000,00
180	Dinas Perijinan	Aplikasi Advice Planning dan SMS Gateway'	Oktober	2010	Software	93.785.000,00
181	Dinas Perijinan	SIM Dokumen IMBB	Nopember	2007	Software	48.136.000,00
182		Software Penyempurnaan IMBB	Oktober	2011	Software	44.770.000,00
183	Dinas Perijinan	SIM Domain perijinan	Desember	2008	Software	48.144.000,00
184		Redesign Sub Domain perijinan	April	2012	Software	25.475.000,00
185	Dinas Perijinan	Penyempurnaan SIM Perijinan	Nopember	2009	Software	43.500.000,00
186		Penyempurnaan SIM Perijinan	Juni	2012	Software	82.308.000,00
187		Pengembangan SIM Perijinan	Juli	2013	Software	70.665.000,00
188		Pengembangan SIM Perijinan	Juni	2015	Software	48.015.000,00
189		Pengembangan SIM Perijinan (Pembangunan Aplikasi Profil Perizinan)	Desember	2016	Software	46.282.500,00
190	Dinas Perijinan	Software Perijinan Online	Juli	2011	Software	43.140.000,00
191	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi Pengawasan dan Pengaduan	Agustus	2014	Software	45.292.500,00
192	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi IKM dengan touchpad	September	2014	Software	19.442.500,00
193	Dinas Perijinan	Pembangunan Aplikasi Data Induk	Oktober	2014	Software	46.255.000,00
194	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	IKM dengan Touchpad	Desember	2017	Software	19.442.500,00
195	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	SIM Aplikasi Perizinan	Desember	2017	Software	44.534.000,00
196	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	SIM Aplikasi Informasi Digital	Desember	2017	Software	40.114.200,00
197	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Aplikasi Android	April	2018	Software	36.759.800,00
198	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan Subdomain	Maret	2018	Software	43.945.000,00
199	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan SIM Perizinan (Online)	Agustus	2018	Software	48.730.000,00
200	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Aplikasi Potensi Investasi	Agustus	2019	Software	58.520.000,00
201	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pengembangan SIM Perizinan	Nopember	2019	Software	75.735.000,00
202	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	SIM Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Mei	2020	Software	49.775.000,00
	Jumlah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal					1.122.766.000,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
203	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Software Perpustakaan (SIPRUS)	-	2009	Software	6.500.000,00
204	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Software Perpustakaan Digital	-	2009	Software	4.000.000,00
205	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pemeliharaan Website Perpustakaan	November	2012	Software	8.000.000,00
206	Dina Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Aplikasi INLISLite	Oktober	2019	Software	99.748.000,00
	Jumlah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					118.248.000,00
207	UPT Pusat Bisnis Dinas Pengelolaan Pasar	Software Keuangan	September	2015	Software	29.584.500,00
	Jumlah UPT Pusat Bisnis					29.584.500,00
208	Bagian Organisasi	Sistem Manajemen Mutu Kantor Arpusda	Desember	2016	Software	38.999.950,00
209	Bagian Organisasi	Sistem Manajemen Mutu RSUD	Desember	2016	Software	68.000.000,00
210	Bagian Organisasi	Sertifikasi ISO	Desember	2016	Software	30.000.000,00
	Jumlah Bagian Organisasi					136.999.950,00
211	DINHUB	Software VISSIM	November	2017	Software	126.500.000,00
212	DINHUB	Data base jaringan dan intregrasi muda angkutan di Kota Yogyakarta	Mei	2020	Software	83.655.000,00
	Jumlah Dinas Perhubungan					210.155.000,00
213	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC	Desember	2016	Software	1.424.500,00
214	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC	Desember	2016	Software	1.424.500,00
215	Dinas Pendidikan	OFICCICE HOME&STUDENT 2016 1 PC	Desember	2016	Software	1.424.500,00
216	Dinas Pendidikan	Software Animasi PAI SD	Desember	2013	Software	880.000,00
217	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi LI		2017	Software	56.257.000,00
218	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah		2017	Software	56.889.500,00
219	Dinas Pendidikan	SIM Aplikasi TPMBK	Maret	2018	Software	49.426.465,00
220	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi JPD	Mei	2018	Software	45.968.065,00
221	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM LI	Desember	2018	Software	48.954.565,00
222	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM e-learning	Desember	2018	Software	48.828.065,00
223	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi Teleconference	Desember	2018	Software	44.802.065,00
224	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Apli e PPKS	Desember	2018	Software	35.948.000,00
225	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM JPD	Desember	2019	Software	48.646.400,00
226		Pengembangan SIM Aplikasi JPD	September	2020	Software	29.357.900,00
227	Dinas Pendidikan	Pengembangan Sistem Pendidikan	Desember	2019	Software	49.139.860,00
228	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Aplikasi E-Learning	Desember	2019	Software	49.153.060,00
229	Dinas Pendidikan	Pembangunan SIM Aplikasi PAK	Desember	2019	Software	49.223.900,00
230	Dinas Pendidikan	Pembangunan Aplikasi Server Backbone	Desember	2019	Software	28.319.000,00
231	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Aplikasi KBS	Desember	2019	Software	49.153.060,00
232	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM Pengelolaan Keuangan	Desember	2019	Software	49.287.700,00
233	Dinas Pendidikan	Software Buku Induk (SDN Gedongkuning)	Desember	2020	Software	5.000.000,00
234	Dinas Pendidikan	Pengembangan SIM SIDIDIK	September	2020	Software	29.414.000,00
	Jumlah Dinas pendidikan					778.922.105,00

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai
			Bulan	Tahun		
235	Bag. Layanan Pengadaan	Pendampingan ISO 9001:2015	Desember	2017	Software	30.000.000,00
236	Bag. Layanan Pengadaan	Aplikasi Monitoring Layanan Pengadaan	Desember	2017	Software	49.500.000,00
237	Bag. Layanan Pengadaan	Sub Domain Bagian Layanan Pengadaan	Desember	2017	Software	33.962.500,00
	Jumlah Bagian Layanan Pengadaan					113.462.500,00
238	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Management LED & Antrian	November	2017	Software	207.720.800,00
239	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software Alat Baca Sidik Jari	November	2018	Software	40.000.000,00
240	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software Aplikasi Lisensi	November	2019	Software	7.000.000,00
	Jumlah Dindukcapil					254.720.800,00
241	Dinas Kesehatan	software	Desember	2018	Software	778.950,00
242	Dinas Kesehatan	software	Desember	2018	Software	778.950,00
243	Dinas Kesehatan	Software mastering database	Desember	2017	Software	24.073.580,00
244	Dinas Kesehatan	Software Sismadak	Desember	2018	Software	16.029.800,00
245	Dinas Kesehatan	Software dan mastering database barcode barang persediaan (RS Pratama)	Desember	2017	Software	24.073.580,00
246	Dinas Kesehatan	Software Aplikasi E-Regulasi Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Desember	2017	Software	26.590.000,00
247	Dinas Kesehatan	Software Microsoft Wndows 10 home	September	2020	Software	2.094.000,00
248	Dinas Kesehatan	Software Program E-IRTP	Desember	2020	Software	22.275.000,00
	Jumlah Dinas Kesehatan					116.693.860,00
249	Dinas DaldukKB	SIM KB	Desember	2018	Software	47.841.000,00
	Jumlah Dinas DaldukKB					47.841.000,00
250	Disperindag	Software IKM	Desember	2019	Software	89.859.000,00
251	Disperindag	Aplikasi Sistem E-Booking Pasar Tradisional	Desember	2020	Software	89.870.000,00
	Jumlah Disperindag					179.729.000,00
252	DPUPKP	Pendataan Penghuni Tahap II	Desember	2019	Software	37.745.000,00
253	DPUPKP	Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	November	2019	Software	44.794.000,00
	Jumlah DPUPKP					82.539.000,00
	JUMLAH					13.277.339.171,13

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ASET TAK BERWUJUD-KAJIAN
Per 31 Desember 2020

No	SKPD	Uraian	Perolehan		Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Perhitungan Dengan Kebijakan Baru					Nilai Bersih ATB Dengan Kebijakan Baru	
			Bulan	Tahun			Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020		Akumulasi Amortisasi s.d 2020
1	DISHUB	Survei Tarikan dan Bangkitan Pekerjaan serta kebutuhan Ruang Parkir Pusat Perbelanjaan	Desember	2014	Kajian	123.365.000,00	3	41.121.666,67	3	123.365.000,00	-	123.365.000,00	-
2	DISHUB	Survey dan Updating kinerja lalu lintas (Volume dan Kecepatan)	Desember	2014	Kajian	142.000.000,00	3	47.333.333,33	3	142.000.000,00	-	142.000.000,00	-
3	DISHUB	Grand Design Intelligent Transport System Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	108.585.000,00	3	36.195.000,00	3	108.585.000,00	-	108.585.000,00	-
4	DISHUB	Audit Keselamatan Jalan Kota Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	49.527.500,00	3	16.509.166,67	3	49.527.500,00	-	49.527.500,00	-
5	DISHUB	Kajian Simpang Kota Yogyakarta	Desember	2014	Kajian	48.372.500,00	3	16.124.166,67	3	48.372.500,00	-	48.372.500,00	-
6	DISHUB	Studi Pembukaan Akses Jalan Baru	Desember	2013	Kajian	49.256.000,00	3	16.418.666,67	3	49.256.000,00	-	49.256.000,00	-
7	DISHUB	Penyusunan Data Base Kinerja Lalu Lintas	Desember	2013	Kajian	49.505.000,00	3	16.501.666,67	3	49.505.000,00	-	49.505.000,00	-
8	DISHUB	Studi Formulasi Kebijakan Transportasi Kota Yogyakarta	Desember	2012	Kajian	113.355.000,00	3	37.785.000,00	3	113.355.000,00	-	113.355.000,00	-
9	DISHUB	Survei strategis Pengelolaan Perlintasan Kereta Api di Kota Yogyakarta	Desember	2012	Kajian	109.450.000,00	3	36.483.333,33	3	109.450.000,00	-	109.450.000,00	-
10	DISHUB	SIM KTB	Desember	2010	Kajian	19.700.000,00	3	6.566.666,67	3	19.700.000,00	-	19.700.000,00	-
11	DISHUB	Survei Tarikan dan Bangkitan Pekerjaan Serta Kebutuhan Ruang Parkir Kegiatan Pendidikan	Desember	2015	Kajian	100.000.000,00	3	33.333.333,33	3	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
12	DISHUB	Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan	Desember	2015	Kajian	139.535.000,00	3	46.511.666,67	3	139.535.000,00	-	139.535.000,00	-
13	DISHUB	Survei Grand Design Sistem Satu Arah di Kota Yogyakarta	Desember	2015	Kajian	49.852.000,00	3	16.617.333,33	3	49.852.000,00	-	49.852.000,00	-
14	DISHUB	Kajian Alternatif Pool Bus Wisata	Desember	2015	Kajian	49.500.000,00	3	16.500.000,00	3	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
15	DISHUB	Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi DED Pengembangan Taman Keselamatan Lalu Lintas	Desember	2015	Kajian	24.750.000,00	3	8.250.000,00	3	24.750.000,00	-	24.750.000,00	-
16	DISHUB	Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi	Oktober	2015	Kajian	44.960.000,00	3	14.986.666,67	3	44.960.000,00	-	44.960.000,00	-
17	DISHUB	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Dishub Kota Tahun 2015	Juli	2015	Kajian	44.950.000,00	3	14.983.333,33	3	44.950.000,00	-	44.950.000,00	-
18	DISHUB	Survey Penyusunan Data Angkutan KTB (Andong dan Becak)	Oktober	2016	Kajian	49.857.500,00	3	16.619.166,67	3	49.857.500,00	-	49.857.500,00	-
19	DISHUB	Survey Penyusunan Jaringan Lintas di Kota Yogyakarta	November	2016	Kajian	49.830.000,00	3	16.610.000,00	3	49.830.000,00	-	49.830.000,00	-
20	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan serta kebutuhan parkir kegiatan hotel/penginapan	Desember	2016	Kajian	145.835.000,00	3	48.611.666,67	3	145.835.000,00	-	145.835.000,00	-
21	DISHUB	Kajian Manajemen Lalu Lintas Kawasan	Desember	2016	Kajian	141.835.000,00	3	47.278.333,33	3	141.835.000,00	-	141.835.000,00	-
22	DISHUB	Survey updating kinerja lalu lintas jalan (volume per-kapasitas dan kecepatan)	Desember	2016	Kajian	49.362.500,00	3	16.454.166,67	3	49.362.500,00	-	49.362.500,00	-
23	DISHUB	Survey penyusunan trayek angkutan umum perkotaan berbasis wisata di Kota Yogyakarta	Desember	2016	Kajian	49.800.000,00	3	16.600.000,00	3	49.800.000,00	-	49.800.000,00	-
24	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Pusat Layanan Kesehatan	Oktober	2017	Kajian	127.975.000,00	3	42.658.333,33	3	92.426.388,89	35.548.611,11	127.975.000,00	-
25	DISHUB	Survey Tarikan dan Bangkitan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Pasar Tradisional	Oktober	2017	Kajian	102.360.000,00	3	34.120.000,00	3	73.926.666,67	28.433.333,33	102.360.000,00	-
26	DISHUB	Survey Updating Kinerja Lalu Lintas Jalan	Oktober	2017	Kajian	136.020.000,00	3	45.340.000,00	3	98.236.666,67	37.783.333,33	136.020.000,00	-
27	DISHUB	Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kawasan	Oktober	2017	Kajian	189.417.200,00	3	63.139.066,67	3	136.801.311,11	52.615.888,89	189.417.200,00	-
28	DISHUB	Survey Penyusunan Jaringan Trayek Bus Sekolah di Kota Yogyakarta	Oktober	2017	Kajian	45.178.000,00	3	15.059.333,33	3	32.628.555,56	12.549.444,44	45.178.000,00	-
29	DISHUB	Penyusunan Desain dan Rencana Penempatan Sarana dan Prasarana KTB	Oktober	2017	Kajian	45.308.000,00	3	15.102.666,67	3	32.722.444,44	12.585.555,56	45.308.000,00	-
30	DISHUB	Survey Normalisasi Simpang	Agustus	2018	Kajian	213.488.400,00	3	71.162.800,00	2	94.883.733,33	71.162.800,00	166.046.533,33	47.441.866,67
31	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Gedung Pertemuan dan Restoran	Oktober	2018	Kajian	103.895.000,00	3	34.631.666,67	2	40.403.611,11	34.631.666,67	75.035.277,78	28.859.722,22
32	DISHUB	Penyusunan Database Angkutan Umum, Agen Angkutan Umum dan Pool Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2018	Oktober	2018	Kajian	49.773.000,00	3	16.591.000,00	2	19.356.166,67	16.591.000,00	35.947.166,67	13.825.833,33

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
33	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir Bangunan Perkantoran dan Jasa Keuangan	November	2018	Kajian	100.100.000,00	3	33.366.666,67	2	36.147.222,22	33.366.666,67	69.513.888,89	30.586.111,11
34	DISHUB	Updating Kinerja Lalu Lintas	Desember	2018	Kajian	103.015.000,00	3	34.338.333,33	2	34.338.333,33	34.338.333,33	68.676.666,67	34.338.333,33
35	DISHUB	Konsultansi Penelitian Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan Angkutan di Kota Yogyakarta Tahun 2019	Oktober	2019	Kajian	74.910.000,00	3	24.970.000,00	1	4.161.666,67	24.970.000,00	29.131.666,67	45.778.333,33
36	DISHUB	Survey Normalisasi Simpang	November	2019	Kajian	217.234.000,00	3	72.411.333,33	1	6.034.277,78	72.411.333,33	78.445.611,11	138.788.388,89
37	DISHUB	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dan Kebutuhan Parkir SPBU dan Perbengkelan	November	2019	Kajian	114.000.000,00	3	38.000.000,00	1	3.166.666,67	38.000.000,00	41.166.666,67	72.833.333,33
38	DISHUB	Dokumen Kajian Rute Aman Selamat Sekolah Tahun 2019	Desember	2019	Kajian	49.947.000,00	3	16.649.000,00	1	-	16.649.000,00	16.649.000,00	33.298.000,00
39	DISHUB	Survey Inventarisasi dan Kebutuhan Sarpras Lalu Lintas	Desember	2019	Kajian	191.180.000,00	3	63.726.666,67	1	-	63.726.666,67	63.726.666,67	127.453.333,33
40	DISHUB	Survey Penyusunan Database Angkutan Barang, Jasa Titipan, Ekspedisi dan Paket di Kota Yogyakarta Tahun 2019	Desember	2019	Kajian	49.775.000,00	3	16.591.666,67	1	-	16.591.666,67	16.591.666,67	33.183.333,33
SUB TOTAL DINAS PERHUBUNGAN						3.666.758.600,00		1.222.252.866,67		2.458.416.711,11	601.955.300,00	3.060.372.011,11	606.386.588,89
41	P3ADK	Pengadaan Rencana Aksi Pengembangan Investasi di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta	Juni	2010	Kajian	96.580.000,00	3	32.193.333,33	3	96.580.000,00	-	96.580.000,00	-
42	P3ADK	Penyusunan Dokumen Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Jogja Bidang Hukum	Nopember	2010	Kajian	9.000.000,00	3	3.000.000,00	3	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
43	P3ADK	Penyusunan Dokumen Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Jogja Bidang Ekonomi Svariah	Nopember	2010	Kajian	9.000.000,00	3	3.000.000,00	3	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
44	P3ADK	Studi Potensi (sensus) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Yogyakarta tahun 2010	Nopember	2010	Kajian	220.955.000,00	3	73.651.666,67	3	220.955.000,00	-	220.955.000,00	-
45	P3ADK	Perencanaan Potensi Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta	Nopember	2010	Kajian	30.630.000,00	3	10.210.000,00	3	30.630.000,00	-	30.630.000,00	-
46	P3ADK	Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta (wilayah Kecamatan Keraton, Ngampilan, Wirobrajan, Tegalrejo, dan Danurejan)	Juli	2011	Kajian	82.093.000,00	3	27.364.333,33	3	82.093.000,00	-	82.093.000,00	-
47	P3ADK	Analisa/perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah (Kajian Finansial Penyediaan Jaringan Intranet di Wilayah Kota Yogyakarta)	Nopember	2011	Kajian	39.754.000,00	3	13.251.333,33	3	39.754.000,00	-	39.754.000,00	-
48	P3ADK	Pekerjaan jasa konsultansi analisa/perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah (Kajian Pengembangan Pasar Ikan Higienis di Kota Yogyakarta)	Nopember	2011	Kajian	38.937.800,00	3	12.979.266,67	3	38.937.800,00	-	38.937.800,00	-
49	P3ADK	Studi Potensi Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta (Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede)	Oktober	2011	Kajian	167.622.000,00	3	55.874.000,00	3	167.622.000,00	-	167.622.000,00	-
50	P3ADK	Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta (Wilayah Kec. Jetis, Gedongtengen, Gondokusuman, Pakualaman dan Gondomanan)	Agustus	2012	Kajian	119.250.000,00	3	39.750.000,00	3	119.250.000,00	-	119.250.000,00	-
51	P3ADK	Studi Potensi Parkir di TKP di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	169.140.000,00	3	56.380.000,00	3	169.140.000,00	-	169.140.000,00	-
52	P3ADK	Studi Potensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	201.098.000,00	3	67.032.666,67	3	201.098.000,00	-	201.098.000,00	-
53	P3ADK	Studi Potensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta	September	2012	Kajian	267.433.000,00	3	89.144.333,33	3	267.433.000,00	-	267.433.000,00	-
54	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota Yogyakarta (Kec. Mergansan, Kec. Kraton, Kec. Pakualaman, Kec. Gondomanan dan Kec. Mantriheron)	Nopember	2013	Kajian	222.637.500,00	3	74.212.500,00	3	222.637.500,00	-	222.637.500,00	-
55	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota Yogyakarta (Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo, Kec. Gedongtengen, Kec. Wirobrajan dan Kec. Ngampilan)	Desember	2013	Kajian	239.352.000,00	3	79.784.000,00	3	239.352.000,00	-	239.352.000,00	-
56	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Prioritas I (Pariwisata) di Kota Yogyakarta	September	2014	Kajian	149.940.000,00	3	49.980.000,00	3	149.940.000,00	-	149.940.000,00	-
57	P3ADK	Kajian Daya Tampung dan Sirkulasi Pengunjung Taman Pintar Kota Yogyakarta	Oktober	2014	Kajian	49.604.500,00	3	16.534.833,33	3	49.604.500,00	-	49.604.500,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
58	P3ADK	Studi Potensi Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta	September	2014	Kajian	133.150.000,00	3	44.383.333,33	3	133.150.000,00	-	133.150.000,00	-
59	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di jalan Malioboro dan Jalan A Yani di Kota Yogyakarta	Nopember	2014	Kajian	135.150.000,00	3	45.050.000,00	3	135.150.000,00	-	135.150.000,00	-
60	P3ADK	Studi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Yogyakarta	Nopember	2014	Kajian	208.450.000,00	3	69.483.333,33	3	208.450.000,00	-	208.450.000,00	-
61	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Prioritas I di Kota Yogyakarta (swakelola)	September	2015	Kajian	154.787.600,00	3	51.595.866,67	3	154.787.600,00	-	154.787.600,00	-
62	P3ADK	Penyusunan Naskah Akademik Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Yogyakarta	Oktober	2015	Kajian	79.950.000,00	3	26.650.000,00	3	79.950.000,00	-	79.950.000,00	-
63	P3ADK	Study Review Potensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2015	September	2015	Kajian	148.305.000,00	3	49.435.000,00	3	148.305.000,00	-	148.305.000,00	-
64	P3ADK	Kajian Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran pada Pedagang Kaki Lima (PKL)	September	2015	Kajian	49.990.000,00	3	16.663.333,33	3	49.990.000,00	-	49.990.000,00	-
65	P3ADK	Kajian Review Tarif Retribusi Jasa Umum Tahun 2015	September	2015	Kajian	49.661.500,00	3	16.553.833,33	3	49.661.500,00	-	49.661.500,00	-
66	P3ADK	Kajian Review Tarif Retribusi Jasa Usaha Tahun 2015	September	2015	Kajian	48.689.000,00	3	16.229.666,67	3	48.689.000,00	-	48.689.000,00	-
67	P3ADK	Study Review Potensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2016	Oktober	2016	Kajian	148.785.000,00	3	49.595.000,00	3	148.785.000,00	-	148.785.000,00	-
68	P3ADK	Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan	Juni	2016	Kajian	50.908.000,00	3	16.969.333,33	3	50.908.000,00	-	50.908.000,00	-
69	P3ADK	Penyusunan Tarif Layanan BLUD Puskesmas di Kota Yogyakarta	September	2016	Kajian	84.950.000,00	3	28.316.666,67	3	84.950.000,00	-	84.950.000,00	-
70	P3ADK	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Jasa Kota Yogyakarta	Oktober	2016	Kajian	204.950.000,00	3	68.316.666,67	3	204.950.000,00	-	204.950.000,00	-
71	P3ADK	Belanja Pekerjaan Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Maret	2017	Kajian	49.976.000,00	3	16.658.666,67	3	45.811.333,33	4.164.666,67	49.976.000,00	-
72	P3ADK	Belanja Pekerjaan Kajian optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produk usaha daerah	Juni	2017	Kajian	49.751.000,00	3	16.583.666,67	3	41.459.166,67	8.291.833,33	49.751.000,00	-
73	P3ADK	belanja modal dan konsultasi	September	2017	Kajian	11.604.000,00	3	3.868.000,00	3	8.703.000,00	2.901.000,00	11.604.000,00	-
74	P3ADK	Kajian Pengaruh Variabel Makro terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Juni	2018	Kajian	49.874.000,00	3	16.624.666,67	2	24.937.000,00	16.624.666,67	41.561.666,67	8.312.333,33
75	P3ADK	Penelitian Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendirian BPR Syariah di Kota Yogyakarta	Oktober	2018	Kajian	144.450.000,00	3	48.150.000,00	2	56.175.000,00	48.150.000,00	104.325.000,00	40.125.000,00
76	P3ADK	BPR Syariah	Januari	2019	Kajian	285.000.000,00	3	95.000.000,00	1	87.083.333,33	95.000.000,00	182.083.333,33	102.916.666,67
77	P3ADK	BPR Syariah	Oktober	2019	Kajian	57.215.812,50	3	19.071.937,50	1	3.178.656,25	19.071.937,50	22.250.593,75	34.965.218,75
78	P3ADK	Review Potensi Pajak Hotel	November	2019	Kajian	106.257.937,50	3	35.419.312,50	1	2.951.609,38	35.419.312,50	38.370.921,88	67.887.015,63
79	P3ADK	Audit Pengawasan Aset Eks Ps. Reksonegaran	November	2019	Kajian	11.627.000,00	3	3.875.666,67	1	322.972,22	3.875.666,67	4.198.638,89	7.428.361,11
80	P3ADK	Kajian Business Process Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta	Juni	2020		128.161.000,00	3	42.720.333,33	0				128.161.000,00
81	P3ADK	Kajian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	Oktober	2020		85.794.000,00	3	28.598.000,00	0				85.794.000,00
		SUB TOTAL P3ADK				4.590.463.650,00		1.530.154.550,00		3.881.374.971,18	233.499.083,33	4.114.874.054,51	475.589.595,49
82	BAPPEDA	Kajian Rencana Pengembangan Jalur Transportasi Non Motoris dan Pedestrian (dengan Perguruan Tinggi)	November	2014	Kajian	108.000.000,00	3	36.000.000,00	3	108.000.000,00	-	108.000.000,00	-
83	BAPPEDA	Kajian Pengembangan TOD Stasiun Lempuyangan (dengan Perguruan Tinggi)	Oktober	2014	Kajian	108.400.000,00	3	36.133.333,33	3	108.400.000,00	-	108.400.000,00	-
84	BAPPEDA	Kajian Penataan Pasar Terban (dengan Perguruan Tinggi)	Agustus	2014	Kajian	109.238.000,00	3	36.412.666,67	3	109.238.000,00	-	109.238.000,00	-
85	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto	Agustus	2014	Kajian	51.290.800,00	3	17.096.933,33	3	51.290.800,00	-	51.290.800,00	-
86	BAPPEDA	Kajian Efisiensi dan Efektifitas Kendaraan Dinas (dengan Perguruan Tinggi)	November	2014	Kajian	96.343.150,00	3	32.114.383,33	3	96.343.150,00	-	96.343.150,00	-
87	BAPPEDA	FS Bahasa Jawa sebagai Pengantar Pendidikan (dengan Instansi Vertikal)	November	2014	Kajian	98.586.000,00	3	32.862.000,00	3	98.586.000,00	-	98.586.000,00	-
88	BAPPEDA	FS Manajemen Pengembangan Kemandirian Perajin Perak Kotagede (Dengan Perguruan Tinggi Negeri)	November	2014	Kajian	96.491.850,00	3	32.163.950,00	3	96.491.850,00	-	96.491.850,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
89	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Kawasan Baciro	Agustus	2014	Kajian	51.241.840,00	3	17.080.613,33	3	51.241.840,00	-	51.241.840,00	-
90	BAPPEDA	Penyusunan RP4D (dengan Perguruan Tinggi Negeri)	November	2014	Kajian	109.746.750,00	3	36.582.250,00	3	109.746.750,00	-	109.746.750,00	-
91	BAPPEDA	Penyusunan RIPJM (dengan Perguruan Tinggi Negeri)	September	2014	Kajian	109.592.750,00	3	36.530.916,67	3	109.592.750,00	-	109.592.750,00	-
92	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta(dengan Perguruan Tinggi Negeri)	November	2014	Kajian	108.899.300,00	3	36.299.766,67	3	108.899.300,00	-	108.899.300,00	-
93	BAPPEDA	Pekerjaan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Agustus	2014	Kajian	202.413.350,00	3	67.471.116,67	3	202.413.350,00	-	202.413.350,00	-
94	BAPPEDA	Penyusunan Grand Disain Sungai Gajah Wong	September	2014	Kajian	52.657.000,00	3	17.552.333,33	3	52.657.000,00	-	52.657.000,00	-
95	BAPPEDA	Jurnal Penelitian	Desember	2014	Penelitian	26.748.250,00	3	8.916.083,33	3	26.748.250,00	-	26.748.250,00	-
96	BAPPEDA	Dokumen Penelitian	Desember	2014	Penelitian	56.918.390,00	3	18.972.796,67	3	56.918.390,00	-	56.918.390,00	-
97	BAPPEDA	Rencana Aksi RTH Tahap II	Agustus	2010	Kajian	288.292.125,00	3	96.097.375,00	3	288.292.125,00	-	288.292.125,00	-
98	BAPPEDA	Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta Tahap II	Oktober	2010	Kajian	103.153.700,00	3	34.384.566,67	3	103.153.700,00	-	103.153.700,00	-
99	BAPPEDA	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Oktober	2011	Kajian	82.000.000,00	3	27.333.333,33	3	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-
100	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Akademis Penyusunan Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta	Oktober	2011	Kajian	75.000.000,00	3	25.000.000,00	3	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
101	BAPPEDA	Studi Model Layanan Rumah Sakit	September	2012	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	3	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
102	BAPPEDA	Kajian Tata Kelola Pemakaman Kota Yogyakarta	Juni	2013	Kajian	48.500.000,00	3	16.166.666,67	3	48.500.000,00	-	48.500.000,00	-
103	BAPPEDA	Kajian dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan Kota Yk	November	2013	Kajian	48.500.000,00	3	16.166.666,67	3	48.500.000,00	-	48.500.000,00	-
104	BAPPEDA	Pekerjaan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Ungkitan	Juni	2011	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	3	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
105	BAPPEDA	Pekerjaan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial	Juni	2011	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	3	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
106	BAPPEDA	Dokumen Revitalisasi Penataan Kawasan Sungai Gajah Wong Kota Yk	September	2013	Kajian	51.614.750,00	3	17.204.916,67	3	51.614.750,00	-	51.614.750,00	-
107	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Penataan Kawasan Sungai Winongo Kota Yk	September	2013	Kajian	52.065.750,00	3	17.355.250,00	3	52.065.750,00	-	52.065.750,00	-
108	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Penataan Kawasan Sungai Code Kota Yk	September	2013	Kajian	51.451.000,00	3	17.150.333,33	3	51.451.000,00	-	51.451.000,00	-
109	BAPPEDA	Naskah Akademik RPJM 2017-2021	Oktober	2015	Kajian	282.787.100,00	3	94.262.366,67	3	282.787.100,00	-	282.787.100,00	-
110	BAPPEDA	Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif	Desember	2015	Kajian	52.598.000,00	3	17.532.666,67	3	52.598.000,00	-	52.598.000,00	-
111	BAPPEDA	Kajian Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Yk	September	2015	Kajian	118.820.000,00	3	39.606.666,67	3	118.820.000,00	-	118.820.000,00	-
112	BAPPEDA	Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota Yk dan Memorandum Program Sanitasi	September	2015	Kajian	155.771.000,00	3	51.923.666,67	3	155.771.000,00	-	155.771.000,00	-
113	BAPPEDA	Penyusunan Kajian Filosofi Tata Ruang Kraton Ngayogyakarta	September	2015	Kajian	51.688.000,00	3	17.229.333,33	3	51.688.000,00	-	51.688.000,00	-
114	BAPPEDA	Pekerjaan Penjarangan Aspirasi Masyarakat	Desember	2015	Kajian	124.024.300,00	3	41.341.433,33	3	124.024.300,00	-	124.024.300,00	-
115	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Bahasa Jawa Sebagai Pengantar Pendidikan	Desember	2015	Kajian	94.034.600,00	3	31.344.866,67	3	94.034.600,00	-	94.034.600,00	-
116	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Fisik Bangunan Etnis Eropa di Kota Yogyakarta	September	2015	Kajian	52.963.300,00	3	17.654.433,33	3	52.963.300,00	-	52.963.300,00	-
117	BAPPEDA	Kajian Kawasan Strategis	November	2015	Kajian	110.035.000,00	3	36.678.333,33	3	110.035.000,00	-	110.035.000,00	-
118	BAPPEDA	Penyusunan Evaluasi RPJPD	Oktober	2015	Kajian	179.720.000,00	3	59.906.666,67	3	179.720.000,00	-	179.720.000,00	-
119	BAPPEDA	Kajian Hunian Berimbang	November	2015	Kajian	195.875.000,00	3	65.291.666,67	3	195.875.000,00	-	195.875.000,00	-
120	BAPPEDA	Kajian Perencanaan Transportasi Perkotaan	Oktober	2016	Kajian	118.488.900,00	3	39.496.300,00	3	118.488.900,00	-	118.488.900,00	-
121	BAPPEDA	Kajian Smart City	Juli	2016	Kajian	167.862.000,00	3	55.954.000,00	3	167.862.000,00	-	167.862.000,00	-
122	BAPPEDA	Kajian Ruang Terbuka Air	Juli	2016	Kajian	117.850.000,00	3	39.283.333,33	3	117.850.000,00	-	117.850.000,00	-
123	BAPPEDA	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	November	2016	Kajian	111.355.200,00	3	37.118.400,00	3	111.355.200,00	-	111.355.200,00	-
124	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Kampung Wisata	Desember	2016	Kajian	49.640.000,00	3	16.546.666,67	3	49.640.000,00	-	49.640.000,00	-
125	BAPPEDA	Penyusunan Peta Geospasial Bangunan Cagar Budaya	November	2016	Kajian	57.209.200,00	3	19.069.733,33	3	57.209.200,00	-	57.209.200,00	-
126	BAPPEDA	Penyusunan Data/Peta Wilayah Berbasis Rukun Warga	Juni	2016	Kajian	246.662.100,00	3	82.220.700,00	3	246.662.100,00	-	246.662.100,00	-
127	BAPPEDA	Peninjauan Kembali Perda No. 2 Th 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta	Desember	2016	Kajian	150.000.000,00	3	50.000.000,00	3	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
128	BAPPEDA	Kajian Kawasan Pinggir Sungai Gajah Wong	November	2016	Kajian	48.889.000,00	3	16.296.333,33	3	48.889.000,00	-	48.889.000,00	-
129	BAPPEDA	Review Dokumen Grand Design Sungai Code	Desember	2016	Kajian	49.137.000,00	3	16.379.000,00	3	49.137.000,00	-	49.137.000,00	-
130	BAPPEDA	Kajian Hunian Perkotaan	November	2016	Kajian	167.726.250,00	3	55.908.750,00	3	167.726.250,00	-	167.726.250,00	-
131	BAPPEDA	Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Yoga Selatan	November	2016	Kajian	237.375.000,00	3	79.125.000,00	3	237.375.000,00	-	237.375.000,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
132	BAPPEDA	Dokumen Kajian Ekososbud Kawasan Permukiman Kumuh	Desember	2016	Kajian	138.100.000,00	3	46.033.333,33	3	138.100.000,00	-	138.100.000,00	-
133	BAPPEDA	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif	November	2016	Kajian	99.075.000,00	3	33.025.000,00	3	99.075.000,00	-	99.075.000,00	-
134	BAPPEDA	Masterplan Transportasi Perkotaan	November	2017	Kajian	266.299.375,00	3	88.766.458,33	3	184.930.121,53	81.369.253,47	266.299.375,00	-
135	BAPPEDA	Kajian Samart City Tahap II	Oktober	2017	Kajian	177.707.000,00	3	59.235.666,67	3	128.343.944,44	49.363.055,56	177.707.000,00	-
136	BAPPEDA	Penyusunan Ropmap Sistem Inovasi daerah	Agustus	2017	Kajian	34.878.750,00	3	11.626.250,00	3	27.127.916,67	7.750.833,33	34.878.750,00	-
137	BAPPEDA	Kegiatan Penyusunan Investasiasi Buku Hasil Penelitian	November	2017	Kajian	53.566.450,00	3	17.855.483,33	3	37.198.923,61	16.367.526,39	53.566.450,00	-
138	BAPPEDA	Penyusunan Data Jalan Beruas Kota Yogyakarta Berbasis GIS	Agustus	2017	Kajian	264.025.000,00	3	88.008.333,33	3	205.352.777,78	58.672.222,22	264.025.000,00	-
139	BAPPEDA	Anlisa Data Statistik	April	2017	Kajian	109.730.200,00	3	36.576.733,33	3	97.537.955,56	12.192.244,44	109.730.200,00	-
140	BAPPEDA	Penyusunan Modal Data (Instrumen) Profil RW Kota Yogyakarta	Oktober	2017	Kajian	65.000.000,00	3	21.666.666,67	3	46.944.444,44	18.055.555,56	65.000.000,00	-
141	BAPPEDA	Kajian Kelayakan Rumah Susun Kota Yogyakarta	November	2017	Kajian	159.993.700,00	3	53.331.233,33	3	111.106.736,11	48.886.963,89	159.993.700,00	-
142	BAPPEDA	Analisa Fiskal Daeah	Oktober	2017	Kajian	90.000.000,00	3	30.000.000,00	3	65.000.000,00	25.000.000,00	90.000.000,00	-
143	BAPPEDA	Pengembangan Potensi Pasar Tradisional	Oktober	2018	Kajian	252.314.000,00	3	84.104.666,67	2	98.122.111,11	84.104.666,67	182.226.777,78	70.087.222,22
144	BAPPEDA	Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah	Desember	2018	Kajian	91.462.000,00	3	30.487.333,33	2	30.487.333,33	30.487.333,33	60.974.666,67	30.487.333,33
145	BAPPEDA	Rancangan Sistem Informasi Warga Kelurahan	Desember	2018	Kajian	80.000.000,00	3	26.666.666,67	2	26.666.666,67	26.666.666,67	53.333.333,33	26.666.666,67
146	BAPPEDA	Desain Becak Njogjani	Desember	2018	Kajian	50.000.000,00	3	16.666.666,67	2	16.666.666,67	16.666.666,67	33.333.333,33	16.666.666,67
147	BAPPEDA	Kajian Optimalisasi Aset Daerah	Desember	2018	Kajian	201.782.000,00	3	67.260.666,67	2	67.260.666,67	67.260.666,67	134.521.333,33	67.260.666,67
148	BAPPEDA	Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah	Desember	2018	Kajian	111.390.700,00	3	37.130.233,33	2	37.130.233,33	37.130.233,33	74.260.466,67	37.130.233,33
149	BAPPEDA	Dokumen Penelitian	Desember	2018	Kajian	217.986.281,87	3	72.662.093,96	2	72.662.093,96	72.662.093,96	145.324.187,91	72.662.093,96
150	BAPPEDA	Dokumen Penelitian Strategi Tematik	Desember	2018	Kajian	152.032.400,00	3	50.677.466,67	2	50.677.466,67	50.677.466,67	101.354.933,33	50.677.466,67
151	BAPPEDA	Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta	Juli	2018	Kajian	101.662.000,00	3	33.887.333,33	2	48.007.055,56	33.887.333,33	81.894.388,89	19.767.611,11
152	BAPPEDA	Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang	Desember	2018	Kajian	130.185.000,00	3	43.395.000,00	2	43.395.000,00	43.395.000,00	86.790.000,00	43.395.000,00
153	BAPPEDA	SDGS Kota Yogyakarta	November	2018	Kajian	170.000.000,00	3	56.666.666,67	2	61.388.888,89	56.666.666,67	118.055.555,56	51.944.444,44
154	BAPPEDA	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	September	2018	Kajian	168.335.700,00	3	56.111.900,00	2	70.139.875,00	56.111.900,00	126.251.775,00	42.083.925,00
155	BAPPEDA	Analisis money follow program dalam rpjmd 2017-2022	Desember	2018	Kajian	149.400.000,00	3	49.800.000,00	2	49.800.000,00	49.800.000,00	99.600.000,00	49.800.000,00
156	BAPPEDA	Analisis Data Statistik	November	2018	Kajian	152.951.500,00	3	50.983.833,33	2	55.232.486,11	50.983.833,33	106.216.319,44	46.735.180,56
157	BAPPEDA	Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta	November	2018	Kajian	200.345.000,00	3	66.781.666,67	2	72.346.805,56	66.781.666,67	139.128.472,22	61.216.527,78
158	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Ruang Kreativitas Anak Muda	Desember	2018	Kajian	75.680.000,00	3	25.226.666,67	2	25.226.666,67	25.226.666,67	50.453.333,33	25.226.666,67
159	BAPPEDA	Evaluasi Cooperate Social Responsibilite (CSR) terhadap pembentukan karakter berbasis socioprener.	November	2019	Kajian	25.000.000,00	3	8.333.333,33	1	694.444,44	8.333.333,33	9.027.777,78	15.972.222,22
160	BAPPEDA	Program healing per group sebagai pencegahan dan penanganan agresivitas remaja di kota jogjakarta	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	3	8.333.333,33	1	1.388.888,89	8.333.333,33	9.722.222,22	15.277.777,78
161	BAPPEDA	Kajian Industri Kreatif Fasion terhadap perkembangan sektor pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kota jogjakarta	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	3	8.333.333,33	1	1.388.888,89	8.333.333,33	9.722.222,22	15.277.777,78
162	BAPPEDA	Penerapan internet of thing (iot) pada aplikasi sistem parkir cerdas berbasis mobile guna mewujudkan smart city kota Jogjakarta.	November	2019	Kajian	30.000.000,00	3	10.000.000,00	1	833.333,33	10.000.000,00	10.833.333,33	19.166.666,67
163	BAPPEDA	Pemetaan aset komunitas terkait layanan kesehatan dan sosial bagi lansia di kota Jogjakarta	Desember	2019	Kajian	25.000.000,00	3	8.333.333,33	1	-	8.333.333,33	8.333.333,33	16.666.666,67
164	BAPPEDA	Upaya pengembangan taman pintar Jogjakarta menjadi obyek wisata go digital dengan aplikasi Mathcitymap	Oktober	2019	Kajian	25.000.000,00	3	8.333.333,33	1	1.388.888,89	8.333.333,33	9.722.222,22	15.277.777,78
165	BAPPEDA	Study Pendahuluan Penyediaan Ducting	September	2019	Kajian	100.000.000,00	3	33.333.333,33	1	8.333.333,33	33.333.333,33	41.666.666,67	58.333.333,33
166	BAPPEDA	Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Jogjakarta	Juli	2019	Kajian	200.000.000,00	3	66.666.666,67	1	27.777.777,78	66.666.666,67	94.444.444,44	105.555.555,56
167	BAPPEDA	Perancangan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta	Desember	2019	Kajian	100.000.000,00	3	33.333.333,33	1	-	33.333.333,33	33.333.333,33	66.666.666,67
168	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Potensi Wilayah di Kampung Dukuh.	Oktober	2019	Kajian	50.000.000,00	3	16.666.666,67	1	2.777.777,78	16.666.666,67	19.444.444,44	30.555.555,56
169	BAPPEDA	Kajian Kota Seni dan Budaya	Desember	2019	Kajian	125.000.000,00	3	41.666.666,67	1	-	41.666.666,67	41.666.666,67	83.333.333,33
170	BAPPEDA	Kajian Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kec. Tegalarjo dan Wirobrajan	November	2019	Kajian	100.000.000,00	3	33.333.333,33	1	2.777.777,78	33.333.333,33	36.111.111,11	63.888.888,89

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
171	BAPPEDA	Kajian Potensi Zakat Infaq Sodaqoh Berbasis Teknologi Informasi di Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	10.000.000,00	3	3.333.333,33	1	277.777,78	-	277.777,78	9.722.222,22
172	BAPPEDA	Manajemen Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi angka pengangguran lulusan SMK di Kota Yogyakarta	Desember	2020		22.000.000,00	3	7.333.333,33	0		-	-	22.000.000,00
173	BAPPEDA	Peningkatan Kualitas Produksi Makanan Mitra Program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta	Desember	2020		44.780.000,00	3	14.926.666,67	0		-	-	44.780.000,00
174	BAPPEDA	Penelitian Tematis Fenomena Riwayat Pemberian MPASI dan pola Makan anak dalam Penanggulangan Malnutrisi untuk pencegahan stunting di Kota Yogyakarta	Desember	2020		24.600.000,00	3	8.200.000,00	0		-	-	24.600.000,00
175	BAPPEDA	Pekerjaan Evaluasi Program Lelel Cendol dan kampung Sayur di Kota Yogyakarta	Desember	2020		39.460.000,00	3	13.153.333,33	0		-	-	39.460.000,00
176	BAPPEDA	Pekerjaan Tingkat Kesiapan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Teknologi Dalam Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Desember	2020		21.098.000,00	3	7.032.666,67	0		-	-	21.098.000,00
177	BAPPEDA	Dampak Penggunaan handphone di Sekolah Terhadap Faktor Pendorong Belajar dan Prestasi Belajar Siswa SMP di Kota Yogyakarta	Desember	2020		20.730.000,00	3	6.910.000,00	0		-	-	20.730.000,00
178	BAPPEDA	Pekerjaan Rancang Bangun Sistem Penyiram tanaman otomatis berbasis internet of things (IOT) dengan memanfaatkan solar cells (studi kasus tanam wisata code Kota Yogyakarta)	Desember	2020		45.000.000,00	3	15.000.000,00	0		-	-	45.000.000,00
179	BAPPEDA	Kajian Setting Fisik dan Hukum terkait Graffiti Tagging sebagai bentuk vandalisme di Kota Yogyakarta	Desember	2020		25.000.000,00	3	8.333.333,33	0		-	-	25.000.000,00
180	BAPPEDA	Perancangan Aplikasi/Instrumen Anugerah Inovasi dan Penelitian Kegiatan Pematapan Invoasi Daerah Tahun 2020	Desember	2020		49.945.000,00	3	16.648.333,33	0		-	-	49.945.000,00
181	BAPPEDA	Kajian Penyusunan Strategi Percepatan Inovasi Daerah	Desember	2020		54.945.000,00	3	18.315.000,00	0		-	-	54.945.000,00
182	BAPPEDA	Perancangan Inovasi Daerah Sistem Peringatan Dini Demam Berdarah Dengue (Early Warning For Dengue)	Desember	2020		119.700.000,00	3	39.900.000,00	0		-	-	119.700.000,00
183	BAPPEDA	Dokumen Roadmap Kota Kreatif	Desember	2020		230.076.000,00	3	76.692.000,00	0		-	-	230.076.000,00
184	BAPPEDA	Kajian Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta	Desember	2020		100.000.000,00	3	33.333.333,33	0		-	-	100.000.000,00
		SUB TOTAL BAPPEDA				10.663.891.761,87		3.554.630.587,29		7.276.222.430,21	1.362.833.182,15	8.639.055.612,36	2.024.836.149,51
185	DISPETARU	Dok. Kajian Ev RT/RW	Agustus	2017	Kajian	267.165.600,00	3	89.055.200,00	3	207.795.466,67	59.370.133,33	267.165.600,00	-
186	DISPETARU	Dok. Kajian Blok Kawasan Strategis	September	2017	Kajian	215.682.200,00	3	71.894.066,67	3	161.761.650,00	53.920.550,00	215.682.200,00	-
187	DISPETARU	Dok. RTBL Kawasan Jl. Solo	Oktober	2017	Kajian	272.618.878,00	3	90.872.959,33	3	196.891.411,89	75.727.466,11	272.618.878,00	-
188	DISPETARU	Dok. Review RTBL Kawasan Kotabaru	Desember	2017	Kajian	57.807.850,00	3	19.269.283,33	3	38.538.566,67	19.269.283,33	57.807.850,00	-
189	DISPETARU	Kajian Ev. Pemanfaatan Ruang	Desember	2017	Kajian	138.985.950,00	3	46.328.650,00	3	92.657.300,00	46.328.650,00	138.985.950,00	-
190	DISPETARU	Neraca Pematuganaan tanah, Sumber daya air, udara dan Sumber daya lainya	Desember	2017	Kajian	228.463.000,00	3	76.154.333,33	3	152.308.666,67	76.154.333,33	228.463.000,00	-
191	DISPETARU	Dok. Updating Peta RT/RW	Desember	2017	Kajian	111.356.225,00	3	37.118.741,67	3	74.237.483,33	37.118.741,67	111.356.225,00	-
192	DISPETARU	Dokumen Revisi RTRW	Agustus	2018	Kajian	191.728.799,73	3	63.909.599,91	2	85.212.799,88	63.909.599,91	149.122.399,79	42.606.399,94
193	DISPETARU	Dokumen Penyempurnaan Peta RTRW	September	2018	Kajian	100.524.000,00	3	33.508.000,00	2	41.885.000,00	33.508.000,00	75.393.000,00	25.131.000,00
194	DISPETARU	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	November	2018	Kajian	250.966.175,00	3	83.655.391,67	2	90.626.674,31	83.655.391,67	174.282.065,97	76.684.109,03
195	DISPETARU	Dokumen Persandingan RTRW	Desember	2018	Kajian	65.912.000,00	3	21.970.666,67	2	21.970.666,67	21.970.666,67	43.941.333,33	21.970.666,67
196	DISPETARU	Dokumen RTBL Kawasan Mangkubumi	Desember	2018	Kajian	343.080.000,00	3	114.360.000,00	2	114.360.000,00	114.360.000,00	228.720.000,00	114.360.000,00
197	DISPETARU	Dokumen RTBL Kawasan Jetis	Agustus	2018	Kajian	220.085.615,00	3	73.361.871,67	2	97.815.828,89	73.361.871,67	171.177.700,56	48.907.914,44
198	DISPETARU	Dokumen Rancangan 3 Dimensi (Skyline) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Desember	2018	Kajian	98.376.000,00	3	32.792.000,00	2	32.792.000,00	32.792.000,00	65.584.000,00	32.792.000,00
199	DISPETARU	Kajian Studi Model dan Bentuk Kompensasi terhadap Pemanfaatan Ruang	November	2018	Kajian	51.733.000,00	3	17.244.333,33	2	18.681.361,11	17.244.333,33	35.925.694,44	15.807.305,56
200	DISPETARU	Kajian Evaluasi dan Potensi Rumah Susun di Kota Yk.	November	2018	Kajian	50.978.300,00	3	16.992.766,67	2	18.408.830,56	16.992.766,67	35.401.597,22	15.576.702,78

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
201	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi Jogja Barat	Agustus	2018	Kajian	178.278.927,27	3	59.426.309,09	2	79.235.078,79	59.426.309,09	138.661.387,88	39.617.539,39
202	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Koridor Ipda Tut Harsono.	Desember	2018	Kajian	65.254.600,00	3	21.751.533,33	2	21.751.533,33	21.751.533,33	43.503.066,67	21.751.533,33
203	DISPETARU	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	Desember	2018	Kajian	155.957.200,00	3	51.985.733,33	2	51.985.733,33	51.985.733,33	103.971.466,67	51.985.733,33
204	DISPETARU	Neraca Penatagunaan Tanah.	Desember	2018	Kajian	385.954.000,00	3	128.651.333,33	2	128.651.333,33	128.651.333,33	257.302.666,67	128.651.333,33
205	DISPETARU	Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang	Desember	2018	Kajian	50.425.417,45	3	16.808.472,48	2	16.808.472,48	16.808.472,48	33.616.944,97	16.808.472,48
206	DISPETARU	Kajian Database Spasial Penataan Ruang	September	2018	Kajian	197.036.300,00	3	65.678.766,67	2	65.678.766,67	65.678.766,67	147.777.225,00	49.259.075,00
207	DISPETARU	Peta RTHP Berbasis GIS	November	2018	Kajian	111.925.200,00	3	37.308.400,00	2	37.308.400,00	37.308.400,00	77.725.833,33	34.199.366,67
208	DISPETARU	Digitalisasi Dokumen Vital Pertanahan	Mei	2018	Kajian	34.226.150,00	3	11.408.716,67	2	11.408.716,67	11.408.716,67	29.472.518,06	4.753.631,94
209	DISPETARU	Kajian Database Sistem Informasi Pertanahan	Agustus	2018	Kajian	201.528.000,00	3	67.176.000,00	2	67.176.000,00	67.176.000,00	156.744.000,00	44.784.000,00
210	DISPETARU	Amdal kawasan kota baru	Desember	2019	Kajian	580.950.000,00	3	193.650.000,00	0	-	193.650.000,00	387.300.000,00	387.300.000,00
211	DISPETARU	RTBL kawasan Taman Siswa	November	2019	Kajian	287.123.800,00	3	95.707.933,33	1	95.707.933,33	95.707.933,33	103.683.594,44	183.440.205,56
212	DISPETARU	RTBL Kawasan Gondomanan	Oktober	2019	Kajian	303.075.400,00	3	101.025.133,33	2	101.025.133,33	101.025.133,33	117.862.655,56	185.212.744,44
213	DISPETARU	Kajian Pengembangan Kawasan Sempul Jaringan Transportasi/TUD	November	2019	Kajian	102.833.200,00	3	34.277.733,33	1	34.277.733,33	34.277.733,33	37.134.211,11	65.698.988,89
214	DISPETARU	Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pendestrian Kawasan Kota Yk	November	2019	Kajian	51.044.400,00	3	17.014.800,00	1	17.014.800,00	17.014.800,00	18.432.700,00	32.611.700,00
215	DISPETARU	Kajian Fungsi runag zona perdagangan dan jasa di kota vozyakarta	November	2019	Kajian	51.690.300,00	3	17.230.100,00	1	17.230.100,00	17.230.100,00	18.665.941,67	33.024.358,33
216	DISPETARU	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	Desember	2019	Kajian	186.095.400,00	3	62.031.800,00	1	-	62.031.800,00	62.031.800,00	124.063.600,00
217	DISPETARU	Penyusunan Neraca Penatagunaan Air	November	2019	Kajian	205.128.200,00	3	68.376.066,67	1	68.376.066,67	68.376.066,67	74.074.072,22	131.054.127,78
218	DISPETARU	Penyusunan Kajian Pengendalian Penataan Ruang	Oktober	2019	Kajian	102.883.000,00	3	34.294.333,33	1	34.294.333,33	34.294.333,33	40.010.055,56	62.872.944,44
219	DISPETARU	Pengembangan dan Updeting Sistem Informasi Pertanahan	November	2019	Kajian	62.164.300,00	3	20.721.433,33	1	20.721.433,33	20.721.433,33	22.448.219,44	39.716.080,56
220	DISPETARU	Pengembangan dan Updeting Sistem Informasi Tata Ruang	November	2019	Kajian	201.978.600,00	3	67.326.200,00	1	67.326.200,00	67.326.200,00	72.936.716,67	129.041.883,33
221	DISPETARU	Pembuatan Peta Sebaran Bangunan ber IMKB Berbasis GIS	November	2019	Kajian	121.542.800,00	3	40.514.266,67	1	40.514.266,67	40.514.266,67	43.890.455,56	77.652.344,44
222	DISPETARU	Pembuatan Video Profil Tata Ruang	November	2019	Kajian	81.074.000,00	3	27.024.666,67	1	27.024.666,67	27.024.666,67	29.276.722,22	51.797.277,78
223	DISPETARU	Jasa Konsultansi Potensi konflik Pertanahan	Desember	2019	Kajian	47.440.000,00	3	15.813.333,33	1	-	15.813.333,33	15.813.333,33	31.626.666,67
224	DISPETARU	Penyusunan Peninjauan Kembali RDTR	Oktober	2020		150.334.545,00	3		0		-	-	150.334.545,00
		SUB TOTAL DISPETARU				6.581.407.332,45		2.143.690.929,15		2.029.426.228,73	2.080.886.852,60	4.110.313.081,33	2.471.094.251,12
225	DBGAD	Laporan DED/ Perencanaan	Desember	2012	Kajian	23.034.490,68	3	7.678.163,56	3	23.034.490,68	-	23.034.490,68	-
226	DBGAD	DED Pra Rancang Pendidikan Inklusi	Desember	2013	Kajian	24.183.226,29	3	8.061.075,43	3	24.183.226,29	-	24.183.226,29	-
227	DBGAD	Prarancangan Kecamatan	2009	2009	Kajian	29.667.012,33	3	9.889.004,11	3	29.667.012,33	-	29.667.012,33	-
228	DBGAD	Prarancangan Kelurahan	2009	2009	Kajian	48.562.617,12	3	16.187.539,04	3	48.562.617,12	-	48.562.617,12	-
229	KIMPRASWIL	Buku Laporan	2008	2008	Kajian	34.450.000,00	3	11.483.333,33	3	34.450.000,00	-	34.450.000,00	-
230	KIMPRASWIL	Buku Laporan	2008	2008	Kajian	43.820.000,00	3	14.606.666,67	3	43.820.000,00	-	43.820.000,00	-
231	KIMPRASWIL	Buku Laporan	2008	2008	Kajian	41.750.000,00	3	13.916.666,67	3	41.750.000,00	-	41.750.000,00	-
232	KIMPRASWIL	Buku Laporan	Desember	2010	Kajian	44.451.000,00	3	14.817.000,00	3	44.451.000,00	-	44.451.000,00	-
233	KIMPRASWIL	Buku Laporan	Desember	2010	Kajian	44.451.000,00	3	14.817.000,00	3	44.451.000,00	-	44.451.000,00	-
234	DPUPKP	Review Masterplan Kompleks Balaitkota	Desember	2017	Kajian	50.558.511,80	3	16.852.837,27	3	33.705.674,53	16.852.837,27	50.558.511,80	-
235	DPUPKP	Pemeriksaan Keandalan bangunan Kesehatan	Desember	2017	Kajian	51.930.000,00	3	17.310.000,00	3	34.620.000,00	17.310.000,00	51.930.000,00	-
236	DPUPKP	Pemeriksaan Keandalan bangunan Pendidikan	Desember	2017	Kajian	51.985.000,00	3	17.328.333,33	3	34.656.666,67	17.328.333,33	51.985.000,00	-
237	DPUPKP	Updating Data Legger	Desember	2017	Kajian	52.105.000,00	3	17.368.333,33	3	34.736.666,67	17.368.333,33	52.105.000,00	-
238	DPUPKP	Dok. Blok Kajian Kawasan Strategis	Desember	2017	Kajian	215.682.200,00	3	71.894.066,67	3	143.788.133,33	71.894.066,67	215.682.200,00	-
239	DPUPKP	Dok. RTBL Kawasan Jl. Solo	Desember	2017	Kajian	290.525.294,00	3	96.841.764,67	3	193.683.529,33	96.841.764,67	290.525.294,00	-
240	DPUPKP	Dok. RTBL Kawasan Jl. Kotabaru	Desember	2017	Kajian	57.807.850,00	3	19.269.283,33	3	38.538.566,67	19.269.283,33	57.807.850,00	-
241	DPUPKP	Pendataan penghuni Rusunawa September 2018	September	2018	Kajian	39.000.000,00	3	13.000.000,00	2	16.250.000,00	13.000.000,00	29.250.000,00	9.750.000,00
242	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang Kesehatan	April	2018	Kajian	49.070.000,00	3	16.356.666,67	2	27.261.111,11	16.356.666,67	43.617.777,78	5.452.222,22
243	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang pemerintahan	Agustus	2018	Kajian	48.520.000,00	3	16.173.333,33	2	21.564.444,44	16.173.333,33	37.737.777,78	10.782.222,22
244	DPUPKP	pemeriksaan keandalan bangunan bidang pendidikan	Mei	2018	Kajian	49.126.000,00	3	16.375.333,33	2	25.927.611,11	16.375.333,33	42.302.944,44	6.823.055,56
245	DPUPKP	Pendataan Septic tank MBR	Desember	2018	Kajian	49.604.000,00	3	16.534.666,67	2	16.534.666,67	16.534.666,67	33.069.333,33	16.534.666,67
246	DPUPKP	Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan layanan Insfrastuktur Kota di wilayah	September	2018	Kajian	69.505.000,00	3	23.168.333,33	2	28.960.416,67	23.168.333,33	52.128.750,00	17.376.250,00
247	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan Bangunan Bidang Kesehatan	Juli	2019		51.332.866,67	3	17.110.955,56	1	17.129.564,82	17.110.955,56	24.240.520,37	27.092.346,30

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
248	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan bangunan bidang pemerintahan	Desember	2019		51.062.866,67	3	17.020.955,56	1	-	17.020.955,56	17.020.955,56	34.041.911,11
249	DPUPKP	Pemeriksaan keandalan Bangunan Bidang Pendidikan	November	2019		51.192.866,67	3	17.064.288,89	1	1.422.024,07	17.064.288,89	18.486.312,96	32.706.553,71
250	DPUPKP	Pendataan Septic Tank Tahap I	Desember	2019		97.628.000,00	3	32.542.666,67	1	-	32.542.666,67	32.542.666,67	65.085.333,33
251	DPUPKP	Updating Data Ledger	Desember	2019		50.852.200,00	3	16.950.733,33	1	-	16.950.733,33	16.950.733,33	33.901.466,67
252	DPUPKP	Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20% Rusun MBR	Desember	2019		49.808.000,00	3	16.602.666,67	1	-	16.602.666,67	16.602.666,67	33.205.333,33
253	DPUPKP	Pendataan kondisi Jalan	Desember	2019		72.842.000,00	3	24.280.666,67	1	-	24.280.666,67	24.280.666,67	48.561.333,33
254	DPUPKP	Pendataan Rumah	November	2019		406.711.000,00	3	135.570.333,33	1	11.297.527,78	135.570.333,33	146.867.861,11	259.843.138,89
255	DPUPKP	Pendataan Rumah Tahap II	Desember	2019		274.670.000,00	3	91.556.666,67	1	-	91.556.666,67	91.556.666,67	183.113.333,33
256	DPUPKP	Pengkajian Konsolidasi Lahap Kel. Pringgokusuman	Desember	2019		48.117.000,00	3	16.039.000,00	1	-	16.039.000,00	16.039.000,00	32.078.000,00
257	DPUPKP	Updating Rumah Tidak Layak Huni	Desember	2019		49.193.000,00	3	16.397.666,67	1	-	16.397.666,67	16.397.666,67	32.795.333,33
258	DPUPKP	survey Kepuasan Masyarakat bidang Perkim,Bina Marga ,SDA dan PAL	Oktober	2019		74.442.000,00	3	24.814.000,00	1	4.135.666,67	24.814.000,00	28.949.666,67	45.492.333,33
259	DPUPKP	Updating Wajib Retribusi	Oktober	2019		99.825.000,00	3	33.275.000,00	1	5.545.833,33	33.275.000,00	38.820.833,33	61.004.166,67
260	DPUPKP	Pendataan PJU Tahap II	Desember	2019		249.562.500,00	3	83.187.500,00	1	-	83.187.500,00	83.187.500,00	166.375.000,00
		SUB TOTAL DPUPKP				3.037.027.502,23		1.012.342.500,74		1.014.127.450,29	900.886.051,94	1.915.013.502,22	1.122.014.000,01
261	Taman Pintar	Kajian kekuatan struktur bangunan gedung kotak Taman Pintar	April	2015	Kajian	24.805.000,00	3	8.268.333,33	3	24.805.000,00	-	24.805.000,00	-
262	DINAS PARIWISATA	Kajian Atraksi Pariwisata	Desember	2020		94.710.000,00	3	31.570.000,00	0	-	-	-	94.710.000,00
263	DINAS PARIWISATA	Kajian Update Data Jasa Usaha Pariwisata	Desember	2020		44.830.000,00	3	14.943.333,33	0	-	-	-	44.830.000,00
264	DINAS PARIWISATA	Masterplan Pengembangan Kampung Wisata Tamansari	Desember	2020		79.000.000,00	3	26.333.333,33	0	-	-	-	79.000.000,00
265	Bidang Pengelolaan Taman Pintar	Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Taman Pintar	Desember	2018		99.825.000,00	3	33.275.000,00	2	-	66.550.000,00	66.550.000,00	33.275.000,00
		SUB TOTAL DINAS PARIWISATA				343.170.000,00		114.390.000,00		24.805.000,00	66.550.000,00	91.355.000,00	251.815.000,00
266	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Penguatan Organisasi	Desember	2016	Kajian	249.999.750,00	3	6.944.437,50	3	249.999.750,00	-	249.999.750,00	-
267	Bag. Organisasi	Konsultasi Perencanaan Penyusunan Standarisasi Kesejahteraan	Juli	2017	Kajian	299.816.000,00	3	99.938.666,67	3	241.518.444,44	58.297.555,56	299.816.000,00	-
268	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar	Juli	2017	Kajian	99.999.845,00	3	33.333.281,67	3	80.555.430,69	19.444.414,31	99.999.845,00	-
269	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan Pasar di Lingkungan Kota Yogyakarta	Juli	2017	Kajian	99.999.900,00	3	33.333.300,00	3	80.555.475,00	19.444.425,00	99.999.900,00	-
270	Bag. Organisasi	Evaluasi Jabatan	Oktober	2018	Kajian	276.000.000,00	3	92.000.000,00	2	107.333.333,33	92.000.000,00	199.333.333,33	76.666.666,67
271	Bag. Organisasi	Kajian Kelembagaan Pengelolaan RSUD Kota Yogyakarta	Agustus	2018	Kajian	99.996.050,00	3	33.332.016,67	2	44.442.688,89	33.332.016,67	77.774.705,56	22.221.344,44
272	Bag. Organisasi	Kajian Pengembangan Aparatur	Desember	2019	Kajian	201.170.000,00	3	67.056.666,67	1	-	67.056.666,67	67.056.666,67	134.113.333,33
		SUB TOTAL BAGIAN ORGANISASI				1.326.981.545,00		365.938.369,17		804.405.122,36	289.575.078,19	1.093.980.200,56	233.001.344,44
273	Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	Kajian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	Juli	2017	Kajian	54.299.250,00	3	18.099.750,00	3	43.741.062,50	10.558.187,50	54.299.250,00	-
		SUB TOTAL BAGIAN ADMINISTRASI dan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				54.299.250,00		18.099.750,00		43.741.062,50	10.558.187,50	54.299.250,00	-

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
274	Dinas kebudayaan	Kajian Budaya Kalang	Mei	2017	Kajian	38.910.000,00	3	12.970.000,00	3	33.505.833,33	5.404.166,67	38.910.000,00	-
275	Dinas kebudayaan	Kajian Filosofi dan Makna Keris dalam Budaya Jawa	September	2018	Kajian	44.214.500,00	3	14.738.166,67	2	18.422.708,33	14.738.166,67	33.160.875,00	11.053.625,00
276	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah pada Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	Oktober	2018	Kajian	46.685.000,00	3	15.561.666,67	2	18.155.277,78	15.561.666,67	33.716.944,44	12.968.055,56
277	Dinas kebudayaan	Penelitian Pendataan Tata Nilai Budaya nDalem-nDalem Kepangeranan 2018	Desember	2018	Kajian	59.500.000,00	3	19.833.333,33	2	19.833.333,33	19.833.333,33	39.666.666,67	19.833.333,33
278	Dinas kebudayaan	Kajian/ Penyusunan Data Bangunan Warisan Budaya 2018	Desember	2018	Kajian	91.014.000,00	3	2.528.166,67	2	30.338.000,00	2.528.166,67	32.866.166,67	58.147.833,33
279	Dinas kebudayaan	Kajian Penyusunan Bangunan Cagar Budaya	April	2019	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	1	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
280	Dinas kebudayaan	Kajian Pengembangan Teknologi Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa	September	2019	Kajian	69.960.000,00	3	23.320.000,00	1	5.830.000,00	23.320.000,00	29.150.000,00	40.810.000,00
281	Dinas kebudayaan	Kajian Filosofi dan Makna Batik Yogyakarta	September	2019	Kajian	60.000.000,00	3	20.000.000,00	1	5.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00
282	Dinas kebudayaan	Kajian Penataan Fisik Lingkungan Budaya Bintaran	Agustus	2019	Kajian	79.450.000,00	3	26.483.333,33	1	8.827.777,78	26.483.333,33	35.311.111,11	44.138.888,89
283	Dinas kebudayaan	Kajian Pelestarian dan Pengembangan Museum Kalang Kotagede dan Living Museum Bintaran	Agustus	2019	Kajian	79.500.000,00	3	26.500.000,00	1	8.833.333,33	26.500.000,00	35.333.333,33	44.166.666,67
284	Dinas kebudayaan	Kajian Pemuktahiran Data Bangunan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	Oktober	2019	Kajian	79.525.000,00	3	26.508.333,33	1	4.418.055,56	26.508.333,33	30.926.388,89	48.598.611,11
285	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah Lokal Toponim Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	1	1.250.000,00	15.000.000,00	16.250.000,00	28.750.000,00
286	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah Lokal Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta	November	2019	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	1	1.250.000,00	15.000.000,00	16.250.000,00	28.750.000,00
287	Dinas kebudayaan	Kajian Sejarah Lokal Keberadaan Bendung Bendolole	Desember	2020		89.991.000,00	3	29.997.000,00	0	-	-	-	89.991.000,00
288	Dinas kebudayaan	Kajian Toponim Kota Yogyakarta Kecamatan Kotagede	Desember	2020		89.991.000,00	3	29.997.000,00	0	-	-	-	89.991.000,00
289	Dinas kebudayaan	Kajian Penelitian Perencanaan nDalem Pujowinatan	Desember	2020		79.460.700,00	3	26.486.900,00	0	-	-	-	79.460.700,00
290	Dinas kebudayaan	Kajian Penelitian Zona Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Baciro	Desember	2020		79.273.700,00	3	26.424.566,67	0	-	-	-	79.273.700,00
291	Dinas kebudayaan	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan Digitalisasi Profil RKB	Desember	2020		99.800.000,00	3	33.266.666,67	0	-	-	-	99.800.000,00
		SUB TOTAL DINAS KEBUDAYAAN				1.222.274.900,00		379.615.133,33		165.664.319,44	225.877.166,67	391.541.486,11	830.733.413,89
292	Dinas Pertanian dan Pangan	Jasa Konsultasi Penelitian/Pembuatan Data Base Bid. Ketahanan Pangan	November	2017	Kajian	49.582.500,00	3	16.527.500,00	3	34.432.291,67	15.150.208,33	49.582.500,00	-
293	Dinas Pertanian dan Pangan	Jasa Konsultasi Grand Desain Kampung Agro Rejowinangun	November	2017	Kajian	48.915.680,00	3	16.305.226,67	3	33.969.222,22	14.946.457,78	48.915.680,00	-
294	Dinas Pertanian dan Pangan	Jasa Konsultasi Grand Desain Plasma Nufah Pisang	November	2017	Kajian	49.190.680,00	3	16.396.893,33	3	34.160.194,44	15.030.485,56	49.190.680,00	-
295	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembuatan Database Ketahanan Pangan (Kajian Konsumsi dan Kebutuhan Bawang Putih, Daging Ayam, Telur, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Kacang Tanah)	September	2018	Kajian	49.757.000,00	3	16.585.666,67	2	20.732.083,33	16.585.666,67	37.317.750,00	12.439.250,00
296	Dinas Pertanian dan Pangan	Database ketahanan pangan dpp	November	2019	Kajian	49.775.000,00	3	16.591.666,67	1	1.382.638,89	16.591.666,67	17.974.305,56	31.800.694,44
297	Dinas Pertanian dan Pangan	Kajian Distribusi Pangan	Desember	2020		42.075.000,00	3	14.025.000,00	0	-	-	-	42.075.000,00
		SUB TOTAL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				289.295.860,00		96.431.953,33		124.676.430,56	78.304.485,00	202.980.915,56	86.314.944,44

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
298	DINKES	Pelayanan kesehatan primer dan rujukan kajian penghitungan jasa pelayanan puskesmas	Sep	2017	Kajian	39.347.000,00	3	13.115.666,67	3	29.510.250,00	9.836.750,00	39.347.000,00	-
299	DINKES	Review buku panduan Pengobatan Puskesmas	Sep	2017	Kajian	39.897.000,00	3	13.299.000,00	3	29.922.750,00	9.974.250,00	39.897.000,00	-
300	DINKES	Jasa penilaian manfaat sertifikat produk pangan industri rumah tangga terhadap industri rumah tangga pangan	Okt	2017	Kajian	44.500.000,00	3	14.833.333,33	3	32.138.888,89	12.361.111,11	44.500.000,00	-
301	DINKES	Review buku pedoman Penanganan bencana bidang Kesehatan	Okt	2017	Kajian	39.913.500,00	3	13.304.500,00	3	28.826.416,67	11.087.083,33	39.913.500,00	-
302	DINKES	Jasa penilaian aplikasi perizinan dan sertikasi bidang Kesehatan	Nov	2017	Kajian	44.900.000,00	3	14.966.666,67	3	31.180.555,56	13.719.444,44	44.900.000,00	-
303	DINKES	Jasa Pemutakhiran data Unit Layanan Kefarmasian	Des	2017	Kajian	44.660.000,00	3	14.886.666,67	3	29.773.333,33	14.886.666,67	44.660.000,00	-
304	DINKES	Jasa Pemutakhiran data PKRT	Des	2017	Kajian	39.875.000,00	3	13.291.666,67	3	26.583.333,33	13.291.666,67	39.875.000,00	-
305	DINKES	Jasa Review Fomas Tingkat Kota	Des	2017	Kajian	44.500.000,00	3	14.833.333,33	3	29.666.666,67	14.833.333,33	44.500.000,00	-
306	DINKES	Jasa Penyusunan Compendium Alkes tingkat Puskesmas	Des	2017	Kajian	44.715.000,00	3	14.905.000,00	3	29.810.000,00	14.905.000,00	44.715.000,00	-
307	DINKES	Penyusunan review Formularium revisi Kota Yogyakarta	Des	2017	Kajian	44.500.000,00	3	14.833.333,33	3	29.666.666,67	14.833.333,33	44.500.000,00	-
308	DINKES	Penyusunan Kajian review EHRA 2018	Juni	2018	Kajian	149.988.300,00	3	49.996.100,00	2	74.994.150,00	49.996.100,00	124.990.250,00	24.998.050,00
309	DINKES	Penyusunan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) di Puskesmas Danurejan 2	Juni	2018	Kajian	48.785.000,00	3	16.261.666,67	2	24.392.500,00	16.261.666,67	40.654.166,67	8.130.833,33
310	DINKES	Penilaian kepatuhan rumah sakit dalam menentukan standar evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku	Juli	2018	Kajian	46.640.000,00	3	15.546.666,67	2	22.024.444,44	15.546.666,67	37.571.111,11	9.068.888,89
		SUB TOTAL DINAS KESEHATAN				672.220.800,00		224.073.600,00		418.489.955,56	211.533.072,22	630.023.027,78	42.197.772,22
311	DISKOMINFO	Dok. Kajian Penyusunan Site Audit Menara Telekomunikasi	Okt	2017	Kajian	49.020.000,00	3	16.340.000,00	3	35.403.333,33	13.616.666,67	49.020.000,00	-
312	DISKOMINFO	Dok. Sistem Monitoring&Ev.Pengendalian Menara Telekomunikasi	Okt	2017	Kajian	49.080.000,00	3	16.360.000,00	3	35.446.666,67	13.633.333,33	49.080.000,00	-
313	DISKOMINFO	Dok. Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi Kota Yk	Okt	2017	Kajian	44.960.000,00	3	14.986.666,67	3	32.471.111,11	12.488.888,89	44.960.000,00	-
314	DISKOMINFO	Kajian Titik Lokasi Menara Telekomunikasi	Okt	2017	Kajian	21.177.000,00	3	7.059.000,00	3	15.294.500,00	5.882.500,00	21.177.000,00	-
315	DISKOMINFO	Kajian Pengembangan Microcell Telekomunikasi	Oktober	2015	Kajian	44.960.000,00	3	14.986.666,67	3	44.960.000,00	-	44.960.000,00	-
316	DISKOMINFO	Dokumen Kajian Penyusunan Site Audit Menara telekomunikasi	Des	2013	Kajian	49.020.000,00	3	16.340.000,00	3	49.020.000,00	-	49.020.000,00	-
317	DISKOMINFO	Dokumen Sistem Monitoring & Evaluasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Des	2014	Kajian	49.080.000,00	3	16.360.000,00	3	49.080.000,00	-	49.080.000,00	-
318	DISKOMINFO	Perencanaan Infrastruktur Smart City	Desember	2018	Kajian	99.155.000,00	3	33.051.666,67	2	33.051.666,67	33.051.666,67	66.103.333,33	33.051.666,67
319	DISKOMINFO	Kajian Standar Manajemen Keamanan Informasi	Desember	2018	Kajian	74.982.100,00	3	24.994.033,33	2	24.994.033,33	24.994.033,33	49.988.066,67	24.994.033,33
320	DISKOMINFO	Kajian Manajemen Resiko	November	2019	Kajian	75.427.000,00	3	25.142.333,33	1	2.095.194,44	25.142.333,33	27.237.527,78	48.189.472,22
321	DISKOMINFO	Kajian Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi	Desember	2019	Kajian	100.719.000,00	3	33.573.000,00	1	-	33.573.000,00	33.573.000,00	67.146.000,00
		SUB TOTAL DISKOMINFO				657.580.100,00		219.193.366,67		321.816.505,56	162.382.422,22	484.198.927,78	173.381.172,22
322	DINDUKCAPIL	Buku Kajian Kependudukan	Nov	2017	Kajian	45.524.000,00	3	15.174.666,67	3	31.613.888,89	13.910.111,11	45.524.000,00	-
		SUB TOTAL DINDUKCAPIL				45.524.000,00		15.174.666,67		31.613.888,89	13.910.111,11	45.524.000,00	-
323	DINDALDUKKB	Modul Edukasi Pengendalian Penduduk	September	2018	Kajian	44.650.000,00	3	14.883.333,33	2	18.604.166,67	14.883.333,33	33.487.500,00	11.162.500,00
324	DINDALDUKKB	Penyusunan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk	Desember	2018	Kajian	44.950.000,00	3	14.983.333,33	2	14.983.333,33	14.983.333,33	29.966.666,67	14.983.333,33
325	DINDALDUKKB	Penyusunan Naskah Akademik Pengendalian Penduduk	Desember	2018	Kajian	57.250.000,00	3	19.083.333,33	2	19.083.333,33	19.083.333,33	38.166.666,67	19.083.333,33
326	DINDALDUKKB	Kajian Stratifikasi Kelompok BKS dan UPPKS di Kota Yogyakarta	Juli	2020		20.900.000,00	3	6.966.666,67	0				20.900.000,00
		SUB TOTAL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA				167.750.000,00		55.916.666,67		52.670.833,33	48.950.000,00	101.620.833,33	66.129.166,67

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
327	RSUD	Kajian Jasa Konsultasi Pengawasan ISO 9001:2008	Okt	2017	Kajian	45.000.000,00	3	15.000.000,00	3	32.500.000,00	12.500.000,00	45.000.000,00	-
		SUB TOTAL RSUD				45.000.000,00		15.000.000,00		32.500.000,00	12.500.000,00	45.000.000,00	-
328	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi	Des	2017	Kajian	308.689.500,00	3	102.896.500,00	3	205.793.000,00	102.896.500,00	308.689.500,00	-
329	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian SLHD	Des	2017	Kajian	339.544.000,00	3	113.181.333,33	3	226.362.666,67	113.181.333,33	339.544.000,00	-
330	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan	Des	2017	Kajian	95.111.000,00	3	31.703.666,67	3	63.407.333,33	31.703.666,67	95.111.000,00	-
331	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	50.375.000,00	3	16.791.666,67	3	33.583.333,33	16.791.666,67	50.375.000,00	-
332	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	70.000.000,00	3	23.333.333,33	3	46.666.666,67	23.333.333,33	70.000.000,00	-
333	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Jasa Konsultasi Penelitian	Des	2017	Kajian	290.630.000,00	3	96.876.666,67	3	193.753.333,33	96.876.666,67	290.630.000,00	-
334	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Beban Pencemaran Sungai Code (Swakelola Tipe II)	Agustus	2018	Kajian	60.862.000,00	3	20.287.333,33	2	40.574.666,67	20.287.333,33	60.862.000,00	-
335	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Swakelola tipe II)	Desember	2018	Kajian	131.957.000,00	3	43.985.666,67	2	43.985.666,67	43.985.666,67	87.971.333,33	43.985.666,67
336	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (Swakelola tipe II)	November	2018	Kajian	136.184.000,00	3	45.394.666,67	2	49.177.555,56	45.394.666,67	94.572.222,22	41.611.777,78
337	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (Swakelola tipe II)	Juli	2018	Kajian	51.953.000,00	3	17.317.666,67	2	24.533.361,11	17.317.666,67	41.851.027,78	10.101.972,22
338	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (Swakelola tipe II)	September	2018	Kajian	139.500.000,00	3	46.500.000,00	2	58.125.000,00	46.500.000,00	104.625.000,00	34.875.000,00
339	Dinas Lingkungan Hidup	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DLH 2018	November	2018	Kajian	91.110.000,00	3	30.370.000,00	2	32.900.833,33	30.370.000,00	63.270.833,33	27.839.166,67
340	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Daya Dukung Daya Tampung Air	Desember	2019	Kajian	75.994.000,00	3	25.331.333,33	1	-	25.331.333,33	25.331.333,33	50.662.666,67
341	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Beban Pencemaran Sungai Gajahwong (Swakelola Tipe II)	Desember	2019	Kajian	60.286.000,00	3	20.095.333,33	1	-	20.095.333,33	20.095.333,33	40.190.666,67
342	Dinas Lingkungan Hidup	SKM DLH	Desember	2019	Kajian	90.500.000,00	3	30.166.666,67	1	-	30.166.666,67	30.166.666,67	60.333.333,33
343	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Database Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan	Desember	2019	Kajian	100.912.000,00	3	33.637.333,33	1	-	33.637.333,33	33.637.333,33	67.274.666,67
344	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Uji Kinerja Lalu Lintas dan Kualitas Udara Jalan Raya (Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan)	Desember	2019	Kajian	70.690.000,00	3	23.563.333,33	1	-	23.563.333,33	23.563.333,33	47.126.666,67
		Sub Total DINAS LINGKUNGAN HIDUP				2.164.297.500,00		1.765.915.500,00		1.018.863.416,67	721.432.500,00	1.740.295.916,67	424.001.583,33
345	TAPEM & KESRA	Penelitian Forum Pemantau Independen (FORPI)	Juli	2017	Kajian	49.300.000,00	3	16.433.333,33	3	39.713.888,89	9.586.111,11	49.300.000,00	-
346	TAPEM & KESRA	Pakta Integritas (Implementasi Kebijakan Sistem Online PPDB Berbasis Zonasi)	November	2018	Kajian	48.125.000,00	3	16.041.666,67	2	17.378.472,22	16.041.666,67	33.420.138,89	14.704.861,11
347	TAPEM & KESRA	Kajian Evaluasi Toko Jejaring	oktober	2019	Kajian	48.346.000,00	3	16.115.333,33	1	2.685.888,89	16.115.333,33	18.801.222,22	29.544.777,78
348	TAPEM & KESRA	Inventarisasi Unsur Buatan Toponimi	november	2019	Kajian	48.346.000,00	3	16.115.333,33	1	1.342.944,44	16.115.333,33	17.458.277,78	30.887.722,22
		SUB TOTAL TAPEM & KESRA				194.117.000,00		64.705.666,67		61.121.194,44	57.858.444,44	118.979.638,89	75.137.361,11
349	Satpol PP	Kajian Perilaku Pelanggar 2018	Desember	2018	Kajian	49.563.500,00	3	16.521.166,67	2	16.521.166,67	16.521.166,67	33.042.333,33	16.521.166,67
350	Satpol PP	Kajian Penegakan Perda pada Masa Pandemi covid-19	Desember	2020		49.500.000,00	3	16.500.000,00	0			-	49.500.000,00
		SUB TOTAL Satpol PP				99.063.500,00		33.021.166,67		16.521.166,67	16.521.166,67	33.042.333,33	66.021.166,67

No	SKPD	Uraian	Bulan	Tahun	Klasifikasi Asset	Nilai Kajian	Masa Manfaat (tahun)	Amortisasi per tahun	Masa Pemakaian	Akumulasi Amortisasi s.d 2019	Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi s.d 2020	Dengan Kebijakan Baru
351	BPKAD	Penyusunan Analisis Kelayakan Divestasi Penyertaan Modal pada PT Radio Swara Adiloka	Juli	2018	Kajian	75.000.000,00	3	25.000.000,00	2	35.416.666,67	25.000.000,00	60.416.666,67	14.583.333,33
352	BPKAD	Penyusunan Analisis Investasi Penambahan Penyertaan Modal pada BPR Bank Jogja	Desember	2018	Kajian	74.932.000,00	3	24.977.333,33	2	24.977.333,33	24.977.333,33	49.954.666,67	24.977.333,33
353	BPKAD	Kajian Analisis Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jogjatama Visesha	Desember	2019		99.830.500,00	3	33.276.833,33	1	-	33.276.833,33	33.276.833,33	66.553.666,67
354	BPKAD	Penilaian Aset tak Berwujud PT.RSA (Pekerjaan Audit Keuangan)	Desember	2019		72.600.000,00	3	24.200.000,00	1	-	24.200.000,00	24.200.000,00	48.400.000,00
355	BPKAD	Penilaian Aset tak Berwujud PT. RSA (Pekerjaan Penilaian Harga Saham)	Desember	2019		99.000.000,00	3	33.000.000,00	1	-	33.000.000,00	33.000.000,00	66.000.000,00
356	BPKAD	Kajian Analisis Investasi untuk pendirian BPR Syariah	Desember	2019		99.830.500,00	3	33.276.833,33	1	-	33.276.833,33	33.276.833,33	66.553.666,67
		SUB TOTAL BPKAD				521.193.000,00		173.731.000,00		60.394.000,00	173.731.000,00	234.125.000,00	287.068.000,00
357	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM aluminium	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	3	22.166.666,67	2	25.861.111,11	22.166.666,67	48.027.777,78	18.472.222,22
358	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM batik	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	3	22.166.666,67	2	25.861.111,11	22.166.666,67	48.027.777,78	18.472.222,22
359	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM kulit	Oktober	2018	Kajian	66.500.000,00	3	22.166.666,67	2	25.861.111,11	22.166.666,67	48.027.777,78	18.472.222,22
360	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM batik	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	3	9.500.000,00	2	11.083.333,33	9.500.000,00	20.583.333,33	7.916.666,67
361	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM aluminium	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	3	9.500.000,00	2	11.083.333,33	9.500.000,00	20.583.333,33	7.916.666,67
362	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Teknologi Tepat guna IKM kulit	Oktober	2018	Kajian	28.500.000,00	3	9.500.000,00	2	11.083.333,33	9.500.000,00	20.583.333,33	7.916.666,67
363	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kajian Pengembangan Pengelolaan BLUD UPT Logam	Desember	2018	Kajian	100.000.000,00	3	33.333.333,33	2	33.333.333,33	33.333.333,33	66.666.666,67	33.333.333,33
364	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Penelitian tepat guna IKM Perak	Desember	2019	Kajian	95.000.000,00	3	31.666.666,67	1	31.666.666,67	31.666.666,67	31.666.666,67	63.333.333,33
365	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Konsultasi Penelitian tepat guna penanganan limbah IKM Aluminium	Desember	2019	Kajian	95.000.000,00	3	31.666.666,67	1	31.666.666,67	31.666.666,67	31.666.666,67	63.333.333,33
		SUB TOTAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan				575.000.000,00		191.666.666,67		144.166.666,67	191.666.666,67	335.833.333,33	239.166.666,67
366	Dinas Kebakaran	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Oktober	2019	Kajian	48.840.000,00	3	16.280.000,00	1	2.713.333,33	16.280.000,00	18.993.333,33	29.846.666,67
		SUB TOTAL Dinas Kebakaran				48.840.000,00		16.280.000,00		2.713.333,33	16.280.000,00	18.993.333,33	29.846.666,67
367	DPMP	Kajian Potensi Investasi	Juli	2019		56.645.000,00	3	18.881.666,67	1	7.867.361,11	18.881.666,67	26.749.027,78	29.895.972,22
		SUB TOTAL DPMP				56.645.000,00		18.881.666,67	1	7.867.361,11	18.881.666,67	26.749.027,78	29.895.972,22
368	DPMPPA	Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah	September	2020		48.546.850,00	3	16.182.283,33	0	-	-	-	48.546.850,00
369	DPMPPA	Kajian Penyusunan Data Pilah Gender/Data Pembuka Wawasan	September	2020		49.268.800,00	3	16.422.933,33	0	-	-	-	49.268.800,00
		SUB TOTAL DPMPA				97.815.650,00		16.182.283,33	0	-	-	-	97.815.650,00
370	KECAMATAN MATRIJERON	Kajian Perencanaan Masterplan Kawasan Kel. Gedongkiwo	Desember	2020		76.725.000,00	3	25.575.000,00	0	-	-	-	76.725.000,00
		SUB TOTAL KECAMATAN MANTRIJERON				76.725.000,00		-	0	-	-	-	76.725.000,00
		JUMLAH TOTAL				37.197.341.951,55	-	13.247.288.889,68		19.991.598.048,60	7.496.572.437,38	27.488.170.485,98	9.709.171.465,57

**Rincian Bangunan Aset Bersejarah
Milik Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Nama Bangunan	Alamat
1	SMP Negeri 8 Yogyakarta	Jl. Prof. DR Kahar Muzakir 2
2	SD Negeri Ngupasan I dan II Yogyakarta	Jl. Reksobayan Ngupasan
3	SD Negeri Ungaran I	Jl. Pattimura Kotabaru
4	Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Jl. Suroto 11
5	SMP Negeri 6 Yogyakarta	Jl. RW Monginsidi 1
6	SMP Negeri 1 Yogyakarta	Jl. Cik Ditiro 29
7	SD Tumbuh	Jl. AM Sangaji 47
8	Pasar Beringharjo	Jl. Pabringan 1
9	SMP Negeri 5 Yogyakarta	Jl. Wardhani 5
10	Kompleks Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Jl. Hayam Wuruk 9-11
11	Taman Parkir Ngabean	Jl. Wakhid Hasyim 1-3
12	SD Negeri Sosrowijayan	Jl. Sosrowijayan 21
13	SMP Negeri 2	Jl. P. Senopati 28

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN UTANG PFK
Per 31 Desember 2020

(dalam Rp)

No.	Uraian	Hutang PFK 2019	Penerimaan Tahun 2020	Penyetoran Tahun 2020	Hutang PFK 2020
1	Pajak Th 2017				-
2	PFK 10%		41.926.222.756,00	41.926.222.756,00	-
3	Taperum		333.861.000,00	333.861.000,00	-
4	PPh 21 Gaji		1.316.520.097,00	1.316.520.097,00	-
5	PPN		26.555.372.138,27	26.555.372.138,27	-
6	PPh 21 Non Gaji		27.737.022.789,00	27.737.022.789,00	-
7	PPh 22		1.378.233.064,18	1.378.233.064,18	-
8	PPh 23		1.188.776.174,27	1.188.776.174,27	-
9	PPh Pasal 4 (2)		3.205.941.547,00	3.205.941.547,00	-
	Jumlah	-	103.641.949.565,72	103.641.949.565,72	-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2019	Jumlah Pendapatan 2020	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2021	2022 dst
1	Yayasan Pendidikan, Dakwah dan Sosial Al- Khairat Kota Yogyakarta	Sewa tanah dan bangunan gedung eks SDN Kotagede II untuk SD Islam Terpadu (SD-IT) Al- Khairat	003/641/PS.4/X/2016	24 Oktober 2016	6.112.000,00	24 bulan	22 Oktober 2018	22 Oktober 2016	3.056.000,00	18 Oktober 2016	6.112.000,00	6.112.000,00	-	-	-
		Sewa tanah dan bangunan gedung eks SDN Kotagede II untuk SD Islam Terpadu (SD-IT) Al- Khairat	002/641/R.PS.6/X/2020	22 Oktober 2020	13.200.000,00	24 bulan	21 Oktober 2022	21 Oktober 2022	13.200.000,00	19 Oktober 2020	13.200.000,00	-	1.100.000,00	6.600.000,00	5.500.000,00
2	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Sewa tanah dan bangunan eks SDN Gowongan, eks SDN Ledoksari, Eks SDN Keputran XII dan eks SDN Nitikan III untuk dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah	002/641/PS.4/X/2016	10 Oktober 2016	16.898.000,00	24 bulan	10 Oktober 2018	08 Oktober 2016	8.449.000,00	10 Oktober 2016	16.898.000,00	16.898.000,00	-	-	-
			002/641/PS.5/X/2018 405/III.0/2018	10 Oktober 2018	22.296.000,00	24 bulan	18 Oktober 2020	18 Oktober 2018	22.296.000,00	17 Oktober 2018	22.296.000,00	13.006.000,00	9.290.000,00	-	-
			003/641/R.PS.6/X/2020 246/III.0/2020	19 Oktober 2020	42.816.000,00	24 bulan	18 Oktober 2022	18 Oktober 2020	42.816.000,00	12 Oktober 2020	42.816.000,00	-	3.568.000,00	21.408.000,00	17.840.000,00
3	Dharma Wanita Persatuan Kota YK	Sewa tanah dan bangunan gedung kantin di Komplek Balaikota Yogyakarta untuk kantin Dharma Wanita	004/641/PS.3/X/2016	27 Oktober 2016	30.584.000,00	24 bulan	27 Oktober 2018	25 Oktober 2016	7.646.000,00	26 Oktober 2016	7.646.000,00	30.584.000,00	-	-	-
			002/641/PS.5/IV/2020 001/PS/DWP/IV/2020	27 April 2020	47.500.000,00	12 Bulan	27 April 2021	27 April 2021	47.500.000,00	29 April 2020	47.500.000,00	-	31.666.666,67	15.833.333,33	-
4	Paguyuban Panca RW Gedongkuning	Sewa tanah dan bangunan di Jl. Semangu No. 12 Rejowinangun Yogyakarta untuk TK RK Gedongkuning	003/641/PS.1/X/2015	02 Oktober 2015	1.088.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015	1.088.000,00	05 Nopember 2015	1.088.000,00	1.088.000,00	-	-	-
			001/641/PS.2/IV/2018	05 April 2018	1.280.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2020	1.280.000,00	04 April 2018	1.280.000,00	1.120.000,00	160.000,00	-	-
			003/641/PS.3/XI/2020 003/SP-PKK/XI/2020	16 Nopember 2020	1.330.000,00	12 Bulan	15 Nopember 2021	15 Nopember 2021	1.330.000,00	14 Nopember 2020	1.330.000,00	-	110.833,33	1.219.166,67	-
5	Yayasan Samara Bunda	Sewa tanah dan bangunan gedung bekas SDN Karangasari II untuk SLB Samara Bunda	002/641/PS.4/X/2015	02/10/2015	2.464.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015	2.464.000,00	29 Oktober 2015	2.464.000,00	2.464.000,00	-	-	-
		Pembayaran Sewa Gedung Ex SDN Karangasari	001/641/PS.3/IX/2019 15/KPTS/TSB/IX/2019	09/09/2019	6.000.000,00	36 Bulan	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	6.000.000,00	09 September 2019	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-	-
		Pembayaran Sewa Gedung Ex SDN Karangasari	001/641/R.PS.4/X/2020 09/YSB/X/2020	05 Oktober 2020	4.500.000,00	24 bulan	04 Oktober 2022	04 Oktober 2022	4.500.000,00	16 September 2020	4.500.000,00	-	562.500,00	2.250.000,00	1.687.500,00

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2019	Jumlah Pendapatan 2020	Pendapatan Diterima Dimuka																														
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2021	2022 dst																													
6	Yayasan TK Buyung	Sewa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang terletak di Jl. Wiratama Tegalarjo Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai TK Buyung	004/641/PS.1/X/2015	02 Oktober 2015	2.624.000,00	24 bulan	01 Oktober 2017	31 Oktober 2015	1.312.000,00	29 Oktober 2015	1.312.000,00	2.624.000,00	-	-																														
			003/641/PS.2/IV/2018	05 April 2018	3.600.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2020	3.600.000,00	04 April 2018	3.600.000,00	3.150.000,00	450.000,00	-	-																													
			005/641/PS.3/XI/2020 005/SP-PKK/XI/2020	16 Nopember 2020	3.090.000,00	12 Bulan	15 Nopember 2021	15 Nopember 2021	3.090.000,00	04 Desember 2020	3.090.000,00	-	257.500,00	2.832.500,00	-	-																												
7	Yayasan TK PKK Cokrodingratan	Sewa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang terletak di Cokrodingratan JT II/130 Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai TK PKK Cokrodingratan	001/641/PS.1/X/2015	11 Oktober 2015	590.000,00	24 bulan	11 Oktober 2017	09 Oktober 2015	590.000,00	29 Oktober 2015	590.000,00	590.000,00	-	-																														
			001/641/PS.2/IV/2018	05 April 2018	626.000,00	24 bulan	05 April 2020	05 April 2018	626.000,00	04 April 2018	626.000,00	547.750,00	78.250,00	-	-																													
			002/641/PS.3/XI/2020 002/SP-PKK/XI/2020	16 Nopember 2020	595.000,00	12 Bulan	15 Nopember 2021	15 Nopember 2021	595.000,00	13 Nopember 2020	595.000,00	-	49.583,33	545.416,67	-	-																												
8	PD BPR Bank Jogja	Sewa sebagian ruangan pada Dinas Perijinan, Kec. GK, Kec. MI dan Kec. DN	002/641/PS.XII/2015	20 Desember 2015	258.108.328,00	60 bulan	20 Desember 2020	18 Desember 2015	58.108.328,00	14 Desember 2015	58.108.328,00	208.108.328,00	50.000.000,00	-	-																													
								10 Desember 2016	50.000.000,00	23 Desember 2016	50.000.000,00																																	
								10 Desember 2017	50.000.000,00	21 Desember 2017	50.000.000,00																																	
								10 Desember 2018	50.000.000,00	10 Desember 2018	50.000.000,00																																	
								10 Desember 2019	50.000.000,00	04 Desember 2019	50.000.000,00																																	
		Sewa Bangunan Gedung Milik Pemerintah (Eks Kecamatan Jetis)	001/641/PS.1/VII/2018 1093/101	20 Agustus 2018	462.200.000,00	60 Bulan	20 Agustus 2023	20 Agustus 2023	92.440.000,00	16 Agustus 2018	92.440.000,00	123.253.333,33	61.626.666,67	-	-																													
								10 Agustus 2019	92.440.000,00	22 Agustus 2019	92.440.000,00																																	
									92.440.000,00	10 Agustus 2020																																		
									92.440.000,00	10 Agustus 2021																																		
		Sewa Gedung Eks Kantor Kelurahan Patehan Kec Kraton		02 Januari 2020	6.750.000,00	24 Bulan	02 Januari 2022	02 Januari 2022	6.750.000,00	11 Desember 2019	6.750.000,00	-	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-																												
Sewa sebagian ruangan pada Dinas Perijinan	009/641/PS.2/XII/2020 1132.3/10.1	21 Desember 2020	60.570.000,00	12 Bulan	20 Desember 2021	20 Desember 2021	60.570.000,00	18 Desember 2020	60.570.000,00	-	-	60.570.000,00	-	-																														
															Sewa sebagian ruangan pada Kecamatan Danurejan	006/641/PS.2/XII/2020 1132.4/10.1	21 Desember 2020	19.659.000,00	12 Bulan	20 Desember 2021	20 Desember 2021	19.659.000,00	18 Desember 2020	19.659.000,00	-	-	19.659.000,00	-	-															
																														Sewa sebagian ruangan pada Kecamatan Mantrijeron	008/641/PS.2/XII/2020 1132.1/10.1	21 Desember 2020	38.167.000,00	12 Bulan	20 Desember 2021	20 Desember 2021	38.167.000,00	18 Desember 2020	38.167.000,00	-	-	38.167.000,00	-	-
PT. BPD DIY	Sewa sebagian ruangan pada Dinas Perijinan	001/641/PS.1/X/2016	305.304.000,00	60 bulan	02 Oktober 2021	01 Oktober 2016	61.304.000,00	28 September 2016	61.304.000,00	198.554.000,00	61.000.000,00	45.750.000,00	-	-																														
						30 September 2017	61.000.000,00	27 September 2017	61.000.000,00																																			
						30 September 2018	61.000.000,00	21 September 2018	61.000.000,00																																			
						30 September 2019	61.000.000,00	29 Oktober 2019	61.000.000,00																																			
						30 September 2020	61.000.000,00	30 September 2020	61.000.000,00																																			
Sewa Ruang ATM DPRD 5 tahun	002/641/PS.1/VII/2019 1489 A/OM 0005	29 Juli 2019	8.900.000,00	60 Bulan	29 Juli 2024	29 Juli 2024	8.900.000,00	26 Juli 2019	8.900.000,00	741.666,67	1.780.000,00	1.780.000,00	4.598.333,33																															
														Sewa Lahan ATM di Komplek Balai Kota	001/641/PS.1/IX/2020 135/OM004	01 September 2020	13.460.000,00	12 Bulan	31 Agustus 2021	01 September 2020	13.460.000,00	27 Agustus 2020	13.460.000,00	-	4.486.666,67	8.973.333,33	-																	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2019	Jumlah Pendapatan 2020	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2021	2022 dst
10	TK PWS Surokarsan	Sewa tanah dan bangunan gedung eks SD Inpres Surokarsan I utk TK Persatuan Wanita Surokarsan	005/641/PS.3/X/2015	02 Oktober 2015	4.020.800,00	24 bulan	01 Oktober 2017	30 September 2015 10 September 2016	2.010.400,00 2.010.400,00	29 Desember 2015 10 Oktober 2016	2.010.400,00 2.010.400,00	4.020.800,00		-	-
11	LPMK Kelurahan Sosromenduran	Sewa tanah dan bangunan Eks Kantor Kelurahan Sosromenduran untuk klinik Sosro Anugerah	006/641/PS.3/X/2015	02/10/2016	1.844.000,00	24 bulan	01 Oktober 2018	02 Oktober 2016	1.844.000,00	30 Oktober 2015	1.844.000,00	1.844.000,00		-	-
12	USEP Kota YK	Sewa tanah dan bangunan eks kelurahan Ngampilan	001/641/PS.II/2016 001/641/PS.II/2016	26/02/2016 27/02/2017	2.801.000,00 3.100.000,00	12 bulan 12 bulan	26 Februari 2017 27 Februari 2018	26 Februari 2016 10 September 2016 25 Februari 2017 11 September 2017	1.401.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00	25 Februari 2016 18 Agustus 2016 21 Februari 2017 21 Agustus 2017	1.401.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00	2.801.000,00 3.100.000,00		-	-
13	Dharma Wanita Dinas Pendidikan	Sewa sebagian bangunan Dinas Pendidikan untuk Kantin	001/641/PS.1/VII/2016	11/07/2016	63.465.000,00	60 bulan	11 Juli 2021	11 Juli 2016 01 Mei 2017 01 Mei 2018 01 Mei 2019 01 Mei 2020	12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00	20 Juni 2016 12 Mei 2017 19 April 2018 29 April 2019 04 Juli 2020	12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00 12.693.000,00	44.425.500,00	12.693.000,00	6.346.500,00	-
14	PT Hutchison 3 Indonesia	Sewa Rumija di wilayah Kota YK untuk pemasangan	620/684	02/08/2016	4.650.000,00	60 bulan	01 Agustus 2021	02 Agustus 2016	4.650.000,00	01 Agustus 2016	4.650.000,00	3.177.500,00	930.000,00	542.500,00	-
15	KPRI WIWARA	Sewa Gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.1/V/2016	31 Mei 2016	22.802.000,00	24 bulan	31 Mei 2018	29 Mei 2016 31 Januari 2017 31 Juli 2017 31 Desember 2017	6.837.000,00 5.965.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	03 Mei 2016 24 Januari 2017 24 Agustus 2017 21 Desember 2017	6.837.000,00 5.965.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	22.802.000,00		-	-
		Sewa Gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.2/VII/2019	12/07/2019	32.500.000,00	23 Bulan	21 April 2020	21 April 2020	32.500.000,00	11 Juli 2019	32.500.000,00	26.847.826,09	5.652.173,91	-	-
		Sewa Gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.2/IV/2020	21 April 2020	30.120.000,00	12 Bulan	21 April 2021	21 April 2020	30.120.000,00	27 April 2020	30.120.000,00	-	20.080.000,00	10.040.000,00	-
		Sewa Gedung KPRI WIWARA	001/641/PS.1/VI/2020	22 Juni 2020	18.000.000,00	12 Bulan	22 Juni 2021	22 Juni 2021	18.000.000,00	27 April 2020	2.380.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
		Sewa Gedung KPRI WIWARA	039/KPRI WIWARA/VI/2020							09 Juni 2020	15.620.000,00				
16	PT. ULUM TIRTA SEGARA (PIH)	Sewa Gedung dan Kolam PIH	130/004/II/2017	16 Februari 2016	102.000.000,00	24 bulan	16 Februari 2016	06 Februari 2017	102.000.000,00	13 Februari 2017	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	-
		Sewa Gedung dan Kolam PIH	011/13/PS/III/2019 001/P-1/MUM/III/2019	06/03/2019	153.000.000,00	36 bulan	06 Maret 2022	06 Maret 2019	153.000.000,00	05 Maret 2019	153.000.000,00	42.500.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	8.500.000,00
17	Dharma Wanita Dinas Pendidikan	Sewa tempat foto copy Dinas Pendidikan	005/641/PS.1/X/2016	17/10/2016	44.255.000,00	60 bulan	17 Oktober 2021	15 Oktober 2016 30 September 2017 30 September 2018 30 September 2019 30 September 2020	8.851.000,00 8.851.000,00 8.851.000,00 8.851.000,00 8.851.000,00	10 Oktober 2016 22 Desember 2017 15 Oktober 2018 30 Desember 2019	8.851.000,00 8.851.000,00 8.851.000,00 8.851.000,00	28.028.166,67	7.375.833,33	-	-
18	Kantor Pos	Sewa sebagian ruang di Dinas Sosial	8540/Umum/Sarana/0916	01/08/2016	18.143.000,00	24 bulan	31 Juli 2018			01 Desember 2016	10.143.000,00	18.143.000,00			
		Sewa Ruang LE Pemkot selama 1 tahun	003/641/PS.3/VIII/2019 8275/umum/sarana/6/0718	31/07/2019	15.846.300,00	12 Bulan	01 Agustus 2020	30 Juni 2017 01 Agustus 2020	4.000.000,00 15.846.300,00	20 Juni 2017 18 Januari 2018 29 Juli 2019	4.000.000,00 4.000.000,00 15.846.300,00	6.602.625,00	9.243.675,00	-	-
		Sewa Ruang untuk Kantor POS			14.300.000,00	12 Bulan	01 Agustus 2021	01 Agustus 2021	14.300.000,00	26 September 2020	14.300.000,00	-	5.958.333,33	8.341.666,67	-
19	Kantor Arpusda	Sewa lahan untuk usaha makanan dan minuman	02/MOU/KAPD/2016	7 Maret 2016	16.000.000,00	34 bulan	31 Desember 2018	5 Maret 2016	16.000.000,00	4 Maret 2016	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
 Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2019	Jumlah Pendapatan 2020	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2021	2022 dst
20	PT. Media Sarana Akses	Sewa Rumaja di wilayah Kota Yk untuk pemasangan Jaringan Telekomunikasi	620/887	14/10/2016	348.609.965,00	60 bulan	13 Oktober 2021	14 Oktober 2016	348.609.965,00	14 Oktober 2016	348.609.965,00	226.596.477,25	69.721.993,00	52.291.494,75	-
21	PT Telkom (Persero) Tbk Indonesia Diva Area Yk	Sewa gedung untuk penempatan perangkat telkom	119/1768	18/05/2017	5.810.000,00	60 bulan	17 Mei 2022	16 Mei 2017	5.810.000,00	16 Mei 2017	5.810.000,00	3.001.833,33	1.162.000,00	1.162.000,00	484.166,67
22	PT Telkom (Persero) Tbk Indonesia Diva Area	Sewa Gedung di SD Petinggen untuk penempatan perangkat Telkom	555/3097	01/08/2017	13.470.000,00	60 bulan	31 Juli 2022	30 Juli 2017	13.470.000,00	09 Agustus 2017	13.470.000,00	6.510.500,00	2.694.000,00	2.694.000,00	1.571.500,00
23	YPDS Al Khairaat	Sewa Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Kota	003/641/PS.5/X/2018 020/YPDS/X/2018	22 Oktober 2018	8.834.000,00	24 Bulan	22 Oktober 2020	22 Oktober 2018	8.834.000,00	19 Oktober 2018	8.834.000,00	5.153.166,67	3.680.833,33	-	-
24	TK PWS Surokarsan	Sewa Bangunan Gedung Jl. Suparman no.519	004/641/PS.4/IX/2018 425/24	6 September 2018	5.754.000,00	24 Bulan	6 September 2020	6 September 2020	5.754.000,00	12 November 2018	5.754.000,00	3.836.000,00	1.918.000,00	-	-
			004/641/PS.4/XI/2020 004/SP-PKK/XI/2020	16 November 2020	4.870.000,00	12 bulan	15 November 2021	15 November 2021	4.870.000,00	11 November 2020	4.870.000,00	-	405.833,33	4.464.166,67	-
25	Pemilik Usaha Angkringan	Sewa Gedung Milik Pemerintah Kota Yk II	002/641/PS.1/XI/2018	19 November 2018	20.400.000,00	36 Bulan	01 Januari 2021	31 Desember 2021	20.400.000,00	14 November 2018	20.400.000,00	7.366.666,67	6.800.000,00	6.233.333,33	-
26	Pemilik Usaha Angkringan	Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Yk (Jl. Mayjen Sutopo no. 32) Gedung Dinas	001/641/PS.1/XI/2018	19 November 2018	18.750.000,00	36 Bulan	19 November 2021	19 November 2021	18.750.000,00	16 November 2018	18.750.000,00	6.770.833,33	6.250.000,00	5.729.166,67	-
27	LPMK Kelurahan Sosromenduran	Sewa Tanah dan Bangunan Eks Kantor Kelurahan	001/641/PS.4/XII/2018 005/EX/SMD/XII/2018	14 Desember 2018	9.300.000,00	60 Bulan	14 Desember 2023	14 Desember 2023	9.300.000,00	13 Desember 2018	9.300.000,00	2.015.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	3.565.000,00
28	Telekonsel Microcell	Sewa Lahan untuk menara Telekonsel Microcell	555/01/UH/III/2019	29 Maret 2019	1.254.000,00	36 Bulan	29 Maret 2022	29 Maret 2019	1.254.000,00	29 Maret 2019	1.254.000,00	313.500,00	418.000,00	418.000,00	104.500,00
29	Borobudur Fiber Indonesia	Sewa Lahan untuk menara Telekonsel Microcell	620/1083	04/04/2019	13.822.488,00	36 Bulan	04 April 2022	04 April 2022	13.822.488,00	29 Maret 2019	13.822.488,00	3.455.622,00	4.607.496,00	4.607.496,00	1.151.874,00
		Sewa Lahan untuk menara Telekonsel Microcell	602/1178	08/04/2019	6.996.900,00	36 Bulan	08 April 2022	08 April 2019	6.996.900,00	05 April 2019	6.996.900,00	1.749.225,00	2.332.300,00	2.332.300,00	583.075,00
30	PT KOMET INFRA NUSANTARA	Sewa untuk Telekomunikasi	621/3135	24/09/2019	130.399.640,00	36 Bulan	24 September 2022	24 September 2022	130.399.640,00	02 September 2019	130.399.640,00	32.599.910,00	130.399.640,00	130.399.640,00	97.799.730,00
		Sewa untuk Telekomunikasi	621/3135	24/09/2019	391.198.920,00	36 Bulan	13 Mei 2022	13 Mei 2022	153.363.084,00	23 September 2019	260.799.282,00	34.080.685,33	51.121.028,00	51.121.028,00	17.040.342,67
		Sewa untuk Telekomunikasi	620/1485	13/05/2019	153.363.084,00	36 Bulan	13 Mei 2022	13 Mei 2022	153.363.084,00	02 Mei 2019	153.363.084,00	34.080.685,33	51.121.028,00	51.121.028,00	17.040.342,67
31	PT TOWER BERSAMA	Setoran dari PT Tower Bersama Kec UH	555/02/UH/VI/2019	18/06/2019	1.949.000,00	48 Bulan	17 Juni 2023	17 Juni 2023	1.949.000,00	15 Mei 2019	1.949.000,00	243.625,00	487.250,00	487.250,00	730.875,00
		Setoran dari PT Tower Bersama Kec WB			1.949.000,00				1.949.000,00	15 Mei 2019	1.949.000,00		1.949.000,00		
		Setoran dari PT Tower Bersama Kec MG			2.508.000,00				2.508.000,00	15 Mei 2019	2.508.000,00		2.508.000,00		
		Setoran dari PT Tower Bersama DLH			19.470.000,00				19.470.000,00	15 Mei 2019	19.470.000,00		19.470.000,00		
		Setoran dari PT Tower Bersama Dindik			2.247.750,00				2.247.750,00	15 Mei 2019	2.247.750,00		2.247.750,00		
		Setoran dari PT Tower Bersama DPUPKP	620/3414	15 Oktober 2019	42.324.356,00	12 Bulan	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	42.324.356,00	08 Juli 2019	42.324.356,00	10.581.089,00	31.743.267,00		
		Setoran dari PT Tower Bersama Untuk Menara Telekomunikasi	TBG-TBE-00993/PDI/04/XI/2020	17 November 2020	343.890.000,00	36 Bulan	15 Oktober 2023	15 Oktober 2023	343.890.000,00	16 November 2020	343.890.000,00	-	28.657.500,00	114.630.000,00	200.602.500,00
32	PT SARANA INSAN MUDA SELARAS	Sewa Ases untuk Pergelaran Fiber Optik 1 tahun	620/2585	12/08/2019	157.395.000,00	12 Bulan	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	157.395.000,00	06 Agustus 2019	157.395.000,00	65.581.250,00	91.813.750,00	-	-
33	PT PRADIPTA BHUMI KONSTRUKSI	Sewa Lahan untuk Direksi dan Barak Pekerja di Ex terminal Terban C Pekerjaan Pedestrian Jl J Sudirman	001/641/PS.1/VIII/2019 001/PBK-Pemkot/Sudirman/VIII/19	07/08/2019	13.750.000,00	5 Bulan	06 Januari 2020	06 Januari 2020	13.750.000,00	07 Agustus 2019	13.750.000,00	13.750.000,00	-	-	-
34	PT BERLIAN PROMOSINDO	Setoran Sewa Reklame Jalan C Simanjuntak simpang 4 Mirotro Kampus 2	001/641/PS.1/III/2020 001/PKS/BP-Pemkot.Yk/Sw.AST/III/2020	03 Maret 2020	19.938.000,00	24 bulan	03 Maret 2022	03 Maret 2020	19.938.000,00	19 Februari 2020	19.938.000,00	-	8.307.500,00	9.969.000,00	1.661.500,00
35	BIT TEKNOLOGI NUSANTARA	Sewa Rumaja untuk Jaringan Fiber Optik	621/2125 209/PKS/BIT-PU/2020	13 Agustus 2020	55.545.000,00	12 Bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	55.545.000,00	11 Agustus 2020	55.545.000,00	-	23.143.750,00	32.401.250,00	-
36	PT SARI GUNUNG MATARAM SAKTI	Sewa Lahan Exs Terminal Terban untuk Direksi Kit	02/641/PS.1/IX/2020 01/SP/SGMS/IX/2020	20 September 2020	24.000.000,00	100 Hari	31 Desember 2020	31 Desember 2020	24.000.000,00	21 September 2020	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-
37	TK MEKAR KUSUMA	Sewa Tanah dan Bangunan untuk TK PKK Mekar Kusuma Yogyakarta	001/641/PS.1/XI/2020 001/SP-PKK/XI/2020	16 November 2020	1.290.000,00	12 Bulan	15 November 2021	15 November 2021	1.290.000,00	13 November 2020	1.290.000,00	-	107.500,00	1.182.500,00	-
38	Taman Pintar	Sewa Kios buku									3.073.250.000,00	2.170.145.833,00	161.750.000,00	161.750.000,00	579.604.167,00

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
 Per 31 Desember 2020

No.	Pihak Ketiga (Penyewa)	Lingkup Perjanjian	Perjanjian			Jangka Waktu	Berakhir	Tatakala		Realisasi		Jumlah Pendapatan s.d 2019	Jumlah Pendapatan 2020	Pendapatan Diterima Dimuka	
			No.	Tanggal	Nilai (Rp)			Tgl Jatuh Tempo	Nominal	Tgl Setor	Nominal			2021	2022 dst
39	Taman Pintar	Sewa Foodcourt									1.190.458.333,01	1.002.541.666,34	171.291.666,67	16.625.000,00	-
40	Kec. MG	Pendapatan Makam									110.734.999,67	50.365.000,00	31.565.416,67	19.222.916,33	9.581.666,67
41	Kec. TR	Pendapatan Makam									172.745.000,00	113.898.750,00	33.715.000,00	14.411.250,00	10.720.000,00
42	Kec. MJ	Pendapatan Makam									68.970.000,00	34.310.000,00	17.229.583,33	9.164.166,67	8.266.250,00
43	Kec. WB	Pendapatan Makam									204.535.000,00	133.592.916,67	31.217.083,33	21.380.000,00	18.345.000,00
44	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM	006/PKS/UPT.PB/2019	1 April 2019	41.600.000,00	1 Tahun	31 Maret 2020	31 Maret 2020	41.600.000,00	22 Mei 2019	41.600.000,00	31.200.000,00	10.400.000,00	-	-
		Media Promosi Neon Box	006/PKS/UPT.PB/2019	1 April 2019	1.095.000,00	365 Hari	31 Maret 2020	31 Maret 2020	1.095.000,00	22 Mei 2019	1.095.000,00	825.000,00	270.000,00	-	-
45	Bank MEGA	Sewa Lahan ATM	009/MOU/UPT.PB/2019	12 Juli 2019	25.725.000,00	1 Tahun	11 Juli 2020	11 Juli 2020	25.725.000,00	19 September 2019	25.725.000,00	12.862.500,00	12.862.500,00	-	-
		Media Promosi Neon Box	009/MOU/UPT.PB/2019	12 Juli 2019	1.095.000,00	365 Hari	11 Juli 2020	11 Juli 2020	1.095.000,00	19 September 2019	1.095.000,00	519.000,00	576.000,00	-	-
46	BRI	Sewa Lahan ATM	003/PKS/UPT.PB/2018	11 April 2018	25.700.000,00	1 Tahun	31 Maret 2020	31 Maret 2020	25.700.000,00	8 April 2019	25.700.000,00	19.275.000,00	6.425.000,00	-	-
		Media Promosi Neon Box	003/PKS/UPT.PB/2018	11 April 2018	1.095.000,00	365 Hari	31 Maret 2020	31 Maret 2020	1.095.000,00	8 April 2019	1.095.000,00	825.000,00	270.000,00	-	-
47	BNI	Sewa Lahan ATM	10/PKS/UPT.PB/2018 (Adendum)	29 Agustus 2018	77.100.000,00	3 Tahun	31 Mei 2021	31 Mei 2021	77.100.000,00	29 Mei 2019	25.700.000,00	40.691.667,00	25.700.000,00	10.708.333,00	-
		Media Promosi Neon Box	10/PKS/UPT.PB/2018 (Adendum)	29 Agustus 2018	3.285.000,00	1095 Hari	31 Mei 2021	31 Mei 2021	3.285.000,00	29 Mei 2019	1.095.000,00	1.737.000,00	1.095.000,00	453.000,00	-
48	BPD Cabang Senopati	Media Promosi Videotron	007/MOU/UPT.PB/2019	13 Mei 2019	29.376.000,00	357 Hari	13 Mei 2020	13 Mei 2020	29.376.000,00	15 Mei 2019	29.376.000,00	18.360.000,00	11.016.000,00	-	-
49	BRI	Media Promosi Videotron	008/MOU/UPT.PB/2019	22 Mei 2019	30.024.000,00	365 Hari	21 Mei 2020	21 Mei 2020	30.024.000,00	18 Juli 2019	30.024.000,00	18.360.000,00	11.664.000,00	-	-
50	PT. Dhompert Karya Anak Bangsa (GO PAY)	Media Promosi Gambar Mural	010/MOU/UPT.PB/2019	30 Agustus 2019	9.582.000,00	365 Hari	30 Agustus 2020	30 Agustus 2020	9.582.000,00	15 Nopember 2019	9.582.000,00	3.202.500,00	6.379.500,00	-	-
51	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM	011/PKS/UPT.PB/2019	31 Oktober 2019	12.600.000,00	1 Tahun	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020	12.600.000,00	5 Desember 2019	12.600.000,00	2.100.000,00	10.500.000,00	-	-
		Media Promosi Billboard	011/PKS/UPT.PB/2019	31 Oktober 2019	1.095.000,00	365 Hari	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020	1.095.000,00	5 Desember 2019	1.095.000,00	183.000,00	912.000,00	-	-
52	CV. JAVADEKA MANDIRI	Sewa Lahan Shelter	013/MOU/UPT.PB/2019	11 Desember 2019	54.750.000,00	365 Hari	14 Desember 2020	14 Desember 2020	54.750.000,00	13 Desember 2019	54.750.000,00	2.400.000,00	52.350.000,00	-	-
		Sewa Lahan Totem	013/MOU/UPT.PB/2019	11 Desember 2019	5.475.000,00	365 Hari	14 Desember 2020	14 Desember 2020	5.475.000,00	13 Desember 2019	5.475.000,00	240.000,00	5.235.000,00	-	-
		Mobile Selling	013/MOU/UPT.PB/2019	11 Desember 2019	300.000,00	6 Hari	14 Desember 2020	14 Desember 2020	300.000,00	13 Desember 2019	300.000,00	-	300.000,00	-	-
		Servis Charge	013/MOU/UPT.PB/2019	11 Desember 2019	480.000,00	12 Bulan	14 Desember 2020	14 Desember 2020	480.000,00	13 Desember 2019	480.000,00	20.000,00	460.000,00	-	-
		Listrik	013/MOU/UPT.PB/2019	11 Desember 2019	600.000,00	12 Bulan	14 Desember 2020	14 Desember 2020	600.000,00	13 Desember 2019	600.000,00	25.000,00	575.000,00	-	-
53	BIAS PROMOSINDO	Media Promosi Sapnduk	003/MOU/UPT.PB/1/2020	2 Januari 2020	32.940.000,00	366 Hari	31 Desember 2020	31 Desember 2020	32.940.000,00	2 Februari 2020	32.940.000,00	-	32.940.000,00	-	-
54	BRI	Sewa Lahan ATM	016/MOU/UPT.PB/2020	11 April 2018	25.700.000,00	1 Tahun	31 Maret 2021	31 Maret 2021	25.700.000,00	18 Maret 2020	25.700.000,00	-	19.275.000,00	6.425.000,00	-
		Media Promosi Neon Box	016/MOU/UPT.PB/2020	11 April 2018	1.095.000,00	365 Hari	31 Maret 2021	31 Maret 2021	1.095.000,00	18 Maret 2020	1.095.000,00	-	825.000,00	270.000,00	-
55	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM	004/MOU/UPT.PB/III/2020	1 April 2019	41.600.000,00	1 Tahun	31 Maret 2021	31 Maret 2021	41.600.000,00	29 April 2020	41.600.000,00	-	31.200.000,00	10.400.000,00	-
		Media Promosi Neon Box	004/MOU/UPT.PB/III/2020	1 April 2019	1.095.000,00	365 Hari	31 Maret 2021	31 Maret 2021	1.095.000,00	29 April 2020	1.095.000,00	-	825.000,00	270.000,00	-
56	LINK AJA	Media Promosi Hanging Banner	01/MOU/UPT.PB/I/2020	1 Januari 2020	13.500.000,00	300 Hari	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020	13.500.000,00	14 Agustus 2020	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-	-
		Media Promosi Neon Box	01/MOU/UPT.PB/I/2020	1 Januari 2020	3.000.000,00	300 Hari	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020	3.000.000,00	14 Agustus 2020	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
57	Bank MEGA	Sewa Lahan ATM	005/MOU/UPT.PB/VII/2020	12 Juli 2020	25.725.000,00	1 Tahun	11 Juli 2021	11 Juli 2021	25.725.000,00	16 Oktober 2020	25.725.000,00	-	12.862.500,00	12.862.500,00	-
		Media Promosi Neon Box	005/MOU/UPT.PB/VII/2020	12 Juli 2020	931.000,00	365 Hari	11 Juli 2021	11 Juli 2021	931.000,00	16 Oktober 2020	931.000,00	-	441.150,00	489.850,00	-
58	LINK AJA	Media Promosi Hanging Banner	012/MOU/UPT.PB/X/2020	1 Januari 2020	11.835.000,00	263 Hari	16 Juli 2021	16 Juli 2021	11.835.000,00	19 Nopember 2020	11.835.000,00	-	2.970.000,00	8.865.000,00	-
		Media Promosi Neon Box	012/MOU/UPT.PB/X/2020	1 Januari 2020	2.630.000,00	263 Hari	16 Juli 2021	16 Juli 2021	2.630.000,00	19 Nopember 2020	2.630.000,00	-	660.000,00	1.970.000,00	-
59	Bank MANDIRI	Sewa Lahan ATM	014/MOU/UPT.PB/X/2020	30 Oktober 2020	12.600.000,00	1 Tahun	31 Oktober 2021	31 Oktober 2021	12.600.000,00	27 Nopember 2020	12.600.000,00	-	2.100.000,00	10.500.000,00	-
		Media Promosi Billboard	014/MOU/UPT.PB/X/2020	30 Oktober 2020	1.095.000,00	365 Hari	31 Oktober 2021	31 Oktober 2021	1.095.000,00	27 Nopember 2020	1.095.000,00	-	183.000,00	912.000,00	-
60	BRI	Media Promosi Videotron	016/MOU/UPT.PB/2020	7 Desember 2020	30.024.000,00	365 Hari	6 Desember 2021	6 Desember 2021	30.024.000,00	22 Desember 2020	30.024.000,00	-	2.016.000,00	28.008.000,00	-
61	BPD DIY	Sewa Sebagian Ruangan pada Gedung Rumah Sakit Pratama Yogyakarta untuk Digunakan Sebagai Kantor Kas BPD DIY	001/641/PS.I/VIII/2018 & 1857.1/OM.0005	21 Agustus 2018	71.400.000,00	3 tahun	21 Agustus 2021	17 Agustus 2018	71.400.000,00	15 Agustus 2018	71.400.000,00	31.733.333,33	23.800.000,00	15.866.666,67	-
62	BPD DIY	Sewa Lahan Pada Rumah Sakit Pratama untuk Penempatan Anjungan Tunai Mandiri	002/641/PS.I/VIII/2018 & 1858.1/OM.0005	21 Agustus 2018	19.800.000,00	3 tahun	21 Agustus 2021	17 Agustus 2018	19.800.000,00	15 Agustus 2018	19.800.000,00	8.800.000,00	6.600.000,00	4.400.000,00	-
		Jumlah			4.421.502.531				3.981.807.611		8.772.035.225,68	5.084.471.045,67	1.635.091.472,92	1.116.124.724,75	989.937.980,34

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UTANG BELANJA
Per 31 Desember 2020

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Listrik	682.121.953,00	516.409.837,00	682.121.953,00	516.409.837,00
2	Utang Telepon	8.179.736,00	8.342.306,00	8.179.736,00	8.342.306,00
3	Utang Air (PDAM)	3.879.992,00	5.876.513,00	3.879.992,00	5.876.513,00
4	Utang Belanja Barang	1.930.320.847,00	52.898.020,00	1.930.320.847,00	52.898.020,00
5	Utang Belanja Modal	48.162.000,00	-	48.162.000,00	-
6	Utang Belanja Pegawai	3.624.591.532,00	3.757.898.203,00	3.624.591.532,00	3.757.898.203,00
7	Utang Belanja lainnya	217.880.927,00	13.000.000,00	217.880.927,00	13.000.000,00
				-	
	Jumlah	6.515.136.987,00	4.354.424.879,00	6.515.136.987,00	4.354.424.879,00

NO	INSTANSI	Hutang Listrik	Hutang Telepon	Hutang Air	Hutang Blj Barang Jasa Lainnya	Hutang Blj Modal	Hutang Belanja Pegawai	Hutang Blj Lainnya	JUMLAH
40	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
41	A. TAPEM	-	-	-	-	-	-	-	-
42	B. HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-
43	C. PROTOKOL	-	-	-	-	-	-	-	-
44	D. UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
45	E. P3ADK	-	-	-	-	-	-	-	-
46	F. DALBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
47	G. ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-
48	H. BLP	-	-	-	-	-	-	-	-
49	DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
50	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-
51	BKPP	-	-	-	-	-	-	-	-
52	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
53	BPKAD	328.667.263,00	2.082.535,00	-	-	-	-	-	330.749.798,00
	JUMLAH	516.409.837,00	8.342.306,00	5.876.513,00	52.898.020,00	-	3.757.898.203,00	13.000.000,00	4.354.424.879,00